

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2009 APBN. Pendapatan Negara. Belanja Negara. Belanja Pemerintah. DAU. Pertanggungjawaban. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN

www.peraturan.go.id

Tahun Anggaran 2006 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;

d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 21/DPD/2008 tanggal 6 Maret 2008;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4571), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2006;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2006; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1) Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp637.987.136.507.056 (enam ratus tiga puluh tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima puluh enam rupiah) dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp667.128.813.065.242 (enam ratus enam puluh tujuh triliun seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), sehingga terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp29.141.676.558.186 (dua puluh sembilan triliun seratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan atas Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp29.415.590.251.868 (dua puluh sembilan triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp273.913.693.682 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

(3) Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang berasal dari SAL

www.peraturan.go.id

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005, yakni sebesar Rp17.066.126.565.213 (tujuh belas triliun enam puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah) ditambah dengan SILPA Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp273.913.693.682 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan ditambah koreksi terhadap selisih lebih kas sebesar Rp1.490.262.050.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

(4) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 menggambarkan jumlah Aset sebesar Rp1.222.317.442.204.837 (seribu dua ratus dua puluh dua triliun tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Kewajiban sebesar Rp1.326.715.685.444.331 (seribu tiga ratus dua puluh enam triliun tujuh ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga Ekuitas Dana menjadi sebesar minus Rp104.398.243.239.494 (seratus empat triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2006 menggambarkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp26.111.116.187.908 (dua puluh enam triliun seratus sebelas miliar seratus enam belas juta seratus delapan tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp55.252.792.746.094 (lima puluh lima triliun dua ratus lima

www.peraturan.go.id

puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah), arus kas bersih dari aktivitas investasi pembiayaan sebesar Rp29.415.590.251.868 (dua puluh sembilan triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar minus Rp3.218.045.953.463 (tiga triliun dua ratus delapan belas miliar empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan dan/atau daftar terinci dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Pasal 8

Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan dan terdapat pengembalian pendapatan tahun yang lalu, maka SAL dapat digunakan.

Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini tidak menyatakan pendapat.

Pasal 10

Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2006

(Audited)

www.peraturan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2006 yang berstatus telah diperiksa (*audited*). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2006, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut ketentuan undang-undang, sebelum LKPP disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehubungan dengan itu, pada tanggal 28 Maret 2007, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2006 untuk diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini "tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*)" atas LKPP Tahun 2006. Walaupun masih mendapat opini *disclaimer*, LKPP Tahun 2006 menunjukkan beberapa peningkatan kualitas, antara lain penyelenggaraan akuntansi oleh kementerian negara/lembaga yang semakin meningkat, pengungkapan (*disclosure*) yang lebih ekstensif, dan data aset Pemerintah yang lebih baik karena adanya inventarisasi aset pada beberapa kementerian negara/lembaga.

LKPP Tahun 2006 (*Audited*) ini merupakan laporan keuangan pertama yang memenuhi pelaksanaan ketentuan undang-undang di bidang Keuangan Negara secara penuh, termasuk batas waktu penyampaian laporan, yaitu harus disampaikan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan LKPP Tahun 2006 (*Audited*) ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. LKPP Tahun 2006 (*Audited*) ini disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh entitas pelaporan (kementerian negara/lembaga/Bendahara Umum Negara) dan entitas lainnya yang telah dikoreksi atau disesuaikan, baik karena hal-hal yang terlambat dilaporkan maupun karena hasil pemeriksaan BPK. Data dalam LKPP ini termasuk data laporan keuangan 23 kementerian negara/lembaga yang baru selesai diperiksa oleh BPK per 18 Juni 2007.
2. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2006 adalah sebesar Rp637,99 triliun, atau 96,79 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp667,13 triliun, atau 95,43 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006. Realisasi Defisit Anggaran adalah sebesar Rp29,14 triliun. Namun, Laporan Realisasi APBN Tahun 2006 ini masih menunjukkan suspen pada sisi Belanja Negara sebesar Rp916,77 miliar. Suspen tersebut terjadi karena masih terdapat sebagian realisasi anggaran yang belum dilaporkan oleh beberapa satuan kerja kementerian negara/lembaga, atau karena terjadi kesalahan/kekeliruan akuntansi.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp1.222,32 triliun dan Kewajiban sebesar Rp1.326,72 triliun, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 adalah sebesar minus Rp104,40 triliun.

www.peraturan.go.id

4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa kenaikan Kas Negara selama TA 2006 adalah sebesar Rp3,49 triliun.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. CaLK meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Namun, sebagaimana halnya dengan lembar muka LKPP yang masih memerlukan penyesuaian, pengungkapan pada CaLK ini akan diperbaiki dan diperluas sehingga lebih andal dan lebih transparan.

Pemerintah menyadari bahwa LKPP Tahun 2006 (*Audited*) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) LKPP ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

www.peraturan.go.id

INDEKS ISI

KATA PENGANTAR iii
INDEKS ISI v
INDEKS TABEL vi
INDEKS GRAFIK vii
INDEKS DAFTAR viii
INDEKS SINGKATAN x
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN xv
RINGKASAN 1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 4
I. LAPORAN REALISASI APBN 5
II. NERACA 7
III. LAPORAN ARUS KAS 9
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11
A. PENJELASAN UMUM 11
A.1. DASAR HUKUM 11
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 12
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 39
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 42
A.5. LAPORAN KINERJA 49
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 51
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 51
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 53
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 72
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 76
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 76
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 77
C.3. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 108
C.4. CATATAN PENTING LAINNYA 110
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 118
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 118
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 119
DAFTAR 137

www.peraturan.go.id

INDEKS TABEL

1.	Asumsi Dasar APBN TA 2004 - 2006	20
2.	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2006 dan 2005	20
3.	Dampak APBN 2006 terhadap Perekonomian Agregat	36
4.	Persentase Anggaran dan Realisasi APBN TA 2006 terhadap PDB	37
5.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2006 dan 2005	38
6.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2006 dan 2005	60
7.	Uang Muka dari Rekening BUN	74
8.	Aset Tetap per 31 Desember 2006	90
9.	Aset Lainnya per 31 Desember 2006	92
10.	Bagian Lancar Utang Luar Negeri per Jenis Utang	97
11.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri per Jenis Obligasi	97
12.	Utang Bunga Luar Negeri	98
13.	Utang Bunga Obligasi	98
14.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi	99
15.	Utang Luar Negeri Jangka Panjang Perbankan per Jenis Utang	101
16.	Posisi Utang Luar Negeri dan SUN	103
17.	Saldo Anggaran Lebih TA 2006 dan TA 2005	104
18.	Ringkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2006	384
19.	Penerbitan SUN Berdenominasi Valas Tahun 2006	388
20.	SUN Jatuh Tempo Tahun 2006	389
21.	Indikator Risiko dan Portofolio SUN 2005 – 2006	392
22.	Hasil Restrukturisasi SU-002 dan SU-004	394
23.	Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara	395
24.	Komposisi Kepemilikan Obligasi Negara	396

www.peraturan.go.id

INDEKS GRAFIK

1. a. Struktur PDB Tahun 2006 13
   b. Struktur PDB Tahun 2005 14
2. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia selama Triwulan II 2005 - Triwulan III 2006 14
3. Perkembangan Ekspor Impor Indonesia November 2005 - Desember 2006 15
4. Perkembangan Laju Inflasi Nasional Triwulan I 2005 - Triwulan IV 2006 16
5. Perkembangan Tingkat Diskonto SBI Triwulan I 2005 - Triwulan IV 2006 16
6. Perkembangan LDR Perbankan Nasional Tahun 2000 - Nopember 2006 18
7. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah TA 2004-2006 22
8. Rasio Penerimaan Perpajakan dan PNBP terhadap Pendapatan Negara TA 2005 dan 2006 24
9. Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2005 dan 2006 29
10. Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2005 dan 2006 30
11. Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan TA 2005 dan 2006 33
12. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2002-2006 51
13. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2002-2006 52
14. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2006 53
15. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2006 dan 2005 54
16. Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2006 56
17. Perbandingan Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2006 dan 2005 56
18. Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2006 58
19. Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 59
20. Komposisi Lima Terbesar Daerah Pengguna Anggaran Transfer untuk Daerah TA 2006 61
21. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2006 62
22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2006 66
23. Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2006 73
24. Struktur Pendapatan 13 Rumah Sakit BLU TA 2006 74
25. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Rumah Sakit BLU TA 2006 76
26. Struktur Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 76
27. Struktur Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 77
28. Struktur Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 dan 2005 91
29. Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya 103
30. Komposisi Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2006 dan 2005 110
31. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Rumah Sakit BLU per 31 Desember 2006 118
32. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas TA 2006 385
33. Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan 386
34. Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN 31 Desember 2006 391
35. Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Domestik 2002 - 2006 395
36. Rata-Rata Perdagangan Harian Obligasi Negara di Pasar Sekunder

www.peraturan.go.id

INDEKS DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2006 137
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran (BA) TA 2006 146
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi dan Subfungsi TA 2006 166
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Bagian Anggaran Jenis Belanja TA 2006 171
5. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Satker yang Ditempatkan Dalam Rekening Khusus *Trust Fund* yang Dikelola BRR NAD-NIas 174
6. Laporan Realisasi Anggaran Transfer untuk Daerah TA 2006 176
7. Daftar Saldo Kas KPPN per 31 Desember 2006 300
8. Sado Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2006 306
9. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2006 308
10. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2006 310
11. Daftar Piutang Pajak per 31 Desember 2006 311
12. Piutang Pungutan Ekspor per 31 Desember 2006 314
13. Daftar Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2006 316
14. Bagian Lancar Tagihan TGR Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2006 317
15. Piutang Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 31 Desember 2006 318
16. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi 320
17. Daftar Persediaan per 31 Desember 2006 321
18. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDI, dan RPD per 31 Desember 2006 323
19. Rincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 31 Desember 2006 324
20. Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN 325
21. Penyertaan Modal Pemerintah pada Non BUMN (Minoritas) 329
22. Penyertaan Modal Pemerintah pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/ Regional 331
23. Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2006 332
24. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2006 343
25. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 31 Desember 2006 344
26. Saldo Rekening-Rekening Escrow 352
27. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2006 357
28. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2006 358
29. Ringkasan Aset Negara Ex-BPPN yang Dikelola PPA untuk Periode 1 Januari – 31 Desember 2006 359
30. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Koordinasi 360
31. Piutang Macet Kementerian Negara/Lembaga yang Penagihannya dialihkan Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 361
32. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri 362
33. Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri 363

www.peraturan.go.id

34. Utang Bunga Obligasi Negara 364
35. Obligasi Negara Jangka Panjang 366
36. Utang Luar Negeri Menurut Negara Kreditor 368
37. Penertiban Rekening pada Kementerian Negara/Lembaga 370
38. Penerimaan Kas dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan Non BUMN 378
39. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan SUN 382
40. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara 409
41. Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya 427
42. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU 432
43. Aset Eks Asing/Cina 436

www.peraturan.go.id

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BP MIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CAP	:	Cadangan Anggaran Pembangunan
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIPA-L	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Luncuran
DJPLN	:	Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EDI	:	*Electronic Data Exchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L		Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUTPA	:	Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	:	Laporan Arus Kas
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MAK	:	Mata Anggaran Pengeluaran
MAP	:	Mata Anggaran Penerimaan
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga

www.peraturan.go.id

PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMP	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Propenas	:	Program Pembangunan Nasional
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SABMKN	:	Sistem Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDA	:	Sumber Daya Alam
SIBOR	:	Singapore Interbank Offered Rate
SIKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SISPEN	:	Sistem Penerimaan Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SPPD	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan

www.peraturan.go.id

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

			Halaman
LAPORAN REALISASI APBN			
Pendapatan Negara dan Hibah			
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	53
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	53
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	53
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	54
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	55
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	55
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	56
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	57
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	57
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	58
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	59
Catatan	B.2.2.2	Transfer untuk Daerah	65
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	65
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	66
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	66
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	67
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	67
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	67
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	67
Catatan	B.2.2.3	Suspen	67
Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	Surplus (Defisit) Anggaran	68
Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	68
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri	68
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	70
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	70
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	70
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	70
Catatan	B.2.4.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	71
SILPA (SIKPA)			
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)	71
NERACA			
ASET			
		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di Bank Indonesia	77
Catatan	C.2.2	Rekening Kas di KPPN	77
Catatan	C.2.3	Rekening Pemerintah Lainnya di BI	78
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	78
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	78
Catatan	C.2.6	Kas Trust Fund	78
Catatan	C.2.7	Uang Muka dari Rekening BUN	79
Catatan	C.2.8	Piutang Pajak	79
Catatan	C.2.9	Piutang Bukan Pajak	80
Catatan	C.2.10	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	82
Catatan	C.2.11	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	83
Catatan	C.2.12	Belanja Dibayar Di Muka	83

www.peraturan.go.id

Catatan	C.2.13	Piutang Lain-lain	84
Catatan	C.2.14	Persediaan	85
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.15	Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	85
Catatan	C.2.16	Dana Bergulir	86
Catatan	C.2.17	Investasi Non Permanen Lainnya	87
Catatan	C.2.18	Investasi Permanen PMN	88
Catatan	C.2.19	Investasi Permanen Lainnya	89
Catatan	C.2.20	Aset Tetap	90
Catatan	C.2.21	Aset Lainnya	92
KEWAJIBAN			
		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.22	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	96
Catatan	C.2.23	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	96
Catatan	C.2.24	Utang Bunga	97
Catatan	C.2.25	Utang Kepada Pihak Ketiga	98
Catatan	C.2.26	Utang Jangka Pendek Lainnya	99
		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	C.2.27	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN	99
Catatan	C.2.28	Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT	100
Catatan	C.2.29	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	101
Catatan	C.2.30	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	101
Catatan	C.2.31	Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN	101
Catatan	C.2.32	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	102
EKUITAS			
		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.33	SAL	104
Catatan	C.2.34	SILPA (SIKPA)	104
Catatan	C.2.35	Dana Lancar Lainnya	105
Catatan	C.2.36	Cadangan Piutang	105
Catatan	C.2.37	Cadangan Persediaan	105
Catatan	C.2.38	Pendapatan yang Ditangguhkan	105
Catatan	C.2.39	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	105
		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.40	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	106
Catatan	C.2.41	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	106
Catatan	C.2.42	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	106
Catatan	C.2.43	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	107
LAPORAN ARUS KAS			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	119
Catatan	D.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	123
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	124
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	125
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	125
Catatan	D.2.6	Bunga Utang	126
Catatan	D.2.7	Subsidi	127
Catatan	D.2.8	Bantuan Sosial	127
Catatan	D.2.9	Belanja Lain-Lain	127
Catatan	D.2.10	Bagi Hasil Pajak	128
Catatan	D.2.11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	128
Catatan	D.2.12	Dana Alokasi Umum	129
Catatan	D.2.13	Dana Alokasi Khusus	129
Catatan	D.2.14	Dana Otonomi Khusus	129
Catatan	D.2.15	Dana Penyesuaian	129
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Catatan	D.2.16	Penjualan Aset Tetap	130
Catatan	D.2.17	Belanja Aset Tetap	130

www.peraturan.go.id

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.18	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	131
Catatan	D.2.19	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	132
Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	133
Catatan	D.2.21	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	133
Catatan	D.2.22	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	134
Catatan	D.2.23	Penyertaan Modal Negara	134
Catatan	D.2.24	RDI/RPD	134

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.25	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	135
Catatan	D.2.26	Transfer Antar Kantor	135
Catatan	D.2.27	Saldo Awal Kas	136
Catatan	D.2.28	Kas di Bendahara Pengeluaran	136
Catatan	D.2.29	Kas di Bendahara Penerimaan	136
Catatan	D.2.30	Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Indonesia	136
Catatan	D.2.31	Kas Trust Fund	136

www.peraturan.go.id

OPINI BPK

www.peraturan.go.id

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Yth. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yth. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Yth. Presiden Republik Indonesia

01 Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006, Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-138/MK.05/2007 tanggal 28 Maret 2007 telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2006 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Periode Tahun 2006 dan 2005, Neraca per 31 Desember 2006 dan 2005, Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2006 dan Tahun 2005, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Lingkup dan Tanggung Jawab

02 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.4. atas LKPP Tahun 2006, LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan basis kas, sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca disusun berdasarkan basis akrual.

Kebijakan Akuntansi

03 Dalam Laporan BPK Nomor 1 6/XII/07/2006 tanggal 18 Juni 2006, BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2005 karena adanya pembatasan dalam pemeriksaan penerimaan dan piutang pajak, kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut masih terjadi pada LKPP Tahun 2006 karena belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah seperti yang akan diuraikan pada paragraf nomor 04 sampai dengan 16.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2005

04 Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, BPK dapat memperoleh dokumen perpajakan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Untuk itu, BPK dengan Surat Nomor 59/ST/IV-XII. 1/03/2007 tanggal 2 Maret 2007 telah meminta izin kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan keterangan dan bukti tertulis mengenai perpajakan. Namun Menteri Keuangan belum memberikan izin sehingga BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai atas

Pembatasan Lingkup Pemeriksaan oleh Pemerintah

www.peraturan.go.id

penerimaan pajak tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp409,20 triliun dan Rp347,03 triliun serta piutang pajak per 31 Desember 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp35,45 triliun dan Rp29,22 triliun.

Selain itu, BPK juga tidak dapat melakukan pemeriksaan atas belanja modal pada Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Keuangan. Pembatasan tersebut disampaikan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-40/PJ.0144/2007 tanggal 19 April 2007 yang ditujukan kepada BPK.

Neraca Awal

05 Pemerintah mulai menyusun LKPP sejak tahun 2004 namun Pemerintah belum menetapkan neraca awal sehingga tidak memungkinkan BPK untuk meyakini kewajaran angka awal yang digunakan sebagai dasar saldo awal penyusunan LKPP.

Pemeriksaan Pengendalian Intern dan Kepatuhan

06 Sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2006, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengendalian Intern Nomor 66/XII/05/2007 tanggal 10 Mei 2007 mengungkapkan adanya permasalahan tertentu menyangkut desain dan implementasi pengendalian intern. Kelemahan pengendalian intern yang menyangkut kekurangan material dalam desain dan implementasi pengendalian intern, yang menurut pendapat BPK, dapat secara negatif mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan diungkapkan dalam paragraf nomor 07, 08, dan 10 sampai dengan 17.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 67/XII/05/2007 tanggal 10 Mei 2007 mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan diungkapkan dalam paragraf nomor 09.

Proses Penyusunan LKPP

07 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.3. atas LKPP Tahun 2006, LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait. Dalam pelaksanaannya, bagian tertentu dari LKPP yaitu rekening pemerintah lainnya, investasi, aset lainnya, utang, realisasi pendapatan negara, realisasi penerimaan hibah dan pembiayaan, dan laporan arus kas tidak didasarkan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak

08 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan B.2.1.1 dan B.2.1.2. atas LKPP Tahun 2006, Pemerintah melaporkan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2006 masing-masing sebesar Rp409,20 triliun dan sebesar Rp226,95 triliun. Realisasi tersebut berdasarkan data yang dikelola oleh Menteri Keuangan, bukan berasal dari dan belum direkonsiliasi dengan data yang dilaporkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

www.peraturan.go.id

masing-masing sebesar Rp405,04 triliun dan Rp201,49 triliun, sehingga terdapat selisih masing-masing sebesar Rp4,16 triliun dan Rp25,46 triliun yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah.

09 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan B.2.2. atas LKPP Tahun 2006, Pemerintah melaporkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp667,13 triliun. Pemerintah belum memperhitungkan pengeluaran yang dilakukan di luar mekanisme APBN dari Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia sebesar Rp9,41 triliun sehingga tidak tercatat dalam laporan realisasi APBN. Belanja

Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan B.2.2.3. atas LKPP Tahun 2006, terdapat perkiraan suspen senilai Rp9 16,77 miliar. Suspen tersebut merupakan perbedaan pencatatan realisasi belanja menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah.

10 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.33. atas LKPP Tahun 2006, Pemerintah melaporkan adanya Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp1 8,83 triliun. Jumlah tersebut berbeda sebesar Rp 1,49 triliun dengan SAL yang disajikan di Neraca yaitu sebesar Rp17,34 triliun. Perbedaan tersebut berasal dari Saldo Kas Lebih Tahun 2005 yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah. Selain itu, SAL di Neraca tidak dapat ditelusuri ke rekening-rekening terkait SAL tersebut. Saldo Anggaran Lebih

11 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.4. butir 2 atas LKPP Tahun 2006, Pemerintah sedang menginventarisasi dan meneliti rekening-rekening yang dibuka oleh dan atas nama kementerian negara/lembaga. Hasil inventarisasi dan penelitian sementara mengungkapkan adanya 3.472 rekening senilai Rp17,66 triliun atas nama kementerian negara/lembaga dan/atau pejabat pada kementerian negara/lembaga. Selain itu, BPK juga menemukan adanya 2.396 rekening senilai Rp2,70 triliun yang belum termasuk dalam inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Keseluruhan rekening tersebut belum disajikan di dalam Neraca Tahun 2006. Hasil inventarisasi dan penelitian atas rekening tersebut oleh Pemerintah dapat berpengaruh secara material terhadap saldo kas yang telah disajikan oleh Pemerintah pada LKPP. Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga

12 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.8 atas LKPP Tahun 2006, saldo piutang pajak per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp35,45 triliun. Dalam piutang pajak termasuk piutang pajak yang masih dalam sengketa dengan wajib pajak baik pada tingkat keberatan maupun banding. Keputusan atas sengketa tersebut dapat berakibat pada pengurangan pajak terutang yang sebelumnya telah ditetapkan dan dicatat sebagai piutang dalam jumlah yang material. Piutang Pajak

13 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.14. atas LKPP Tahun 2006, saldo persediaan per 31 Desember 2006 adalah Rp3,54 triliun. Di antara nilai persediaan tersebut sebesar Rp2,05 triliun berasal dari nilai persediaan kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil inventarisasi fisik untuk posisi akhir tahun. Terdapat 11 (sebelas) kementerian negara/lembaga yang belum atau kurang melaporkan persediaannya karena satuan kerja terkait tidak melakukan inventarisasi fisik. Sehubungan dengan ketiadaan data tersebut BPK tidak bisa memastikan kewajaran nilai persediaan. Persediaan

www.peraturan.go.id

14 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.18. atas LKPP Tahun 2006, dalam saldo investasi permanen penyertaan modal negara per 31 Desember 2006 terdapat investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp427,73 triliun. Nilai tersebut merupakan penjumlahan seluruh ekuitas BUMN secara proporsional dengan persentase kepemilikan pada BUMN yang bersangkutan. Nilai ekuitas tersebut diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan 139 BUMN yang terdiri dari 64 laporan keuangan yang sudah diperiksa senilai Rp104,08 triliun, 52 laporan keuangan yang belum diperiksa senilai Rp 160,18 triliun, dan sisanya senilai Rp163,47 triliun berdasarkan estimasi posisi. Selain itu, masih ada 2 (dua) BUMN yang laporan keuangannya belum tersedia. Pengaruh atas penyajian tersebut mungkin menjadi material apabila keseluruhan investasi permanen penyertaan modal negara tersebut didasarkan pada laporan keuangan BUMN yang telah diperiksa.

Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

15 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.20. atas LKPP Tahun 2006, saldo aset tetap per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp343,92 triliun yang merupakan aset tetap berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga. Administrasi aset tetap pada kementerian negara/lembaga dilakukan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi. Selanjutnya dalam Catatan C.4 butir 12 diungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan SABMN di Kementerian Negara/Lembaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga penyajian aset tetap dalam LKPP ini belum menggambarkan nilai yang sebenarnya. Terdapat 5 (lima) masalah krusial terhadap pelaksanaan SABMN yaitu: (1) belum dilakukannya inventarisasi ulang atas seluruh aset kementerian negara/lembaga maupun unit-unit lain yang belum terdaftar; (2) belum dilakukannya revaluasi atas aset tetap secara keseluruhan sehingga dapat menggambarkan nilai yang wajar; (3) belum adanya penataan organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan; (4) belum adanya perbaikan sistem dan prosedur penatausahaan barang milik negara; dan (5) tidak dicatatnya aset tetap yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan dalam SABMN maupun Sistem Akuntansi Keuangan. Jika SABMN dapat berjalan secara efektif serta inventarisasi dan revaluasi dilakukan secara menyeluruh akan berpengaruh secara material pada nilai aset tetap.

Aset Tetap

16 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C 2.21. atas LKPP Tahun 2006, dalam Aset Lainnya sebesar Rp86,50 triliun terdapat Aset Lain-Lain yang di antaranya sebesar Rp50,29 triliun yang merupakan Aset Eks BPPN dan BP MIGAS. Aset Eks BPPN terdiri dari Aset pada PT PPA sebesar Rp4,38 triliun yang dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat pengalihan dari BPPN kepada Menteri Keuangan, dan Aset yang dikelola oleh Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3, dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Departemen Keuangan sebesar Rp7,36 triliun yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah. Sementara itu Aset BP MIGAS merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas yang dikelola oleh KKKS dengan nilai yang dicatat sebesar Rp38,55 triliun. Namun nilai tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah karena masih dalam tahap pembahasan. Nilai aset eks BPPN dan BP MIGAS dapat berbeda secara material jika dinilai atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kondisi aset yang ada.

Aset Lainnya

www.peraturan.go.id

17 Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.2.29. sampai dengan C.2.32. atas LKPP Tahun 2006, Utang Jangka Panjang Luar Negeri adalah sebesar Rp556,2 1 triliun. Jumlah tersebut merupakan angka yang berasal dari penatausahaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Departemen Keuangan. Namun penatausahaan tersebut belum sepenuhnya tertib yaitu: (1) belum ditetapkannya petunjuk pelaksanaan penatausahaan utang luar negeri; (2) sebanyak 553 Perjanjian Pinjaman dari 4.4 10 perjanjian tidak ditemukan; (3) proses konfirmasi dan rekonsiliasi belum dilakukan; dan (4) nilai penarikan pinjaman menurut catatan DJPU berbeda dengan data menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3,58 triliun dan Pemerintah belum dapat menjelaskan terjadinya perbedaaan tersebut.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

18 Karena adanya pembatasan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan, belum ditetapkannya neraca awal, kelemahan dalam sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4 sampai dengan 17 di atas, dan belum adanya tindak lanjut yang memadai dari Pemerintah, lingkup pemeriksaan BPK tidak memungkinkan BPK menyatakan pendapat, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2006.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2006

Jakarta, 10 Mei 2007
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Anggota,

I Gusti Agung Rai
Akuntan Register Negara No.

www.peraturan.go.id

RINGKASAN

www.peraturan.go.id

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2005, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2006, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2006 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2006 ini disusun dari laporan keuangan seluruh kementerian negara/lembaga, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset negara.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2006 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2006 adalah sebesar Rp637,99 triliun atau mencapai 96,79 persen dari anggarannya.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2006 adalah sebesar Rp667,13 triliun atau mencapai 95,43 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp440,15 triliun atau 92,03 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp226,18 triliun atau 102,41 persen dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran TA 2006 adalah sebesar Rp29,14 triliun yang berarti 72,88 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp39,98 triliun.

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2006 adalah sebesar Rp29,42 triliun yang berarti membiayai 100,94 persen Defisit Anggaran, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp0,27 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2006 dan TA 2005 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

		TA 2006	TA 2005
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	659,11	637,99	495,22
Belanja Negara	699,09	667,13	509,63
Belanja Pemerintah Pusat	478,25	440,15	361,15
Transfer untuk Daerah	220,85	226,18	150,46
Defisit Anggaran	39,98	29,14	14,41
Pembiayaan Neto	39,98	29,42	8,87
SILPA (SIKPA)	-	0,27	(5,53)

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2006.

Jumlah Aset per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp1.222,32 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp125,86 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp664,85 triliun; Aset Tetap sebesar Rp344,61 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp86,99 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp1.326,72 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp104,61 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.222,11 triliun.

www.peraturan.go.id

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2006 adalah sebesar minus Rp104,40 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp21,25 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar minus Rp125,65 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2006 dan 2005 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
Aset	1.222,32	1.173,13
Aset Lancar	125,86	128,55
Investasi Jangka Panjang	664,85	650,49
Aset Tetap	344,61	314,17
Dana Cadangan	0	1,73
Aset Lainnya	86,99	78,20
Kewajiban	1.326,72	1.342,05
Kewajiban Jangka Pendek	104,61	138,03
Kewajiban Jangka Panjang	1.222,11	1.204,02
Ekuitas Dana Neto	(104,40)	(168,92)
Ekuitas Dana Lancar	21,25	(9,48)
Ekuitas Dana Investasi	(125,65)	(161,17)
Ekuitas Dana Cadangan	0	1,73

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2006 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2006.

Saldo kas BUN per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp21,55 triliun yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp3,49 triliun dari saldo per 31 Desember 2005 sebesar Rp18,06 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari kenaikan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp26,11 triliun, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp55,25 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp29,42 triliun, dan kenaikan arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3,22 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2006 dan 2005 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

	TA 2006	TA 2005
Saldo Awal Kas BUN dan KPPN	18,06	12,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	26,11	22,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(55,25)	(36,88)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	29,42	8,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	3,22	10,84
Kenaikan (Penurunan) Kas	3,49	5,31
Saldo Akhir Kas BUN dan KPPN	21,55	18,06

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

www.peraturan.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

www.peraturan.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006 (***Audited***) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006 (***Audited***) tersebut telah disusun berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan perbendaharaan yang telah dikoreksi dan disesuaikan berdasarkan data akuntansi yang lebih lengkap serta perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk laporan keuangan 23 kementerian negara/lembaga yang baru selesai diperiksa setelah penyampaian Laporan Keuangan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jakarta, Desember 2008
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI APBN
(AUDITED)

www.peraturan.go.id

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2006			Tahun Anggaran 2005
		Anggaran (UU No. 14 / 2006)	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	**425.053.080.000.000**	**409.203.019.335.450**	**96,27 %**	**347.031.113.925.042**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	410.226.380.000.000	395.971.535.630.012	96,53 %	331.791.943.009.819
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	14.826.700.000.000	13.231.483.705.438	89,24 %	15.239.170.915.223
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	**229.829.268.281.000**	**226.950.066.385.871**	**98,75 %**	**146.888.310.402.381**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	165.694.879.000.000	167.473.800.945.318	101,07 %	110.467.256.674.000
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	22.322.500.000.000	22.973.056.234.957	102,91 %	12.835.193.803.218
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	41.811.889.281.000	36.503.209.205.596	87,30 %	23.585.859.925.163
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	**4.232.907.854.000**	**1.834.050.785.735**	**43,33 %**	**1.304.782.898.434**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)		**659.115.256.135.000**	**637.987.136.507.056**	**96,79 %**	**495.224.207.225.857**
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	**478.249.290.655.000**	**440.154.197.702.786**	**92,01 %**	**361.155.202.059.513**
1. Belanja Pegawai		78.904.457.499.000	73.252.287.657.704	92,84 %	54.254.195.763.183
2. Belanja Barang		55.506.999.447.000	47.182.190.735.240	85,00 %	29.171.687.018.503
3. Belanja Modal		66.723.899.991.000	55.073.710.080.032	82,36 %	32.888.839.447.753
4. Pembayaran Bunga Utang		82.494.656.960.000	79.082.563.276.141	95,86 %	65.199.594.748.749
5. Subsidi		107.627.567.700.000	107.431.785.858.675	99,82 %	120.765.318.308.031
6. Bantuan Sosial		44.590.994.494.000	40.708.566.188.991	91,29 %	24.903.485.060.263
7. Belanja Lain-lain		42.400.714.565.000	37.423.093.906.003	88,26 %	33.972.081.713.031

www.peraturan.go.id

2009, No.9

II. Transfer untuk Daerah	B.2.2.2	**220.849.845.400.000**	**226.179.954.328.611**	**102,41 %**	**150.463.868.566.482**
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	**216.797.725.400.000**	**222.130.617.897.611**	**102,46 %**	**143.221.256.566.482**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	59.563.725.400.000	64.900.298.776.741	108,96 %	49.692.261.301.466
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	145.664.200.000.000	145.664.184.719.236	99,99 %	88.765.427.859.383
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	11.569.800.000.000	11.566.134.401.634	99,97 %	4.763.567.405.633
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	**4.052.120.000.000**	**4.049.336.431.000**	**99,93 %**	**7.242.612.000.000**
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	3.488.284.000.000	3.488.284.000.000	100,00 %	1.775.312.000.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	563.836.000.000	561.052.431.000	99,51 %	5.467.300.000.000
III. Suspen	B.2.2.3		**794.661.033.845**		**(1.986.652.464.635)**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**699.099.136.055.000**	**667.128.813.065.242**	**95,43 %**	**509.632.418.161.360**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	**(39.983.879.920.000)**	**(29.141.676.558.186)**	**72,88 %**	**(14.408.210.935.503)**
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	B.2.4.1	55.257.700.000.000	**55.982.076.550.778**	101,31 %	**19.144.696.165.201**
1. Rekening Pemerintah		10.549.100.000.000	11.555.466.605.494	109,54 %	8.901.481.663.383
2. Dana Moratorium		7.357.400.000.000	7.357.400.000.000	100,00 %	(13.700.000.000.000)
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi		5.774.500.000.000	5.055.702.597.315	87,55 %	6.563.537.070.729
4. Surat Utang Negara (Neto)		35.771.700.000.000	35.985.507.347.969	100,60 %	22.574.677.431.089
5. Penyertaan Modal Negara		(4.195.000.000.000)	(3.972.000.000.000)	94,68 %	(5.195.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	**(15.273.802.428.000)**	**(26.566.486.298.910)**	**173,93 %**	**(10.271.967.441.904)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	**37.550.387.572.000**	**26.114.585.238.873**	**69,55 %**	**26.840.442.127.896**
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	12.075.100.000.000	13.579.552.756.283	112,46 %	12.264.809.841.399
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	25.475.287.572.000	12.535.032.482.590	49,20 %	14.575.632.286.497
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.2	**(52.824.190.000.000)**	**(52.681.071.537.783)**	**99,73 %**	**(37.112.409.569.800)**
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**39.983.897.572.000**	**29.415.590.251.868**	**73,57 %**	**8.872.728.723.297**
E. Sisa Lebih (Kurang)Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D+C)	B.2.5		**273.913.693.682**		**(5.535.482.212.206)**

www.peraturan.go.id

NERACA
(AUDITED)

www.peraturan.go.id

II. NERACA (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2006	31 Desember 2005
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia	C.2.1	954.310.836.789	100.485.809.688
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	20.594.618.632.501	17.956.484.012.457
Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia	C.2.3	12.331.109.271.481	26.503.223.018.939
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	1.460.472.090.821	671.209.250.352
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	432.936.274.303	955.897.763.011
Kas Trust Fund	C.2.6	2.213.702.756.920	-
Jumlah Kas dan Bank		37.987.149.862.815	46.187.299.854.447
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.7	2.764.674.545.037	2.489.884.695.414
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.8	35.454.552.126.836	29.216.456.291.000
Piutang Bukan Pajak	C.2.9	25.743.092.097.917	37.025.156.608.440
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.10	232.655.356	39.858.709
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.11	12.153.879.936	8.101.260.747
Belanja Dibayar Di Muka	C.2.12	595.604.989.211	-
Piutang Lain-lain	C.2.13	19.770.394.533.689	6.578.250.135.452
Jumlah Piutang		81.576.030.282.945	72.828.004.154.348
Persediaan	C.2.14	3.536.170.895.752	7.046.248.099.544
Jumlah Aset Lancar		125.863.025.586.549	128.551.436.803.753
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.15	59.212.080.140.000	60.371.748.000.000
Dana Bergulir	C.2.16	5.690.613.254.758	2.937.740.327.698
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.17	2.750.000.000.000	2.684.000.000.000
Jumlah Investasi Non Permanen		67.652.693.394.758	65.993.488.327.698
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.18	475.464.257.091.081	430.416.127.491.383
Investasi Permanen Lainnya	C.2.19	121.735.183.292.481	154.076.839.362.585
Jumlah Investasi Permanen		597.199.440.383.562	584.492.966.853.968
Jumlah Investasi Jangka Panjang		664.852.133.778.320	650.486.455.181.666
Aset Tetap	C.2.20		
Tanah		81.910.266.143.051	78.518.225.156.823
Peralatan dan Mesin		112.020.234.093.856	136.141.296.429.368
Gedung dan Bangunan		53.296.738.091.616	39.274.840.245.416
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		82.202.555.277.832	50.532.399.824.448
Aset Tetap Lainnya		4.119.371.666.634	1.668.962.576.760
Konstruksi Dalam Pengerjaan		11.065.568.407.884	8.031.642.913.663
Jumlah Aset Tetap		344.614.733.680.873	314.167.367.146.478
Dana Cadangan			
Dana Cadangan		0	1.730.000.000.000
Aset Lainnya	C.2.21		
Tagihan Penjualan Angsuran		126.825.794	396.153.164.892
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		51.048.922.086	67.339.857.240
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		314.819.000	1.296.844.250
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		29.954.472.252.333	32.381.868.877.082

www.peraturan.go.id

Aset Tak Berwujud		626.241.182.170	50.173.529.179
Aset Lain-lain		56.355.345.157.712	45.302.890.932.733
Jumlah Aset Lainnya		86.987.549.159.095	78.199.723.205.376
JUMLAH ASET		1.222.317.442.204.837	1.173.134.982.337.273
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	C.2.22	460.693.623.955	219.972.238.360
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.23	79.760.070.578.171	87.808.151.589.830
Utang Bunga	C.2.24	13.307.756.263.984	47.495.944.414.493
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.25	8.135.305.495.739	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.26	2.944.434.123.992	2.503.279.497.317
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		104.608.260.085.841	138.027.347.740.000
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN	C.2.27	664.069.038.386.125	623.558.308.465.243
Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT	C.2.28	1.832.022.617.347	1.717.659.839.897
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		0	20.730.320.269
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		665.901.061.003.472	625.296.698.625.409
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.29	505.104.096.673.440	541.788.132.754.460
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	C.2.30	130.873.212.300	2.247.197.068.470
Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN	C.2.31	50.456.525.092.318	34.114.645.772.471
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.32	514.869.376.960	576.681.707.720
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		556.206.364.355.018	578.726.657.303.121
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.222.107.425.358.490	1.204.023.355.928.530
JUMLAH KEWAJIBAN		1.326.715.685.444.331	1.342.050.703.668.530
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL	C.2.33	17.066.126.565.213	21.574.381.777.419
SILPA (SIKPA)	C.2.34	273.913.693.682	(5.535.482.212.206)
Dana Lancar Lainnya	C.2.35	22.518.154.250.699	31.462.414.983.277
Cadangan Piutang	C.2.36	81.576.030.282.945	72.828.004.154.348
Cadangan Persediaan	C.2.37	3.535.170.895.752	7.046.248.099.544
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.38	432.936.274.303	955.897.763.011
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.39	(104.147.566.461.886)	(137.807.375.501.640)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		21.254.765.500.708	(9.475.910.936.247)
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.40	664.852.133.778.320	650.486.455.181.666
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.41	344.614.733.680.873	314.167.367.146.478
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.42	86.987.549.159.095	78.199.723.205.376
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.43	(1.222.107.425.358.490)	(1.204.023.355.928.530)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(125.653.008.740.202)	(161.169.810.395.010)
Ekuitas Dana Cadangan			
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0	1.730.000.000.000
EKUITAS DANA NETO		(104.398.243.239.494)	(168.915.721.331.257)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.222.317.442.204.837	1.173.134.982.337.273

www.peraturan.go.id

LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)

www.peraturan.go.id

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2006	Tahun Anggaran 2005
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		208.833.125.652.841	175.367.250.849.344
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		123.035.859.568.711	101.296.007.600.047
c. Pajak Bumi dan Bangunan		20.858.516.906.183	16.218.531.467.160
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		3.184.469.880.249	3.432.528.810.249
e. Cukai		37.772.132.887.314	33.256.155.560.171
f. Bea Masuk		12.140.401.555.427	14.920.926.026.871
g. Pajak Ekspor		1.091.082.150.011	318.244.888.352
h. Pajak Lainnya		2.287.430.734.714	2.050.212.067.600
Total Penerimaan Perpajakan		409.203.019.335.450	346.859.857.269.794
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		167.473.800.945.318	110.467.256.674.000
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		22.973.056.234.957	12.835.193.803.218
c. Penerimaan PNBP Lainnya		36.467.597.306.379	23.459.183.857.096
Total PNBP		226.914.454.486.654	146.761.634.334.314
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	1.834.050.785.735	1.326.496.774.687
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		637.951.524.607.839	494.947.988.378.795
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	72.884.043.314.552	56.417.157.770.659
2. Belanja Barang dan Jasa	D.2.5	47.065.451.829.540	31.874.206.278.166
3. Bunga Utang	D.2.6	79.069.362.794.878	57.632.203.685.766
4. Subsidi	D.2.7	107.456.739.357.285	120.724.027.617.730
5. Bantuan Sosial	D.2.8	40.684.769.238.136	24.374.841.372.265
6. Belanja Lain-Lain	D.2.9	38.155.510.436.090	30.933. 944.702.343
7. Bagi Hasil Pajak	D.2.10	28.544.231.692.934	23.801.845.159.731
8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.11	36.700.805.029.998	26.019.029.590.037
9. Dana Alokasi Umum	D.2.12	145.666.815.317.795	88.733.248.464.832
10. Dana Alokasi Khusus	D.2.13	11.566.091.977.723	4.750.230.280.799
11. Dana Otonomi Khusus	D.2.14	3.488.284.000.000	1.775.312.000.000
12. Dana Penyesuaian	D.2.15	558.303.431.000	5.436.950.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		611.840.408.419.931	472.472.996.922.328
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		26.111.116.187.908	22.474.991.456.467
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.16	35.611.899.217	126.676.068.067
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		35.611.899.217	126.676.068.067
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Aset Tetap	D.2.17	55.288.404.645.311	37.009.878.460.037
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		55.288.404.645.311	37.009.878.460.037
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(55.252.792.746.094)	(36.883.202.391.970)

www.peraturan.go.id

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.18	118.203.381.971.024	65.086.123.908.334
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.19	29.672.559.197.871	26.840.442.127.896
3. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	D.2.20	3.665.247	97.545.547
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		147.875.944.834.142	91.926.663.581.777
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.21	58.249.309.085.493	38.497.909.406.516
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.22	52.681.071.537.783	37.112.409.569.800
3. Penyertaan Modal Negara	D.2.23	3.972.000.000.000	5.195.000.000.000
4. RDI/RPD	D.2.24	3.557.973.958.998	2.248.615.882.164
Jumlah Arus Kas Keluar (C.2)		118.460.354.582.274	83.053.934.858.480
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		29.415.590.251.868	8.872.728.723.297
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.25	184.359.625.705	42.501.576.657
2. Transfer Antar Kantor	D.2.26	3.033.686.327.758	10.802.350.659.576
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I – D.II)		3.218.045.953.463	10.844.852.236.233
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D)		3.491.959.647.145	5.309.370.024.027
SALDO AWAL KAS BUN DAN KPPN	D.2.27	18.056.969.822.145	12.747.599.798.118
SALDO AKHIR KAS BUN DAN KPPN		21.548.929.469.290	18.056.969.822.145
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	D.2.28	1.460.472.090.821	671.209.250.352
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	D.2.29	432.936.274.303	955.897.763.011
REKENING PEMERINTAH LAINNYA PADA BI	D.2.30	12.331.109.271.481	26.503.223.018.939
KAS TRUST FUND	D.2.31	2.213.702.756.920	-
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		37.987.149.862.815	46.187.299.854.447

www.peraturan.go.id

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)

www.peraturan.go.id

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa LKPP (*Audited*) disusun berdasarkan LKPP (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2005, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006, Pasal 17 ayat (1) menetapkan bahwa setelah Tahun Anggaran 2006 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006 berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006, Pasal 17 ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2006 berakhir untuk mendapatkan persetujuan DPR.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

www.peraturan.go.id

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian nasional 2006 sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Di sisi eksternal, dampak dari ketidakseimbangan global (*global imbalance*), tingginya harga minyak mentah dunia, dan tingginya tingkat bunga di luar negeri akibat kebijakan moneter yang relatif ketat terutama di Amerika Serikat telah mengakibatkan Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan kebijakan yang hati-hati, meskipun pada paruh kedua tahun ini sudah terjadi *reversal* di mana banyak negara mulai memperlonggar kebijakan moneternya sejak Juni 2006.

Dari sisi internal, kinerja perekonomian mulai diwarnai oleh beberapa perbaikan seperti daya beli masyarakat yang mulai pulih setelah sempat melemah akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005, mulai turunnya suku bunga perbankan, dan diluncurkannya program-program untuk memperbaiki infrastruktur. Akan tetapi iklim investasi yang belum kondusif, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor perbankan, dan masih berlanjutnya dampak bencana alam di beberapa daerah masih menjadi faktor penghambat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2006.

Stabilitas makroekonomi cukup baik

Secara umum, stabilitas makroekonomi tahun 2006 cukup baik ditandai dengan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, menurunnya inflasi, stabilnya harga minyak, menurunnya hambatan berinvestasi, naiknya kepercayaan investor, membaiknya kondisi fiskal maupun neraca pembayaran serta tidak adanya goncangan yang cukup berarti dalam mempengaruhi perekonomian nasional sepanjang 2006. Membaiknya kondisi fiskal didukung oleh meningkatnya pembiayaan dalam negeri, *debt swap,* dan penghapusan sebagian hutang dari Jerman serta percepatan pelunasan hutang IMF sekitar 7,7 miliar USD (Rp65 triliun) yang lebih cepat 4 tahun dari waktu yang ditentukan. Upaya untuk mengurangi jumlah dan rasio hutang terhadap pendapatan nasional terus dilakukan. Pada tahun 2004, rasio hutang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah 56,1 persen, kemudian pada tahun 2005 turun menjadi 47,9 persen dan pada tahun 2006 turun menjadi 41,3 persen. Di masa yang akan datang, Pemerintah berusaha menurunkan rasio hutang menjadi 35 persen. Dengan demikian, APBN semakin sehat dan dapat mengalokasikan anggaran lebih besar lagi pada berbagai sektor pembangunan terutama dalam memperbaiki kualitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Upaya meningkatkan kemandirian

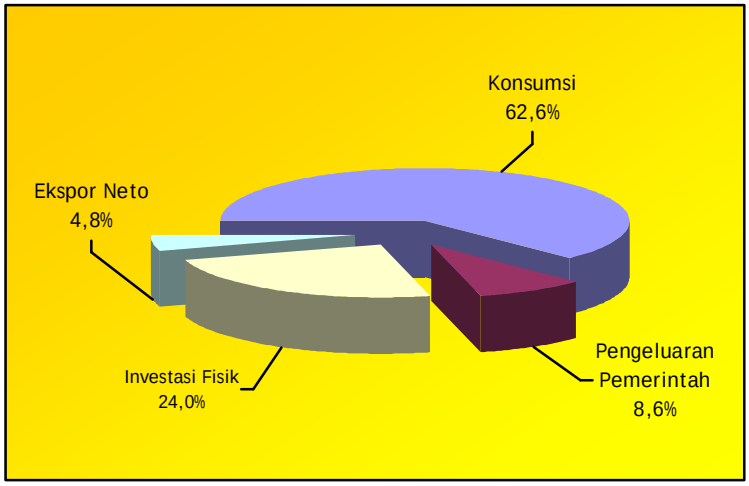
Pada tahun 2006, upaya Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan dan *exposure* Indonesia terhadap hutang luar negeri ditunjukkan dengan tidak dilanjutkan kerja sama dengan *Consultative Group on Indonesia* (CGI). Di samping itu, sumber pembiayaan dari dalam negeri akan terus diperluas dan diperdalam agar menghindarkan risiko anggaran dari goncangan nilai tukar, suku bunga dan risiko perpanjangan jatuh tempo. Sejalan dengan itu, Pemerintah terus juga berupaya meningkatkan kemandirian dalam bidang pangan dan energi, kecukupan dan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan dan kemampuan berproduksi dari komoditas padi, jagung, gula dan kedelai menjadi prioritas yang tinggi dalam strategi pembangunan pemerintah jangka menengah. Hal ini terwujud tidak saja dalam bentuk perhatian dalam kebijakan namun juga dalam prioritas anggaran. Dengan meningkatnya harga komoditi internasional, terutama komoditi pertanian dan pertambangan, dan arus modal yang mulai masuk ke Indonesia mendukung semakin membaiknya kinerja neraca pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa

www.peraturan.go.id

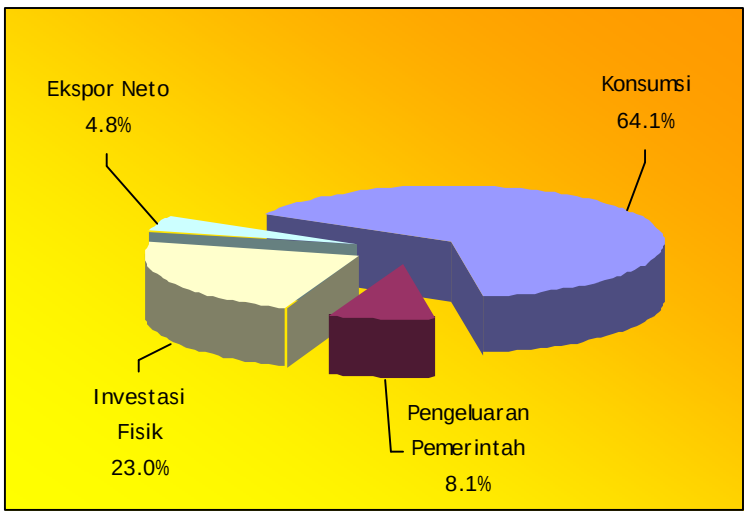
secara fundamental, ekonomi Indonesia makin membaik dari waktu ke waktu. Kendati demikian, perlu diwaspadai berbagai permasalahan fiskal yang mungkin timbul di masa yang akan datang yang terkait dengan implementasi dari berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah di bidang perpajakan dan perdagangan serta risiko dari penerbitan surat utang untuk pembiayaan dalam negeri (yang akan menyedot dana masyarakat). Selain itu, kinerja ekspor yang impresif ternyata belum mampu menggerakkan sektor ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran. Meningkatnya permintaan *(demand)* dari luar negeri seyogyanya mampu meningkatkan produksi *(supply)* dalam negeri yang menghasilkan penciptaan lapangan kerja baru.

Pertumbuhan perekonomian pada tahun 2006 sebesar 5,5 %

Pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2006 sebesar 5,5% sedikit melambat dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 5,6%, ditandai dengan melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, meskipun secara umum nilai ekspor neto mengalami peningkatan. Kondisi ini terkait erat dengan menurunnya daya beli konsumen sebagai dampak lanjutan dari peningkatan harga BBM domestik. Hal ini wajar terjadi mengingat perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sektor konsumsi *(consumption-driven economy)*, sebagaimana ditunjukkan oleh struktur PDB pada Grafik 1.a dan Grafik 1.b.



Grafik 1.a : Struktur PDB Tahun 2006



Nilai ekspor meningkat dengan total nilai di atas USD 100,69 miliar

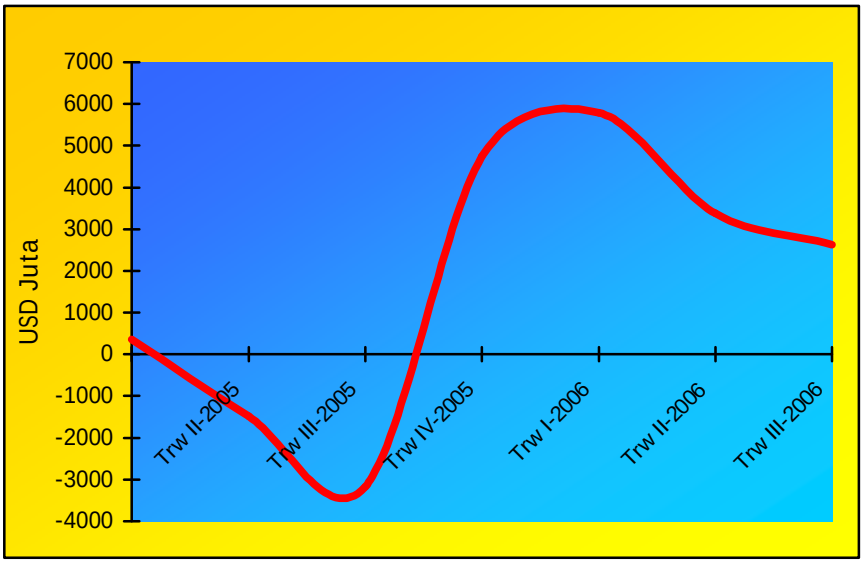
Grafik 1.b : Struktur PDB Tahun 2005

www.peraturan.go.id

Dilihat dari struktur PDB, maka sumber utama pertumbuhan ekonomi 5,5 persen adalah ekspor 4,1 persen, diikuti konsumsi rumah tangga 1,9 persen, konsumsi pemerintah 0,7 persen, pembentukan modal tetap bruto (investasi) 0,7 persen serta pengaruh impor 2,8 persen. PDB per-kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 mencai Rp15,0 juta (1.663 USD), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp12,7 juta (1.320,6 USD).

Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selama tahun 2006 mencatat surplus cukup tinggi terutama dipengaruhi oleh surplus di neraca transaksi berjalan. Sumbangan peningkatan nilai ekspor Indonesia cukup baik dalam dua tahun terakhir yaitu sebesar 18 persen dengan total nilai yang dicapai di atas USD 100,69 miliar. Ekspor nonmigas Desember 2006 mencapai 7,62 miliar USD, naik 21,02 persen dibanding Desember 2005. Sementara itu, pertumbuhan impor relatif tetap sejalan dengan masih rendahnya permintaan domestik. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia selama Triwulan II 2005 sampai dengan Triwulan III 2006 dapat dilihat pada Grafik 2.

Jumlah cadangan devisa mencapai USD 42,4 miliar

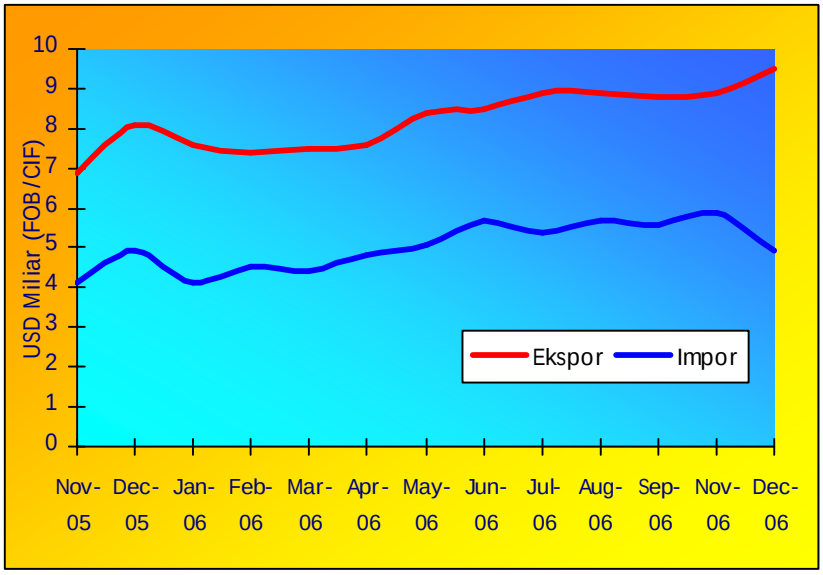


Grafik 2 : Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia selama

Triwulan II 2005 - Triwulan III 2006

Di sisi lain, neraca lalu lintas modal dan finansial mencatat defisit, yang antara lain disebabkan oleh relatif besarnya aliran modal keluar akibat peningkatan penempatan residen ke perbankan di luar negeri. Namun demikian, aliran *portfolio investment* masih tinggi tercermin pada peningkatan kepemilikan asing pada surat-surat berharga seperti SBI dan saham yang diakibatkan masih kompetitifnya tingkat suku bunga dibandingkan dengan suku bunga luar negeri. Secara keseluruhan, kondisi tersebut meningkatkan jumlah cadangan devisa USD dari USD 34,72 miliar pada tahun 2005 menjadi sekitar USD 42,4 miliar atau setara dengan 4,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah pada tahun 2006. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia selama tahun 2006 dapat dilihat pada Grafik 3.

www.peraturan.go.id



Grafik 3 : Perkembangan Ekspor Impor Indonesia selama

November 2005 - Desember 2006

Nilai tukar Rupiah berada di kisaran 9.100-9.200 per Dolar Amerika

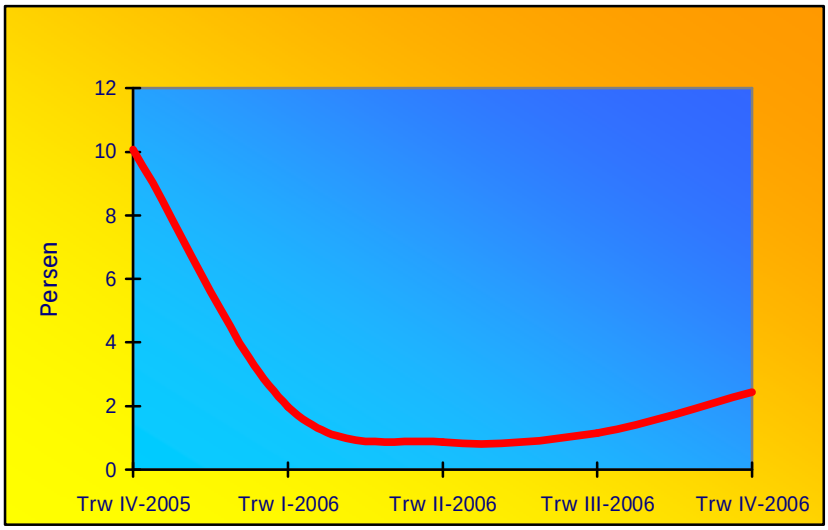
Selama tahun 2006, nilai tukar Rupiah mengalami penguatan dengan volatilitas yang cenderung menurun dibandingkan tahun 2005. Meskipun terjadi pelemahan mata uang utama dunia seperti Euro dan Yen terhadap Dolar Amerika, peningkatan suku bunga *Federal Reserve*, serta melemahnya kondisi pasar keuangan di beberapa negara sempat memicu sentimen negatif di pertengahan tahun, akan tetapi pada akhir tahun 2006 Rupiah ditutup stabil pada kisaran 9.100-9.200 per Dolar Amerika. Dibandingkan dengan tahun 2005, Rupiah mengalami penguatan sekitar 8,24 persen.

Laju inflasi terkendali pada level 6,6 persen dan Suku bunga SBI 9,75 persen

Stabilitas nilai tukar ini berdampak pada terkendalinya laju inflasi, yakni dari 17,11 persen pada tahun 2005 menjadi 6,6 persen pada tahun 2006. Nilai tukar dan laju inflasi yang membaik memberi ruang pada penurunan SBI di mana awal tahun 2006 sebesar 12.75 persen menurun menjadi 9,75 persen *(single digit)* pada akhir tahun yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat pada kondisi perekonomian yang lebih baik. Langkah penurunan suku bunga yang bertujuan untuk menggerakkan sektor riil ternyata belumlah cukup untuk mendorong kinerja investasi dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan laju inflasi nasional dari triwulan I 2005 sampai dengan triwulan IV 2006 dapat dilihat pada Grafik 4.

www.peraturan.go.id

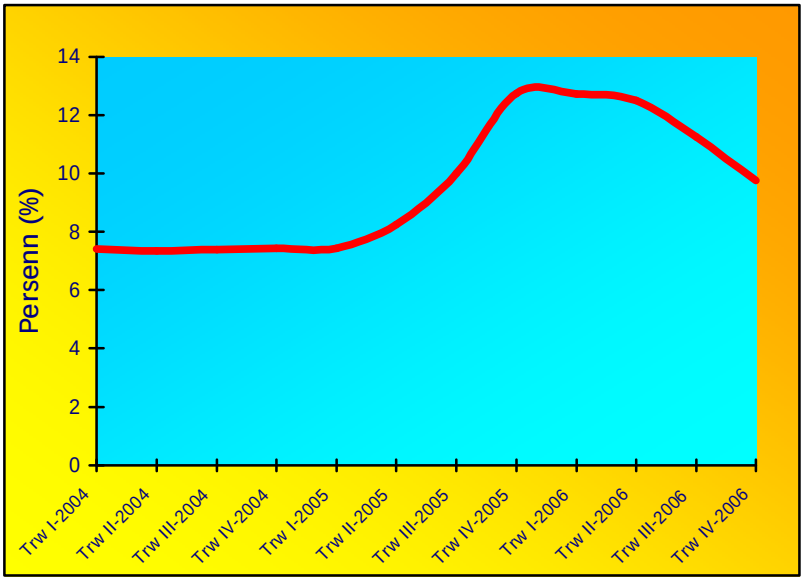
Keterkaitan suku bunga dan sektor riil



Grafik 4: Perkembangan Laju Inflasi Nasional

Triwulan I 2005 - Triwulan IV 2006

Meskipun demikian, suku bunga yang berlaku relatif masih tingi, khususnya bila dibandingkan dengan sasarannya dalam APBN-P TA 2006 yang sebesar 9,5 persen. Masih terbatasnya penurunan kebijakan suku bunga ini membuat pergerakan sektor riil masih belum terlalu signifikan mendongkrak perekonomian nasional. Walaupun begitu, Indeks Harga Saham Gabungan di BEJ meningkat dari 1.162,64 pada akhir Desember 2005 menjadi 1.310,26 pada 30 Juni 2006 dan menjadi 1.805 pada Desember 2006. Tingkat suku bunga SBI dari triwulan I 2005 sampai dengan triwulan IV 2006 dapat dilihat pada Grafik 5.



Grafik 5: Perkembangan Tingkat Diskonto SBI Triwulan I 2005 - Triwulan IV 2006

Harga Minyak Dunia 56.80 USD/barrel

Terkoreksinya harga minyak dunia (62.6 USD/barrel di awal tahun 2006 menjadi 56.80 USD/barrel pada Desember 2006) adalah akibat dari koreksi signifikan sisi *demand*, telah diikuti dengan penurunan harga komoditi ekspor

www.peraturan.go.id

lainnya. Tekanan harga minyak yang sedikit melonggar berdampak pada tekanan inflasi di seluruh dunia, sehingga berdampak pada relatif stabilnya suku bunga *Fed* yang merupakan referensi utama suku bunga internasional.

Realisasi PMDN turun 44 persen dan realisasi PMA turun 47 persen

Ditinjau dari sisi investasi dalam negeri, belum terdapat kemajuan yang berarti ditunjukkan oleh melambatnya pemulihan kinerja investasi swasta. Hal ini ditandai dengan relatif rendahnya angka persetujuan dan realisasi investasi dalam negeri. Selama tahun 2006, realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan 44 persen dibandingkan tahun 2005 (dari Rp30.665 miliar menjadi Rp16.912,8 milar). Demikian pula, realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengalami penurunan sebesar 47 persen di tahun 2006 bila dibandingkan dengan tahun 2005 (dari USD 8.914,5 juta menjadi USD 4.699,9 juta).

Berbagai hal yang masih perlu dicermati mengenai belum kondusifnya iklim investasi di Indonesia terutama disebabkan masih adanya ekonomi biaya tinggi akibat keterbatasan prasarana dan belum efisiennya birokrasi pemerintah terkait pengurusan perizinan. Terbatasnya pasokan energi ataupun infrastruktur lainnya dapat berimplikasi pada tingginya biaya produksi yang menyebabkan tingginya harga dan mempengaruhi daya saing Indonesia. Data *Global Competitiveness Report 2006-2007* dari hasil survey *World Economic Forum* yang menyebutkan posisi Indonesia pada urutan 50 dari 125 negara menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Keunggulan dari sisi tenaga kerja dan kualitas hasil produksi yang relatif bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya juga harus terus dikembangkan, sejalan dengan perbaikan infrastruktur dan penurunan hambatan berinvestasi.

Upaya mengurangi hambatan infrasturktur

Dalam rangka mengatasi hambatan ketersediaan infrastruktur, pemerintah menawarkan proyek-proyek unggulannya melalui *Indonesia Infrastructure Summit 2006* yang menghasilkan komitmen pendanaan atas 25 proyek infrastruktur di antaranya jalan tol, penyediaan air dan listrik dengan total investasi 7 milyar USD. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun untuk memberikan dukungan bagi pembangunan infrastruktur dalam negeri. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengupayakan konversi energi untuk menghasilkan tenaga kelistrikan. Selama ini, ketergantungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada BBM ditengarai sebagai faktor penghambat penyediaan energi listrik yang murah dan efisien, menyusul naiknya harga BBM dalam negeri tahun 2005 dan harga minyak dunia akhir-akhir ini. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006, Pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara. Dengan berkurangnya ketergantungan kepada BBM diharapkan kelangkaan pasokan energi listrik dapat teratasi.

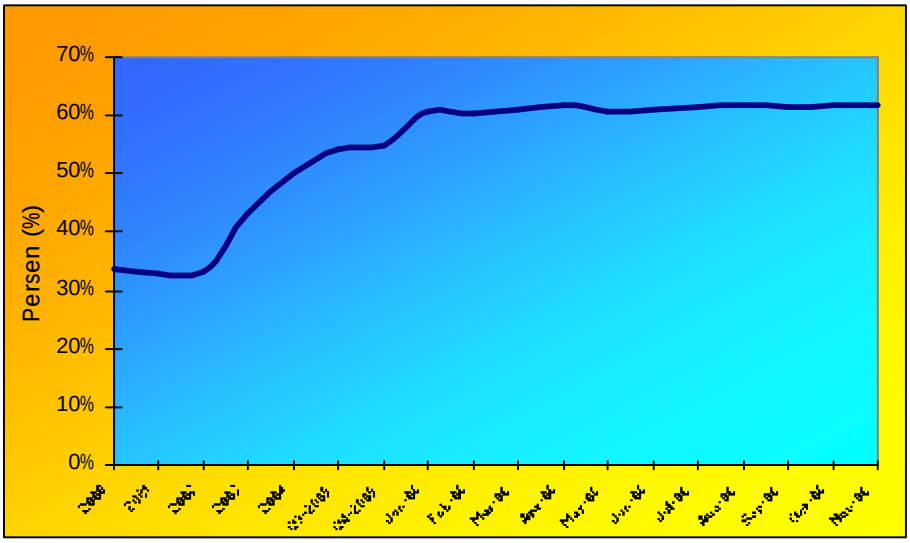
Pada akhir Februari 2006, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang meliputi 3 hal yaitu penyederhanaan proses pembentukan dan izin usaha, pembenahan perpajakan dan percepatan sistem pelayanan bea masuk dan cukai untuk mengatasi hambatan berinvestasi. Dari sisi proses perizinan, diharapkan berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan izin usaha dari 150 hari menjadi 30 hari melalui pendelegasian kewenangan kepada Kanwil Hukum dan HAM di provinsi. Pembenahan perpajakan diarahkan untuk mengamandemen tiga undang-undang yaitu UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan dan UU PPN. Sedangkan yang berhubungan dengan bea cukai, Pemerintah mengupayakan sitem pelayanan satu jendela yang akan mempercepat masuknya barang tanpa terlalu banyak pemeriksaan.

Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 61%

Dari sisi perbankan, beban *Non-Performing Loan* (NPL) yang tinggi berdampak pada keengganan/kehati-hatian untuk melakukan ekspansi kredit. Data *Gross NPL* akhir tahun terhadap Total Kredit sebesar 8,7 persen kurang lebih sama dengan posisi Juni 2006. Angka kredit bermasalah ini bertambah dibandingkan pada akhir tahun 2005 yang sebesar 7,42 persen. Selain NPL, belum

www.peraturan.go.id

optimalnya intermediasi sektor perbankan juga ditandai dengan tidak bergeraknya LDR *(Loan to Deposit Ratio)* yaitu di level 61 persen sepanjang tahun 2006. Dibandingkan dengan rasio pada tahun 2005 sebesar 55,02 persen, rasio LDR tahun 2006 ini meningkat tipis, namun belum memberikan dampak signifikan pada sektor riil. Selain disebabkan oleh faktor NPL dan suku bunga yang masih tinggi, hal lain yang menyebabkan stagnannya LDR adalah peraturan prudensial BI dan kesulitan dari pihak perbankan untuk mendapatkan nasabah yang berkualitas. Perkembangan LDR Perbankan Nasional dari tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2006 dapat dilihat pada Grafik 6.



Grafik 6: Perkembangan LDR Perbankan Nasional
Tahun 2000 - Nopember 2006

Rendahnya kegiatan di sektor riil tidak saja dapat dilihat dari rendahnya tingkat investasi selama tahun 2006, tetapi juga dari sisi produksi berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi motor pertumbuhan. Dalam tahun 2006, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4,6 persen, relatif stagnan dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2005. Bahkan industri pengolahan non migas mengalami perlambatan dari 5,9 persen pada tahun 2005 menjadi 5,3 persen pada tahun 2006. Sektor perdagangan juga mengalami perlambatan dari 6,3 persen menjadi 5,3 persen dalam tahun ini.

Penerbitan ORI tahun 2006 menghasilkan 9,5 triliun untuk APBN

Sedangkan untuk investasi portofolio jangka panjang, penerbitan Obligasi Republik Indonesia (ORI) pada semester II dimana Pemerintah melakukan lelang (*auctions*) pada tanggal 22 Agustus 2006, 19 September 2006, dan 10 Oktober 2006 yang menghasilkan Rp9,5 triliun untuk APBN setidaknya berkontribusi dalam menggairahkan iklim investasi yang cukup lesu. Kekhawatiran terjadinya *capital outflow* tidak muncul di akhir tahun jika dibandingkan Semester I tahun 2006 seiring dengan meningkatnya aliran dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, terutama dalam bentuk investasi di pasar finansial seperti saham dan obligasi pemerintah yang mengakibatkan cadangan devisa terus meningkat.

Pemerintah berkomitmen pada pengentasan kemiskinan sebagai salah satu agenda dalam RPJM 2005-2009

Di samping berbagai kemajuan di atas, pemerintah juga semakin menunjukkan keberpihakannya kepada pengentasan kemiskinan sebagai salah satu agenda yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mendukung upaya penurunan penduduk miskin di antaranya adalah keberhasilan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan pola ekspansi ekonomi dari sumber konsumtif ke sumber produktif yang diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan selanjutnya dan mampu menciptakan

www.peraturan.go.id

lapangan kerja yang lebih luas, serta kebijakan pemerintah yang bersifat langsung berupa peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan pengembangan wilayah tertinggal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk miskin Indonesia masih mencapai 17,76 persen. Jumlah ini dalam tahun 2006 diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 13,3 persen atau sebesar 29,5 juta jiwa. Untuk itu anggaran yang disediakan dalam mengurangi kemiskinan terus meningkat. Ini tercermin dari besarnya dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengentaskan masyarakat miskin dari sebesar Rp18 triliun pada tahun 2004, Rp23 triliun pada tahun 2005 sampai sekitar Rp42 triliun di tahun 2006.

Stabilitas ekonomi diperkirakan semakin membaik

Ke depan, stabilitas makroekonomi domestik diperkirakan semakin membaik dengan menurunnya tingkat inflasi dan suku bunga, stabilnya nilai tukar, dan meningkatnya cadangan devisa. Perkembangan ini juga didukung oleh membaiknya *country risk* sebagaimana juga terefleksi dari meningkatnya peringkat hutang jangka panjang Indonesia dari *Standard & Poor*, dari BB menjadi B+ untuk hutang dalam mata uang asing dan dari BB menjadi BB+ untuk hutang dalam mata uang lokal. Perbaikan *rating* hutang tersebut didasarkan pada kinerja fiskal dan eksternal yang membaik dengan mengecilnya beban hutang. Naiknya daya saing Indonesia pada tingkat global menurut *World Economic Forum* dari peringkat 69 pada tahun 2005 menjadi peringkat 50 pada tahun 2006 merupakan sinyal positif bagi kebangkitan ekonomi Indonesia.

Selain itu, diharapkan daya serap belanja modal bisa lebih besar dari 85 persen dan dengan tidak dibayangi oleh inflasi yang tinggi dan surplus perdagangan yang impresif serta cadangan devisa yang aman sehingga bisa menjadi modal bagi sektor perbankan untuk menurunkan suku bunga, mendorong fungsi intermediasi (menaikkan *LDR*), menekan *NPL* dan menaikkan laba. Ditambah lagi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diluncurkan tahun 2007 diharapkan dapat menghasilkan penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan infrastruktur perdesaan, dan di lingkungan daerah kumuh di perkotaan.

Asumsi dasar APBN TA 2004-2006 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Asumsi Dasar APBN TA 2004 - 2006

Uraian	Realisasi TA 2004	Realisasi TA 2005	APBN (UU 13/2005)	APBN-P (UU 14/2006)	Realisasi TA 2006
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,6	6,2	5,8	5,5
Tingkat Inflasi (%)	6,4	17,1	8,0	8,0	6,6
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	8.939	9.705	9.900	9.300	9.020
Suku Bunga SBI 3 Bulan (%)	7,39	9,09	9,50	12,00	9,75
Harga Minyak (USD/barel)	37,17	51,80	57,00	57,00	56,80
Produksi Minyak (juta barel/hari)	1,040	0,999	1,050	1,050	1,007

Catatan:
- Ø Per Triwulan III-2006, Neraca Transaksi Berjalan Tahun 2006, surplus USD 4.029 juta (1,09% PDB) dan Neraca Modal Tahun 2006, defisit USD 688 juta (0,18% PDB);
- Ø Posisi Cadangan Devisa Tahun 2006, USD 42,4 miliar.

Sedangkan perbandingan realisasi anggaran TA 2005 dan dapat dilihat pada Tabel 2.

www.peraturan.go.id

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2006 dan 2005
(dalam triliun)

Uraian	Reali-sasi TA 2005	TA 2006			
		APBN (UU 13/2005)	APBN-P (UU 14/2006)	Reali-sasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Penerimaan Perpajakan	347,0	416,3	425,1	409,2	96%
PNBP	146,9	205,3	229,8	226,9	99%
Penerimaan Hibah	1,3	3,6	4,2	1,8	43%
Pendapatan Negara dan Hibah	495,2	625,2	659,1	637,9	97%
Belanja Pemerintah Pusat	361,2	427,6	478,2	440,0	92%
Transfer utk Daerah	150,5	220,1	220,8	226,2	102%
Total Belanja Negara*	509,6	647,7	699,1	667,1	95%
Defisit Anggaran	14,4	22,4	39,9	29,1	73%
Pembiayaan	8,9	22,4	39,9	29,4	74%

Catatan:
*) Termasuk Suspen TA 2005 sebesar Rp1,9 triliun, dan TA 2006 sebesar Rp0,9 triliun

Perkembangan variabel ekonomi makro seperti fluktuasi harga minyak dunia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan antara lain mendasari perubahan terhadap perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah menurut UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

1. Pendapatan Negara

Realisasi pendapatan negara dan hibah Rp637,8 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2006 mencapai Rp637,9 triliun atau 96 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp142,7 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp495,2 triliun. Sumbangan terbesar berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp80 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan Rp409,1 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam TA 2006 adalah sebesar Rp409,2 triliun atau mencapai 96 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006. Hal ini berarti meningkat sebesar Rp62,2 triliun atau 18 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2005. Meningkatnya Penerimaan Perpajakan sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan *tax ratio* yaitu peningkatan penerimaan perpajakan dan rasionya terhadap PDB melalui langkah-langkah yang dilakukan pada tahun 2006 yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pada sistem perpajakan di antaranya dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan administrasi perpajakan. Walaupun *tax ratio* tahun 2006 tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2005, namun secara nominal penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Dalam TA 2006, realisasi Penerimaan Perpajakan berada di bawah sasarannya, sehingga *tax ratio* sedikit mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi di sektor-sektor tertentu, penurunan impor barang modal, dan transaksi di sektor perumahan yang

www.peraturan.go.id

menyebabkan beberapa jenis pajak seperti PPN Impor, Bea Masuk, dan BPHTB terkena dampaknya. Realisasi PPN Impor TA 2006 adalah sebesar Rp43,1 triliun atau turun 6 persen dari realisasi TA 2005 sebesar Rp45,8 triliun. Sedangkan realisasi Bea Masuk TA 2006 adalah sebesar Rp12,1 triliun yang berarti mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 2,6 triliun atau 20 persen dibanding realisasi TA 2005.

Beberapa faktor yang menyebabkan Bea Masuk tidak tercapai adalah adanya penurunan tarif atas kebijakan internasional, dan menurunnya volume impor tahun 2006. Selain itu penurunan disebabkan adanya penurunan tarif terkait dengan perjanjian antara ASEAN-Cina yang memberikan pengaruh signifikan bagi bea masuk. Adanya penurunan tarif secara umum tidak terlalu berpengaruh terhadap realisasi Penerimaan Cukai tahun 2006 yang terbukti meningkat sebesar Rp37,7 triliun atau 13 persen dibandingkan TA 2005.

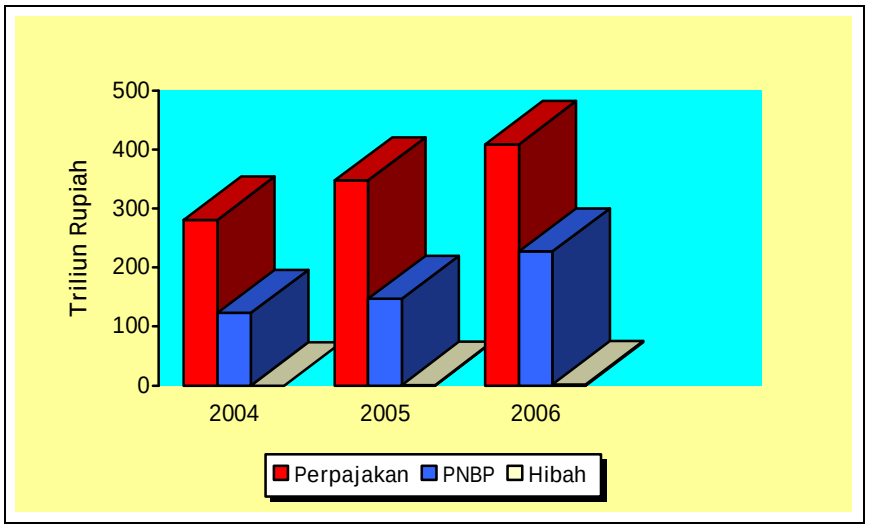
Meskipun demikian, secara nominal, kinerja penerimaan perpajakan TA 2006 lebih baik dibandingkan TA 2005, walaupun realisasinya masih lebih rendah dari target APBN-P TA 2006. Penurunan sektor pajak yang terbesar adalah pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor yang turun secara absolut dari pertumbuhannya. Hal ini mengakibatkan PPh Impor dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Impor turun. Realisasi PPnBM impor turun 43 persen yaitu hanya sekitar Rp1,7 triliun dibanding dengan realisasi TA 2005 Rp 2,5 triliun.

Peningkatan PNBP antara lain diperoleh dari peningkatan signifikan penerimaan SDA dan bagian laba BUMN

Peningkatan PNBP sebesar Rp 80 triliun diperoleh dari peningkatan yang signifikan dari penerimaan SDA sebesar Rp61,2 triliun, penerimaan bagian laba BUMN 2006 sebesar Rp10,1 triliun, dan peningkatan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp8,7 triliun. Bagian Laba BUMN yang berkontribusi cukup signifikan terhadap kenaikan PNBP dipengaruhi oleh beberapa hal: (i) jumlah kepemilikan saham pada BUMN; (ii) laba bersih setelah pajak *(earning after tax)*; (iii) besarnya *pay out* ratio; (iv) rencana strategis BUMN dalam melakukan ekspansi usaha, privatisasi, dan *merger* serta (v) kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi kinerja masing-masing BUMN. Adapun penyumbang terbesar pada bagian laba BUMN adalah sektor pertambangan yang salah satunya berasal dari PT Pertamina (Persero) yang menyumbang sebesar Rp7,9 triliun. Selain itu peningkatan signifikan terdapat pada sektor jasa lain-lain yang meningkat 373 persen dari TA 2005. Dalam sektor ini, bagian laba terbesar yang diterima oleh Pemerintah berasal dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Setoran PT PPA TA 2006 sebesar Rp188,54 miliar meningkat tajam 377 persen dibanding dengan setoran tahun 2005 yang sejumlah Rp39,44 miliar. Peningkatan setoran PT PPA ini antara lain disebabkan karena tingginya laba bersih tahun 2005 (Setoran Hasil Pengelolaan) yang dibagikan pada TA 2006.

Sedangkan sumber PNBP yang berasal dari penerimaan SDA meliputi SDA minyak bumi dan gas alam, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Kenaikan sumbangan penerimaan SDA terhadap PNBP tahun 2006 antara lain dipengaruhi berbagai faktor seperti tingkat lifting migas, harga minyak mentah di pasar internasional serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kontribusi penerimaan SDA berasal dari Pendapatan pertambangan yang meningkat lebih dari 100 persen dibanding dengan tahun 2005 (tahun 2006: Rp6,8 triliun dan tahun 2005: Rp3,1 triliun) dan pendapatan minyak bumi yang naik sekitar 70 persen dari tahun 2005 (tahun 2006: Rp125,1 triliun dan tahun 2005: Rp72,8 triliun). Penerimaan SDA pertambangan umum bersumber dari iuran tetap *(landrent*), dan iuran produksi/eksploitasi *(royalty).* Penerimaan PNBP mencapai sasaran meskipun *lifting* minyak di bawah asumsi dan apresiasi nilai tukar rupiah membawa konsekuensi penurunan PNBP yang berasal dari migas. Sementara itu, realisasi PNBP non-migas, khususnya PNBP Non-Migas dan dividen BUMN melebihi sasaran. Perkembangan dan perbandingan Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Peneriman Hibah dari TA 2004 s.d. 2006, dapat dilihat pada Grafik 7.

www.peraturan.go.id



Grafik 7: Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah
TA 2004 - 2006

Meningkatnya penerimaan perpajakan sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan *tax ratio* yaitu peningkatan penerimaan perpajakan dan rasionya terhadap PDB melalui langkah-langkah yang dilakukan pada tahun 2006 yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pada sistem perpajakan diantaranya dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas kebijakan perpajakan *(tax policy)* dan administrasi perpajakan. Langkah-langkah tersebut diambil untuk memperbaiki administrasi perpajakan dalam mengatasi rendahnya rasio pajak yang dipengaruhi oleh (i) sistem perpajakan yang rumit dan cenderung terjadi tumpang-tindih peraturan; (ii) kecenderungan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya; (iii) dan kondisi perekonomian yang didominasi sektor informal. Upaya nyata yang saat ini sedang dilakukan adalah perubahan UU perpajakan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Tercapainya prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan dan keadilan akan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan merangsang perkembangan ekonomi makro yang lebih baik dengan menghapuskan hambatan berinvestasi. Dampak reformasi perpajakan dapat dilihat pada Boks 1.

Boks 1: Dampak Reformasi Perpajakan terhadap Perekonomian

Perubahan UU perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara dan perekonomian, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, hal tersebut akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan (*tax potential loss*) yang diakibatkan rencana penurunan tarif dan penyederhanaan lapisan tarif, serta penerimaan PPN dan PPnBM, yang sebagian besar disebabkan oleh adanya rencana pemberian fasilitas dan perluasan basis pajak, terutama untuk komoditi ekspor. Sedangkan perubahan UU KUP, UU Kepabeanan, dan UU Cukai diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan, berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai akibat dari menurunnya beban pajak, dan meningkatnya denda dan penalti. Dampak positif dari perubahan UU perpajakan terhadap perekonomian berkaitan dengan meningkatnya daya beli masyarakat akibat turunnya beban pajak yang akan meningkatkan permintaan domestik, dan selanjutnya akan meningkatkan produksi dalam negeri.

www.peraturan.go.id

Dalam jangka panjang, reformasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif, serta dapat lebih meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia. Dengan demikian, pada gilirannya akan dapat memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan perpajakan, dan mendorong berkembangnya perekonomian dalam jangka panjang.

(Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2007).

Perkembangan PNBP dipengaruhi perkembangan variabel ekonomi makro dan kebijakan Pemerintah

Realisasi penerimaan pajak tersebut di atas ditentukan oleh beberapa faktor penentu yaitu indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Selain itu penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak internasional. Harga minyak internasional yang yang mengalami kenaikan dari USD 51,8 per barel pada tahun 2005 menjadi USD 56,8 per barel TA 2006, belum memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dari sektor pertambangan, khususnya PPh, PPN dan PBB. Hal ini karena terkompensasi oleh belum terpenuhinya realisasi *lifting* minyak Indonesia. Tingkat suku bunga yang menurun di tahun 2006 secara keseluruhan tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan secara keseluruhan mengingat kontribusi yang relatif rendah dari PPh dari transaksi keuangan.

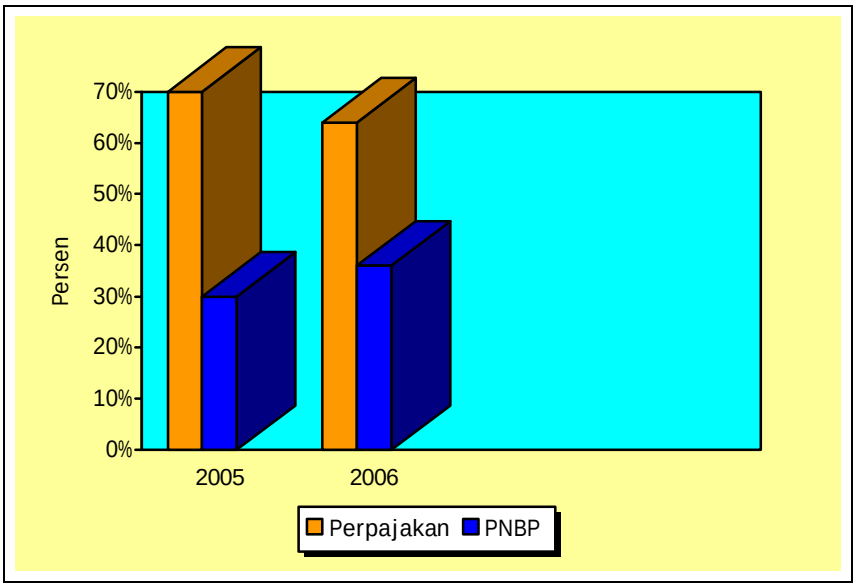
Yang perlu dicatat adalah walaupun penerimaan pajak TA 2006 meningkat, namun kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan dalam negeri hanya sekitar 64 persen atau lebih kecil dibandingkan dengan TA 2005 sebesar 70 persen. Dalam jangka panjang, diharapkan sumbangan sektor perpajakan semakin dominan terhadap penerimaan negara yang dapat mendukung ketahanan fiskal.

Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2006 dipengaruhi juga oleh perkembangan berbagai variabel ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan Pemerintah antara lain: (i) optimalisasi dan intensifikasi PNBP, baik yang bersumber dari SDA, baik migas, pertambangan umum dan kehutanan, maupun non-SDA seperti telekomunikasi, kepolisian, pertanahan, pengembalian pinjaman RDI; (ii) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan penerapan *good corporate governance*; dan (iii) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP oleh kementerian negara/lembaga ke kas negara.

Realisasi PNBP meningkat sebesar Rp80 triliun dibandingkan tahun 2005

Realisasi PNBP TA 2006 adalah sebesar Rp226,9 triliun, atau meningkat sekitar Rp80 triliun dibanding dengan realisasi PNBP TA 2005 yang hanya sebesar Rp146,9 triliun. Jika kontribusi perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri TA 2006 menurun 6 persen dibanding TA 2005 (TA 2006 sebesar 64 persen dan TA 2005 sebesar 70 persen), maka kontribusi PNBP TA 2006 meningkat sebesar 35 persen dibanding dengan kontribusi pada TA 2005 yang sebesar 30 persen. Rasio realisasi PNBP terhadap PDB adalah 6,8 persen. Kontribusi PNBP yang meningkat ini diharapkan dapat berlangsung terus dalam jangka panjang sehingga dapat mendukung kesinambungan fiskal. Rasio Penerimaan Perpajakan dan PNBP terhadap Pendapatan Negara pada TA 2005 dan 2006 dapat dilihat pada Grafik 8.

www.peraturan.go.id



Grafik 8: Rasio Penerimaan Perpajakan dan PNBP terhadap Pendapatan Negara TA 2005 dan 2006

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2006 mencapai Rp1,83 triliun atau 43,3 persen dari sasaran yang ditetapkan APBN-P TA 2006. Jika dibandingkan dengan TA 2005, realisasi Penerimaan Hibah TA 2006 meningkat tajam sebesar 41 persen dari sejumlah Rp1,3 triliun. Perkembangan hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam tiga tahun terakhir terkait erat dengan terjadinya bencana alam yang melanda berbagai daerah khususnya di tahun 2006 seperti bencana alam dan gempa bumi dan gelombang tsunami yang menerpa sebagian besar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pada penghujung tahun 2004, yang kemudian disusul dengan gempa bumi di Pulau Simeuleu pada Maret 2005 dan gempa bumi yang melanda Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 serta letusan gunung berapi.

2. Belanja Negara

Sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal, volume realisasi anggaran belanja negara tahun 2006 bertambah besar jika dibandingkan dengan TA 2005 dengan peningkatan sebesar Rp155,5 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 31,6 persen. Ditinjau dari komposisi, maka belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer untuk daerah. Pada tahun 2006, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar Rp78,8 triliun. Jumlah alokasi tersebut pada dasarnya diprioritaskan untuk menambah anggaran pendidikan, subsidi, dan dana untuk penanggulangan bencana.

Faktor eksternal dan internal berpengaruh terhadap volume belanja pemerintah

Apabila dibandingkan dengan tahun 2005, pada tahun 2006 terjadi peningkatan volume anggaran belanja pemerintah pusat yang cukup signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan indikator-indikator ekonomi makro khususnya harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia crude oil price*), nilai tukar rupiah dan suku bunga SBI 3 bulan, selain berbagai kebijakan internal yang diambil pemerintah dalam menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seperti implementasi sistem penganggaran yang baru sejak tahun 2005. Pengaruh dari masing-masing indikator dan kebijakan tersebut adalah: (1) kenaikan harga minyak mentah menyebabkan membengkaknya subsidi BBM dan subsidi listrik sebagai akibat naiknya biaya produksi. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah telah mengambil langkah menyesuaikan harga BBM di bulan Maret dan Oktober 2005 serta kenaikan tarif listrik di bulan Mei 2005; (2) kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, program kompensasi pengurangan subsidi BBM di bidang pendidikan,

www.peraturan.go.id

kesehatan dan infrastruktur perdesaan, pemberian subsidi langsung tunai, serta bantuan APBN untuk kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam tahun 2005; (3) penerapan sistem *unified budget* tahun 2005 mengakibatkan keterlambatan penerbitan DIPA 2005 yang berimbas pada tidak dapat terserapnya anggaran 2005 secara maksimal, sehingga hal tersebut diakomodasi dengan penerbitan DIPA luncuran atas dana yang tidak terserap tersebut di tahun 2006. (Lihat Boks 2)

Boks 2: DIPA LUNCURAN (DIPA-L)

Upaya Pemerintah dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai tujuan bernegara telah dimanifestasikan melalui gelombang reformasi publik yang telah dimulai beberapa tahun belakangan ini. Sejalan dengan itu, reformasi manajemen keuangan pemerintah telah berdampak pada perubahan masif atas sistem dan organisasi di lingkup Departemen Keuangan.

Lahirnya Undang-Undang di bidang keuangan negara (reformasi hukum) yang dilanjutkan dengan restrukturisasi organisasi (reformasi institusi) mensyaratkan perubahan terutama terkait dengan business process pengelolaan keuangan negara. Kenyataan adanya masa transisi reformasi ini mengakibatkan adanya keterlambatan pengesahan dokumen anggaran kementerian negara/lembaga yang berdampak pada perekonomian nasional yaitu minimnya daya serap anggaran selama masa transisi tahun 2005. Rendahnya daya serap APBN TA 2005 akhirnya telah membuat pemerintah melaksanakan kebijakan meluncurkan sejumlah dana yang belum terpakai tersebut dalam DIPA Luncuran (DIPA-L).

DIPA-L adalah dokumen pelaksanaan anggaran dari peluncuran program/ kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006 yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Dasar hukum diterbitkannya DIPA-L adalah Perdirjen No. PER-65/PB/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-55/PB/2005 tentang Petunjuk Teknis Peluncuran Program/Kegiatan yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2006. Adapun kriteria DIPA-L yang disetujui berdasarkan UU APBN-P No. 9 Tahun 2005 meliputi: (1) pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga yang telah dikontrakkan selambat-lambatnya akhir bulan November 2005 dan masa penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya akhir bulan April 2006, (2) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, (3) pelaksanaan program kompensasi BBM.

Dana yang dialokasikan untuk DIPA-L TA 2006 sejumlah Rp15,15 triliun yang tersebar pada belanja pegawai Rp 310,4 miliar, belanja barang Rp2,04 triliun, belanja modal Rp6,81 triliun, belanja bantuan sosial Rp1,98 triliun dan belanja lain-lain sebesar Rp 4,01 triliun. Sumber pembiayaan untuk DIPA-L didominasi oleh rupiah murni (63,25 persen), pinjaman luar negeri (17,82 persen), PNBP (10,63 persen) dan Hibah (8,30 persen). Sejalan dengan kriteria program/kegiatan dalam DIPA-L tersebut di atas, alokasi DIPA-L terbesar diperuntukkan bagi bagian anggaran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias sejumlah Rp3,5 triliun atau sekitar 23 persen dari total dana yang dialokasikan. Dana sejumlah tersebut di atas pada akhir tahun 2006 telah terealisasikan 58,1 persen (Rp2,08 triliun). Prioritas kedua yang tercermin melalui besarnya alokasi DIPA-L ada pada bagian anggaran Departemen PU, Departemen Kesehatan dan Departemen Perhubungan.

Pada akhir tahun 2006, total pagu senilai Rp15,15 triliun hanya dapat terserap sekitar 46 persen atau sejumlah Rp6,94 triliun dengan rincian: realisasi

www.peraturan.go.id

belanja pegawai sebesar Rp211,78 miliar (68 persen dari pagu belanja pegawai), realisasi belanja barang sebesar Rp1,26 triliun (62 persen dari pagu belanja barang), belanja modal Rp3,84 triliun (56 persen dari pagu belanja modal), realisasi bantuan sosial sebesar Rp1,56 triliun (79 persen dari pagu bantuan sosial) dan realisasi belanja lain-lain Rp71,77 miliar (2 persen dari pagu belanja lain-lain).

Minimnya realisasi DIPA-L ini disebabkan antara lain ada beberapa kementerian negara/lembaga yang tidak menggunakan dana yang telah dialokasikan tersebut seperti Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemilihan Umum termasuk dana penerusan pinjaman serta subsidi. Selanjutnya, bagian 23 persen dari total pagu DIPA-L yang diperuntukkan bagi BRR NAD Nias hanya terealisasi sebesar 54,01 persen dan dana sejumlah Rp2,6 triliun yang dialokasikan buat Departemen PU hanya terealisasi sekitar 60 persen. Secara rata-rata realisasi DIPA-L masing-masing departemen lebih dari 50 persen.

Dilihat dari realisasi DIPA-L berdasarkan fungsi, maka realisasi terbesar ada pada fungsi pelayanan umum (37,2 persen dari total realisasi keseluruhan), diikuti oleh fungsi ekonomi (21,7 persen), fungsi kesehatan (14,1 persen) serta fungsi perumahan dan fasilitas umum (12,2 persen).

Belanja Pemerintah dilihat dari fungsinya memiliki 2 fungsi yaitu menjalankan mesin birokrasi atau roda pemerintahan dan merangsang/ menggerakkan kegiatan ekonomi secara umum. Terkait dengan fungsi menjalankan roda pemerintahan, secara umum terdapat empat fungsi yang mendapat prioritas tinggi dalam penganggaran pemerintah pusat, meliputi fungsi pelayanan umum, pendidikan, pertahanan dan ekonomi. Dalam dua tahun terakhir alokasi belanja pemerintah telah difokuskan pada fungsi pelayanan umum di mana di tahun 2005 alokasi belanja untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp278,5 triliun (67,65 persen dari total alokasi belanja pemerintah) dengan realisasi sebesar Rp255,6 triliun atau sebesar 70,8 persen. Tidak tercapainya target realisasi dikarenakan perubahan sistem penganggaran menjadi *unified budget* pada tahun 2005 tersebut.

Alokasi belanja untuk fungsi pelayanan umum mencapai Rp304,4 triliun atau meningkat 8,4% dari tahun 2005

Program-program pelayanan umum yang belum tercapai di tahun 2005 kemudian dialokasikan ke dalam anggaran tahun 2006 yang tercermin dalam kenaikan alokasi belanja untuk fungsi pelayanan umum yaitu mencapai Rp304,4 triliun atau meningkat 8,4 persen dari tahun 2005 yang meliputi program-program yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk pembayaran bunga utang, subsidi dan transfer lainnya serta pembiayaan lain-lain. Besarnya anggaran berkaitan dengan perubahan indikator ekonomi yang berpengaruh pada asumsi pengeluaran dan kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan BBM serta anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias (lihat Boks 3).

Kebijakan lainnya seperti pembatalan kenaikan tarif dasar listrik dan program *debt switching* surat utang negara (SUN) juga turut mempengaruhi kenaikan anggaran dengan menaikkan subsidi dan penyelesaian bunga utang. Untuk fungsi pendidikan, alokasi belanja ditujukan bagi penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa yang mendukung program Wajib Belajar 9 tahun (alokasi 2006 mencapai Rp47 triliun atau meningkat 43 persen dari TA 2005). Sedangkan fungsi pertahanan membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk mengembangkan program pertahanan integratif; pengembangan pertahanan matra darat, laut dan udara; serta pengembangan potensi dukungan pertahanan. Terakhir, fungsi ekonomi terutama sekali untuk mengatasi dampak langsung kenaikan BBM dan meningkatkan prasarana pedesaan.

www.peraturan.go.id

Boks 3: BRR NAD-Nias

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nangroe Aceh Darussalam (NAD)-Nias merupakan badan yang bertanggung jawab melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam tsunami dan gempa bumi di wilayah Propvinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 yang selanjutnya ditetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005. Badan ini memiliki 6 bidang yang mengurusi langsung masalah-masalah rehabilitasi dan rekonstruksi serta satu kesekretariatan. Fokus dari masing-masing bidang tersebut meliputi perencanaan; pemberdayaan kelembagaan masyarakat; perumahan, infrastruktur dan tata guna lahan; pemberdayaan ekonomi dan usaha; pembangunan keberagamaan, sosial dan budaya serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Sementara dari sisi pendanaan, BRR NAD-Nias mengelola dana yang bersumber dari APBN dan non-APBN.

Dari total dana APBN yang dikelola pada tahun 2006 sebesar Rp14,1 triliun, terdapat dana DIPA Luncuran (DIPA-L) sebesar Rp3,6 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,08 triliun (58,62 persen), dan DIPA Umum TA 2006 sebesar Rp10,5 triliun dengan realisasi sebesar Rp7,9 triliun (75,05 persen). Sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk belanja modal (belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan serta lain-lain belanja untuk perbaikan infrastruktur) yang mencapai Rp6,6 triliun, dan belanja bantuan sosial (pendidikan, beasiswa, lembaga peribadatan dan lainnya) yang mencapai Rp4,8 triliun. Realisasi dari masing-masing jenis belanja tersebut adalah Rp4,6 triliun dan Rp3,6 triliun. Meskipun total keseluruhan realisasi anggaran belanja pada TA 2006 mencapai 79,91 persen atau meningkat tajam bila dibandingkan dengan TA 2005 yang hanya sekitar 10,45 persen, tetapi BRR NAD-Nias masih belum berhasil mengatasi kendala dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini terlihat dengan adanya dana *trust fund* yang merupakan dana DIPA-Umum TA 2006 yang telah ditarik dari Kas Negara tetapi belum digunakan untuk pembelanjaan dengan nilai sebesar Rp2,2 triliun. Dengan demikian, realisasi DIPA Umum TA 2006 pada BRR NAD-Nias sesungguhnya adalah sebesar Rp5,7 triliun, atau hanya sebesar 54,01 persen.

Sementara itu, dana yang *off budget* meliputi bantuan ataupun komitmen dari lembaga dalam dan luar negeri seperti bantuan sosial kredit mikro, hibah *Recovery of Aceh Nias Trust Fund* (RANTF), komitmen NGO, bantuan ADB dan komitmen dari multi donor dengan realisasi mencapai Rp454,9 milyar, USD1.868,2 juta dan 79,2 juta Euro.

Diharapkan dengan realisasi pelaksanaan anggaran yang berkesinambungan ini mampu merangsang pertumbuhan wilayah Aceh-Nias. Pembangunan infrastruktur akan mampu mengurangi jumlah wilayah yang terisolir secara geografis, sehingga mempercepat tumbuhnya kekuatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Meskipun pada saat ini pembangunan masih diutamakan pada sektor perumahan yang kurang berdampak langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi hal dimaksud menjadi dasar bagi tumbuhnya suasana yang kondusif dalam berusaha. Dengan terpenuhinya perumahan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat akan merangsang mereka untuk berusaha lebih keras bangkit dari keterpurukan akibat tsunami dan gempa bumi tahun 2004.

(Sumber : Laporan Keuangan BRR NAD-Nias)

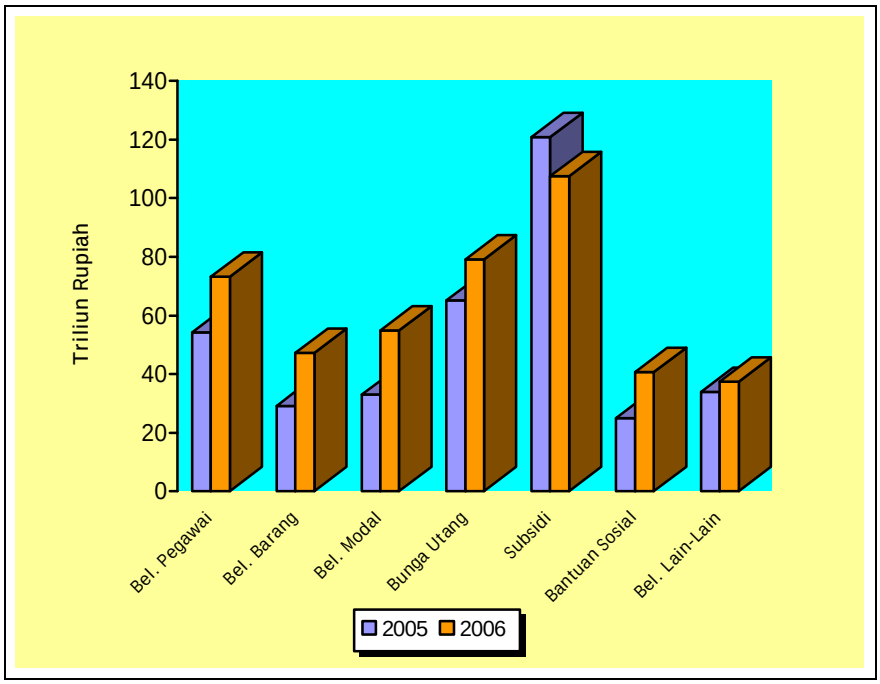
Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp440,3 triliun

Secara keseluruhan, dari sekitar Rp440,3 triliun Belanja Pemerintah Pusat tahun 2006, subsidi masih menempati urutan teratas belanja yaitu sekitar Rp107,4 triliun atau menurun 11,04 persen dibandingkan TA 2005. Beban subsidi

www.peraturan.go.id

yang sangat besar terutama ditujukan untuk subsidi BBM dan non-BBM. Dari sisi BBM, subsidi yang membesar disebabkan naiknya harga minyak mentah internasional dan konsumsi BBM yang cenderung membesar. Sementara untuk non-BBM, terutama diakibatkan peningkatan subsidi listrik melalui PT PLN, subsidi pangan melalui Perum Bulog, subsidi pupuk bagi pertanian dan subsidi bagi BUMN yang mendapat tugas melaksanakan pelayanan publik. Subsidi listrik berkaitan dengan naiknya biaya produksi listrik akibat naiknya harga BBM, sementara subsidi lainnya berhubungan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public service obligation*).

Pemerintah juga merealisasikan belanja modal sekitar Rp54,9 triliun dan bantuan sosial sekitar Rp60,7 triliun untuk perbaikan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Jumlah ini melonjak masing-masing sebesar 67 persen dan 63 persen bila dibandingkan dengan tahun 2005. Untuk mendukung roda kepemerintahan, pemerintah juga mengalokasikan kenaikan yang besar untuk belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar 35 persen dan 62 persen bila dibandingkan tahun 2005. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan melalui perbaikan pendapatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, dan melalui penyediaan belanja barang ditujukan untuk mendukung pengembangan jumlah dan jenis kegiatan pemerintah, serta pembukaan kantor perwakilan RI di luar negeri, selain untuk penyesuaian harga. Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2005 dan 2006 dapat dilihat pada Grafik 9.



Grafik 9: Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2005 dan 2006

Upaya pengentasan kemiskinan

Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan atas dua, yaitu pengeluaran yang berdampak *tidak langsung* terhadap kemiskinan (seperti pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perumahan) dan pengeluaran yang berdampak *langsung* terhadap kemiskinan (seperti subsidi dan transfer dana tunai). Di tahun 2006, komitmen pemerintah terhadap program pendidikan yang diharapkan dapat secara tidak langsung meningkatkan kapasitas masyarakat untuk

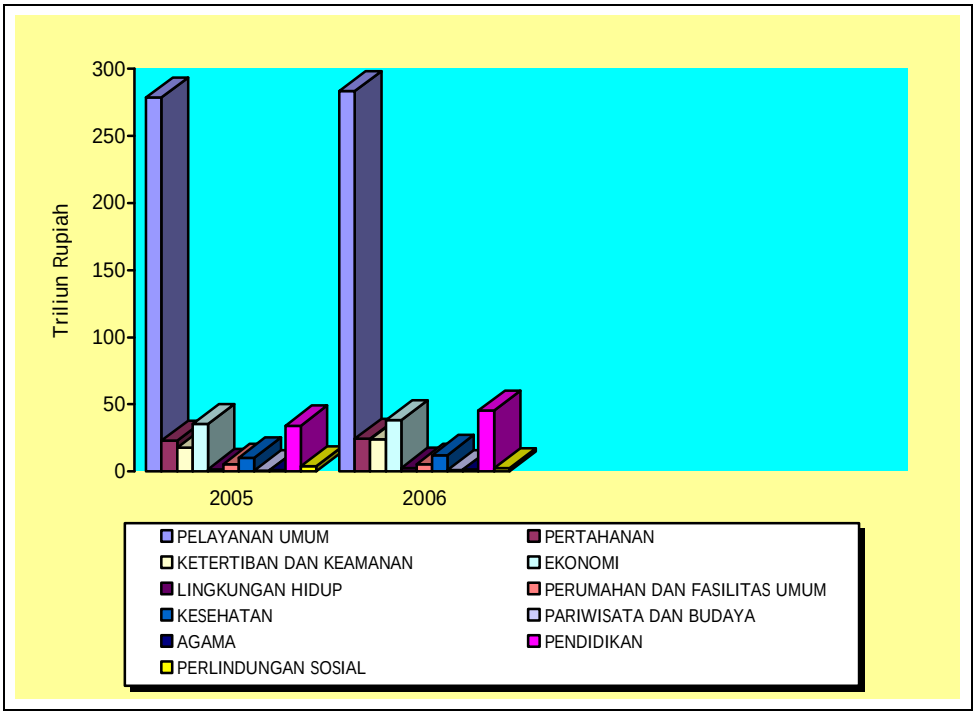
www.peraturan.go.id

memutuskan rantai kemiskinan ditunjukkan dengan meningkatnya alokasi anggaran pendidikan sebesar 50 persen pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan anggaran pendidikan tahun 2006 tersebut juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan program BOS yang membebaskan 70,3 persen siswa wajib belajar dan menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25 persen pada tahun 2005 menjadi 1,5 persen pada tahun 2006.

Alokasi dana kesehatan

Sedangkan alokasi dana kesehatan juga meningkat sebesar 27 persen (data sebelum APBN-P TA 2006). Anggaran kesehatan ini antara lain direalisasikan dengan bantuan kesehatan gratis, peningkatan jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu serta Program Imunisasi Nasional. Selain itu, dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, HIV/AIDS, dan demam berdarah.

Bencana alam yang menimpa Indonesia telah membuat Pemerintah untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih intensif. Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian terutama dalam kaitannya dalam pemberian akses penduduk terhadap sumber daya dan pasar yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Realisasi anggaran belanja TA 2005 untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum yang tidak memenuhi target yang dianggarkan yaitu hanya mencapai 76,1 persen atau sebesar Rp4,216 triliun tetap didorong melalui penyediaan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum TA 2006 sebesar Rp5,11 triliun. Alokasi ini diharapkan dapat memacu pembangungan infrastruktur dan perumahan melalui program-program seperti pengembangan perumahan, pemberdayaan komunitas pemukiman, penyediaan air minum dan perumahan serta pemukiman lainnya. Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi pada TA 2005 dan 2006 dapat dilihat pada Grafik 10.



Grafik 10: Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2005 dan 2006

Total realisasi Belanja Negara TA 2006 adalah sebesar Rp667,1 triliun atau sebesar 95 persen dari anggaran yang ditetapkan. Angka ini meningkat cukup signifikan dibanding dengan realisasi Belanja Negara semester I tahun 2006 sebesar 21 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

www.peraturan.go.id

Realisasi belanja negara sebesar Rp667,1 triliun

pada TA 2006 adalah sebesar Rp440,0 triliun atau mencapai 92 persen dari yang dianggarkan dan meningkat 30 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2005. Peningkatan realisasi belanja Pemerintah Pusat ini antara lain disebabkan oleh perkembangan susunan kementerian lembaga, perkembangan jumlah Bagian Anggaran (BA) dan perubahan nomenklatur atau pemisahan suatu unit organisasi dari organisasi induknya atau penggabungan organisasi. Di tahun 2006, jumlah BA adalah 75 bertambah 4 BA dari tahun 2005.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah pusat yang lebih tinggi juga disebabkan oleh adanya (i) kegiatan dalam DIPA 2005 yang diluncurkan ke tahun 2006; (ii) tambahan anggaran pendidikan yang cukup signifikan, dalam upaya untuk memenuhi amanat UUD 1945 terkait dengan anggaran pendidikan. Realisasi belanja pemerintah pusat yang cukup tinggi tersebut pada dasarnya telah mengacu pada arah kebijakan fiskal yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diarahkan untuk mendukung proses konsolidasi fiskal, juga ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara dengan tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pada tahun 2006 tidak otomotis atau serta merta mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Minimnya kapasitas SDM kerap menjadi kendala dalam merespon lapangan kerja yang ada. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk memadukan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas SDM. Upaya tersebut dimanifestasikan melalui peningkatan belanja Pemerintah Pusat yang bertujuan menstimulus pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan upaya pemerataan *(growth with equity)* terutama melalui pengeluaran untuk program-program pemihakan yang konkret, intensif dan konsisten untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti dari anggaran subsidi dan program bantuan langsung tunai yang semakin meningkat dengan tujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan *(vicious circle of poverty).* Bantuan Langsung Tunai tahun 2006 yang dianggarkan sebesar Rp18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Begitu juga dengan realisasi bantuan sosial yang memiliki pengaruh langsung dalam pengentasan kemiskinan meningkat jumlahnya dari Rp24,9 triliun menjadi Rp40,7 triliun pada tahun 2006.

Jika dilihat dari komposisi belanja pemerintah pusat, maka subsidi merupakan pos APBN yang mendapat alokasi dana terbesar dibanding belanja pemerintah pusat lainnya (tahun 2006=19 persen dari total belanja; tahun 2005 = 28 persen dari total belanja pemerintah). Meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat juga terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan lain seperti program beras untuk rakyat miskin, bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, bantuan petani, nelayan dan bantuan untuk sekolah/pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan seperti yang telah dikemukakan di atas. Program-program yang direalisasikan melalui eksekusi belanja Pemerintah yang semakin meningkat ini sejalan dengan upaya global yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Millenium Development Goals* yang salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan. Adapun dampak realisasi belanja pemerintah pusat terhadap sektor riil tercermin dari meningkatnya persentase belanja modal pemerintah terhadap PDB di tahun 2006 sebesar 1,6 persen, meningkat dibanding tahun 2005 yang hanya mencapai 1,1 persen. Meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah pusat menjadi salah satu sumber stimulus fiskal di tahun 2006.

Dari hasil perubahan besaran APBN TA 2006, belanja negara yang dianggarkan pemerintah jika dibandingkan dengan target semester I tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp50,6 triliun yang ditujukan untuk subsidi, bunga utang, bencana alam, subsidi langsung tunai, dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Di luar alokasi tambahan belanja yang bersifat mendesak tersebut, terdapat dana sekitar Rp4,5 triliun yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Tambahan anggaran pendidikan

www.peraturan.go.id

tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, menjamin akses warga miskin untuk memperoleh pendidikan, rehabilitasi gedung sekolah, biaya program wajib belajar, dan pengangkatan guru bantu/honorer.

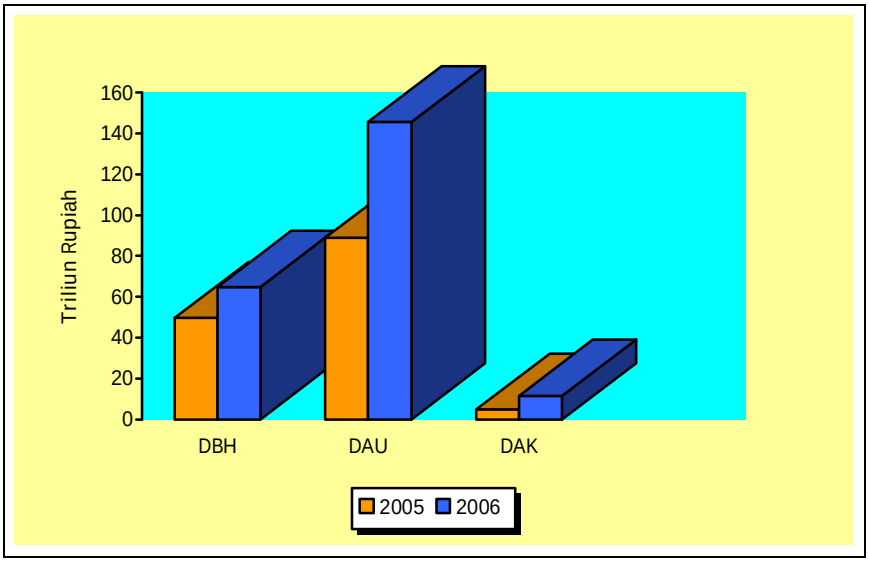
Realisasi transfer untuk daerah Rp226,2 triliun

Realisasi Transfer untuk Daerah pada TA 2006 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp226,2 triliun atau 102 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp75,9 triliun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2005. Peningkatan realisasi anggaran Transfer untuk Daerah terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk (*i*) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (*ii*) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (*iii*) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah *(vertical fiscal imbalance)* dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance)*; (*iv*) meningkatkan pelayanan publik; serta (*v*) meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja.

Dengan otonomi daerah, Kepala Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar, dan untuk menjalankan kewenangan itu, bagian APBN juga semakin banyak yang ditransfer ke daerah untuk dikelola dalam APBD. Dana perimbangan serta dana otonomi khusus meningkat yaitu dari hanya Rp150,4 triliun pada TA 2005 menjadi Rp226,2 triliun pada TA 2006 atau meningkat 50 persen. Sedangkan Dana Alokasi Umum yang diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan PNS daerah, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan umum mengalami kenaikan pesat sebesar 64 persen dari Rp 88,7 trilun pada TA 2005 menjadi Rp145,6 triliun pada TA 2006 dengan realisasi pada tahun 2006 hampir 100 persen.

Selain itu, anggaran untuk Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan tajam dari Rp4,7 triliun pada TA 2005 menjadi Rp11,6 triliun pada TA 2006. Sedangkan realisasi DAK TA 2006, hampir mencapai 100 persen yaitu sebesar Rp11,4 triliun dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan negara dalam APBN, baik perpajakan maupun sumber daya alam, yang dibagihasilkan kepada daerah meningkat dari Rp49,7 triliun TA 2005 menjadi Rp64,9 triliun (naik 31 persen). Secara keseluruhan kontribusi belanja daerah terhadap PDB 2006 adalah 6,78 persen. Dengan demikian, belanja APBN TA 2006 lebih ekspansif dibanding dengan realisasi belanja APBN TA 2005.

Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan pada TA 2005 dan 2006 dapat dilihat pada Grafik 11.



Grafik 11: Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan TA 2005 dan 2006

www.peraturan.go.id

3. Pembiayaan

Defisit anggaran sebesar Rp29,1 triliun

Defisit Anggaran TA 2006 adalah sebesar Rp29,1 triliun, atau 0,98 persen dari PDB, yang berarti masih berada di bawah yang telah dianggarkan. Namun, meningkat hampir 128 persen dari Defisit TA 2005 sebesar Rp14,4 triliun.

Realisasi pembiayaan sebesar Rp29,4 triliun

Realisasi Pembiayaan Anggaran pada TA 2006 mencapai Rp29,4 triliun atau 99 persen dari PDB atau 83 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp39,9 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp24,3 triliun dibandingkan dengan realisasi TA 2005. Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2006 adalah sebesar Rp55,9 triliun atau 101 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006. Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2006 meningkat tajam dibanding dengan realisasi TA 2005, karena untuk menutup defisit anggaran yang semakin besar. Dilihat dari struktur sumber pembiayaan, terdapat perbaikan di mana defisit anggaran negara dibiayai melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yaitu 68 persen dari total sumber pembiayaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan fokus Pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dari penerbitan obligasi negara.

Kondisi pasar SUN selama tahun 2006 diwarnai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan SUN. Hal ini nampak dari meningkatnya volume rata-rata perdagangan SUN harian dari sekitar Rp2,3 triliun per hari pada bulan Januari 2006 menjadi Rp4,4 triliun per hari pada bulan Desember 2006. Hal ini kontras dengan tahun sebelumnya yang cenderung menunjukkan trend menurun sampai akhir tahun. Perbaikan kondisi makro ekonomi yang ditandai dengan rendahnya inflasi dan turunnya suku bunga referensi Bank Indonesia, diikuti dengan kestabilan politik dan peningkatan rating/*outlook sovereign credit*, menjadi driver utama peningkatan aktivitas perdagangan SUN tahun 2006.

Adapun rata-rata perdagangan harian obligasi negara sepanjang tahun 2006, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan rata-rata perdagangan harian obligasi negara lima tahun terakhir dapat dilihat pada Daftar 39 (Laporan Pertanggungjawaban Surat Utang Negara Tahun 2006) pada Tabel 23.

Sementara itu, kepemilikan SUN per akhir tahun 2006 menunjukkan *shifting* dari investor perbankan ke kelompok investor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan SUN pada perbankan dari Rp290 triliun pada akhir tahun 2005 menjadi Rp269 triliun pada akhir tahun 2006. Kelompok investor lain hampir semua mengalami peningkatan, kecuali Dana Pensiun yang cenderung stagnan. Khususnya untuk Asing terdapat peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp11 triliun pada akhir tahun 2004 menjadi Rp31 triliun pada akhir tahun 2005, dan Rp55 triliun pada akhir tahun 2006. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor asing yang semakin meningkat terhadap SUN. Namun di lain pihak, meningkatnya kepemilikan SUN oleh pihak asing juga perlu dicermati, khususnya risiko *sudden reversal* yang berpotensi membahayakan pasar SUN secara keseluruhan.

Target SUN neto ditetapkan sebesar Rp35,77 triliun dan surplus sebesar Rp214 miliar

Target APBN atas pengelolaan SUN terkait dalam tiga pos yaitu pos Surat Utang Negara (neto), Bunga Utang Dalam Negeri, dan Bunga Utang Luar Negeri. Mulai tahun 2005, DPR telah menyetujui penerapan konsep net penerbitan SUN. Net penerbitan SUN ialah selisih antara SUN yang diterbitkan dengan yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SUN di APBN ditetapkan dalam bentuk net penerbitan SUN, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SUN dan jumlah pembelian kembali. Untuk tahun 2006 target net penerbitan SUN (SUN neto) ditetapkan sebesar Rp35,77 triliun. Realisasinya mencapai Rp35,98, sehingga terdapat kelebihan dari target sebesar Rp214 miliar. Komponen utama kelebihan ini ialah adanya *temporary effect* dari *net accrued interest* sebesar kurang lebih positif Rp130 miliar.

www.peraturan.go.id

Realisasi pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdominasi Rupiah senilai Rp54,1 triliun

Selanjutnya, beban Bunga Utang Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp58,2 triliun. Sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2006 secara total mencapai Rp54,1 triliun. Dengan demikian realisasi pembayaran bunga lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar kurang lebih Rp4,1 triliun. Selisih ini diakibatkan oleh turunnya tingkat bunga SBI 3 bulan yang menjadi dasar penghitungan bunga SUN seri VR (*Variable Rate*) dan terus dilakukannya program *debt switching* yang secara terukur dan sistematis dalam jumlah yang cukup besar. Akhirnya, pos bunga utang luar negeri meliputi pembayaran bunga utang luar negeri dalam bentuk *loan* (pinjaman) maupun obligasi (SUN valas). Khusus untuk SUN valas, sepanjang tahun 2006, realisasi pembayaran bunga mencapai USD132,3 juta atau Rp1,87 triliun (dengan kurs saat transaksi).

Sumbangan RDI selama tahun 2006 sebesar Rp8.877,99 miliar ke kas Negara dan realisasi pembiayaan luar negeri minus Rp19,3 triliun

Pembiayaan lainnya berasal dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi dan perbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah seperti rekening dana investasi (RDI), rekening penjaminan, dan rekening pemerintah lainnya. Pembiayaan melalui RDI ditujukan untuk membayar sebagian utang luar negeri, membiayai keperluan yang berhubungan dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, keberhasilan program Pemerintah, menjamin ketersediaan barang guna menghindarkan kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan mempercepat perkembangan produk perbankan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi serta pembelian kembali SUN. Selama tahun 2006, RDI menyumbang sekitar Rp8.877,99 miliar ke kas negara. Akhirnya, realisasi pembiayaan luar negeri tahun 2006 adalah sebesar minus Rp19,3 triliun atau 67 persen dari pagu anggarannya dalam APBN-P TA 2006. Pembiayaan luar negeri bersaldo minus karena pembayaran cicilan pokok utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penarikan pinjaman luar negeri. Dampak APBN TA 2006 terhadap perekonomian disajikan pada Boks 4.

Boks 4: Dampak APBN TA 2006 Terhadap Perekonomian Agregat

Pada tahap perencanaan APBN TA 2006 disusun dengan asumsi semakin membaiknya perekonomian nasional dan adanya peningkatan stabilitas makroekonomi Indonesia. Hal ini terefleksikan dalam asumsi penurunan tingkat inflasi dari 8,55 persen di tahun 2005 menjadi 8 persen (APBN-P 2006) yang merupakan salah satu kondisi penting dalam upaya pemulihan kepercayaan, membaiknya nilai tukar rupiah menjadi Rp 9.300 per USD (dari Rp 9.800 per USD pada tahun 2005). APBN TA 2006 disusun berdasarkan asumsi ekonomi makro lain seperti suku bunga SBI 12 persen dan harga minyak 57USD/barel. R-APBN 2006 adalah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi jangka menengah tahun 2004 - 2009 yang mengarah kepada tiga strategi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yaitu *pro-growth, pro-employment,* dan *pro-poor*.

Dalam rangka menyeimbangkan tujuan stimulasi *(fiscal stimulation)* dan tujuan kesinambungan *(fiscal sustainability),* di tahun 2006, pengeluaran pemerintah sebesar Rp670,7 triliun, atau meningkat 28 persen dari total pengeluaran pemerintah pada TA 2005 senilai Rp509,6 triliun.

APBN TA 2006 merupakan salah satu komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi khususnya melalui pembentukan konsumsi dan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Dilihat dari realisasi belanja, maka rasio belanja pemerintah pusat terhadap PDB adalah sebesar 13 persen. Sedangkan rasio transfer untuk daerah terhadap PDB adalah sebesar 6,8 persen.

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat, salah satu komponen yang berpengaruh pada Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu belanja modal pemerintah pusat tercermin dari rasio belanja modal pemerintah pusat terhadap PDB yaitu senilai 1,7 persen. Walaupun angka ini turun dari yang diasumsikan pada APBN-P TA 2006 (1,9 persen) namun angka ini naik jika

www.peraturan.go.id

dibandingkan dengan rasio belanja pemerintah pusat TA 2005 terhadap PDB atas harga berlaku 2005 yaitu 1,3 persen. Sedangkan komponen pengeluaran pemerintah lain yang berpengaruh pada sektor riil, khususnya dalam pembentukan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan, adalah belanja pegawai (2,2 persen terhadap PDB) dan belanja barang dengan memberikan sumbangan senilai 1,4 persen terhadap PDB.

Apabila diasumsikan 67,5 persen dari total transfer untuk daerah diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa yaitu berdasarkan proporsi rata-rata APBN (Nota Keuangan dan RAPBN TA 2007), maka sumbangan konsumsi barang dan jasa daerah tahun 2006 adalah Rp152,82 triliun (4,6 persen terhadap PDB), sedangkan belanja modal daerah Rp73,58 triliun (2,2 persen terhadap PDB). Dengan demikian, total kontribusi APBN terhadap pembentukan modal tetap bruto tahun 2006 adalah sebesar Rp132,51 triliun (3,7 persen terhadap PDB).

Pada tahun 2006, jika dilihat dari sisi penggunaan, maka sebagian besar PDB digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto sebesar 24 persen. Dengan demikian dari angka tersebut pemerintah telah berperan dalam pembentukan investasi senilai 4 persen PDB sedangkan sisanya adalah swasta (20 persen). Dengan berbagai kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi maka ke depan, kontribusi investasi pemerintah dapat lebih ditingkatkan termasuk investasi swasta yang mempengaruhi perekonomian secara agregat.

Dampak APBN TA 2006 terhadap perekonomian agregat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Dampak APBN 2006 terhadap Perekonomian Agregat

No.	Rincian	Realisasi (Rp triliun)	% thd PDB
1	Konsumsi Pemerintah (a-b)	288,080	8,6
	a) Belanja barang dan jasa	310,905	9,3
	Belanja pegawai *)	72,873	2,2
	Belanja barang *)	47,066	1,4
	Belanja rutin daerah	152,816	4,6
	Belanja lainnya	38,150	1,1
	b) Pendapatan barang dan jasa	22,825	0,7
2	Pembentukan Modal Domestik Bruto	132,509	4,0
	Pemerintah Pusat	58,931	1,8
	Pemerintah Daerah	73,578	2,2
	Jumlah	420,589	12,6

Catatan:
*) merupakan belanja pegawai dan belanja barang dalam negeri

Sementara itu, persentase realisasi APBN TA 2006 terhadap PDB dapat dilihat pada Tabel 4, dan perbandingan indikator ekonomi tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat pada Tabel 5.

www.peraturan.go.id

Tabel 4
Persentase Anggaran dan Realisasi APBN TA 2006 Terhadap PDB

URAIAN	2006			
	APBN-P (Rp triliun)	% thd PDB	Realisasi (Rp triliun)	% thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah				
1. Penerimaan Perpajakan	425,04	12,73	409,07	12,26
a. Pajak Dalam Negeri	410,22	12,29	395,97	11,86
b. Pajak Perdagangan Internasional	14,82	0,44	13,23	0,40
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	229,82	6,88	226,94	6,80
a. SDA	165,69	4,96	167,47	5,02
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	22,32	0,67	22,97	0,69
c. PNBP Lainnya	41,81	1,25	36,50	1,09
3. Hibah	4,23	0,13	1,83	0,05
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	659,09	19,74	637,97	19,11
Belanja Negara				
Belanja Pemerintah Pusat				
1. Belanja Pegawai	78,90	2,36	73,25	2,19
2. Belanja Barang	55,50	1,66	47,18	1,41
3. Belanja Modal	66,72	2,00	54,95	1,65
4. Pembayaran Bunga Utang	82,49	2,47	79,08	2,37
5. Subsidi	107,62	3,22	107,43	3,22
6. Bantuan Sosial	44,59	1,34	40,71	1,22
7. Belanja Lain-lain	42,40	1,27	37,42	1,12
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat	478,22	14,33	440,02	13,18
Transfer untuk Daerah				
1. Dana Perimbangan	216,78	6,49	222,13	6,65
a. DBH	59,56	1,78	64,90	1,94
b. DAU	145,66	4,36	145,66	4,36
c. DAK	11,56	0,35	11,57	0,35
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	4,04	0,12	4,05	0,12
a. Dana Otonomi Khusus	3,48	0,10	3,49	0,10
b. Dana Penyesuaian	0,56	0,02	0,56	0,02
Jumlah Transfer untuk Daerah	220,9	6,61	226,16	6,78
Defisit Anggaran	39,98	1,2	29,14	0,87
Pembiayaan	39,98	1,2	29,42	0,88

Keterangan:
PDB sebesar Rp3.338,196 triliun (BPS)

www.peraturan.go.id

Tabel 5
Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2006 dan 2005

No.	Indikator	2005	2006	Ket.
1	Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp Triliun)	1.749,60	1.846,70	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	2.785,00	3.338,196	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	12,70	15,00	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	5,60	5,50	(1)
5	Inflasi (%)	17,11	6,60	(1)
6	Total Ekspor (USD Miliar)	85,57	100,69	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD Miliar)	66,32	79,50	(1)
8	Total Impor (USD Miliar)	57,55	61,08	(1)
9	Impor Non Migas (USD Miliar)	40,16	42,10	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	34,72	42,00	(1)
11	Rupiah/USD (Kurs Tengah Bank Indonesia)	9.830,00	9.020,00	(4)
12	Total Penerimaan Pemerintah (Rp Triliun)	516,20	637,90	(5)
13	Total Pengeluaran Pemerintah (Rp Triliun)	542,40	667,10	(5)
14	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	-26,18	32,80	(5)
15	Uang Primer (Rp Triliun)	239,80	297,08	(2)
16	Uang Beredar (Rp Triliun)			
	a. Arti Sempit (M1)	281,90	342,60	(2)
	b. Arti Luas (M2)	1.203,20	1.338,50	(2)
17	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	689,70	761,60	(2)
18	Suku Bunga (% per tahun)			
	a. SBI satu bulan	12,75	9,75	(2)
	b. Deposito 1 bulan	11,98	9,75	(2)
	c. Kredit Modal Kerja	15,92	15,35	(2)
	d. Kredit Investasi	15,43	15,38	(2)
19	Persetujuan Investasi			
	a. Domestik (Rp Triliun)	50,58	143,70	(6)
	b. Asing (USD Miliar)	13,58	13,20	(6)
20	IHSG BEJ	1.162,60	1.805,00	(4)
21	Peringkat Daya Saing Indonesia	69,00	50,00	(3)
22	Rasio Hutang terhadap PDB (DSR, %)	48,10	42,09	(3)

Sumber data:
(1) Badan Pusat Statistik
(2) Laporan Kebijakan Moneter Tri-IV BI
(3) Pidato Presiden RI Januari 2007
(4) Badan Kebijakan Fiskal, Dep. Keuangan
(5) Laporan Realisasi APBN, Dep. Keuangan

www.peraturan.go.id

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2006 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas pemerintah pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan BUN, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Untuk tahun 2006, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga yang dicakup dalam LKPP meliputi:

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kejaksaan Agung
6. Kepresidenan
7. Sekretariat Wakil Presiden
8. Departemen Dalam Negeri
9. Departemen Luar Negeri
10. Departemen Pertahanan
11. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Departemen Keuangan
13. Departemen Pertanian
14. Departemen Perindustrian
15. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Departemen Perhubungan
17. Departemen Pendidikan Nasional
18. Departemen Kesehatan
19. Departemen Agama
20. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21. Departemen Sosial
22. Departemen Kehutanan
23. Departemen Kelautan dan Perikanan
24. Departemen Pekerjaan Umum
25. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
26. Departemen Perdagangan
27. Departemen Komunikasi dan Informatika
28. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
29. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
30. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
31. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
32. Kementerian Negara Riset dan Teknologi
33. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
34. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
36. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
37. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Bappenas
38. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
39. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
40. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
41. Badan Intelijen Negara
42. Badan Pusat Statistik
43. Badan Pertanahan Nasional
44. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

www.peraturan.go.id

45. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
46. Badan Koordinasi Penanaman Modal
47. Badan Narkotika Nasional
48. Badan Meteorologi dan Geofisika
49. Badan Tenaga Nuklir Nasional
50. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
51. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
52. Badan Standarisasi Nasional
53. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
54. Badan Kepegawaian Negara
55. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
56. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias
57. Dewan Ketahanan Nasional
58. Dewan Perwakilan Daerah
59. Lembaga Sandi Negara
60. Lembaga Ketahanan Nasional
61. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
62. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
63. Lembaga Administrasi Negara
64. Kepolisian Negara Republik Indonesia
65. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
66. Komisi Pemilihan Umum
67. Komisi Pemberantasan Korupsi
68. Komisi Yudisial Republik Indonesia
69. Mahkamah Konstitusi
70. Perpustakaan Nasional
71. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
72. Arsip Nasional Republik Indonesia
73. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), meliputi:

- BA 061 - Bunga Utang
- BA 062 - Subsidi dan Transfer
- BA 069 - Belanja Lain-lain
- BA 070 - Dana Perimbangan
- BA 071 - Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus
- BA 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
- BA 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri
- BA 098 - Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman
- BA 099 - Penyertaan Modal Negara

LKPP Tahun 2006 ini mencakup:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/ kuasi organisasi pemerintah, seperti pada Otorita Batam, Otorita Asahan, Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Radio Republik Indonesia (RRI);
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset pemerintah, seperti BP Migas, BP Gelora Bung Karno, BP Komplek Kemayoran, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

Namun, sejumlah unit fiskal register belum dicakup dalam LKPP, antara lain:

- Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS); dan
- Lembaga Kantor Berita Nusantara (LKBN) Antara.

www.peraturan.go.id

LKPP tidak mencakup entitas:

- Pemerintah daerah;
- Bank pemerintah;
- Lembaga keuangan milik pemerintah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, investasi pemerintah pada perusahaan negara disajikan nilainya dalam investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara.

LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Kementerian negara/lembaga membukukan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja. Sedangkan KPPN membukukan transaksi melalui SiAP.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan termasuk entitas kementerian negara/lembaga. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, serta Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2006 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2006 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas kementerian negara/lembaga.

2. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan kompilasi Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan data yang dikelola Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, dan unit register, serta unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset negara. Data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran, investasi jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang didasarkan pada data Departemen Keuangan. Sedangkan data Penyertaan Modal Pemerintah berasal dari Kementerian Negara BUMN. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya didasarkan pada Neraca Kementerian Negara/Lembaga. Neraca Kementerian Negara/Lembaga disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Laporan Arus Kas TA 2006 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN (rekening 501.000000) dan rekening BUN (rekening 502.000000). Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

www.peraturan.go.id

Implementasi SAI tahun 2006 mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat permasalahan-permasalahan terutama organisasi dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Sampai dengan tahun 2006, beberapa kementerian negara/lembaga masih belum membentuk dan menunjuk unit akuntansi yang mengimplementasikan SAI sesuai dengan hirarki organisasi.

Permasalahan lain yang cukup berpengaruh dalam penyusunan LKPP adalah implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SABMN) di sebagian besar kementerian negara/lembaga yang masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, sebagian kementerian negara/lembaga belum melakukan inventarisasi fisik dan revaluasi atas nilai barang milik kekayaan negara. Hal ini mempengaruhi kualitas nilai aset yang ada di Neraca Pemerintah Pusat.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2006 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

(3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat

www.peraturan.go.id

kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Rekening khusus (Reksus) tidak termasuk dalam perkiraan Kas.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

www.peraturan.go.id

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.
- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut:
  a. Dana SU-005 dipinjamkan langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK;
  b. Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP yang ditunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

www.peraturan.go.id

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2006 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP Tahun 2006 belum didepresiasi.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LKPP Tahun 2006, seluruh aset tetap yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

www.peraturan.go.id

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Departemen Keuangan. Utang dalam negeri pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds* dan *variable rates bonds,* yang dikelola Departemen Keuangan.

Fixed Rate Bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara 9,25 persen sampai 15,75 persen, yang terdiri dari 34 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2007 sampai 2026 (posisi per akhir tahun 2006). Selain itu terdapat satu seri ORI, yaitu ORI001, dengan tingkat

www.peraturan.go.id

kupon 12,05 persen yang akan jatuh tempo tahun 2009. Baik obligasi jenis FR maupun ORI, dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Variable Rate Bonds-VR adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan ialah tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai akhir tahun 2006, terdapat 21 seri VR yang jatuh temponya berkisar antara tahun 2007 sampai dengan 2020. Obligasi VR adalah obligasi yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

SU-005 adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk kelanjutan pendanaan kredit program. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi untuk memberikan likuiditas. Dalam kaitan ini, maka Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan ketiga Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 18 Agustus 2004. Plafond yang tersedia sebesar Rp9,97 triliun, dengan ketentuan bahwa pinjaman yang dapat ditarik maksimum sebesar pengembalian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sampai dengan akhir Maret 2003. Sesuai dengan laporan BI pengembalian KLBI sampai dengan akhir Maret sebesar Rp3,1 triliun (dibulatkan). SU-005 akan diperhitungkan sebagai kewajiban sebesar dana yang telah ditarik. Jangka waktu pinjaman adalah 10 (sepuluh) tahun dari 29 Desember 1999 sampai dengan 10 Desember 2009.

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi perhitungan indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan tingkat bunga 0,1 persen dan jatuh tempo tahun 2025.

SRBI-1/MK/2003 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka bantuan likuiditas BI.

International Bond adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi USD (RI0014), dengan nominal penerbitan sebesar USD1.000.000.000,00. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2014 dengan tingkat kupon tetap sebesar 6,75 persen setahun, yang dibayar secara periodik dua kali setahun (*semiannually*). RI0014 diterbitkan melalui proses *bookbuilding*, dengan menggunakan jasa penjamin emisi/*underwriter*.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

www.peraturan.go.id

Nilai nominal atas utang luar negeri pemerintah merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terakhir.

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi pemerintah, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liablility* berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada LKPP ini.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Selisih kurs

(8) Selisih Kurs

Menurut SAP, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Namun, LKPP Tahun 2006 ini belum menyajikan selisih kurs atas aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

www.peraturan.go.id

A.5. LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja (kinerja) setiap kementerian negara/lembaga. Lebih lanjut, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang merupakan gabungan dari Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dilampirkan bersama dengan LKPP sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk disampaikan kepada DPR. Namun, pada tahun 2006, Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud belum dapat disajikan karena sistem pelaporan kinerja yang akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 yang akan menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 masih dalam proses penyusunan.

www.peraturan.go.id

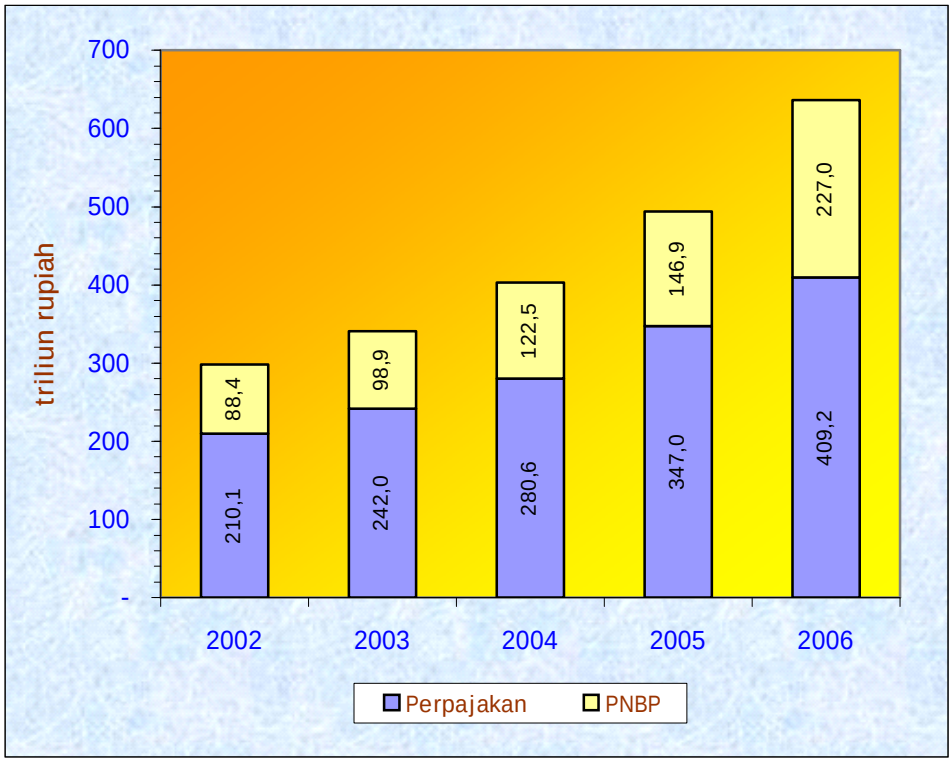
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Secara umum, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2006 mengalami peningkatan dibandingkan TA 2005. Pada sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2006 adalah sebesar Rp637.987.136.507.056, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp142.762.929.281.199 atau 28,83 persen dibandingkan dengan TA 2005. Kenaikan ini berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp62.171.905.410.408, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp80.061.755.983.490, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp529.267.887.301.

Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, hal ini terlihat pada Grafik 12.

Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP



Grafik 12: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2002-2006

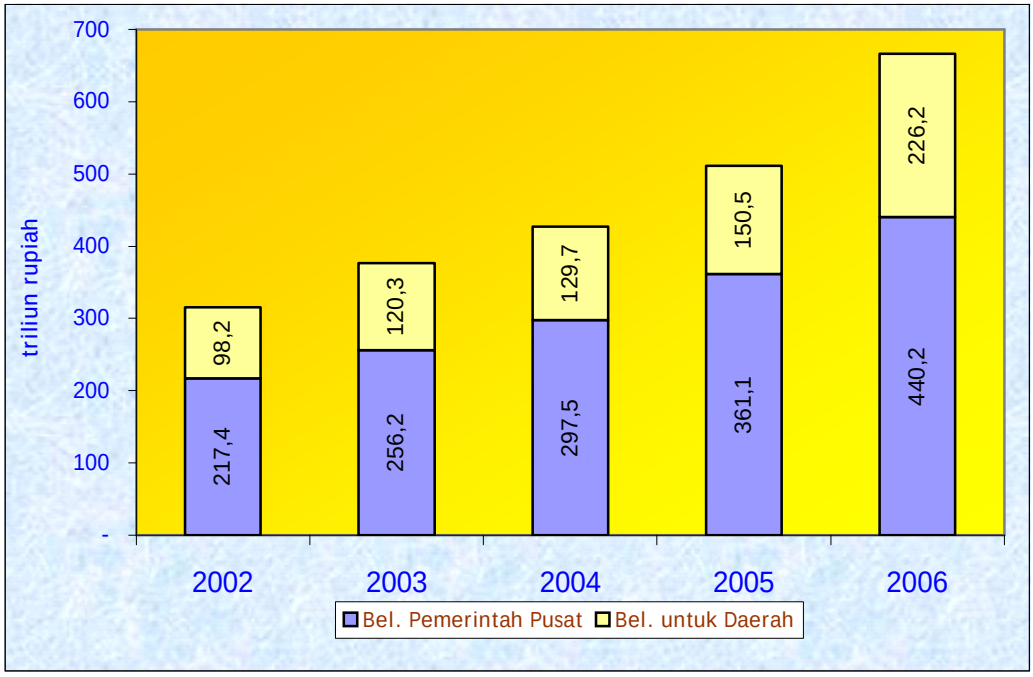
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2006 berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp409.203.019.335.450, PNBP sebesar Rp226.950.066.385.871, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1.834.050.785.735.

Pada sisi belanja, realisasi Belanja Negara pada TA 2006 adalah sebesar Rp667.128.813.065.242, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp157.496.394.903.882 atau 30,90 persen dibandingkan dengan TA 2005. Kenaikan ini disebabkan terutama karena meningkatnya pengeluaran Pemerintah pada sektor pendidikan, sektor ketertiban dan keamanan, dan dana untuk penanggulangan bencana. Selain itu, meningkatnya realisasi Belanja Negara pada TA 2006 adalah karena adanya realisasi belanja atas anggaran yang diluncurkan dari TA 2005 ke TA 2006.

Perkembangan realisasi Belanja Negara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 13.

www.peraturan.go.id

Perkembangan realisasi Belanja Negara



Grafik 13: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2002-2006

Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Negara meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer untuk Daerah. Transfer untuk Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2006 sebesar Rp667.128.813.065.242, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp440.154.197.702.786 dan Transfer untuk Daerah sebesar Rp226.179.954.328.611.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara tersebut terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp29.141.676.558.186. Defisit Anggaran ini dapat ditutupi dari Pembiayaan sebesar Rp29.415.590.251.868, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp55.982.076.550.778 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp26.566.486.298.910.

Berdasarkan Defisit Anggaran dan Pembiayaan pada TA 2006 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp273.913.693.682.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp637,99 triliun.

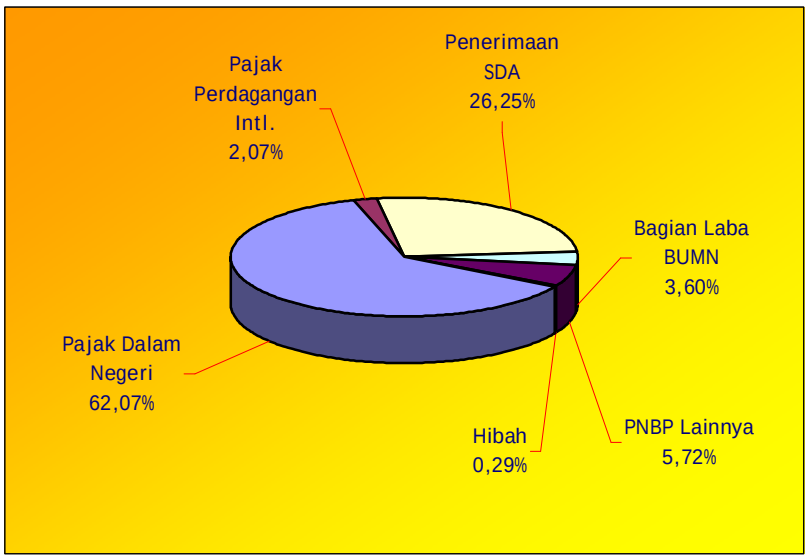
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2006 adalah sebesar Rp637.987.136.507.056, atau 96,79 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp659.115.256.135.000. Dibandingkan dengan TA 2005, Pendapatan Negara dan Hibah TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp142.762.929.281.199 atau 28,83 persen.

www.peraturan.go.id

Penerimaan Negara dan Hibah terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan (3) Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2006 dapat dilihat pada Grafik 14.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah



Grafik 14: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2006

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan Rp409,20 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2006 adalah sebesar Rp409.203.019.335.450, atau 96,27 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp425.053.080.000.000. Hal ini berarti lebih tinggi sebesar Rp62.171.905.410.408 atau 17,92 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2005.

Penerimaan Perpajakan berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak DN Rp395,97 triliun

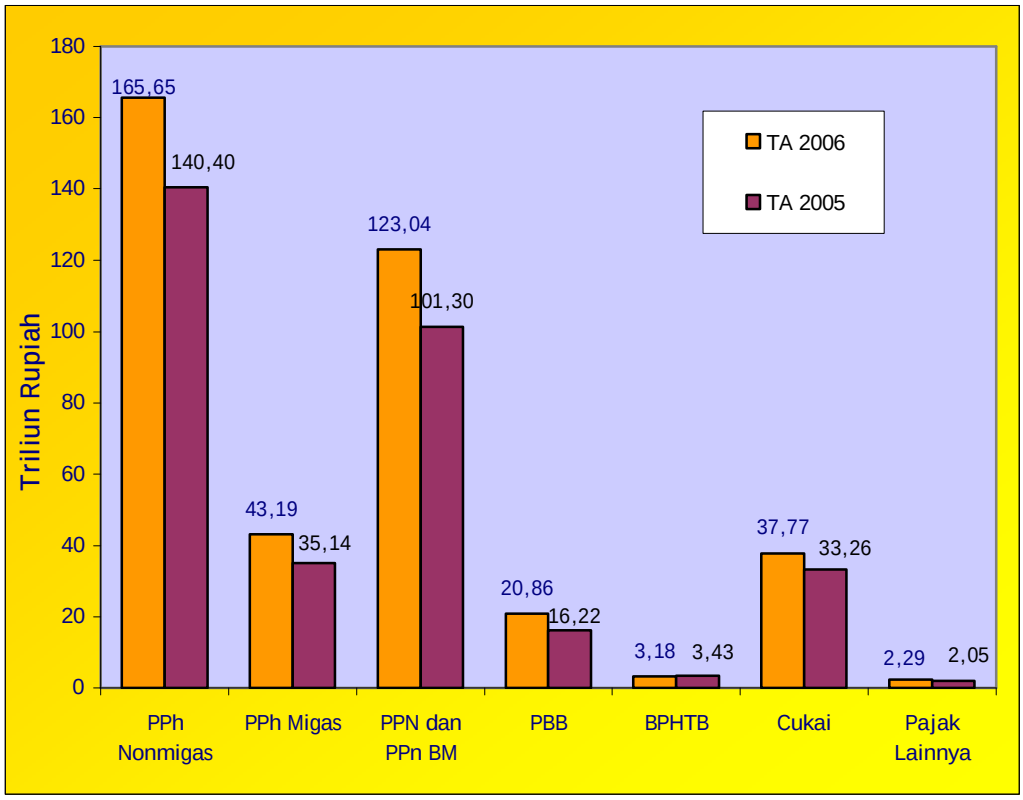
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2006 adalah sebesar Rp395.971.535.630.012, atau 96,53 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp410.226.380.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp64.179.592.620.193 atau 19,34 persen dari realisasi TA 2005. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut:

	TA 2006	TA 2005
PPh Nonmigas	Rp 165.645.237.830.836	Rp 140.398.024.435.884
PPh Migas	43.187.887.822.005	35.143.166.347.322
PPN dan PPn BM	123.035.859.568.711	101.295.752.118.716
PBB	20.858.516.906.183	16.216.693.096.637
BPHTB	3.184.469.880.249	3.431.891.899.489
Cukai	37.772.132.887.314	33.256.155.560.171
Pajak Lainnya	2.287.430.734.714	2.050.259.551.600
Total	Rp395.971.535.630.012	Rp331.791.943.009.819

Berikut adalah perbandingan realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2006 dan TA 2005. (Grafik 15)

www.peraturan.go.id

Perbandingan realisasi penerimaan pajak DN



Grafik 15: Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2006 dan 2005

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri dapat dilihat dalam Daftar 1.

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional Rp13,23 triliun

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2006 adalah sebesar Rp13.231.483.705.438, atau 89,24 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp14.826.700.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2006 mengalami penurunan sebesar Rp2.007.687.209.785 atau 13,17 persen dari realisasi TA 2005. Besarnya realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

	TA 2006	TA 2005
Bea Masuk	Rp 12.140.401.555.427	Rp 14.920.926.026.871
Pajak/Pungutan Ekspor	1.091.082.150.011	318.244.888.352
Total	Rp13.231.483.705.438	Rp15.239.170.915.223

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Dalam TA 2006, Pungutan Ekspor masih merupakan bagian dari pajak yang dikelola oleh Direktorat PNBP Ditjen Anggaran-Departemen Keuangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1994 tentang PNBP. Mulai tahun 2007, Pungutan Ekspor ini akan dikelola oleh Ditjen Pajak-Departemen Keuangan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Realisasi PNBP Rp226,95 triliun

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2006 adalah sebesar Rp226.950.066.385.871 atau 98,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp229.829.268.281.000. Hal ini berarti PNBP TA 2006 mengalami

www.peraturan.go.id

kenaikan sebesar Rp80.061.755.983.490 atau 54,51 persen dari realisasi TA 2005. Peningkatan PNBP ini diperoleh dari peningkatan yang signifikan atas semua pos PNBP yaitu Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp57.006.544.271.318 atau 51,60 persen, peningkatan Penerimaan Bagian Laba BUMN sebesar Rp10.137.862.431.739 atau 78,98 persen, dan peningkatan Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp12.917.349.280.433 atau 54,77 persen.

Penerimaan PNBP mencapai sasaran meskipun lifting minyak di bawah asumsi dan apresiasi nilai tukar rupiah membawa konsekuensi penurunan PNBP yang berasal dari migas. Sementara itu, realisasi PNBP non-migas, khususnya PNBP Non-Migas dan dividen BUMN melebihi sasaran.

Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya.

Realisasi Penerimaan SDA Rp167,47 triliun

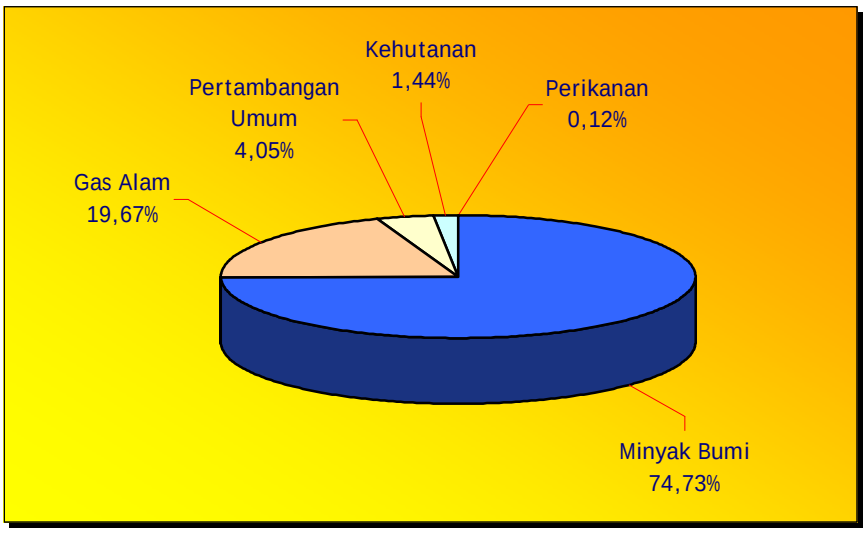
B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2006 adalah sebesar Rp167.473.800.945.318, atau 101,07 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp165.694.879.000.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp57.006.544.271.318 atau 51,60 persen dari realisasi TA 2005. Kenaikan Penerimaan SDA antara lain dipengaruhi berbagai faktor seperti tingkat lifting migas, harga minyak mentah di pasar internasional serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kontribusi meningkatnya Penerimaan SDA ini berasal dari Pendapatan Minyak Bumi yang meningkat cukup signifikan yaitu sebesar RpRp52.323.137.327.496 atau 71,85 persen dari TA 2005.
Besarnya realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut:

	TA 2006	TA 2005
Pendapatan Minyak Bumi	Rp125.145.403.396.875	Rp 72.822.266.069.379
Pendapatan Gas Alam	32.940.684.187.4	30.939.783.556.621
Pendapatan Pertambangan Umum	6.781.369.889.324	3.190.472.228.757
Pendapatan Kehutanan	2.409.460.598.313	3.249.365.525.474
Pendapatan Perikanan	196.882.873.358	265.369.293.769
Total	Rp167.473.800.945.318	Rp110.467.256.674.000

Komposisi realisasi Penerimaan SDA (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik 16.

Komposisi Realisasi Penerimaan SDA



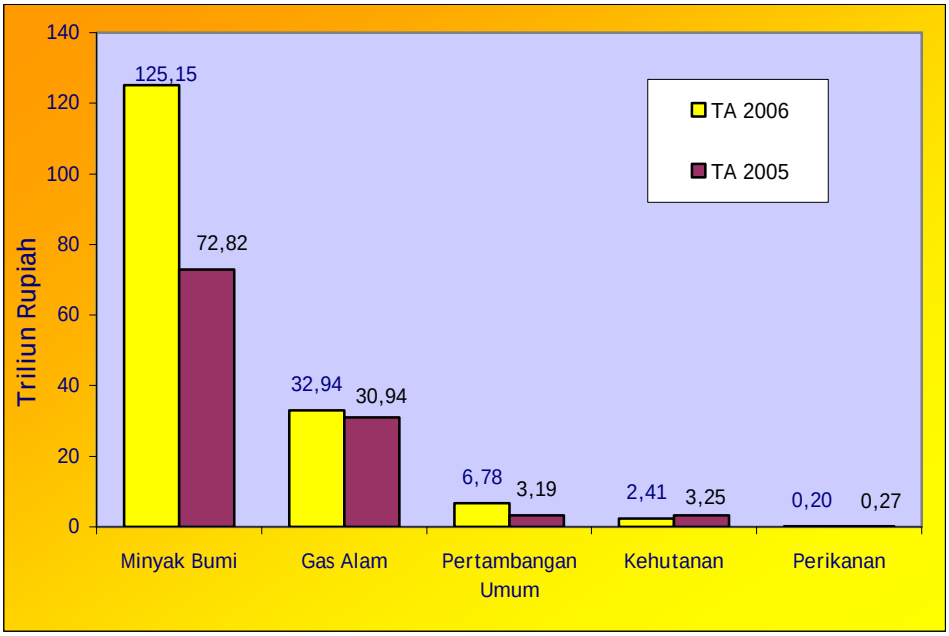
Grafik 16: Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2006

Sedangkan perbandingan realisasi Penerimaan SDA TA 2006 dan TA 2005 dapat dilihat

www.peraturan.go.id

pada Grafik 17.

Perbandingan Realisasi Penerimaan SDA



Grafik 17: Perbandingan Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2006 dan 2005

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan SDA dapat dilihat dalam Daftar 1.

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp22,97 triliun

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2006 adalah sebesar Rp22.973.056.234.957 atau 102,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp22.322.500.000.000. Hal ini berarti Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp10.137.862.431.739 atau 78,98 persen persen dari realisasi TA 2005.

Bagian Laba BUMN yang berkontribusi cukup signifikan terhadap kenaikan PNBP dipengaruhi oleh beberapa hal: (i) jumlah kepemilikan saham pada BUMN; (ii) laba bersih setelah pajak (earning after tax); (iii) besarnya *pay out ratio*; (iv) rencana strategis BUMN dalam melakukan ekspansi usaha, privatisasi, dan merger serta (v) kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi kinerja masing-masing BUMN. Penyumbang terbesar bagian laba BUMN adalah sektor pertambangan yang salah satunya berasal dari PT Pertamina (Persero) yang menyumbang sebesar Rp11.950.940.045.643.

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya Rp36,50 triliun

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya TA 2006 adalah sebesar Rp36.503.209.205.596 atau 87,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 yaitu sebesar Rp41.811.889.281.000. Hal ini berarti PNBP Lainnya TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp12.917.349.280.433 atau 54,77 persen dari realisasi TA 2005. Besarnya realisasi PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

	TA 2006	TA 2005
Penjualan Hasil Produksi, Sitaan	Rp 388.908.924.399	Rp 1.642.772.961.321
Penjualan Aset	35.611.899.217	126.676.068.067
Pendapatan Sewa	69.889.864.639	46.745.554.376
Pendapatan Jasa	9.808.266.112.552	6.853.388.462.402
Pendapatan Bukan Pajak Luar Negeri	353.011.168.545	620.263.551.985
Pendapatan Bunga	4.785.279.335	2.114.544.871
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	74.413.840.000	108.756.403.431

www.peraturan.go.id

Pendapatan On Redemption atas Pemb. Kembali Obligasi DN Jk. Pjg	51.575.792.275	225.101.490.488
Pendapatan Premium Obligasi Negara	1.731.248.733.000	0
Pendapatan Pendidikan	2.357.826.811.004	1.212.343.585.483
Pendapatan Lain-lain	21.627.670.780.630	12.747.697.302.739
Total	Rp36.503.209.205.596	Rp23.585.859.925.163

Rincian lebih lanjut dari PNBP Lainnya dapat dilihat dalam Daftar 1.

Selain itu, terdapat pendapatan lain-lain yang berpotensi masuk ke Kas Negara seperti penyelenggaraan pendidikan/pelatihan, dan penyewaan gedung atau ruang konvensi oleh beberapa kementerian negara/lembaga yang tidak dikelola melalui mekanisme APBN.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Rp1,83 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2006 adalah sebesar Rp1.834.050.785.735 atau 43,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp4.232.907.854.000. Hal ini berarti realisasi Penerimaan Hibah TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp529.267.887.301 atau 40,56 persen dari TA 2005.

Kenaikan Penerimaan Hibah karena terjadinya bencana alam/gempa bumi yang melanda Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Pulau Simeuleu.

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Hibah dapat dilihat dalam Daftar 1.

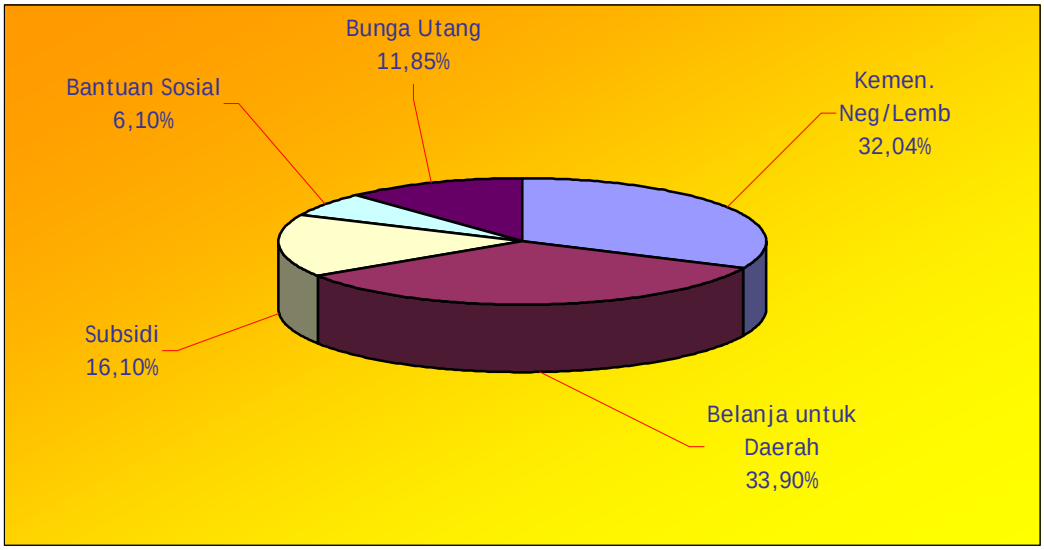
B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Rp667,13 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2006 adalah sebesar Rp667.128.813.065.242 atau 95,43 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp699.099.136.055.000. Dibandingkan dengan TA 2005, Belanja Negara TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp157.496.394.903.882 atau 30,90 persen. Realisasi Belanja Negara terdiri dari *(i)* Belanja Pemerintah Pusat dan *(ii)* Transfer untuk Daerah.

Dilihat dari komposisinya, realisasi Transfer untuk Daerah TA 2006 menempati porsi terbesar, yaitu Rp226.179.954.328.611 atau 33,90 persen dari total Belanja Negara. Komposisi realisasi Belanja Negara pada TA 2006, disajikan pada Grafik 18.

Komposisi Alokasi Belanja Negara

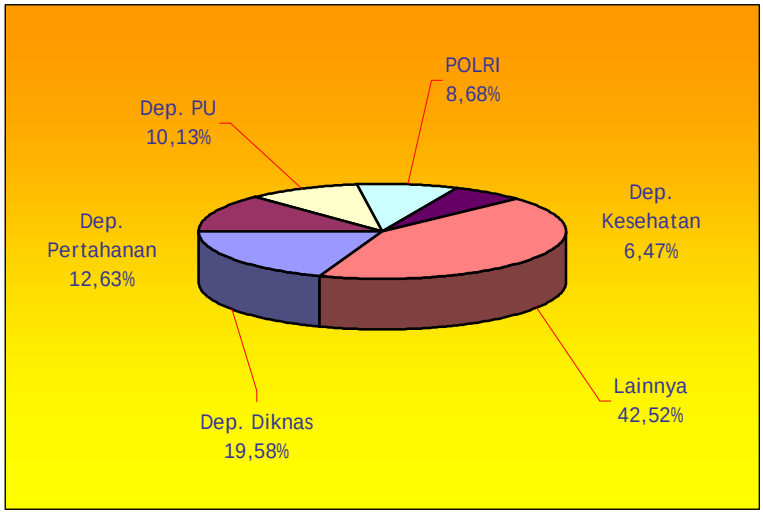


Grafik 18: Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2006

Komposisi 5 (lima) terbesar kementerian negara/lembaga pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 061, BA 062, dan BA 069 dalam TA 2006 dapat dilihat pada Grafik 19.

www.peraturan.go.id

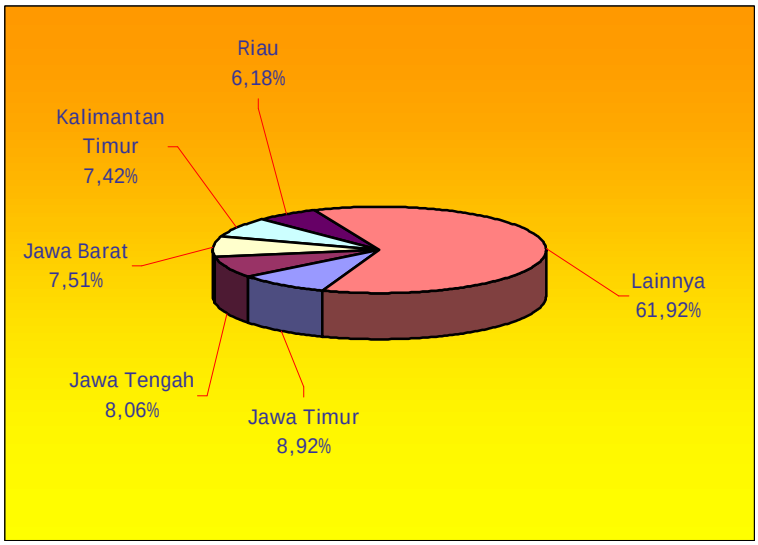
Komposisi Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat



Grafik 19: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2006

Sementara itu, komposisi 5 (lima) terbesar daerah pengguna anggaran Transfer untuk Daerah TA 2006 dapat dilihat pada Grafik 20.

Komposisi Lima Terbesar Daerah Pengguna Anggaran Transfer untuk Daerah



Grafik 20: Komposisi Lima Terbesar Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) Pengguna Anggaran Transfer untuk Daerah TA 2006

Secara keseluruhan, peringkat pengguna anggaran menurut Bagian Anggaran dapat dilihat pada Daftar 2.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp440,15 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 adalah sebesar Rp440.154.197.702.786 atau 92,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp478.249.290.655.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp78.998.995.643.273 atau 21,87 persen dari TA 2005. Meningkatnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada TA 2006 adalah karena adanya realisasi belanja atas anggaran yang diluncurkan dari TA 2005 ke TA 2006 dalam bentuk DIPA Luncuran (DIPA-L) dan realisasi atas tambahan anggaran pendidikan yang cukup signifikan, dalam upaya untuk memenuhi amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan. Dari jumlah realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 tersebut terdapat Rp6.944.575.672.008 yang berasal dari DIPA-L.

www.peraturan.go.id

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 menurut Bagian Anggaran terbesar adalah pada BA 062 (Subsidi dan Transfer) sebesar Rp140.058.489.786.897 atau 31,82 persen dari total belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA pada kementerian negara/lembaga terbesar adalah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp37.095.144.450.889 atau 8,43 persen dari total belanja. Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi pada TA 2006 dan 2005 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 6.

Tabel 6
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2006 dan 2005
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2006	TA 2005
01	Pelayanan Umum	283.465.142.636.848	255.603.159.832.384
02	Pertahanan	24.426.141.042.980	21.562.174.659.421
03	Ketertiban dan Keamanan	23.743.115.168.836	15.617.306.884.846
04	Ekonomi	38.295.620.549.454	23.503.977.902.008
05	Lingkungan Hidup	2.664.475.152.193	1.333.894.058.912
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	5.457.205.792.482	4.216.518.796.909
07	Kesehatan	12.189.728.205.984	5.836.864.889.781
08	Pariwisata dan Budaya	905.443.154.946	588.574.789.492
09	Agama	1.411.200.131.019	1.312.343.207.946
10	Pendidikan	45.303.905.094.389	29.307.935.001.710
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	2.303.280.818.537	2.103.783.120.057
	Total *)	440.154.197.702.786	361.155.202.059.513

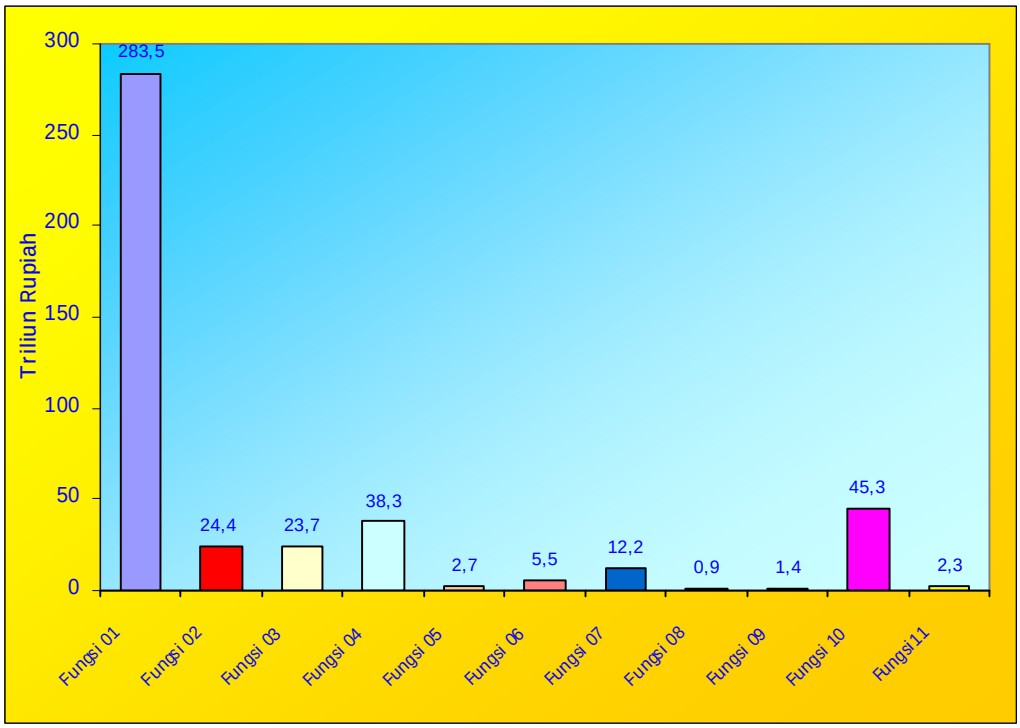
*) Catatan:

Termasuk realisasi sebesar minus Rp11.060.044.882 pada TA 2006 dan Rp168.668.916.047 pada TA 2005 yang tidak diketahui kelompok fungsinya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp283.465.142.636.848 atau 64,40 persen dari total belanja. Sementara itu, komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dapat dilihat pada Grafik 21. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dan Subfungsi dapat dilihat dalam Daftar 3.

www.peraturan.go.id

Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi



Grafik 21: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2006

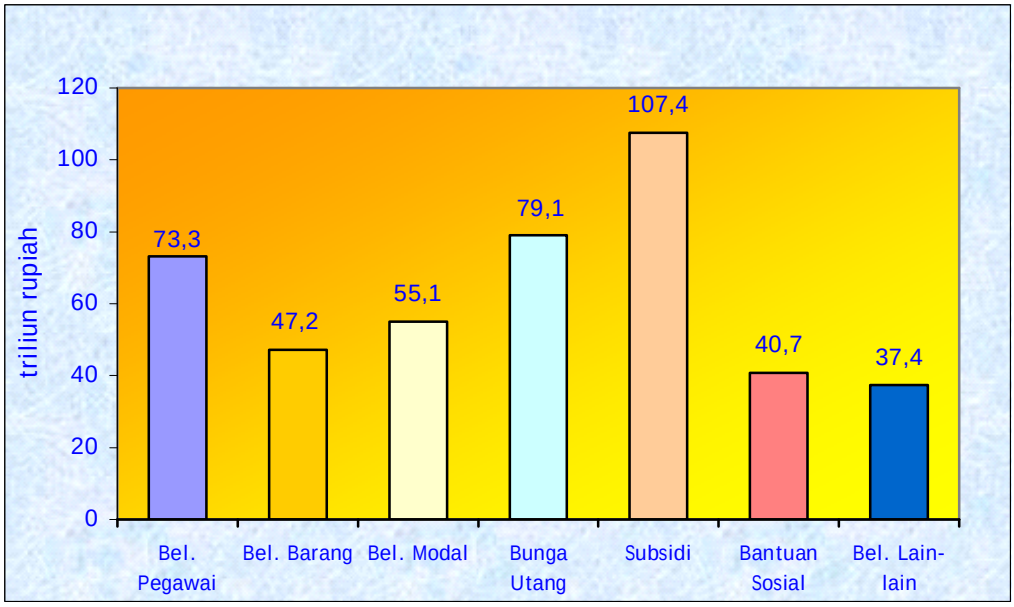
Terdapat pencatatan belanja yang tidak mencantumkan kode fungsi pada beberapa kementerian negara/lembaga yaitu sebesar minus Rp11.060.044.882.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 22.

Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanj



Grafik 22: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2006

www.peraturan.go.id

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp73,25 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2006 adalah sebesar Rp73.252.287.265.554 yang berarti 92,84 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp78.904.457.499.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp18.998.091.894.521 atau 35,02 persen dari TA 2005. Rincian Belanja Pegawai TA 2006 adalah sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 21.861.441.420.119
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/PoIri	20.226.100.239.647
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	345.820.221.603
Belanja Pegawai Perjan	301.310.697
Belanja Gaji Dokter PTT	634.200.949.934
Belanja Honorarium	4.823.371.370.112
Belanja Lembur	102.550.933.903
Belanja Vakasi	717.610.862.297
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	782.637.835.960
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	23.271.785.238.852
Belanja Asuransi Kesehatan	436.485.393.140
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	49.981.881.440
Total	Rp73.252.287.657.704

Belanja Barang

Belanja Barang Rp47,18 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2006 adalah sebesar Rp47.182.190.735.240 yang berarti 85,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp55.506.999.447.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp18.010.503.716.737 atau 61,74 persen dari TA 2005. Rincian Belanja Barang TA 2006 adalah sebagai berikut:

Belanja Barang Operasional	Rp 22.752.075.923.662
Belanja Barang Non Operasional	3.831.965.753.266
Belanja Jasa	7.785.054.455.755
Belanja Pemeliharaan	3.905.631.283.180
Belanja Perjalanan	8.907.463.319.377
Total	Rp47.182.190.735.240

Belanja Modal

Belanja Modal Rp55,07 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2006 adalah sebesar Rp55.073.710.080.032 yang berarti 82,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp66.723.899.991.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp22.184.870.632.279 atau 67,45 persen dari TA 2005. Rincian Belanja Modal TA 2006 adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah	Rp 1.675.902.652.399
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.560.739.542.334
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.191.813.735.319
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.156.430.213.317
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.488.823.936.663
Total	Rp 55.073.710.080.032

www.peraturan.go.id

Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp79,08

Realisasi Pembayaran Bunga Utang TA 2006 adalah sebesar Rp79.082.563.276.141 yang berarti 95,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp82.494.656.960.000. Hal ini berarti realisasi Pembayaran Bunga Utang TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp13.882.968.527.392 atau 21,29 persen dari TA 2005.

Subsidi

Subsidi Rp107,43 triliun

Realisasi Subsidi TA 2006 adalah sebesar Rp107.431.785.858.675 yang berarti 99,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp107.627.567.700.000. Hal ini berarti realisasi Subsidi TA 2006 mengalami penurunan sebesar Rp13.333.532.449.356 atau 11,04 persen dari TA 2005. Rincian Subsidi TA 2006 adalah sebagai berikut:

Subsidi BBM	Rp 64.212.079.995.900
Subsidi Pangan	5.320.237.500.000
Subsidi Listrik	30.393.303.368.309
Subsidi Benih	131.125.500.000
Subsidi Pupuk	3.165.723.566.190
Subsidi Harga/Biaya Lainnya	264.359.949.000
Subsidi Bunga KPR	251.996.426.346
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	34.223.400.000
Subsidi PPh	1.863.753.579.000
Subsidi PT KAI	450.000.000.000
Subsidi PT PELNI	650.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	115.000.000.000
Subsidi TVRI	40.199.923.930
Subsidi BULOG	394.999.996.000
Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	144.782.654.000
Total	Rp107.431.785.858.675

Bantuan Sosial

Bantuan Sosial Rp40,71 triliun

Realisasi Bantuan Sosial TA 2006 adalah sebesar Rp40.708.566.188.991 yang berarti 91,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp44.590.994.494.000. Hal ini berarti realisasi Bantuan Sosial TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp15.805.081.128.728 atau 63,47 persen dari TA 2005. Rincian Bantuan Sosial TA 2006 adalah sebagai berikut:

Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	Rp14.955.371.830.306
Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/ Lembaga/Guru	14.072.013.491.492
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	2.755.885.733.150
Belanja Bantuan Beasiswa	920.733.173.581
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	113.980.593.282
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	7.890.581.367.180
Total	Rp40.708.566.188.991

Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp37,42 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2006 adalah sebesar Rp37.423.093.906.003 yang berarti 88,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp42.400.714.565.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp3.451.012.192.972 atau 10,16 persen dari TA 2005. Rincian Belanja Lain-lain TA 2006 adalah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Belanja Kerjasama Teknis Internasional	Rp 6.107.628.750
Belanja Cadangan Umum	3.222.515.140.639
Belanja Pemilu/Sidang Tahunan	5.426.131.214
Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	3.641.069.000
Belanja Cadangan Dana Reboisasi	3.911.997.016.852
Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	58.489.459.545
Belanja Dana Tanggap Darurat (Dana Kontinjensi)	26.951.255.117.883
Belanja Bagi Hasil Biaya /Upah Pungut PBB untuk DJP	784.914.701.630
Belanja Lain-lain II lainnya	2.478.747.640.490
Total	Rp37.423.093.906.003

Rincian Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 menurut Bagian Anggaran dan Jenis Belanja dapat dilihat dalam Daftar 4.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sudah termasuk realisasi belanja yang ditempatkan dalam rekening khusus *Trust Fund* yang dikelola BRR NAD-Nias sebesar Rp2.213.702.756.920, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa Konsultan	Rp 137.153.516.260
Belanja Modal Tanah	383.840.486.553
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.224.479.171
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.853.363.760
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	382.090.633.996
Belanja Modal Irigasi	17.475.675.771
Belanja Modal Jaringan	166.548.408.161
Belanja Modal Fisik Lainnya	74.330.597.045
Belanja Bantuan Sosial Lainnya	893.185.596.203
Total	Rp2.213.702.756.920

Rincian realisasi anggaran per kegiatan satker yang ditempatkan dalam rekening khusus *Trust Fund* tersebut dapat dilihat dalam Daftar 5.

Selain itu, terdapat kelebihan realisasi belanja di atas pagu anggaran pada Departemen Agama sebesar Rp542.459.000, yang terdiri dari satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Departemen Agama sebesar Rp99.950.000, satker Ditjen Kelembagaan Agama Islam sebesar Rp395.009.000, dan satker UIN Syarief Hidayatullah Jakarta sebesar Rp47.500.000. Kelebihan tersebut terjadi karena pemalsuan penerbitan SPM yang dilakukan oleh pegawai KPPN Jakarta IV yang membebani DIPA di Departemen Agama.

B.2.2.2. Transfer untuk Daerah

Realisasi Transfer untuk Daerah Rp226,18 triliun

Dalam TA 2006, realisasi anggaran Transfer untuk Daerah adalah sebesar Rp226.179.954.328.611, yang berarti 102,41 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp220.849.845.400.000. Hal ini berarti Transfer untuk Daerah TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp75.716.085.762.129 atau 50,32 persen dari TA 2005.

Transfer untuk Daerah terdiri dari *(i)* Dana Perimbangan, dan *(ii)* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Laporan Realisasi Anggaran Transfer untuk Daerah dapat dilihat dalam Daftar 6.

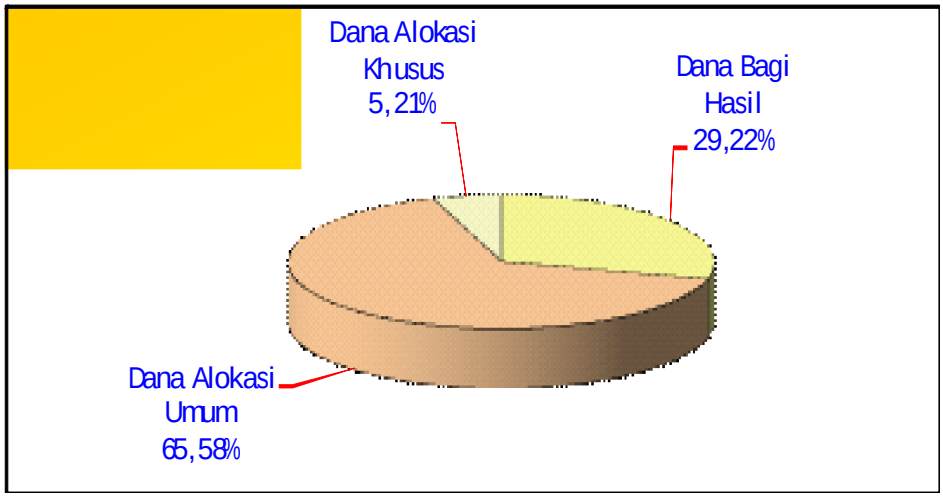
www.peraturan.go.id

Realisasi Dana Perimbangan Rp222,13 triliun

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2006 adalah sebesar Rp222.130.617.897.611 yang berarti 102,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp216.797.725.400.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp78.909.361.331.129 atau 55,10 persen dari TA 2005. Dana Perimbangan terdiri dari *(i)* Dana Bagi Hasil (DBH), *(ii)* Dana Alokasi Umum (DAU), dan *(iii)* Dana Alokasi Khusus (DAK). Komposisi realisasi Dana Perimbangan dapat dilihat pada Grafik 23.

Komposisi Realisasi Dana Perimbangan



Grafik 23: Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2006

Daerah penerima Dana Perimbangan terbesar dalam TA 2006 adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebesar Rp20.159.443.015.666. Rincian realisasi Dana Perimbangan per Daerah TA 2006 dapat dilihat dalam Daftar 6.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH Rp64,90 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2006 adalah sebesar Rp64.900.298.776.741, yang berarti 108,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp59.563.725.400.000. Hal ini berarti realisasi DBH TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp15.208.037.475.275 atau 30,60 persen dari TA 2005. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Perpajakan dan Bagi Hasil SDA.

Daerah penerima DBH terbesar dalam TA 2006 adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah sebesar Rp14.168.257.118.493. Sementara itu, pemerintah daerah penerima DBH Pajak terbesar dalam TA 2006 adalah Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sebesar Rp5.438.541.328.978, dan penerima DBH SDA terbesar dalam TA 2006 adalah Pemda Kabupaten Kutai dengan jumlah sebesar Rp3.212.361.750.922. Rincian realisasi DBH per Daerah TA 2006 dapat dilihat dalam Daftar 6.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi DAU Rp145,66 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2006 adalah sebesar Rp145.664.184.719.236, yang berarti hampir 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp145.664.200.000.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp56.898.756.859.853 atau 64,10 persen dari TA 2005. DAU diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan PNS daerah, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan, serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan umum.

www.peraturan.go.id

Provinsi penerima DAU terbesar dalam TA 2006 adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebesar Rp16.616.760.000.000. Sedangkan pemerintah daerah penerima DAU terbesar dalam TA 2006 adalah Pemda Kabupaten Bandung dengan jumlah sebesar Rp1.168.636.000.000. Rincian realisasi DAU per Daerah TA 2006 dapat dilihat dalam Daftar 6.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi DAK Rp11,57 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2006 adalah sebesar Rp11.566.134.401.634, yang berarti 99,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp11.569.800.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp6.802.566.996.001 atau 142,80 persen dari TA 2005.

Provinsi penerima DAK terbesar dalam TA 2006 adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebesar Rp913.630.000.000. Sedangkan pemerintah daerah penerima DAK terbesar dalam TA 2006 adalah Pemda Kabupaten Ciamis dengan jumlah sebesar Rp52.900.000.000. Rincian realisasi DAK per Daerah TA 2006 dapat dilihat dalam Daftar 6.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

Realisasi DOK dan Penyesuaian Rp4,05 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (DOKP) TA 2006 adalah sebesar Rp4.049.336.431.000, yang berarti 99,93 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp4.052.120.000.000. Hal ini berarti realisasi DOKP TA 2006 mengalami penurunan sebesar Rp3.193.275.569.000 atau 44,09 persen dari TA 2005. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari *(i)* Dana Otonomi Khusus, dan *(ii)* Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi DOK Rp3,49 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus (DOK) TA 2006 adalah sebesar Rp3.488.284.000.000, yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp3.488.284.000.000. Hal ini berarti realisasi DOK TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp1.712.972.000.000 atau 96,49 persen dari TA 2005. Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian Rp561,05 miliar

Realisasi Dana Penyesuaian (DP) TA 2006 adalah sebesar Rp561.052.431.000, yang berarti 99,51 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp563.836.000.000. Hal ini berarti realisasi DP TA 2006 mengalami penurunan sebesar Rp4.906.247.569.000 atau 89,74 persen dari TA 2005.

Provinsi penerima DP terbesar dalam TA 2006 adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebesar Rp913.630.000.000. Sedangkan pemerintah daerah penerima DP terbesar dalam TA 2006 adalah Pemda Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah sebesar Rp184.560.000.000. Rincian realisasi DP per Daerah TA 2006 dapat dilihat dalam Daftar 6.

Dana Penyesuaian terdiri dari Penyesuaian Murni dan Penyesuaian Kebijakan (*Ad-Hoc*). Dana Penyesuaian Murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan DAU mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi TA sebelumnya. Sedangkan Dana Penyesuaian (*Ad-Hoc*) diberikan untuk membantu keuangan daerah tertentu dalam rangka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan pengeluaran daerah dalam APBD.

www.peraturan.go.id

Perkiraan Suspen Rp794,66 miliyar

B.2.2.3. Suspen

Suspen merupakan perkiraan (*account*) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara. Sementara perbedaan pencatatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tidak ada karena data yang digunakan adalah data BUN. Jumlah perkiraan Suspen TA 2006 adalah sebesar Rp794.661.033.845 yang merupakan selisih lebih total Belanja Negara menurut data BUN dan data kementerian negara/lembaga dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga (KL)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Negara			
Belanja Pemerintah Pusat	440.604.281.615.792	440.154.197.702.786	450.083.913.006
Transfer untuk Daerah	226.524.531.449.450	226.179.954.328.611	344.577.120.839
Jumlah Suspen			794.661.033.845

Perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara diduga terjadi karena beberapa satuan kerja (satker) belum menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang kepada kementerian negara/lembaga bersangkutan, terutama satker pengguna dana Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Selain itu, perbedaan pencatatan tersebut juga dimungkinkan karena terjadinya realisasi belanja melalui mekanisme Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) yang tidak dilaporkan baik oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa Anggaran. Sementara itu, Angka Suspen pada TA 2005 adalah sebesar minus Rp1.986.652.464.635.

B.2.3. Surplus (Defisit) Anggaran

Defisit Anggaran Rp29,14 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, serta Belanja Negara TA 2006, maka Defisit Anggaran TA 2006 adalah sebesar Rp29.141.676.558.186, yang berarti 72,88 persen dari defisit yang diperkirakan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp39.983.879.920.000.

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan (neto) Rp29,42 triliun

Untuk menutupi Defisit Anggaran TA 2006 tersebut ditempuh berbagai upaya strategis untuk mengoptimalkan pembiayaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan APBN-P TA 2006, realisasi Pembiayaan (Neto) adalah sebesar Rp29.415.590.251.868, yang berarti 73,57 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp39.983.897.572.000. Pembiayaan terdiri dari *(i)* Pembiayaan Dalam Negeri dan *(ii)* Pembiayaan Luar Negeri.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan DN Rp55,98 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2006 adalah sebesar Rp55.982.076.550.778, yang berarti 101,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp55.257.700.000.000. Dibandingkan dengan dengan realisasi pada TA 2005, Pembiayaan Dalam Negeri TA 2006 ini mengalami kenaikan sebesar Rp36.837.380.385.577 atau 192,42 persen. Hal ini berarti Pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan sumber pembiayaan defisit anggaran berasal dari pembiayaan dalam negeri dan tidak tergantung dari sumber pinjaman luar negeri. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari *(i)* Rekening Pemerintah, *(ii)* Dana Eks. Moratorium NAD dan Nias, *(iii)* Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi *(iv)* Surat Utang Negara (Neto) dan *(v)* Penyertaan Modal.

www.peraturan.go.id

Rekening Pemerintah

Realisasi Pembiayaan Rekening Pemerintah Rp11,56 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2006 adalah sebesar Rp11.555.466.605.494, yang berarti 109,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp10.549.100.000.000. Pembiayaan Rekening Pemerintah TA 2006 berasal dari:

Penerimaan dari Penutupan Rekening	Rp 5.055.462.940.247
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi	2.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi	4.500.000.000.000
Penyesuaian Penambahan Saldo Reksus Karena Selisih Kurs	3.665.247
Total	Rp11.555.466.605.494

Dana Moratorium

Realisasi Pembiayaan Dana Moratorium Rp7,36 triliun

Realisasi penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Dana Eks. Moratorium NAD dan Nias TA 2006 adalah sebesar Rp7.357.400.000.000, atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp7.357.400.000.000.

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan PAPR Rp5,06 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebesar Rp5.055.702.597.315, atau 87,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp5.774.500.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2006	TA 2005
Penerimaan Hasil Privatisasi	Rp2.371.675.405.434	Rp 0
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	2.684.027.191.881	6.563.537.070.729
Total	Rp5.055.702.597.315	Rp6.563.537.070.729

Surat Utang Negara (SUN) Neto

Realisasi Pembiayaan SUN Neto Rp35,99 triliun

Realisasi Pembiayaan dari SUN Neto adalah sebesar Rp35.985.507.347.969, atau 100,60 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp35.771.700.000.000. Realisasi Pembiayaan dari Surat Utang Negara berasal dari:

Uraian	TA 2006	TA 2005
Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi	Rp 0	Rp21.582.000.000
Penerimaan Utang Bunga SUN DN	1.689.768.517.000	320.154.502.348
Penerimaan Pembiayaan untuk SUN	73.757.650.000.000	22.539.996.600.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN	18.466.901.169.540	24.490.853.735.257
Penerimaan Utang Bunga SUN LN	320.496.746.922	0
Belanja Pengeluaran Pelunasan SUN DN	(25.141.982.761.508)	(19.350.436.000.000)
Belanja Pengeluaran Pelunasan SUN DN-melalui Pembelian Kembali	(31.226.291.000.000)	(5.158.000.000.000)
Belanja Pembayaran Utang Bunga SUN DN	(1.567.098.452.000)	(289.473.406.516)
Belanja Pembayaran Utang Bunga SUN LN	(313.936.871.985)	0
Total	Rp35.985.507.347.969	Rp22.574.677.431.089

Penyertaan Modal Negara (PMN)

Realisai PMN Rp3,97 triliun

Realisasi pembiayaan PMN TA 2006 adalah sebesar minus Rp3.972.000.000.000, yang berarti 94,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar minus Rp4.195.000.000.000. Penyertaan Modal tersebut terdiri dari:

Uraian	TA 2006	TA 2005
PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Rp 1.972.000.000.000	Rp 1.195.000.000.000
Penyertaan Modal lainnya	2.000.000.000.000	4.000.000.000.000
Total	Rp3.972.000.000.000	Rp5.195.000.000.000

www.peraturan.go.id

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan LN (Neto) minus Rp26,57 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2006 adalah sebesar minus Rp26.566.486.298.910, yang berarti 173,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar minus Rp15.273.802.428.000. Pembiayaan Luar Negeri minus berarti jumlah pembayaran cicilan pokok pinjaman lama lebih besar dari pinjaman atau utang baru. Dengan demikian, jumlah pinjaman luar negeri akan semakin berkurang. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

Realisasi Penarikan Pinjaman LN (Bruto) Rp26,11 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) TA 2006 adalah sebesar Rp26.114.585.238.873 yang berarti 69,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp37.550.387.572.000. Penarikan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari Penarikan Pinjaman Program dan Penarikan Pinjaman Proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program Rp13,58 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2006 adalah sebesar Rp13.579.552.756.283, yang berarti 112,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp12.075.100.000.000. Realisasi Pinjaman Program TA 2006 terdiri dari:

Uraian	TA 2006	TA 2005
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	Rp 915.056.506.949	Rp 949.127.958.111
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	4.788.020.000.000	3.923.202.597.988
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	5.428.400.000.000	7.392.350.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	2.448.076.249.334	129.285.300
Total	Rp13.579.552.756.283	Rp12.264.809.841.399

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Penarikan PinjamanPproyek Rp12,54 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2006 adalah sebesar Rp12.535.032.482.590, yang berarti 49,20 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp25.475.287.572.000. Realisasi Pinjaman Proyek terdiri dari:

Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	Rp 5.039.901.938.771
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	6.064.506.728.051
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.801.291.435.052
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	187.306.339.714
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN	(3.557.973.958.998)
Total	Rp12.535.032.482.590

B.2.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp52,68 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2006 adalah sebesar Rp52.681.071.537.783, yang berarti 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp52.824.190.000.000**.** Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri ini merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2006. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri ini berasal dari pembayaran cicilan pokok (bruto) sebesar Rp52.720.054.366.170 dan dikurangi dengan Pengembalian Pembiayaan Cicilan sebesar Rp38.982.828.387. Dibandingkan dengan realisasi TA 2005, Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2006 ini mengalami kenaikan sebesar Rp15.568.661.967.983. Hal ini berarti Pemerintah selalu berupaya mengurangi jumlah utang luar negeri.

www.peraturan.go.id

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)

SILPA Rp273,91 miliar

Berdasarkan defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBN-P TA 2006 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp273.913.693.682. Sementara itu, pada TA 2005 terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp5.535.482.212.206.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai Pengelolaan Keuangan (PK) BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan wadah implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, dan hibah.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sesuai dengan SAP, Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat yang secara organisatoris membawahinya. Namun, pada TA 2006 pendapatan dan belanja BLU belum dikonsolidasikan pada laporan

www.peraturan.go.id

keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Sehingga, dalam Laporan Realisasi APBN TA 2006 ini belum mencakup Laporan Realisasi Anggaran BLU.

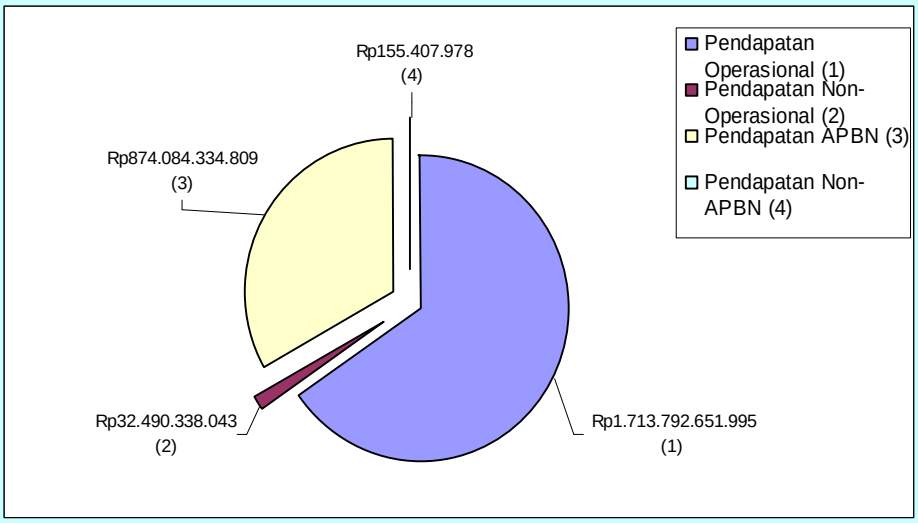
Sampai tanggal 31 Desember 2006, terdapat 17 instansi pemerintah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU), yaitu:

- Bergerak dalam bidang layanan kesehatan masyarakat (13 unit):
  1. RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, Departemen Kesehatan;
  2. RSUP Fatmawati Jakarta, Departemen Kesehatan;
  3. RS Kanker Dharmais Jakarta, Departemen Kesehatan;
  4. RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Departemen Kesehatan;
  5. RS Anak & Bersalin Harapan Kita (RSAB) Jakarta, Departemen Kesehatan;
  6. RSUP Persahabatan Jakarta, Departemen Kesehatan;
  7. RSUP Hasan Sadikin Bandung, Departemen Kesehatan;
  8. RSUP Kariadi Semarang, Departemen Kesehatan;
  9. RSUP Sarjito Yogyakarta, Departemen Kesehatan;
  10. RSUP Sanglah Denpasar, Departemen Kesehatan;
  11. RSUP Dr. M. Djamil Padang, Departemen Kesehatan;
  12. RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Departemen Kesehatan;
  13. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Departemen Kesehatan.

- Bergerak dalam bidang telekomunikasi (1 unit):
  1. Balai Telekmunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP), Departemen Komunikasi dan Informatika.

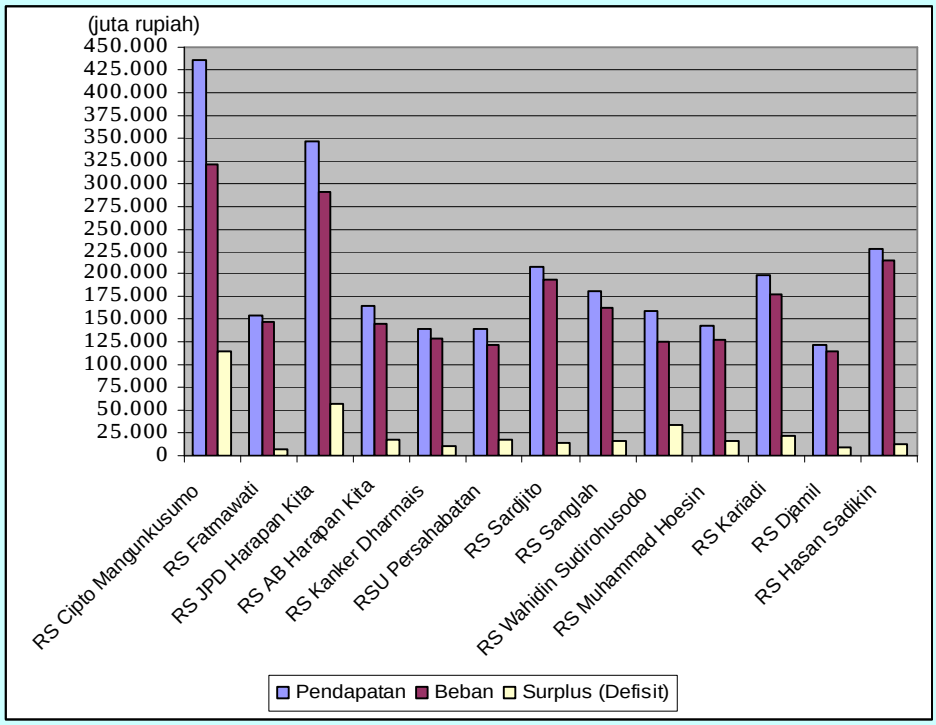
- Bergerak dalam bidang layanan dana bergulir (3):
  1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Departemen Pekerjaan Umum;
  2. Badan Investasi Pemerintah (BIP), Departemen Keuangan;
  3. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Instansi yang menerapkan PK BLU dan telah menyusun laporan keuangan (unaudited) tahun 2006 adalah 13 RS BLU (eks Perjan), tetapi belum dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan ke dalam LKPP tahun 2006, sedangkan 4 instansi lainnya yang penetapannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) pada tahun 2006 belum beroperasi. Total pendapatan tahun 2006 untuk ke 13 RS BLU sebesar Rp2.620.522.732.825 yang rinciannya dapat dilihat dari Grafik 24 berikut ini:



Grafik 24: Struktur Pendapatan 13 Rumah Sakit BLU TA 2006

Perbandingan pendapatan, beban, dan surplus (defisit) tahun 2006 dari tiap RS BLU disajikan dalam Grafik 25 di bawah ini:



Grafik 25: Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Rumah Sakit BLU TA 2006

Pendapatan dan belanja RS BLU diukur berdasarkan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit (PARS) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dengan basis akrual. Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga, angka-angka dalam laporan keuangan BLU harus disajikan kembali dengan basis kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Modul Penerimaan Negara (MPN-Prima)

Pencatatan Penerimaan Negara pada TA 2006 menggunakan Sistem Penerimaan Negara (SISPEN), sehingga belum bisa dilakukan rekonsiliasi secara utuh. Pada awal tahun 2007, Pemerintah mulai mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara (MPN-Prima). MPN adalah modul yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara. Pengimplementasian MPN-Prima ini adalah sebagai tuntutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sekaligus untuk memperbaiki kelemahan pada SISPEN.

MPN-Prima mengintegerasikan tiga sistem yang selama ini dijalankan unit eselon I di Departmen Keuangan yaitu Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Direktorat Jenderal Pajak, *Electronic Data Change* (EDI) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta SISPEN oleh Ditjen Perbendaharaan.

Tujuan MPN adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan otentifikasi dokumen sumber dan efisiensi bagi bank persepsi/pos, meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan mendukung terlaksananya *Treasury Single Account* (TSA) dan akuntansi berbasis berbasis akrual. Pengembangan MPN selanjutnya, akan mencakup upaya pengaitan MPN dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

www.peraturan.go.id

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

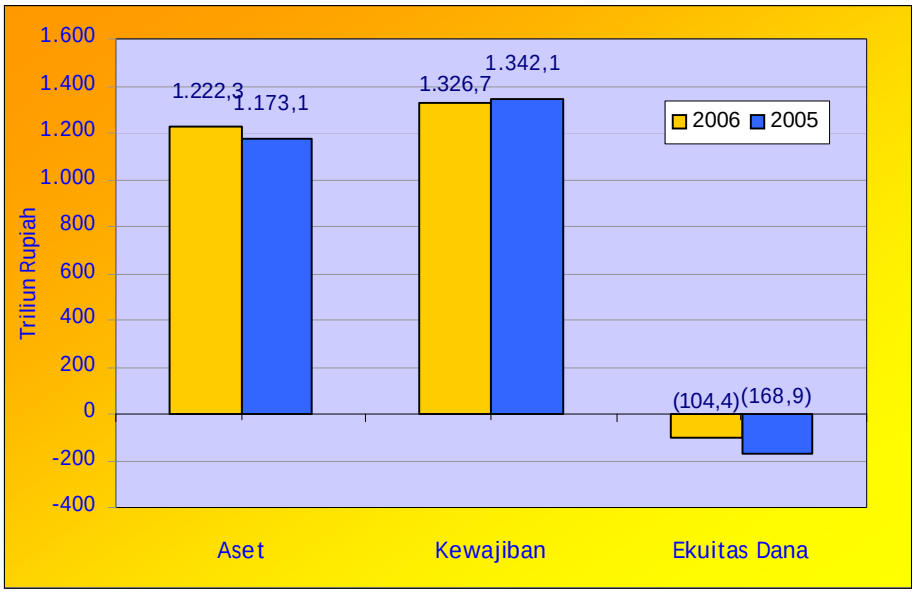
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Aset sebesar Rp1.222,32 triliun

Kewajiban sebesar Rp1.326,72 triliun

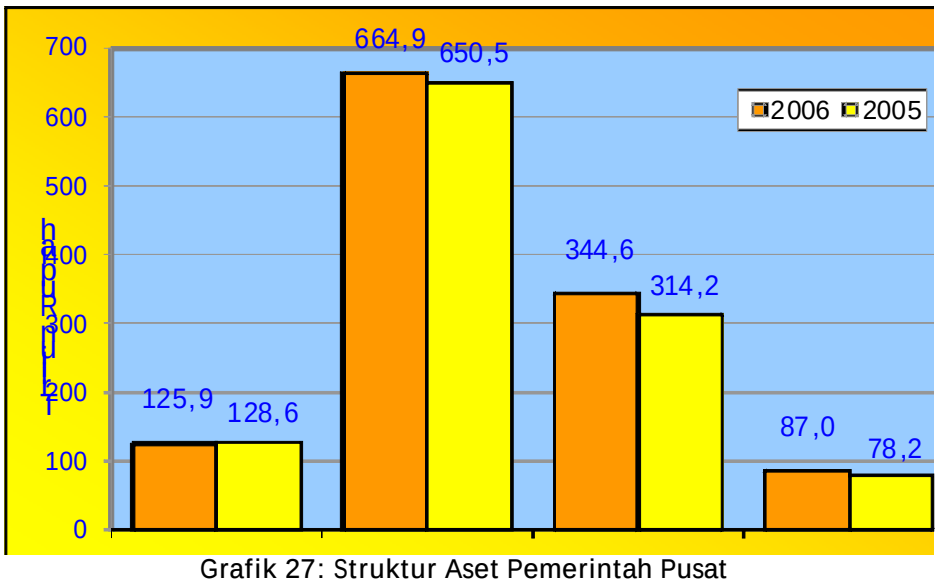
Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp104,40 triliun

Posisi keuangan per 31 Desember 2006 adalah Aset sebesar Rp1.222.317.442.254.837; Kewajiban sebesar Rp1.326.715.685.444.331; dan Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp104.398.243.189.494.(Grafik 26).



Grafik 26: Struktur Neraca Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2006 dan 2005

Jumlah Aset sebesar Rp1.222.317.442.254.837 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp125.863.025.586.549; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp664.852.133.828.320; Aset Tetap sebesar Rp344.614.733.680.873; dan Aset Lainnya sebesar Rp86.987.549.159.095 (Grafik 27).

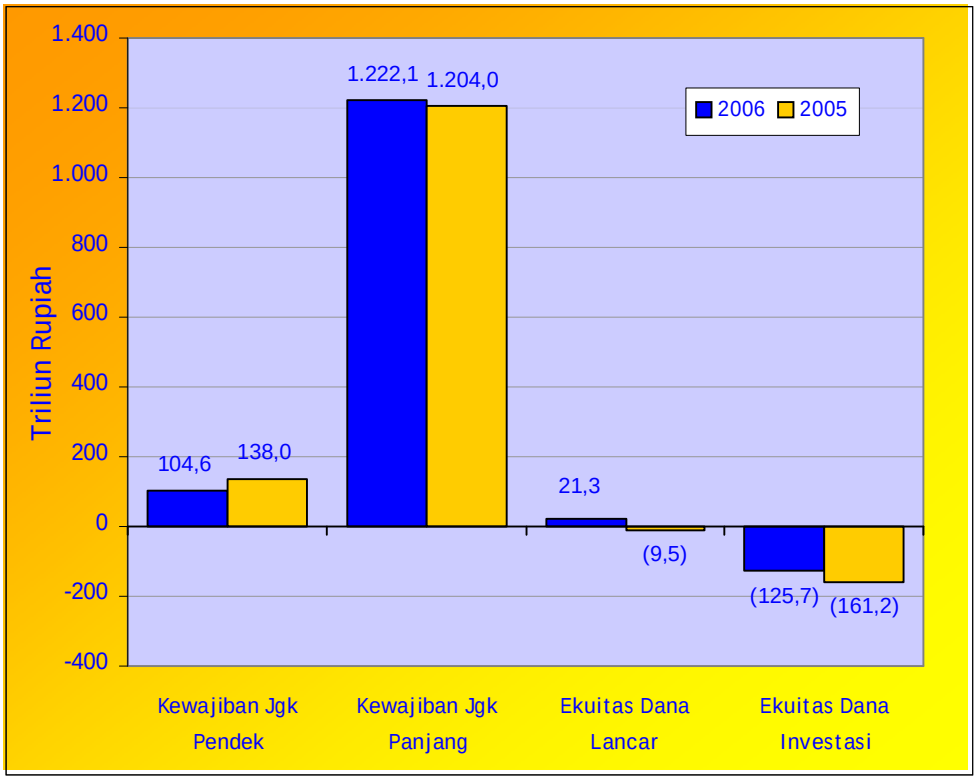


Grafik 27: Struktur Aset Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2006 dan 2005

Jumlah Kewajiban sebesar Rp1.326.715.685.444.331 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp104.608.260.085.841; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.222.107.425.358.490.

www.peraturan.go.id

Total Ekuitas Dana Neto sebesar minus Rp104.398.243.189.494 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp21.254.765.500.708; dan Ekuitas Dana Investasi sebesar minus Rp125.653.008.690.202; (Grafik 28).



Grafik 28: Struktur Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Pusat per 21 Desember 2006 dan 2005

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

Rekening Kas BUN di BI Rp954,31 miliar

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp954.310.836.789 dan Rp100.485.809.688 merupakan saldo Rekening 502 yang ada di BI.

Rekening di Kas KPPN Rp20,59 triliun

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp20.594.618.632.501 dan Rp17.956.484.012.457 merupakan saldo Rekening KPPN di seluruh Indonesia. Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 7.

RPL di BI Rp12,33 triliun

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia

Khusus Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp12.331.109.271.481 dan Rp26.503.223.018.939 merupakan saldo rekening pemerintah lainnya yang ada di BI, yang terdiri dari:

www.peraturan.go.id

	2006	2005
–RDI dan RPD	Rp4.263.280.108.491	Rp5.733.834.164.019
–Rek. hasil minyak perjanjian KPS	1.151.490.051.659	10.720.482.154.138
–Rek. Pemerintah lainnya	6.916.339.111.331	10.048.906.700.782
Jumlah	Rp12.331.109.271.481	Rp26.503.223.018.939

Jumlah rekening untuk menampung hasil penerimaan minyak perjanjian karya *production sharing* (KPS) sebesar Rp1.151.490.051.659 masih terdapat hak pemerintah daerah dan pihak lainnya yang belum dibagikan. Di dalam rekening pemerintah lainnya terdapat rekening Kas BUN dalam valas sebesar Rp3.806.594.579.799.
Rincian lebih lengkap masing-masing rekening dapat dilihat pada Daftar 8.

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1,46 triliun

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp1.460.472.090.821 dan Rp671.209.250.352 merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga (K/L) ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 9.

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp432,94 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp432.936.274.303 dan Rp955.897.763.011 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 10.

C.2.6 Kas Trus Fund

Kas di BRR NAD-Nias Rp2,21 triliun

Jumlah Kas Trus Fund per 31 Desember 2006 sebesar Rp2.213.702.756.920 merupakan kas yang ditempatkan pada rekening Trust Fund pada BRR NAD-Nias yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan pembangunan perumahan, infrastuktur, fasilitas bangunan layanan publik dan pengadaan tanah.

Trust Fund adalah dana yang berasal dari DIPA BRR NAD-Nias TA 2006 yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun 2006, digunakan untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan pembangunan perumahan, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik dan pengadaan tanah.

Penggunaan rekening *trust fund* tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2007 tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari Sisa DIPA Tahun Anggaran 2006. Dana tersebut telah diterbitkan SP2D-nya dan selanjutnya disimpan dalam rekening Trust Fund dengan nilai Rp2.213.702.756.920. Pelaksanaan penyaluran *trust fund* dilaksanakan oleh Komite Trust Fund yang dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juli 2007. Apabila sampai dengan tanggal 2 Juli 2007 dana tersebut belum dapat disalurkan maka seluruh sisa *trust fund* beserta jasa giro yang diterima harus disetorkan ke kas negara.

www.peraturan.go.id

C.2.7. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN Rp2,76 triliun

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp2.764.674.545.037 dan Rp2.489.884.695.414 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7

Uang Muka dari Rekening BUN
(dalam rupiah)

Lender	2006	2005
- IBRD	962.602.151.538	930.389.055.199
- ADB	873.514.048.925	642.255.391.454
- OECF/JBIC	650.366.643.918	646.476.064.556
- Lainnya	278.191.700.656	270.764.184.205
Jumlah	2.764.674.545.037	2.489.884.695.414

C.2.8. Piutang Pajak

Piutang Pajak Rp35,45 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp35.454.552.126.836 dan Rp29.216.456.291.000 merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
- SKPKB	Rp32.280.657.580.871	Rp29.216.456.291.000
- SPKPBM	3.173.894.545.965	
Jumlah	Rp35.454.552.126.836	Rp29.216.456.291.000

Rincian Piutang Pajak berupa SKPKB sebesar Rp32.280.657.580.871 dapat dilihat pada Daftar 11.

Piutang Pajak berupa SKPBM sebesar Rp3.173.894.545.965 merupakan piutang pajak yang berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil I DJBC Medan	Rp 2.786.856.779
Kanwil II DJBC Tanjung Balai Karimun	6.539.090.175
Kanwil III DJBC Palembang	764.728.834
Kanwil IV DJBC Jakarta	222.143.741.938
Kanwil V DJBC Bandung	273.769.885.528
Kanwil VI DJBC Semarang	2.538.017.222.531
Kanwil VII DJBC Surabaya	78.969.843.351
Kanwil VIII DJBC Denpasar	168.233.463
Kanwil IX DJBC Pontianak	1.602.176.117
Kanwil X DJBC Balikpapan	49.010.436.363
Kanwil XII DJBC Ambon	122.330.886
Jumlah	Rp3.173.894.545.965

www.peraturan.go.id

C.2.9. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp25,74 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp25.743.092.097.917 dan Rp37.025.156.608.440 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari:

	2006	2005
- PNBP K/L	Rp25.664.085.203.188	36.995.215.431.035*)
- Piutang kepada PPA	79.006.894.729	29.941.177.405
	Rp25.743.092.097.917	Rp37.025.156.608.440

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp25.664.085.203.188 yang berada di kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya adalah Piutang Bukan Pajak di Departemen Keuangan sebesar Rp22.598.801.458.415 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang denda dan dividen	Rp 5.440.601.893
- Piutang migas kepada Pertamina	18.556.219.133.446
- Piutang migas kepada KKKS	3.818.683.368.529
- Piutang Pungutan Ekspor	161.279.583.878
- Piutang PNBP lainnya	57.178.770.669
	Rp22.598.801.458.415

Piutang denda dan dividen sebesar Rp5.440.601.893 merupakan pembayaran dividen BUMN kepada pemerintah yang penyelesaiannya dijadwalkan tahun 2006 namun sampai dengan 31 Desember 2006 belum diselesaikan pembayarannya. Keterlambatan penyelesaian ini mengakibatkan denda, yang diperhitungkan sebagai penambah piutang. Rincian piutang dividen per BUMN sebagai berikut:

		2006	2005
-	PT Nindya Karya	Rp 3.201.105.867	Rp2.623.257.586
-	PT Yodya Karya	1.118.878.408	1.732.172.584
-	PT Balai Pustaka	1.120.193.135	883.264.643
-	PT PAL	424.483	0
-	BUMN Lainnya	0	249.916.410.477
	Jumlah	Rp 5.440.601.893	Rp255.155.105.290

Piutang Pemerintah kepada PT Pertamina sebesar Rp18.556.219.133.446 merupakan kewajiban PT Pertamina (Persero) dari sektor migas sampai dengan 31 Desember 2006, dengan rincian sebagai:

-	Nilai Lawan	Rp 8.704.636.756.975
-	Technical Assistance Contract (TAC)	299.781.225.977
-	Operasi Hulu Pertamina	2.770.128.335.978
-	Ekspor Minyak Mentah	2.730.382.090.535
-	Natural Gas	1.116.051.759.264
-	LPG	60.452.412.165
-	Piutang Lain-lain [1)]	2.874.786.552.552
	Jumlah [2)]	Rp18.556.219.133.446

Keterangan:

1) Merupakan dana Pemerintah yang pada mulanya tertahan di Bank of America (BoA) sehubungan dengan kasus Karaha Bodas Company (KBC). Namun telah dilakukan pencairan seluruh dana yang tertahan oleh BoA kepada KBC terkait putusan pengadilan yang memenangkan KBC dalam kasus tersebut, maka

www.peraturan.go.id

direncanakan dana-dana yang telah dicairkan kepada KBC tersebut akan dijadikan sebagai kewajiban PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah.

2) Masih termasuk kewajiban PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah eks. Periode tahun 2003 yang direncanakan menjadi tambahan Penyertaan Modal Pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 454/KMK/06/2005 tanggal 21 September 2005 kurang dan belum memperhitungkan koreksi BPK atas hasil pemeriksaan subsidi BBM tahun 2005 yang berpengaruh terhadap kewajiban nilai lawan sebesar Rp467.62 miliar.

Piutang migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar Rp3.818.683.368.529 merupakan piutang yang timbul karena penjualan minyak dan gas yang jatuh tempo dan diperkirakan akan dibayar satu bulan setelah pengiriman minyak dan gas tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penjualan Minyak Bumi	Rp 902.950.480.155
2.	Penjualan Gas Alam	Rp 2.802.373.373.690
	Melalui Trustee	Rp 2.432.078.167.798
	- Ekspor LNG	Rp1.346.442.418.237
	- Eksopr LPG	-
	- Ekspor Gas Alam	484.423.321.180
	- Domestik Gas Alam	601.212.428.381
	Melalui Non Trustee (Kewajiban KKKS)	Rp 370.295.205.892
	- Eksopr LPG	Rp 74.473.958.869
	- Ekspor Gas Alam	195.914
	- Domestik Gas Alam [1)]	295.821.051.108
3.	Overlifting KKKS	Rp 113.359.514.684
	Jumlah 1+2+3	Rp 3.818.683.368.529

Keterangan:

1) Jumlah tersebut termasuk kewajiban PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar USD29.819.111.27, yang berasal dari transaksi swap LNG untuk PT PIM. Dari jumlah tersebut, menurut informasi dari BP MIGAS sebesar USD7.000.000.00 telah diselesaikan oleh PT PIM sebagai pembayaran uang muka, namun dana tersebut saat ini masih berada di rekening penampungan yang dibentuk oleh BP MIGAS dalam rangka penyelesaian permasalahan transaksi swap LNG Arun.

Piutang Pungutan Ekspor sebesar Rp161.279.583.878 merupakan piutang kepada eksportir batu bara yang sampai saat ini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan atas tagihan batu bara tersebut. Rincian Piutang Pungutan Ekspor disajikan pada Daftar 12.

Rincian Piutang Bukan Pajak masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 13.

Piutang kepada PT PPA sebesar Rp79.006.894.729 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal (1)	29.941.177.405
Penerimaan:	
Hasil Pengelolaan Aset:	
Divestasi saham yang dikelola	Rp 2.269.255.316.405
Dividen atas saham yang dikelola	28.619.817.293
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	517.147.111.212
Bunga atas obligasi yang dikelola	32.550.000.000
Jumlah Hasil Pengelolan Aset (2)	Rp2.847.572.244.910

www.peraturan.go.id

Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	150.000.000.000
Bunga dari dana hasil pengelolaan aset yang masih harus disetor	72.754.608.120
Jumlah Penerimaan (3)	3.070.326.853.030
Pengurangan:	
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	Rp123.972.633.961
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali periode sebelumnya yang dibayar tunai pada tahun berjalan	1.457.203.291
Insentif Kinerja Perusahaan	221.186.353.712
PPN atas Insentif Kinerja Perusahaan	22.118.635.371
Jumlah Pengurangan (4)	368.734.826.335
Hasil Pengelolaan Aset yang harus disetor ke Pemerintah (5) = (1) + (3) –(4)	2.731.533.204.100
Hasil Pengelolaan Aset yang telah disetor ke Pemerintah (6)	(2.652.526.309.371)
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) –(6)	Rp79.006.894.729

C.2.10. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp232,66 juta

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp232.655.356 dan Rp39.858.709 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca. Jumlah tersebut merupakan Saldo Bagian Lancar TPA yang berada di:

	2006	2005
- Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 75.240.000	Rp 14.630.000
- Bappenas	157.415.356	25.228.709
	Rp 232.655.356	Rp 39.858.709

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp12,15 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp12.153.879.936 dan Rp8.101.260.747 merupakan saldo Tagihan TGR kementerian negara/lembaga yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca. Rincian Bagian Lancar Tagihan TGR untuk masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 14.

Jumlah Bagian Lancar TGR sebesar Rp12.153.879.936 belum termasuk TGR terhadap pegawai KPPN Jakarta IV. Pemalsuan dilakukan oleh yang bersangkutan sebanyak dua periode dengan rincian sebagai berikut:

No.	TA	Bruto	Pot. Pajak	Jumlah Bersih	Penerbitan Cheque
1	2005	Rp249.850.500	Rp36.341.890	Rp213.508.610	Rp207.000.000
2	2006	542.459.000	76.959.938	465.499.062	460.500.000
Jumlah		Rp792.309.500	Rp113.301.828	Rp679.007.672	Rp667.500.000

Berdasarkan Resume Kasus Pemalsuan SPM pada KPPN Jakarta IV bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan, negara dirugikan sebesar Rp792.309.500.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-8739/PB/2006 tanggal 30 Nopember 2006 hal Persetujuan pembayaran dana DIPA 2006 Satker Departemen Agama akibat pemalsuan SPM, butir 4 bahwa terhadap pegawai yang terlibat dalam pemalsuan SPM agar dilakukan TGR dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pada butir 5 dicantumkan bahwa Piutang TGR dicantumkan pada neraca satuan kerja KPPN Jakarta IV. Sampai dengan 31 Desember 2006 jumlah sebesar Rp792.309.500 belum dilunasi oleh pegawai tersebut ke kas negara.

www.peraturan.go.id

C.2.12. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka Rp595,60 miliar

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2006 sebesar Rp595.604.989.211 merupakan belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang manfaat/barangnya masih akan diterima pada periode berikutnya yang berada di:

- Kementerian Negara PAN	Rp167.475.000
- BRR Aceh-Nias [1)]	594.839.660.739
- BKN [2)]	597.853.472
	Rp595.604.989.211

Keterangan:
1) merupakan pembayaran termin atas pembangunan rumah yang belum selesai oleh BRR Aceh-Nias sebesar Rp581.822.001.519 dan sisa sewa yang belum habis masa sewanya sebesar Rp13.017.659.220.
2) merupakan sewa gedung tiga kantor regional BKN

Pada Neraca per 31 Desember 2005 belum menyajikan Belanja Dibayar di Muka.

C.2.13. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain Rp19,78 triliun

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp19.770.394.533.689 dan Rp6.578.250.135.452 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang terdiri dari:

	2006	2005
- Piutang di K/L	Rp6.395.986.372.256	Rp6.556.737.856.239
- Bunga dan denda	17.056.982.202	21.512.279.213
- Kredit program	1.017.038.368.126	
- Piutang 18 BDL	12.180.641.909.105	0
- Piutang Kelebihan Rekapitalisasi	155.000.000.000	0
- Kompensasi penjualan aset eks asing/cina	4.670.902.000	0
Jumlah	Rp19.770.394.533.689	Rp6.578.250.135.452

- Piutang Lain-lain yang berasal dari kementerian negara/lembaga sebesar Rp6.395.986.372.256 merupakan piutang yang berada di Kejaksaan Agung berupa denda dan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 belum diselesaikan.
- Piutang bunga dan denda sebesar Rp17.056.982.202 merupakan jumlah bunga dan denda dari pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 yang sudah jatuh tempo tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 belum diterima. Rincian piutang bunga dan denda dapat dilihat pada Daftar 15.
- Piutang kredit program sebesar Rp1.017.038.368.126 merupakan hak pemerintah sampai dengan 31 Desember 2006 atas beberapa kredit program yang telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:
  - § Tunggakan Kkop Pangan sebesar Rp92.373.626.116 merupakan hak pemerintah atas kredit kepada Koperasi dalam rangka Pengadaan Pangan (KKop-Pangan) Musim Pengadaan (MP) 2000. Dalam rangka pelaksanaan KKop-Pangan MP 2000. Pemerintah telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan 5 (lima) bank pelaksana, dengan total plafond sebesar Rp500 milyar.

www.peraturan.go.id

- § Tunggakan dalam rangka Program Kredit Ketahanan Pangan yang menjadi bagian Pemerintah atas klaim risiko sampai dengan akhir tahun 2006 sebesar Rp1.413.860.570.
- § Hak pemerintah sebesar Rp923.250.881.440 merupakan tunggakan yang terkait dengan program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Pengadaaan (TP) 1999/2000. Dalam rangka pelaksanaan KUT TP 1999/2000 tersebut. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan 11 (sebelas) bank pelaksana dalam rangka penyediaan pendanaan dengan subsidi bunga dari Pemerintah, dengan total plafond sebesar Rp1.903 milyar.

- Piutang 18 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp12.180.641.909.105 merupakan total kewajiban 18 BDL kepada Pemerintah sampai dengan triwulan IV tahun 2006 (termasuk piutang Bank Asiatic (DL), Bank Dagang Bali (DL) dan Bank Global Internasional (DL)). Atas piutang tersebut, Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan BI dan selanjutnya meminta rencana kerja dari Tim Likuidasi Bank eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah. Rincian piutang yang berasal dari kewajiban BDL dapat dilihat pada Daftar 16.

- Piutang kelebihan rekapitalisasi sebesar Rp155.000.000.000 merupakan kelebihan biaya rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesia (BDI) yang harus dikembalikan kepada Pemerintah. BDI diminta untuk melakukan koreksi atas masih tercantumnya pinjaman subordinasi Danamon Internasional dalam neracanya dengan menyetorkannya ke rekening BUN No. 502.000.000 di Bank Indonesia.

- Piutang kompensasi penjualan aset bekas asing/cina sebesar Rp4.670.902.000 merupakan tagihan atas pelepasan/penjualan aset bekas milik asing/cina kepada pihak ketiga di Surabaya sebesar Rp2.448.268.000 dan di Semarang sebesar Rp2.222.634.000 yang sampai saat ini sedang dalam proses penyelesaian/penagihan. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan pihak yang bersangkutan belum juga melunasi kewajibannnya, maka besarnya kompensasi akan ditaksir ulang.

C.2.14. Persediaan

Persediaan Rp3,54 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp3.535.170.895.752 dan Rp7.046.248.099.544 merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga dan unit terkait lainnya.

Termasuk dalam nilai persediaan kementerian negara/lembaga sebesar Rp2.049.577.288.585 antara lain:

- Persediaan yang berada di BRR Aceh-Nias dengan nilai Rp452.392.778.617 yang sebagian besar merupakan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa persediaan rumah dan bangunan sebesar Rp449.880.004.651, peralatan, alat permainan edukatif dan sarana perpustakaan sebesar Rp2.489.142.016 dan sisanya sebesar Rp23.631.950 merupakan hasil stock opname barang habis pakai.
- Persediaan di Kepolisian RI berupa barang konsumsi, amunisi dan suku cadang serta blangko SSB sebesar Rp618.428.329.304.

Rincian Persediaan untuk setiap kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 17.

Persediaan dari unit terkait lainnya sebesar Rp1.485.593.607.167 terdiri dari:

- Persediaan berupa Cadangan Beras Pemerintah yang belum terjual/tersalurkan yang disimpan di Perum Bulog sebesar Rp1.275.713.700.000.

www.peraturan.go.id

- Persediaan berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp209.879.907.167 yang meliputi pengadaan tahun 2006 dan sisa CBN tahun sebelumnya yang belum tersalurkan.

C.2.15. Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah

RDI/RPD Rp59,21 triliun

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp59.212.080.140.000 dan Rp60.371.748.000.000 merupakan nilai dana investasi yang terdiri dari:

(dalam juta rupiah)

	2006	2005
- pokok blm jatuh tempo	Rp41.502.352,46	Rp44.632.310,10
- total tunggakan per 31-12-2006	16.678.387,04	5.682.157,40
- kewajiban akrual bunga, biaya komitmen dan denda s.d. 31-12-2006	1.031.340,65	10.057.280,50
Jumlah	Rp59.212.080,14	Rp60.371.748,00

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, tunggakan sebesar Rp17.709.727,69juta (Rp16.678.387,04 juta + Rp1.031.340,65 juta) tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Kategori	2006	%	2005	%
- Lancar	551.922,37	3,12%	700.825,13	4,47%
- Dalam perhatian	578.891,08	3,27%	1.155.512,03	7,37%
- Kurang lancar	125.827,15	0,71%	464.042,20	2,96%
- Diragukan	48.267,34	0,27%	98.261,32	0,63%
- Macet	16.404.819,75	92,63%	13.262.498,53	84,58%
Jumlah	17.709.727,69		15.681.139,20	

Rincian saldo RDI/RPD dapat dilihat pada Daftar 18.

RDI dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 7/Kep/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971 merupakan kelanjutan dari pengelolaan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan yang sudah dilaksanakan pada PELITA I tahun 1969. Proyek yang dibiayai antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, jasa keuangan bank dan bukan bank, sarana dan prasarana pemerintah daerah dan koperasi melalui unit usaha BUMN, BUMD/Pemda. Pembiayaan yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri ini diharapkan tidak akan membebani APBN. Pengembalian pinjaman luar negeri bersumber dari pembayaran kembali RDI oleh debitur.

SLA diberikan berdasarkan Keppres No. 59 tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Surat keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Proyek yang dapat dibiayai melalui SLA antara lain pertanian, eksplorasi laut, kehutanan. Perkebunan, farmasi, jasa keuangan bank dan bukan bank, sarana dan prasarana pemerintah daerah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi melalui unit usaha BUMN, BUMD/Pemda dan Koperasi.

RPD dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-495/MK.01/86 tanggal 7 Mei 1986. Pedoman Pengelolaan RPD mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. S-1021/KMK.013/1991 tanggal 30 September 1991 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 347.a/KMK.017/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Proyek yang dapat dibiayai melalui RPD antara lain sarana dan prasarana pemerintah daerah, perusahaan air minum melalui unit usaha BUMD/Pemda.

www.peraturan.go.id

C.2.16. Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp5,69 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp5.690.613.254.758 dan Rp2.937.740.327.698 merupakan dana pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota KSM dan lain-lain yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga. Rincian dana bergulir adalah sebagai berikut:

	2006	2005
1. Dep. Keuangan [1)]	1.658.234.536.813	1.211.990.994.755
2. Dep. Perindustrian [2)]	7.610.858.926	40.246.486.000
3. Dep. Kehutanan [3)]	1.476.715.412.919	0
4. Dep. Kelautan dan Perikanan [4)]	2.968.940.800	0
5. Kemneg. Kop dan UKM [5)]	2.540.083.505.300	1.685.502.846.943
6. KLH [6)]	5.000.000.000	0
Jumlah	Rp5.690.613.254.758	Rp2.937.740.327.698

Keterangan:

1) Dana Bergulir yang dikelola oleh Departemen Keuangan yang disalurkan antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah , PT Bank BUKOPIN, PT Bank BRI dan PT Bank Mandiri. Dari jumlah tersebut yang terkait dengan RDI sebesar Rp945.091.660.984 dan tidak terkait RDI sebesar Rp713.142.875.829.

2) Jumlah tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang terdiri dari piutang lancar sebesar Rp4.723.407.082 dan piutang kurang lancar sebesar Rp2.887.451.842. Sedangkan piutang macetnya berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp26.708.553.030.

3) Meliputi Dana Hutan Tanaman Industri, Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai, Dana Kredit Usaha Persuteraan Alam dan Dana Kredit Usaha Hutan Rakyat. Atas pengembalian dana bergulir tersebut dari pihak ketiga langsung disetorkan ke kas negara dan tidak digulirkan lagi.

4) Merupakan dana penguatan modal yang diberikan kepada 164 Koperasi Usaha Bersama dengan melibatkan 2.624 nelayan. Dana bergulir tersebut disalurkan selama periode 2003-2006.

5) Merupakan nilai akumulasi sejak tahun 2000 s.d. 2006 yang merupakan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir untuk memberikan stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

6) Merupakan dana Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah (UKM) sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup.

C.2.17. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp2,75 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp2.750.000.000.000 dan Rp2.684.000.000.000 merupakan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang disalurkan melalui BUMN dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai BUMN Pengelola dan/atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pinjaman pendanaan KUMK merupakan kelanjutan pendanaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi untuk memberikan kredit likuiditas. Untuk itu pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan pagu sebesar Rp9.97 triliun. Realisasi pencairan pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Saldo awal	Rp2.684.000.000.000	Rp1.420.053.000.000
Mutasi	66.000.000.000	1.263.947.000.000
Saldo akhir	Rp2.750.000.000.000	Rp2.684.000.000.000

www.peraturan.go.id

Rincian mengenai pencairan pinjaman pendanaan KUMK sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dapat dilihat pada Daftar 19.

C.2.18. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara Rp475,46 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp475.464.257.091.081 dan Rp430.416.127.491.383 merupakan nilai penyertaan modal negara pada:

	2006	2005
- BUMN	Rp427.461.229.833.450	Rp393.102.042.283.196
- BHMN	11.077.359.758.021	0
- Non BUMN	2.891.624.719.663	2.627.090.000.000
- Lemb Internasional	34.034.042.779.947	34.686.995.208.187
	Rp475.464.257.091.081	Rp430.416.127.491.383

Penyertaan pada BUMN (kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51%) merupakan penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan negara pada BUMN yang bersangkutan (*equity method*). Penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp427.461.229.883.450 diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BUMN dari 141 BUMN (termasuk PT Dirgantara dan PT Sarana Multigriya Finansial).

Laporan keuangan BUMN tersebut terdiri dari:
- 78 laporan keuangan *audited* tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar Rp263.087.019.629.585;
- 40 laporan keuangan *unaudited* tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar Rp14.991.714.561.165;
- 19 laporan keuangan prognosa tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar 149.549.606.516.700*;*
- 1 laporan keuangan semester tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar *minus* Rp83.618.000.000;
- 1 laporan keuangan RKAP tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar *minus* Rp83.492.874.000.

BUMN yang laporannya belum tersedia adalah PT Survey Udara Penas dan PT Kertas Kraft Aceh.

PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp11.077.359.758.021 merupakan nilai ekuitas pada 8 BHMN yang untuk pertama kalinya dilaporkan dalam LKPP Tahun 2006, dengan rincian:

- Universitas Indonesia	Rp 723.228.256.772
- Universitas Gajah Mada	3.449.713.148.361
- Institut Teknologi Bandung	3.502.699.685.808
- Institut Pertanian Bogor	666.119.015.547
- Universitas Sumatra Utara	1.795.220.836.565
- Universitas Airlangga	485.865.957.320
- Universitas Pendidikan Indonesia	320.032.801.365
- BP MIGAS	134.480.056.283
	Rp11.077.359.758.021

Dari 8 BHMN di atas, Pemerintah telah menetapkan status Penyertaan sebagai Kekayaan Negara yang tertanam pada BHMN terhadap 2 BHMN yaitu Institut Pertanian Bogor dan Universitas Airlangga.

Penyertaan modal negara pada perusahaan minoritas (non BUMN) merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang

www.peraturan.go.id

dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

Dari 20 perusahaan minoritas, 18 perusahaan telah menyajikan laporan keuangannya. Dua perusahaan minoritas yang belum menyampaikan laporan keuangannya adalah PT Asean Bintulu Fertilizer dan PT Asean Copper Product.

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2006. Setoran dalam bentuk *promissory notes* tidak diperhitungkan dalam nilai penyertaan modal ini. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2006.

Rincian penyertaan modal pemerintah pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 20. Sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No.8 Tahun 2006. LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih disajikan dalam Daftar 40 dan Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya disajikan dalam Daftar 41.

Rincian penyertaan modal negara pada perusahaan minoritas dapat dilihat pada Daftar 21, dan rincian penyertaan modal negara pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Daftar 22.

C.2.19. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp121,74 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp121.735.183.292.481 dan Rp154.076.839.362.585 merupakan nilai penyertaan modal negara pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas, kecuali Otorita Asahan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

	2006	2005
- Bank Indonesia[1)]	Rp 97.162.895.000.000	130.226.559.000.000
- Otorita Batam	3.352.543.555.131	3.257.297.014.574
- BP Kemayoran	1.932.229.948.842	1.753.205.767.127
- BPGBK	13.661.282.017.192	13.839.777.580.884
- LPS	5.573.844.961.000	4.000.000.000.000
- Taman Mini Indonesia Indah	27.335.937.622	0
- Otorita Asahan[2)]	449.482.699	0
- BP Gdg Manggala Wanabakti	24.602.389.995	0
- PT SMF[3)]	0	1.000.000.000.000
Jumlah	Rp121.735.183.292.481	Rp 154.076.839.362.585

Keterangan:

1) Nilai ekuitas pada BI berdasarkan Laporan Keuangan BI per 31 Desember 2006, merupakan selisih antara nilai aset sebesar Rp772.066.182 juta dengan nilai kewajiban sebesar Rp674.903.287 juta.

2) Merupakan aset negara di bawah pengelolaan Otorita Asahan berupa tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya.

3) Pada tahun 2006 PT SMF statusnya berubah menjadi BUMN yang masih berada di bawah Departemen Keuangan dengan kepemilikan Negara 100%.

www.peraturan.go.id

C.2.20. Aset Tetap

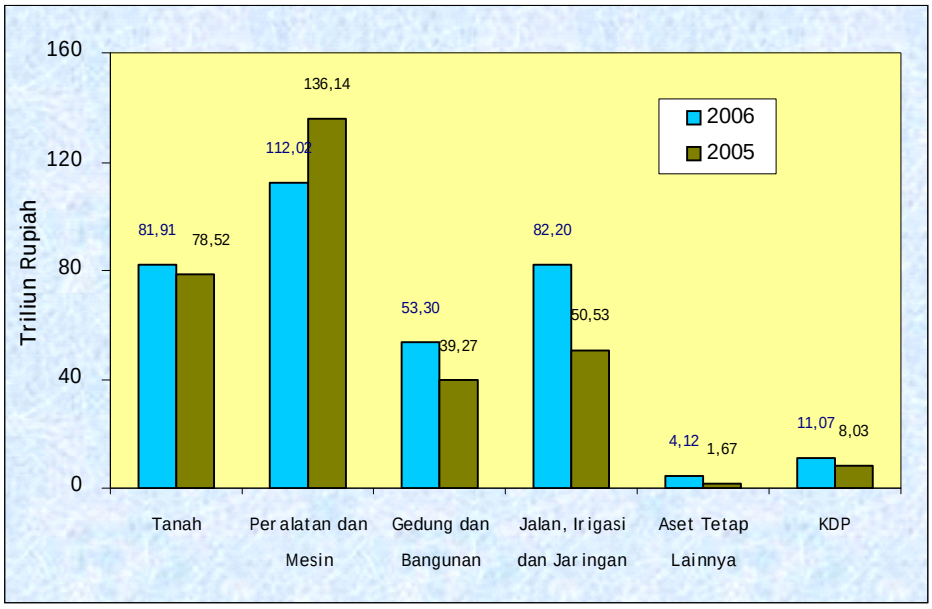
Aset Tetap Rp344,61 triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp344.614.733.680.873 dan Rp314.167.367.146.478 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Sampai saat ini belum dilakukan penilaian atas nilai wajar aset tetap. Rincian menurut jenis aset tetap dan perbandingannya dapat dilihat pada Tabel 8 dan Grafik 29.

Rincian lebih lanjut masing-masing aset tetap untuk setiap kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 23.

Tabel 8
Aset Tetap
(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	2006	2005
Tanah	81.910.266.143.051	78.518.225.156.823
Peralatan dan Mesin	112.020.234.093.856	136.141.296.429.368
Gedung dan Bangunan	53.296.738.091.616	39.274.840.245.416
Jalan. Irigasi dan Jaringan	82.202.555.277.832	50.532.399.824.448
Aset Tetap Lainnya	4.119.371.666.634	1.668.962.576.760
Konstruksi Dlm Pengerjaan	11.065.568.407.884	8.031.642.913.663
Total	344.614.733.680.873	314.167.367.146.478



Grafik 29: Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Jenisnya

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2006 termasuk aset tetap dari unit fiskal register yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Nilai aset tetap seluruh kementerian negara/lembaga di luar Departemen Petahanan (Dephan) mencatat kenaikan sebesar Rp30.457.996.336.169 dibandingkan nilai per 31 Desember 2005. Namun, karena Dephan mencatat penurunan aset tetap (lihat penjelasan di bawah) sebesar Rp58.960.476.047.440, sehingga secara keseluruhan aset tetap hanya mengalami kenaikan sebesar Rp29.757.586.669.873.

www.peraturan.go.id

Peningkatan (penambahan) nilai aset tetap seluruh kementerian negara/lembaga di luar Departemen Petahanan adalah sebesar Rp30.457.996.336.169, lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2006 sebesar Rp54.499.059.303.639. Hal ini disebabkan oleh penambahan aset tetap yang tidak hanya berasal dari realisasi belanja modal, tetapi juga berasal dari realisasi belanja barang yang menghasilkan aset tetap, transfer masuk, hibah masuk, reklasifikasi masuk, pengembangan nilai, dan koreksi nilai, serta penambahan aset tetap dari tiga unit fiskal register di atas sebesar Rp3.839.749.165.564

Terkait dengan koreksi nilai sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, beberapa kementerian negara/lembaga melakukan koreksi nilai atas saldo awal aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi ulang antara lain di Departemen Energi dan SDM sebesar Rp6.957.753.573.546, Departemen Perhubungan sebesar Rp3.848.555.467.209, dan Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp8.414.953.866.757.

Penurunan nilai aset tetap di Dephan terjadi karena Dephan tidak melakukan koreksi tambah atas perkiraan Peralatan dan Mesin senilai Rp62.211.264.224.243 yang menghasilkan saldo akhir per 31 Desember 2005 sebesar Rp89.911.441.781.540. Dephan tetap menggunakan angka Neraca Dephan 2005 *unaudited* sebagai saldo awal dalam Neraca komparatif Dephan Tahun 2006 *unaudited* karena tidak ada catatan dan fisik yang sebenarnya terhadap penambahan angka dimaksud sehingga nilai aset tetapnya menurun Rp58.960.476.047.440 dibandingkan tahun lalu.

C.2.21. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp86,99 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp86.987.549.159.095 dan Rp78.199.723.205.376 merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Pengunaannya (*restricted assets*), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Aset Lainnya per 31 Desember 2006
(dalam rupiah)

Uraian	2006	2005
- Tagihan Penjualan Angsuran	126.825.794	396.153.164.892
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	51.048.922.086	67.339.857.240
- Kemitraan dgn Pihak Ketiga	314.819.000	1.296.844.250
- Aset Tak Berwujud	626.241.182.170	50.173.529.179
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya	29.954.472.252.333	32.381.868.877.082
- Aset Lain-lain	56.355.345.157.712	45.302.890.932.733
Jumlah	86.987.549.159.095	78.199.723.205.376

Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo TPA merupakan saldo TPA kementerian negara/lembaga yang berada di:

	2006	2005
- Dewan Perwakilan Rakyat	Rp 32.375.000	0
- Badan Pemeriksa Keuangan	29.260.000	Rp 35.530.000
- Departemen Pekerjaan Umum	0	396.000.000.000
- Bappenas	62.670.794	117.634.892
- Badan Intelejen Nagara	2.520.000	0
	Rp 126.825.794	Rp396.153.164.892

www.peraturan.go.id

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan TGR merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di kementerian negara/lembaga. Rincian Tagihan TGR dapat dilihat pada Daftar 24.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

	2006	2005
- Departemen Agama	0	Rp 19.800.000
- Departemen Kehutanan	Rp 33.569.000	33.569.000
- Departemen Pekerjaan Umum	0	1.243.475.250
- Bappenas	281.250.000	0
	Rp 314.819.000	Rp1.296.844.250

Dana yang Dibatasi Pengunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

	2006	2005
- Rekening khusus	Rp 845.909.266.282	Rp1.787.807.379.270
- *Escrow account*	26.337.406.166.238	27.845.902.360.514
- Dana penjaminan	579.335.691.131	325.701.926.145
- Kas besi	394.670.903.051	430.626.232.314
- Rekening penjaminan	263.995.256.882	0
- Dana Abadi Umat	1.315.729.609.307	0
- Bapertarum	5.183.832.240	0
- Kas PMU Rekompak	158.504.274.302	0
- Kas Komite Beasiswa	53.737.252.900	0
- Dana devisa	0	1.991.830.978.836
Jumlah	Rp29.954.472.252.333	Rp32.381.868.877.082

- Saldo rekening khusus sebesar Rp845.909.266.282 merupakan rekening khusus pemerintah di BI. Rincian per rekening dapat dilihat di Daftar 25.
- *Escrow accounts* sebesar Rp26.337.406.166.238 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:
  - Saldo rekening dana reboisasi sebesar Rp10.295.063.936.535 merupakan rekening dana reboisasi yang penggunaan dananya hanya untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan melalui skema pinjaman. Kebijakan pengelolaan dana tersebut diatur dengan ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1999. Inpres Nomor 4 Tahun 2000 serta PP Nomor 35 Tahun 2002.
  - Saldo Dana Moratorium sebesar Rp4.646.770.992.158 merupakan dana moratorium yang berada pada Bank Umum dan BI yang digunakan untuk menampung sisa dana moratorium Tahun Anggaran 2005 yang belum digunakan dalam APBN.
  - *Escrow accounts* subsidi meliputi subsidi BBM, listrik, pupuk, dan pangan yang pada akhir tahun anggaran belum dapat diverifikasi oleh BPKP. Saldo e*scrow accounts* subsidi PSO sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp4.667.266.053.725.
  - *Escrow accounts* dana bagi hasil merupakan rekening penampungan untuk dana bagi hasil perikanan, pertambangan umum, kehutanan, dan DAK DR yang belum disalurkan pada tahun anggaran bersangkutan karena daerah penghasil belum teridentifikasi. Saldo e*scrow accounts* dana bagi hasil per 31 Desember 2006 sebesar Rp3.105.524.842.204.

www.peraturan.go.id

- Rekening Dana Cadangan Infrastruktur merupakan rekening penampungan dana infrastruktur Tahun anggaran 2006 yang belum digunakan oleh Direktorat Pengelolaan Dana Investasi Departemen Keuangan karena dokumen belum lengkap. Saldo Dana Cadangan Infrastruktur per 31 Desember 2006 sebesar Rp2.000.268.835.616.
- Rekening Cadangan Penanaman Modal Negara (PMN) merupakan rekening penampungan sisa dana PMN Tahun Anggaran 2006 yang belum disalurkan kepada BUMN penerima karena dokumen belum lengkap. Saldo per 31 Desember 2006 sebesar Rp1.622.050.000.000.
- Rekening Cadangan Jasa Perbendaharaan merupakan rekening penampungan sisa pagu jasa perbendaharaan Tahun Anggaran 2006 karena dokumen belum lengkap. Saldo per 31 Desember 2006 sebesar Rp461.506.000.

Beberapa escrow account telah diselesaikan pada awal tahun 2007 seperti Rekening Dana Cadangan Infrastruktur dan Rekening Cadangan PMN (lihat C.3). Rincian masing-masing *escrow account* disajikan pada Daftar 26.

- Dana Penjaminan sebesar Rp579.335.691.131 merupakan dana penjaminan yang berada di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp305.683.304.480, di Departemen Pertanian berupa dana penjaminan atas pinjaman petani/kelompok petani kepada perbankan sebesar Rp255.000.000.000, serta di Departemen Kehutanan berupa deposito terbeku yang merupakan jaminan Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUKDAS) sebesar Rp18.652.386.651.
- Kas besi sebesar Rp394.670.903.051 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kas Besi Perwakilan RI di luar negeri dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya. yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri.
- Rekening penjaminan sebesar Rp263.995.256.882 merupakan rekening penjaminan berupa uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/JTKI) dan jaminan dari lembaga Penempatan Tenaga kerja swasta yang berada di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp223.503.725.000 dan uang deposito untuk perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) sebesar Rp40.491.531.882. Rekening penjaminan di DESDM termasuk juga KK dan PKP2B yang terminasi sepihak yang akan disetor ke kas negara sebesar Rp2.985.925.000.
- Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji. Jumlah sebesar Rp1.315.729.609.307 merupakan nilai ekuitas DAU. Dana ini tidak berada di Rekening Kas Negara dan baru dilaporkan dalam LKPP Tahun 2006.
- Bapertarum sebesar Rp5.183.832.240 merupakan nilai ekuitas Bapertarum.
- Kas PMU ReKOMPAK sebesar Rp158.504.274.302 merupakan nilai uang kas pada rekening PMU ReKOMPAk yang belum disalurkan kepada Kelompok Penerima Bantuan (Kelompok Pemukim).
- Kas Komite Beasiswa sebesar Rp53.737.252.900 merupakan nilai uang kas pada rekening Komite Beasiswa yang dikelola oleh Komite Pelaksana Program

www.peraturan.go.id

Beasiswa Pendidikan Lanjutan, yang bertujuan untuk mendanai beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan di propinsi NAD.

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp626.241.182.170 merupakan aset tak berwujud yang berupa antara lain software, biaya survey/penelitian dan hak paten yang berada di kementerian negara/lembaga. Rincian Aset Tak Berwujud masing-masing kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada Daftar 27.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut:

Instansi/unit terkait	2006	2005
- K/L	Rp1.223.318.252.619	Rp1.589.303.810.078
- PPA	4.382.507.066.912	8.893.391.456.657
- Tim Koordinasi	7.360.075.726.532	1.099.621.502.074
- DJKN	4.770.301.276.713	780 .629.350.227
- Direktorat PPP	73.671.929.170	0
- BP Migas	38.545.470.905.766	32.939.944.813.697
Jumlah	Rp56.355.345.157.712	Rp45.302.890.932.733

- Aset Lain-lain yang berasal dari kementerian negara/lembaga sebesar Rp1.223.318.252.619 disajikan pada Daftar 28.
- Aset Lain-lain yang berasal dari PPA sebesar Rp4.382.507.066.912 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PPA menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian disajikan pada Daftar 29.
- Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp7.360.075.726.532 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih) sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA. Jumlah tersebut di luar aset yang berasal dari penyelesaian di Tim Koordinasi dan aset non ATK. Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada Daftar 30.
- Aset Lain-lain yang berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan sebesar Rp4.770.301.276.713 merupakan piutang macet kementerian negara/lembaga yang penagihannya dialihkan ke DJKN. Hasil bersih penagihan akan merupakan PNBP kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Rincian disajikan pada Daftar 31.
- Aset Lain-lain yang berasal dari BP Migas sebesar Rp38.545.470.905.766 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang berupa Aset dan Inventori yang dikelola oleh KKKS, dengan rincian sebagai berikut (dalam juta rupiah):

www.peraturan.go.id

Aset	Cost	Acc. Depr.	Book Value
- Tahap Produksi	201.781.490,66	171.323.553,25	30.457.937,41
- Tahap Eksplorasi	86.034,19		86.034,19
Sub jumlah	201.867.524,86	171.323.553,25	30.543.971,60

Inventory	Capital	Non Capital	Total
- Tahap produksi	3.716.982,50	3.824.496,01	7.541.478,51
- Tahap eksplorasi	416.641,06	43.379,73	460.020,79
Sub jumlah	4.133.623,55	3.867.875,75	8.001.499,30
Jumlah			38.545.470,91

Data tanah yang digunakan oleh KKKS sampai saat ini masih dilakukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut.

- Aset Lain-lain yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan sebesar Rp73.671.929.169 terdiri dari:
  - § Dana pemerintah sebesar Rp48.937.803.536 dalam rangka kerjasama penjamin kredit UMKM pada Perum Pengembangan Sarana Usaha yang terdiri dari Rekening Giro Rp237.803.536 dan Deposito Rp48.700.000.000.
  - § Dana Cadangan Kredit Usaha Tani (KUT). Dalam rangka pelaksanaan KUT Tahun Pengadaan 1999/2000, Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan sebelas bank pelaksana dalam rangka penyediaan pendanaan dengan subsidi bunga dari Pemerintah, dengan total plafond sebesar Rp1.903 milyar. Dari plafond sebesar Rp1.903 milyar tersebut, sampai dengan akhir pelaksanaan program, masih terdapat hak (piutang) pemerintah di masyarakat sebesar Rp24.734.125.634.

C.2.22. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp460,69 miliar

Utang PFK per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp460.693.623.955 dan Rp219.972.238.360 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran PFK adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
- Pengmbl. Pen. PFK 10% Gaji	7.069.979.354.525	6.762.091.747.193	307.887.607.332
- Pengmbl. Pen. PFK 2% Gaji Terusan	3.607.793.598	28.019.062.610	(24.411.269.012)
- Pengmbl. Pen. PFK 2% Iuran Kes. Pemda	678.273.581.764	609.438.201.000	68.835.380.764
- Pengmbl. Pen. PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	4.959.217.778	6.220.563.000	(1.261.345.222)
- Pengmbl. Pen. PFK 2% Askes TNI/Polri	61.669.343.093	46.524.241.000	15.145.102.093
- Pengmbl. Pen. PFK Lain-lain	356.998.148.000	262.500.000.000	94.498.148.000
Jumlah	8.175.487.438.758	7.714.793.814.803	460.693.623.955

C.2.23. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp79,76 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp79.760.070.578.171 dan Rp87.808.151.589.830 merupakan utang pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca. Jumlah Bagian Lancar Utang Luar Negeri disajikan pada Tabel 10. Rincian Bagian Lancar Utang Luar Negeri yang akan dibayar per bulan selama tahun 2007 dapat dilihat pada Daftar 32.

www.peraturan.go.id

Tabel 10
Bagian Lancar Utang Luar Negeri per Jenis Utang
(dalam rupiah)

Jenis Utang	2006	2005
Bilateral	21.936.088.982.000	19.873.704.475.240
Bonds and Notes	0	82.947.397.870
Kredit Komersil	45.913.025.000	56.940.432.280
Kredit Ekspor	12.495.274.241.000	14.771.267.440.930
Leasing	496.201.833.000	642.644.133.660
Multilateral	18.708.463.506.000	20.065.627.469.370
Jumlah	53.681.941.587.000	55.493.131.349.350

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri merupakan reklasifikasi surat utang negara (SUN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca, sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri per Jenis Obligasi
(dalam rupiah)

Jenis Bonds	2006	2005
Fixed Rate Bonds :		
Nominal	15.453.245.000.000	13.317.430.000.000
Unamortized Premium (Disc.)	(2.411.288.372)	0
Nilai bersih (nilai buku) (I)	15.450.833.711.628	13.317.430.000.000
Variable Rate Bonds :		
Nominal	9.040.826.000.000	10.308.250.000.000
Unamortized Premium (Disc.)	0	0
Nilai bersih (nilai buku) (II)	9.040.826.000.000	10.308.250.000.000
Surat Utang kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	1.586.469.279.543	8.689.340.240.480 *)
Accrued Indexation	0	0
Nilai bersih (nilai buku) (III)	1.586.469.279.543	8.689.340.240.480
Jumlah (I + II + III)	26.078.128.991.171	32.315.020.240.480

Catatan: *) CPI Indexed Linked Bond

Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri dapat dilihat pada Daftar 33, sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan SUN Tahun Anggaran 2006 dapat dilihat pada Daftar 39.

C.2.24. Utang Bunga

Utang Bunga Rp13,31 triliun

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp13.307.756.263.984 dan Rp47.495.944.414.493 merupakan jumlah utang bunga luar negeri dan utang bunga obligasi serta utang bunga lainnya yang masih harus dibayar. Rincian utang bunga luar negeri disajikan pada Tabel 12.

www.peraturan.go.id

Tabel 12
Utang Bunga Luar Negeri
(dalam rupiah)

Jenis Utang	2006	2005*)
Utang Bilateral	1.180.932.071.660	8.446.205.666.390
Bonds and Notes	0	127.374.269.640
Kredit Komersial	5.206.876.180	32.253.380.110
Kredit Ekspor	670.567.221.280	5.036.065.759.010
Leasing	3.626.996.120	44.051.473.900
Multilateral	1.770.604.234.740	8.063.471.854.160
Jumlah	3.630.937.399.980	21.749.422.403.210

Catatan: *) untuk tahun 2005, utang bunga merupakan jumlah proyeksi pembayaran bunga dan komisi yang akan dibayar pada tahun 2006.

Rincian utang bunga obligasi dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13
Utang Bunga Obligasi
(dalam rupiah)

Utang Bunga	2006	2005
Fixed Rate Bonds	6.250.198.367.506	5.367.441.925.390
Variable Rate Bonds	2.077.212.220.576	2.769.273.440.150
Surat Utang kepada BI	279.207.834.755	17.009.151.478.863 *)
International Bonds	1.060.517.694.628	600.685.166.880
Jumlah	9.667.136.117.465	25.746.522.011.283

Catatan: *) terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005 dan SRBI-1/MK/2003

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 34.

Utang bunga lainnya sebesar Rp9.682.746.539 merupakan utang subsidi bunga dalam rangka program Kredit Ketahanan Pangan yang belum ditagih oleh bank pelaksana kepada Pemerintah yang dihitung secara akrual dan harus dibayar pada tahun 2006.

C.2.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp8,14 triliun

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2006 sebesar Rp8.135.305.495.739 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

- Departemen Hukum dan HAM[1)]	Rp	17.049.958.838
- Departemen ESDM[2)]		40.491.531.882
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi[3)]		223.518.342.424
- Kementerian Negara BUMN		84.500.000
- Kepolisian RI[4)]		76.186.434.426
- Bapertarum		5.183.832.240
- *Escrow Account*[5)]		7.772.790.895.929
Jumlah		Rp 8.135.305.495.739

Keterangan:
1) Utang berupa bahan makanan narapidana yang berada di UPT-UPT daerah.
2) Utang kepada perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berupa rekening jaminan.
3) Terdiri dari uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebesar Rp223.503.725.000 dan utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp14.617.424.

www.peraturan.go.id

4) Utang perawatan dan makan tahanan.
5) Merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan dana bagi hasil dan subsidi *public service obligation* (PSO) yang sampai saat ini masih ditampung di rekening escrow. Lihat C.2.21 bagian *escrow accounts.*

Utang kepada Pihak Ketiga baru dilaporkan pada LKPP Tahun 2006.

C.2.26. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp2,94 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp2.944.434.123.992 dan Rp2.503.279.497.317. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari tunggakan kepada suplier Bahan Bakar Minyak Pelumas, Listrik, Telekomunikasi, Gas, dan Air di Departemen Pertahanan sebesar Rp2.941.365.403.920 dan utang yang menjadi bagian Pemerintah kepada bank pelaksana atas jumlah Kredit Ketahanan Pangan yang dipertanggungkan kepada lembaga penjaminan sebesar Rp3.068.720.072.

C.2.27. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN

Utang Jangka Panjang DN SUN Rp664,07 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp664.069.038.386.125 dan Rp623.558.308.465.243 merupakan posisi utang obligasi dalam negeri yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi
(dalam rupiah)

Jenis Obligasi	2006	2005
Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	223.111.256.000.000	175.838.592.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	(2.968.375.175.775)	(2.797.533.816.462)
Nilai bersih (nilai buku) (I)	220.142.880.824.225	173.041.058.183.538
Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	171.145.872.000.000	200.375.080.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	0	0
Nilai bersih (nilai buku) (II)	171.145.872.000.000	200.375.080.000.000
Surat Utang kepada BI		
Principle Outstanding	272.780.285.561.900	250.142.170.281.705*)
Accrued Indexation	0	0
Nilai bersih (nilai buku) (III)	272.780.285.561.900	250.142.170.281.705
Jumlah (I+II+III)	664.069.038.386.125	623.558.308.465.243

keterangan: *) merupakan gabungan dari CPI Index Linked Bond, SRBI-1/MK/2003, dan eks SU-005

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 35.

Catatan:

- Termasuk di dalam Fixed Rate Bond adalah satu seri ORI, yaitu ORI001 dengan tingkat kupon 12.05% yang akan jatuh tempo tahun 2009.
- Surat Utang kepada Bank Indonesia terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005, SU-007 dan SRBI-01. SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia. berkaitan dengan program penjaminan dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Pada bulan April 2006 Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor: SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999. Pada intinya, pokok-pokok yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama dimaksud antara lain:

www.peraturan.go.id

a. Klausul indeksasi pokok terhadap inflasi dihapus efektif tanggal 31 Desember 2005.
b. Tingkat bunga SU-002/MK/1998 diturunkan dari 3% menjadi 1%.
c. Jatuh tempo Surat Utang pasca restrukturisasi diperpanjang sampai 2025 dari yang sebelumnya 2018, dan
d. Perhitungan indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dikonversi menjadi surat utang baru (SU-007) dengan tingkat bunga 0,1% dan jatuh tempo tahun 2025.

- SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1% setahun (dari sebelumnya 3%), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018), dan tidak diindeks terhadap inflasi. SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3% setahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018), dan tidak diindeks terhadap inflasi. Sementara SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1% setahun dan pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025.

- Nilai nominal SRBI pada saat diterbitkan adalah sebesar Rp144.536.094.294.530.00 atau sama dengan jumlah nominal SU-001 dan SU-003. SRBI jatuh tempo tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1% setahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Pada tahun 2006 rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia lebih dari 10%, sehingga pada tahun 2006 Bank Indonesia menggunakan kelebihan tersebut untuk mengurangi saldo SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1,52 triliun.

C.2.28. Kewajiban Pemerintah terhadap THT

Kewajiban Pemerintah Terhadap Program THT Rp1,83 triliun

Jumlah Kewajiban Pemerintah terhadap THT per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp1.832.022.617.347 dan Rp1.717.659.839.897 merupakan utang jangka panjang pemerintah yang terkait dengan dana pensiun pegawai negeri.

Kewajiban Pemerintah terhadap THT sebesar Rp1.832.022.617.347 merupakan Kewajiban Pemerintah Terhadap Program THT sehubungan dengan saldo *unfunded liability* tahun 2004 kepada PT TASPEN akibat perubahan formula perhitungan manfaat dari SK Menkeu No. 500/KMK.06/2004.

Disamping itu, masih terdapat kewajiban *Unfunded Liabilitiy* Pemerintah terhadap Program THT posisi 31 Desember 2006 sebesar Rp525,641 miliar yang belum diselesaikan sebagai akibat dari adanya perubahan skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai PP Nomor 26 Tahun 2001 dan PP Nomor 11 Tahun 2003. Sampai saat ini, jumlah tersebut masih merupakan perhitungan sepihak dari PT TASPEN, sehingga Pemerintah tidak dapat mengakuinya sebagai utang Pemerintah kepada PT TASPEN.

C.2.29. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp505,10 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp505.104.096.673.440 dan Rp541.788.132.754.460 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca sebagaimana disajikan pada Tabel 15.

www.peraturan.go.id

Tabel 15
Utang Luar Negeri Jangka Panjang Perbankan per Jenis Utang
(dalam rupiah)

Jenis Utang	2006	2005
Bilateral	265.200.317.725.260	286.322.027.164.760
Kredit Ekspor	88.704.895.045.260	101.709.691.099.070
Multilateral	151.198.883.902.920	153.756.414.490.630
Jumlah	505.104.096.673.440	541.788.132.754.460

C.2.30. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Non Perbankan Rp130,87 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp130.873.212.300 dan Rp2.247.197.068.470 merupakan utang luar negeri non perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari:

	2006	2005
- Bonds	Rp 0	Rp 1.560.589.282.130
- Leasing	130.873.212.300	686.607.786.340
Jumlah	Rp130.873.212.300	Rp2.247.197.068.470

C.2.31. Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN

Utang Jangka Panjang LN SUN Rp50,46 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp50.456.525.092.318 dan Rp34.114.645.772.471 merupakan posisi utang obligasi luar negeri (*International Bonds-RI0014*) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
Original Issued Principles*	Rp52.072.000.000.000	Rp33.332.000.000.000
Accrued Indexation	(2.462.000.000.000)	1.073.000.000.000
Net Unamortized Pr (Disc.)	846.525.092.318	(290.354.227.529)
Nilai Bersih (nilai buku)	Rp50.456.525.092.318	Rp34.114.645.772.471

*) konversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs saat diterbitkan.

Catatan:
Penerbitan SUN berdenominasi USD pada tahun 2006 dilakukan pada bulan Maret 2006 dengan rincian sebagai berikut:

Item	Maret 2006 (Dual Tranches)	
Seri	INDO-17	INDO-35
Tanggal Penerbitan	9 Maret 2006	9 Maret 2006
Tanggal Jatuh Tempo	9 Maret 2017	12 Oktober 2035
Nominal (USD)	1.000.000.000	1.000.000.000
Kupon	6.875 %	8.50 %
Clean Price (%)	99.052	113.454
Clean Proceeds after discount (USD)	990.520.000	1.134.540.000
Underwriter's Fee (bps)	10 bps dari clean proceeds	10 bps dari clean proceeds
Underwriter's Fee (USD)	990.520	1.134.540

www.peraturan.go.id

Underwriter's Out of Pocket Expenses/OPE (USD)	470.000
Joint Lead Managers	Barclays Capital. JP Morgan. UBS Investment Bank
Listing	Singapore Exchange Securities Trading Limited
Rating	
- Standard and Poors	B+
- Fitch	BB-
- Moody's	B2

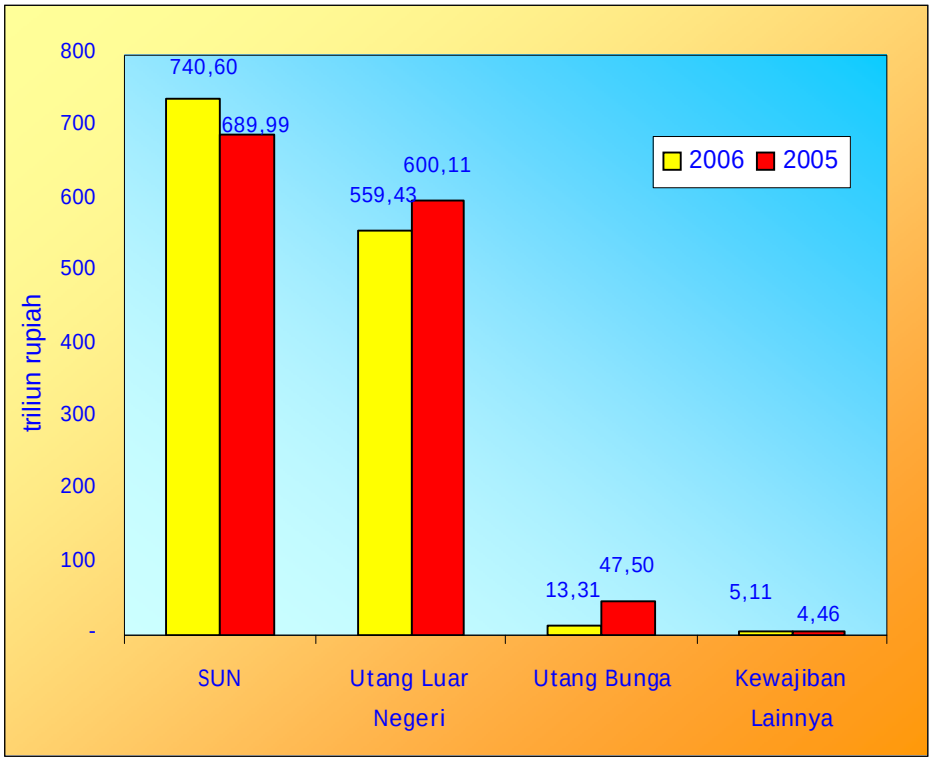
C.2.32. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang LN Lainnya Rp514,87 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp514.869.376.960 dan Rp576.681.707.720 merupakan posisi utang luar negeri komersial kredit yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca.

Posisi (*outstanding*) utang luar negeri Pemerintah RI secara keseluruhan menurut negara kreditor per 31 Desember 2006 dapat dilihat di Daftar 36.

Secara keseluruhan, komposisi kewajiban pemerintah disajikan pada Grafik 30. Sedangkan posisi Utang Luar Negeri, SUN, dan Utang Bunga dapat dilihat pada Tabel 16.



Grafik 30: Komposisi Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2006 dan 2005

Tabel 16
Posisi Utang Luar Negeri dan SUN
(Dalam Rupiah)

Jenis Utang	31-12-2006	31-12-2005	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN)			
Bag. Lancar Utang LN	53.681.941.587.000	55.493.131.349.350	(1.811.189.762.350)
Utang LN –Jangka Panjang	505.749.851.487.762	544.612.011.530.650	(38.862.160.042.888)
Jumlah	559.431.793.074.762	600.105.142.880.000	(40.673.349.805.238)
Surat Utang Negara (SUN)			
Bag. Lancar SUN	26.078.128.991.171	32.315.020.240.480	(6.236.891.249.309)
SUN-Jangka Panjang	664.069.038.386.125	623.558.308.465.243	40.510.729.920.882
Obligasi Intl.	50.456.525.092.318	34.114.645.772.471	16.341.879.319.847
Jumlah	740.603.692.469.614	689.987.974.478.194	50.615.717.991.420

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada posisi SUN terdapat kenaikan sebesar Rp50.615.717.991.420. Kenaikan ini antara lain karena penerbitan SUN baik melalui lelang maupun dengan *debt switching*, dan adanya restrukturisasi SU-002 dan SU-004 menjadi SU-007. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada Laporan Pertanggungjawaban SUN.

C.2.33. Sisa Anggaran Lebih

Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp17.066.126.565.213 merupakan saldo awal SAL tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2006 terdapat Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) sebesar Rp273.913.693.682 dan penambahan dari selisih tahun lalu sebesar Rp1.490.262.050.000 sehingga saldo akhir SAL per 31 Desember 2006 sebesar Rp18.830.302.308.895 Rincian SAL sampai dengan 31 Desember 2006 dan 2005 disajikan pada Tabel 17.

SAL Rp17,07 triliun

Tabel 17
Saldo Anggaran Lebih TA 2006 dan 2005
(dalam juta rupiah)

Uraian	TA 2006	TA 2005
Saldo Awal	17.066.126,57	21.574.381,77
- SILPA (SIKPA)	273.913,69	(5.535.482,21)
- Koreksi Set-Off BI	0,00	1.027.227,00
- Penambahan dari Selisih Tahun Lalu	1.490.262,05	0,00
Saldo Akhir	18.830.302,30	17.066.126,56
Rincian SAL terdiri dari:		
Rekening KPPN	20.594.618,63	17.956.484,01
Rekening BUN di BI	4.760.905,42	100.485,81
Rekening SAL di BI	305.609,93	48.181,78
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.460.472,09	671.209,25
Jumlah	27.121.606,07	18.776.360,85
Pengurang		
Utang PFK	(460.693,62)	(219.972,24)
Penggunaan Rek Moratorium	(1.700.000,00)	0,00
Penggunaan Rek Migas	(4.200.000,00)	0,00
Kas dalam Transito	(988.906,82)	0,00
Uang Muka Reksus	(93.133,58)	0,00
Jumlah	(7.442.734,02)	(219.972,24)

www.peraturan.go.id

Koreksi Pencatatan		
Perbedaan Pencatatan PFK	54.906,79	0,00
Koreksi SILPA terkait PPh dlm valas dan selisih Kurs	282.562,33	0,00
Perbedaan Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran	(1.162.970,51)	0,00
Perbedaan Pencatatan Kas di KPPN	(7.056,93)	0,00
Koreksi SIKPA/SILPA	(16.011,42)	0,00
Jumlah	(848.569,74)	0,00
Selisih Kas Lebih	0,00	(1.490.262,05)
SAL	18.830.302,30	17.066.126,56

SILPA Rp273,91 miliar

C.2.34. SILPA (SIKPA)

Jumlah SILPA (SIKPA) per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp273.913.693.682 dan minus Rp5.535.482.212.206 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran TA 2006.

Dana Lancar Lainnya Rp22,52 triliun

C.2.35. Dana Lancar Lainnya

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp22.518.154.250.699 dan Rp31.462.414.983.277 merupakan Kas dan Bank pemerintah di luar Rekening 502 BUN dan Rekening Kas di KPPN.

Cadangan Piutang Rp81,58 triliun

C.2.36. Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp81.576.030.282.945 dan Rp72.828.004.154.348 merupakan pasangan perkiraan Piutang, yang terdiri dari:

	2006	2005
- Piutang Pajak	Rp35.454.552.126.836	Rp29.216.456.291.000
- Piutang Bukan Pajak	25.737.724.557.593	37.025.156.608.440
- Bagian Lancar TPA	232.655.356	39.858.709
- Bagian Lancar TGR	12.153.879.936	8.101.260.747
- Belanja Dibayar Di Muka	597.914.389.211	0
- Piutang Lain-lain	19.688.724.084.329	6.578.250.135.452
Jumlah	Rp81.576.030.282.945	Rp72.828.004.154.348

Cadangan Persediaan Rp3,54 triliun

C.2.37. Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp3.535.170.895.752 dan Rp7.046.248.099.544 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan kementerian negara/lembaga dan instansi terkait lainnya.

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp432,94 miliar

C.2.38. Pendapatan yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp432.936.274.303 dan Rp955.897.763.011

www.peraturan.go.id

merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak kementerian negara/lembaga yang belum disetorkan ke Kas Negara. Perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp104,15 triliun

C.2.39. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Bagian Lancar Utang jangka Panjang. Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah sebagai berikut:

	2006	2005
- Bag Lancar Utang Jgk Panjang	Rp79.760.070.578.171	Rp87.808.151.589.830
- Utang Bunga	13.307.756.263.984	47.495.944.414.493
- Utang kpd Pihak Ketiga	8.135.305.495.739	0
- Utang Jgk Pendek Lainnya	2.944.434.123.992	2.503.279.497.317
Jumlah	Rp104.147.566.461.886	Rp137.807.375.501.640

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp664,85 triliun

C.2.40. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp664.852.133.778.320 dan Rp650.486.455.181.666 merupakan dana pemerintah pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
- Diinv. dlm RDI/RPD	Rp59.212.080.140.000	Rp60.371.748.000.000
- Diinv. dlm Dana Bergulir	5.690.613.254.758	2.937.740.327.698
- Diinv. dlm Inv Non Permanen Lainnya	2.750.000.000.000	2.684.000.000.000
- Diinv. dlm PMN	475.464.257.091.081	430.416.127.491.383
- Diinv. dlm Inv Permanen Lainnya	121.735.183.292.481	154.076.839.362.585
Jumlah	Rp664.852.133.778.320	Rp650.486.455.181.666

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp344,61 triliun

C.2.41. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp344.614.733.680.873 dan Rp314.167.367.146.478 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
- Diinv. Dlm Tanah	Rp81.910.266.143.051	78.518.225.156.823
- Diinv. Dlm Peralatan & Mesin	112.020.234.093.856	136.141.296.429.368
- Diinv. Dlm Gedung & Bangunan	53.296.738.091.616	39.274.840.245.416
- Diinv. Dlm Jln. Irigasi & Jaringan	82.202.555.277.832	50.532.399.824.448
- Diinv. Dlm Aset Tetap Lainnya	4.119.371.666.634	1.668.962.576.760
- Diinv. Dlm KDP	11.065.568.407.884	8.031.642.913.663
Jumlah	Rp344.614.733.680.873	Rp314.167.367.146.478

www.peraturan.go.id

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp86,99 triliun

C.2.42. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp86.987.549.159.095 dan Rp78.199.723.205.376 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Diinv. Dlm TPA	Rp 126.825.794	Rp 396.153.164.892
- Diinv. Dlm TGR	51.048.922.086	67.339.857.240
- Diinv. Dlm Kemitraan dg Phk Ketiga	314.819.000	1.296.844.250
- Diinv. Dlm Aset Tak Berwujud	626.241.182.170	50.173.529.179
- Diinv. Dlm Dana yg Dibatasi Penggunaannya	29.954.472.252.333	32.381.868.877.082
- Diinv. Dlm Aset Lain-lain	56.355.345.157.712	45.302.890.932.733
Jumlah	Rp 86.987.549.159.095	Rp78.199.723.205.376

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Rp1.222,11 triliun

C.2.43. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang. yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri. Rincian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2006	2005
- UJP DN SUN	Rp664.069.038.386.125	Rp623.558.308.465.243
- Kewajiban Pemerintah terhadap THT	1.832.022.617.347	1.717.659.839.897
- UJP DN Lainnya	0	20.730.320.269
- UJP LN Perbankan	505.104.096.673.440	541.788.132.754.460
- UJP LN Non Perbankan	130.873.212.300	2.247.197.068.470
- UJP LN SUN	50.456.525.092.318	34.114.645.772.471
- UJP LN Lainnya	514.869.376.960	576.681.707.720
Jumlah	Rp1.222.107.425.358.490	Rp1.204.023.355.928.530

C.3. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Piutang kepada PT PPA

Atas Piutang Pemerintah kepada PT PPA sebesar Rp79.006.894.729 sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Neraca (C.2.9), PT PPA telah melakukan penyetoran pada tanggal 29 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000.000 dan pada tanggal 2 April 2007 sebesar Rp29.006.894.729.

2. Rekening Cadangan Penanaman Modal Negara (PMN)

www.peraturan.go.id

Rekening Cadangan Penanaman Modal Negara (PMN) merupakan rekening penampungan sisa dana PMN TA 2006 yang belum disalurkan kepada BUMN penerima, yaitu sebanyak 12 BUMN dengan saldo per 31 Desember 2006 Rp1.622.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Neraca (C.2.21). Sampai dengan tanggal 28 Februari 2007, terdapat 8 (delapan) BUMN yang telah menerima dan menyampaikan konfirmasi penerimaan dana penyertaan tersebut ke rekening masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

No.	BUMN	Tanggal Surat	Jumlah (Rp)
1	PT Perikanan Nusantara	31 Januari 2007	100.000.000.000
2	PT Pertani	31 Januari 2007	20.000.000.000
3	PT Pupuk Sriwijaya	31 Januari 2007	100.000.000.000
4	Perum PPD	31 Januari 2007	40.000.000.000
5	PT Kertas Kraft Aceh	06 Februari 2007	100.000.000.000
6	PT Kliring Berjangka	13 Februari 2007	82.000.000.000
7	PT Kertas Leces	13 Februari 2007	100.000.000.000
8	PT Dirgantara Indonesia	13 Februari 2007	40.000.000.000
	Jumlah		582.000.000.000

Adapun BUMN yang menerima dana PMN pada bulan Maret 2007 dengan nilai total sebesar Rp1.040.000.000.000 adalah:

1. PT Garuda Indonesia	Rp	500.000.000.000
2. PT Merpati Nusantara Airlines		450.000.000.000
3. PT Semen Kupang		50.000.000.000
4. PT Industri Kereta Api		40.000.000.000
Total		Rp1.040.000.000.000

3. Rekening Cadangan Infrastruktur

Rekening Cadangan Infrastruktur merupakan rekening penampungan yang diperuntukkan bagi dana dukungan infrastruktur dengan saldo per 31 Desember 2006 sebesar Rp2.000.268.835.616 sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Neraca (C.2.21). Dana dukungan infrastruktur tersebut merupakan dana bergulir yang harus dikelola suatu badan (selain BUMN) untuk menghasilkan keuntungan. Pada tanggal 20 Desemebr 2006 Pemerintah telah membentuk Badan Investasi Pemerintah (BIP sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dengan status bertahap.

Pada tanggal 18 Januari 2007, Pemerintah telah menyalurkan dana Rp2.000.000.000.000 dari rekening escrow account ke rekening BIP. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari, BIP melakukan perjanjian investasi dengan Badan pengatur jalan Tol (BPJT) untuk penyaluran dana talangan bagi pembelian tanah dalam rangka pembangunan jalan tol sebesar Rp600.000.000.000. Pada tanggal 24 Januari 2007, BIP melakukan penyaluran tahap I dana investasi ke BPJT sebesar Rp590.000.000.000.

4. Pergantian Menteri Kabinet Indonesia Bersatu

www.peraturan.go.id

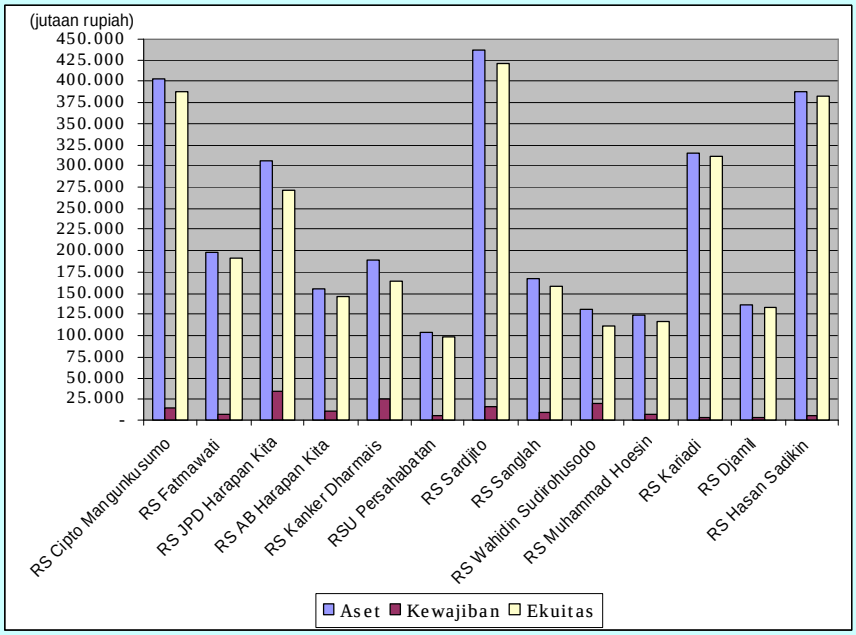
Pada tanggal 7 Mei 2007, pada saat berlangsungnya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006, Presiden Republik Indonesia mengganti beberapa Menteri dan Pejabat Negara setingkat Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri dan Pejabat Negara setingkat Menteri yang diganti tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perhubungan, Menteri Negara BUMN, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Jaksa Agung.

C.4. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian negara/lembaga teknis yang secara organisatoris membawahinya. Namun, pada tahun 2006 neraca BLU belum dikonsolidasikan pada neraca kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Sehingga, dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 ini belum mencakup Neraca BLU.

Sementara itu, aset, kewajiban, dan ekuitas untuk ke 13 Rumah Sakit BLU per 31 Desember 2006 (lihat penjelasan B.3. Catatan Penting Lainnya pada Laporan Realisasi APBN) dapat dilihat pada Grafik 31.



Grafik 31: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Rumah Sakit BLU per 31 Desember 2006

Sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 42.

2. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/

Lembaga.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2004 dan 2005 menunjukkan adanya 1.303 rekening dengan total nilai sebesar Rp8.537.735.905.807 pada 35 K/L yang tidak disajikan dalam laporan keuangan K/L (LK K/L) dan LKPP (Daftar 37.a). Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. Pemerintah kemudian melakukan klarifikasi ke K/L Langkah klarifikasi yang dilakukan meliputi: (i) konfirmasi, (ii) survei kuesioner, dan (iii) pembahasan bersama.

Konfirmasi atas rekening dikirimkan kepada K/L pada tanggal 11 Agustus 2006. Konfirmasi rekening dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai aktif/tidak aktifnya rekening, penyajian/ pengungkapan rekening dalam LK K/L. Sampai dengan tanggal 20 November yaitu batas terakhir konfirmasi, masih terdapat 8 K/L yang belum mengirimkan informasi sehubungan dengan rekening tersebut (lihat Daftar 37.a).

Untuk mengetahui lebih rinci rekening pemerintah, telah dikirimkan kuesioner kepada K/L pada tanggal 20 November 2006. Diharapkan dari Kuesioner ini diperoleh informasi mengenai penanggung jawab rekening, dasar hukum pembentukan rekening, saldo dan mutasi rekening, sumber dana rekening, tujuan pembentukan rekening serta apakah masih diperlukan atau tidak rekening tersebut. Jawaban kuesioner memperlihatkan adanya KL yang belum mengirimkan jawaban dan mengirimkan jawaban tetapi tidak lengkap (lihat Daftar 37.a).

Jawaban kuesioner yang diterima dari K/L ditabulasi, kemudian dipetakan ke dalam beberapa kelompok rekening. Setelah pemetaan dilakukan, dilanjutkan dengan pembahasan bersama dengan K/L. Tujuan dari pembahasan bersama adalah untuk mengetahui lebih detail informasi mengenai rekening tersebut guna mencari cara penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap 1.303 rekening pada 35 K/L, ternyata jumlah rekening pemerintah yang belum dilaporkan dalam LKKL dan LKPP TA 2005 adalah sebanyak 3.195 rekening, yang berarti lebih banyak dari hasil temuan BPK. (lihat Daftar 37.a)

Hasil klarifikasi menunjukkan adanya beberapa karakteristik dari rekening-rekening tersebut yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Rekening Bendahara
b. Rekening Escrow;
c. Rekening Jaminan;
d. Rekening Titipan;
e. Sumbangan dan Penerimaan Lain-lain;
f. Rekening yang tidak jelas;
g. Rekening yang Sudah Ditutup dan Disetor ke Rekening Kas Negara (Menurut konfirmasi dari Dit. PKN dan Dit. PPP);
h. Rekening Tambahan yang Belum Dilaporkan.

Rincian rekening menurut karakteristiknya dapat dilihat di Daftar 37.a.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian sementara atas keberadaan rekening-rekening yang belum dilaporkan pada LKPP Tahun 2004 dan 2005, alternatif penyelesaian yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- Alternatif I : Dipertahankan untuk Operasional Satker

www.peraturan.go.id

- Alternatif II : Dipertahankan Sementara untuk Kegiatan Adhoc
- Alternatif II : Dipertahankan Sementara untuk Dialihkan dalam Bentuk BLU
- Alternatif III : Dialihkan sebagai Rekening PFK pada Ditjen Perbendaharaan
- Alternatif IV : Diungkapkan pada LKPP karena Bukan Milik Pemerintah
- Alternatif V : Rekening Ditutup dan Saldo Disetor ke Kas Negara
- Alternatif VI : Rekening yang Diakui Bukan Milik Pemerintah dan Memerlukan Pemeriksaan/Investigasi

Terhadap rekening yang sudah ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara, telah digunakan sebagai sumber pembiayaan TA 2006 sebesar Rp5.055.462.940.247 (Lihat penjelasan D.2.18.b). Rincian rekening yang sudah ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara dapat dilihat pada Daftar37.b.

Terhadap rekening yang belum diperoleh klarifikasinya, Pemerintah akan mendapatkan informasi mengenai rekening dari kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, dan akan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan antara lain:

- Penyelesaian berdasarkan alternatif-alternatif yang disepakati
- Penutupan rekening-rekening yang kepemilikannya tidak jelas
- Peraturan lainnya a.l. SKB pencairan dana yang dialihkan pengelolaannya ke Departemen Keuangan.

3. Aset Eks-BPPN

Sehubungan dengan pengalihan aset eks BPPN kepada Menteri Keuangan yang berkaitan dengan aset hak tagih BPPN kepada Kaharudin Ongko dengan nilai buku sebesar Rp8.306.132.903.745 dan nilai pengalihan sebesar Rp1 dan dengan sejumlah aset jaminan (*underlying asset*) baik berupa saham, properti maupun hak tagih belum dilakukan penanganan lebih lanjut.

Dalam *underlying asset* properti sebanyak 48 aset telah diserahkan kepada perusahaan induk, sebagian lagi belum efektif karena masalah pajak dan nilai valuasi aset oleh penilai independen dan sebanyak 724 aset properti lainnya yang berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk SHM, SHGB, HGB Girik, SHMRS, AJB, SPH, HP, dan Hak Pakai belum efektif dialihkan ke Perusahaan Induk maupun ke BPPN.

Underlying asset yang berupa saham, meliputi 4 saham yang sudah efektif dialihkan tetapi belum bisa dijual, 6 saham belum dialihkan, 2 saham berada dalam penanganan kepolisian, serta 1 saham yang hasil penjualannya disita oleh kepolisian.

4. Aset Eks Asing/Cina

Aset Eks Asing/Cina merupakan aset negara yang berasal dari nasionalisasi aset bekas milik asing (Belanda/Cina) atau organisasi Cina terlarang. Nasionalisasi aset asing/Cina Aset dimulai sejak tahun 1958 dengan dikeluarkannya UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Bekas Belanda. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2006, terdapat 942 buah aset eks asing/Cina yang telah lama dikuasai Negara namun belum jelas status hukumnya. Untuk menyelesaikan masalah status hukum kepemilikan aset tersebut, pemerintah telah melakukan cara-cara sebagai berikut:

a. disertifikatkan untuk instansi Pemerintah yang ditunjuk;
b. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara kompensasi kepada Pemerintah;
c. dipertukarkan kepada pihak ketiga;
d. dihibahkan; atau
e. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah.

Penyelesaian masalah aset dengan cara tersebut (butir a dan c), maka status hak kepemilikan menjadi atas nama Pemerintah Pusat/Daerah sehingga aset dimaksud dengan sendirinya dicaat oleh instansi yang bersangkutan sebagai Barang Milik Negara dari perolehan lain yang sah sesuai PP Nomor 6 Tahun 2006. Mengingat aset bekas milik asing/Cina ini sebagian besar berupa sekolah negeri dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangkan pelaksanaan otonomi daerah, maka statusnya menjadi Barang Milik Daerah. Rincian Aset Eks Asing/Cina dapat dilihat pada Daftar 43.

Terhadap aset Eks Cina yang dikuasai oleh Yayasan Trisakti/Universitas Trisakti seluas 71.503 meter persegi masih dalam proses hukum, sehingga belum dapat disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat.

5. Aset Bersejarah (***Heritage Assets***)

Aset Bersejarah pada kementerian negara/lembaga belum disajikan dalam LKPP Tahun 2006, antara lain:

- Departemen Perhubungan berupa Tugu Peringatan.
- Arsip Nasional Republik Indonesia berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas Arsip Kertas sebanyak 27.247 km linier, arsip film sebanyak 70.054 reel, Arsip video sebanyak 30.000 buah, Arsip Rekaman Suara 30.000 kaset, Arsip Foto sebanyak 1.663.000 buah foto dan Arsip VCD sebanyak 29 buah.
- Departemen Luar Negeri sebanyak 67 unit yang merupakan aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berupa Tugu *Teysman*, Tugu *Raffles*, *Santhiong* (Pemakaman Belanda), Patung masing-masing 1 unit yang merupakan aset dari Kebun Raya Bogor.

6. Dana pada Badan-Badan Lainnya

- BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

  Baznas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan

www.peraturan.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Posisi keuangan (Neraca) Baznas periode 31 Desember 2006 adalah Aset sebesar Rp17.484.718.242. kewajiban sebesar Rp130.583.510 dan ekuitas dana sebesar Rp17.354.134.732.

Rincian ekuitas dana terdiri dari zakat sebesar Rp3.097.969.959, Infaq Shodaqoh sebesar Rp10.082.287.771, operasional sebesar Rp1.791.275.088, Non Syariah sebesar Rp594.664.986. Penyaluran Terakumulasi Dalam Aktiva sebesar Rp1.918.520.438 dan Dana yang harus tersedia untuk utang sebesar minus Rp130.583.510.

Rincian lebih lanjut posisi keuangan per 31 Desember 2006 dapat dilihat pada Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya (Daftar 41).

7. Kewajiban Kontinjensi

- Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunanakan BatuBara

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Pemberian jaminan tersebut didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, jaminan Pemerintah diberikan dalam hal PT PLN (Persero) tidak mampu membayar kewajibannya sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah tersebut adalah:

a. Kebijakan harga jual tenaga listrik;
b. Kebijakan subsidi listrik dalam rangka kompensasi fungsi kemanfaatan umum;
c. Kebijakan yang mempengaruhi pasokan clan harga batubara; dan
d. Kebijakan yang menghentikan atau menunda pelaksanaan pembangunan proyek yang telah berjalan, yang mengakibatkan PLN tidak mampu membayar kewajibannya

yang mengakibatkan PT PLN tidak mampu membayar kewajibannya.

Pemenuhan kewajiban pembayaran utang PLN dengan Jaminan Pemerintah dilakukan sebagai langkah terakhir (*last resort*), setelah terlebih dahulu PLN menggunakan secara maksimal sumber arus kas perusahaan untuk menutup kewajibannya kepada kreditur. Pemenuhan kewajiban jaminan Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Jumlah proyek pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun adalah sebanyak 80 unit yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa.

www.peraturan.go.id

- Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta

  Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2006, Pemerintah memberikan jaminan melalui mekanisme APBN terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Badan Usaha. Jaminan diberikan sebesar 50% dari *shortfall* atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) penumpang per hari atau 50% dari nilai maksimum sebesar USD22,500,000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) pertahun selama lima tahun.

8. Kewajiban Pemerintah Terkait Subsidi Beras

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2006 mengungkapkan adanya kewajiban Pemerintah Pusat terkait subsidi beras kepada Perum BULOG. Berdasarkan data yang ada, kewajiban tersebut sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp483.361.177.934,26, dengan rincian sebagai berikut:

– Tahun 2001	Rp178.038.672.135,12
– Tahun 2003	78.929.663.133,00
– Tahun 2004	206.092.702.378,14
– Selisih harga Operasi Pasar Murni (OPM) dan harga buku BULOG	20.300.140.288,00
Jumlah	Rp483.361.177.934,26

Kewajiban Pemerintah untuk keperluan biaya perawatan beras tahun 2004 sebagaimana di atas, dengan memperhatikan skala prioritas, telah dialokasikan dalam APBN TA 2007 sebesar Rp207.000.000.000,00 melalui Bagian Anggaran 069 Pos Pengeluaran Lain-lain Sub Pos Pengeluaran Terprogram. Sedangkan sisanya akan diselesaikan Pemerintah secara bertahap dengan memperhatikan keuangan negara.

9. Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji. Pemerintah selaku pemberi kerja belum mengiur. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *current cost financing* yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN (82,5%) pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Dana pensiun membayar sebesar 17,5% sisanya. Dana Pensiun yang telah digunakan untuk *sharing* Pembayaran Manfaat Pensiun sejak tahun 1994 sampai dengan 2006 meliputi nilai Rp30,16 triliun.

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT *(past service liabilities*). Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31

www.peraturan.go.id

Desember 2003 terdapat defisit kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp365,47 triliun sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah pada Dana Pensiun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) per 31 Desember 2006 sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* adalah sebesar Rp435,69 triliun.

10. Selisih Kurs

Transaksi mata uang asing yang ada di lingkungan Departemen Luar Negeri mengakibatkan selisih kurs sebesar Rp13.774.350.600. Hal ini timbul karena perbedaan nilai tukar rupiah terhadap uang persediaan yang diterima dari dan dikembalikan ke kas negara. Transaksi tersebut belum disajikan pada pada Neraca maupun Laporan Realisasi Anggaran Departemen Luar Negeri.

11. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Departemen Pertahanan

Departemen Pertahanan (Dephan) adalah satu-satunya kementerian negara/lembaga yang belum melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sehingga Laporan Keuangan Dephan Tahun 2006 belum disusun dengan menggunakan aplikasi SAI.

Transaksi belanja yang berkaitan langsung dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hanyalah belanja Gaji Pegawai. Adapun proses penganggarannya, Departemen Pertahahan menggunakan *Block Fund* berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Pertahahan.

12. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) di Kementerian Negara/Lembaga

Secara umum pelaksanaan SABMN di kementerian negara/lembaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga penyajian nilai aset tetap dalam LKPP ini belum menggambarkan nilai yang sebenarnya. Ada 4 (empat) permasalahan yang sangat krusial terhadap pelaksanaan SABMN, yaitu:

- Perlu diadakan inventarisasi ulang atas seluruh aset negara baik yang ada di kementerian negara/lembaga maupun unit-unit lain yang belum terdaftar.
- Perlu dilakukan revaluasi atas aset tetap secara keseluruhan sehingga dapat menggambarkan nilai yang wajar secara ekonomis.
- Perlu penataan organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan sehingga tidak terjadi saling lepas tanggung jawab terhadap penyajian dan pelaporan barang milik negara.
- Sistem dan prosedur penatausahaan barang milik negara mulai dari transaksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan pelaporan.

Keempat hal di atas merupakan tanggung jawab yang akan diemban oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang baru saja dibentuk bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

www.peraturan.go.id

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2006 sebesar Rp18,06 triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2006 sebesar Rp18.056.969.822.145 merupakan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2005 untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi aset nonkeuangan, dan nonanggaran dengan rincian:

	2006	2005
Kas di BI	Rp 100.485.809.688	Rp 248.984.834.918
Kas di KPPN	17.956.484.012.457	12.498.614.963.200
Jumlah Saldo Awal Kas	Rp18.056.969.822.145	Rp12.747.599.798.118

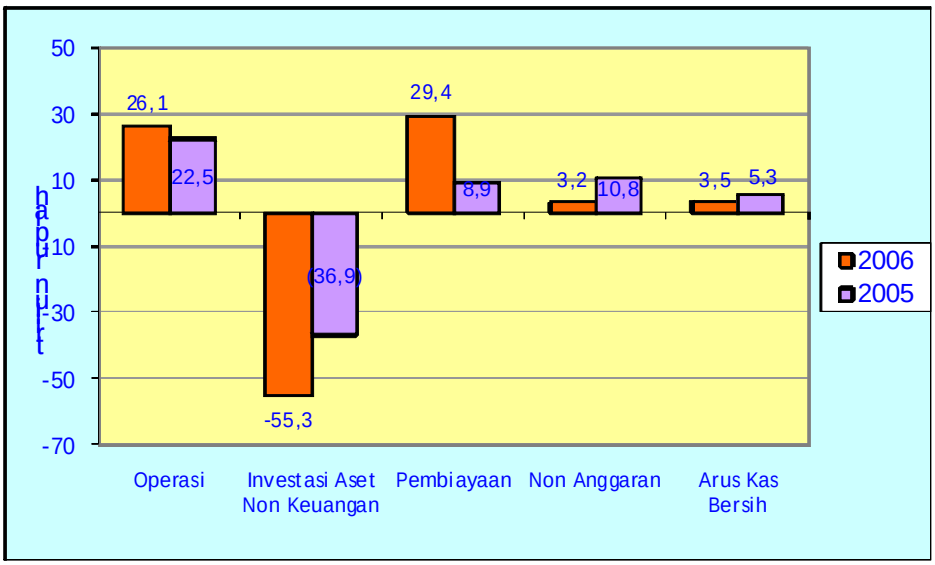
ARUS KAS BERSIH

Arus Kas Bersih pada TA 2006 sebesar Rp3,49 triliun

Arus Kas Bersih dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	Rp26.111.116.187.908	Rp22.474.991.456.467
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(55.252.792.746.094)	(36.883.202.391.970)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan	29.415.590.251.868	8.872.728.723.297
Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran	3.218.045.953.463	10.844.852.236.233
Kenaikan (Penurunan) Kas	Rp3.491.959.647.145	Rp5.309.370.024.027

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 32.



Grafik 32: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2006 sebesar Rp37,98 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2006 sebesar Rp37.980.593.172.158 merupakan kas pemerintah pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah TA berikutnya, dengan rincian:

www.peraturan.go.id

	2006	2005
Rekening Kas BUN di BI	Rp 954.310.836.789	Rp 100.485.809.688
Rekening Kas di KPPN	20.594.618.632.501	17.956.484.012.457
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.460.472.090.821	671.209.250.352
Kas di Bendahara Penerimaan	432.936.274.303	955.897.763.011
Rekening Pemerintah Lainnya pada BI	12.331.109.271.481	26.503.223.018.939
Kas Trust Fund	2.213.702.756.920	
Jumlah Saldo Akhir Kas	Rp37.987.149.862.815	Rp46.187.299.854.447

Saldo Akhir Kas Pemerintah per 31 Desember 2006 menunjukkan penurunan sebesar Rp8.200.149.991.632 atau 17,75 persen dari tahun sebelumnya.

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat TA 2006 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp26,11 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode tahun 2006, terdapat Arus Kas Masuk Bersih sebesar Rp26.111.116.187.908, dengan perhitungan sebagai berikut:

	2006	2005
Arus Kas Masuk	Rp 637.951.524.607.839	Rp 494.947.988.378.795
Dikurangi Arus Kas Keluar	(611.840.408.419.931)	(472.472.996.922.328)
Arus Kas Bersih	Rp 26.111.116.187.908	Rp 22.474.991.456.467

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam TA 2006 pemerintah dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp3.636.124.731.441 dibandingkan dengan TA 2005 sebesar Rp22.474.991.456.467.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan (neto) Rp409,20 triliun

Penerimaan Perpajakan dalam TA 2006 sebesar Rp409.203.019.335.450 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp359.290.484.892.709 dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp49.912.534.442.741. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang tahun berjalan setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan dalam TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp62.343.162.065.656 atau 17,97 persen dari TA 2005 sebesar Rp346.859.857.269.794. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2006 dan TA 2005 adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Pajak Penghasilan	Rp 214.250.525.953.279	Rp 184.323.643.550.094
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	136.706.459.099.409	115.559.795.126.890
Pajak Bumi dan Bangunan	20.861.277.893.027	16.223.755.645.997
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		3.442.123.068.347

www.peraturan.go.id

	3.193.068.860.495	
Pajak Ekspor	1.905.645.003.419	318.250.274.427
Pajak Lainnya	2.297.709.567.757	2.053.427.766.465
Total Penerimaan Pajak	379.214.686.377.386	321.920.995.432.220
Dikurangi:		
Pengembalian Pajak	19.924.201.484.677	23.238.219.749.468
Jumlah Penerimaan Pajak	Rp 359.290.484.892.709	Rp298.682.775.682.752
Bea Masuk	12.291.353.126.465	15.179.146.610.169
Cukai	37.774.252.517.288	33.256.635.359.622
Total Penerimaan Bea dan Cukai	50.065.605.643.753	48.435.781.969.791
Dikurangi:		
Pengembalian Bea dan Cukai	153.071.201.012	258.700.382.749
Jumlah Penerimaan Bea & Cukai	49.912.534.442.741	48.177.081.587.042
Penerimaan Perpajakan (Neto)	Rp409.203.019.335.450	Rp 346.859.857.269.794

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan dalam TA 2006 adalah sebesar Rp208.833.125.652.841 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Sehingga pada TA 2006 terdapat kenaikan sebesar Rp33.465.874.803.497 atau 19,08 persen dari penerimaan TA 2005 sebesar Rp175.367.250.849.344. Rincian penerimaan kas dari Pajak Penghasilan TA 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

	2006	2005
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	Rp14.672.114.385.638	Rp12.293.101.394.123
PPh Gas Alam	28.518.465.410.268	26.477.364.106.758
PPh Lainnya Minyak Bumi	0	6.043.561
PPh Migas Lainnya	1.642.213	516.780
Jumlah PPh Migas	43.190.581.438.119	38.770.472.061.222
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	31.595.456.838.521	27.430.945.086.486
PPh Pasal 22	4.044.915.661.838	2.853.675.695.720
PPh Pasal 22 Impor	13.141.071.473.170	13.532.505.336.482
PPh Pasal 23	15.413.382.073.929	13.093.551.476.100
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.815.312.667.864	1.596.538.791.255
PPh Pasal 25/29 Badan	70.252.110.173.705	55.961.965.005.873
PPh Pasal 26	10.619.311.072.749	9.147.371.362.708
PPh Final dan Fiskal LN	24.136.181.439.872	21.908.003.821.764
PPh Non Migas Lainnya	42.203.113.512	28.614.912.484
Jumlah PPh Non Migas	171.059.944.515.160	145.553.171.488.872
Dikurangi :		
Pengembalian PPh	5.417.400.300.438	8.956.392.700.750
Jumlah Pajak Penghasilan	Rp 208.833.125.652.841	Rp175.367.250.849.344

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2006 adalah sebesar Rp123.035.859.568.711, yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp21.739.851.968.664 atau 21,46 persen dari penerimaan TA 2005 sebesar Rp101.296.007.600.047. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

	2006	2005
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	Rp 91.537.634.194.759	Rp 66.861.800.446.026
PPN dan PPnBM Impor	44.847.792.419.723	48.355.699.245.482
PPN dan PPnBM lainnya	321.032.484.927	342.295.435.382
Jumlah PPN dan PPnBM	136.706.459.099.409	115.559.795.126.890
Dikurangi:		
Pengembalian PPN dan PPnBM	(13.670.599.530.698)	(14.263.787.526.843)
Jumlah PPN dan PPnBM (Neto)	Rp 123.035.859.568.711	Rp101.296.007.600.047

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam TA 2006 adalah sebesar Rp20.858.516.906.183 yang berarti naik sebesar Rp4.639.985.439.023 atau 28,61 persen dari TA 2005 sebesar Rp16.218.531.467.160. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut:

	2006	2005
PBB Pedesaan	5.787.460.066.156	Rp 4.514.494.175.370
PBB Perkotaan	3.800.764.640.362	3.548.851.217.843
PBB Perkebunan	151.655.887.690	147.786.735.389
PBB Kehutanan	81.311.495.840	102.603.993.117
PBB Pertambangan	10.520.745.453.335	7.410.799.916.253
PBB Lainnya	519.340.349.644	499.219.608.025
Jumlah	20.861.277.893.027	16.223.755.645.997
Dikurangi:		
Pengembalian PBB	(2.760.986.844)	(5.224.178.837)
Jumlah (neto)	20.858.516.906.183	Rp16.218.531.467.160

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam TA 2006 adalah sebesar Rp3.184.469.880.249, turun Rp248.058.930.000 atau 7,23 persen dari penerimaan BPHTB TA 2005 sebesar Rp3.432.528.810.249.

e. Cukai

Penerimaan Cukai dalam TA 2006 adalah sebesar Rp37.772.132.887.314 yang berarti naik sebesar Rp4.515.977.327.143 atau 13,58 persen dari Penerimaan Cukai TA 2005 sebesar Rp33.256.155.560.171. Rincian Penerimaan Cukai adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Cukai Hasil Tembakau	Rp 37.061.549.022.786	Rp 32.647.624.630.209
Cukai Ethyl Alkohol	136.058.679.320	101.514.067.699
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	568.055.790.971	500.569.986.955
Denda Administrasi Cukai	2.133.207.339	4.286.520.997
Cukai Lainnya	6.455.816.872	2.640.153.762
Jumlah	37.774.252.517.288	33.256.635.359.622
Dikurangi:		
Pengembalian Cukai	(2.119.629.974)	(479.799.451)
Jumlah (Neto)	Rp37.772.132.887.314	Rp33.256.155.560.171

www.peraturan.go.id

f. Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk dalam TA 2006 adalah sebesar Rp12.140.401.555.427 yang berarti lebih kecil Rp2.780.524.471.444 atau 18,64 persen dari Penerimaan Bea Masuk TA 2005 sebesar Rp14.920.926.026.871. Rincian Penerimaan Bea Masuk tersebut adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Bea Masuk	Rp 11.946.641.435.594	Rp 14.896.727.478.657
Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	1.914.331.502	1.114.656.802
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	312.924.219.457	231.073.400.278
Bea Masuk dalam rangka KITE	170.447	31.740.031
Pabean Lainnya	29.872.969.465	50.199.334.401
Jumlah Bea Masuk	12.291.353.126.465	15.179.146.610.169
Dikurangi:		
Pengembalian Bea Masuk	(150.951.571.038)	(258.220.583.298)
Jumlah Bea Masuk (Neto)	Rp 12.140.401.555.427	Rp14.920.926.026.871

g. Pajak Ekspor

Penerimaan Pajak Ekspor dalam TA 2006 adalah sebesar Rp1.091.082.150.011 yang berarti lebih besar Rp772.837.261.659 atau 242,84 persen dari penerimaan TA 2005 sebesar Rp318.244.888.352.

h. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya dalam TA 2006 adalah sebesar Rp2.287.430.734.714 atau naik sebesar Rp237.218.667.114 atau 11,57 persen dari TA 2005 sebesar Rp2.050.212.067.600. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Penjualan Benda dan Bea Materai	Rp2.221.439.005.338	Rp2.011.993.682.474
Pajak Tidak Langsung	8.367.664.182	3.973.821.543
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	43.093.548.491	26.975.143.835
- Bunga Penagihan PPN	24.789.103.440	10.459.767.999
- Bunga Penagihan PPnBM	1.049.202	25.350.614
- Bunga Penagihan PTLL	19.197.104	
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	67.902.898.237	37.460.262.448
Jumlah Pajak Lainnya	Rp2.297.709.567.757	Rp2.053.427.766.465
Dikurangi:		
Pengembalian Pajak Lainnya	(10.278.833.043)	(3.215.698.865)
Jumlah Pajak Lainnya (Neto)	Rp2.287.430.734.714	Rp2.050.212.067.600

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebesar Rp226,91 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam TA 2006 adalah sebesar Rp226.914.454.486.654, naik sebesar Rp80.152.820.152.340 atau 54,61 persen dari TA 2005 sebesar Rp146.761.634.334.314.

PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara dan PNBP lainnya dikurangi dengan pengembalian PNBP.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam dalam TA 2006 adalah sebesar Rp167.473.800.945.318, naik sebesar Rp57.006.544.271.318 atau 51,60 persen dari TA 2005 sebesar Rp110.467.256.674.000. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yang terdiri dari:

	2006	2005
Pendapatan Minyak Bumi	Rp 125.145.403.396.875	Rp 72.822.266.069.379
Pendapatan Gas Alam	32.940.684.187.448	30.939.783.556.621
Pendapatan Pertambangan Umum	6.781.369.889.324	3.190.472.228.757
Pendapatan Kehutanan	2.409.692.930.813	3.251.198.326.175
Pendapatan Perikanan	196.882.873.358	265.369.293.769
Jumlah Penerimaan SDA	Rp167.474.033.277.818	Rp110.469.089.474.701
Dikurangi		.
Pengembalian Pendapatan SDA	(232.332.500)	(1.832.800.701)
Jumlah Penerimaan SDA (Neto)	Rp167.473.800.945.318	Rp110.467.256.674.000

b. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dalam TA 2006 adalah sebesar Rp22.973.056.234.957, naik Rp10.137.862.431.739 atau 78,98 persen dari TA 2005 sebesar Rp12.835.193.803.218. Pendapatan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada BUMN dan non BUMN.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan Non BUMN dirinci menurut klasifikasi usaha disajikan pada Daftar 38.

c. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya dalam TA 2006 adalah sebesar Rp36.467.597.306.379, naik Rp13.008.413.449.283 atau 55,45 persen dari TA 2005 sebesar Rp23.459.183.857.096. Penerimaan ini terdiri dari:

	2006	2005
Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	Rp 393.768.881.716	Rp 1.642.812.221.321
Pendapatan Sewa	69.890.643.739	46.747.425.431
Pendapatan Jasa I	7.514.060.949.675	5.522.107.749.226
Pendapatan Jasa II	2.295.109.749.793	1.332.964.292.457
Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri	353.011.168.545	620.263.551.985
Pendapatan Bunga	4.785.279.335	2.114.544.871
Gain on Redemption atas Pembelian kembali Obligasi DN Jangka Panjang dan Premium Obligasi	1.782.824.525.275	225.101.490.488
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	74.430.911.500	108.770.468.931
Pendapatan Pendidikan	2.357.826.811.004	1.212.343.585.483
Pendapatan Pelunasan Piutang	7.426.686.860.621	8.042.517.305.958
Pendapatan Laba Bersih Penjualan BBM	7.328.702.216.238	11.576.248
Pendapatan Lain-lain	4.631.119.877.108	3.537.280.477.310
Pendapatan dari Pengembalian dan Pembetulan Pembukuan Belanja	2.537.854.529.668	1.192.434.351.307
Jumlah PNBP Lainnya	36.770.072.404.217	23.485.469.041.016
Dikurangi:		
Pengembalian PNBP	(302.475.097.838)	(26.285.183.920)
Jumlah PNBP Lainnya (Neto)	Rp 36.467.597.306.379	Rp23.459.183.857.096

www.peraturan.go.id

Termasuk dalam Penerimaan PNBP Lainnya adalah Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan sebesar Rp7.375.936.569 dan pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp107.805.510.

D.2.3. Pendapatan Hibah

Hibah sebesar Rp1,83 triliun

Pendapatan Hibah dalam TA 2006 adalah sebesar Rp1.834.050.785.735, naik Rp507.554.011.048 atau 38,26 persen dari TA 2005 sebesar Rp1.326.496.774.687 Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	Rp 12.982.000	Rp 132.259.542
Hibah Dalam Negeri – Lembaga/ Badan Usaha	2.435.310.356	85.841.540
Hibah Dalam Negeri Lainnya	51.791.971.296	14.610.700.756
Jumlah Hibah Dalam Negeri	54.240.263.652	14.828.801.838
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan		224.100.000
Hibah Luar Negeri – Bilateral	26.869.412.948	1.090.931.256.500
Hibah Luar Negeri – Multilateral	1.746.459.165.126	210.479.302.772
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	6.481.944.009	10.033.313.577
Jumlah Hibah Luar Negeri	1.779.810.522.083	1.311.667.972.849
Jumlah Hibah	Rp1.834.050.785.735	Rp1.326.496.774.687

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp72,88 triliun

Belanja Pegawai dalam TA 2006 adalah sebesar Rp72.884.043.314.552, naik Rp16.466.885.543.893 atau 29,19 persen dari TA 2005 sebesar Rp56.417.157.770.659. rincian sebagai berikut:

	2006	2005
Belanja PNS	Rp 21.314.222.421.882	Rp 15.988.500.160.030
Belanja Pegawai TNI/Polri	20.082.865.325.170	15.114.560.425.325
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	345.957.331.631	689.602.126.960
Belanja Pegawai Perjan	8.125.701.044	542.769.529.713
Belanja Gaji Dokter PTT	407.989.718.054	354.970.629.050
Belanja Honorarium	4.807.285.684.654	2.639.372.535.646
Belanja Lembur	102.437.840.896	66.113.188.293
Belanja Vakasi	717.283.473.118	395.349.094.180
Belanja Tunj. Khusus & Pegawai Transito	1.516.590.573.014	1.664.430.405.624
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	23.307.003.465.420	18.812.057.386.808
Belanja Asuransi Kesehatan	486.491.067.200	390.529.895.877
Jumlah Belanja Pegawai	73.096.252.602.083	56.658.255.377.506
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Pegawai	(212.209.287.531)	(241.097.606.847)
Belanja Pegawai (Neto)	Rp 72.884.043.314.552	Rp 56.417.157.770.659

www.peraturan.go.id

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp47,06 triliun

Belanja Barang dalam TA 2006 adalah sebesar Rp47.065.451.829.540 yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Belanja Barang Operasional	Rp 26.804.478.679.764	Rp 18.191.872.063.884
Belanja Jasa	7.853.875.531.786	4.881.198.748.334
Belanja Pemeliharaan	3.914.148.622.928	3.150.140.625.475
Belanja Perjalanan	8.719.459.719.837	5.690.110.621.525
Jumlah Belanja Barang	47.291.962.554.315	31.913.322.059.218
Dikurangi :		
Pengembalian Belanja Barang	(226.510.724.775)	(39.115.781.052)
Jumlah Belanja Barang (Neto)	47.065.451.829.540	Rp31.874.206.278.166

Belanja Barang TA 2006 ini mengalami kenaikan sebesar Rp15.191.245.551.374 atau 47,66 persen dari TA 2005 sebesar Rp31.874.206.278.166.

D.2.6. Bunga Utang

Belanja Bunga Utang sebesar Rp79,07 triliun

Belanja Bunga Utang dalam TA 2006 sebesar Rp79.069.362.794.878 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Belanja Bunga Utang mengalami kenaikan sebesar Rp21.437.159.109.112 atau 37,20 persen dari Belanja Bunga Utang TA sebesar Rp57.632.203.685.766.

Rincian Bunga Utang tersebut adalah sebagai berikut:

Bunga atas Utang Dalam Negeri

Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp54.896.668.514.321 merupakan pembayaran bunga atas surat utang negara (obligasi) yang diterbitkan di dalam negeri dengan rincian:

	2006	2005
Pembayaran Bunga Utang DN	Rp 53.176.056.906.000	Rp 41.228.819.256.931
Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan DN		341.811.058.184
Pembayaran Discount Obligasi DN	1.086.080.398.600	1.927.259.275.200
Pembayaran Loss on Bond Redemption atas pemb.kembali obligasi Dalam Negeri	653.492.107.563	
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	54.915.629.412.163	43.497.889.590.315
Dikurangi :		
Pengembalian Pembayaran Bunga Utang DN	(18.960.897.842)	(1.616.815.080)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri (Neto)	Rp54.896.668.514.321	Rp 43.496.272.775.235

Bunga atas Utang Luar Negeri

Bunga atas Utang Luar Negeri adalah sebesar Rp24.172.694.280.557, dengan rincian sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

	2006	2005
Pembayaran Bunga Utang LN	Rp 24.102.556.279.180	Rp23.443.746.393.480
Pembayaran Discount Obligasi LN	86.675.640.000	243.525.477.000
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	24.189.231.919.180	23.687.271.870.480
Dikurangi:		
Pengembalian Pembayaran Bunga Utang LN	(16.537.638.623)	(9.551.340.959.949)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN (Neto)	Rp24.172.694.280.557	Rp14.135.930.910.531

D.2.7. Subsidi

Subsidi sebesar Rp107,46 triliun

Belanja Subsidi dalam TA 2006 sebesar Rp107.456.739.357.285 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Belanja Subsidi adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Subsidi Lembaga Keuangan BBM	0	Rp 221.223.660
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	Rp64.212.079.995.900	2.132.524.441.666
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM	39.299.854.326.750	110.118.878.460.216
Subsidi Non BBM - Bunga kredit/Penyertaan Resiko	286.219.826.346	168.372.883.097
Subsidi Non BBM - Pajak	1.863.753.579.000	6.200.593.557.000
Subsidi dalam rangka PSO	1.849.155.256.218	2.132.793.712.125
Jumlah Belanja Subsidi	107.511.062.984.214	120.753.384.277.764
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja subsidi	(54.323.626.929)	(29.356.660.034)
Jumlah Belanja Subsidi (Neto)	Rp107.456.739.357.285	Rp120.724.027.617.730

Belanja Subsidi TA 2006 ini mengalami penurunan sebesar Rp13.267.288.260.445 atau 10,99 persen dari TA 2005 sebesar Rp120.724.027.617.730.

D.2. 8. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebesar Rp40,68 triliun

Bantuan Sosial dalam TA 2006 adalah sebesar Rp40.684.769.238.136 dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	Rp14.964.381.638.996	Rp11.799.696.727.284
Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	14.084.716.710.929	7.067.354.670.926
Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga	2.756.028.573.150	1.840.400.127.116
Beasiswa	1.019.688.203.670	1.467.530.749.092
Lembaga Peribadatan	113.986.593.282	26.519.292.000
Lembaga Sosial Lainnya	7.900.176.558.553	2.191.375.237.011
Jumlah Bantuan Sosial	40.838.978.278.580	24.392.876.803.429
Dikurangi:		
Pengembalian Bantuan Sosial	(154.209.040.444)	(18.035.431.164)
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	Rp40.684.769.238.136	Rp24.374.841.372.265

Belanja Sosial TA 2006 ini mengalami kenaikan sebesar Rp16.309.927.865.871 atau 66,91 persen dari TA 2005 sebesar Rp24.374.841.372.265. Kenaikan paling

www.peraturan.go.id

signifikan pada Belanja Bantuan Sosial Langsung Sekolah/Lembaga/Guru yang mengalami kenaikan sebesar 99,29 persen.

Belanja Lain-lain sebesar Rp38,15 triliun

D.2.9. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain dalam TA 2006 adalah sebesar Rp38.155.510.436.090 dengan rincian:

	2006	2005
Kerjasama Teknis internasional	Rp 140.579.569.525	Rp 220.532.885
Cadangan Umum	3.222.564.996.639	2.085.978.502.430
Pengeluaran Tak Tersangka	1.337.845.000	16.050.000
Pemilihan Umum/Sidang Tahunan	6.255.270.526	358.281.045.825
Cadangan Dana Reboisasi	3.773.110.693.493	1.418.220.677.570
Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	58.490.839.545	9.722.010.981.268
Tanggap Darurat	2.693.871.983.684	1.255.457.580.348
Belanja Lainnya	28.335.238.011.314	16.669.498.893.447
Jumlah Belanja Lain-lain	38.231.449.209.726	31.509.684.263.773
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Lain-lain	(75.938.773.636)	(575.739.561.430)
Jumlah Belanja Lain-lain (Neto)	Rp38.155.510.436.090	Rp30.933.944.702.343

Belanja Lain-lain TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp7.221.565.733.747 atau 23,35 persen dari TA 2005 sebesar Rp30.933.944.702.343.

Bagi Hasil Pajak sebesar Rp28,54 triliun

D.2.10. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak dalam TA 2006 adalah sebesar Rp28.544.231.692.934, dengan rincian:

	2006	2005
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	Rp6.059.286.512.580	Rp 5.440.785.627.374
Bagi Hasil PBB	19.384.722.182.854	14.929.734.127.698
Bagi Hasil BPHTB	3.103.865.928.374	3.455.125.800.637
Jumlah Bagi Hasil Pajak	28.547.874.623.808	23.825.645.555.709
Dikurangi:		
Pengembalian Bagi Hasil Pajak	(3.642.930.874)	(23.800.395.978)
Jumlah Bagi Hasil Pajak (Neto)	Rp28.544.231.692.934	Rp 23.801.845.159.731

Bagi Hasil Pajak TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp4.742.386.533.203 atau 19,92 persen dari TA 2005 sebesar Rp23.801.845.159.731.

Bagi Hasil SDA sebesar Rp36,70 triliun

D.2.11. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dalam TA 2006 adalah sebesar Rp36.700.805.029.998 dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
Bagi Hasil Minyak Bumi	Rp17.856.208.800.002	Rp 12.598.389.208.770
Bagi Hasil Gas Alam	13.865.070.452.502	10.081.590.006.751
Bagi Hasil Pertambangan Umum	3.627.859.026.561	2.584.290.953.961
Bagi Hasil Kehutanan	1.212.717.807.713	552.375.656.389
Bagi Hasil Perikanan	199.948.501.209	220.075.540.379

www.peraturan.go.id

Jumlah Bagi Hasil SDA	36.761.804.587.987	26.036.721.366.250
Dikurangi:		
Pengembalian Bagi Hasil SDA	(60.999.557.989)	(17.691.776.213)
Jumlah Bagi Hasil SDA (Neto)	Rp36.700.805.029.998	Rp26.019.029.590.037

Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp10.681.775.439.961 atau 41,05 persen dari TA 2005 sebesar Rp26.019.029.590.037.

DAU sebesar Rp145,67 triliun

D.2.12. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dalam TA 2006 sebesar Rp145.666.815.317.795 digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp56.933.566.852.963 atau 64,16 persen dari TA 2005 sebesar Rp88.733.248.464.832.

DAK sebesar Rp11,57 triliun

D.2.13. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dalam TA 2006 sebesar Rp11.566.091.977.723, berupa Dana Non Reboisasi. Dana Non Reboisasi digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemekaran pemerintah, kelautan dan perikanan, dan untuk pertanian. Jumlah Dana Alokasi Khusus TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp6.815.861.696.924 atau 143,48 persen dari TA 2005 sebesar Rp4.750.230.280.799.

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp3,49 triliun

D.2.14. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dalam TA 2006 sebesar Rp3.488.284.000.000 seluruhnya digunakan untuk Propinsi Papua. Penggunaan dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jumlah Dana Otonomi Khusus TA 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp1.712.972.000.000 atau 96,49 persen dari TA 2005 sebesar Rp1.775.312.000.000.

Dana Penyesuaian sebesar Rp558,30 miliar

D.2.15. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian digunakan untuk propinsi serta kabupaten/kota. Dana Penyesuaian dalam TA 2006 adalah sebesar Rp558.303.431.000, turun Rp4.878.646.569.000 atau 89,73 persen dari TA 2005 sebesar Rp5.436.950.000.000.

Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp59,05 triliun

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2006 menunjukkan arus kas neto sebesar minus Rp55.252.792.746.094 dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
Arus Masuk	Rp35.611.899.217	Rp 126.676.068.067
Dikurangi Arus Keluar	(52.288.404.645.311)	(37.009.878.460.037)
Arus Kas Keluar Bersih	(55.252.792.746.094)	(Rp36.883.202.391.970)

www.peraturan.go.id

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan TA 2006 mengalami penurunan sebesar Rp18.369.590.354.124 atau 49,80 persen dari TA 2005 sebesar Rp36.883.202.391.970. Hal tersebut memberi indikasi yang jelas bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja modal mengalami kenaikan.

Penjualan Aset Tetap sebesar Rp35,61 miliar

D.2.16. Penjualan Aset Tetap

Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap dalam TA 2006 adalah sebesar Rp35.611.899.217 dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
Penjualan atas Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah	Rp8.275.573.867	Rp9.089.648.766
Penjualan Kendaraan Bermotor	6.295.824.409	1.804.728.004
Penjualan Sewa Beli	45.873.546.733	95.408.996.250
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	664.490.355	28.276.791
Penjualan Aset Lainnya	13.665.663.458	20.355.047.281
	74.775.098.822	126.686.697.092
Dikurangi:		
Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset	(39.163.199.605)	(10.629.025)
Jumlah Penjualan Aset Tetap	Rp35.611.899.217	Rp126.676.068.067

Pendapatan Penjualan Aset Tetap TA 2006 ini mengalami penurunan sebesar Rp91.064.168.850 atau 71,89 persen dari TA 2005 sebesar Rp Rp126.676.068.067.

Belanja Aset Tetap sebesar Rp55.29 triliun

D.2.17. Belanja Aset Tetap

Belanja Aset Tetap dalam TA 2006 adalah sebesar Rp55.288.404.645.311 dengan rincian sebagai berikut:

	2006	2005
Belanja Modal Tanah	Rp1.576.096.271.514	Rp 683.761.759.903
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.762.484.202.202	13.177.704.591.403
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.266.216.618.632	6.563.302.147.685
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.163.722.573.310	12.414.319.764.305
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.522.148.217.597	4.170.790.196.741
Jumlah Belanja Aset Tetap	Rp55.288.404.645.311	Rp37.009.878.460.037

Dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp26.111.116.187.908 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp55.252.792.746.094 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp29.141.676.558.186. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan yang diuraikan dibawah ini.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp33,21 triliun

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap

www.peraturan.go.id

arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan neto dalam TA 2006 sebesar Rp29.415.590.251.868. Jumlah ini menunjukkan kenaikan jumlah Pembiayaan neto sebesar Rp20.542.861.528.571 dari TA 2005 sebesar Rp8.872.728.723.297. Jumlah tersebut berasal dari:

	2006	2005
Arus Masuk	Rp 147.875.944.834.142	Rp 91.926.663.581.777
Dikurangi Arus Keluar	(118.460.354.582.274)	(83.053.934.858.480)
Arus Kas Bersih	Rp 29.415.590.251.868	Rp 8.872.728.723.297

Penerimaan Pembiayaan DN Rp118,20 triliun

D.2.18. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2006 adalah sebesar Rp118.203.381.971.024. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.117.258.062.690 atau 81,61 persen dibandingkan dengan TA 2005 sebesar Rp65.086.123.908.334.

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari:

		2006	2005
A	Pinjaman Jangka Pendek	Rp 0	Rp 11.150.000.000.000
B	Rekening Pemerintah	11.555.462.940.247	0
C	Dana Eks. Moratorium	7.357.400.000.000	0
D	Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	5.055.702.597.315	6.563.537.070.729
E	Surat Utang Negara	94.234.816.433.462	47.372.586.837.605
	Total Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	Rp118.203.381.971.024	Rp65.086.123.908.334

a. Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek berasal dari Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan. Pada TA 2006 tidak terdapat realisasi Pinjaman Jangka.

b. Rekening Pemerintah

Merupakan Penerimaan Pembiayaan dari rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah pada TA 2006 sebesar Rp11.555.462.940.247 ini terdiri dari:

Penerimaan dari Penutupan Rekening	Rp 5.055.462.940.247
Penerimaan Pembiayaan dari Rekenig Dana Investasi	2.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi	4.500.000.000.000
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	Rp11.555.462.940.247

c. Dana Eks Moratorium

Merupakan penerimaan pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh sebesar Rp7.357.400.000.000.

www.peraturan.go.id

d. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari privatisasi BUMN sebesar Rp2.371.675.405.434 dan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan sebesar Rp2.684.027.191.881. Jumlah pembiayaan dari kegiatan privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi TA 2006 sebesar Rp5.055.702.597.315, yang berarti lebih kecil Rp1.507.834.473.414 atau 22,97 persen dari penerimaan TA 2005 sebesar Rp6.563.537.070.729.

e. Surat Utang Negara

Merupakan penerimaan pembiayaan dari penerbitan Surat Utang Negara/Obligasi baik obligasi dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan pembiayaan Surat Utang Negara pada TA 2006 sebesar Rp94.234.816.433.462 yang berarti lebih besar Rp46.862.229.595.857 atau 98,92 persen dari penerimaan penerbitan Surat Utang Negara TA 2005 sebesar Rp47.372.586.837.605. Rincian dari penerimaan pembiayaan penerbitan Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Pelunasan Investasi dari Obligasi	Rp 0	Rp 21.582.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	1.689.768.517.000	320.154.502.348
Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri	73.757.650.000000	22.539.996.600.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN	18.466.901.169.540	24.490.853.735.257
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN	320.496.746.922	0
	Rp94.234.816.433.462	Rp47.372.586.837.605

Penerimaan Pembiayaan LN sebesar Rp33,47 triliun

D.2.19. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2006 sebesar Rp29.672.559.197.871 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadualan kembali bunga utang luar negeri.

Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2006 adalah sebesar Rp13.579.552.756.283. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.314.742.914.884 atau 10,72 persen dibandingkan dengan TA 2005 yang berjumlah Rp12.264.809.841.399, dengan rincian:

	2006	2005
Program Bilateral	Rp915.056.506.949	Rp 949.127.958.111
Program Mutilateral	12.664.496.249.334	11.315.681.883.288
Jumlah Pinjaman Program	Rp13.579.552.756.283	Rp 12.264.809.841.399

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2006 adalah sebesar Rp16.093.006.441.588. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar

www.peraturan.go.id

Rp1.666.188.822.961 atau 11,55 persen dibandingkan TA 2005 yang berjumlah Rp14.426.817.618.627, dengan rincian:

	2006	2005
Pinjaman Proyek dari Bilateral	Rp5.039.901.938.771	Rp8.406.703.143.226
Pinjaman Proyek dari Multilateral	6.064.506.728.051	3.112.570.734.751
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.801.291.435.052	2.851.353.722.528
Pinjaman Proyek dari Komersial		-
Pinjaman Proyek Lainnya	187.306.339.714	56.190.018.122
Jumlah Pinjaman Proyek	Rp16.093.006.441.588	Rp14.426.817.618.627

c. Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri

Dalam TA 2006 tidak terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri.

d. Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

Dalam TA 2006 tidak terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjadualan kembali bunga utang luar negeri.

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Rp3,66 juta

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2006 sebesar Rp3.665.247 berasal dari penambahan saldo rekening khusus karena selisih kurs.

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp58,25 triliun

D.2.21. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2006 adalah sebesar Rp58.249.309.085.493 yang digunakan untuk Pelunasan Surat Utang Negara sebesar Rp58.249.309.085.493 terdiri dari pelunasan obligasi dan pembayaran bunga obligasi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.751.399.678.977 atau 51,3 persen dibandingkan dengan TA 2005 yang berjumlah Rp38.497.909.406.516.

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp52,68 triliun

D.2.22. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2006 sebesar Rp52.681.071.537.783 merupakan cicilan pokok utang luar negeri–pinjaman proyek. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pinjaman proyek ini lebih tinggi Rp15.568.661.967.983 atau 41,95 persen dibandingkan dengan TA 2005 yang berjumlah Rp37.112.409.569.800.

Pengeluaran PMN sebesar Rp3,97 triliun

D.2.23. Penyertaan Modal Negara

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara dalam TA 2006 sebesar Rp3.972.000.000.000 terdiri dari Penyertaan Modal Negara untuk BUMN dan Penyertaan Modal lainnya. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.223.000.000.000 atau 23,54 persen dibandingkan dengan TA 2005 yang berjumlah Rp5.195.000.000.000.

www.peraturan.go.id

D.2.24. RDI/RPD

RDI/RPD sebesar Rp3,56 triliun

Merupakan pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk BUMN/BUMD, melalui RDI/RPD.Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara dalam TA 2006 sebesar Rp3.557.973.958.998 berasal dari penerusan pinjaman tahun berjalan dan tahun yang lalu, Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.309.358.076.834 atau 58,23 persen dibandingkan dengan TA 2005 yang berjumlah Rp2.248.615.882.164.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Penurunan kas dari Aktivitas Nonanggaran sebesar Rp3,22 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2006, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar Rp3.218.045.953.463, yang berasal dari:

D.2.25. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK sebesar Rp0,19 triliun

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2006 sebesar Rp184.359.625.705 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan atas gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya, termasuk didalamnya adalah Penerimaan dan Pelunasan Wesel Pemerintah. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Penerimaan PFK 10% Gaji	Rp 7.068.014.408.668	Rp 6.056.083.224.453
Penerimaan PFK 2% Pensiun/Gaji Terusan	8.561.825.995	76.356.303.554
Penerimaan PFK 2% Pemda	741.062.875.573	355.163.785.642
Penerimaan PFK Beras Bulog	94.854.793.386	59.720.757.344
Penerimaan Wesel Pemerintah	375.367.020	168.479.886
Penerimaan PFK Lain-lain	300.625.880.860	306.091.167.973
Jumlah Penerimaan PFK	Rp8.213.495.151.502	Rp6.853.583.718.852
Dikurangi		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	Rp6.909.407.503.686	Rp5.997.517.782.673
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pensiun/Gaji Terusan	28.043.010.491	90.289.144.204
Penerimaan PFK 2% Pemda	692.650.245.224	
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog		350.441.597.890
Pelunasan Wesel Pemerintah	90.524.896.816	83.101.211.892
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	Rp14.079.580	4.862.036
Jumlah Pengeluaran PFK	308.495.790.000	289.727.543.500
Perhitungan Fihak Ketiga	Rp8.029.135.525.797	Rp6.811.082.142.195
	Rp 184.359.625.705	Rp 42.501.576.657

D.2.26. Transfer Antar Kantor

Transfer Antar Kantor sebesar Rp3,03 triliun

Transfer Antar Kantor dalam TA 2006 sebesar Rp3.033.686.327.758 merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen

www.peraturan.go.id

Keuangan dan rekening BUN, pemindahbukuan intern KPPN, serta penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan. Rincian Transfer Antar Kantor adalah sebagai berikut:

	2006	2005
Penerimaan Kiriman Uang (KU)	Rp 721.297.780.174.616	Rp559.792.005.805.367
Penerimaan KU Dalam Rangka Reksus	265.593.040.449	1.173.110.465.496
Penerimaan KU dalam rangka TSA	38.112.384.240.562	128.557.449.657
Pemindahbukuan intern KPPN	685.039.877.487.827	555.025.801.931.186
Penerimaan *Reimbursment* dalam rangka *Prefinancing*	34.400.397.423.255	12.263.090.210.176
Penerimaan Uang Persediaan	15.149.826.953.336	12.913.052.009.336
Jumlah Penerimaan Transfer Antar Kantor	1.494.265.859.320.045	1.141.295.617.871.218
Dikurangi:		
Pengeluaran Transfer Antar Kantor	(1.491.232.172.992.290)	(1.130.493.267.211.640)
Jumlah Transfer Antar Kantor	Rp 3.033.686.327.758	Rp 10.802.350.659.578

D.2.27. Saldo Awal Kas

Lihat penjelasan pada Ikhtisar Laporan Arus Kas (D.1).

D.2.28. Kas di Bendahara Pengeluaran

Penjelasan mengenai Kas di Bendahara Pengeluaran lihat catatan atas Neraca (C.2.4).

D.2.29. Kas di Bendahara Penerima

Penjelasan mengenai Kas di Bendahara Penerimaan lihat catatan atas Neraca (C.2.5).

D.2.30. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Indonesia

Penjelasan mengenai Rekening Pemerintah Lainnya pada BI lihat catatan atas Neraca (C.2.3).

D.2.31. Kas Trust Fund

Penjelasan mengenai Kas Trust Fund lihat catatan atas Neraca (C.2.6).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.peraturan.go.id

DAFTAR

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
41	Penerimaan Perpajakan	425.053.080.000.000	409.203.019.335.450	(15.850.060.664.550)	347.031.113.925.042	62.171.905.410.408
411	Pajak Dalam Negeri	410.226.380.000.000	395.971.535.630.012	(14.254.844.369.988)	331.791.943.009.819	64.179.592.620.193
4111	Pajak Penghasilan (PPh)	213.697.980.000.000	208.833.125.652.841	(4.864.854.347.159)	175.541.190.783.206	33.291.934.869.635
41111	PPh Migas	38.685.980.000.000	43.187.887.822.005	4.501.907.822.005	35.143.166.347.322	8.044.721.474.683
411111	PPh Minyak Bumi	13.334.650.000.000	14.672.114.385.638	1.337.464.385.638	11.817.126.210.591	2.854.988.175.047
411112	PPh Gas Alam	25.351.330.000.000	28.518.465.410.268	3.167.135.410.268	23.316.838.664.747	5.201.626.745.521
411113	PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	-	-	-	940.369.606	(940.369.606)
411119	PPh Migas Lainnya	-	(2.691.973.901)	(2.691.973.901)	8.261.102.378	(10.953.076.279)
41112	PPh Nonmigas	175.012.000.000.000	165.645.237.830.836	(9.366.762.169.164)	140.398.024.435.884	25.247.213.394.952
411121	PPh Pasal 21	28.001.900.000.000	31.561.667.373.444	3.559.767.373.444	27.364.886.662.554	4.196.780.710.890
411122	PPh Pasal 22 Nonimpor	4.382.900.000.000	4.024.253.492.637	(358.646.507.363)	2.839.421.187.742	1.184.832.304.895
411123	PPh Pasal 22 Impor	15.405.700.000.000	13.140.320.051.468	(2.265.379.948.532)	13.531.084.838.894	(390.764.787.426)
411124	PPh Pasal 23	19.487.300.000.000	15.355.635.005.902	(4.131.664.994.098)	12.972.254.766.341	2.383.380.239.561
411125	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.327.700.000.000	1.803.456.312.747	(524.243.687.253)	1.569.869.198.317	233.587.114.430
411126	PPh Pasal 25/29 Badan	68.658.200.000.000	65.073.976.846.330	(3.584.223.153.670)	51.387.031.336.290	13.686.945.510.040
411127	PPh Pasal 26	11.055.400.000.000	10.520.528.073.720	(534.871.926.280)	8.915.071.157.208	1.605.456.916.512
411128	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	25.692.900.000.000	24.126.874.618.065	(1.566.025.381.935)	21.883.624.751.072	2.243.249.866.993
411129	PPh Nonmigas Lainnya		38.526.056.523	38.526.056.523	(65.219.462.534)	103.745.519.057
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	132.876.100.000.000	123.035.859.568.711	(9.840.240.431.289)	101.295.752.118.716	21.740.107.449.995
41121	Pendapatan PPN	132.876.100.000.000	118.239.682.513.673	(14.636.417.486.327)	93.954.353.088.553	24.285.329.425.120
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri		74.847.101.151.107	74.847.101.151.107	48.763.525.416.438	26.083.575.734.669
411212	Pendapatan PPN Impor		43.090.899.108.883	43.090.899.108.883	44.890.746.233.280	(1.799.847.124.397)
411219	Pendapatan PPN Lainnya		301.682.253.683	301.682.253.683	300.081.438.835	1.600.814.848
41122	Pendapatan PPNBM		4.796.177.055.038	4.796.177.055.038	7.341.399.030.163	(2.545.221.975.125)
411221	Pendapatan PPNBM Dalam Negeri		3.094.815.644.266	3.094.815.644.266	4.893.706.557.428	(1.798.890.913.162)
411222	Pendapatan PPNBM Impor		1.701.579.806.822	1.701.579.806.822	2.448.941.660.503	(747.361.853.681)
411229	Pendapatan PPNBM Lainnya		(218.396.050)	(218.396.050)	(1.249.187.768)	1.030.791.718

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
4113	Pajak Bumi dan Bangunan	18.153.800.000.000	20.858.516.906.183	2.704.716.906.183	16.216.693.096.637	4.641.823.809.546
41131	Pajak Bumi dan Bangunan	18.153.800.000.000	20.858.516.906.183	2.704.716.906.183	16.216.693.096.637	4.641.823.809.546
411311	PBB Pedesaan		5.787.388.608.908	5.787.388.608.908	4.510.309.244.845	1.277.079.364.063
411312	PBB Perkotaan		3.799.392.031.646	3.799.392.031.646	3.550.576.338.217	248.815.693.429
411313	PBB Perkebunan		151.243.483.998	151.243.483.998	147.786.735.389	3.456.748.609
411314	PBB Kehutanan		80.999.381.619	80.999.381.619	102.603.993.117	(21.604.611.498)
411315	PBB Pertambangan		10.520.190.598.335	10.520.190.598.335	7.406.216.735.946	3.113.973.862.389
411319	PBB Lainnya		519.302.801.677	519.302.801.677	499.200.049.123	20.102.752.554
4114	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.386.200.000.000	3.184.469.880.249	(1.201.730.119.751)	3.431.891.899.489	(247.422.019.240)
41141	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.386.200.000.000	3.184.469.880.249	(1.201.730.119.751)	3.431.891.899.489	(247.422.019.240)
411411	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.386.200.000.000	3.184.469.880.249	(1.201.730.119.751)	3.431.891.899.489	(247.422.019.240)
4115	Pendapatan Cukai	38.522.600.000.000	37.772.132.887.314	(750.467.112.686)	33.256.155.560.171	4.515.977.327.143
41151	Pendapatan Cukai	38.522.600.000.000	37.772.132.887.314	(750.467.112.686)	33.256.155.560.171	4.515.977.327.143
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau		37.059.432.537.507	37.059.432.537.507	32.647.619.590.209	4.411.812.947.298
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol		136.058.679.320	136.058.679.320	101.514.067.699	34.544.611.621
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol		568.055.790.971	568.055.790.971	500.569.986.955	67.485.804.016
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai		2.130.062.644	2.130.062.644	3.988.161.546	(1.858.098.902)
411519	Pendapatan Cukai Lainnya		6.455.816.872	6.455.816.872	2.463.753.762	3.992.063.110
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	2.589.700.000.000	2.287.430.734.714	(302.269.265.286)	2.050.259.551.600	237.171.183.114
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	2.589.700.000.000	2.228.586.928.889	(361.113.071.111)	2.015.978.705.418	212.608.223.471
411611	Pendapatan Bea Meterai	2.589.700.000.000	1.291.112.425.091	(1.298.587.574.909)	1.223.553.229.876	67.559.195.215
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai		930.326.580.247	930.326.580.247	788.487.936.598	141.838.643.649
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya		7.147.923.551	7.147.923.551	3.937.538.944	3.210.384.607
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	-	58.843.805.825	58.843.805.825	34.280.846.182	24.562.959.643
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh		40.318.952.702	40.318.952.702	24.705.825.267	15.613.127.435
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN		19.926.730.907	19.926.730.907	9.609.658.486	10.317.072.421
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM		(1.406.435.928)	(1.406.435.928)	(33.769.909)	(1.372.666.019)

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL		4.558.144	4.558.144	(867.662)	5.425.806
412	Pajak Perdagangan Internasional	14.826.700.000.000	13.231.483.705.438	(1.595.216.294.562)	15.239.170.915.223	(2.007.687.209.785)
4121	Pendapatan Bea Masuk	13.583.000.000.000	12.140.401.555.427	(1.442.598.444.573)	14.920.926.026.871	(2.780.524.471.444)
41211	Pendapatan Bea Masuk	13.583.000.000.000	12.140.401.555.427	(1.442.598.444.573)	14.920.926.026.871	(2.780.524.471.444)
412111	Pendapatan Bea Masuk		11.922.769.763.518	11.922.769.763.518	14.832.438.008.073	(2.909.668.244.555)
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)		1.914.331.502	1.914.331.502	1.114.656.802	799.674.700
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		309.081.007.569	309.081.007.569	217.552.063.150	91.528.944.419
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor		(123.003.173.217)	(123.003.173.217)	(180.378.035.555)	57.374.862.338
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		29.639.626.055	29.639.626.055	50.199.334.401	(20.559.708.346)
4122	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor	1.243.700.000.000	1.091.082.150.011	(152.617.849.989)	318.244.888.352	772.837.261.659
41221	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor	1.243.700.000.000	1.091.082.150.011	(152.617.849.989)	318.244.888.352	772.837.261.659
412211	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor	1.243.700.000.000	1.091.082.150.011	(152.617.849.989)	318.244.888.352	772.837.261.659
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	229.829.268.281.000	226.950.066.385.871	(2.879.201.895.129)	146.888.310.402.381	80.061.755.983.490
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	165.694.879.000.000	167.473.800.945.318	1.778.921.945.318	110.467.256.674.000	57.006.544.271.318
4211	Pendapatan Minyak Bumi	122.963.750.000.000	125.145.403.396.875	2.181.653.396.875	72.822.266.069.379	52.323.137.327.496
421111	Pendapatan Minyak Bumi	122.963.750.000.000	125.145.403.396.875	2.181.653.396.875	72.822.266.069.379	52.323.137.327.496
4212	Pendapatan Gas Alam	36.824.740.000.000	32.940.684.187.448	(3.884.055.812.552)	30.939.783.556.621	2.000.900.630.827
421211	Pendapatan Gas Alam	36.824.740.000.000	32.940.684.187.448	(3.884.055.812.552)	30.939.783.556.621	2.000.900.630.827
4213	Pendapatan Pertambangan Umum	3.482.243.000.000	6.781.369.889.324	3.299.126.889.324	3.190.472.228.757	3.590.897.660.567
421311	Pendapatan Iuran Tetap	62.774.000.000	171.336.260.553	108.562.260.553	113.612.753.120	57.723.507.433
421312	Pendapatan Royalti Batubara	3.419.469.000.000	6.610.033.628.771	3.190.564.628.771	3.076.859.475.637	3.533.174.153.134
4214	Pendapatan Kehutanan	2.010.000.000.000	2.409.460.598.313	399.460.598.313	3.249.365.525.474	(839.904.927.161)
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.512.841.000.000	1.690.536.332.311	177.695.332.311	2.561.483.675.914	(870.947.343.603)
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.512.841.000.000	1.690.536.332.311	177.695.332.311	2.561.483.675.914	(870.947.343.603)
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	462.426.000.000	575.439.653.644	113.013.653.644	642.336.888.293	(66.897.234.649)
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	462.426.000.000	575.439.653.644	113.013.653.644	642.336.888.293	(66.897.234.649)
42143	Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan	34.733.000.000	112.282.363.093	77.549.363.093	42.851.758.364	69.430.604.729

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
421431	Pendapatan IHPH Tanaman Industri	34.733.000.000	103.267.563.893	68.534.563.893	26.886.739.789	76.380.824.104
421432	Pendapatan IHPH Bambu		9.014.799.200	9.014.799.200	4.773.301.250	4.241.497.950
421433	Pendapatan IHPH Tanaman Rotan		-	-	11.191.717.325	(11.191.717.325)
42144	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	25.612.016.770	25.612.016.770	-	25.612.016.770
421441	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan		25.612.016.770	25.612.016.770	-	25.612.016.770
42145	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi	-	2.150.385.547	2.150.385.547	1.029.526.776	1.120.858.771
421451	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi		2.150.385.547	2.150.385.547	1.029.526.776	1.120.858.771
42146	Pendapatan Iuran Menangkap Satwa Liar	-	3.439.846.948	3.439.846.948	1.663.676.127	1.776.170.821
421461	Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar		2.776.630.808	2.776.630.808	1.663.676.127	1.112.954.681
421462	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)		300.000	300.000		300.000
421465	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam		662.876.140	662.876.140		662.876.140
421466	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)		40.000	40.000		40.000
4215	Pendapatan Perikanan	414.146.000.000	196.882.873.358	(217.263.126.642)	265.369.293.769	(68.486.420.411)
42151	Pendapatan Perikanan	414.146.000.000	196.882.873.358	(217.263.126.642)	265.369.293.769	(68.486.420.411)
421511	Pendapatan Perikanan	414.146.000.000	196.882.873.358	(217.263.126.642)	265.368.947.369	(68.486.074.011)
421512	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		-	-	346.400	(346.400)
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	22.322.500.000.000	22.973.056.234.957	650.556.234.957	12.835.193.803.218	10.137.862.431.739
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	22.322.500.000.000	22.973.056.234.957	650.556.234.957	12.835.193.803.218	10.137.862.431.739
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	22.322.500.000.000	1.197.294.246.778	(21.125.205.753.222)	3.818.219.257.880	(2.620.925.011.102)
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	22.322.500.000.000	1.197.294.246.778	(21.125.205.753.222)	3.818.219.257.880	(2.620.925.011.102)
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	-	21.775.761.988.179	21.775.761.988.179	9.016.974.545.338	12.758.787.442.841
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan		21.775.761.988.179	21.775.761.988.179	9.016.974.545.338	12.758.787.442.841
423	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	41.811.889.281.000	36.503.209.205.596	(5.308.680.075.404)	23.585.859.925.163	12.917.349.280.433
42311	Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	4.591.729.239.000	388.908.924.399	(4.202.820.314.601)	1.642.772.961.321	(1.253.864.036.922)
423111	Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	2.285.056.000	17.567.426.702	15.282.370.702	4.835.104.704	12.732.321.998
423112	Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	7.587.523.000	8.466.962.378	879.439.378	6.739.790.303	1.727.172.075
423113	Penjualan Hasil Tambang	2.106.642.037.000	117.096.670	(2.106.524.940.330)	1.529.368.584.542	(1.529.251.487.872)

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
423114	Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	2.458.550.213.000	99.294.877.121	(2.359.255.335.879)		99.294.877.121
423115	Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	155.000.000	1.310.875.377	1.155.875.377	37.070.975.382	(35.760.100.005)
423116	Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, dan Hasil Cetakan Lainnya	14.746.424.000	4.546.474.591	(10.199.949.409)	7.166.633.713	(2.620.159.122)
423117	Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	429.339.000	8.457.383.696	8.028.044.696	4.041.186.428	4.416.197.268
423118	Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni		194.242.022.944	194.242.022.944	26.130.432.620	168.111.590.324
423119	Penjualan Lainnya	1.333.647.000	54.905.804.920	53.572.157.920	27.420.253.629	27.485.551.291
42312	Penjualan Aset	27.592.498.000	35.611.899.217	8.019.401.217	126.676.068.067	(91.064.168.850)
423121	Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	460.971.000	6.733.832.867	6.272.861.867		6.733.832.867
423122	Penjualan Kendaraan Bermotor	1.087.051.000	(31.301.675.591)	(32.388.726.591)		(31.301.675.591)
423123	Penjualan Sewa Beli	25.032.482.000	45.853.104.158	20.820.622.158		45.853.104.158
423124	Penjualan Aset Bekas Milik Asing	-	664.490.355	664.490.355		664.490.355
423129	Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih / Rusak / Dihapuskan	1.011.994.000	13.662.147.428	12.650.153.428		13.662.147.428
42313	Pendapatan Sewa	27.845.332.000	69.889.864.639	42.044.532.639	46.745.554.376	23.144.310.263
423131	Sewa Rumah Dinas, Rumah Negeri	9.500.519.000	37.983.321.354	28.482.802.354	16.827.576.624	21.155.744.730
423132	Sewa Gedung, Bangunan, Gudang	16.004.288.000	26.193.589.334	10.189.301.334	24.180.816.849	2.012.772.485
423133	Sewa Benda-Benda Bergerak	1.324.698.000	2.476.482.270	1.151.784.270	1.987.702.288	488.779.982
423139	Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya	1.015.827.000	3.236.471.681	2.220.644.681	3.749.458.615	(512.986.934)
42314	Pendapatan Jasa I	7.929.967.651.000	7.513.299.974.785	(416.667.676.215)	5.521.699.474.226	1.991.600.500.559
423141	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	243.086.110.000	211.600.340.116	(31.485.769.884)	113.640.519.351	97.959.820.765
423142	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	18.207.150.000	10.031.012.788	(8.176.137.212)	8.960.320.552	1.070.692.236
423143	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor dan SIM, STNK, dan BPKB	2.298.453.837.000	1.605.974.555.579	(692.479.281.421)	1.807.982.255.375	(202.007.699.796)
423144	Pendapatan Hak dan Perijinan	3.429.932.998.000	2.959.693.622.522	(470.239.375.478)	2.059.617.830.825	900.075.791.697
423145	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	50.274.533.000	542.811.169.050	492.536.636.050	111.452.936.531	431.358.232.519
423146	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	1.518.624.815.000	1.579.908.818.587	61.284.003.587	976.360.179.467	603.548.639.120
423147	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	65.809.680.000	63.425.213.320	(2.384.466.680)	48.299.565.050	15.125.648.270
423148	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	305.201.594.000	282.181.154.941	(23.020.439.059)	248.925.354.380	33.255.800.561
423149	Pendapatan Jasa I Lainnya	376.934.000	257.674.087.882	257.297.153.882	146.460.512.695	111.213.575.187
42315	Pendapatan Jasa II	1.469.646.474.000	2.294.966.137.767	825.319.663.767	1.331.688.988.176	963.277.149.591

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
423151	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	72.693.782.000	1.021.436.208.567	948.742.426.567	673.567.507.603	347.868.700.964
423152	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	628.418.000.000	609.942.083.878	(18.475.916.122)	434.421.336.765	175.520.747.113
423153	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin	5.469.068.000	5.368.631.610	(100.436.390)	9.710.451.300	(4.341.819.690)
423154	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		48.324.025	48.324.025	1.281.603.390	(1.233.279.365)
423155	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak-Pajak Negara Dengan Surat Paksa	2.750.555.000	19.976.277.055	17.225.722.055	10.965.986.410	9.010.290.645
423156	Pendapatan Uang Pewarganegaraan		7.655.726.398	7.655.726.398	9.211.229.581	(1.555.503.183)
423157	Pendapatan Bea Lelang	25.934.510.000	57.136.315.339	31.201.805.339	38.306.592.504	18.829.722.835
423158	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Negara	82.080.010.000	49.467.463.876	(32.612.546.124)	56.803.252.450	(7.335.788.574)
423159	Pendapatan Jasa II Lainnya	652.300.549.000	523.935.107.019	(128.365.441.981)	97.421.028.173	426.514.078.846
42316	Pendapatan Bukan Pajak Dari Luar Negeri	349.326.436.000	353.011.168.545	3.684.732.545	620.263.551.985	(267.252.383.440)
423161	Pendapatan Dari Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia	56.648.876.000	185.571.062.374	128.922.186.374	164.916.639.520	20.654.422.854
423162	Pendapatan Dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	292.677.560.000	139.213.407.947	(153.464.152.053)	454.844.833.883	(315.631.425.936)
423169	Pendapatan Rutin Lainnya Dari Luar Negeri		28.226.698.224	28.226.698.224	502.078.582	27.724.619.642
42317	Pendapatan Bunga	-	4.785.279.335	4.785.279.335	2.114.544.871	2.670.734.464
423171	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi		13.654.735	13.654.735	380.157.875	(366.503.140)
423172	Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi		126.006.789	126.006.789	7.122.200	118.884.589
423173	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		-	-	33.447.671	(33.447.671)
423179	Pendapatan Bunga Lainnya		4.645.617.811	4.645.617.811	1.693.817.125	2.951.800.686
42318	Pendapatan Gain On Bond Redemption	-	51.575.792.275	51.575.792.275	225.101.490.488	(173.525.698.213)
423181	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang		51.575.792.275	51.575.792.275	225.101.490.488	(173.525.698.213)
42319	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	-	1.731.248.733.000	1.731.248.733.000		1.731.248.733.000
423191	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah		488.906.373.000	488.906.373.000		488.906.373.000
423192	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		1.242.342.360.000	1.242.342.360.000		1.242.342.360.000
42321	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	24.374.293.000	74.413.840.000	50.039.547.000	108.756.403.431	(34.342.563.431)
423211	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	1.026.947.000	422.475.326	(604.471.674)	183.116.644	239.358.682
423212	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	240.349.000	35.490.170	(204.858.830)	44.928.075	(9.437.905)
423213	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	502.548.000	1.172.011.717	669.463.717	868.428.977	303.582.740

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
423214	Pendapatan Hasil Denda/Denda Tilang dan Sebagainya	15.199.850.000	51.435.705.260	36.235.855.260	98.896.858.867	(47.461.153.607)
423215	Pendapatan Ongkos Perkara	6.205.120.000	8.941.756.707	2.736.636.707	2.678.740.089	6.263.016.618
423219	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.199.479.000	12.406.400.820	11.206.921.820	6.084.330.779	6.322.070.041
42331	Pendapatan Pendidikan	4.592.803.339.000	2.357.826.811.004	(2.234.976.527.996)	1.212.343.585.483	1.145.483.225.521
423311	Pendapatan Uang Pendidikan	4.496.756.844.000	2.143.329.266.426	(2.353.427.577.574)	1.070.961.278.851	1.072.367.987.575
423312	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	21.154.175.000	14.042.261.608	(7.111.913.392)	24.302.620.390	(10.260.358.782)
423313	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	13.800.000	2.569.668.471	2.555.868.471	1.981.964.270	587.704.201
423319	Pendapatan Pendidikan Lainnya	74.878.520.000	197.885.614.499	123.007.094.499	115.097.721.972	82.787.892.527
4234	Pendapatan Lain-Lain	22.798.604.019.000	21.627.670.780.630	(1.170.933.238.370)	12.747.697.302.739	8.879.973.477.891
42341	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan	2.094.295.000	-	(2.094.295.000)	-	-
423411	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat	2.052.845.000	-	(2.052.845.000)	-	-
423412	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun	20.000.000	-	(20.000.000)	-	-
423413	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni	21.450.000	-	(21.450.000)	-	-
42342	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	3.744.354.975.000	2.536.250.061.753	(1.208.104.913.247)	1.192.434.351.307	1.343.815.710.446
423421	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	740.534.000	30.911.181.966	30.170.647.966	22.324.675.812	8.586.506.154
423422	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun	5.400.000	333.131.433.548	333.126.033.548	22.665.409.160	310.466.024.388
423423	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL	3.743.595.241.000	2.168.950.835.018	(1.574.644.405.982)	1.060.955.660.331	1.107.995.174.687
423424	Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman Luar Negeri TAYL	11.800.000	2.727.687.460	2.715.887.460	82.146.511.346	(79.418.823.886)
423425	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah	2.000.000	411.865.258	409.865.258	173.352.614	238.512.644
423426	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL	-	117.058.503	117.058.503	4.168.742.044	(4.051.683.541)
42343	Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM	-	7.328.702.216.238	7.328.702.216.238	11.576.248	7.328.690.639.990
423431	Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM		981.337.464	981.337.464	11.576.248	969.761.216
423432	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)		7.327.720.878.774	7.327.720.878.774		7.327.720.878.774
42344	Pendapatan Pelunasan Piutang	7.389.539.968.000	7.426.686.860.621	37.146.892.621	8.042.517.305.958	(615.830.445.337)
423441	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	7.377.980.000.000	7.397.609.249.284	19.629.249.284	8.018.517.361.356	(620.908.112.072)
423442	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	11.559.968.000	29.077.611.337	17.517.643.337	23.999.944.602	5.077.666.735
42345	Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan	-	1.095.940.230	1.095.940.230	5.881.420.816	(4.785.480.586)

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
423451	Pembetulan Pembukuan Belanja Rupiah Murni TAB		1.085.604.150	1.085.604.150	5.776.150.061	(4.690.545.911)
423452	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Pinjaman Luar Negeri TAB		4.566.280	4.566.280	15.000.000	(10.433.720)
423453	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Hibah TAB		5.769.800	5.769.800	3.806.294	1.963.506
423454	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB		-	-	23.658	(23.658)
423455	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB		-	-	85.365.449	(85.365.449)
423456	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB		-	-	1.075.354	(1.075.354)
42346	Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	-	508.527.685	508.527.685	2.224.412.237	(1.715.884.552)
423461	Pembetulan Pembukuan Belanja Rupiah Murni TAYL		294.608.728	294.608.728	766.099.670	(471.490.942)
423462	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Pinjaman Luar Negeri TAYL		170.136.620	170.136.620	955.095.457	(784.958.837)
423463	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Hibah TAYL		-	-	355.125	(355.125)
423464	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL		8.469.607	8.469.607	318.896.015	(310.426.408)
423465	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL		34.693.750	34.693.750	675.000	34.018.750
423466	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL		618.980	618.980	183.290.970	(182.671.990)
42347	Pendapatan Lain-Lain	11.662.614.781.000	4.326.943.432.024	(7.335.671.348.976)	3.504.628.236.173	822.315.195.851
423471	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	2.222.850.000	6.885.433.961	4.662.583.961	4.030.257.496	2.855.176.465
423472	Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.576.421.000	51.192.229.587	49.615.808.587	26.772.669.442	24.419.560.145
423473	Pendapatan atas Denda Administrasi BPHTB		258.237.947	258.237.947	1.778.201.538	(1.519.963.591)
423474	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional		30.098.821	30.098.821	1.642.550.016.654	(1.642.519.917.833)
423475	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	9.000.000.000	4.327.117.213	(4.672.882.787)	9.054.554.203	(4.727.436.990)
423476	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)		5.898.000	5.898.000		5.898.000
423477	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	15.000.000.000	4.000.030.000	(10.999.970.000)		4.000.030.000
423478	Pendapatan dari biaya pengawasan HET Minyak Tanah		2.099.070.000	2.099.070.000		2.099.070.000
423479	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	11.634.815.510.000	4.032.635.116.964	(7.602.180.393.036)	1.820.442.536.840	2.212.192.580.124
423481	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM		217.410.494.314	217.410.494.314		217.410.494.314
423482	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa		8.099.705.217	8.099.705.217		8.099.705.217
424	Pendapatan PNBP Lainnya I		7.483.742.079	7.483.742.079		7.483.742.079
4241	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi		7.483.742.079	7.483.742.079		7.483.742.079

www.peraturan.go.id

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(DALAM RUPIAH)

KODE MAP	URAIAN MAP	ANGGARAN (UU No. 14 / 2006)	REALISASI TAHUN 2006	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2005	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
42411	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi		7.483.742.079	7.483.742.079		7.483.742.079
424111	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan		7.375.936.569	7.375.936.569		7.375.936.569
424112	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara		107.805.510	107.805.510		107.805.510
43	Penerimaan Hibah	4.232.907.854.000	1.834.050.785.735	(2.398.857.068.265)	1.304.782.898.434	529.267.887.301
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	54.240.263.652	54.240.263.652		54.240.263.652
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		54.240.263.652	54.240.263.652		54.240.263.652
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan		12.982.000	12.982.000		12.982.000
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha		2.435.310.356	2.435.310.356		2.435.310.356
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya		51.791.971.296	51.791.971.296		51.791.971.296
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri		1.779.810.522.083	1.779.810.522.083	1.304.782.898.434	475.027.623.649
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	1.779.810.522.083	1.779.810.522.083	1.304.782.898.434	475.027.623.649
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral		26.869.412.948	26.869.412.948		26.869.412.948
431213	Pendapatan Hibah Multilateral		1.746.459.165.126	1.746.459.165.126		1.746.459.165.126
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya		6.481.944.009	6.481.944.009	1.304.782.898.434	(1.298.300.954.425)
			-	-		-
	Jumlah Penerimaan	659.115.256.135.000	637.987.136.507.056	(21.128.119.627.944)	495.224.207.225.857	142.762.929.281.199

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	145.785.583.000	112.365.691.437	18.103.245.595	130.468.937.032	(15.316.645.968)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	47.638.792.000	39.214.228.388	18.103.245.595	57.317.473.983	9.678.681.983
02	MAJELIS	98.146.791.000	73.151.463.049	-	73.151.463.049	(24.995.327.951)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.205.984.730.000	939.897.463.460	-	939.897.463.460	(266.087.266.540)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	386.756.574.000	302.200.240.004		302.200.240.004	(84.556.333.996)
02	DEWAN	819.228.156.000	637.697.223.456		637.697.223.456	(181.530.932.544)
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	686.247.824.000	552.090.227.740	14.546.758.256	566.636.985.996	(119.610.838.004)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	339.330.242.000	283.983.204.606	1.012.269.000	284.995.473.606	(54.334.768.394)
02	B.P.K. PUSAT	346.917.582.000	268.107.023.134	13.534.489.256	281.641.512.390	(65.276.069.610)
005	MAHKAMAH AGUNG	2.219.567.197.000	1.929.241.542.447	18.994.007.540	1.948.235.549.987	(271.331.647.013)
01	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG	1.752.149.248.000	1.585.071.377.683	18.994.007.540	1.604.065.385.223	(148.083.862.777)
02	KEPANITERAAN	76.597.779.000	61.950.311.809	-	61.950.311.809	(14.647.467.191)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	52.350.413.000	43.237.985.356	-	43.237.985.356	(9.112.427.644)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	26.079.448.000	22.919.465.858	-	22.919.465.858	(3.159.982.142)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN	4.454.382.000	3.191.070.370	-	3.191.070.370	(1.263.311.630)
06	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	291.172.220.000	198.176.311.401	-	198.176.311.401	(92.995.908.599)
07	BADAN DIKLAT LITBANG	10.404.951.000	9.239.449.470	-	9.239.449.470	(1.165.501.530)
08	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	6.358.756.000	5.455.570.500	-	5.455.570.500	(903.185.500)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.502.696.360.000	1.399.986.874.866	1.082.115.979	1.401.068.990.845	(101.627.369.155)
01	KEJAKSAAN AGUNG	1.502.696.360.000	1.399.986.874.866	1.082.115.979	1.401.068.990.845	(101.627.369.155)
007	KEPRESIDENAN	1.080.911.421.000	719.508.815.531	10.361.349.510	729.870.165.041	(351.041.255.959)
01	SEKRETARIAT NEGARA	652.435.813.000	365.567.828.313	10.361.349.510	375.929.177.823	(276.506.635.177)
02	SEKRETARIAT KABINET	16.335.878.000	13.729.607.152	-	13.729.607.152	(2.606.270.848)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	375.016.638.000	306.015.416.127	-	306.015.416.127	(69.001.221.873)
04	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	14.946.119.000	11.923.966.333	-	11.923.966.333	(3.022.152.667)
05	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	22.176.973.000	22.271.997.606	-	22.271.997.606	95.024.606
008	WAKIL PRESIDEN	221.652.611.000	157.135.667.218	-	157.135.667.218	(64.516.943.782)
01	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	178.822.818.000	136.884.716.159	-	136.884.716.159	(41.938.101.841)
02	BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI	42.829.793.000	20.250.951.059	-	20.250.951.059	(22.578.841.941)
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	1.545.182.610.000	1.114.192.485.396	43.850.898.372	1.158.043.383.768	(387.139.226.232)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	399.816.329.000	374.486.330.999	36.707.304.895	411.193.635.894	11.377.306.894
02	INSPEKTORAT JENDERAL	61.446.022.000	31.278.082.936	-	31.278.082.936	(30.167.939.064)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	64.321.529.000	58.079.623.140	-	58.079.623.140	(6.241.905.860)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	68.052.249.000	60.623.827.148	-	60.623.827.148	(7.428.421.852)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	57.942.194.000	53.203.913.071	4.607.088.200	57.811.001.271	(131.192.729)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	261.194.880.000	251.896.353.337	-	251.896.353.337	(9.298.526.663)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	357.913.264.000	68.417.172.353	2.048.869.777	70.466.042.130	(287.447.221.870)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	147.258.114.000	125.429.213.302	-	125.429.213.302	(21.828.900.698)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	52.554.076.000	22.873.508.559	-	22.873.508.559	(29.680.567.441)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.910.617.000	17.495.625.561	-	17.495.625.561	(3.414.991.439)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.773.336.000	50.408.834.990	487.635.500	50.896.470.490	(2.876.865.510)
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	4.748.947.453.000	3.098.570.229.752	54.218.444.245	3.152.788.673.997	(1.596.158.779.003)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.541.888.617.000	2.909.648.360.707	54.218.444.245	2.963.866.804.952	(1.578.021.812.048)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	13.733.538.000	13.724.483.779	-	13.724.483.779	(9.054.221)
03	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	20.562.581.000	18.380.025.091	-	18.380.025.091	(2.182.555.909)
04	DITJEN MULTILATERAL EKKUBANG	20.107.896.000	15.282.173.784	-	15.282.173.784	(4.825.722.216)
05	DITJEN INFORMASI, DIPLOMASI PUBLIK DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	19.292.935.000	15.393.560.449	-	15.393.560.449	(3.899.374.551)
06	DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER	15.383.085.000	14.545.730.699	-	14.545.730.699	(837.354.301)
07	DITJEN KERJASAMA ASEAN	13.676.541.000	12.018.199.637	-	12.018.199.637	(1.658.341.363)
08	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	19.120.824.000	17.284.900.412	-	17.284.900.412	(1.835.923.588)
09	DITJEN MULTILATERAL POLSOSKAM	74.950.886.000	72.558.782.601	-	72.558.782.601	(2.392.103.399)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	10.230.550.000	9.734.012.593	-	9.734.012.593	(496.537.407)
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	28.180.890.508.000	23.922.771.242.982	-	23.922.771.242.982	(4.258.119.265.018)
01	DEPARTEMEN PERTAHANAN	6.093.119.656.000	23.922.771.242.982	-	23.922.771.242.982	17.829.651.586.982
21	MARKAS BESAR TNI	3.602.494.977.000	-	-	-	(3.602.494.977.000)
22	MARKAS BESAR TNI AD	10.866.314.733.000	-	-	-	(10.866.314.733.000)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
23	MARKAS BESAR TNI AL	4.293.935.129.000	-	-	-	(4.293.935.129.000)
24	MARKAS BESAR TNI AU	3.325.026.013.000	-	-	-	(3.325.026.013.000)
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA	3.438.983.043.000	2.823.668.403.330	52.240.408.183	2.875.908.811.513	(563.074.231.487)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.648.299.777.000	2.336.312.604.805	27.957.070.003	2.364.269.674.808	(284.030.102.192)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	16.003.839.000	15.494.271.663	-	15.494.271.663	(509.567.337)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	38.839.021.000	30.049.909.351	-	30.049.909.351	(8.789.111.649)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	189.669.644.000	185.001.778.707	3.955.239.600	188.957.018.307	(712.625.693)
06	DITJEN IMIGRASI	397.600.433.000	122.905.402.109	12.832.918.450	135.738.320.559	(261.862.112.441)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	46.719.237.000	42.374.035.523	2.310.591.250	44.684.626.773	(2.034.610.227)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.849.111.000	20.469.427.820	5.184.588.880	25.654.016.700	(195.094.300)
09	DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	24.941.578.000	23.673.243.441	-	23.673.243.441	(1.268.334.559)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	32.993.452.000	30.749.195.778	-	30.749.195.778	(2.244.256.222)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	18.066.951.000	16.638.534.133	-	16.638.534.133	(1.428.416.867)
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	6.575.637.245.000	5.012.205.201.412	154.772.013.334	5.166.977.214.746	(1.408.660.030.254)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	485.752.933.000	422.965.282.939	327.392.400	423.292.675.339	(62.460.257.661)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	46.867.266.000	31.151.620.528	504.843.535	31.656.464.063	(15.210.801.937)
03	DITJEN ANGGARAN	62.075.358.000	45.547.905.805	-	45.547.905.805	(16.527.452.195)
04	DITJEN PAJAK	3.040.165.147.000	2.529.364.736.648	101.360.966.086	2.630.725.702.734	(409.439.444.266)
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	1.686.488.526.000	966.922.088.972	31.539.388.414	998.461.477.386	(688.027.048.614)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	915.153.933.000	729.235.881.175	13.252.612.046	742.488.493.221	(172.665.439.779)
10	DITJEN PIUTANG DAN LELANG NEGARA	149.731.412.000	135.379.659.030	501.630.000	135.881.289.030	(13.850.122.970)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	91.341.681.000	81.070.409.345	2.785.407.895	83.855.817.240	(7.485.863.760)
12	BADAN PENGKAJIAN EKONOMI, KEUANGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL	43.280.299.000	28.707.384.553	-	28.707.384.553	(14.572.914.447)
16	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	54.780.690.000	41.860.232.417	4.499.772.958	46.360.005.375	(8.420.684.625)
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	6.391.424.530.000	5.430.616.450.151	120.536.180.315	5.551.152.630.466	(840.271.899.534)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	763.195.587.000	705.906.408.191	17.655.145.575	723.561.553.766	(39.634.033.234)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	37.557.098.000	30.102.367.927	-	30.102.367.927	(7.454.730.073)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	517.186.595.000	473.936.076.491	48.957.485.175	522.893.561.666	5.706.966.666
04	DITJEN HOLTIKULTURA	250.316.653.000	239.080.036.023	6.641.437.077	245.721.473.100	(4.595.179.900)
05	DITJEN PERKEBUNAN	450.116.823.000	410.579.007.735	8.195.034.400	418.774.042.135	(31.342.780.865)
06	DITJEN PETERNAKAN	635.779.298.000	604.828.554.913	3.599.016.560	608.427.571.473	(27.351.726.527)
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	395.010.354.000	372.130.868.239	2.275.500.000	374.406.368.239	(20.603.985.761)
08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	1.014.309.506.000	886.812.087.424	2.463.063.970	889.275.151.394	(125.034.354.606)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	712.173.491.000	544.799.960.824	1.561.020.250	546.360.981.074	(165.812.509.926)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	643.138.225.000	529.306.213.130	16.798.978.583	546.105.191.713	(97.033.033.287)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	692.499.995.000	375.907.986.971	1.409.772.000	377.317.758.971	(315.182.236.029)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	280.140.905.000	257.226.882.283	10.979.726.725	268.206.609.008	(11.934.295.992)
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.244.209.772.000	1.110.302.344.143	16.167.609.246	1.126.469.953.389	(117.739.818.611)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
01	SEKRETARIAT JENDERAL	338.237.506.000	294.364.350.187	5.195.283.631	299.559.633.818	(38.677.872.182)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA	76.817.639.000	70.724.892.979	-	70.724.892.979	(6.092.746.021)
03	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN,TEKSTIL DAN ANEKA	60.798.195.000	57.189.275.980	959.322.000	58.148.597.980	(2.649.597.020)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA	48.304.065.000	46.190.584.916	-	46.190.584.916	(2.113.480.084)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	292.890.576.000	265.897.165.283	55.269.600	265.952.434.883	(26.938.141.117)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	14.051.574.000	13.582.088.259	-	13.582.088.259	(469.485.741)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	413.110.217.000	362.353.986.539	9.957.734.015	372.311.720.554	(40.798.496.446)
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.545.651.458.000	4.484.106.086.431	173.503.260.550	4.657.609.346.981	(888.042.111.019)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	323.062.671.000	280.216.661.350	25.390.378.960	305.607.040.310	(17.455.630.690)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	44.412.386.000	42.819.395.833	-	42.819.395.833	(1.592.990.167)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	380.161.667.000	285.658.956.362	11.098.884.789	296.757.841.151	(83.403.825.849)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	3.345.691.026.000	2.760.040.361.437	73.361.209.207	2.833.401.570.644	(512.289.455.356)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	281.651.673.000	132.859.260.719	16.682.027.350	149.541.288.069	(132.110.384.931)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	446.831.648.000	368.828.461.500	16.161.269.825	384.989.731.325	(61.841.916.675)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	390.248.580.000	316.280.873.436	8.728.641.079	325.009.514.515	(65.239.065.485)
13	BADAN GEOLOGI	333.591.807.000	297.402.115.794	22.080.849.340	319.482.965.134	(14.108.841.866)
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	8.423.070.457.000	6.457.838.911.740	311.868.281.553	6.769.707.193.293	(1.653.363.263.707)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	217.717.591.000	173.859.322.718	556.140.000	174.415.462.718	(43.302.128.282)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	21.925.166.000	21.221.635.023	-	21.221.635.023	(703.530.977)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	745.296.024.000	751.604.429.204	5.368.655.800	756.973.085.004	11.677.061.004
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	2.276.135.156.000	1.792.091.285.825	177.183.453.703	1.969.274.739.528	(306.860.416.472)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1.903.848.425.000	1.712.511.448.633	76.089.005.815	1.788.600.454.448	(115.247.970.552)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	2.777.765.538.000	1.618.864.454.798	52.354.241.635	1.671.218.696.433	(1.106.546.841.567)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	55.788.063.000	53.334.005.437	-	53.334.005.437	(2.454.057.563)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	229.042.879.000	211.840.100.667	316.784.600	212.156.885.267	(16.885.993.733)
13	BADAN SAR NASIONAL	195.551.615.000	122.512.229.435	-	122.512.229.435	(73.039.385.565)
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	40.427.988.790.000	36.794.208.579.649	300.935.871.240	37.095.144.450.889	(3.332.844.339.111)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.446.797.645.000	1.080.609.731.959	2.501.229.700	1.083.110.961.659	(363.686.683.341)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	101.178.927.000	79.334.290.520	1.894.725.200	81.229.015.720	(19.949.911.280)
03	DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	21.692.684.567.000	21.223.447.545.037	47.251.848.184	21.270.699.393.221	(421.985.173.779)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	10.454.138.296.000	8.100.894.464.026	224.339.067.860	8.325.233.531.886	(2.128.904.764.114)
05	DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	1.567.327.475.000	1.497.537.941.373	6.159.911.098	1.503.697.852.471	(63.629.622.529)
08	DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.487.905.982.000	4.208.853.004.875	18.789.089.198	4.227.642.094.073	(260.263.887.927)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	677.955.898.000	603.531.601.859	-	603.531.601.859	(74.424.296.141)
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	13.902.987.406.000	11.271.091.434.421	989.549.949.456	12.260.641.383.877	(1.642.346.022.123)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.396.082.890.000	1.900.244.388.274	194.861.278.055	2.095.105.666.329	(300.977.223.671)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	43.117.555.000	36.015.486.258	-	36.015.486.258	(7.102.068.742)
03	DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT	3.086.298.171.000	2.295.832.419.478	491.575.943.867	2.787.408.363.345	(298.889.807.655)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
04	DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK	4.599.105.601.000	4.273.568.982.691	216.391.452.017	4.489.960.434.708	(109.145.166.292)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	2.069.971.732.000	1.266.618.302.211	73.847.519.752	1.340.465.821.963	(729.505.910.037)
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	639.478.982.000	629.028.505.464	-	629.028.505.464	(10.450.476.536)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	173.242.325.000	142.973.569.011	1.944.440.000	144.918.009.011	(28.324.315.989)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	895.690.150.000	726.809.781.034	10.929.315.765	737.739.096.799	(157.951.053.201)
025	**DEPARTEMEN AGAMA**	**11.102.075.754.000**	**9.896.599.120.362**	**126.737.753.029**	**10.023.336.873.391**	**(1.078.738.880.609)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	8.493.141.788.000	7.535.403.446.281	106.767.289.225	7.642.170.735.506	(850.971.052.494)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	38.104.521.000	33.490.957.116	-	33.490.957.116	(4.613.563.884)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN BIMBINGAN HAJI	438.952.879.000	428.359.103.630	-	428.359.103.630	(10.593.775.370)
04	DITJEN PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM	1.900.447.004.000	1.703.218.167.187	19.970.463.804	1.723.188.630.991	(177.258.373.009)
05	DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KRISTEN	33.062.932.000	32.155.543.990	-	32.155.543.990	(907.388.010)
06	DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KHATOLIK	32.749.982.000	32.307.425.837	-	32.307.425.837	(442.556.163)
07	DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT HINDU DAN BUDHA	34.437.980.000	34.883.339.942	-	34.883.339.942	445.359.942
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN DIKLAT KEAGAMAAN	131.178.668.000	96.781.136.379	-	96.781.136.379	(34.397.531.621)
026	**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**2.220.350.409.000**	**2.001.867.671.744**	**67.491.104.178**	**2.069.358.775.922**	**(150.991.633.078)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	220.041.345.000	169.232.339.347	1.410.054.000	170.642.393.347	(49.398.951.653)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	39.525.546.000	37.064.746.998	-	37.064.746.998	(2.460.799.002)
03	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	190.003.321.000	163.537.846.231	1.366.843.000	164.904.689.231	(25.098.631.769)
04	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	209.372.324.000	187.267.449.953	351.572.232	187.619.022.185	(21.753.301.815)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	90.785.516.000	86.197.061.917	135.400.000	86.332.461.917	(4.453.054.083)
06	DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	503.882.730.000	486.471.741.626	37.079.729.810	523.551.471.436	19.668.741.436
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	397.289.695.000	373.088.159.641	24.522.403.536	397.610.563.177	320.868.177
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	58.618.816.000	56.878.198.444	-	56.878.198.444	(1.740.617.556)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	50.748.584.000	48.133.975.593	-	48.133.975.593	(2.614.608.407)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	460.082.532.000	393.996.151.994	2.625.101.600	396.621.253.594	(63.461.278.406)
027	**DEPARTEMEN SOSIAL**	**2.295.714.464.000**	**2.164.893.726.332**	**56.492.896.029**	**2.221.386.622.361**	**(74.327.841.639)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	115.067.998.000	103.811.993.959	12.339.276.179	116.151.270.138	1.083.272.138
02	INSPEKTORAT JENDERAL	9.381.353.000	9.343.507.583	-	9.343.507.583	(37.845.417)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	745.549.576.000	719.596.022.248	9.890.431.850	729.486.454.098	(16.063.121.902)
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	604.608.149.000	561.912.723.353	-	561.912.723.353	(42.695.425.647)
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	692.806.815.000	644.206.258.790	34.230.688.000	678.436.946.790	(14.369.868.210)
11	BADAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL	128.300.573.000	126.023.220.399	32.500.000	126.055.720.399	(2.244.852.601)
029	**DEPARTEMEN KEHUTANAN**	**1.870.984.208.000**	**1.448.781.163.182**	**36.434.206.713**	**1.485.215.369.895**	**(385.768.838.105)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	469.342.748.000	318.341.277.416	4.567.121.806	322.908.399.222	(146.434.348.778)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	29.315.537.000	22.498.971.831	-	22.498.971.831	(6.816.565.169)
03	DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN	244.936.394.000	173.656.586.674	2.285.709.500	175.942.296.174	(68.994.097.826)
04	DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	230.493.178.000	204.747.475.412	8.860.660.649	213.608.136.061	(16.885.041.939)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	437.225.439.000	378.313.839.279	14.803.273.183	393.117.112.462	(44.108.326.538)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
06	BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN	301.520.102.000	213.877.513.661	1.771.827.400	215.649.341.061	(85.870.760.939)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	158.150.810.000	137.345.498.909	4.145.614.175	141.491.113.084	(16.659.696.916)
032	**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**2.853.629.732.000**	**2.474.338.350.432**	**92.010.558.048**	**2.566.348.908.480**	**(287.280.823.520)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	510.379.038.000	495.714.548.891	19.393.937.447	515.108.486.338	4.729.448.338
02	INSPEKTORAT JENDERAL	20.761.191.000	20.575.325.454	-	20.575.325.454	(185.865.546)
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	556.493.182.000	483.449.661.071	37.955.170.038	521.404.831.109	(35.088.350.891)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	539.769.693.000	442.353.186.339	3.188.853.906	445.542.040.245	(94.227.652.755)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	207.313.536.000	185.208.424.017	5.605.412.000	190.813.836.017	(16.499.699.983)
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	186.861.557.000	158.073.582.416	2.449.572.235	160.523.154.651	(26.338.402.349)
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	670.273.381.000	539.661.651.701	15.480.574.122	555.142.225.823	(115.131.155.177)
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	161.778.154.000	149.301.970.543	7.937.038.300	157.239.008.843	(4.539.145.157)
033	**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**	**19.849.044.613.000**	**17.635.844.679.870**	**1.550.849.382.567**	**19.186.694.062.437**	**(662.350.550.563)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	295.256.849.000	227.708.229.592	-	227.708.229.592	(67.548.619.408)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	21.902.948.000	20.584.275.715	-	20.584.275.715	(1.318.672.285)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	170.141.914.000	159.908.709.498	1.700.934.800	161.609.644.298	(8.532.269.702)
04	DITJEN BINA MARGA	8.259.868.383.000	7.150.143.422.282	598.244.675.906	7.748.388.098.188	(511.480.284.812)
05	DITJEN CIPTA KARYA	3.805.618.998.000	3.681.771.682.645	842.930.589.206	4.524.702.271.851	719.083.273.851
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	6.883.700.078.000	6.040.034.733.193	107.973.182.655	6.148.007.915.848	(735.692.162.152)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	256.534.615.000	216.780.772.081	-	216.780.772.081	(39.753.842.919)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	156.020.828.000	138.912.854.864	-	138.912.854.864	(17.107.973.136)
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**	**88.157.189.000**	**76.315.064.784**	**-**	**76.315.064.784**	**(11.842.124.216)**
01	MENKO BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	88.157.189.000	76.315.064.784	-	76.315.064.784	(11.842.124.216)
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**113.271.368.000**	**59.559.674.427**	**6.019.362.341**	**65.579.036.768**	**(47.692.331.232)**
01	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	113.271.368.000	59.559.674.427	6.019.362.341	65.579.036.768	(47.692.331.232)
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**110.841.120.000**	**62.145.957.815**	**5.928.317.110**	**68.074.274.925**	**(42.766.845.075)**
01	MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	110.841.120.000	62.145.957.815	5.928.317.110	68.074.274.925	(42.766.845.075)
040	**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**652.924.383.000**	**602.115.764.817**	**7.592.350.035**	**609.708.114.852**	**(43.216.268.148)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	206.548.217.000	180.681.771.944	491.148.855	181.172.920.799	(25.375.296.201)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	8.315.186.000	7.952.364.454	-	7.952.364.454	(362.821.546)
03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	87.254.967.000	86.572.153.303	-	86.572.153.303	(682.813.697)
04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA	105.862.780.000	94.804.922.763	3.419.729.880	98.224.652.643	(7.638.127.357)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	34.240.212.000	31.384.705.315	-	31.384.705.315	(2.855.506.685)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	101.163.831.000	94.574.329.609	-	94.574.329.609	(6.589.501.391)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	109.539.190.000	106.145.517.429	3.681.471.300	109.826.988.729	287.798.729
041	**KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**203.309.187.000**	**147.633.454.410**	**7.449.907.700**	**155.083.362.110**	**(48.225.824.890)**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	203.309.187.000	147.633.454.410	7.449.907.700	155.083.362.110	(48.225.824.890)
042	**KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI**	**355.473.246.000**	**342.604.088.671**	**-**	**342.604.088.671**	**(12.869.157.329)**
01	MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	355.473.246.000	342.604.088.671	-	342.604.088.671	(12.869.157.329)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
043	**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**	**408.639.342.000**	**299.948.973.305**	**943.077.000**	**300.892.050.305**	**(107.747.291.695)**
01	MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	408.639.342.000	299.948.973.305	943.077.000	300.892.050.305	(107.747.291.695)
044	**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM**	**933.140.163.000**	**856.916.257.531**	**73.292.783.698**	**930.209.041.229**	**(2.931.121.771)**
01	MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	933.140.163.000	856.916.257.531	73.292.783.698	930.209.041.229	(2.931.121.771)
047	**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**136.546.826.000**	**116.860.815.671**	**-**	**116.860.815.671**	**(19.686.010.329)**
01	MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	136.546.826.000	116.860.815.671	-	116.860.815.671	(19.686.010.329)
048	**KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**	**208.702.083.000**	**169.780.139.451**	**-**	**169.780.139.451**	**(38.921.943.549)**
01	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	208.702.083.000	169.780.139.451	-	169.780.139.451	(38.921.943.549)
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**953.502.868.000**	**958.819.193.585**	**53.566.098.500**	**1.012.385.292.085**	**58.882.424.085**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	953.502.868.000	958.819.193.585	53.566.098.500	1.012.385.292.085	58.882.424.085
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**694.456.410.000**	**690.337.492.412**	**-**	**690.337.492.412**	**(4.118.917.588)**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	694.456.410.000	690.337.492.412	-	690.337.492.412	(4.118.917.588)
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**30.652.676.000**	**29.556.316.459**	**-**	**29.556.316.459**	**(1.096.359.541)**
01	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30.652.676.000	29.556.316.459	-	29.556.316.459	(1.096.359.541)
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**947.102.320.000**	**909.175.927.074**	**2.923.920.961**	**912.099.848.035**	**(35.002.471.965)**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	947.102.320.000	909.175.927.074	2.923.920.961	912.099.848.035	(35.002.471.965)
055	**KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**	**257.395.267.000**	**196.953.885.164**	**1.179.966.570**	**198.133.851.734**	**(59.261.415.266)**
01	MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/BAPPENAS	257.395.267.000	196.953.885.164	1.179.966.570	198.133.851.734	(59.261.415.266)
056	**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**	**1.685.833.716.000**	**1.132.425.915.540**	**79.058.269.775**	**1.211.484.185.315**	**(474.349.530.685)**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.685.833.716.000	1.132.425.915.540	79.058.269.775	1.211.484.185.315	(474.349.530.685)
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**142.943.779.000**	**138.598.744.122**	**91.003.000**	**138.689.747.122**	**(4.254.031.878)**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	142.943.779.000	138.598.744.122	91.003.000	138.689.747.122	(4.254.031.878)
059	**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**2.049.583.439.000**	**1.226.839.253.736**	**8.871.733.058**	**1.235.710.986.794**	**(813.872.452.206)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	99.297.914.000	71.300.015.035	6.877.127.149	78.177.142.184	(21.120.771.816)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	11.633.599.000	11.384.755.678	-	11.384.755.678	(248.843.322)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	1.691.819.394.000	924.834.669.369	70.499.284	924.905.168.653	(766.914.225.347)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	28.887.359.000	25.303.820.744	1.715.550.000	27.019.370.744	(1.867.988.256)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	113.998.953.000	101.353.002.686	-	101.353.002.686	(12.645.950.314)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	55.184.639.000	52.819.707.640	208.556.625	53.028.264.265	(2.156.374.735)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	48.761.581.000	39.843.282.584	-	39.843.282.584	(8.918.298.416)
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**16.848.445.656.000**	**16.185.718.371.390**	**264.164.005.264**	**16.449.882.376.654**	**(398.563.279.346)**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	16.848.445.656.000	16.185.718.371.390	264.164.005.264	16.449.882.376.654	(398.563.279.346)
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**335.260.472.000**	**301.956.784.545**	**333.573.950**	**302.290.358.495**	**(32.970.113.505)**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	335.260.472.000	301.956.784.545	333.573.950	302.290.358.495	(32.970.113.505)
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**78.619.650.000**	**72.256.529.102**	**-**	**72.256.529.102**	**(6.363.120.898)**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	78.619.650.000	72.256.529.102	-	72.256.529.102	(6.363.120.898)
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**280.768.869.000**	**183.237.902.277**	**-**	**183.237.902.277**	**(97.530.966.723)**
01	SEKRETARIAT UTAMA	106.137.207.000	67.648.788.472	-	67.648.788.472	(38.488.418.528)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
02	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	31.899.349.000	19.947.638.321	-	19.947.638.321	(11.951.710.679)
03	DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	101.407.714.000	70.481.612.083	-	70.481.612.083	(30.926.101.917)
04	DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	10.892.286.000	6.436.900.051	-	6.436.900.051	(4.455.385.949)
05	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	7.059.026.000	4.577.781.370	-	4.577.781.370	(2.481.244.630)
06	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	23.373.287.000	14.145.181.980	-	14.145.181.980	(9.228.105.020)
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**262.217.054.000**	**285.745.570.644**	**-**	**285.745.570.644**	**23.528.516.644**
01	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	262.217.054.000	285.745.570.644	-	285.745.570.644	23.528.516.644
067	**KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**581.184.499.000**	**230.209.637.887**	**-**	230.209.637.887	(350.974.861.113)
01	MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	581.184.499.000	230.209.637.887	-	230.209.637.887	(350.974.861.113)
068	**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**715.135.577.000**	**633.923.418.774**	**3.579.338.103**	**637.502.756.877**	**(77.632.820.123)**
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	715.135.577.000	633.923.418.774	3.579.338.103	637.502.756.877	(77.632.820.123)
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**49.020.559.000**	**36.601.899.634**	**-**	36.601.899.634	(12.418.659.366)
01	KOMNASHAM	49.020.559.000	36.601.899.634	-	36.601.899.634	(12.418.659.366)
075	**BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**533.418.459.000**	**519.979.526.002**	**1.796.410.000**	**521.775.936.002**	**(11.642.522.998)**
01	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	533.418.459.000	519.979.526.002	1.796.410.000	521.775.936.002	(11.642.522.998)
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**688.310.683.000**	**317.847.222.611**	**222.683.550**	318.069.906.161	(370.240.776.839)
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	688.310.683.000	317.847.222.611	222.683.550	318.069.906.161	(370.240.776.839)
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**216.887.968.000**	**184.939.962.960**	**19.692.478.882**	**204.632.441.842**	**(12.255.526.158)**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	216.887.968.000	184.939.962.960	19.692.478.882	204.632.441.842	(12.255.526.158)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**77.523.513.000**	**33.008.780.716**	-	33.008.780.716	(44.514.732.284)
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	77.523.513.000	33.008.780.716	-	33.008.780.716	(44.514.732.284)
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**583.634.991.000**	**396.315.324.409**	**292.689.000**	**396.608.013.409**	**(187.026.977.591)**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	583.634.991.000	396.315.324.409	292.689.000	396.608.013.409	(187.026.977.591)
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**258.042.386.000**	**250.069.836.212**	**834.674.000**	**250.904.510.212**	**(7.137.875.788)**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	258.042.386.000	250.069.836.212	834.674.000	250.904.510.212	(7.137.875.788)
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**481.861.954.000**	**413.028.000.297**	**366.500.000**	**413.394.500.297**	**(68.467.453.703)**
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	481.861.954.000	413.028.000.297	366.500.000	413.394.500.297	(68.467.453.703)
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**165.296.604.000**	**155.446.641.967**	**7.091.601.000**	**162.538.242.967**	**(2.758.361.033)**
01	L A P A N	165.296.604.000	155.446.641.967	7.091.601.000	162.538.242.967	(2.758.361.033)
083	**BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL**	**157.593.296.000**	**140.522.741.080**	**4.403.759.600**	**144.926.500.680**	**(12.666.795.320)**
01	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	157.593.296.000	140.522.741.080	4.403.759.600	144.926.500.680	(12.666.795.320)
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL**	**53.310.160.000**	**31.006.845.540**	**49.200.000**	**31.056.045.540**	**(22.254.114.460)**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	53.310.160.000	31.006.845.540	49.200.000	31.056.045.540	(22.254.114.460)
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**53.191.946.000**	**46.939.241.470**	-	**46.939.241.470**	**(6.252.704.530)**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	53.191.946.000	46.939.241.470	-	46.939.241.470	(6.252.704.530)
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**168.848.405.000**	**126.037.092.747**	-	**126.037.092.747**	**(42.811.312.253)**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	168.848.405.000	126.037.092.747	-	126.037.092.747	(42.811.312.253)
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**86.163.263.000**	**83.924.609.651**	-	**83.924.609.651**	**(2.238.653.349)**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
01	ARSIP NASIONAL	86.163.263.000	83.924.609.651	-	83.924.609.651	(2.238.653.349)
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**243.037.284.000**	**225.638.219.483**	**2.818.334.000**	**228.456.553.483**	**(14.580.730.517)**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	243.037.284.000	225.638.219.483	2.818.334.000	228.456.553.483	(14.580.730.517)
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**473.641.834.000**	**424.606.043.248**	**12.494.022.082**	**437.100.065.330**	**(36.541.768.670)**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	473.641.834.000	424.606.043.248	12.494.022.082	437.100.065.330	(36.541.768.670)
090	**DEPARTEMEN PERDAGANGAN**	**1.361.477.575.000**	**1.102.892.406.126**	**25.777.744.000**	**1.128.670.150.126**	**(232.807.424.874)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	516.193.697.000	393.048.352.874	22.382.289.900	415.430.642.774	(100.763.054.226)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	239.929.870.000	221.747.160.488	452.283.725	222.199.444.213	(17.730.425.787)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	202.022.907.000	185.849.901.649	1.846.026.375	187.695.928.024	(14.326.978.976)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	96.602.766.000	76.085.694.764	144.144.000	76.229.838.764	(20.372.927.236)
05	INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	14.855.789.000	13.238.066.150	-	13.238.066.150	(1.617.722.850)
06	BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	172.097.214.000	122.317.187.757	953.000.000	123.270.187.757	(48.827.026.243)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	67.425.038.000	51.800.632.888	-	51.800.632.888	(15.624.405.112)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	52.350.294.000	38.805.409.556	-	38.805.409.556	(13.544.884.444)
091	**KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT**	**421.356.624.000**	**368.296.856.926**	**866.092.200**	**369.162.949.126**	**(52.193.674.874)**
01	SEKRETARIAT KEMENTERIANNEGARA PERUMAHAN RAKYAT	101.562.876.000	69.377.105.348	866.092.200	70.243.197.548	(31.319.678.452)
02	DEPUTI PEMBIAYAAN	39.023.487.000	29.909.830.101	-	29.909.830.101	(9.113.656.899)
03	DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN	41.807.328.000	41.332.189.127	-	41.332.189.127	(475.138.873)
04	DEPUTI PERUMAHAN FORMAL	183.982.071.000	177.178.963.954	-	177.178.963.954	(6.803.107.046)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
05	DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA	54.980.862.000	50.498.768.396	-	50.498.768.396	(4.482.093.604)
092	**KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**493.111.422.000**	**451.204.061.259**	**6.174.371.000**	**457.378.432.259**	**(35.732.989.741)**
01	MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	493.111.422.000	451.204.061.259	6.174.371.000	457.378.432.259	(35.732.989.741)
093	**KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI**	**220.899.185.000**	**168.250.226.610**	**53.472.220.633**	**221.722.447.243**	**823.262.243**
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	220.899.185.000	168.250.226.610	53.472.220.633	221.722.447.243	823.262.243
094	**BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS**	**10.462.249.827.000**	**7.894.195.035.725**	**2.082.482.891.058**	**9.976.677.926.783**	**(485.571.900.217)**
01	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN	105.734.223.000	92.238.506.359	66.119.198.125	158.357.704.484	52.623.481.484
02	BIDANG KELEMBAGAAN	1.021.606.651.000	601.787.822.962	334.682.627.770	936.470.450.732	(85.136.200.268)
03	BIDANG PERUMAHAN INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN	6.696.948.866.000	5.342.471.850.545	933.396.216.192	6.275.868.066.737	(421.080.799.263)
04	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA	837.894.374.000	612.608.816.670	373.285.010.221	985.893.826.891	147.999.452.891
05	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN	339.685.667.000	294.770.422.309	140.007.919.112	434.778.341.421	95.092.674.421
06	BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	1.072.330.452.000	689.919.895.364	126.036.564.227	815.956.459.591	(256.373.992.409)
07	SEKRETARIAT, PERWAKILAN NIAS, KEUANGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	388.049.594.000	260.397.721.516	108.955.355.411	369.353.076.927	(18.696.517.073)
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**191.658.513.000**	**149.206.250.460**	-	**149.206.250.460**	**(42.452.262.540)**
01	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	191.658.513.000	149.206.250.460	-	149.206.250.460	(42.452.262.540)
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**46.728.762.000**	**34.918.864.373**	-	**34.918.864.373**	**(11.809.897.627)**
01	KOMISI YUDISIAL RI	46.728.762.000	34.918.864.373	-	34.918.864.373	(11.809.897.627)
61	**BUNGA UTANG**	**82.555.203.900.000**	**78.828.090.869.808**	-	**78.828.090.869.808**	**(3.727.113.030.192)**
62	SUBSIDI DAN TRANSFER	145.552.663.614.000	140.058.489.786.897	-	140.058.489.786.897	(5.494.173.827.103)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA ESELON I	URAIAN BAGIAN ANGGARAN/ESELON I	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL	
69	BELANJA LAIN LAIN	35.902.432.593.000	31.784.295.053.803	-	31.784.295.053.803	(4.118.137.539.197)
					-	-
JUMLAH		478.249.290.655.000	433.087.508.897.635	6.944.575.672.008	440.032.084.569.643	(38.217.206.085.357)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
URUTAN REALISASI BELANJA MENURUT BA
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

BA	URAIAN BA	REALISASI		NETTO
		DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	BELANJA
062	SUBSIDI DAN TRANSFER	140.058.489.786.897	-	140.058.489.786.897
061	CICILAN BUNGA UTANG	78.828.090.869.808	-	78.828.090.869.808
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	36.794.208.579.649	300.935.871.240	37.095.144.450.889
069	BELANJA LAIN LAIN	31.784.295.053.803	-	31.784.295.053.803
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	23.922.771.242.982	-	23.922.771.242.982
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	17.635.844.679.870	1.550.849.382.567	19.186.694.062.437
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	16.185.718.371.390	264.164.005.264	16.449.882.376.654
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	11.271.091.434.421	989.549.949.456	12.260.641.383.877
025	DEPARTEMEN AGAMA	9.896.599.120.362	126.737.753.029	10.023.336.873.391
094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	7.894.195.035.725	2.082.482.891.058	9.976.677.926.783
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	6.457.838.911.740	311.868.281.553	6.769.707.193.293
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	5.430.616.450.151	120.536.180.315	5.551.152.630.466
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	5.012.205.201.412	154.772.013.334	5.166.977.214.746
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.484.106.086.431	173.503.260.550	4.657.609.346.981
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	3.098.570.229.752	54.218.444.245	3.152.788.673.997
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	2.823.668.403.330	52.240.408.183	2.875.908.811.513
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.474.338.350.432	92.010.558.048	2.566.348.908.480
027	DEPARTEMEN SOSIAL	2.164.893.726.332	56.492.896.029	2.221.386.622.361
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.001.867.671.744	67.491.104.178	2.069.358.775.922
005	MAHKAMAH AGUNG	1.929.241.542.447	18.994.007.540	1.948.235.549.987
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.448.781.163.182	36.434.206.713	1.485.215.369.895
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.399.986.874.866	1.082.115.979	1.401.068.990.845
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.226.839.253.736	8.871.733.058	1.235.710.986.794
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.132.425.915.540	79.058.269.775	1.211.484.185.315
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	1.114.192.485.396	43.850.898.372	1.158.043.383.768
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.102.892.406.126	25.777.744.000	1.128.670.150.126
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.110.302.344.143	16.167.609.246	1.126.469.953.389
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	958.819.193.585	53.566.098.500	1.012.385.292.085
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	939.897.463.460	-	939.897.463.460
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	856.916.257.531	73.292.783.698	930.209.041.229
054	BADAN PUSAT STATISTIK	909.175.927.074	2.923.920.961	912.099.848.035
007	KEPRESIDENAN	719.508.815.531	10.361.349.510	729.870.165.041
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	690.337.492.412	-	690.337.492.412
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	633.923.418.774	3.579.338.103	637.502.756.877
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	602.115.764.817	7.592.350.035	609.708.114.852
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	552.090.227.740	14.546.758.256	566.636.985.996
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	519.979.526.002	1.796.410.000	521.775.936.002
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	451.204.061.259	6.174.371.000	457.378.432.259
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	424.606.043.248	12.494.022.082	437.100.065.330
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	413.028.000.297	366.500.000	413.394.500.297
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	396.315.324.409	292.689.000	396.608.013.409
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	368.296.856.926	866.092.200	369.162.949.126
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	342.604.088.671	-	342.604.088.671
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	317.847.222.611	222.683.550	318.069.906.161
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	301.956.784.545	333.573.950	302.290.358.495
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	299.948.973.305	943.077.000	300.892.050.305
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	285.745.570.644	-	285.745.570.644
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	250.069.836.212	834.674.000	250.904.510.212
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	230.209.637.887	-	230.209.637.887

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
URUTAN REALISASI BELANJA MENURUT BA
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

BA	URAIAN BA	REALISASI		NETTO
		DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	BELANJA
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	225.638.219.483	2.818.334.000	228.456.553.483
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	168.250.226.610	53.472.220.633	221.722.447.243
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	184.939.962.960	19.692.478.882	204.632.441.842
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	196.953.885.164	1.179.966.570	198.133.851.734
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	183.237.902.277	-	183.237.902.277
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	169.780.139.451	-	169.780.139.451
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	155.446.641.967	7.091.601.000	162.538.242.967
008	WAKIL PRESIDEN	157.135.667.218	-	157.135.667.218
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	147.633.454.410	7.449.907.700	155.083.362.110
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	149.206.250.460	-	149.206.250.460
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	140.522.741.080	4.403.759.600	144.926.500.680
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	138.598.744.122	91.003.000	138.689.747.122
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	112.365.691.437	18.103.245.595	130.468.937.032
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	126.037.092.747	-	126.037.092.747
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	116.860.815.671	-	116.860.815.671
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	83.924.609.651	-	83.924.609.651
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	76.315.064.784	-	76.315.064.784
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	72.256.529.102	-	72.256.529.102
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	62.145.957.815	5.928.317.110	68.074.274.925
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	59.559.674.427	6.019.362.341	65.579.036.768
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	46.939.241.470	-	46.939.241.470
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	36.601.899.634	-	36.601.899.634
100	KOMISI YUDISIAL RI	34.918.864.373	-	34.918.864.373
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	33.008.780.716	-	33.008.780.716
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	31.006.845.540	49.200.000	31.056.045.540
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	29.556.316.459	-	29.556.316.459
	TOTAL	**433.087.508.897.635**	**6.944.575.672.008**	**440.032.084.569.643**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI DAN SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE F/SF	URAIAN FUNGSI DAN SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA		
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL
01	**PELAYANAN UMUM**	**40.671.609.708.000**	**280.759.423.850.542**	**2.583.600.845.923**	**283.343.024.696.465**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	22.722.543.634.000	16.920.005.820.558	195.202.169.262	17.115.207.989.820
01.02	BANTUAN LUAR NEGERI	26.446.492.000	131.625.752	-	131.625.752
01.03	PELAYANAN UMUM	4.590.997.013.000	7.643.560.766.200	207.905.404.555	7.851.466.170.755
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	1.142.812.108.000	963.108.427.605	292.689.000	963.401.116.605
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH		78.769.832.267.263	-	78.769.832.267.263
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	865.777.550.000	2.106.097.090.785	25.111.629.405	2.131.208.720.190
01.07	LITBANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAH	53.643.961.000	52.824.067.713	-	52.824.067.713
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAH LAINNYA	11.269.388.950.000	174.304.235.660.316	2.153.908.987.131	176.458.144.647.447
01.12	SUBFUNGSI TIDAK ADA			1.179.966.570	1.179.966.570
01.19	SUBFUNGSI TIDAK ADA		(372.370.150)		(372.370.150)
01.27	SUBFUNGSI TIDAK ADA		494.500	-	494.500
02	**PERTAHANAN**	**28.689.267.958.000**	**24.426.141.042.980**	**-**	**24.426.141.042.980**
02.01	PERTAHANAN NEGARA	22.985.505.362.000	23.214.676.624.997	-	23.214.676.624.997
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	5.124.993.312.000	630.921.220.693	-	630.921.220.693
02.03	BANTUAN MILITER LUAR NEGERI	75.638.743.000	75.841.177.717	-	75.841.177.717
02.04	LITBANG PERTAHANAN	38.794.337.000	38.942.984.951	-	38.942.984.951
02.05	PERTAHANAN LAINNYA	464.336.204.000	465.759.034.622	-	465.759.034.622
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**25.045.600.449.000**	**23.378.674.034.988**	**364.441.133.848**	**23.743.115.168.836**
03.01	KEPOLISIAN	17.741.443.205.000	17.113.172.096.718	270.509.949.264	17.383.682.045.982

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI DAN SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE F/SF	URAIAN FUNGSI DAN SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA		
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	195.551.615.000	122.512.229.435	-	122.512.229.435
03.03	PEMBINAAN HUKUM	4.781.155.489.000	4.033.978.921.021	91.290.078.194	4.125.268.999.215
03.04	PERADILAN	1.836.525.506.000	1.654.420.531.713	1.265.372.790	1.655.685.904.503
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	306.465.113.000	301.440.271.880	1.375.733.600	302.816.005.480
03.90	KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKKUM LAINNYA	184.459.521.000	153.149.984.221	-	153.149.984.221
04	**EKONOMI**	**44.483.416.093.000**	**36.790.274.091.760**	**1.505.346.457.694**	**38.295.620.549.454**
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	2.297.134.711.000	1.950.668.139.438	105.249.729.437	2.055.917.868.875
04.02	TENAGA KERJA	1.024.241.231.000	974.398.062.257	3.740.605.600	978.138.667.857
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	10.016.244.690.000	8.129.292.573.145	216.412.559.842	8.345.705.132.987
04.04	PENGAIRAN	5.926.274.730.000	5.217.206.777.986	93.867.089.371	5.311.073.867.357
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	3.632.416.629.000	2.985.614.918.548	79.510.125.347	3.065.125.043.895
04.06	PERTAMBANGAN	1.269.079.782.000	1.080.681.779.692	79.269.035.714	1.159.950.815.406
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	1.221.305.679.000	1.105.477.766.285	13.879.358.915	1.119.357.125.200
04.08	TRANSPORTASI	16.199.096.599.000	13.376.723.508.103	910.366.963.659	14.287.090.471.762
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.719.137.823.000	949.528.232.370	550.599.284	950.078.831.654
04.10	LITBANG EKONOMI	290.289.281.000	241.039.008.390	703.980.525	241.742.988.915
04.90	EKONOMI LAINNYA	888.194.938.000	779.643.325.546	1.796.410.000	781.439.735.546
05	**LINGKUNGAN HIDUP**	**3.130.286.848.000**	**2.561.720.005.308**	**102.760.346.275**	**2.664.480.351.583**
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	266.054.757.000	309.183.478.164	16.417.064.047	325.600.542.211
05.02	MANAJEMEN AIR LIMBAH	37.337.275.000	35.110.424.366	-	35.110.424.366

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI DAN SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE F/SF	URAIAN FUNGSI DAN SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA		
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	272.516.825.000	178.656.713.114	418.485.000	179.075.198.114
05.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	1.852.189.620.000	1.617.117.218.723	52.064.437.889	1.669.181.656.612
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	664.024.290.000	379.788.013.075	33.860.359.339	413.648.372.414
05.06	LITBANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	38.656.000	638.185.425	-	638.185.425
05.90	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	38.125.425.000	41.225.972.441	-	41.225.972.441
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**5.394.253.147.000**	**4.610.866.014.944**	**846.339.777.538**	**5.457.205.792.482**
06.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.013.668.574.000	941.136.192.329	64.681.206.246	1.005.817.398.575
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN	1.150.986.878.000	994.389.878.682	238.363.572.718	1.232.753.451.400
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	851.923.439.000	853.689.794.060	6.975.050.945	860.664.845.005
0690	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA	2.377.674.256.000	1.821.650.149.939	536.319.947.629	2.357.970.097.568
06.06	SUBFUNGSI TIDAK ADA		(66)	-	(66)
07	**KESEHATAN**	**13.499.931.825.000**	**11.211.989.036.778**	**977.739.169.206**	**12.189.728.205.984**
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	974.142.916.000	923.604.938.959	433.496.657	924.038.435.616
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	4.595.128.685.000	4.308.899.652.477	530.315.592.448	4.839.215.244.925
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	5.297.088.669.000	3.773.949.551.067	378.448.064.805	4.152.397.615.872
07.04	KELUARGA BERENCANA	382.903.921.000	329.231.372.501	-	329.231.372.501
07.05	LITBANG KESEHATAN	173.242.325.000	142.973.569.011	1.944.440.000	144.918.009.011
07.90	KESEHATAN LAINNYA	2.077.425.309.000	1.733.329.952.763	66.597.575.296	1.799.927.528.059
08	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**935.532.850.000**	**890.989.183.911**	**14.453.971.035**	**905.443.154.946**
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA	521.880.870.000	506.741.120.878	3.419.729.880	510.160.850.758

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI DAN SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE F/SF	URAIAN FUNGSI DAN SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA		
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL
08.02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OL;AHRAGA	325.470.796.000	301.805.853.610	6.174.371.000	307.980.224.610
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	79.199.469.000	76.412.455.230	687.250.000	77.099.705.230
08.90	PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA	8.981.715.000	6.029.754.193	4.172.620.155	10.202.374.348
09	**AGAMA**	**1.357.666.188.000**	**1.400.298.748.954**	**10.901.382.065**	**1.411.200.131.019**
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.216.645.204.000	1.282.032.895.552	7.528.548.758	1.289.561.444.310
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	32.695.220.000	32.345.587.095	2.371.194.607	34.716.781.702
09.03	LITBANG AGAMA	34.529.669.000	16.933.009.615	-	16.933.009.615
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	73.796.095.000	68.978.541.496	1.001.638.700	69.980.180.196
09.09	SUBFUNGSI TIDAK ADA	34.529.669.000	8.715.196	473.736.136.511	473.744.851.707
10	**PENDIDIKAN**	**48.672.219.435.000**	**44.830.168.957.878**	**473.736.136.511**	**45.303.905.094.389**
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	307.779.602.000	302.357.653.987	3.983.756.902	306.341.410.889
10.02	PENDIDIKAN DASAR	23.166.278.356.000	22.642.526.864.751	131.396.670.947	22.773.923.535.698
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	4.887.888.168.000	4.674.985.230.269	28.873.221.520	4.703.858.451.789
10.04	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	867.416.969.000	834.940.885.598	2.340.649.568	837.281.535.166
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	778.899.663.000	719.292.593.219	2.868.160.700	722.160.753.919
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	12.605.276.928.000	9.443.714.586.576	285.291.825.802	9.729.006.412.378
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIODIKAN	4.093.857.311.000	3.848.421.687.371	15.073.351.422	3.863.495.038.793
10.08	PEMBINAAN KEAGAMAAN	1.624.270.519.000	2.081.525.881.115	-	2.081.525.881.115
10.09	LITBANG PENDIDIKAN	312.984.808.000	256.016.204.387	3.779.736.650	259.795.941.037
10.90	PENDIDIKAN LAINNYA	27.567.111.000	26.387.370.605	128.763.000	26.516.133.605

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI DAN SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE F/SF	URAIAN FUNGSI DAN SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA		
			DIPA UMUM	DIPA LUNCURAN	TOTAL
11	**KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**	**2.359.206.049.000**	**2.238.024.366.624**	**65.256.451.913**	**2.303.280.818.537**
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT	2.170.937.000	-	-	-
11.03	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN DAN PEJUANG	27.371.124.000	26.952.387.945	-	26.952.387.945
11.04	KEPENDUDUKAN , KELUARGA BERENCANA DNA PELINDUNGAN ANAK	60.777.829.000	71.792.233.032	172.777.000	71.965.010.032
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	104.322.716.000	90.020.015.291	3.279.338.103	93.299.353.394
11.06	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL	30.075.812.000	29.383.529.004	-	29.383.529.004
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	692.806.815.000	644.201.518.990	47.111.171.950	691.312.690.940
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	66.418.013.000	64.598.070.213	32.500.000	64.630.570.213
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	1.375.262.803.000	1.311.082.452.149	14.660.664.860	1.325.743.117.009
11.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA		(5.840.000)	-	(5.840.000)
	FUNGSI TIDAK ADA		(11.060.437.032)	-	(11.060.437.032)
0000	SUBFUNGSI TIDAK ADA		(12.324.187.032)	-	(12.324.187.032)
2504	SUBFUNGSI TIDAK ADA		1.263.750.000	-	1.263.750.000
JUMLAH BELANJA		**214.238.990.550.000**	**433.087.508.897.635**	**6.944.575.672.008**	**440.032.084.569.643**

Keterangan:

Terjadi perbedaan sebesar Rp194.321.216.877 antara realisasi menurut fungsi/subfungsi dengan realisasi menurut jenis belanja dan organisasi. Hal ini disebabkan Departemen Agama tidak mencantumkan realisasi belanja menurut fungsi/fungsi dalam LRA-nya.

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	PEMBAYARAN BUNGA UTANG	SUBSIDI	BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	JUMLAH BELANJA
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	17.318.243.399	76.794.026.745	36.356.666.888	-	-	-	-	130.468.937.032
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	204.825.822.009	644.833.419.841	90.238.221.610	-	-	-	-	939.897.463.460
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	131.802.656.872	263.945.552.855	170.888.776.269	-	-	-	-	566.636.985.996
005	MAHKAMAH AGUNG	988.295.479.077	295.470.178.837	664.469.892.073	-	-	-	-	1.948.235.549.987
006	KEJAKSAAN AGUNG	485.758.780.247	463.588.283.875	451.721.926.723	-	-	-	-	1.401.068.990.845
007	KEPRESIDENAN	88.195.068.167	480.931.769.172	159.843.327.702	-	-	900.000.000	-	729.870.165.041
008	WAKIL PRESIDEN	3.920.150.532	126.205.274.832	27.010.241.854	-	-	-	-	157.135.667.218
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	250.840.856.645	470.107.714.397	433.512.812.726	-	-	3.582.000.000	-	1.158.043.383.768
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.498.423.417.380	1.514.542.386.120	139.822.870.497	-	-	-	-	3.152.788.673.997
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	11.920.250.128.602	6.602.033.217.431	5.400.487.896.949	-	-	-	-	23.922.771.242.982
013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	946.900.100.318	1.121.883.412.398	807.125.298.797	-	-	-	-	2.875.908.811.513
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.354.270.297.809	1.622.983.329.114	1.876.992.578.945	312.731.008.878	-	-	-	5.166.977.214.746
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	929.696.693.901	1.997.274.902.891	1.442.045.235.098	-	-	1.182.135.798.576	-	5.551.152.630.466
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	231.757.167.041	462.407.199.427	370.141.792.720	-	-	62.163.794.201	-	1.126.469.953.389
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	351.790.916.035	1.139.624.205.922	3.166.194.225.024	-	-	-	-	4.657.609.346.981
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	652.722.182.335	1.352.274.420.240	4.764.710.590.718	-	-	-	-	6.769.707.193.293
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	4.467.808.166.111	5.116.845.504.686	1.559.842.571.491	-	-	25.950.648.208.601	-	37.095.144.450.889
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	1.568.195.584.029	3.317.319.599.162	3.910.765.165.794	-	-	3.464.361.034.892	-	12.260.641.383.877
025	DEPARTEMEN AGAMA	4.848.046.187.789	1.106.604.888.851	1.726.478.334.542	-	-	2.342.207.462.209	-	10.023.336.873.391
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	342.643.321.068	818.202.311.838	718.922.125.533	-	-	189.591.017.483	-	2.069.358.775.922
027	DEPARTEMEN SOSIAL	182.712.451.627	462.794.693.995	116.269.951.151	-	-	1.459.609.525.588	-	2.221.386.622.361
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	443.185.640.793	795.481.430.786	240.856.728.816	-	-	5.691.569.500	-	1.485.215.369.895
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	258.926.769.715	959.457.264.864	952.084.392.081	-	-	395.880.481.820	-	2.566.348.908.480
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	794.416.317.549	2.631.453.808.288	14.163.252.715.011	-	-	1.574.638.364.569	22.932.857.020	19.186.694.062.437
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	6.183.838.213	56.908.023.821	13.223.202.750	-	-	-	-	76.315.064.784
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	8.705.466.259	53.609.988.219	3.263.582.290	-	-	-	-	65.579.036.768

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	PEMBAYARAN BUNGA UTANG	SUBSIDI	BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	JUMLAH BELANJA
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.442.810.481	43.216.004.764	4.721.531.180	-	-	8.693.928.500	-	68.074.274.925
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	155.767.199.513	376.482.598.635	77.458.316.704	-	-	-	-	609.708.114.852
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	16.123.113.011	44.832.284.249	94.127.964.850	-	-	-	-	155.083.362.110
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	30.474.044.364	175.086.197.617	137.043.846.690	-	-	-	-	342.604.088.671
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	40.779.221.161	215.798.941.494	44.313.887.650	-	-	-	-	300.892.050.305
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	51.938.513.789	305.428.504.032	321.383.119.867	-	-	251.458.903.541	-	930.209.041.229
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	12.278.860.835	99.652.165.836	4.929.789.000	-	-	-	-	116.860.815.671
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	15.675.662.564	145.565.899.877	8.538.577.010	-	-	-	-	169.780.139.451
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	36.555.242.368	490.151.511.942	485.678.537.775	-	-	-	-	1.012.385.292.085
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	16.076.220.196	18.673.233.235	655.588.038.981	-	-	-	-	690.337.492.412
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	8.300.650.351	11.315.430.108	9.940.236.000	-	-	-	-	29.556.316.459
054	BADAN PUSAT STATISTIK	509.701.342.109	318.550.546.035	83.561.387.891	-	-	-	286.572.000	912.099.848.035
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	52.384.262.279	133.408.754.316	12.340.835.139	-	-	-	-	198.133.851.734
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	558.038.897.128	570.414.565.214	83.030.722.973	-	-	-	-	1.211.484.185.315
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	30.922.273.829	48.372.333.074	59.395.140.219	-	-	-	-	138.689.747.122
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	101.705.447.525	954.172.323.348	179.833.215.921	-	-	-	-	1.235.710.986.794
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.211.935.627.132	3.664.403.998.105	2.573.542.751.417	-	-	-	-	16.449.882.376.654
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	88.880.954.309	130.241.302.896	83.168.101.290	-	-	-	-	302.290.358.495
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11.968.267.902	32.561.032.062	27.727.229.138	-	-	-	-	72.256.529.102
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	31.085.738.771	133.785.232.146	18.366.931.360	-	-	-	-	183.237.902.277
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	16.081.268.806	108.533.684.999	161.130.616.839	-	-	-	-	285.745.570.644
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	11.996.174.355	106.553.299.385	6.284.339.875	-	-	105.375.824.272	-	230.209.637.887
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	131.897.140.022	461.447.780.606	34.157.836.249	-	-	10.000.000.000	-	637.502.756.877
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	11.895.245.873	22.701.093.187	2.005.560.574	-	-	-	-	36.601.899.634
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	87.433.209.480	98.867.690.632	335.475.035.890	-	-	-	-	521.775.936.002
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	172.771.784.702	135.813.258.353	8.429.627.056	-	-	-	1.055.236.550	318.069.906.161

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	PEMBAYARAN BUNGA UTANG	SUBSIDI	BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	JUMLAH BELANJA
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	5.552.657.049	42.165.483.994	156.914.300.799	-	-	-	-	204.632.441.842
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	6.914.830.178	7.411.005.134	18.682.945.404	-	-	-	-	33.008.780.716
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	131.483.518.780	201.733.984.873	63.390.509.756	-	-	-	-	396.608.013.409
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	137.962.839.552	88.672.431.450	24.269.239.210	-	-	-	-	250.904.510.212
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	123.878.893.552	159.735.242.680	129.780.364.065	-	-	-	-	413.394.500.297
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	63.402.101.769	63.649.587.552	35.486.553.646	-	-	-	-	162.538.242.967
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	37.236.630.316	56.341.194.275	51.348.676.089	-	-	-	-	144.926.500.680
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	5.958.678.001	24.589.167.539	508.200.000	-	-	-	-	31.056.045.540
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11.775.683.631	21.531.110.844	13.632.446.995	-	-	-	-	46.939.241.470
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	28.352.362.740	57.695.926.509	39.988.803.498	-	-	-	-	126.037.092.747
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	16.664.681.332	25.680.950.024	41.578.978.295	-	-	-	-	83.924.609.651
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	90.712.667.730	74.644.247.569	63.099.638.184	-	-	-	-	228.456.553.483
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	165.951.937.301	157.345.529.554	113.802.598.475	-	-	-	-	437.100.065.330
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	162.253.585.746	552.521.062.251	412.125.515.889	-	-	1.769.986.240	-	1.128.670.150.126
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	21.022.333.842	180.996.323.379	145.009.044.905	-	-	22.135.247.000	-	369.162.949.126
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	55.393.461.546	346.113.932.487	18.537.717.786	-	-	37.333.320.440	-	457.378.432.259
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	51.752.114.911	58.110.453.216	58.408.558.483	-	-	-	53.451.320.633	221.722.447.243
094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	375.488.208.863	1.326.940.649.998	4.633.859.346.363	-	-	3.640.389.721.559	-	9.976.677.926.783
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	72.539.260.559	70.730.587.901	5.936.402.000	-	-	-	-	149.206.250.460
100	KOMISI YUDISIAL RI	3.349.518.192	24.748.072.581	6.821.273.600	-	-	-	-	34.918.864.373
061	CICILAN BUNGA UTANG	-	-	-	78.769.832.267.263	-	-	58.258.602.545	78.828.090.869.808
062	SUBSIDI DAN TRANSFER	23.520.920.938.123	-	-	-	107.431.785.858.675	-	9.105.782.990.099	140.058.489.786.897
069	BELANJA LAIN LAIN	2.762.019.485.964	840.949.240.683	-	-	-	-	28.181.326.327.156	31.784.295.053.803
	JUMLAH	73.252.287.265.554	47.181.912.659.247	54.951.875.415.032	79.082.563.276.141	107.431.785.858.675	40.708.566.188.991	37.423.093.906.003	440.032.084.569.643

www.peraturan.go.id

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER/KEGIATAN
YANG DITEMPATKAN DALAM REKENING KHUSUS TRUST FUND YANG DIKELOLA BRR-NAD-NIAS
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

NO	Kegiatan/Satker	Nilai Trust Fund
I	INFRASTRUKTUR	
1	BRR-Pemeliharaan Rehabilitasi Peningkatan dan Pembangunan Sarpras Transportasi Nias	10.482.941.483
2	BRR-Pemeliharaan Rehabilitasi Peningkatan dan Pembangunan Transportasi NAD	18.717.742.679
3	BRR-Pengembangan Kawasan Perontohan	102.850.690.960
4	BRR-Pembinaan Perencanaan Jalan NAD	34.259.079.638
5	BRR-Pembinaan Perencanaan Jalan NAD	32.855.332.963
6	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Nasional NAD	49.200.401.122
7	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Propinsi NAD	17.958.322.848
8	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Propinsi Sumut	2.810.636.650
9	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kota Banda Aceh	61.798.144.648
10	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kota Sabang	8.516.452.605
11	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Aceh Besar	17.516.301.720
12	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Aceh jaya	12.609.992.586
13	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Pidie	19.685.854.263
14	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Bireun	903.089.000
15	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan KAbupaten Aceh Utara	10.691.977.535
16	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan KotaLhokseumawe	2.994.258.642
17	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Aceh Barat	13.248.797.934
18	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Nagan Raya	2.618.767.338
19	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Aceh Barat Daya	9.052.552.600
20	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Nias	4.333.065.304
21	BRR-Rehabilitasi dan konstruksi Jalan Kabupaten Nias Selatan	14.004.928.929
22	BRR-Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah NAD	38.300.687.600
23	BRR-Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Nias	15.372.595.446
24	BRR-Pembinaan dan Perencanaan Irigasi NAD	17.473.910.353
25	BRR-Pembinaan dan Perencanaan PBPP NAD	43.596.514.558
26	BRR-Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Nias	1.397.123.554
27	BRR-Pengembangan Daerah Rawa dan Pengamanan Pantai Nias	11.915.491.317
28	BRR-Irigasi Wilayah Simelue	1.178.798.126
29	BRR-Irigasi Wilayah Nias	374.731.946
31	BRR-Peningkatan Kualitas Jasa Kelistrikan NAD	82.048.555.700
32	BRR-Peningkatan Kualitas Jasa Kelistrikan Nias	5.113.765.236
33	BRR-Fasilitas Pos, Telekomunikasi, Meterorologi dan Geofisika NAD	2.999.350.500
34	BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut NAD	65.022.192.968
35	BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi NAD	42.932.152.032
36	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Tengah	6.621.652.253
37	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Timur	5.176.146.075
38	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kota Langsa	5.648.245.000
39	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Tamiang	4.260.456.731
40	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Tenggara	1.304.626.965
41	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Gayo Lues	3.094.556.190
42	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Selatan	7.513.012.173
43	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Singkil	10.428.753.925
44	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Bener Meriah	6.488.950.000
45	BRR-Pembinaan dan Perencanaan PDRP NAD	5.338.522.062
	Sub Total Infrastruktur	**830.710.122.157**

www.peraturan.go.id

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER/KEGIATAN
YANG DITEMPATKAN DALAM REKENING KHUSUS TRUST FUND YANG DIKELOLA BRR-NAD-NIAS
TAHUN ANGGARAN 2006
(DALAM RUPIAH)

NO	Kegiatan/Satker	Nilai Trust Fund
II	PERUMAHAN	
1	BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah III	99.673.815.415
2	BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah IV	79.888.221.358
3	BRR-Deputi Perumahan dan Permukiman NAD-Nias	69.784.254.200
4	BRR-Bantuan Perbaikan Rumah NAD	33.523.240.000
5	BRR-Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali NAD	290.222.798.550
6	BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah I	89.952.108.283
7	BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias	249.439.869.246
8	BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah II	113.386.298.720
	Sub Total Perumahan	**1.025.870.605.772**
III	TATA GUNA LAHAN	
1	BRR-Pengelolaan Pertanahan	350.643.068.644
	Sub Total Pengeloaan Pertanahan	**350.643.068.644**
	TOTAL	2.207.223.796.573

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE	PROVINSI *)	DANA BAGI HASIL			DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	TOTAL DANA PERIMBANGAN
		PERPAJAKAN	SDA	JUMLAH			
0100	DKI Jakarta	5.438.541.328.978	1.713.539.484.164	7.152.080.813.142	768.080.000.000		7.920.160.813.142
0200	Jawa Barat	2.579.216.181.263	441.288.617.755	3.020.504.799.018	13.261.842.951.996	685.460.000.000	16.967.807.751.014
0300	Jawa Tengah	1.466.676.233.965	15.540.796.135	1.482.217.030.100	15.850.371.999.992	896.894.765.000	18.229.483.795.092
0400	DI. Yogyakarta	193.034.391.856	982.182.085	194.016.573.941	2.452.463.000.000	126.495.000.000	2.772.974.573.941
0500	Jawa Timur	2.476.222.733.356	152.830.282.310	2.629.053.015.666	16.616.760.000.000	913.630.000.000	20.159.443.015.666
0600	NAD	869.169.923.667	3.530.370.848.007	4.399.540.771.674	5.020.879.999.600	592.800.000.000	10.013.220.771.274
0700	Sumatera Utara	1.224.733.326.138	14.352.345.835	1.239.085.671.973	8.333.576.000.000	645.825.000.000	10.218.486.671.973
0800	Sumatera Barat	399.748.324.899	21.856.003.595	421.604.328.494	5.128.699.999.992	466.475.000.000	6.016.779.328.486
0900	Riau	1.534.382.738.978	10.276.958.801.855	11.811.341.540.833	1.876.834.999.663	161.575.000.000	13.849.751.540.496
1000	Jambi	654.816.622.640	609.645.422.118	1.264.462.044.758	2.799.351.000.000	200.355.000.000	4.264.168.044.758
1100	Sumatera Selatan	1.197.371.697.436	2.224.117.444.131	3.421.489.141.567	4.250.577.999.992	312.135.000.000	7.984.202.141.559
1200	Lampung	381.889.006.329	423.994.818.121	805.883.824.450	4.261.521.000.000	308.343.636.634	5.375.748.461.084
1300	Kalimantan Barat	402.284.626.498	16.316.050.187	418.600.676.685	4.654.627.000.000	352.603.000.000	5.425.830.676.685
1400	Kalimantan Tengah	500.987.659.370	102.478.080.268	603.465.739.638	4.373.822.000.000	378.690.000.000	5.355.977.739.638
1500	Kalimantan Selatan	507.061.765.709	543.636.005.546	1.050.697.771.255	3.360.317.000.000	326.600.000.000	4.737.614.771.255
1600	Kalimantan Timur	1.798.919.622.730	12.369.337.495.763	14.168.257.118.493	2.207.524.999.984	213.100.000.000	16.588.882.118.477
1700	Sulawesi Utara	215.111.882.724	6.656.755.625	221.768.638.349	2.759.309.834.700	314.210.000.000	3.295.288.473.049
1800	Sulawesi Tengah	254.406.724.445	9.424.171.572	263.830.896.017	3.262.726.992.000	286.337.000.000	3.812.894.888.017

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE	PROVINSI *)	DANA BAGI HASIL			DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	TOTAL DANA PERIMBANGAN
		PERPAJAKAN	SDA	JUMLAH			
1900	Sulawesi Selatan	782.675.620.074	95.000.688.788	877.676.308.862	6.586.304.000.000	649.785.000.000	8.113.765.308.862
2000	Sulawesi Tenggara	234.360.523.557	37.035.996.526	271.396.520.083	2.892.750.000.000	321.560.000.000	3.485.706.520.083
2100	Maluku	292.137.248.320	8.012.475.389	300.149.723.709	2.462.447.995.996	250.850.000.000	3.013.447.719.705
2200	Bali	317.507.748.864	24.167.586.302	341.675.335.166	2.854.128.000.000	235.590.000.000	3.431.393.335.166
2300	NTB	237.803.983.642	88.975.399.021	326.779.382.663	2.998.810.999.996	291.010.000.000	3.616.600.382.659
2400	NTT	321.786.336.006	220.075.536.691	541.861.872.697	4.529.410.999.988	492.045.000.000	5.563.317.872.685
2500	Papua	851.056.252.094	872.974.536.551	1.724.030.788.645	7.251.914.999.337	658.655.000.000	9.634.600.787.982
2600	Bengkulu	190.051.145.906	18.954.432.595	209.005.578.501	2.300.957.996.000	292.780.000.000	2.802.743.574.501
2800	Maluku Utara	258.250.622.139	58.056.071.109	316.306.693.248	1.864.169.962.200	283.650.000.000	2.464.126.655.448
2900	Banten	904.052.951.911	27.723.559.448	931.776.511.359	2.704.950.000.000	96.366.000.000	3.733.092.511.359
3000	Bangka Belitung	139.605.491.835	72.576.805.740	212.182.297.575	1.468.389.996.000	178.440.000.000	1.859.012.293.575
3100	Gorontalo	98.436.651.902	546.639.226.096	645.075.877.998	1.406.386.999.800	135.160.000.000	2.186.622.877.798
3200	Kepulauan Riau	543.314.165.416	2.049.922.761.203	2.593.236.926.619	1.032.357.992.000	81.760.000.000	3.707.354.918.619
3300	Irian Jaya Barat	832.288.287.860	77.959.569.526	910.247.857.386	2.746.291.000.000	259.945.000.000	3.916.483.857.386
3400	Sulawesi Barat	129.220.524.172	1.776.182.005	130.996.706.177	1.325.627.000.000	157.010.000.000	1.613.633.706.177
Total		28.227.122.344.679	36.673.176.432.062	64.900.298.776.741	145.664.184.719.236	11.566.134.401.634	222.130.617.897.611

*) Ikhtisar Menurut Provinsi (meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	5.941.182.815.910	5.438.541.328.978	502.641.486.932
0200	Prop. Jawa Barat	621.059.286.545	660.051.512.003	(38.992.225.458)
0205	Kab. Bogor	177.561.942.712	141.775.318.499	35.786.624.213
0206	Kab. Sukabumi	51.431.546.382	43.706.112.157	7.725.434.225
0207	Kab. Cianjur	59.096.029.005	57.557.069.003	1.538.960.002
0208	Kab. Bekasi	286.901.910.568	278.912.678.317	7.989.232.251
0209	Kab. Karawang	143.668.990.986	161.043.842.149	(17.374.851.163)
0210	Kab. Purwakarta	58.108.610.234	51.619.746.720	6.488.863.514
0211	Kab. Subang	71.601.324.231	99.635.904.110	(28.034.579.879)
0212	Kab. Bandung	125.739.529.607	87.510.923.544	38.228.606.063
0213	Kab. Sumedang	31.552.865.547	35.942.315.719	(4.389.450.172)
0214	Kab. Garut	36.712.639.529	45.454.175.005	(8.741.535.476)
0215	Kab. Tasikmalaya	26.960.790.196	35.269.545.687	(8.308.755.491)
0216	Kab. Ciamis	27.289.205.031	33.210.482.439	(5.921.277.408)
0217	Kab. Cirebon	42.206.584.159	48.800.403.049	(6.593.818.890)
0218	Kab. Kuningan	28.606.227.033	36.259.464.664	(7.653.237.631)
0219	Kab. Indramayu	100.038.136.453	126.039.778.898	(26.001.642.445)
0220	Kab. Majalengka	51.472.544.789	60.081.087.799	(8.608.543.010)
0251	Kota Bandung	241.900.848.423	134.069.238.100	107.831.610.323
0252	Kota Bogor	75.546.277.789	68.845.743.342	6.700.534.447
0253	Kota Sukabumi	19.035.085.811	20.813.931.194	(1.778.845.383)
0254	Kota Cirebon	35.242.026.924	33.560.918.332	1.681.108.592
0257	Kota Bekasi	142.159.975.677	136.131.422.239	6.028.553.438
0258	Kota Depok	108.309.757.993	97.608.931.978	10.700.826.015
0260	Kota Tasikmalaya	24.694.765.674	27.816.088.059	(3.121.322.385)
0261	Kota Cimahi	29.505.396.809	36.280.725.088	(6.775.328.279)
0262	Kota Banjar	16.094.321.034	21.225.139.576	(5.130.818.542)
0300	Prop. Jawa Tengah	256.439.433.963	296.783.495.096	(40.344.061.133)
0301	Kab. Semarang	25.220.295.217	30.549.433.814	(5.329.138.597)
0302	Kab. Kendal	22.763.297.564	24.525.962.306	(1.762.664.742)
0303	Kab. Demak	21.332.762.970	26.758.879.656	(5.426.116.686)
0304	Kab. Grobogan	28.044.183.028	41.109.197.939	(13.065.014.911)
0305	Kab. Pekalongan	17.602.731.636	22.850.525.377	(5.247.793.741)
0306	Kab. Batang	19.846.333.171	24.466.337.015	(4.620.003.844)
0307	Kab. Tegal	25.539.888.563	30.616.725.512	(5.076.836.949)
0308	Kab. Brebes	32.985.023.455	43.015.655.069	(10.030.631.614)
0309	Kab. Pati	25.361.595.890	31.718.297.598	(6.356.701.708)
0310	Kab. Kudus	34.993.907.935	45.087.643.784	(10.093.735.849)
0311	Kab. Pemalang	24.487.835.019	31.105.211.936	(6.617.376.917)
0312	Kab. Jepara	30.879.798.406	37.442.769.384	(6.562.970.978)
0313	Kab. Rembang	20.627.496.124	25.765.968.413	(5.138.472.289)
0314	Kab. Blora	35.816.531.896	55.170.907.401	(19.354.375.505)
0315	Kab. Banyumas	34.076.658.117	40.774.964.919	(6.698.306.802)
0316	Kab. Cilacap	47.691.739,710	63.415.447.211	(15.723.707.501)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0317	Kab. Purbalingga	20.518.309.607	25.686.766.666	(5.168.457.059)
0318	Kab. Banjarnegara	21.789.061.140	28.508.725.624	(6.719.664.484)
0319	Kab. Magelang	24.899.071.699	29.306.038.944	(4.406.967.245)
0320	Kab. Temanggung	16.494.856.958	20.778.603.531	(4.283.746.573)
0321	Kab. Wonosobo	20.476.974.323	22.363.817.079	(1.886.842.756)
0322	Kab. Purworejo	21.110.964.693	26.436.731.780	(5.325.767.087)
0323	Kab. Kebumen	23.892.724.964	30.340.660.399	(6.447.935.435)
0324	Kab. Klaten	26.583.806.287	27.946.623.718	(1.362.817.431)
0325	Kab. Boyolali	21.984.853.985	26.281.054.614	(4.296.200.629)
0326	Kab. Sragen	21.541.081.558	25.467.719.425	(3.926.637.867)
0327	Kab. Sukoharjo	27.484.191.654	30.878.647.344	(3.394.455.690)
0328	Kab. Karanganyar	24.820.224.159	25.141.346.833	(321.122.674)
0329	Kab. Wonogiri	21.011.748.896	26.910.360.057	(5.898.611.161)
0351	Kota Semarang	162.302.570.377	146.671.625.019	15.630.945.358
0352	Kota Salatiga	14.587.957.597	14.118.063.411	469.894.186
0353	Kota Pekalongan	17.393.959.623	19.053.279.202	(1.659.319.579)
0354	Kota Tegal	17.142.521.487	17.988.042.991	(845.521.504)
0355	Kota Magelang	12.901.700.742	13.710.404.598	(808.703.856)
0356	Kota Surakarta	44.521.038.689	37.930.300.300	6.590.738.389
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	43.192.799.245	41.104.030.782	2.088.768.463
0401	Kab. Bantul	25.848.263.756	22.268.406.665	3.579.857.091
0402	Kab. Sleman	56.151.822.541	49.815.437.076	6.336.385.465
0403	Kab. Gunungkidul	16.879.653.219	20.829.546.950	(3.949.893.731)
0404	Kab. Kulonprogo	14.988.833.882	18.023.799.478	(3.034.965.596)
0451	Kota Yogyakarta	46.463.227.539	40.993.170.905	5.470.056.634
0500	Prop. Jawa Timur	483.905.134.307	556.486.109.242	(72.580.974.935)
0501	Kab. Gresik	73.206.795.449	49.068.814.534	24.137.980.915
0502	Kab. Mojokerto	33.978.238.508	31.616.876.701	2.361.361.807
0503	Kab. Sidoarjo	142.324.209.195	157.391.918.561	(15.067.709.366)
0504	Kab. Jombang	32.550.044.972	20.557.479.065	11.992.565.907
0505	Kab. Sampang	32.491.178.251	41.108.052.970	(8.616.874.719)
0506	Kab. Pamekasan	25.261.884.380	33.486.351.803	(8.224.467.423)
0507	Kab. Sumenep	77.372.370.997	102.978.469.607	(25.606.098.610)
0508	Kab. Bangkalan	40.486.286.955	55.487.544.065	(15.001.257.110)
0509	Kab. Bondowoso	16.683.980.240	20.349.559.533	(3.665.579.293)
0510	Kab. Situbondo	20.948.220.073	26.101.207.827	(5.152.987.754)
0511	Kab. Banyuwangi	35.446.359.743	42.401.987.610	(6.955.627.867)
0512	Kab. Jember	41.967.097.955	43.789.456.568	(1.822.358.613)
0513	Kab. Malang	45.406.745.645	50.463.273.194	(5.056.527.549)
0514	Kab. Pasuruan	55.487.707.226	56.331.745.427	(844.038.201)
0515	Kab. Probolinggo	31.176.002.161	32.905.996.815	(1.729.994.654)
0516	Kab. Lumajang	20.971.543.799	24.748.264.471	(3.776.720.672)
0517	Kab. Kediri	32.515.733.166	39.841.106.757	(7.325.373.591)
0518	Kab. Tulungagung	27.302.053.086	31.824.816.814	(4.522.763.728)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0519	Kab. Nganjuk	24.180.871.516	29.657.028.791	(5.476.157.275)
0520	Kab. Trenggalek	20.889.170.363	25.695.187.811	(4.806.017.448)
0521	Kab. Blitar	24.626.228.114	30.239.175.308	(5.612.947.194)
0522	Kab. Madiun	21.277.214.518	25.063.185.616	(3.785.971.098)
0523	Kab. Ngawi	21.173.280.042	27.055.668.367	(5.882.388.325)
0524	Kab. Magetan	17.828.307.028	21.912.635.091	(4.084.328.063)
0525	Kab. Ponorogo	26.579.740.626	33.975.733.943	(7.395.993.317)
0526	Kab. Pacitan	17.387.570.708	21.887.515.725	(4.499.945.017)
0527	Kab. Bojonegoro	45.986.213.850	63.742.834.624	(17.756.620.774)
0528	Kab. Tuban	47.695.241.754	63.285.791.708	(15.590.549.954)
0529	Kab. Lamongan	27.735.297.509	43.636.862.441	(15.901.564.932)
0551	Kota Surabaya	483.795.736.248	452.930.425.892	30.865.310.356
0552	Kota Mojokerto	16.239.572.715	55.195.847.851	(38.956.275.136)
0553	Kota Malang	52.118.289.442	43.944.112.734	8.174.176.708
0554	Kota Pasuruan	14.443.544.406	15.865.966.893	(1.422.422.487)
0555	Kota Probolinggo	20.158.628.397	28.891.992.010	(8.733.363.613)
0556	Kota Blitar	14.729.230.974	15.242.320.735	(513.089.761)
0557	Kota Kediri	25.470.527.104	25.897.054.767	(426.527.663)
0558	Kota Madiun	17.231.230.554	17.626.430.489	(395.199.935)
0559	Kota Batu	15.719.980.139	17.537.930.996	(1.817.950.857)
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	246.622.580.567	173.629.453.864	72.993.126.703
0601	Kab. Aceh Besar	12.027.653.047	18.623.590.500	(6.595.937.453)
0602	Kab. Pidie	15.929.057.715	24.167.774.837	(8.238.717.122)
0603	Kab. Aceh Utara	74.134.460.613	147.991.603.082	(73.857.142.469)
0604	Kab. Aceh Timur	44.260.247.330	77.150.245.764	(32.889.998.434)
0605	Kab. Aceh Selatan	13.952.946.382	21.312.433.172	(7.359.486.790)
0606	Kab. Aceh Barat	13.599.698.662	19.339.940.701	(5.740.242.039)
0607	Kab. Aceh Tengah	12.153.002.372	19.134.224.801	(6.981.222.429)
0608	Kab. Aceh Tenggara	11.491.542.001	15.366.348.868	(3.874.806.867)
0609	Kab. Simeuleu	11.814.717.137	13.457.176.695	(1.642.459.558)
0610	Kab. Aceh Singkil	12.911.971.699	19.039.944.419	(6.127.972.720)
0611	Kab. Bireuen	21.610.546.126	34.306.763.470	(12.696.217.344)
0612	Kab. Aceh Barat Daya	10.262.170.702	14.837.790.123	(4.575.619.421)
0613	Kab. Gayo Lues	11.526.200.712	16.926.305.569	(5.400.104.857)
0614	Kab. Aceh Jaya	13.567.981.999	9.984.979.994	3.583.002.005
0615	Kab. Nagan Raya	12.877.807.881	28.720.273.773	(15.842.465.892)
0616	Kab. Aceh Tamiang	38.904.123.939	68.817.993.707	(29.913.869.768)
0617	Kab. Bener Meriah	9.659.527.350	15.150.739.935	(5.491.212.585)
0651	Kota Banda Aceh	23.674.502.475	30.688.596.109	(7.014.093.634)
0652	Kota Sabang	15.574.691.595	21.934.064.826	(6.359.373.231)
0653	Kota Langsa	13.166.382.594	19.944.764.072	(6.778.381.478)
0654	Kota Lhokseumawe	34.490.775.099	58.644.915.386	(24.154.140.287)
0700	Prop. Sumatera Utara	224.082.700.370	243.224.678.482	(19.141.978.112)
0701	Kab. Deli Serdang	80.918.044.008	72.016.206.216	8.901.837.792

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0702	Kab. Tanah Karo	13.700.337.241	15.640.688.472	(1.940.351.231)
0703	Kab. Langkat	84.971.425.002	120.907.931.171	(35.936.506.169)
0704	Kab. Tapanuli Tengah	18.920.590.956	23.583.643.014	(4.663.052.058)
0705	Kab. Simalungun	51.486.409.267	44.683.856.950	6.802.552.317
0706	Kab. Labuhanbatu	65.706.264.782	82.813.935.837	(17.107.671.055)
0707	Kab. Dairi	15.213.700.837	19.817.069.465	(4.603.368.628)
0708	Kab. Tapanuli Utara	15.441.711.036	19.153.221.287	(3.711.510.251)
0709	Kab. Tapanuli Selatan	30.629.531.411	42.062.001.513	(11.432.470.102)
0710	Kab. Asahan	50.217.603.391	55.326.505.842	(5.108.902.451)
0711	Kab. Nias	15.929.335.165	19.534.800.000	(3.605.464.835)
0712	Kab. Toba Samosir	12.073.084.801	18.897.149.491	(6.824.064.690)
0713	Kab. Mandailing Natal	18.328.611.301	23.723.886.284	(5.395.274.983)
0714	Kab. Nias Selatan	13.420.308.003	12.951.191.146	469.116.857
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	12.879.890.074	17.614.108.471	(4.734.218.397)
0716	Kab. Humbang Hasundutan	14.075.936.305	19.707.837.858	(5.631.901.553)
0717	Kab. Samosir	9.371.168.884	12.267.289.363	(2.896.120.479)
0718	Kab. Serdang Bedagai	28.561.547.110	34.667.316.376	(6.105.769.266)
0751	Kota Medan	234.963.228.337	198.575.931.611	36.387.296.726
0752	Kota Tebingtinggi	15.479.141.411	16.932.493.902	(1.453.352.491)
0753	Kota Binjai	28.464.533.064	38.635.715.590	(10.171.182.526)
0754	Kota Pematangsiantar	18.459.278.024	19.301.398.214	(842.120.190)
0755	Kota Tanjungbalai	13.191.493.434	14.444.279.749	(1.252.786.315)
0756	Kota Sibolga	14.426.766.652	17.060.372.871	(2.633.606.219)
0757	Kota Padang Sidempuan	18.201.362.268	21.189.816.963	(2.988.454.695)
0800	Prop. Sumatera Barat	58.390.223.793	72.073.114.672	(13.682.890.879)
0801	Kab. Agam	16.009.423.057	18.677.659.965	(2.668.236.908)
0802	Kab. Pasaman	13.833.075.029	17.273.998.512	(3.440.923.483)
0803	Kab. Limapuluh Kota	16.308.681.144	17.037.454.363	(728.773.219)
0804	Kab. Solok	14.309.620.522	17.995.532.190	(3.685.911.668)
0805	Kab. Padang Pariaman	12.757.575.192	15.782.282.459	(3.024.707.267)
0806	Kab. Pesisir Selatan	15.668.968.731	22.777.196.458	(7.108.227.727)
0807	Kab. Tanah Datar	12.682.330.904	15.865.542.154	(3.183.211.250)
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	11.892.948.650	15.427.996.644	(3.535.047.994)
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	14.080.819.788	17.181.506.586	(3.100.686.798)
0810	Kab. Dharmasraya	13.978.858.469	13.767.644.271	211.214.198
0811	Kab. Solok Selatan	13.696.368.706	16.111.039.007	(2.414.670.301)
0812	Kab. Pasaman Barat	18.415.863.886	20.157.469.990	(1.741.606.104)
0851	Kota Bukittinggi	12.274.492.978	12.428.682.908	(154.189.930)
0852	Kota Padang Panjang	11.051.201.305	13.317.241.929	(2.266.040.624)
0853	Kota Solok	10.518.388.951	12.875.979.297	(2.357.590.346)
0854	Kota Sawahlunto	11.654.134.573	12.535.077.571	(880.942.998)
0855	Kota Padang	42.716.607.480	39.303.900.703	3.412.706.777
0856	Kota Payakumbuh	11.401.948.766	14.771.323.916	(3.369.375.150)
0857	Kota Pariaman	9.914.426.653	14.387.681.304	(4.473.254.651)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0900	Prop. Riau	256.568.270.814	329.241.852.678	(72.673.581.864)
0901	Kab. Kampar	92.307.386.520	114.023.855.393	(21.716.468.873)
0902	Kab. Bengkalis	190.078.970.747	214.497.738.968	(24.418.768.221)
0904	Kab. Indragiri Hulu	56.628.979.757	74.036.096.827	(17.407.117.070)
0905	Kab. Indragiri Hilir	43.726.963.589	49.520.384.634	(5.793.421.045)
0906	Kab. Pelalawan	78.986.938.684	102.838.173.764	(23.851.235.080)
0907	Kab. Rokan Hulu	78.632.426.881	100.199.893.518	(21.567.466.637)
0908	Kab. Rokan Hilir	104.701.832.887	159.130.970.124	(54.429.137.237)
0909	Kab. Siak	117.033.221.433	161.937.629.914	(44.904.408.481)
0912	Kab. Kuantan Singingi	26.938.898.303	33.021.967.561	(6.083.069.258)
0951	Kota Pekanbaru	73.035.546.617	77.696.330.166	(4.660.783.549)
0953	Kota Dumai	51.746.973.271	118.237.845.431	(66.490.872.160)
1000	Prop. Jambi	100.747.932.409	128.734.470.996	(27.986.538.587)
1001	Kab. Batanghari	67.745.864.183	84.746.307.720	(17.000.443.537)
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	59.098.143.625	54.190.235.711	4.907.907.914
1003	Kab. Bungo	20.732.641.949	24.311.618.661	(3.578.976.712)
1004	Kab. Sarolangun	37.985.622.152	55.674.639.838	(17.689.017.686)
1005	Kab. Kerinci	15.748.385.385	18.981.164.391	(3.232.779.006)
1006	Kab. Merangin	26.998.987.279	34.688.115.502	(7.689.128.223)
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	64.376.796.453	101.653.738.049	(37.276.941.596)
1008	Kab. Tebo	19.878.319.609	26.324.027.653	(6.445.708.044)
1009	Kab. Muaro Jambi	65.615.856.335	69.174.463.996	(3.558.607.661)
1051	Kota Jambi	45.036.953.006	56.337.840.123	(11.300.887.117)
1100	Prop. Sumatera Selatan	204.881.860.500	246.141.203.565	(41.259.343.065)
1103	Kab. Musi Banyu Asin	154.549.784.717	173.122.359.829	(18.572.575.112)
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	48.401.025.572	64.269.183.344	(15.868.157.772)
1105	Kab. Muara Enim	72.489.571.124	91.923.330.397	(19.433.759.273)
1106	Kab. Lahat	68.094.233.472	88.587.864.088	(20.493.630.616)
1107	Kab. Musi Rawas	75.147.165.842	103.169.784.655	(28.022.618.813)
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	34.286.848.148	40.934.569.359	(6.647.721.211)
1109	Kab. Banyu Asin	76.659.216.376	97.266.700.564	(20.607.484.188)
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	13.527.399.850	20.160.669.226	(6.633.269.376)
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	12.288.439.676	18.514.439.568	(6.225.999.892)
1112	Kab. Ogan Ilir	46.130.115.767	55.585.775.948	(9.455.660.181)
1151	Kota Palembang	92.829.686.802	88.828.937.996	4.000.748.806
1153	Kota Prabumulih	42.659.367.411	56.777.207.231	(14.117.839.820)
1154	Kota Pagar Alam	19.714.527.948	22.542.014.952	(2.827.487.004)
1155	Kota Lubuk Linggau	22.462.306.615	29.547.656.714	(7.085.350.099)
1200	Prop. Lampung	69.286.525.945	78.236.512.375	(8.949.986.430)
1201	Kab. Lampung Selatan	31.225.493.383	38.772.358.289	(7.546.864.906)
1202	Kab. Lampung Tengah	33.461.603.863	34.406.299.289	(944.695.426)
1203	Kab. Lampung Utara	22.535.022.343	29.652.732.013	(7.117.709.670)
1204	Kab. Lampung Barat	19.036.678.561	7.700.644.079	11.336.034.482
1205	Kab. Tulang Bawang	31.251.376.931	36.694.780.418	(5.443.403.487)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1206	Kab. Tanggamus	21.294.646.725	27.199.615.662	(5.904.968.937)
1207	Kab. Lampung Timur	32.113.778.858	44.193.903.571	(12.080.124.713)
1208	Kab. Way Kanan	22.014.683.892	25.312.134.631	(3.297.450.739)
1251	Kota Bandar Lampung	41.657.344.680	45.921.367.967	(4.264.023.287)
1252	Kota Metro	15.024.854.681	13.798.658.035	1.226.196.646
1300	Prop. Kalimantan Barat	59.345.399.158	77.449.847.043	(18.104.447.885)
1301	Kab. Sambas	20.263.870.472	25.039.900.731	(4.776.030.259)
1302	Kab. Sanggau	23.484.728.055	29.565.846.134	(6.081.118.079)
1303	Kab. Sintang	20.273.497.265	27.694.612.857	(7.421.115.592)
1304	Kab. Pontianak	22.526.218.208	29.888.917.085	(7.362.698.877)
1305	Kab. Kapuas Hulu	28.195.381.446	34.800.305.090	(6.604.923.644)
1306	Kab. Ketapang	31.371.444.840	42.719.078.475	(11.347.633.635)
1307	Kab. Bengkayang	14.310.109.387	18.133.372.301	(3.823.262.914)
1308	Kab. Landak	18.607.225.527	26.258.803.040	(7.651.577.513)
1309	Kab. Melawi	15.229.937.766	18.478.882.150	(3.248.944.384)
1310	Kab. Sekadau	14.388.234.091	19.039.215.528	(4.650.981.437)
1351	Kota Pontianak	41.385.932.169	35.436.441.388	5.949.490.781
1352	Kota Singkawang	15.343.630.121	17.779.404.676	(2.435.774.555)
1400	Prop. Kalimantan Tengah	63.421.922.005	94.558.784.728	(31.136.862.723)
1401	Kab. Kapuas	20.341.548.980	29.747.811.251	(9.406.262.271)
1402	Kab. Barito Utara	28.352.958.043	38.569.348.336	(10.216.390.293)
1403	Kab. Barito Selatan	34.376.569.325	47.828.240.268	(13.451.670.943)
1404	Kab. Kotawaringin Timur	24.015.667.160	28.814.619.947	(4.798.952.787)
1405	Kab. Kotawaringin Barat	18.052.155.473	21.177.863.908	(3.125.708.435)
1406	Kab. Katingan	16.066.869.503	22.004.469.508	(5.937.600.005)
1407	Kab. Seruyan	28.191.285.215	34.358.673.931	(6.167.388.716)
1408	Kab. Sukamara	20.227.982.866	24.195.434.669	(3.967.451.803)
1409	Kab. Lamandau	22.566.374.442	28.135.161.747	(5.568.787.305)
1410	Kab. Gunung Mas	15.880.824.815	23.018.401.029	(7.137.576.214)
1411	Kab. Pulang Pisau	13.092.816.937	17.904.170.758	(4.811.353.821)
1412	Kab. Murung Raya	26.910.652.235	37.057.679.049	(10.147.026.814)
1413	Kab. Barito Timur	29.963.129.197	37.520.101.382	(7.556.972.185)
1451	Kota Palangkaraya	14.104.261.302	16.096.898.859	(1.992.637.557)
1500	Prop. Kalimantan Selatan	80.543.407.224	100.195.875.954	(19.652.468.730)
1501	Kab. Banjar	24.937.585.794	28.378.083.619	(3.440.497.825)
1502	Kab. Tanah Laut	22.925.163.333	27.771.210.802	(4.846.047.469)
1503	Kab. Tapin	18.753.759.518	22.115.375.823	(3.361.616.305)
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	18.462.688.262	21.658.988.671	(3.196.300.409)
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	17.604.561.633	24.369.280.629	(6.764.718.996)
1506	Kab. Barito Kuala	16.743.848.836	20.583.386.297	(3.839.537.461)
1507	Kab. Tabalong	63.552.898.504	80.644.045.890	(17.091.147.386)
1508	Kab. Kotabaru	27.587.934.482	33.159.239.920	(5.571.305.438)
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	27.997.050.065	33.267.572.599	(5.270.522.534)
1510	Kab. Tanah Bumbu	19.799.465.512	21.459.351.081	(1.659.885.569)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1511	Kab. Balangan	30.795.216.910	38.466.569.616	(7.671.352.706)
1551	Kota Banjarmasin	35.289.798.666	34.985.504.756	304.293.910
1552	Kota Banjar Baru	17.973.663.997	20.007.280.052	(2.033.616.055)
1600	Prop. Kalimantan Timur	328.000.598.564	395.123.928.416	(67.123.329.852)
1601	Kab. Kutai	260.806.903.890	327.883.715.261	(67.076.811.371)
1602	Kab. Pasir	38.271.009.909	44.866.195.744	(6.595.185.835)
1603	Kab. Bulungan	60.946.446.800	93.229.473.856	(32.283.027.056)
1604	Kab. Berau	31.718.781.164	34.718.727.886	(2.999.946.722)
1605	Kab. Nunukan	60.342.925.770	96.559.502.119	(36.216.576.349)
1606	Kab. Malinau	41.297.121.759	49.579.007.908	(8.281.886.149)
1607	Kab. Kutai Barat	50.588.917.227	42.198.475.999	8.390.441.228
1608	Kab. Kutai Timur	101.722.254.219	119.153.517.174	(17.431.262.955)
1609	Kab. Penajem Paser Utara	71.231.716.322	100.008.188.413	(28.776.472.091)
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	79.979.488.214	112.320.919.519	(32.341.431.305)
1652	Kota Balikpapan	152.065.002.625	160.455.431.138	(8.390.428.513)
1653	Kota Tarakan	79.693.747.927	123.214.452.760	(43.520.704.833)
1654	Kota Bontang	97.343.374.122	99.608.086.537	(2.264.712.415)
1700	Prop. Sulawesi Utara	31.166.934.583	42.191.809.035	(11.024.874.452)
1702	Kab. Minahasa	15.387.041.721	21.363.345.334	(5.976.303.613)
1703	Kab. Bolaang Mongondow	18.645.154.422	23.248.968.150	(4.603.813.728)
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	11.289.309.483	14.801.055.476	(3.511.745.993)
1705	Kab. Talaud Kepulauan	11.940.058.735	17.392.293.684	(5.452.234.949)
1706	Kab. Minahasa Selatan	13.232.837.948	13.610.171.155	(377.333.207)
1707	Kota Tomohon	12.217.519.792	15.771.669.209	(3.554.149.417)
1708	Kab. Minahasa Utara	11.392.838.899	15.564.150.413	(4.171.311.514)
1751	Kota Manado	31.920.183.586	30.981.962.491	938.221.095
1753	Kota Bitung	13.846.992.783	20.186.457.777	(6.339.464.994)
1800	Prop. Sulawesi Tengah	32.299.252.985	44.964.885.743	(12.665.632.758)
1801	Kab. Poso	15.824.700.954	22.195.185.681	(6.370.484.727)
1802	Kab. Donggala	15.823.580.096	17.512.688.408	(1.689.108.312)
1803	Kab. Toli-toli	12.645.040.206	16.615.623.446	(3.970.583.240)
1804	Kab. Banggai	16.563.935.119	22.136.180.325	(5.572.245.206)
1805	Kab. Buol	13.947.063.933	17.476.775.524	(3.529.711.591)
1806	Kab. Morowali	26.771.701.294	37.107.734.451	(10.336.033.157)
1807	Kab. Banggai Kepulauan	12.713.369.544	18.439.504.744	(5.726.135.200)
1808	Kab. Parigi Moutong	14.741.715.403	23.068.403.265	(8.326.687.862)
1809	Kab. Tojo Una-Una	11.847.922.181	17.684.048.457	(5.836.126.276)
1851	Kota Palu	18.063.005.029	17.205.694.401	857.310.628
1900	Prop. Sulawesi Selatan	129.575.761.153	151.519.681.268	(21.943.920.115)
1901	Kab. Pinrang	18.218.928.506	21.337.779.353	(3.118.850.847)
1902	Kab. Gowa	21.603.915.379	24.553.672.888	(2.949.757.509)
1903	Kab. Wajo	49.025.157.271	61.285.607.453	(12.260.450.182)
1905	Kab. Bone	28.891.297.465	35.393.818.298	(6.502.520.833)
1906	Kab. Tana Toraja	17.040.863.449	22.266.886.886	(5.226.023.437)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1907	Kab. Maros	19.559.515.475	19.883.460.559	(323.945.084)
1909	Kab. Luwu	14.432.523.950	20.562.904.481	(6.130.380.531)
1910	Kab. Sinjai	16.645.825.757	18.653.532.146	(2.007.706.389)
1911	Kab. Bulukumba	19.276.987.608	23.824.660.942	(4.547.673.334)
1912	Kab. Bantaeng	16.281.003.265	21.644.319.466	(5.363.316.201)
1913	Kab. Jeneponto	18.479.363.688	24.474.779.072	(5.995.415.384)
1914	Kab. Selayar	17.185.088.948	22.713.499.323	(5.528.410.375)
1915	Kab. Takalar	16.524.802.848	16.337.675.676	187.127.172
1916	Kab. Barru	15.711.519.744	18.026.482.425	(2.314.962.681)
1917	Kab. Sidenreng Rappang	26.357.983.913	31.778.340.008	(5.420.356.095)
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	17.944.562.824	21.352.029.121	(3.407.466.297)
1919	Kab. Soppeng	17.850.656.677	20.781.188.496	(2.930.531.819)
1921	Kab. Enrekang	20.122.262.442	29.120.813.179	(8.998.550.737)
1922	Kab. Luwu Utara	19.562.905.973	25.529.650.061	(5.966.744.088)
1924	Kab. Luwu Timur	23.155.696.665	26.862.550.097	(3.706.853.432)
1951	Kota Makassar	100.605.943.943	86.833.458.714	13.772.485.229
1952	Kota Pare-pare	16.373.717.669	18.077.562.217	(1.703.844.548)
1953	Kota Palopo	15.879.909.257	19.861.267.945	(3.981.358.688)
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	28.612.567.403	39.740.708.909	(11.128.141.506)
2001	Kab. Kendari/Konawe	18.541.723.160	24.152.563.042	(5.610.839.882)
2002	Kab. Buton	11.676.984.219	16.117.679.559	(4.440.695.340)
2003	Kab. Muna	16.383.026.287	19.976.311.273	(3.593.284.986)
2004	Kab. Kolaka	19.895.112.793	26.709.200.203	(6.814.087.410)
2005	Kab. Konawe Selatan	13.794.357.565	19.839.943.910	(6.045.586.345)
2006	Kab. Wakatobi	11.108.481.964	15.914.530.598	(4.806.048.634)
2007	Kab. Bombana	11.266.855.821	16.792.911.170	(5.526.055.349)
2008	Kab. Kolaka Utara	10.627.563.656	14.178.491.463	(3.550.927.807)
2051	Kota Kendari	20.561.723.604	21.321.198.451	(759.474.847)
2052	Kota Bau-Bau	14.284.482.284	19.616.984.979	(5.332.502.695)
2100	Prop. Maluku	34.176.491.541	52.791.092.239	(18.614.600.698)
2101	Kab. Maluku Tengah	29.997.302.299	63.888.487.577	(33.891.185.278)
2102	Kab. Maluku Tenggara	23.349.103.362	41.046.333.764	(17.697.230.402)
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	21.270.204.676	29.256.814.014	(7.986.609.338)
2104	Kab. Pulau Buru	18.340.547.271	24.504.169.372	(6.163.622.101)
2105	Kab. Aru Kepulauan	10.363.244.549	4.438.842.673	5.924.401.876
2106	Kab. Seram Bagian Barat	14.249.494.960	13.920.956.982	328.537.978
2107	Kab. Seram Bagian Timur	35.047.990.137	40.578.649.283	(5.530.659.146)
2151	Kota Ambon	18.118.189.873	21.711.902.416	(3.593.712.543)
2200	Prop. Bali	66.764.099.387	66.022.735.208	741.364.179
2201	Kab. Buleleng	17.515.825.594	17.986.651.080	(470.825.486)
2202	Kab. Jembrana	13.177.242.133	14.918.330.375	(1.741.088.242)
2203	Kab. Klungkung	11.570.676.538	13.175.809.122	(1.605.132.584)
2204	Kab. Gianyar	17.792.017.321	19.859.198.127	(2.067,180.806)
2205	Kab. Karangasem	13.464.052.108	16.681.852.036	(3.217.799.928)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2206	Kab. Bangli	11.992.261.954	14.591.480.665	(2.599.218.711)
2207	Kab. Badung	70.939.566.816	68.612.552.416	2.327.014.400
2208	Kab. Tabanan	17.223.988.015	16.927.752.710	296.235.305
2251	Kota Denpasar	71.925.760.241	68.731.387.125	3.194.373.116
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	40.803.298.843	49.178.372.046	(8.375.073.203)
2301	Kab. Lombok Barat	19.187.732.671	10.751.397.049	8.436.335.622
2302	Kab. Lombok Tengah	16.951.605.351	9.534.211.070	7.417.394.281
2303	Kab. Lombok Timur	18.505.423.831	23.814.534.769	(5.309.110.938)
2304	Kab. Bima	12.298.014.459	15.771.825.620	(3.473.811.161)
2305	Kab. Sumbawa	16.880.654.668	21.102.678.960	(4.222.024.292)
2306	Kab. Dompu	13.338.690.576	14.435.338.262	(1.096.647.686)
2307	Kab. Sumbawa Barat	19.642.217.702	23.914.416.823	(4.272.199.121)
2351	Kota Mataram	25.832.534.365	51.023.588.846	(25.191.054.481)
2352	Kota Bima	11.555.130.809	18.277.620.197	(6.722.489.388)
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	37.683.701.975	55.857.862.532	(18.174.160.557)
2401	Kab. Kupang	11.626.885.165	15.427.494.788	(3.800.609.623)
2402	Kab. Belu	13.438.065.559	14.447.458.993	(1.009.393.434)
2403	Kab. Timor Tengah Utara	12.603.041.987	15.956.274.092	(3.353.232.105)
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	14.234.725.169	19.479.087.799	(5.244.362.630)
2405	Kab. Alor	12.541.939.909	15.456.391.835	(2.914.451.926)
2406	Kab. Sikka	11.816.054.978	14.866.167.043	(3.050.112.065)
2407	Kab. Flores Timur	14.709.590.795	21.557.603.204	(6.848.012.409)
2408	Kab. Ende	12.713.895.048	13.806.771.431	(1.092.876.383)
2409	Kab. Ngada	13.189.479.876	16.251.080.083	(3.061.600.207)
2410	Kab. Manggarai	13.617.741.878	19.461.597.290	(5.843.855.412)
2411	Kab. Sumba Timur	13.834.078.860	17.885.441.931	(4.051.363.071)
2412	Kab. Sumba Barat	15.446.061.321	19.046.978.764	(3.600.917.443)
2413	Kab. Lembata	11.457.560.309	12.486.764.112	(1.029.203.803)
2414	Kab. Rote Ndao	10.042.857.721	17.240.580.283	(7.197.722.562)
2415	Kab. Manggarai Barat	10.913.169.138	14.172.626.589	(3.259.457.451)
2451	Kota Kupang	17.314.595.319	18.390.590.945	(1.075.995.626)
2500	Prop. Papua	116.570.362.045	211.785.499.533	(95.215.137.488)
2501	Kab. Jayapura	23.793.592.087	33.496.632.710	(9.703.040.623)
2502	Kab. Biak Numfor	15.601.524.701	21.908.804.434	(6.307.279.733)
2504	Kab. Yapen Waropen	18.252.831.828	50.076.432.787	(31.823.600.959)
2507	Kab. Merauke	32.088.062.464	56.368.073.886	(24.280.011.422)
2508	Kab. Jayawijaya	28.636.331.464	31.322.453.008	(2.686.121.544)
2509	Kab. Paniai	29.791.155.692	41.360.358.719	(11.569.203.027)
2510	Kab. Nabire	24.561.660.199	30.778.030.580	(6.216.370.381)
2511	Kab. Puncak Jaya	20.598.110.762	35.720.921.786	(15.122.811.024)
2512	Kab. Mimika	75.254.421.559	89.225.731.355	(13.971.309.796)
2513	Kab. Mappi	21.304.812.329	26.978.765.337	(5.673.953.008)
2514	Kab. Asmat	21.467.893.835	24.837.696.748	(3.369.802.913)
2515	Kab. Boven Digoel	25.760.432.648	31.467.757.591	(5.707.324.943)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - PAJAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2516	Kab. Sarmi	23.237.012.758	30.574.641.575	(7.337.628.817)
2517	Kab. Keerom	16.761.193.883	26.633.441.909	(9.872.248.026)
2518	Kab. Tolikara	17.073.743.437	7.763.156.894	9.310.586.543
2519	Kab. Pegunungan Bintang	22.129.823.883	32.941.251.132	(10.811.427.249)
2523	Kab. Waropen	23.141.802.072	13.302.722.363	9.839.079.709
2524	Kab. Yahukimo	18.743.874.240	8.579.948.644	10.163.925.596
2525	Kab. Supiori	11.172.989.044	15.695.116.594	(4.522.127.550)
2551	Kota Jayapura	24.747.099.942	30.239.247.771	(5.492.147.829)
2600	Prop. Bengkulu	23.133.812.874	32.145.710.426	(9.011.897.552)
2601	Kab. Bengkulu Utara	15.765.623.743	19.235.420.612	(3.469.796.869)
2602	Kab. Bengkulu Selatan	10.423.839.011	17.982.649.327	(7.558.810.316)
2603	Kab. Rejang Lebong	12.563.770.872	27.881.234.945	(15.317.464.073)
2604	Kab. Seluma	11.889.807.484	14.399.113.653	(2.509.306.169)
2605	Kab. Kaur	11.854.215.885	15.007.618.816	(3.153.402.931)
2606	Kab. Muko-Muko	13.337.152.999	18.709.341.033	(5.372.188.034)
2607	Kab. Lebong	14.902.216.608	15.142.680.024	(240.463.416)
2608	Kab. Kepahiang	10.734.362.703	11.351.123.187	(616.760.484)
2651	Kota Bengkulu	17.943.538.453	18.196.253.883	(252.715.430)
2800	Prop. Maluku Utara	29.804.853.329	44.508.362.133	(14.703.508.804)
2801	Kab. Halmahera Barat	18.248.108.428	14.559.547.009	3.688.561.419
2802	Kab. Halmahera Tengah	20.670.151.855	27.316.519.172	(6.646.367.317)
2803	Kab. Halmahera Utara	16.784.148.572	24.148.079.161	(7.363.930.589)
2804	Kab. Halmahera Selatan	19.171.696.917	26.865.759.721	(7.694.062.804)
2805	Kab. Kepulauan Sula	15.478.670.200	36.004.793.820	(20.526.123.620)
2806	Kab. Halmahera Timur	19.146.447.049	27.510.674.097	(8.364.227.048)
2851	Kota Ternate	28.535.904.004	35.796.197.361	(7.260.293.357)
2852	Kota Tidore Kepulauan	13.727.316.121	21.540.689.665	(7.813.373.544)
2900	Prop. Banten	237.304.122.710	226.608.445.915	10.695.676.795
2901	Kab. Serang	77.584.579.895	61.549.016.468	16.035.563.427
2902	Kab. Pandeglang	27.331.714.402	30.670.480.969	(3.338.766.567)
2903	Kab. Lebak	32.416.712.783	34.760.963.432	(2.344.250.649)
2904	Kab. Tangerang	323.064.081.656	287.335.522.837	35.728.558.819
2951	Kota Tangerang	214.426.591.642	194.764.747.684	19.661.843.958
2952	Kota Cilegon	64.405.172.287	68.363.774.606	(3.958.602.319)
3000	Prop. Bangka Belitung	23.081.327.296	25.502.856.898	(2.421.529.602)
3001	Kab. Belitung	16.282.167.478	16.440.148.751	(157.981.273)
3002	Kab. Bangka	16.224.159.253	19.569.122.731	(3.344.963.478)
3003	Kab. Bangka Barat	14.233.112.819	14.870.576.126	(637.463.307)
3004	Kab. Bangka Tengah	13.264.131.270	13.934.164.469	(670.033.199)
3005	Kab. Bangka Selatan	12.303.805.155	14.438.928.240	(2.135.123.085)
3006	Kab. Belitung Timur	11.836.831.343	14.806.860.165	(2.970.028.822)
3051	Kota Pangkalpinang	20.510.069.702	20.042.834.455	467.235.247
3100	Prop. Gorontalo	11.033.272.534	15.146.724.315	(4.113.451.781)
3101	Kab. Gorontalo	15.207.807.922	17.683.311.463	(2.475.503.541)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3102	Kab. Boalemo	13.662.014.874	18.194.493.297	(4.532.478.423)
3103	Kab. Pohuwato	13.392.181.742	17.341.069.030	(3.948.887.288)
3104	Kab. Bone Bolango	12.896.235.680	15.910.551.889	(3.014.316.209)
3151	Kota Gorontalo	13.243.342.840	14.160.501.908	(917.159.068)
3200	Prop. Kepulauan Riau	99.060.428.855	122.708.694.929	(23.648.266.074)
3201	Kab. Riau Kepulauan	37.870.205.386	42.833.593.490	(4.963.388.104)
3202	Kab. Karimun	25.367.588.702	30.576.535.904	(5.208.947.202)
3203	Kab. Natuna	91.896.749.638	147.545.750.881	(55.649.001.243)
3204	Kab. Lingga	17.663.800.037	25.223.590.842	(7.559.790.805)
3251	Kota Batam	128.568.297.704	140.829.614.973	(12.261.317.269)
3252	Kota Tanjung Pinang	28.670.109.883	33.596.384.397	(4.926.274.514)
3300	Prop. Irian Jaya Barat	107.620.753.019	158.333.879.438	(50.713.126.419)
3301	Kab. Manokwari	71.299.048.643	188.326.058.006	(117.027.009.363)
3302	Kab. Sorong	84.850.632.871	143.010.339.859	(58.159.706.988)
3303	Kab. Fak-Fak	30.182.438.900	39.117.827.980	(8.935.389.080)
3304	Kab. Sorong Selatan	53.855.280.711	72.087.437.426	(18.232.156.715)
3305	Kab. Raja Ampat	35.526.614.792	60.996.798.234	(25.470.183.442)
3306	Kab. Teluk Bintuni	91.073.130.965	59.661.686.936	31.411.444.029
3307	Kab. Teluk Wondama	21.796.023.894	16.650.266.441	5.145.757.453
3308	Kab. Kaimana	32.176.850.807	38.049.750.551	(5.872.899.744)
3351	Kota Sorong	42.919.077.321	56.054.242.989	(13.135.165.668)
3400	Prop. Sulawesi Barat	14.364.849.628	20.022.903.261	(5.658.053.633)
3401	Kab. Majene	17.522.832.759	23.016.241.086	(5.493.408.327)
3402	Kab. Mamuju	18.929.143.081	23.684.309.589	(4.755.166.508)
3403	Kab. Mamuju Utara	17.033.220.706	24.171.482.478	(7.138.261.772)
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	16.781.477.232	20.527.436.225	(3.745.958.993)
3405	Kab. Mamasa	11.700.525.248	17.798.151.533	(6.097.626.285)
	Total	25.386.675.529.401	28.227.133.530.056	(2.840.458.000.655)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	3.072.665.317.903	3.072.665.317.903	-
0200	Prop. Jawa Barat	237.379.835.645	237.379.835.645	-
0205	Kab. Bogor	23.268.108.089	23.261.791.682	6.316.407
0206	Kab. Sukabumi	5.762.142.583	5.762.142.583	-
0207	Kab. Cianjur	5.493.763.998	5.493.763.998	-
0208	Kab. Bekasi	82.502.794.908	82.502.794.908	-
0209	Kab. Karawang	25.593.574.003	25.593.574.003	-
0210	Kab. Purwakarta	11.688.591.691	11.688.591.691	-
0211	Kab. Subang	6.054.872.168	6.054.872.168	-
0212	Kab. Bandung	11.148.105.552	11.148.105.552	-
0213	Kab. Sumedang	5.834.065.349	5.834.065.349	-
0214	Kab. Garut	5.608.003.624	5.608.003.624	-
0215	Kab. Tasikmalaya	4.995.568.576	4.995.568.576	-
0216	Kab. Ciamis	5.477.028.632	5.477.028.632	-
0217	Kab. Cirebon	7.808.018.944	7.808.018.944	-
0218	Kab. Kuningan	5.366.280.590	5.366.280.590	-
0219	Kab. Indramayu	11.209.703.326	11.209.703.326	-
0220	Kab. Majalengka	5.309.305.644	5.309.305.644	-
0251	Kota Bandung	50.540.673.712	50.540.673.712	-
0252	Kota Bogor	11.794.463.646	11.794.463.646	-
0253	Kota Sukabumi	6.085.838.220	6.085.838.220	-
0254	Kota Cirebon	8.844.715.405	8.844.715.403	2
0257	Kota Bekasi	22.471.016.009	22.471.015.534	475
0258	Kota Depok	15.319.480.770	15.319.480.770	-
0260	Kota Tasikmalaya	7.239.223.849	7.239.223.849	-
0261	Kota Cimahi	5.999.760.626	5.999.760.626	-
0262	Kota Banjar	4.654.653.550	4.654.653.550	-
0300	Prop. Jawa Tengah	85.847.996.005	85.847.996.005	-
0301	Kab. Semarang	2.911.016.410	2.911.016.410	-
0302	Kab. Kendal	2.316.360.381	2.316.360.381	-
0303	Kab. Demak	2.199.460.547	2.199.460.547	-
0304	Kab. Grobogan	2.579.827.569	2.579.827.569	-
0305	Kab. Pekalongan	1.324.085.077	1.324.085.077	-
0306	Kab. Batang	1.982.545.769	1.982.545.769	-
0307	Kab. Tegal	2.070.885.999	2.070.885.999	-
0308	Kab. Brebes	1.918.683.743	1.918.683.743	-
0309	Kab. Pati	2.584.384.995	2.584.384.995	-
0310	Kab. Kudus	10.642.545.541	10.642.545.284	257
0311	Kab. Pemalang	2.258.718.747	2.258.718.747	-
0312	Kab. Jepara	7.413.381.936	7.413.381.936	-
0313	Kab. Rembang	1.539.889.543	1.231.213.873	308.675.670
0314	Kab. Blora	2.998.525.145	2.998.525.138	7
0315	Kab. Banyumas	4.095.544.711	4.095.544.711	-
0316	Kab. Cilacap	9.269.263.979	9.269.263.977	2
0317	Kab. Purbalingga	1.824.883.900	1.824.883.900	-
0318	Kab. Banjarnegara	1.901.253.779	1.901.253.779	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0319	Kab. Magelang	2.483.452.352	1.987.553.628	495.898.724
0320	Kab. Temanggung	1.975.656.599	1.975.656.599	-
0321	Kab. Wonosobo	1.854.211.792	1.854.211.792	-
0322	Kab. Purworejo	1.940.622.849	1.940.622.849	-
0323	Kab. Kebumen	2.268.689.170	2.268.689.170	-
0324	Kab. Klaten	2.942.820.517	2.942.820.517	-
0325	Kab. Boyolali	1.946.820.671	1.946.820.671	-
0326	Kab. Sragen	2.240.037.152	2.240.037.152	-
0327	Kab. Sukoharjo	2.905.144.542	2.905.144.542	-
0328	Kab. Karanganyar	2.303.934.912	2.303.934.912	-
0329	Kab. Wonogiri	1.795.805.209	1.795.805.000	209
0351	Kota Semarang	25.054.215.226	25.054.215.226	-
0352	Kota Salatiga	2.505.922.494	2.505.922.494	-
0353	Kota Pekalongan	2.892.092.834	2.892.092.834	-
0354	Kota Tegal	2.646.815.598	2.646.815.598	-
0355	Kota Magelang	2.475.950.498	2.475.950.498	-
0356	Kota Surakarta	6.708.543.826	6.708.543.826	-
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	15.376.997.865	15.376.997.865	-
0401	Kab. Bantul	2.833.142.429	2.833.142.429	-
0402	Kab. Sleman	8.439.079.998	8.439.079.998	-
0403	Kab. Gunungkidul	1.996.639.242	1.996.639.242	-
0404	Kab. Kulonprogo	2.058.033.978	2.058.033.978	-
0451	Kota Yogyakarta	7.738.601.152	7.738.601.152	-
0500	Prop. Jawa Timur	156.857.433.347	156.857.433.347	-
0501	Kab. Gresik	15.274.529.250	15.274.529.250	-
0502	Kab. Mojokerto	4.799.216.045	4.799.216.045	-
0503	Kab. Sidoarjo	18.135.238.829	18.135.238.829	-
0504	Kab. Jombang	3.450.951.128	3.450.951.128	-
0505	Kab. Sampang	2.248.701.976	2.248.701.976	-
0506	Kab. Pamekasan	3.348.672.237	3.348.672.237	-
0507	Kab. Sumenep	2.330.954.078	2.330.954.078	-
0508	Kab. Bangkalan	2.252.547.003	2.252.547.003	-
0509	Kab. Bondowoso	2.431.908.025	2.431.908.025	-
0510	Kab. Situbondo	2.567.100.794	2.567.100.794	-
0511	Kab. Banyuwangi	3.413.030.128	3.413.030.128	-
0512	Kab. Jember	4.529.689.612	4.529.689.612	-
0513	Kab. Malang	6.057.548.254	6.057.548.254	-
0514	Kab. Pasuruan	8.822.098.463	8.822.098.463	-
0515	Kab. Probolinggo	3.844.853.658	3.844.853.658	-
0516	Kab. Lumajang	2.681.912.424	2.681.912.424	-
0517	Kab. Kediri	2.715.867.735	2.715.867.735	-
0518	Kab. Tulungagung	3.234.495.691	3.234.495.691	-
0519	Kab. Nganjuk	2.679.534.741	2.679.534.741	-
0520	Kab. Trenggalek	2.591.718.606	2.591.718.606	-
0521	Kab. Blitar	2.456.115.189	2.456.115.186	3
0522	Kab. Madiun	2.373.432.538	2.373.432.538	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0523	Kab. Ngawi	2.571.838.099	2.571.838.099	-
0524	Kab. Magetan	2.616.597.421	2.616.597.421	-
0525	Kab. Ponorogo	2.656.110.930	2.656.110.930	-
0526	Kab. Pacitan	2.164.696.825	2.164.696.825	-
0527	Kab. Bojonegoro	3.761.888.440	3.761.888.440	-
0528	Kab. Tuban	4.828.198.347	4.828.198.347	-
0529	Kab. Lamongan	2.736.423.518	2.736.423.518	-
0551	Kota Surabaya	75.126.751.621	75.126.751.621	-
0552	Kota Mojokerto	3.330.032.640	3.330.032.640	-
0553	Kota Malang	9.282.770.195	9.282.770.195	-
0554	Kota Pasuruan	2.922.534.438	2.922.534.438	-
0555	Kota Probolinggo	3.498.821.534	3.498.821.534	-
0556	Kota Blitar	2.691.869.779	2.691.869.779	-
0557	Kota Kediri	8.741.558.897	8.741.558.897	-
0558	Kota Madiun	3.951.426.372	3.951.426.372	-
0559	Kota Batu	2.164.514.556	2.164.514.556	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	33.713.541.783	33.713.541.783	-
0601	Kab. Aceh Besar	1.997.583.226	1.997.583.226	-
0602	Kab. Pidie	1.861.318.062	1.861.318.062	-
0603	Kab. Aceh Utara	2.571.110.137	2.571.110.137	-
0604	Kab. Aceh Timur	581.593.813	581.593.813	-
0605	Kab. Aceh Selatan	1.010.423.928	1.010.423.927	1
0606	Kab. Aceh Barat	1.158.217.520	1.158.217.520	-
0607	Kab. Aceh Tengah	757.149.109	757.149.109	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	688.990.241	688.990.241	-
0609	Kab. Simeuleu	893.348.216	-	893.348.216
0610	Kab. Aceh Singkil	737.012.805	737.012.805	-
0611	Kab. Bireuen	775.752.891	775.752.891	-
0612	Kab. Aceh Barat daya	788.649.895	788.649.895	-
0613	Kab. Gayo Lues	680.741.895	680.741.895	-
0614	Kab. Aceh Jaya	559.351.812	198.423.022	360.928.790
0615	Kab. Nagan Raya	696.690.909	696.690.909	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	2.090.947.854	2.090.947.854	-
0617	Kab. Bener Meriah	649.350.694	649.350.694	-
0651	Kota Banda Aceh	10.731.050.624	10.731.050.624	-
0652	Kota Sabang	1.512.804.787	1.512.804.787	-
0653	Kota Langsa	1.791.247.827	1.791.247.827	-
0654	Kota Lhoksumawe	4.886.095.770	4.886.095.770	-
0700	Prop. Sumatera Utara	57.938.105.624	57.938.105.622	2
0701	Kab. Deli Serdang	5.214.201.637	5.214.201.637	-
0702	Kab. Tanah Karo	1.465.908.002	1.465.908.002	-
0703	Kab. Langkat	3.502.384.130	3.502.384.130	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	1.238.667.816	1.238.667.816	-
0705	Kab. Simalungun	2.498.908.597	2.498.908.597	-
0706	Kab. Labuhanbatu	3.726.275.123	3.726.266.260	8.863
0707	Kab. Dairi	1.387.923.773	1.387.923.773	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0708	Kab. Tapanuli Utara	1.412.125.258	1.412.125.257	1
0709	Kab. Tapanuli Selatan	1.787.242.148	1.787.242.148	-
0710	Kab. Asahan	3.467.129.960	3.467.129.960	-
0711	Kab. Nias	1.496.943.669	1.496.943.669	-
0712	Kab. Toba Samosir	2.293.220.994	2.293.220.994	-
0713	Kab. Mandailing Natal	1.599.472.223	1.599.472.223	-
0714	Kab. Nias Selatan	1.198.236.452	425.291.022	772.945.430
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	1.129.631.943	1.129.631.943	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	1.207.186.074	1.207.186.074	-
0717	Kab. Samosir	1.134.887.565	1.134.887.565	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	1.992.355.180	1.992.355.180	-
0751	Kota Medan	35.928.245.867	35.928.245.867	-
0752	Kota Tebingtinggi	1.505.769.272	1.505.769.272	-
0753	Kota Binjai	1.565.506.541	1.565.506.539	2
0754	Kota Pematangsiantar	5.055.274.294	5.055.274.294	-
0755	Kota Tanjungbalai	1.329.348.636	1.329.348.636	-
0756	Kota Sibolga	1.624.358.993	1.624.358.993	-
0757	Kota Padang Sidempuan	2.145.954.288	2.145.954.288	-
0800	Prop. Sumatera Barat	19.678.968.057	19.678.968.057	-
0801	Kab. Agam	1.152.293.069	1.152.293.069	-
0802	Kab. Pasaman	790.205.142	790.205.142	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	922.954.421	922.954.421	-
0804	Kab. Solok	840.655.740	840.655.740	-
0805	Kab. Padang Pariaman	974.239.050	974.239.050	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	864.690.850	864.690.850	-
0807	Kab. Tanah Datar	871.982.964	871.982.964	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	919.670.740	919.670.740	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	669.395.761	669.395.761	-
0810	Kab. Dharmasraya	545.075.917	545.075.916	1
0811	Kab. Solok Selatan	990.747.472	990.747.472	-
0812	Kab. Pasaman Barat	728.793.241	728.793.241	-
0851	Kota Bukittinggi	1.965.946.466	1.840.136.135	125.810.331
0852	Kota Padang Panjang	680.038.478	680.038.478	-
0853	Kota Solok	778.339.323	778.339.323	-
0854	Kota Sawahlunto	731.678.810	731.678.810	-
0855	Kota Padang	13.559.576.449	10.976.733.876	2.582.842.573
0856	Kota Payakumbuh	890.149.138	890.149.138	-
0857	Kota Pariaman	642.019.053	642.019.053	-
0900	Prop. Riau	63.686.582.276	63.686.582.276	-
0901	Kab. Kampar	3.264.622.993	3.264.622.993	-
0902	Kab. Bengkalis	23.091.766.460	23.091.766.460	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	3.843.724.374	3.843.724.374	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	3.861.081.974	3.861.081.974	-
0906	Kab. Pelalawan	5.064.011.651	5.064.011.651	-
0907	Kab. Rokan Hulu	3.044.757.266	3.044.757.266	-
0908	Kab. Rokan Hilir	3.601.632.312	3.601.632.312	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0909	Kab. Siak	7.524.391.946	7.524.391.946	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	3.114.216.384	3.114.216.384	-
0951	Kota Pekanbaru	21.815.120.322	21.815.120.322	-
0953	Kota Dumai	17.304.547.730	17.304.547.730	-
1000	Prop. Jambi	10.654.267.581	10.654.267.581	-
1001	Kab. Batanghari	1.719.061.369	1.719.061.369	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	778.257.971	778.257.971	-
1003	Kab. Bungo	1.374.165.366	1.374.165.366	-
1004	Kab. Sarolangun	792.425.625	792.425.625	-
1005	Kab. Kerinci	844.724.586	844.724.586	-
1006	Kab. Merangin	1.154.672.648	1.154.672.648	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.139.791.420	1.139.791.420	-
1008	Kab. Tebo	711.599.098	360.720.851	350.878.247
1009	Kab. Muaro Jambi	873.287.208	873.287.208	-
1051	Kota Jambi	6.593.416.079	6.593.416.079	-
1100	Prop. Sumatera Selatan	42.392.859.162	42.392.859.162	-
1103	Kab. Musi Banyuasin	3.486.244.998	3.486.244.998	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	2.556.818.557	2.556.818.557	-
1105	Kab. Muara Enim	6.759.479.037	6.759.479.037	-
1106	Kab. Lahat	2.170.685.455	2.170.685.455	-
1107	Kab. Musi Rawas	1.435.436.043	1.435.436.043	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	2.268.064.070	2.268.064.070	-
1109	Kab. Banyuasin	2.471.827.817	2.471.527.700	300.117
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.858.491.043	1.858.491.043	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.555.221.653	1.555.221.653	-
1112	Kab. Ogan Ilir	1.867.182.904	1.867.182.904	-
1151	Kota Palembang	28.090.991.373	28.090.991.373	-
1153	Kota Prabumulih	4.525.251.074	4.525.251.074	-
1154	Kota Pagar Alam	1.671.844.828	1.671.844.828	-
1155	Kota Lubuk Linggau	2.871.749.888	2.871.749.888	-
1200	Prop. Lampung	20.684.330.201	20.684.330.201	-
1201	Kab. Lampung Selatan	3.026.755.392	3.026.755.392	-
1202	Kab. Lampung Tengah	2.133.913.952	2.133.913.952	-
1203	Kab. Lampung Utara	1.765.647.791	1.765.647.791	-
1204	Kab. Lampung Barat	1.201.766.545	1.201.766.545	-
1205	Kab. Tulang Bawang	6.133.779.724	6.133.779.724	-
1206	Kab. Tanggamus	1.630.866.614	1.630.866.614	-
1207	Kab. Lampung Timur	1.618.135.515	1.618.135.515	-
1208	Kab. Way Kanan	1.209.390.519	1.209.390.519	-
1251	Kota Bandar Lampung	9.493.410.665	9.493.410.665	-
1252	Kota Metro	2.812.828.586	2.812.828.586	-
1300	Prop. Kalimantan Barat	11.644.493.980	11.644.493.980	-
1301	Kab. Sambas	851.469.113	851.469.113	-
1302	Kab. Sanggau	1.282.632.272	1.282.632.272	-
1303	Kab. Sintang	949.501.754	949.501.754	-
1304	Kab. Pontianak	1.382.991.449	1.382.991.449	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1305	Kab. Kapuas Hulu	905.906.866	905.906.866	-
1306	Kab. Ketapang	1.106.390.146	1.106.390.146	-
1307	Kab. Bengkayang	599.953.356	599.953.356	-
1308	Kab. Landak	865.508.632	865.508.632	-
1309	Kab. Melawi	724.124.716	724.124.716	-
1310	Kab. Sekadau	524.641.788	524.641.788	-
1351	Kota Pontianak	6.893.103.666	6.893.103.666	-
1352	Kota Singkawang	1.380.517.213	1.380.517.213	-
1400	Prop. Kalimantan Tengah	6.867.622.547	6.867.622.547	-
1401	Kab. Kapuas	521.949.874	521.949.874	-
1402	Kab. Barito Utara	586.878.357	586.878.357	-
1403	Kab. Barito Selatan	508.616.224	508.616.224	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	1.698.137.257	1.698.137.257	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	1.483.825.482	1.483.825.482	-
1406	Kab. Katingan	467.991.272	467.991.272	-
1407	Kab. Seruyan	463.473.816	463.473.816	-
1408	Kab. Sukamara	399.173.695	399.173.695	-
1409	Kab. Lamandau	254.902.915	254.902.915	-
1410	Kab. Gunung Mas	320.379.141	206.113.573	114.265.568
1411	Kab. Pulang Pisau	395.625.042	395.625.042	-
1412	Kab. Murung Raya	395.543.543	395.543.543	-
1413	Kab. Barito Timur	446.583.490	155.045.456	291.538.034
1451	Kota Palangkaraya	2.358.353.711	2.358.353.711	-
1500	Prop. Kalimantan Selatan	17.095.519.808	17.095.519.808	-
1501	Kab. Banjar	1.262.822.243	1.262.822.243	-
1502	Kab. Tanah Laut	1.311.178.644	1.311.178.644	-
1503	Kab. Tapin	912.583.891	912.583.891	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	980.185.288	980.185.288	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.138.358.728	1.138.358.728	-
1506	Kab. Barito Kuala	988.901.456	988.901.456	-
1507	Kab. Tabalong	2.046.042.017	2.046.042.017	-
1508	Kab. Kotabaru	3.688.611.883	3.688.611.883	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	970.539.027	970.539.027	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	1.040.804.773	1.040.804.773	-
1511	Kab. Balangan	970.020.543	970.020.543	-
1551	Kota Banjarmasin	8.495.176.051	8.495.176.051	-
1552	Kota Banjar Baru	1.838.055.168	1.490.790.534	347.264.634
1600	Prop. Kalimantan Timur	103.613.132.090	103.613.132.090	-
1601	Kab. Kutai Kartanegara	9.103.945.894	9.103.945.894	-
1602	Kab. Pasir	6.045.223.070	6.045.223.070	-
1603	Kab. Bulungan	4.205.146.569	4.205.146.569	-
1604	Kab. Berau	4.997.696.915	4.997.696.915	-
1605	Kab. Nunukan	4.268.756.372	4.268.756.372	-
1606	Kab. Malinau	4.020.727.337	4.020.727.337	-
1607	Kab. Kutai Barat	5.159.864.092	5.159.864.092	-
1608	Kab. Kutai Timur	10.684.125.932	10.684.125.932	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1609	Kab. Penajam Paser Utara	4.277.135.819	4.277.135.819	-
1651	Kota Samarinda	14.579.567.119	14.579.567.119	-
1652	Kota Balikpapan	60.542.277.800	60.542.277.800	-
1653	Kota Tarakan	5.282.182.874	5.282.182.874	-
1654	Kota Bontang	22.253.048.341	22.215.475.843	37.572.498
1700	Prop. Sulawesi Utara	10.081.568.571	10.081.568.571	-
1702	Kab. Minahasa	883.556.122	883.556.122	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	951.520.927	951.520.927	-
1704	Kab. Sangihe	683.167.649	683.167.649	-
1705	Kab. Talaud Kepulauan	637.518.950	637.518.950	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	899.797.573	899.797.573	-
1707	Kota Tomohon	767.135.053	767.135.053	-
1708	Kab. Minahasa Utara	986.282.788	986.282.788	-
1751	Kota Manado	8.225.334.635	8.225.334.635	-
1753	Kota Bitung	1.088.039.160	1.088.039.160	-
1800	Prop. Sulawesi Tengah	6.073.008.991	6.073.008.991	-
1801	Kab. Poso	589.746.949	589.746.949	-
1802	Kab. Donggala	446.582.641	446.582.641	-
1803	Kab. Toli-Toli	546.203.303	464.402.127	81.801.176
1804	Kab. Banggai	1.054.911.176	1.054.911.176	-
1805	Kab. Buol	473.081.985	473.081.985	-
1806	Kab. Morowali	578.819.030	578.819.030	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	560.753.825	560.753.825	-
1808	Kab. Parigi Moutong	565.584.268	565.584.268	-
1809	Kab. Tojo Una-Una	370.595.823	370.595.823	-
1851	Kota Palu	3.923.234.486	3.923.234.486	-
1900	Prop. Sulawesi Selatan	38.073.894.021	38.073.894.021	-
1901	Kab. Pinrang	1.508.401.043	1.508.401.043	-
1902	Kab. Gowa	1.299.263.452	1.299.263.452	-
1903	Kab. Wajo	1.338.440.192	1.338.440.192	-
1905	Kab. Bone	1.960.324.499	1.960.324.499	-
1906	Kab. Tana Toraja	1.282.924.467	1.282.924.464	3
1907	Kab. Maros	2.550.301.822	2.550.301.822	-
1909	Kab. Luwu	1.093.965.482	1.093.965.482	-
1910	Kab. Sinjai	1.015.849.413	1.015.849.413	-
1911	Kab. Bulukumba	1.173.850.702	1.173.850.702	-
1912	Kab. Bantaeng	878.099.120	878.099.120	-
1913	Kab. Jeneponto	1.095.340.059	1.095.340.059	-
1914	Kab. Selayar	995.954.848	995.954.848	-
1915	Kab. Takalar	1.124.006.110	1.124.006.110	-
1916	Kab. Barru	1.197.136.595	1.197.136.595	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	1.307.094.230	1.307.094.226	4
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.383.099.797	2.383.099.797	-
1919	Kab. Soppeng	1.016.300.666	1.016.300.666	-
1921	Kab. Enrekang	769.998.011	769.998.011	-
1922	Kab. Luwu Utara	1.089.173.403	1.089.173.403	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1924	Kab. Luwu Timur	9.034.377.532	9.034.377.532	-
1951	Kota Makassar	19.102.690.718	19.102.690.718	-
1952	Kota Pare-pare	2.305.149.849	2.305.149.849	-
1953	Kota Palopo	1.589.099.020	1.589.099.020	-
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	6.350.940.723	6.350.940.723	-
2001	Kab. Konawe	494.178.355	494.178.355	-
2002	Kab. Buton	429.337.772	429.337.772	-
2003	Kab. Muna	610.305.701	610.305.701	-
2004	Kab. Kolaka	2.065.648.416	2.065.648.416	-
2005	Kab. Konawe Selatan	510.544.574	510.544.574	-
2006	Kab. Wakatobi	313.351.891	313.351.891	-
2007	Kab. Bombana	462.839.285	462.839.285	-
2008	Kab. Kolaka Utara	386.754.929	386.754.929	-
2051	Kota Kendari	3.451.530.211	3.451.530.211	-
2052	Kota Bau-Bau	801.919.950	801.919.950	-
2100	Prop. Maluku	2.924.334.733	2.924.334.733	-
2101	Kab. Maluku Tengah	342.398.954	342.398.954	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	370.164.047	370.164.047	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	220.716.300	220.716.300	-
2104	Kab. Pulau Buru	289.813.870	289.813.870	-
2105	Kab. Kepulauan Aru	210.074.774	210.074.774	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	271.579.473	89.911.278	181.668.195
2107	Kab. Seram Bagian Timur	188.908.566	31.048.622	157.859.944
2151	Kota Ambon	2.492.846.114	1.725.942.596	766.903.518
2200	Prop. Bali	25.186.088.833	25.186.088.833	-
2201	Kab. Buleleng	2.437.979.603	2.437.979.603	-
2202	Kab. Jembrana	1.593.432.382	1.593.432.382	-
2203	Kab. Klungkung	1.366.074.297	1.366.074.297	-
2204	Kab. Gianyar	3.972.083.047	3.972.083.047	-
2205	Kab. Karangasem	1.940.831.117	1.940.831.117	-
2206	Kab. Bangli	1.374.547.421	1.374.547.421	-
2207	Kab. Badung	9.684.910.161	9.684.910.161	-
2208	Kab. Tabanan	1.812.473.392	1.812.473.392	-
2251	Kota Denpasar	13.596.801.832	13.596.801.830	2
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	18.405.701.249	18.405.701.249	-
2301	Kab. Lombok Barat	2.113.998.024	2.113.998.024	-
2302	Kab. Lombok Tengah	1.761.176.936	1.761.176.934	2
2303	Kab. Lombok Timur	1.869.962.632	1.869.962.632	-
2304	Kab. Bima	1.036.914.612	1.036.914.612	-
2305	Kab. Sumbawa	1.539.225.237	1.539.225.237	-
2306	Kab. Dompu	1.282.474.105	1.282.474.105	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	6.376.133.001	6.376.103.001	30.000
2351	Kota Mataram	9.873.132.278	9.873.132.278	-
2352	Kota Bima	1.755.535.045	1.755.535.045	-
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	8.121.011.919	8.121.011.919	-
2401	Kab. Kupang	425.733.654	425.733.654	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2402	Kab. Belu	907.400.559	907.400.559	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	404.585.876	404.585.876	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	827.436.147	827.436.147	-
2405	Kab. Alor	690.982.721	690.982.719	2
2406	Kab. Sikka	572.100.587	572.100.587	-
2407	Kab. Flores Timur	651.598.570	651.598.570	-
2408	Kab. Ende	667.569.264	667.569.264	-
2409	Kab. Ngada	451.398.117	451.398.117	-
2410	Kab. Manggarai	484.770.010	484.770.010	-
2411	Kab. Sumba Timur	507.810.933	507.810.933	-
2412	Kab. Sumba Barat	468.088.550	463.652.842	4.435.708
2413	Kab. Lembata	422.134.597	422.134.597	-
2414	Kab. Rote Ndao	323.561.560	323.561.560	-
2415	Kab. Manggarai Barat	348.494.164	348.494.164	-
2451	Kota Kupang	4.027.852.566	4.027.852.566	-
2500	Prop. Papua	39.953.230.723	39.953.230.723	-
2501	Kab. Jayapura	1.343.828.390	1.343.828.390	-
2502	Kab. Biak-Numfor	1.489.213.307	1.489.213.307	-
2504	Kab. Yapen-Waropen	993.064.704	993.064.704	-
2507	Kab. Merauke	2.824.496.551	2.824.496.551	-
2508	Kab. Jayawijaya	1.085.060.908	1.085.060.908	-
2509	Kab. Paniai	980.164.942	980.164.942	-
2510	Kab. Nabire	1.206.773.518	1.206.773.518	-
2511	Kab. Puncak Jaya	1.000.204.188	1.000.204.188	-
2512	Kab. Mimika	30.478.068.103	30.478.068.103	-
2513	Kab. Mappi	925.311.746	428.129.238	497.182.508
2514	Kab. Asmat	931.684.307	931.684.307	-
2515	Kab. Boven Digoel	929.421.909	929.421.909	-
2516	Kab. Sarmi	1.022.304.654	1.022.304.654	-
2517	Kab. Keerom	1.062.906.954	480.478.869	582.428.085
2518	Kab. Tolikara	955.637.144	955.637.142	2
2519	Kab. Pegunungan Bintang	1.034.284.587	1.034.284.587	-
2523	Kab. Waropen	983.701.640	983.701.640	-
2524	Kab. Yahukimo	927.825.085	927.825.085	-
2525	Kab. Supiori	1.052.644.317	1.052.211.055	433.262
2551	Kota Jayapura	8.703.249.123	8.703.249.123	-
2600	Prop. Bengkulu	4.864.372.710	4.864.372.710	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	706.562.432	706.562.432	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	398.865.892	398.865.892	-
2603	Kab. Rejang Lebong	689.239.097	689.239.097	-
2604	Kab. Seluma	326.406.661	326.406.661	-
2605	Kab. Kaur	316.869.052	256.326.614	60.542.438
2606	Kab. Mukomuko	556.918.304	556.918.304	-
2607	Kab. Lebong	327.900.196	327.900.196	-
2608	Kab. Kepahiang	447.961.560	447.961.560	-
2651	Kota Bengkulu	3.525.835.870	3.525.835.870	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2800	Prop. Maluku Utara	3.991.280.505	3.991.280.505	-
2801	Kab. Halmahera Barat	230.312.152	230.312.152	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	350.044.626	350.044.626	-
2803	Kab. Halmahera Utara	1.510.054.808	1.510.054.808	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	334.931.833	334.931.833	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	308.118.379	308.118.379	-
2806	Kab. Halmahera Timur	307.167.001	307.167.001	-
2851	Kota Ternate	2.634.979.762	2.634.979.762	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	311.312.194	311.312.194	-
2900	Prop. Banten	101.255.953.016	101.255.953.016	-
2901	Kab. Serang	16.492.794.104	13.302.596.975	3.190.197.129
2902	Kab. Pandeglang	8.554.607.643	8.554.607.643	-
2903	Kab. Lebak	8.677.495.811	8.677.495.811	-
2904	Kab. Tangerang	46.584.285.879	46.584.285.879	-
2951	Kota Tangerang	46.688.832.046	46.688.832.046	-
2952	Kota Cilegon	24.885.914.040	24.885.914.040	-
3000	Prop. Bangka Belitung	6.038.352.744	6.038.352.744	-
3001	Kab. Belitung	963.036.679	963.036.679	-
3002	Kab. Bangka	825.174.950	825.174.950	-
3003	Kab. Bangka Barat	493.749.076	493.749.076	-
3004	Kab. Bangka Tengah	1.072.104.799	1.072.104.799	-
3005	Kab. Bangka Selatan	492.664.028	274.670.556	217.993.472
3006	Kab. Belitung Timur	570.165.752	570.165.752	-
3051	Kota Pangkalpinang	4.640.633.831	4.640.633.831	-
3100	Prop. Gorontalo	2.584.356.244	2.584.356.244	-
3101	Kab. Gorontalo	714.124.177	714.124.177	-
3102	Kab. Boalemo	475.136.028	475.136.027	1
3103	Kab. Pahuwato	422.653.394	422.653.394	-
3104	Kab. Bone Bolango	488.498.476	440.235.610	48.262.866
3151	Kota Gorontalo	1.776.122.292	1.776.122.292	-
3200	Prop. Riau Kepulauan	37.646.353.595	37.646.353.585	10
3201	Kab. Kepulauan Riau	5.800.099.235	5.800.099.235	-
3202	Kab. Karimun	3.581.301.655	3.581.301.655	-
3203	Kab. Natuna	3.605.967.563	3.605.967.563	-
3204	Kab. Lingga	2.968.353.150	2.968.353.150	-
3251	Kota Batam	35.694.613.280	35.694.613.280	-
3252	Kota Tanjung Pinang	4.819.195.508	4.819.195.508	-
3300	Prop. Irian Jaya Barat	6.058.335.439	6.058.335.439	-
3301	Kab. Manokwari	1.190.462.780	1.190.462.780	-
3302	Kab. Sorong	525.472.744	352.848.604	172.624.140
3303	Kab. Fak-Fak	726.645.623	726.645.623	-
3304	Kab. Sorong Selatan	415.219.172	415.219.172	-
3305	Kab. Raja Ampat	377.863.742	377.863.742	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	1.031.079.372	1.031.079.372	-
3307	Kab. Teluk Wondama	336.106.261	336.106.261	-
3308	Kab. Kaimana	412.787.364	412.787.364	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3351	Kota Sorong	4.071.866.101	4.071.866.101	-
3400	Prop. Sulawesi Barat	1.521.755.116	861.383.148	660.371.968
3401	Kab. Majene	383.308.168	383.308.168	-
3402	Kab. Mamuju	453.137.965	453.137.965	-
3403	Kab. Mamuju Utara	477.648.177	477.648.177	-
3404	Kab. Polewali Mandar	628.781.453	628.781.453	-
3405	Kab. Mamasa	339.756.910	339.756.910	-
	Total	**6.065.919.999.968**	**6.052.608.670.469**	13.311.329.499

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	1.302.884.849.757	1.414.651.755.062	(111.766.905.305)
0200	Prop. Jawa Barat	244.630.900.980	301.277.577.805	(56.646.676.825)
0205	Kab. Bogor	81.558.016.173	73.046.251.337	8.511.764.836
0206	Kab. Sukabumi	37.944.652.869	34.540.246.688	3.404.406.181
0207	Kab. Cianjur	35.241.851.997	44.244.311.463	(9.002.459.466)
0208	Kab. Bekasi	119.095.789.370	137.495.044.804	(18.399.255.434)
0209	Kab. Karawang	90.575.192.133	89.065.868.030	1.509.324.103
0210	Kab. Purwakarta	30.390.400.413	34.547.797.413	(4.157.397.000)
0211	Kab. Subang	60.700.645.773	91.068.755.285	(30.368.109.512)
0212	Kab. Bandung	79.830.214.245	53.634.441.638	26.195.772.607
0213	Kab. Sumedang	21.777.001.588	27.181.410.272	(5.404.408.684)
0214	Kab. Garut	28.070.060.975	37.383.834.304	(9.313.773.329)
0215	Kab. Tasikmalaya	20.285.598.370	28.589.010.911	(8.303.412.541)
0216	Kab. Ciamis	19.378.944.189	24.647.695.689	(5.268.751.500)
0217	Kab. Cirebon	27.063.733.005	36.421.536.273	(9.357.803.268)
0218	Kab. Kuningan	19.211.460.473	28.752.826.112	(9.541.365.639)
0219	Kab. Indramayu	83.140.907.157	111.056.665.078	(27.915.757.921)
0220	Kab. Majalengka	40.396.518.935	52.511.770.361	(12.115.251.426)
0251	Kota Bandung	84.009.394.341	53.886.958.826	30.122.435.515
0252	Kota Bogor	28.275.516.333	33.345.281.522	(5.069.765.189)
0253	Kota Sukabumi	8.889.624.981	11.049.327.995	(2.159.703.014)
0254	Kota Cirebon	16.420.986.189	18.829.543.412	(2.408.557.223)
0257	Kota Bekasi	58.078.121.058	71.271.283.545	(13.193.162.487)
0258	Kota Depok	38.726.333.973	41.794.051.193	(3.067.717.220)
0260	Kota Tasikmalaya	13.140.846.575	17.238.150.067	(4.097.303.492)
0261	Kota Cimahi	16.271.131.653	20.430.649.660	(4.159.518.007)
0262	Kota Banjar	10.047.839.434	14.931.083.564	(4.883.244.130)
0300	Prop. Jawa Tengah	129.946.462.758	182.874.152.941	(52.927.690.183)
0301	Kab. Semarang	17.456.847.237	23.378.961.724	(5.922.114.487)
0302	Kab. Kendal	17.279.150.733	18.872.456.848	(1.593.306.115)
0303	Kab. Demak	16.490.855.493	22.303.490.154	(5.812.634.661)
0304	Kab. Grobogan	23.351.625.649	36.641.746.333	(13.290.120.684)
0305	Kab. Pekalongan	14.305.911.629	19.607.773.015	(5.301.861.386)
0306	Kab. Batang	15.627.270.712	20.487.920.802	(4.860.650.090)
0307	Kab. Tegal	20.627.472.114	26.148.111.738	(5.520.639.624)
0308	Kab. Brebes	28.990.670.382	39.129.335.653	(10.138.665.271)
0309	Kab. Pati	19.635.676.605	26.497.183.564	(6.861.506.959)
0310	Kab. Kudus	18.174.585.864	30.735.181.065	(12.560.595.201)
0311	Kab. Pemalang	19.299.641.502	25.763.576.045	(6.463.934.543)
0312	Kab. Jepara	20.068.587.780	27.022.884.225	(6.954.296.445)
0313	Kab. Rembang	17.291.130.211	22.768.520.465	(5.477.390.254)
0314	Kab. Blora	30.736.358.541	50.262.501.401	(19.526.142.860)
0315	Kab. Banyumas	23.284.217.196	30.368.845.372	(7.084.628.176)
0316	Kab. Cilacap	34.035.436.801	51.392.537.946	(17.357.101.145)
0317	Kab. Purbalingga	16.591.245.657	21.758.671.384	(5.167.425.727)
0318	Kab. Banjarnegara	17.869.359.791	24.931.383.980	(7.062.024.189)
0319	Kab. Magelang	18.933.986.497	24.445.115.126	(5.511.128.629)
0320	Kab. Temanggung	12.355.968.789	16.972.521.842	(4.616.553.053)
0321	Kab. Wonosobo	16.532.138.961	18.817.694.440	(2.285.555.479)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0322	Kab. Purworejo	16.964.236.674	22.076.369.968	(5.112.133.294)
0323	Kab. Kebumen	19.584.598.144	25.650.134.152	(6.065.536.008)
0324	Kab. Klaten	17.894.194.520	20.629.845.827	(2.735.651.307)
0325	Kab. Boyolali	17.127.216.464	22.178.720.997	(5.051.504.533)
0326	Kab. Sragen	16.633.857.636	21.416.992.946	(4.783.135.310)
0327	Kab. Sukoharjo	18.419.412.982	22.498.114.058	(4.078.701.076)
0328	Kab. Karanganyar	16.074.523.917	18.376.541.361	(2.302.017.444)
0329	Kab. Wonogiri	17.621.462.837	23.611.336.278	(5.989.873.441)
0351	Kota Semarang	59.411.933.181	69.058.755.407	(9.646.822.226)
0352	Kota Salatiga	7.558.969.293	8.457.652.158	(898.682.865)
0353	Kota Pekalongan	10.429.696.339	12.892.157.460	(2.462.461.121)
0354	Kota Tegal	10.440.587.599	12.197.849.354	(1.757.261.755)
0355	Kota Magelang	7.889.495.954	9.164.411.892	(1.274.915.938)
0356	Kota Surakarta	19.473.842.493	20.999.656.939	(1.525.814.446)
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	16.512.590.340	18.586.651.023	(2.074.060.683)
0401	Kab. Bantul	14.520.263.517	14.441.981.356	78.282.161
0402	Kab. Sleman	24.765.773.373	26.692.513.769	(1.926.740.396)
0403	Kab. Gunungkidul	13.277.211.527	17.195.826.780	(3.918.615.253)
0404	Kab. Kulonprogo	11.318.517.454	14.081.018.748	(2.762.501.294)
0451	Kota Yogyakarta	22.041.174.657	22.808.490.870	(767.316.213)
0500	Prop. Jawa Timur	237.797.013.600	342.046.756.754	(104.249.743.154)
0501	Kab. Gresik	40.478.773.509	27.514.634.302	12.964.139.207
0502	Kab. Mojokerto	24.487.619.373	23.824.946.562	662.672.811
0503	Kab. Sidoarjo	76.598.770.476	106.223.364.353	(29.624.593.877)
0504	Kab. Jombang	26.666.679.554	15.739.936.043	10.926.743.511
0505	Kab. Sampang	28.896.113.185	37.582.239.729	(8.686.126.544)
0506	Kab. Pamekasan	20.375.482.653	28.595.468.595	(8.219.985.942)
0507	Kab. Sumenep	73.089.347.589	99.264.224.057	(26.174.876.468)
0508	Kab. Bangkalan	36.189.010.782	51.819.915.918	(15.630.905.136)
0509	Kab. Bondowoso	12.652.093.125	16.527.599.844	(3.875.506.719)
0510	Kab. Situbondo	16.653.158.109	21.635.812.709	(4.982.654.600)
0511	Kab. Banyuwangi	28.039.018.365	35.009.705.704	(6.970.687.339)
0512	Kab. Jember	31.679.016.453	35.058.144.243	(3.379.127.790)
0513	Kab. Malang	31.679.347.581	36.963.343.525	(5.283.995.944)
0514	Kab. Pasuruan	33.938.408.553	41.972.907.018	(8.034.498.465)
0515	Kab. Probolinggo	25.238.518.533	27.275.976.838	(2.037.458.305)
0516	Kab. Lumajang	15.949.282.365	20.232.266.188	(4.282.983.823)
0517	Kab. Kediri	26.218.304.901	34.076.504.084	(7.858.199.183)
0518	Kab. Tulungagung	19.985.111.745	24.629.900.525	(4.644.788.780)
0519	Kab. Nganjuk	18.695.023.605	24.650.334.765	(5.955.311.160)
0520	Kab. Trenggalek	16.399.002.907	21.354.857.045	(4.955.854.138)
0521	Kab. Blitar	20.233.740.235	26.053.266.834	(5.819.526.599)
0522	Kab. Madiun	16.867.006.090	21.055.830.478	(4.188.824.388)
0523	Kab. Ngawi	16.896.970.053	22.851.915.501	(5.954.945.448)
0524	Kab. Magetan	13.663.772.757	17.729.737.326	(4.065.964.569)
0525	Kab. Ponorogo	21.816.925.486	29.473.476.335	(7.656.550.849)
0526	Kab. Pacitan	13.787.845.193	18.321.430.254	(4.533.585.061)
0527	Kab. Bojonegoro	39.675.620.560	57.488.469.477	(17.812.848.917)
0528	Kab. Tuban	39.721.825.917	55.944.810.485	(16.222.984.568)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0529	Kab. Lamongan	22.809.300.021	38.748.705.539	(15.939.405.518)
0551	Kota Surabaya	197.975.538.657	249.386.222.010	(51.410.683.353)
0552	Kota Mojokerto	10.016.024.345	47.763.633.617	(37.747.609.272)
0553	Kota Malang	20.519.434.557	23.870.315.260	(3.350.880.703)
0554	Kota Pasuruan	9.067.272.158	10.853.644.403	(1.786.372.245)
0555	Kota Probolinggo	14.267.292.093	23.096.163.838	(8.828.871.745)
0556	Kota Blitar	9.282.908.505	10.593.997.078	(1.311.088.573)
0557	Kota Kediri	11.118.043.197	12.932.383.115	(1.814.339.918)
0558	Kota Madiun	9.732.515.652	10.595.527.227	(863.011.575)
0559	Kota Batu	10.601.361.693	13.286.679.610	(2.685.317.917)
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	210.453.196.734	137.462.133.517	72.991.063.217
0601	Kab. Aceh Besar	8.647.165.931	14.992.459.255	(6.345.293.324)
0602	Kab. Pidie	12.691.555.763	20.737.240.888	(8.045.685.125)
0603	Kab. Aceh Utara	70.225.246.586	143.977.815.867	(73.752.569.281)
0604	Kab. Aceh Timur	42.098.629.627	75.240.232.746	(33.141.603.119)
0605	Kab. Aceh Selatan	11.672.514.564	19.009.176.677	(7.336.662.113)
0606	Kab. Aceh Barat	11.036.177.252	16.547.838.856	(5.511.661.604)
0607	Kab. Aceh Tengah	10.138.389.373	17.060.726.974	(6.922.337.601)
0608	Kab. Aceh Tenggara	9.486.847.870	13.403.948.337	(3.917.100.467)
0609	Kab. Simeuleu	9.676.079.881	12.218.193.410	(2.542.113.529)
0610	Kab. Aceh Singkil	10.904.951.004	17.008.313.804	(6.103.362.800)
0611	Kab. Bireuen	19.496.689.345	32.089.798.794	(12.593.109.449)
0612	Kab. Aceh Barat Daya	8.227.256.917	12.731.254.493	(4.503.997.576)
0613	Kab. Gayo Lues	9.575.450.927	14.948.420.760	(5.372.969.833)
0614	Kab. Aceh Jaya	11.769.086.297	9.161.931.214	2.607.155.083
0615	Kab. Nagan Raya	10.930.373.082	26.753.649.041	(15.823.275.959)
0616	Kab. Aceh Tamiang	35.251.072.195	65.345.773.099	(30.094.700.904)
0617	Kab. Bener Meriah	7.766.152.766	11.408.072.859	(3.641.920.093)
0651	Kota Banda Aceh	11.000.547.961	17.146.881.214	(6.146.333.253)
0652	Kota Sabang	12.757.382.918	19.111.863.042	(6.354.480.124)
0653	Kota Langsa	9.857.830.877	16.618.401.497	(6.760.570.620)
0654	Kota Lhokseumawe	28.087.375.439	52.156.132.367	(24.068.756.928)
0700	Prop. Sumatera Utara	128.245.993.146	168.345.471.341	(40.099.478.195)
0701	Kab. Deli Serdang	49.765.990.641	54.675.542.597	(4.909.551.956)
0702	Kab. Tanah Karo	9.345.885.669	12.153.991.649	(2.808.105.980)
0703	Kab. Langkat	79.301.528.982	109.432.335.427	(30.130.806.445)
0704	Kab. Tapanuli Tengah	16.239.540.210	21.022.335.825	(4.782.795.615)
0705	Kab. Simalungun	36.461.247.020	40.389.267.512	(3.928.020.492)
0706	Kab. Labuhanbatu	55.994.569.929	76.146.937.288	(20.152.367.359)
0707	Kab. Dairi	12.516.212.694	17.127.242.527	(4.611.029.833)
0708	Kab. Tapanuli Utara	12.595.003.168	16.406.752.265	(3.811.749.097)
0709	Kab. Tapanuli Selatan	26.982.127.773	38.948.589.105	(11.966.461.332)
0710	Kab. Asahan	42.110.634.501	49.367.911.638	(7.257.277.137)
0711	Kab. Nias	13.156.696.566	16.619.932.522	(3.463.235.956)
0712	Kab. Toba Samosir	8.471.267.757	15.368.764.255	(6.897.496.498)
0713	Kab. Mandailing Natal	15.311.583.668	20.814.291.773	(5.502.708.105)
0714	Kab. Nias Selatan	10.985.512.621	12.492.528.818	(1.507.016.197)
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	10.504.995.841	15.258.372.638	(4.753.376.797)
0716	Kab. Humbang Hasundutan	11.601.887.301	17.267.377.430	(5.665.490.129)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0717	Kab. Samosir	6.969.689.109	9.906.297.908	(2.936.608.799)
0718	Kab. Serdang Bedagai	24.497.022.120	30.948.469.978	(6.451.447.858)
0751	Kota Medan	104.707.438.580	122.893.006.208	(18.185.567.628)
0752	Kota Tebingtinggi	10.603.429.529	13.285.484.548	(2.682.055.019)
0753	Kota Binjai	23.172.380.553	34.702.388.908	(11.530.008.355)
0754	Kota Pematangsiantar	9.590.571.840	11.338.065.660	(1.747.493.820)
0755	Kota Tanjungbalai	9.526.028.748	11.464.553.252	(1.938.524.504)
0756	Kota Sibolga	11.283.098.009	14.095.958.657	(2.812.860.648)
0757	Kota Padang Sidempuan	14.182.797.850	17.322.315.060	(3.139.517.210)
0800	Prop. Sumatera Barat	33.944.058.936	47.636.383.225	(13.692.324.289)
0801	Kab. Agam	12.511.026.098	15.972.691.095	(3.461.664.997)
0802	Kab. Pasaman	11.752.765.997	15.203.682.683	(3.450.916.686)
0803	Kab. Limapuluh Kota	13.935.622.833	14.615.692.810	(680.069.977)
0804	Kab. Solok	12.162.860.892	15.853.091.658	(3.690.230.766)
0805	Kab. Padang Pariaman	10.397.232.252	13.380.539.373	(2.983.307.121)
0806	Kab. Pesisir Selatan	13.525.693.991	18.465.062.085	(4.939.368.094)
0807	Kab. Tanah Datar	10.392.244.050	13.622.567.917	(3.230.323.867)
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	9.663.974.020	13.223.463.361	(3.559.489.341)
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	12.150.760.137	15.239.776.497	(3.089.016.360)
0810	Kab. Dharmasraya	12.015.678.662	12.888.005.310	(872.326.648)
0811	Kab. Solok Selatan	10.332.010.144	13.863.669.683	(3.531.659.539)
0812	Kab. Pasaman Barat	12.994.086.755	17.609.742.228	(4.615.655.473)
0851	Kota Bukittinggi	7.482.442.622	8.535.793.197	(1.053.350.575)
0852	Kota Padang Panjang	8.940.258.937	11.187.721.241	(2.247.462.304)
0853	Kota Solok	8.353.945.738	10.675.142.906	(2.321.197.168)
0854	Kota Sawahlunto	9.677.151.873	10.571.325.751	(894.173.878)
0855	Kota Padang	18.421.167.141	21.225.853.457	(2.804.686.316)
0856	Kota Payakumbuh	8.725.695.738	12.320.987.884	(3.595.292.146)
0857	Kota Pariaman	7.847.903.710	10.893.688.972	(3.045.785.262)
0900	Prop. Riau	172.746.488.538	259.117.128.703	(86.370.640.165)
0901	Kab. Kampar	77.832.659.637	106.798.566.057	(28.965.906.420)
0902	Kab. Bengkalis	157.805.900.397	189.251.509.162	(31.445.608.765)
0904	Kab. Indragiri Hulu	45.895.151.493	68.609.004.024	(22.713.852.531)
0905	Kab. Indragiri Hilir	32.930.977.725	44.075.460.598	(11.144.482.873)
0906	Kab. Pelalawan	65.004.023.143	95.967.197.964	(30.963.174.821)
0907	Kab. Rokan Hulu	64.542.685.725	92.622.372.100	(28.079.686.375)
0908	Kab. Rokan Hilir	91.943.216.685	152.234.146.568	(60.290.929.883)
0909	Kab. Siak	104.353.125.597	152.243.709.635	(47.890.584.038)
0912	Kab. Kuantan Singingi	20.667.058.029	28.624.124.317	(7.957.066.288)
0951	Kota Pekanbaru	36.725.202.405	45.028.890.051	(8.303.687.646)
0953	Kota Dumai	26.560.321.651	98.040.992.452	(71.480.670.801)
1000	Prop. Jambi	77.789.123.388	117.062.035.628	(39.272.912.240)
1001	Kab. Batanghari	53.430.994.604	81.696.202.400	(28.265.207.796)
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	41.176.195.204	51.617.255.624	(10.441.060.420)
1003	Kab. Bungo	17.859.101.013	21.375.929.887	(3.516.828.874)
1004	Kab. Sarolangun	35.813.932.317	53.588.802.496	(17.774.870.179)
1005	Kab. Kerinci	13.580.141.229	16.903.553.168	(3.323.411.939)
1006	Kab. Merangin	24.456.204.981	32.232.892.393	(7.776.687.412)
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	56.894.533.783	99.268.954.899	(42.374.421.116)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1008	Kab. Tebo	17.825.256.621	24.703.168.185	(6.877.911.564)
1009	Kab. Muaro Jambi	49.236.639.957	66.233.527.117	(16.996.887.160)
1051	Kota Jambi	35.483.964.237	46.513.910.214	(11.029.945.977)
1100	Prop. Sumatera Selatan	147.193.956.378	186.039.520.550	(38.845.564.172)
1103	Kab. Musi Banyu Asin	117.253.288.629	135.720.008.408	(18.466.719.779)
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	44.305.059.285	60.226.031.298	(15.920.972.013)
1105	Kab. Muara Enim	64.119.988.197	83.388.708.670	(19.268.720.473)
1106	Kab. Lahat	61.747.114.527	84.867.715.843	(23.120.601.316)
1107	Kab. Musi Rawas	70.339.539.509	100.424.237.574	(30.084.698.065)
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	28.424.680.188	37.226.839.273	(8.802.159.085)
1109	Kab. Banyu Asin	69.697.284.669	73.074.225.314	(3.376.940.645)
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	10.129.204.917	17.028.302.502	(6.899.097.585)
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	9.491.114.133	15.713.225.768	(6.222.111.635)
1112	Kab. Ogan Ilir	41.632.869.933	52.343.598.505	(10.710.728.572)
1151	Kota Palembang	49.560.591.539	44.842.120.257	4.718.471.282
1153	Kota Prabumulih	36.684.012.447	50.654.268.990	(13.970.256.543)
1154	Kota Pagar Alam	16.479.165.470	19.510.550.349	(3.031.384.879)
1155	Kota Lubuk Linggau	17.440.852.837	24.609.836.567	(7.168.983.730)
1200	Prop. Lampung	40.483.494.144	52.200.836.487	(11.717.342.343)
1201	Kab. Lampung Selatan	24.429.377.781	33.449.284.158	(9.019.906.377)
1202	Kab. Lampung Tengah	24.642.615.141	30.170.346.774	(5.527.731.633)
1203	Kab. Lampung Utara	17.815.244.422	22.168.154.334	(4.352.909.912)
1204	Kab. Lampung Barat	16.575.713.086	5.247.179.920	11.328.533.166
1205	Kab. Tulang Bawang	20.499.466.437	28.594.391.744	(8.094.925.307)
1206	Kab. Tanggamus	17.848.772.541	24.132.787.668	(6.284.015.127)
1207	Kab. Lampung Timur	26.026.237.053	39.546.591.097	(13.520.354.044)
1208	Kab. Way Kanan	15.579.163.243	19.730.448.217	(4.151.284.974)
1251	Kota Bandar Lampung	21.239.029.485	26.707.381.181	(5.468.351.696)
1252	Kota Metro	9.197.524.125	9.309.294.365	(111.770.240)
1300	Prop. Kalimantan Barat	41.819.241.978	62.512.798.855	(20.693.556.877)
1301	Kab. Sambas	17.444.353.149	22.796.222.270	(5.351.869.121)
1302	Kab. Sanggau	20.259.033.813	26.655.612.457	(6.396.578.644)
1303	Kab. Sintang	17.305.783.461	25.229.547.394	(7.923.763.933)
1304	Kab. Pontianak	17.678.653.749	26.221.146.251	(8.542.492.502)
1305	Kab. Kapuas Hulu	25.549.770.050	32.622.065.664	(7.072.295.614)
1306	Kab. Ketapang	28.016.331.284	39.212.732.100	(11.196.400.816)
1307	Kab. Bengkayang	11.386.002.861	16.218.752.781	(4.832.749.920)
1308	Kab. Landak	16.173.263.565	24.072.377.024	(7.899.113.459)
1309	Kab. Melawi	12.778.665.960	16.426.209.205	(3.647.543.245)
1310	Kab. Sekadau	12.295.138.973	17.227.395.302	(4.932.256.329)
1351	Kota Pontianak	19.936.271.493	20.190.846.492	(254.574.999)
1352	Kota Singkawang	10.850.300.538	14.164.678.058	(3.314.377.520)
1400	Prop. Kalimantan Tengah	53.162.135.298	85.801.958.694	(32.639.823.396)
1401	Kab. Kapuas	18.369.711.536	27.859.134.097	(9.489.422.561)
1402	Kab. Barito Utara	25.507.858.036	36.581.176.023	(11.073.317.987)
1403	Kab. Barito Selatan	32.589.088.891	45.968.341.082	(13.379.252.191)
1404	Kab. Kotawaringin Timur	18.304.396.893	23.801.603.446	(5.497.206.553)
1405	Kab. Kotawaringin Barat	13.529.784.501	18.171.435.011	(4.641.650.510)
1406	Kab. Katingan	12.485.500.101	19.185.292.907	(6.699.792.806)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1407	Kab. Seruyan	22.882.143.349	26.551.171.316	(3.669.027.967)
1408	Kab. Sukamara	18.432.993.281	22.404.860.178	(3.971.866.897)
1409	Kab. Lamandau	20.335.333.077	26.651.083.966	(6.315.750.889)
1410	Kab. Gunung Mas	14.281.580.824	21.581.651.726	(7.300.070.902)
1411	Kab. Pulang Pisau	11.418.327.045	16.256.154.347	(4.837.827.302)
1412	Kab. Murung Raya	25.236.244.482	35.432.134.016	(10.195.889.534)
1413	Kab. Barito Timur	28.126.966.617	35.940.224.143	(7.813.257.526)
1451	Kota Palangkaraya	9.607.621.941	11.198.258.063	(1.590.636.122)
1500	Prop. Kalimantan Selatan	58.372.246.296	79.193.981.814	(20.821.735.518)
1501	Kab. Banjar	21.020.220.621	25.174.768.181	(4.154.547.560)
1502	Kab. Tanah Laut	18.597.530.079	23.918.058.142	(5.320.528.063)
1503	Kab. Tapin	16.487.812.857	19.406.618.531	(2.918.805.674)
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	16.102.940.524	19.356.324.816	(3.253.384.292)
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	14.994.564.935	21.830.937.270	(6.836.372.335)
1506	Kab. Barito Kuala	14.337.930.850	18.204.280.102	(3.866.349.252)
1507	Kab. Tabalong	60.060.795.477	77.159.861.057	(17.099.065.580)
1508	Kab. Kotabaru	19.099.160.469	24.925.186.929	(5.826.026.460)
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	25.595.795.308	30.937.460.207	(5.341.664.899)
1510	Kab. Tanah Bumbu	15.691.052.849	16.771.859.616	(1.080.806.767)
1511	Kab. Balangan	28.537.708.797	36.252.765.695	(7.715.056.898)
1551	Kota Banjarmasin	16.650.149.445	19.888.156.591	(3.238.007.146)
1552	Kota Banjar Baru	13.362.778.539	16.220.332.526	(2.857.553.987)
1600	Prop. Kalimantan Timur	209.178.371.754	281.674.390.441	(72.496.018.687)
1601	Kab. Kutai	247.961.857.626	316.242.250.405	(68.280.392.779)
1602	Kab. Pasir	30.808.332.549	37.439.472.086	(6.631.139.537)
1603	Kab. Bulungan	54.075.196.341	87.670.538.297	(33.595.341.956)
1604	Kab. Berau	23.971.140.359	28.018.398.962	(4.047.258.603)
1605	Kab. Nunukan	52.608.065.508	87.895.375.354	(35.287.309.846)
1606	Kab. Malinau	35.730.290.532	44.273.568.886	(8.543.278.354)
1607	Kab. Kutai Barat	34.808.389.245	34.903.624.696	(95.235.451)
1608	Kab. Kutai Timur	86.996.024.397	106.299.398.527	(19.303.374.130)
1609	Kab. Penajem Paser Utara	65.600.909.253	94.344.281.652	(28.743.372.399)
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	54.745.337.205	85.427.625.631	(30.682.288.426)
1652	Kota Balikpapan	61.569.077.895	81.484.590.009	(19.915.512.114)
1653	Kota Tarakan	71.521.419.563	115.138.659.186	(43.617.239.623)
1654	Kota Bontang	73.416.221.891	74.317.211.237	(900.989.346)
1700	Prop. Sulawesi Utara	17.701.941.852	29.700.587.295	(11.998.645.443)
1702	Kab. Minahasa	12.228.581.709	19.006.265.213	(6.777.683.504)
1703	Kab. Bolaang Mongondow	16.079.624.325	20.981.110.593	(4.901.486.268)
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	9.129.976.504	12.746.351.098	(3.616.374.594)
1705	Kab. Talaud Kepulauan	10.044.435.895	15.492.786.892	(5.448.350.997)
1706	Kab. Minahasa Selatan	10.718.862.885	11.359.021.800	(640.158.915)
1707	Kota Tomohon	9.875.724.049	14.897.188.780	(5.021.464.731)
1708	Kab. Minahasa Utara	8.665.446.141	13.023.442.327	(4.357.996.186)
1751	Kota Manado	13.322.158.821	16.329.858.598	(3.007.699.777)
1753	Kota Bitung	10.116.142.533	14.491.968.025	(4.375.825.492)
1800	Prop. Sulawesi Tengah	24.896.237.274	37.597.301.936	(12.701.064.662)
1801	Kab. Poso	13.920.721.475	20.294.425.001	(6.373.703.526)
1802	Kab. Donggala	13.686.647.805	15.727.432.280	(2.040.784.475)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1803	Kab. Toli-toli	10.700.722.773	12.382.031.821	(1.681.309.048)
1804	Kab. Banggai	13.760.228.853	19.598.966.670	(5.838.737.817)
1805	Kab. Buol	12.186.129.578	13.493.492.866	(1.307.363.288)
1806	Kab. Morowali	24.885.020.294	35.242.427.735	(10.357.407.441)
1807	Kab. Banggai Kepulauan	10.873.422.549	16.624.870.307	(5.751.447.758)
1808	Kab. Parigi Moutong	12.643.594.605	20.939.914.872	(8.296.320.267)
1809	Kab. Tojo Una-Una	10.198.133.188	16.035.154.519	(5.837.021.331)
1851	Kota Palu	9.396.833.373	10.370.377.695	(973.544.322)
1900	Prop. Sulawesi Selatan	78.269.283.612	106.913.481.662	(28.644.198.050)
1901	Kab. Pinrang	14.769.048.213	18.216.204.063	(3.447.155.850)
1902	Kab. Gowa	16.998.548.037	20.726.453.571	(3.727.905.534)
1903	Kab. Wajo	45.985.710.789	58.058.740.468	(12.073.029.679)
1905	Kab. Bone	24.732.243.796	31.654.157.769	(6.921.913.973)
1906	Kab. Tana Toraja	14.230.883.412	19.665.555.782	(5.434.672.370)
1907	Kab. Maros	14.290.902.403	15.359.705.621	(1.068.803.218)
1909	Kab. Luwu	11.911.820.338	18.056.779.430	(6.144.959.092)
1910	Kab. Sinjai	14.057.265.734	16.282.278.649	(2.225.012.915)
1911	Kab. Bulukumba	16.265.147.576	20.958.617.026	(4.693.469.450)
1912	Kab. Bantaeng	14.080.800.255	19.308.449.024	(5.227.648.769)
1913	Kab. Jeneponto	16.073.606.139	22.106.878.585	(6.033.272.446)
1914	Kab. Selayar	14.875.354.690	20.432.643.152	(5.557.288.462)
1915	Kab. Takalar	14.057.598.448	13.857.950.593	199.647.855
1916	Kab. Barru	12.766.547.419	15.384.687.924	(2.618.140.505)
1917	Kab. Sidenreng Rappang	23.141.402.753	28.904.105.999	(5.762.703.246)
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	14.117.262.497	17.478.523.238	(3.361.260.741)
1919	Kab. Soppeng	15.110.001.881	18.287.589.042	(3.177.587.161)
1921	Kab. Enrekang	18.005.780.381	27.065.682.078	(9.059.901.697)
1922	Kab. Luwu Utara	16.766.105.480	22.966.894.969	(6.200.789.489)
1924	Kab. Luwu Timur	12.694.581.003	16.083.420.381	(3.388.839.378)
1951	Kota Makassar	39.477.149.335	47.746.385.322	(8.269.235.987)
1952	Kota Pare-pare	11.718.623.930	13.861.127.256	(2.142.503.326)
1953	Kota Palopo	12.362.483.627	16.653.296.787	(4.290.813.160)
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	21.039.066.360	32.803.289.626	(11.764.223.266)
2001	Kab. Kendari/Konawe	16.734.898.835	22.323.759.153	(5.588.860.318)
2002	Kab. Buton	9.936.099.997	14.445.749.158	(4.509.649.161)
2003	Kab. Muna	14.386.545.656	18.085.940.410	(3.699.394.754)
2004	Kab. Kolaka	16.243.469.927	23.182.773.576	(6.939.303.649)
2005	Kab. Konawe Selatan	11.999.684.781	18.064.502.307	(6.064.817.526)
2006	Kab. Wakatobi	9.507.941.383	14.374.945.473	(4.867.004.090)
2007	Kab. Bombana	9.516.827.206	15.103.967.995	(5.587.140.789)
2008	Kab. Kolaka Utara	8.967.710.277	12.562.752.644	(3.595.042.367)
2051	Kota Kendari	12.476.226.463	15.162.949.185	(2.686.722.722)
2052	Kota Bau-Bau	11.693.215.564	17.179.110.536	(5.485.894.972)
2100	Prop. Maluku	30.703.484.808	49.279.634.362	(18.576.149.554)
2101	Kab. Maluku Tengah	28.332.799.455	62.263.515.158	(33.930.715.703)
2102	Kab. Maluku Tenggara	21.576.835.425	39.383.426.083	(17.806.590.658)
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	19.759.384.486	27.796.932.064	(8.037.547.578)
2104	Kab. Pulau Buru	16.728.629.511	22.988.251.612	(6.259.622.101)
2105	Kab. Aru Kepulauan	8.901.465.885	3.002.664.009	5.898.801.876

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2106	Kab. Seram Bagian Barat	12.710.211.597	12.603.058.699	107.152.898
2107	Kab. Seram Bagian Timur	33.600.977.681	39.310.715.154	(5.709.737.473)
2151	Kota Ambon	12.735.751.869	17.375.219.776	(4.639.467.907)
2200	Prop. Bali	27.581.834.394	28.023.299.924	(441.465.530)
2201	Kab. Buleleng	11.655.237.141	12.522.611.932	(867.374.791)
2202	Kab. Jembrana	9.058.072.581	10.976.136.007	(1.918.063.426)
2203	Kab. Klungkung	8.485.620.271	9.987.548.435	(1.501.928.164)
2204	Kab. Gianyar	10.583.329.264	11.814.159.003	(1.230.829.739)
2205	Kab. Karangasem	9.802.290.861	12.511.131.270	(2.708.840.409)
2206	Kab. Bangli	9.095.706.003	11.633.207.637	(2.537.501.634)
2207	Kab. Badung	37.326.180.285	34.970.935.118	2.355.245.167
2208	Kab. Tabanan	11.599.054.893	11.824.753.581	(225.698.688)
2251	Kota Denpasar	33.197.126.519	35.229.919.022	(2.032.792.503)
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	20.370.994.074	29.430.710.437	(9.059.716.363)
2301	Kab. Lombok Barat	14.215.460.517	7.002.675.229	7.212.785.288
2302	Kab. Lombok Tengah	13.434.958.125	6.466.329.503	6.968.628.622
2303	Kab. Lombok Timur	14.877.391.869	20.456.885.791	(5.579.493.922)
2304	Kab. Bima	9.939.185.397	13.477.158.990	(3.537.973.593)
2305	Kab. Sumbawa	13.671.612.261	18.008.669.648	(4.337.057.387)
2306	Kab. Dompu	10.739.217.861	11.848.321.371	(1.109.103.510)
2307	Kab. Sumbawa Barat	11.851.987.851	16.213.258.157	(4.361.270.306)
2351	Kota Mataram	10.358.013.717	36.206.658.449	(25.848.644.732)
2352	Kota Bima	8.354.275.874	15.169.895.755	(6.815.619.881)
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	28.838.343.816	46.084.415.103	(17.246.071.287)
2401	Kab. Kupang	9.849.695.301	13.534.675.239	(3.684.979.938)
2402	Kab. Belu	11.094.059.350	12.170.878.796	(1.076.819.446)
2403	Kab. Timor Tengah Utara	10.950.644.061	14.298.510.822	(3.347.866.761)
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	12.148.649.452	17.380.490.065	(5.231.840.613)
2405	Kab. Alor	10.592.562.098	13.490.331.210	(2.897.769.112)
2406	Kab. Sikka	9.742.205.061	12.881.794.964	(3.139.589.903)
2407	Kab. Flores Timur	12.711.275.855	19.658.423.336	(6.947.147.481)
2408	Kab. Ende	10.661.509.574	11.856.413.893	(1.194.904.319)
2409	Kab. Ngada	11.451.758.349	14.537.038.860	(3.085.280.511)
2410	Kab. Manggarai	11.860.651.658	17.672.107.542	(5.811.455.884)
2411	Kab. Sumba Timur	12.007.556.037	16.050.569.033	(4.043.012.996)
2412	Kab. Sumba Barat	13.681.424.081	17.289.902.196	(3.608.478.115)
2413	Kab. Lembata	9.779.221.342	10.816.451.364	(1.037.230.022)
2414	Kab. Rote Ndao	8.467.256.911	15.672.853.433	(7.205.596.522)
2415	Kab. Manggarai Barat	9.199.029.964	12.534.942.583	(3.335.912.619)
2451	Kota Kupang	10.605.678.863	12.122.929.392	(1.517.250.529)
2500	Prop. Papua	74.930.336.442	169.665.422.982	(94.735.086.540)
2501	Kab. Jayapura	20.583.659.807	30.698.528.468	(10.114.868.661)
2502	Kab. Biak Numfor	12.383.520.144	16.695.158.384	(4.311.638.240)
2504	Kab. Yapen Waropen	15.626.970.754	47.815.281.224	(32.188.310.470)
2507	Kab. Merauke	27.692.374.023	51.756.698.286	(24.064.324.263)
2508	Kab. Jayawijaya	26.206.069.066	28.977.112.011	(2.771.042.945)
2509	Kab. Paniai	27.195.674.060	39.154.089.887	(11.958.415.827)
2510	Kab. Nabire	21.626.095.431	28.239.043.412	(6.612.947.981)
2511	Kab. Puncak Jaya	17.955.510.204	33.494.613.708	(15.539.103.504)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2512	Kab. Mimika	42.955.561.566	56.920.300.421	(13.964.738.855)
2513	Kab. Mappi	19.107.534.293	25.324.532.209	(6.216.997.916)
2514	Kab. Asmat	19.277.041.318	22.679.908.551	(3.402.867.233)
2515	Kab. Boven Digoel	23.562.244.449	29.312.231.792	(5.749.987.343)
2516	Kab. Sarmi	20.924.604.214	28.326.233.031	(7.401.628.817)
2517	Kab. Keerom	14.376.183.039	24.925.899.150	(10.549.716.111)
2518	Kab. Tolikara	14.828.002.403	5.581.415.862	9.246.586.541
2519	Kab. Pegunungan Bintang	19.805.435.406	30.680.862.655	(10.875.427.249)
2523	Kab. Waropen	20.868.144.382	11.092.916.833	9.775.227.549
2524	Kab. Yahukimo	16.525.945.265	6.426.019.669	10.099.925.596
2525	Kab. Supiori	8.884.679.237	10.169.876.965	(1.285.197.728)
2551	Kota Jayapura	12.534.016.369	17.636.736.144	(5.102.719.775)
2600	Prop. Bengkulu	16.948.492.164	26.856.698.588	(9.908.206.424)
2601	Kab. Bengkulu Utara	13.180.729.581	17.237.162.752	(4.056.433.171)
2602	Kab. Bengkulu Selatan	8.571.645.549	16.290.490.715	(7.718.845.166)
2603	Kab. Rejang Lebong	10.060.200.045	25.801.250.957	(15.741.050.912)
2604	Kab. Seluma	10.200.214.053	12.843.923.998	(2.643.709.945)
2605	Kab. Kaur	10.279.216.063	13.514.081.342	(3.234.865.279)
2606	Kab. Muko-Muko	11.381.902.965	16.920.899.285	(5.538.996.320)
2607	Kab. Lebong	13.175.984.682	13.588.675.939	(412.691.257)
2608	Kab. Kepahiang	8.824.069.413	9.667.826.371	(843.756.958)
2651	Kota Bengkulu	10.125.279.333	12.087.438.459	(1.962.159.126)
2800	Prop. Maluku Utara	25.600.900.824	40.312.259.445	(14.711.358.621)
2801	Kab. Halmahera Barat	16.753.292.386	13.100.724.297	3.652.568.089
2802	Kab. Halmahera Tengah	19.062.003.339	25.739.979.485	(6.677.976.146)
2803	Kab. Halmahera Utara	13.919.989.874	21.323.681.923	(7.403.692.049)
2804	Kab. Halmahera Selatan	17.585.061.194	25.291.771.411	(7.706.710.217)
2805	Kab. Kepulauan Sula	13.919.359.931	34.468.096.223	(20.548.736.292)
2806	Kab. Halmahera Timur	17.581.176.158	25.962.781.190	(8.381.605.032)
2851	Kota Ternate	24.162.820.352	31.268.969.958	(7.106.149.606)
2852	Kota Tidore Kepulauan	12.132.300.037	19.992.529.859	(7.860.229.822)
2900	Prop. Banten	68.744.305.854	79.779.466.209	(11.035.160.355)
2901	Kab. Serang	33.367.121.901	38.104.056.264	(4.736.934.363)
2902	Kab. Pandeglang	15.299.482.869	20.300.713.156	(5.001.230.287)
2903	Kab. Lebak	18.587.353.082	23.972.596.209	(5.385.243.127)
2904	Kab. Tangerang	118.955.356.527	126.695.887.733	(7.740.531.206)
2951	Kota Tangerang	93.833.575.706	103.829.121.486	(9.995.545.780)
2952	Kota Cilegon	30.729.954.357	33.869.840.161	(3.139.885.804)
3000	Prop. Bangka Belitung	12.719.319.192	18.321.409.073	(5.602.089.881)
3001	Kab. Belitung	9.613.026.909	13.313.505.615	(3.700.478.706)
3002	Kab. Bangka	12.252.880.413	16.404.443.421	(4.151.563.008)
3003	Kab. Bangka Barat	10.273.259.853	13.115.422.680	(2.842.162.827)
3004	Kab. Bangka Tengah	9.045.922.581	11.568.076.868	(2.522.154.287)
3005	Kab. Bangka Selatan	9.113.037.237	12.646.164.031	(3.533.126.794)
3006	Kab. Belitung Timur	9.016.561.701	12.473.596.219	(3.457.034.518)
3051	Kota Pangkalpinang	10.404.710.541	12.945.936.502	(2.541.225.961)
3100	Prop. Gorontalo	7.845.229.890	12.194.025.830	(4.348.795.940)
3101	Kab. Gorontalo	12.883.579.855	15.472.630.107	(2.589.050.252)
3102	Kab. Boalemo	11.832.774.956	16.457.158.083	(4.624.383.127)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3103	Kab. Pohuwato	11.615.424.458	15.594.014.240	(3.978.589.782)
3104	Kab. Bone Bolango	11.117.633.314	14.140.356.744	(3.022.723.430)
3151	Kota Gorontalo	8.530.371.058	10.241.817.192	(1.711.446.134)
3200	Prop. Kepulauan Riau	50.903.515.260	75.287.667.045	(24.384.151.785)
3201	Kab. Riau Kepulauan	27.103.842.261	32.446.541.804	(5.342.699.543)
3202	Kab. Karimun	19.280.183.157	25.150.299.618	(5.870.116.461)
3203	Kab. Natuna	87.032.678.185	142.646.429.562	(55.613.751.377)
3204	Kab. Lingga	13.421.342.997	20.950.716.148	(7.529.373.151)
3251	Kota Batam	58.545.500.534	72.937.773.880	(14.392.273.346)
3252	Kota Tanjung Pinang	18.784.810.485	24.216.774.550	(5.431.964.065)
3300	Prop. Irian Jaya Barat	100.997.744.940	151.886.072.749	(50.888.327.809)
3301	Kab. Manokwari	68.471.153.973	185.737.293.589	(117.266.139.616)
3302	Kab. Sorong	82.947.696.237	141.372.245.381	(58.424.549.144)
3303	Kab. Fak-Fak	28.058.671.787	37.121.093.418	(9.062.421.631)
3304	Kab. Sorong Selatan	52.161.797.649	70.445.689.468	(18.283.891.819)
3305	Kab. Raja Ampat	33.870.487.160	59.392.830.602	(25.522.343.442)
3306	Kab. Teluk Bintuni	88.763.787.703	57.404.503.674	31.359.284.029
3307	Kab. Teluk Wondama	20.181.653.743	15.127.157.130	5.054.496.613
3308	Kab. kaimana	30.501.614.593	36.398.808.753	(5.897.194.160)
3351	Kota Sorong	36.341.107.330	49.648.647.975	(13.307.540.645)
3400	Prop. Sulawesi Barat	12.360.310.992	18.926.556.152	(6.566.245.160)
3401	Kab. Majene	15.740.620.701	21.333.375.037	(5.592.754.336)
3402	Kab. Mamuju	16.379.501.226	21.718.837.794	(5.339.336.568)
3403	Kab. Mamuju Utara	15.231.934.559	22.349.531.694	(7.117.597.135)
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	14.158.591.889	18.374.821.844	(4.216.229.955)
3405	Kab. Mamasa	10.112.264.448	16.211.377.498	(6.099.113.050)
	Total	**14.558.415.921.723**	**18.994.935.288.718**	**(4.436.519.366.995)**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	1.565.632.648.250	951.224.256.013	614.408.392.237
0200	Prop. Jawa Barat	139.048.549.920	121.394.098.553	17.654.451.367
0205	Kab. Bogor	72.735.818.450	45.460.959.073	27.274.859.377
0206	Kab. Sukabumi	7.724.750.930	3.403.722.886	4.321.028.044
0207	Kab. Cianjur	18.360.413.010	7.818.993.542	10.541.419.468
0208	Kab. Bekasi	85.303.326.290	58.914.838.605	26.388.487.685
0209	Kab. Karawang	27.500.224.850	46.384.400.116	(18.884.175.266)
0210	Kab. Purwakarta	16.029.618.130	5.383.357.616	10.646.260.514
0211	Kab. Subang	4.845.806.290	2.512.276.657	2.333.529.633
0212	Kab. Bandung	34.761.209.810	22.728.376.354	12.032.833.456
0213	Kab. Sumedang	3.941.798.610	2.926.840.098	1.014.958.512
0214	Kab. Garut	3.034.574.930	2.462.337.077	572.237.853
0215	Kab. Tasikmalaya	1.679.623.250	1.684.966.200	(5.342.950)
0216	Kab. Ciamis	2.433.232.210	3.085.758.118	(652.525.908)
0217	Kab. Cirebon	7.334.832.210	4.570.847.832	2.763.984.378
0218	Kab. Kuningan	4.028.485.970	2.140.357.962	1.888.128.008
0219	Kab. Indramayu	5.687.525.970	3.773.410.494	1.914.115.476
0220	Kab. Majalengka	5.766.720.210	2.260.011.794	3.506.708.416
0251	Kota Bandung	107.350.780.370	29.641.605.562	77.709.174.808
0252	Kota Bogor	35.476.297.810	23.705.998.174	11.770.299.636
0253	Kota Sukabumi	4.059.622.610	3.678.764.979	380.857.631
0254	Kota Cirebon	9.976.325.330	5.886.659.517	4.089.665.813
0257	Kota Bekasi	61.610.838.610	42.389.123.160	19.221.715.450
0258	Kota Depok	54.263.943.250	40.495.400.015	13.768.543.235
0260	Kota Tasikmalaya	4.314.695.250	3.338.714.143	975.981.107
0261	Kota Cimahi	7.234.504.530	9.850.314.802	(2.615.810.272)
0262	Kota Banjar	1.391.828.050	1.639.402.462	(247.574.412)
0300	Prop. Jawa Tengah	40.644.975.200	28.061.346.150	12.583.629.050
0301	Kab. Semarang	4.852.431.570	4.259.455.680	592.975.890
0302	Kab. Kendal	3.167.786.450	3.337.145.077	(169.358.627)
0303	Kab. Demak	2.642.446.930	2.255.928.955	386.517.975
0304	Kab. Grobogan	2.112.729.810	1.887.624.037	225.105.773
0305	Kab. Pekalongan	1.972.734.930	1.918.667.285	54.067.645
0306	Kab. Batang	2.236.516.690	1.995.870.444	240.646.246
0307	Kab. Tegal	2.841.530.450	2.397.727.775	443.802.675
0308	Kab. Brebes	2.075.669.330	1.967.635.673	108.033.657
0309	Kab. Pati	3.141.534.290	2.636.729.039	504.805.251
0310	Kab. Kudus	6.176.776.530	3.709.917.435	2.466.859.095
0311	Kab. Pemalang	2.929.474.770	3.082.917.144	(153.442.374)
0312	Kab. Jepara	3.397.828.690	3.006.503.223	391.325.467
0313	Kab. Rembang	1.796.476.370	1.766.234.075	30.242.295
0314	Kab. Blora	2.081.648.210	1.909.880.862	171.767.348

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0315	Kab. Banyumas	6.696.896.210	6.310.574.836	386.321.374
0316	Kab. Cilacap	4.387.038.930	2.753.645.288	1.633.393.642
0317	Kab. Purbalingga	2.102.180.050	2.103.211.382	(1.031.332)
0318	Kab. Banjarnegara	2.018.447.570	1.676.087.865	342.359.705
0319	Kab. Magelang	3.481.632.850	2.873.370.190	608.262.660
0320	Kab. Temanggung	2.163.231.570	1.830.425.090	332.806.480
0321	Kab. Wonosobo	2.090.623.570	1.691.910.847	398.712.723
0322	Kab. Purworejo	2.206.105.170	2.419.738.963	(213.633.793)
0323	Kab. Kebumen	2.039.437.650	2.421.837.077	(382.399.427)
0324	Kab. Klaten	5.746.791.250	4.373.957.374	1.372.833.876
0325	Kab. Boyolali	2.910.816.850	2.155.512.946	755.303.904
0326	Kab. Sragen	2.667.186.770	1.810.689.327	856.497.443
0327	Kab. Sukoharjo	6.159.634.130	5.475.388.744	684.245.386
0328	Kab. Karanganyar	6.441.765.330	4.460.870.560	1.980.894.770
0329	Kab. Wonogiri	1.594.480.850	1.503.218.779	91.262.071
0351	Kota Semarang	77.836.421.970	52.558.654.386	25.277.767.584
0352	Kota Salatiga	4.523.065.810	3.154.488.759	1.368.577.051
0353	Kota Pekalongan	4.072.170.450	3.269.028.908	803.141.542
0354	Kota Tegal	4.055.118.290	3.143.378.039	911.740.251
0355	Kota Magelang	2.536.254.290	2.070.042.208	466.212.082
0356	Kota Surakarta	18.338.652.370	10.222.099.535	8.116.552.835
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	11.303.211.040	7.140.381.894	4.162.829.146
0401	Kab. Bantul	8.494.857.810	4.993.282.880	3.501.574.930
0402	Kab. Sleman	22.946.969.170	14.683.843.309	8.263.125.861
0403	Kab. Gunungkidul	1.605.802.450	1.637.080.928	(31.278.478)
0404	Kab. Kulonprogo	1.612.282.450	1.884.746.752	(272.464.302)
0451	Kota Yogyakarta	16.683.451.730	10.446.078.883	6.237.372.847
0500	Prop. Jawa Timur	89.250.687.360	57.581.919.141	31.668.768.219
0501	Kab. Gresik	17.453.492.690	6.279.650.982	11.173.841.708
0502	Kab. Mojokerto	4.691.403.090	2.992.714.094	1.698.688.996
0503	Kab. Sidoarjo	47.590.199.890	33.033.315.379	14.556.884.511
0504	Kab. Jombang	2.432.414.290	1.366.591.894	1.065.822.396
0505	Kab. Sampang	1.346.363.090	1.277.111.265	69.251.825
0506	Kab. Pamekasan	1.537.729.490	1.542.210.971	(4.481.481)
0507	Kab. Sumenep	1.952.069.330	1.383.291.472	568.777.858
0508	Kab. Bangkalan	2.044.729.170	1.415.081.144	629.648.026
0509	Kab. Bondowoso	1.599.979.090	1.390.051.664	209.927.426
0510	Kab. Situbondo	1.727.961.170	1.898.294.324	(170.333.154)
0511	Kab. Banyuwangi	3.994.311.250	3.979.251.778	15.059.472
0512	Kab. Jember	5.758.391.890	4.201.622.713	1.556.769.177
0513	Kab. Malang	7.669.849.810	7.442.381.415	227.468.395
0514	Kab. Pasuruan	12.727.200.210	5.536.739.946	7.190.460.264

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0515	Kab. Probolinggo	2.092.629.970	1.785.166.319	307.463.651
0516	Kab. Lumajang	2.340.349.010	1.834.085.859	506.263.151
0517	Kab. Kediri	3.581.560.530	3.048.734.938	532.825.592
0518	Kab. Tulungagung	4.082.445.650	3.960.420.598	122.025.052
0519	Kab. Nganjuk	2.806.313.170	2.327.159.285	479.153.885
0520	Kab. Trenggalek	1.898.448.850	1.748.612.160	149.836.690
0521	Kab. Blitar	1.936.372.690	1.729.793.288	206.579.402
0522	Kab. Madiun	2.036.775.890	1.633.922.600	402.853.290
0523	Kab. Ngawi	1.704.471.890	1.631.914.767	72.557.123
0524	Kab. Magetan	1.547.936.850	1.566.300.344	(18.363.494)
0525	Kab. Ponorogo	2.106.704.210	1.846.146.678	260.557.532
0526	Kab. Pacitan	1.435.028.690	1.401.388.646	33.640.044
0527	Kab. Bojonegoro	2.548.704.850	2.492.476.707	56.228.143
0528	Kab. Tuban	3.145.217.490	2.512.782.876	632.434.614
0529	Kab. Lamongan	2.189.573.970	2.151.733.384	37.840.586
0551	Kota Surabaya	210.693.445.970	128.417.452.261	82.275.993.709
0552	Kota Mojokerto	2.893.515.730	4.102.181.594	(1.208.665.864)
0553	Kota Malang	22.316.084.690	10.791.027.279	11.525.057.411
0554	Kota Pasuruan	2.453.737.810	2.089.788.052	363.949.758
0555	Kota Probolinggo	2.392.514.770	2.297.006.638	95.508.132
0556	Kota Blitar	2.754.452.690	1.956.453.878	797.998.812
0557	Kota Kediri	5.610.925.010	4.223.112.755	1.387.812.255
0558	Kota Madiun	3.547.288.530	3.079.476.890	467.811.640
0559	Kota Batu	2.954.103.890	2.086.736.830	867.367.060
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	2.455.842.050	2.453.778.564	2.063.486
0601	Kab. Aceh Besar	1.382.903.890	1.633.548.019	(250.644.129)
0602	Kab. Pidie	1.376.183.890	1.569.215.887	(193.031.997)
0603	Kab. Aceh Utara	1.338.103.890	1.442.677.078	(104.573.188)
0604	Kab. Aceh Timur	1.580.023.890	1.328.419.205	251.604.685
0605	Kab. Aceh Selatan	1.270.007.890	1.292.832.568	(22.824.678)
0606	Kab. Aceh Barat	1.405.303.890	1.633.884.325	(228.580.435)
0607	Kab. Aceh Tengah	1.257.463.890	1.316.348.718	(58.884.828)
0608	Kab. Aceh Tenggara	1.315.703.890	1.273.410.290	42.293.600
0609	Kab. Simeuleu	1.245.289.040	1.238.983.285	6.305.755
0610	Kab. Aceh Singkil	1.270.007.890	1.294.617.810	(24.609.920)
0611	Kab. Bireuen	1.338.103.890	1.441.211.785	(103.107.895)
0612	Kab. Aceh Barat Daya	1.246.263.890	1.317.885.735	(71.621.845)
0613	Kab. Gayo Lues	1.270.007.890	1.297.142.914	(27.135.024)
0614	Kab. Aceh Jaya	1.239.543.890	624.625.758	614.918.132
0615	Kab. Nagan Raya	1.250.743.890	1.269.933.823	(19.189.933)
0616	Kab. Aceh Tamiang	1.562.103.890	1.381.272.754	180.831.136
0617	Kab. Bener Meriah	1.244.023.890	3.093.316.382	(1.849.292.492)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0651	Kota Banda Aceh	1.942.903.890	2.810.664.271	(867.760.381)
0652	Kota Sabang	1.304.503.890	1.309.396.997	(4.893.107)
0653	Kota Langsa	1.517.303.890	1.535.114.748	(17.810.858)
0654	Kota Lhokseumawe	1.517.303.890	1.602.687.249	(85.383.359)
0700	Prop. Sumatera Utara	37.898.601.600	16.941.101.519	20.957.500.081
0701	Kab. Deli Serdang	25.937.851.730	12.126.461.982	13.811.389.748
0702	Kab. Tanah Karo	2.888.543.570	2.020.788.821	867.754.749
0703	Kab. Langkat	2.167.511.890	7.973.211.614	(5.805.699.724)
0704	Kab. Tapanuli Tengah	1.442.382.930	1.322.639.373	119.743.557
0705	Kab. Simalungun	12.526.253.650	1.795.680.841	10.730.572.809
0706	Kab. Labuhanbatu	5.985.419.730	2.940.732.289	3.044.687.441
0707	Kab. Dairi	1.309.564.370	1.301.903.165	7.661.205
0708	Kab. Tapanuli Utara	1.434.582.610	1.334.343.765	100.238.845
0709	Kab. Tapanuli Selatan	1.860.161.490	1.326.170.260	533.991.230
0710	Kab. Asahan	4.639.838.930	2.491.464.244	2.148.374.686
0711	Kab. Nias	1.275.694.930	1.417.923.809	(142.228.879)
0712	Kab. Toba Samosir	1.308.596.050	1.235.164.242	73.431.808
0713	Kab. Mandailing Natal	1.417.555.410	1.310.122.288	107.433.122
0714	Kab. Nias Selatan	1.236.558.930	33.371.306	1.203.187.624
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	1.245.262.290	1.226.103.890	19.158.400
0716	Kab. Humbang Hasundutan	1.266.862.930	1.233.274.354	33.588.576
0717	Kab. Samosir	1.266.592.210	1.226.103.890	40.488.320
0718	Kab. Serdang Bedagai	2.072.169.810	1.726.491.218	345.678.592
0751	Kota Medan	94.327.543.890	39.754.679.536	54.572.864.354
0752	Kota Tebingtinggi	3.369.942.610	2.141.240.082	1.228.702.528
0753	Kota Binjai	3.726.645.970	2.367.820.143	1.358.825.827
0754	Kota Pematangsiantar	3.813.431.890	2.908.058.260	905.373.630
0755	Kota Tanjungbalai	2.336.116.050	1.650.377.861	685.738.189
0756	Kota Sibolga	1.519.309.650	1.340.055.221	179.254.429
0757	Kota Padang Sidempuan	1.872.610.130	1.721.547.615	151.062.515
0800	Prop. Sumatera Barat	4.767.196.800	4.757.763.390	9.433.410
0801	Kab. Agam	2.346.103.890	1.552.675.801	793.428.089
0802	Kab. Pasaman	1.290.103.890	1.280.110.687	9.993.203
0803	Kab. Limapuluh Kota	1.450.103.890	1.498.807.132	(48.703.242)
0804	Kab. Solok	1.306.103.890	1.301.784.792	4.319.098
0805	Kab. Padang Pariaman	1.386.103.890	1.427.504.036	(41.400.146)
0806	Kab. Pesisir Selatan	1.278.583.890	3.447.443.523	(2.168.859.633)
0807	Kab. Tanah Datar	1.418.103.890	1.370.991.273	47.112.617
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	1.309.303.890	1.284.862.543	24.441.347
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	1.260.663.890	1.272.334.328	(11.670.438)
0810	Kab. Dharmasraya	1.418.103.890	334.563.045	1.083.540.845
0811	Kab. Solok Selatan	2.373.611.090	1.256.621.852	1.116.989.238

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0812	Kab. Pasaman Barat	4.692.983.890	1.818.934.521	2.874.049.369
0851	Kota Bukittinggi	2.826.103.890	2.052.753.576	773.350.314
0852	Kota Padang Panjang	1.430.903.890	1.449.482.210	(18.578.320)
0853	Kota Solok	1.386.103.890	1.422.497.068	(36.393.178)
0854	Kota Sawahlunto	1.245.303.890	1.232.073.010	13.230.880
0855	Kota Padang	10.735.863.890	7.101.313.370	3.634.550.520
0856	Kota Payakumbuh	1.786.103.890	1.560.186.894	225.916.996
0857	Kota Pariaman	1.424.503.890	2.851.973.279	(1.427.469.389)
0900	Prop. Riau	20.135.200.000	6.438.141.699	13.697.058.301
0901	Kab. Kampar	11.210.103.890	3.960.666.343	7.249.437.547
0902	Kab. Bengkalis	9.181.303.890	2.154.463.346	7.026.840.544
0904	Kab. Indragiri Hulu	6.890.103.890	1.583.368.429	5.306.735.461
0905	Kab. Indragiri Hilir	6.934.903.890	1.583.842.062	5.351.061.828
0906	Kab. Pelalawan	8.918.903.890	1.806.964.149	7.111.939.741
0907	Kab. Rokan Hulu	11.044.983.890	4.532.764.152	6.512.219.738
0908	Kab. Rokan Hilir	9.156.983.890	3.295.191.244	5.861.792.646
0909	Kab. Siak	5.155.703.890	2.169.528.333	2.986.175.557
0912	Kab. Kuantan Singingi	3.157.623.890	1.283.626.860	1.873.997.030
0951	Kota Pekanbaru	14.495.223.890	10.852.319.793	3.642.904.097
0953	Kota Dumai	7.882.103.890	2.892.305.249	4.989.798.641
1000	Prop. Jambi	12.304.541.440	1.018.167.787	11.286.373.653
1001	Kab. Batanghari	12.595.808.210	1.331.043.951	11.264.764.259
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	17.143.690.450	1.794.722.116	15.348.968.334
1003	Kab. Bungo	1.499.375.570	1.561.523.408	(62.147.838)
1004	Kab. Sarolangun	1.379.264.210	1.293.411.717	85.852.493
1005	Kab. Kerinci	1.323.519.570	1.232.886.637	90.632.933
1006	Kab. Merangin	1.388.109.650	1.300.550.461	87.559.189
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	6.342.471.250	1.244.991.730	5.097.479.520
1008	Kab. Tebo	1.341.463.890	1.260.138.617	81.325.273
1009	Kab. Muaro Jambi	15.505.929.170	2.067.649.671	13.438.279.499
1051	Kota Jambi	2.959.572.690	3.230.513.830	(270.941.140)
1100	Prop. Sumatera Selatan	15.295.044.960	17.708.823.853	(2.413.778.893)
1103	Kab. Musi Banyu Asin	33.810.251.090	33.916.106.423	(105.855.333)
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	1.539.147.730	1.486.333.489	52.814.241
1105	Kab. Muara Enim	1.610.103.890	1.775.142.690	(165.038.800)
1106	Kab. Lahat	4.176.433.490	1.549.462.790	2.626.970.700
1107	Kab. Musi Rawas	3.372.190.290	1.310.111.038	2.062.079.252
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	3.594.103.890	1.439.666.016	2.154.437.874
1109	Kab. Banyu Asin	4.490.103.890	21.720.947.550	(17.230.843.660)
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.539.703.890	1.273.875.681	265.828.209
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.242.103.890	1.245.992.147	(3.888.257)
1112	Kab. Ogan Ilir	2.630.062.930	1.374.994.539	1.255.068.391

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1151	Kota Palembang	15.178.103.890	15.895.826.366	(717.722.476)
1153	Kota Prabumulih	1.450.103.890	1.597.687.167	(147.583.277)
1154	Kota Pagar Alam	1.563.517.650	1.359.619.775	203.897.875
1155	Kota Lubuk Linggau	2.149.703.890	2.066.070.259	83.633.631
1200	Prop. Lampung	8.118.701.600	5.351.345.687	2.767.355.913
1201	Kab. Lampung Selatan	3.769.360.210	2.296.318.739	1.473.041.471
1202	Kab. Lampung Tengah	6.685.074.770	2.102.038.563	4.583.036.207
1203	Kab. Lampung Utara	2.954.130.130	5.718.929.888	(2.764.799.758)
1204	Kab. Lampung Barat	1.259.198.930	1.251.697.614	7.501.316
1205	Kab. Tulang Bawang	4.618.130.770	1.966.608.950	2.651.521.820
1206	Kab. Tanggamus	1.815.007.570	1.435.961.380	379.046.190
1207	Kab. Lampung Timur	4.469.406.290	3.029.176.959	1.440.229.331
1208	Kab. Way Kanan	5.226.130.130	4.372.295.895	853.834.235
1251	Kota Bandar Lampung	10.924.904.530	9.720.576.121	1.204.328.409
1252	Kota Metro	3.014.501.970	1.676.535.084	1.337.966.886
1300	Prop. Kalimantan Barat	5.881.663.200	3.292.554.208	2.589.108.992
1301	Kab. Sambas	1.968.048.210	1.392.209.348	575.838.862
1302	Kab. Sanggau	1.943.061.970	1.627.601.405	315.460.565
1303	Kab. Sintang	2.018.212.050	1.515.563.709	502.648.341
1304	Kab. Pontianak	3.464.573.010	2.284.779.385	1.179.793.625
1305	Kab. Kapuas Hulu	1.739.704.530	1.272.332.560	467.371.970
1306	Kab. Ketapang	2.248.723.410	2.399.956.229	(151.232.819)
1307	Kab. Bengkayang	2.324.153.170	1.314.666.164	1.009.487.006
1308	Kab. Landak	1.568.453.330	1.320.917.384	247.535.946
1309	Kab. Melawi	1.727.147.090	1.328.548.229	398.598.861
1310	Kab. Sekadau	1.568.453.330	1.287.178.438	281.274.892
1351	Kota Pontianak	14.556.557.010	8.352.491.230	6.204.065.780
1352	Kota Singkawang	3.112.812.370	2.234.209.405	878.602.965
1400	Prop. Kalimantan Tengah	3.392.164.160	1.889.203.487	1.502.960.673
1401	Kab. Kapuas	1.449.887.570	1.366.727.280	83.160.290
1402	Kab. Barito Utara	2.258.221.650	1.401.293.956	856.927.694
1403	Kab. Barito Selatan	1.278.864.210	1.351.282.962	(72.418.752)
1404	Kab. Kotawaringin Timur	4.013.133.010	3.314.879.244	698.253.766
1405	Kab. Kotawaringin Barat	3.038.545.490	1.522.603.415	1.515.942.075
1406	Kab. Katingan	3.113.378.130	2.351.185.329	762.192.801
1407	Kab. Seruyan	4.845.668.050	7.344.028.799	(2.498.360.749)
1408	Kab. Sukamara	1.395.815.890	1.391.400.796	4.415.094
1409	Kab. Lamandau	1.976.138.450	1.229.174.866	746.963.584
1410	Kab. Gunung Mas	1.278.864.850	1.230.635.730	48.229.120
1411	Kab. Pulang Pisau	1.278.864.850	1.252.391.369	26.473.481
1412	Kab. Murung Raya	1.278.864.210	1.230.001.490	48.862.720
1413	Kab. Barito Timur	1.389.579.090	1.424.831.783	(35.252.693)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1451	Kota Palangkaraya	2.138.285.650	2.540.287.085	(402.001.435)
1500	Prop. Kalimantan Selatan	5.075.641.120	3.906.374.332	1.169.266.788
1501	Kab. Banjar	2.654.542.930	1.940.493.195	714.049.735
1502	Kab. Tanah Laut	3.016.454.610	2.541.974.016	474.480.594
1503	Kab. Tapin	1.353.362.770	1.796.173.401	(442.810.631)
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.379.562.450	1.322.478.567	57.083.883
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.471.637.970	1.399.984.631	71.653.339
1506	Kab. Barito Kuala	1.417.016.530	1.390.204.739	26.811.791
1507	Kab. Tabalong	1.446.061.010	1.438.142.816	7.918.194
1508	Kab. Kotabaru	4.800.162.130	4.545.441.108	254.721.022
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	1.430.715.730	1.359.573.365	71.142.365
1510	Kab. Tanah Bumbu	3.067.607.890	3.646.686.692	(579.078.802)
1511	Kab. Balangan	1.287.487.570	1.243.783.378	43.704.192
1551	Kota Banjarmasin	10.144.473.170	6.602.172.114	3.542.301.056
1552	Kota Banjar Baru	2.772.830.290	2.296.156.992	476.673.298
1600	Prop. Kalimantan Timur	15.209.094.720	9.828.488.494	5.380.606.226
1601	Kab. Kutai	3.741.100.370	2.537.518.962	1.203.581.408
1602	Kab. Pasir	1.417.454.290	1.381.500.588	35.953.702
1603	Kab. Bulungan	2.666.103.890	1.361.706.381	1.304.397.509
1604	Kab. Berau	2.749.943.890	1.702.632.009	1.047.311.881
1605	Kab. Nunukan	3.466.103.890	4.395.370.393	(929.266.503)
1606	Kab. Malinau	1.546.103.890	1.284.711.685	261.392.205
1607	Kab. Kutai Barat	10.620.663.890	2.134.987.211	8.485.676.679
1608	Kab. Kutai Timur	4.042.103.890	2.169.992.715	1.872.111.175
1609	Kab. Penajem Paser Utara	1.353.671.250	1.386.770.942	(33.099.692)
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	10.654.583.890	12.313.726.769	(1.659.142.879)
1652	Kota Balikpapan	29.953.646.930	18.428.563.329	11.525.083.601
1653	Kota Tarakan	2.890.145.490	2.793.610.700	96.534.790
1654	Kota Bontang	1.674.103.890	3.075.399.457	(1.401.295.567)
1700	Prop. Sulawesi Utara	3.383.424.160	2.409.653.169	973.770.991
1702	Kab. Minahasa	2.274.903.890	1.473.523.999	801.379.891
1703	Kab. Bolaang Mongondow	1.614.009.170	1.316.336.630	297.672.540
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	1.476.165.330	1.371.536.729	104.628.601
1705	Kab. Talaud Kepulauan	1.258.103.890	1.261.987.842	(3.883.952)
1706	Kab. Minahasa Selatan	1.614.177.490	1.351.351.782	262.825.708
1707	Kota Tomohon	1.574.660.690	107.345.376	1.467.315.314
1708	Kab. Minahasa Utara	1.741.109.970	1.554.425.298	186.684.672
1751	Kota Manado	10.372.690.130	6.426.769.258	3.945.920.872
1753	Kota Bitung	2.642.811.090	4.606.450.592	(1.963.639.502)
1800	Prop. Sulawesi Tengah	1.330.006.720	1.294.574.816	35.431.904
1801	Kab. Poso	1.314.232.530	1.311.013.731	3.218.799
1802	Kab. Donggala	1.690.349.650	1.338.673.487	351.676.163

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1803	Kab. Toli-toli	1.398.114.130	3.769.189.498	(2.371.075.368)
1804	Kab. Banggai	1.748.795.090	1.482.302.479	266.492.611
1805	Kab. Buol	1.287.852.370	3.510.200.673	(2.222.348.303)
1806	Kab. Morowali	1.307.861.970	1.286.487.686	21.374.284
1807	Kab. Banggai Kepulauan	1.279.193.170	1.253.880.612	25.312.558
1808	Kab. Parigi Moutong	1.532.536.530	1.562.904.125	(30.367.595)
1809	Kab. Tojo Una-Una	1.279.193.170	1.278.298.115	895.055
1851	Kota Palu	4.742.937.170	2.912.082.220	1.830.854.950
1900	Prop. Sulawesi Selatan	13.232.583.520	6.532.305.585	6.700.277.935
1901	Kab. Pinrang	1.941.479.250	1.613.174.247	328.305.003
1902	Kab. Gowa	3.306.103.890	2.527.955.865	778.148.025
1903	Kab. Wajo	1.701.006.290	1.888.426.793	(187.420.503)
1905	Kab. Bone	2.198.729.170	1.779.336.030	419.393.140
1906	Kab. Tana Toraja	1.527.055.570	1.318.406.640	208.648.930
1907	Kab. Maros	2.718.311.250	1.973.453.116	744.858.134
1909	Kab. Luwu	1.426.738.130	1.412.159.569	14.578.561
1910	Kab. Sinjai	1.572.710.610	1.355.404.084	217.306.526
1911	Kab. Bulukumba	1.837.989.330	1.692.193.214	145.796.116
1912	Kab. Bantaeng	1.322.103.890	1.457.771.322	(135.667.432)
1913	Kab. Jeneponto	1.310.417.490	1.272.560.428	37.857.062
1914	Kab. Selayar	1.313.779.410	1.284.901.323	28.878.087
1915	Kab. Takalar	1.343.198.290	1.355.718.973	(12.520.683)
1916	Kab. Barru	1.747.835.730	1.444.657.906	303.177.824
1917	Kab. Sidenreng Rappang	1.909.486.930	1.567.139.783	342.347.147
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.444.200.530	1.490.406.086	(46.205.556)
1919	Kab. Soppeng	1.724.354.130	1.477.298.788	247.055.342
1921	Kab. Enrekang	1.346.484.050	1.285.133.090	61.350.960
1922	Kab. Luwu Utara	1.707.627.090	1.473.581.689	234.045.401
1924	Kab. Luwu Timur	1.426.738.130	1.744.752.184	(318.014.054)
1951	Kota Makassar	42.026.103.890	19.984.382.674	22.041.721.216
1952	Kota Pare-pare	2.349.943.890	1.911.285.112	438.658.778
1953	Kota Palopo	1.928.326.610	1.618.872.138	309.454.472
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	1.222.560.320	586.478.560	636.081.760
2001	Kab. Kendari/Konawe	1.312.645.970	1.334.625.534	(21.979.564)
2002	Kab. Buton	1.311.546.450	1.242.592.629	68.953.821
2003	Kab. Muna	1.386.174.930	1.280.065.162	106.109.768
2004	Kab. Kolaka	1.585.994.450	1.460.778.211	125.216.239
2005	Kab. Konawe Selatan	1.284.128.210	1.264.897.029	19.231.181
2006	Kab. Wakatobi	1.287.188.690	1.226.233.234	60.955.456
2007	Kab. Bombana	1.287.189.330	1.226.103.890	61.085.440
2008	Kab. Kolaka Utara	1.273.098.450	1.228.983.890	44.114.560
2051	Kota Kendari	4.633.966.930	2.706.719.055	1.927.247.875

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2052	Kota Bau-Bau	1.789.346.770	1.635.954.493	153.392.277
2100	Prop. Maluku	548.672.000	587.123.144	(38.451.144)
2101	Kab. Maluku Tengah	1.322.103.890	1.282.573.465	39.530.425
2102	Kab. Maluku Tenggara	1.402.103.890	1.292.743.634	109.360.256
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.290.103.890	1.239.165.650	50.938.240
2104	Kab. Pulau Buru	1.322.103.890	1.226.103.890	96.000.000
2105	Kab. Aru Kepulauan	1.251.703.890	1.226.103.890	25.600.000
2106	Kab. Seram Bagian Barat	1.267.703.890	1.227.987.005	39.716.885
2107	Kab. Seram Bagian Timur	1.258.103.890	1.236.885.507	21.218.383
2151	Kota Ambon	2.889.591.890	2.610.740.044	278.851.846
2200	Prop. Bali	13.996.176.160	12.813.346.451	1.182.829.709
2201	Kab. Buleleng	3.422.608.850	3.026.059.545	396.549.305
2202	Kab. Jembrana	2.525.737.170	2.348.761.986	176.975.184
2203	Kab. Klungkung	1.718.981.970	1.822.186.390	(103.204.420)
2204	Kab. Gianyar	3.236.605.010	4.072.956.077	(836.351.067)
2205	Kab. Karangasem	1.720.930.130	2.229.889.649	(508.959.519)
2206	Kab. Bangli	1.522.008.530	1.583.725.607	(61.717.077)
2207	Kab. Badung	23.928.476.370	23.956.707.137	(28.230.767)
2208	Kab. Tabanan	3.812.459.730	3.290.525.737	521.933.993
2251	Kota Denpasar	25.131.831.890	19.904.666.273	5.227.165.617
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	2.026.603.520	1.341.960.360	684.643.160
2301	Kab. Lombok Barat	2.858.274.130	1.634.723.796	1.223.550.334
2302	Kab. Lombok Tengah	1.755.470.290	1.306.704.633	448.765.657
2303	Kab. Lombok Timur	1.758.069.330	1.487.686.346	270.382.984
2304	Kab. Bima	1.321.914.450	1.257.752.018	64.162.432
2305	Kab. Sumbawa	1.669.817.170	1.554.784.075	115.033.095
2306	Kab. Dompu	1.316.998.610	1.304.542.786	12.455.824
2307	Kab. Sumbawa Barat	1.414.096.850	1.325.055.665	89.041.185
2351	Kota Mataram	5.601.388.370	4.943.798.119	657.590.251
2352	Kota Bima	1.445.319.890	1.352.189.397	93.130.493
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	724.346.240	1.652.435.510	(928.089.270)
2401	Kab. Kupang	1.351.456.210	1.467.085.895	(115.629.685)
2402	Kab. Belu	1.436.605.650	1.369.179.638	67.426.012
2403	Kab. Timor Tengah Utara	1.247.812.050	1.253.177.394	(5.365.344)
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	1.258.639.570	1.271.161.587	(12.522.017)
2405	Kab. Alor	1.258.395.090	1.275.077.906	(16.682.816)
2406	Kab. Sikka	1.501.749.330	1.412.271.492	89.477.838
2407	Kab. Flores Timur	1.346.716.370	1.247.581.298	99.135.072
2408	Kab. Ende	1.384.816.210	1.282.788.274	102.027.936
2409	Kab. Ngada	1.286.323.410	1.262.643.106	23.680.304
2410	Kab. Manggarai	1.272.320.210	1.304.719.738	(32.399.528)
2411	Kab. Sumba Timur	1.318.711.890	1.327.061.965	(8.350.075)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2412	Kab. Sumba Barat	1.296.548.690	1.288.988.018	7.560.672
2413	Kab. Lembata	1.256.204.370	1.248.178.151	8.026.219
2414	Kab. Rote Ndao	1.252.039.250	1.244.165.290	7.873.960
2415	Kab. Manggarai Barat	1.365.645.010	1.289.189.842	76.455.168
2451	Kota Kupang	2.681.063.890	2.239.808.987	441.254.903
2500	Prop. Papua	1.686.794.880	2.166.845.828	(480.050.948)
2501	Kab. Jayapura	1.866.103.890	1.454.275.852	411.828.038
2502	Kab. Biak Numfor	1.728.791.250	3.724.432.743	(1.995.641.493)
2504	Kab. Yapen Waropen	1.632.796.370	1.268.086.859	364.709.511
2507	Kab. Merauke	1.571.191.890	1.786.879.049	(215.687.159)
2508	Kab. Jayawijaya	1.345.201.490	1.260.280.089	84.921.401
2509	Kab. Paniai	1.615.316.690	1.226.103.890	389.212.800
2510	Kab. Nabire	1.728.791.250	1.332.213.650	396.577.600
2511	Kab. Puncak Jaya	1.642.396.370	1.226.103.890	416.292.480
2512	Kab. Mimika	1.820.791.890	1.827.362.831	(6.570.941)
2513	Kab. Mappi	1.271.966.290	1.226.103.890	45.862.400
2514	Kab. Asmat	1.259.168.210	1.226.103.890	33.064.320
2515	Kab. Boven Digoel	1.268.766.290	1.226.103.890	42.662.400
2516	Kab. Sarmi	1.290.103.890	1.226.103.890	64.000.000
2517	Kab. Keerom	1.322.103.890	1.227.063.890	95.040.000
2518	Kab. Tolikara	1.290.103.890	1.226.103.890	64.000.000
2519	Kab. Pegunungan Bintang	1.290.103.890	1.226.103.890	64.000.000
2523	Kab. Waropen	1.289.956.050	1.226.103.890	63.852.160
2524	Kab. Yahukimo	1.290.103.890	1.226.103.890	64.000.000
2525	Kab. Supiori	1.235.665.490	4.472.595.312	(3.236.929.822)
2551	Kota Jayapura	3.509.834.450	3.899.262.504	(389.428.054)
2600	Prop. Bengkulu	1.320.948.000	424.639.128	896.308.872
2601	Kab. Bengkulu Utara	1.878.331.730	1.291.695.428	586.636.302
2602	Kab. Bengkulu Selatan	1.453.327.570	1.293.292.720	160.034.850
2603	Kab. Rejang Lebong	1.814.331.730	1.390.744.891	423.586.839
2604	Kab. Seluma	1.363.186.770	1.228.782.994	134.403.776
2605	Kab. Kaur	1.258.130.770	1.237.210.860	20.919.910
2606	Kab. Muko-Muko	1.398.331.730	1.231.523.444	166.808.286
2607	Kab. Lebong	1.398.331.730	1.226.103.889	172.227.841
2608	Kab. Kepahiang	1.462.331.730	1.235.335.256	226.996.474
2651	Kota Bengkulu	4.292.423.250	2.582.979.554	1.709.443.696
2800	Prop. Maluku Utara	212.672.000	204.822.183	7.849.817
2801	Kab. Halmahera Barat	1.264.503.890	1.228.510.560	35.993.330
2802	Kab. Halmahera Tengah	1.258.103.890	1.226.495.061	31.608.829
2803	Kab. Halmahera Utara	1.354.103.890	1.314.342.430	39.761.460
2804	Kab. Halmahera Selatan	1.251.703.890	1.239.056.477	12.647.413
2805	Kab. Kepulauan Sula	1.251.191.890	1.228.579.218	22.612.672

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2806	Kab. Halmahera Timur	1.258.103.890	1.240.725.906	17.377.984
2851	Kota Ternate	1.738.103.890	1.892.247.641	(154.143.751)
2852	Kota Tidore Kepulauan	1.283.703.890	1.236.847.612	46.856.278
2900	Prop. Banten	67.303.863.840	45.390.461.880	21.913.401.960
2901	Kab. Serang	27.724.663.890	10.180.570.981	17.544.092.909
2902	Kab. Pandeglang	3.477.623.890	1.815.160.170	1.662.463.720
2903	Kab. Lebak	5.151.863.890	2.112.806.332	3.039.057.558
2904	Kab. Tangerang	157.524.439.250	114.084.938.505	43.439.500.745
2951	Kota Tangerang	73.904.183.890	44.291.588.209	29.612.595.681
2952	Kota Cilegon	8.789.303.890	9.676.059.206	(886.755.316)
3000	Prop. Bangka Belitung	4.323.655.360	1.143.095.081	3.180.560.279
3001	Kab. Belitung	5.706.103.890	2.163.606.457	3.542.497.433
3002	Kab. Bangka	3.146.103.890	2.339.504.360	806.599.530
3003	Kab. Bangka Barat	3.466.103.890	1.261.404.370	2.204.699.520
3004	Kab. Bangka Tengah	3.146.103.890	1.293.982.802	1.852.121.088
3005	Kab. Bangka Selatan	2.698.103.890	1.518.093.653	1.180.010.237
3006	Kab. Belitung Timur	2.250.103.890	1.763.098.194	487.005.696
3051	Kota Pangkalpinang	5.464.725.330	2.456.264.122	3.008.461.208
3100	Prop. Gorontalo	603.686.400	368.342.241	235.344.159
3101	Kab. Gorontalo	1.610.103.890	1.496.557.179	113.546.711
3102	Kab. Boalemo	1.354.103.890	1.262.199.187	91.904.703
3103	Kab. Pohuwato	1.354.103.890	1.324.401.396	29.702.494
3104	Kab. Bone Bolango	1.290.103.890	1.329.959.535	(39.855.645)
3151	Kota Gorontalo	2.936.849.490	2.142.562.424	794.287.066
3200	Prop. Kepulauan Riau	10.510.560.000	9.774.674.299	735.885.701
3201	Kab. Riau Kepulauan	4.966.263.890	4.586.952.451	379.311.439
3202	Kab. Karimun	2.506.103.890	1.844.934.631	661.169.259
3203	Kab. Natuna	1.258.103.890	1.293.353.756	(35.249.866)
3204	Kab. Lingga	1.274.103.890	1.304.521.544	(30.417.654)
3251	Kota Batam	34.328.183.890	32.197.227.813	2.130.956.077
3252	Kota Tanjung Pinang	5.066.103.890	4.560.414.339	505.689.551
3300	Prop. Irian Jaya Barat	564.672.640	350.370.410	214.302.230
3301	Kab. Manokwari	1.637.431.890	1.398.301.637	239.130.253
3302	Kab. Sorong	1.377.463.890	1.285.245.874	92.218.016
3303	Kab. Fak-Fak	1.397.121.490	1.270.088.939	127.032.551
3304	Kab. Sorong Selatan	1.278.263.890	1.226.528.786	51.735.104
3305	Kab. Raja Ampat	1.278.263.890	1.226.103.890	52.160.000
3306	Kab. Teluk Bintuni	1.278.263.890	1.226.103.890	52.160.000
3307	Kab. Teluk Wondama	1.278.263.890	1.226.103.890	52.160.000
3308	Kab. Kaimana	1.262.448.850	1.238.154.434	24.294.416
3351	Kota Sorong	2.506.103.890	2.333.728.913	172.374.977
3400	Prop. Sulawesi Barat	482.783.520	234.963.961	247.819.559

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3401	Kab. Majene	1.398.903.890	1.299.557.881	99.346.009
3402	Kab. Mamuju	2.096.503.890	1.512.333.830	584.170.060
3403	Kab. Mamuju Utara	1.323.637.970	1.344.302.607	(20.664.637)
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	1.994.103.890	1.523.832.928	470.270.962
3405	Kab. Mamasa	1.248.503.890	1.247.017.125	1.486.765
	Total	**4.762.339.607.710**	**3.179.578.385.492**	**1.582.761.222.218**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	212.484.728.871	212.484.728.871	-
0199	Instansi Pusat	1.501.054.755.293	1.501.054.755.293	-
0200	Prop. Jawa Barat	129.794.164.535	129.794.164.535	-
0205	Kab. Bogor	14.771.956.245	14.771.956.245	-
0206	Kab. Sukabumi	10.672.994.232	10.672.994.232	-
0207	Kab. Cianjur	10.696.932.263	10.696.932.263	-
0208	Kab. Bekasi	23.948.397.214	23.948.397.214	-
0209	Kab. Karawang	26.921.653.544	26.921.653.544	-
0210	Kab. Purwakarta	10.658.705.765	10.658.705.765	-
0211	Kab. Subang	11.260.322.411	11.260.322.411	-
0212	Kab. Bandung	10.688.917.775	10.688.917.775	-
0213	Kab. Sumedang	10.640.856.748	10.640.856.748	-
0214	Kab. Garut	10.713.064.152	10.713.064.152	-
0215	Kab. Tasikmalaya	10.658.026.889	10.658.026.889	-
0216	Kab. Ciamis	10.807.561.534	10.807.561.534	-
0217	Kab. Cirebon	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0218	Kab. Kuningan	10.641.296.478	10.641.296.478	-
0219	Kab. Indramayu	20.723.365.669	20.723.365.669	-
0220	Kab. Majalengka	11.293.688.381	11.293.688.381	-
0251	Kota Bandung	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0252	Kota Bogor	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0253	Kota Sukabumi	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0254	Kota Cirebon	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0257	Kota Bekasi	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0258	Kota Depok	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0260	Kota Tasikmalaya	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0261	Kota Cimahi	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0262	Kota Banjar	10.639.671.392	10.639.671.392	-
0300	Prop. Jawa Tengah	1.834.039.778	1.834.039.778	-
0301	Kab. Semarang	292.192.096	292.192.096	-
0302	Kab. Kendal	445.311.856	445.311.856	-
0303	Kab. Demak	289.900.076	289.900.076	-
0304	Kab. Grobogan	402.863.565	402.863.565	-
0305	Kab. Pekalongan	324.147.475	324.147.475	-
0306	Kab. Batang	380.493.183	380.493.183	-
0307	Kab. Tegal	334.914.330	334.914.330	-
0308	Kab. Brebes	355.367.500	355.367.500	-
0309	Kab. Pati	319.854.008	319.854.008	-
0310	Kab. Kudus	289.975.721	289.975.721	-
0311	Kab. Pemalang	402.674.154	402.674.154	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0312	Kab. Jepara	298.236.648	298.236.648	-
0313	Kab. Rembang	303.894.264	303.894.264	-
0314	Kab. Blora	2.945.382.135	2.945.382.135	-
0315	Kab. Banyumas	301.611.848	301.611.848	-
0316	Kab. Cilacap	344.700.727	344.700.727	-
0317	Kab. Purbalingga	292.360.204	292.360.204	-
0318	Kab. Banjarnegara	303.599.677	303.599.677	-
0319	Kab. Magelang	298.983.823	298.983.823	-
0320	Kab. Temanggung	298.832.519	298.832.519	-
0321	Kab. Wonosobo	294.418.195	294.418.195	-
0322	Kab. Purworejo	296.537.073	296.537.073	-
0323	Kab. Kebumen	298.656.262	298.656.262	-
0324	Kab. Klaten	289.900.076	289.900.076	-
0325	Kab. Boyolali	354.153.486	354.153.486	-
0326	Kab. Sragen	290.041.686	290.041.686	-
0327	Kab. Sukoharjo	289.900.076	289.900.076	-
0328	Kab. Karanganyar	289.957.251	289.957.251	-
0329	Kab. Wonogiri	307.163.965	307.163.965	-
0351	Kota Semarang	321.232.098	321.232.098	-
0352	Kota Salatiga	289.900.076	289.900.076	-
0353	Kota Pekalongan	289.900.076	289.900.076	-
0354	Kota Tegal	289.900.076	289.900.076	-
0355	Kota Magelang	289.900.076	289.900.076	-
0356	Kota Surakarta	289.900.076	289.900.076	-
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	14.362.208	14.362.208	-
0401	Kab. Bantul	183.064.849	183.064.849	-
0402	Kab. Sleman	182.826.289	182.826.289	-
0403	Kab. Gunungkidul	184.843.969	184.843.969	-
0404	Kab. Kulonprogo	234.258.481	234.258.481	-
0451	Kota Yogyakarta	182.826.289	182.826.289	-
0500	Prop. Jawa Timur	28.579.224.197	28.579.224.197	-
0501	Kab. Gresik	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0502	Kab. Mojokerto	1.726.686.021	1.726.686.021	-
0503	Kab. Sidoarjo	1.647.491.407	1.647.491.407	-
0504	Kab. Jombang	1.734.788.084	1.734.788.084	-
0505	Kab. Sampang	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0506	Kab. Pamekasan	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0507	Kab. Sumenep	224.444.290	224.444.290	-
0508	Kab. Bangkalan	2.576.958.326	2.576.958.326	-
0509	Kab. Bondowoso	1.783.619.989	1.783.619.989	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0510	Kab. Situbondo	1.748.884.954	1.748.884.954	-
0511	Kab. Banyuwangi	2.148.695.116	2.148.695.116	-
0512	Kab. Jember	1.841.246.190	1.841.246.190	-
0513	Kab. Malang	1.782.916.140	1.782.916.140	-
0514	Kab. Pasuruan	1.727.310.371	1.727.310.371	-
0515	Kab. Probolinggo	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0516	Kab. Lumajang	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0517	Kab. Kediri	1.773.203.649	1.773.203.649	-
0518	Kab. Tulungagung	1.735.416.467	1.735.416.467	-
0519	Kab. Nganjuk	1.807.025.964	1.807.025.964	-
0520	Kab. Trenggalek	1.732.177.559	1.732.177.559	-
0521	Kab. Blitar	1.763.186.228	1.763.186.228	-
0522	Kab. Madiun	1.868.777.251	1.868.777.251	-
0523	Kab. Ngawi	1.779.513.485	1.779.513.485	-
0524	Kab. Magetan	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0525	Kab. Ponorogo	1.760.544.910	1.760.544.910	-
0526	Kab. Pacitan	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0527	Kab. Bojonegoro	49.930.070.378	49.930.070.378	-
0528	Kab. Tuban	11.448.448.282	11.448.448.282	-
0529	Kab. Lamongan	2.083.167.740	2.083.167.740	-
0551	Kota Surabaya	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0552	Kota Mojokerto	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0553	Kota Malang	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0554	Kota Pasuruan	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0555	Kota Probolinggo	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0556	Kota Blitar	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0557	Kota Kediri	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0558	Kota Madiun	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0559	Kota Batu	1.726.655.332	1.726.655.332	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	2.790.901.886.600	2.790.901.886.600	-
0601	Kab. Aceh Besar	18.558.389.854	18.558.389.854	-
0602	Kab. Pidie	18.557.488.725	18.557.488.725	-
0603	Kab. Aceh Utara	361.108.690.134	361.108.690.134	-
0604	Kab. Aceh Timur	23.355.571.897	23.355.571.897	-
0605	Kab. Aceh Selatan	18.552.269.720	18.552.269.720	-
0606	Kab. Aceh Barat	18.583.336.578	18.583.336.578	-
0607	Kab. Aceh Tengah	18.550.170.234	18.550.170.234	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	18.550.170.234	18.550.170.234	-
0609	Kab. Simeuleu	18.551.096.978	18.551.096.978	-
0610	Kab. Aceh Singkil	18.551.213.391	18.551.213.391	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0611	Kab. Bireuen	18.577.902.322	18.577.902.322	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	18.556.946.169	18.556.946.169	-
0613	Kab. Gayo Lues	18.550.536.676	18.550.536.676	-
0614	Kab. Aceh Jaya	18.560.390.110	18.560.390.110	-
0615	Kab. Nagan Raya	18.560.576.576	18.560.576.576	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	21.112.448.883	20.977.991.525	134.457.358
0617	Kab. Bener Meriah	18.565.539.348	18.565.539.348	-
0651	Kota Banda Aceh	18.550.170.234	18.550.170.234	-
0652	Kota Sabang	18.550.170.234	18.550.170.234	-
0653	Kota Langsa	18.550.170.234	18.550.170.234	-
0654	Kota Lhokseumawe	18.550.170.234	18.550.170.234	-
0700	Prop. Sumatera Utara	1.999.702.088	1.999.702.088	-
0701	Kab. Deli Serdang	407.630.657	407.630.657	-
0702	Kab. Tanah Karo	330.117.627	330.117.627	-
0703	Kab. Langkat	2.469.879.238	2.469.879.238	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	468.626.198	468.626.198	-
0705	Kab. Simalungun	356.198.981	356.198.981	-
0706	Kab. Labuhanbatu	364.187.956	364.187.956	-
0707	Kab. Dairi	429.438.264	429.438.264	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	416.402.122	416.402.122	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	718.948.218	718.948.218	-
0710	Kab. Asahan	330.117.627	330.117.627	-
0711	Kab. Nias	330.117.627	131.597.834	198.519.793
0712	Kab. Toba Samosir	362.219.283	362.219.283	-
0713	Kab. Mandailing Natal	627.065.033	627.065.033	-
0714	Kab. Nias Selatan	330.117.627	330.117.627	-
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	333.084.751	333.084.751	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	384.805.947	384.805.947	-
0717	Kab. Samosir	389.966.108	389.966.108	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	330.117.627	330.117.627	-
0751	Kota Medan	330.117.627	330.117.627	-
0752	Kota Tebingtinggi	330.117.627	330.117.627	-
0753	Kota Binjai	1.140.093.167	1.140.093.167	-
0754	Kota Pematangsiantar	330.117.627	330.117.627	-
0755	Kota Tanjungbalai	330.117.627	330.117.627	-
0756	Kota Sibolga	330.117.627	330.117.627	-
0757	Kota Padang Sidempuan	381.441.347	381.441.347	-
0800	Prop. Sumatera Barat	3.679.318.741	3.679.318.741	-
0801	Kab. Agam	589.557.894	589.557.894	-
0802	Kab. Pasaman	670.605.741	670.605.741	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0803	Kab. Limapuluh Kota	589.557.894	589.557.894	-
0804	Kab. Solok	590.147.568	590.147.568	-
0805	Kab. Padang Pariaman	589.557.894	589.557.894	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	619.070.214	619.070.214	-
0807	Kab. Tanah Datar	591.536.813	591.536.813	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	591.559.366	591.559.366	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	961.701.225	961.701.225	-
0810	Kab. Dharmasraya	589.557.894	589.557.894	-
0811	Kab. Solok Selatan	624.204.922	624.204.922	-
0812	Kab. Pasaman Barat	590.801.388	590.801.388	-
0851	Kota Bukittinggi	589.557.894	589.557.894	-
0852	Kota Padang Panjang	589.557.894	589.557.894	-
0853	Kota Solok	589.557.894	589.557.894	-
0854	Kota Sawahlunto	7.041.478.677	7.041.478.677	-
0855	Kota Padang	589.557.894	589.557.894	-
0856	Kota Payakumbuh	589.557.894	589.557.894	-
0857	Kota Pariaman	589.557.894	589.557.894	-
0900	Prop. Riau	2.055.012.757.021	2.055.012.757.021	-
0901	Kab. Kampar	830.513.598.448	830.513.598.448	-
0902	Kab. Bengkalis	1.914.299.874.761	1.914.299.874.761	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	418.153.863.614	418.153.863.614	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	411.357.905.413	411.357.905.413	-
0906	Kab. Pelalawan	422.747.614.130	422.747.614.130	-
0907	Kab. Rokan Hulu	424.166.112.923	424.166.112.923	-
0908	Kab. Rokan Hilir	1.263.464.771.512	1.263.464.771.512	-
0909	Kab. Siak	1.302.431.690.071	1.302.431.690.071	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	412.238.218.134	412.238.218.134	-
0951	Kota Pekanbaru	411.404.903.842	411.404.903.842	-
0953	Kota Dumai	411.167.491.986	411.167.491.986	-
1000	Prop. Jambi	121.565.136.006	121.565.136.006	-
1001	Kab. Batanghari	34.892.753.542	34.892.753.542	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	132.552.275.626	132.552.275.626	-
1003	Kab. Bungo	28.134.634.407	28.134.634.407	-
1004	Kab. Sarolangun	32.430.566.510	32.430.566.510	-
1005	Kab. Kerinci	27.147.853.566	27.147.853.566	-
1006	Kab. Merangin	27.229.897.186	27.229.897.186	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	114.031.219.086	114.031.219.086	-
1008	Kab. Tebo	29.191.502.320	29.191.502.320	-
1009	Kab. Muaro Jambi	32.417.454.860	32.417.454.860	-
1051	Kota Jambi	30.052.129.009	30.052.129.009	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1100	Prop. Sumatera Selatan	444.583.837.310	444.583.837.310	-
1103	Kab. Musi Banyu Asin	738.856.601.921	738.856.601.921	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	86.894.776.155	86.894.776.155	-
1105	Kab. Muara Enim	117.716.320.361	117.716.320.361	-
1106	Kab. Lahat	85.136.278.078	85.136.278.078	-
1107	Kab. Musi Rawas	111.100.376.022	111.100.376.022	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	68.534.127.102	68.534.127.102	-
1109	Kab. Banyu Asin	84.574.620.729	84.574.620.729	-
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	68.675.966.442	68.675.966.442	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	68.534.127.102	68.534.127.102	-
1112	Kab. Ogan Ilir	70.044.373.734	70.044.373.734	-
1151	Kota Palembang	68.534.127.102	68.534.127.102	-
1153	Kota Prabumulih	75.212.939.181	75.212.939.181	-
1154	Kota Pagar Alam	68.534.127.102	67.184.845.790	1.349.281.312
1155	Kota Lubuk Linggau	68.534.127.102	68.534.127.102	-
1200	Prop. Lampung	123.857.629.819	123.754.348.451	103.281.368
1201	Kab. Lampung Selatan	25.499.270.736	25.499.270.736	-
1202	Kab. Lampung Tengah	25.499.270.736	25.499.270.736	-
1203	Kab. Lampung Utara	25.499.270.736	25.499.270.736	-
1204	Kab. Lampung Barat	25.533.017.170	25.533.017.170	-
1205	Kab. Tulang Bawang	25.568.724.012	25.568.724.012	-
1206	Kab. Tanggamus	25.779.457.334	25.779.457.334	-
1207	Kab. Lampung Timur	70.355.512.052	70.355.512.052	-
1208	Kab. Way Kanan	25.507.405.422	25.507.405.422	-
1251	Kota Bandar Lampung	25.499.270.736	25.499.270.736	-
1252	Kota Metro	25.499.270.736	25.499.270.736	-
1300	Prop. Kalimantan Barat	2.826.231.939	2.826.231.939	-
1301	Kab. Sambas	597.857.752	597.857.752	-
1302	Kab. Sanggau	613.766.027	613.766.027	-
1303	Kab. Sintang	1.119.457.020	1.119.457.020	-
1304	Kab. Pontianak	927.612.129	927.612.129	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	2.247.468.692	2.247.468.692	-
1306	Kab. Ketapang	4.066.929.958	4.066.929.958	-
1307	Kab. Bengkayang	628.664.856	628.664.856	-
1308	Kab. Landak	647.694.918	647.694.918	-
1309	Kab. Melawi	844.729.896	844.729.896	-
1310	Kab. Sekadau	594.618.840	594.618.840	-
1351	Kota Pontianak	606.399.320	606.399.320	-
1352	Kota Singkawang	594.618.840	594.618.840	-
1400	Prop. Kalimantan Tengah	19.985.808.281	19.985.808.281	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1401	Kab. Kapuas	5.604.091.086	5.604.091.086	-
1402	Kab. Barito Utara	10.755.461.466	10.755.461.466	-
1403	Kab. Barito Selatan	3.244.461.353	3.244.461.353	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	5.010.746.574	5.010.746.574	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	4.746.867.272	4.746.867.272	-
1406	Kab. Katingan	9.989.148.450	9.989.148.450	-
1407	Kab. Seruyan	6.406.394.782	6.406.394.782	-
1408	Kab. Sukamara	2.693.817.838	2.693.817.838	-
1409	Kab. Lamandau	4.302.690.491	4.302.690.491	-
1410	Kab. Gunung Mas	4.064.190.469	4.064.190.469	-
1411	Kab. Pulang Pisau	2.758.850.870	2.758.850.870	-
1412	Kab. Murung Raya	17.530.683.040	17.530.683.040	-
1413	Kab. Barito Timur	2.722.420.154	2.722.420.154	-
1451	Kota Palangkaraya	2.662.448.142	2.662.448.142	-
1500	Prop. Kalimantan Selatan	108.253.908.173	108.253.908.173	-
1501	Kab. Banjar	31.352.794.175	31.352.794.175	-
1502	Kab. Tanah Laut	61.413.392.082	61.413.392.082	-
1503	Kab. Tapin	24.850.088.771	24.850.088.771	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	20.263.086.335	20.263.086.335	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	18.288.161.826	18.288.161.826	-
1506	Kab. Barito Kuala	18.142.314.019	18.142.314.019	-
1507	Kab. Tabalong	50.916.966.919	50.916.966.919	-
1508	Kab. Kotabaru	67.546.168.608	67.546.168.608	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	19.030.934.054	19.030.934.054	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	44.389.684.243	44.389.684.243	-
1511	Kab. Balangan	41.330.694.316	41.330.694.316	-
1551	Kota Banjarmasin	18.070.705.679	18.070.705.679	-
1552	Kota Banjar Baru	19.787.106.346	19.787.106.346	-
1600	Prop. Kalimantan Timur	2.958.716.205.449	2.958.716.205.449	-
1601	Kab. Kutai	3.212.361.750.922	3.212.361.750.922	-
1602	Kab. Pasir	507.357.267.923	507.357.267.923	-
1603	Kab. Bulungan	486.890.874.733	486.890.874.733	-
1604	Kab. Berau	504.908.282.710	504.908.282.710	-
1605	Kab. Nunukan	491.090.323.952	491.090.323.952	-
1606	Kab. Malinau	480.518.534.074	480.518.534.074	-
1607	Kab. Kutai Barat	538.339.418.759	538.339.418.759	-
1608	Kab. Kutai Timur	727.130.010.839	727.130.010.839	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	501.897.387.880	501.897.387.880	-
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	500.316.408.151	500.316.408.151	-
1652	Kota Balikpapan	476.570.476.452	476.570.476.452	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1653	Kota Tarakan	490.826.150.259	490.826.150.259	-
1654	Kota Bontang	492.414.403.660	492.414.403.660	-
1700	Prop. Sulawesi Utara	1.003.617.552	1.003.617.552	-
1702	Kab. Minahasa	372.144.965	372.144.965	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	2.675.677.536	2.675.677.536	-
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	349.507.888	349.507.888	-
1705	Kab. Talaud Kepulauan	349.507.888	349.507.888	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	471.305.164	471.305.164	-
1707	Kota Tomohon	349.507.888	349.507.888	-
1708	Kab. Minahasa Utara	381.288.722	381.288.722	-
1751	Kota Manado	349.598.729	349.598.729	-
1753	Kota Bitung	354.599.293	354.599.293	-
1800	Prop. Sulawesi Tengah	1.520.935.897	1.520.935.897	-
1801	Kab. Poso	2.295.724.589	2.295.724.589	-
1802	Kab. Donggala	443.305.741	443.305.741	-
1803	Kab. Toli-toli	376.290.219	376.290.219	-
1804	Kab. Banggai	1.598.425.243	1.598.425.243	-
1805	Kab. Buol	362.270.168	362.270.168	-
1806	Kab. Morowali	1.023.598.755	1.023.598.755	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	401.375.335	401.375.335	-
1808	Kab. Parigi Moutong	659.740.490	659.740.490	-
1809	Kab. Tojo Una-Una	374.034.941	374.034.941	-
1851	Kota Palu	368.470.194	368.470.194	-
1900	Prop. Sulawesi Selatan	18.162.596.403	18.162.596.403	-
1901	Kab. Pinrang	1.812.563.598	1.812.563.598	-
1902	Kab. Gowa	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1903	Kab. Wajo	1.813.730.046	1.813.730.046	-
1905	Kab. Bone	1.824.947.848	1.824.947.848	-
1906	Kab. Tana Toraja	1.813.472.210	1.813.472.210	-
1907	Kab. Maros	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1909	Kab. Luwu	1.938.040.310	1.938.040.310	-
1910	Kab. Sinjai	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1911	Kab. Bulukumba	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1912	Kab. Bantaeng	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1913	Kab. Jeneponto	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1914	Kab. Selayar	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1915	Kab. Takalar	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1916	Kab. Barru	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	1.838.601.039	1.838.601.039	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.812.455.009	1.812.455.009	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1919	Kab. Soppeng	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1921	Kab. Enrekang	1.817.379.791	1.817.379.791	-
1922	Kab. Luwu Utara	2.211.466.140	2.211.466.140	-
1924	Kab. Luwu Timur	36.394.049.402	36.394.049.402	-
1951	Kota Makassar	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1952	Kota Pare-pare	1.812.414.384	1.812.414.384	-
1953	Kota Palopo	1.812.414.384	1.812.414.384	-
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	7.043.050.893	7.043.050.893	-
2001	Kab. Kendari/Konawe	1.888.333.739	1.888.333.739	-
2002	Kab. Buton	1.733.505.541	1.733.505.541	-
2003	Kab. Muna	1.719.036.498	1.719.036.498	-
2004	Kab. Kolaka	14.152.382.681	14.152.382.681	-
2005	Kab. Konawe Selatan	1.789.486.497	1.789.486.497	-
2006	Kab. Wakatobi	1.718.140.498	1.718.140.498	-
2007	Kab. Bombana	1.748.362.906	1.748.362.906	-
2008	Kab. Kolaka Utara	1.807.416.277	1.807.416.277	-
2051	Kota Kendari	1.718.140.498	1.718.140.498	-
2052	Kota Bau-Bau	1.718.140.498	1.718.140.498	-
2100	Prop. Maluku	1.374.985.993	1.374.985.993	-
2101	Kab. Maluku Tengah	583.010.499	583.010.499	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	506.189.461	506.189.461	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	509.916.693	509.916.693	-
2104	Kab. Pulau Buru	1.437.433.106	1.437.433.106	-
2105	Kab. Aru Kepulauan	623.138.607	623.138.607	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	627.289.900	346.413.405	280.876.495
2107	Kab. Seram Bagian Timur	2.122.786.440	2.122.786.440	-
2151	Kota Ambon	508.601.185	508.601.185	-
2201	Kab. Buleleng	182.074.209	182.074.209	-
2202	Kab. Jembrana	182.074.209	182.074.209	-
2203	Kab. Klungkung	182.074.209	182.074.209	-
2204	Kab. Gianyar	182.074.209	182.074.209	-
2205	Kab. Karangasem	182.074.209	182.074.209	-
2206	Kab. Bangli	182.074.209	182.074.209	-
2207	Kab. Badung	182.074.209	182.074.209	-
2208	Kab. Tabanan	182.074.209	182.074.209	-
2251	Kota Denpasar	182.074.209	182.074.209	-
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	22.528.918.421	22.528.918.421	-
2301	Kab. Lombok Barat	5.722.670.828	5.722.670.828	-
2302	Kab. Lombok Tengah	5.721.868.142	5.721.868.142	-
2303	Kab. Lombok Timur	5.721.868.142	2.884.771.465	2.837.096.677

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2304	Kab. Bima	5.808.840.727	5.808.840.727	-
2305	Kab. Sumbawa	6.424.594.389	6.424.594.389	-
2306	Kab. Dompu	5.730.092.656	5.730.092.656	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	45.183.623.767	45.183.623.767	-
2351	Kota Mataram	5.721.868.142	5.721.868.142	-
2352	Kota Bima	5.718.914.756	5.718.914.756	-
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	58.154.149	58.154.149	-
2401	Kab. Kupang	186.914.592	186.914.592	-
2402	Kab. Belu	201.479.286	201.479.286	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	186.914.592	186.914.592	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	186.914.592	184.030.434	2.884.158
2405	Kab. Alor	186.951.926	186.951.926	-
2406	Kab. Sikka	192.412.729	192.412.729	-
2407	Kab. Flores Timur	197.638.446	197.638.446	-
2408	Kab. Ende	210.889.581	210.889.581	-
2409	Kab. Ngada	186.914.592	514.039	186.400.553
2410	Kab. Manggarai	260.006.048	260.006.048	-
2411	Kab. Sumba Timur	186.914.592	186.914.592	-
2412	Kab. Sumba Barat	207.665.726	207.665.726	-
2413	Kab. Lembata	186.914.592	186.914.592	-
2414	Kab. Rote Ndao	186.914.592	186.914.592	-
2415	Kab. Manggarai Barat	193.228.192	193.228.192	-
2451	Kota Kupang	187.129.842	187.129.842	-
2500	Prop. Papua	217.119.017.482	217.119.017.482	-
2501	Kab. Jayapura	25.861.402.859	25.861.402.859	-
2502	Kab. Biak Numfor	22.898.718.094	22.898.718.094	-
2504	Kab. Yapen Waropen	24.069.233.072	24.069.233.072	-
2507	Kab. Merauke	22.902.257.287	22.902.257.287	-
2508	Kab. Jayawijaya	22.947.865.094	22.947.865.094	-
2509	Kab. Paniai	23.323.323.243	23.323.323.243	-
2510	Kab. Nabire	23.325.753.985	23.325.753.985	-
2511	Kab. Puncak Jaya	22.967.301.351	22.967.301.351	-
2512	Kab. Mimika	427.533.675.213	427.533.675.213	-
2513	Kab. Mappi	22.898.718.094	22.898.718.094	-
2514	Kab. Asmat	22.898.718.094	22.898.718.094	-
2515	Kab. Boven Digoel	24.881.231.038	24.881.231.038	-
2516	Kab. Sarmi	23.929.825.373	23.929.825.373	-
2517	Kab. Keerom	22.964.609.065	22.964.609.065	-
2518	Kab. Tolikara	22.984.616.222	22.984.616.222	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	22.924.097.449	22.924.097.449	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2523	Kab. Waropen	24.110.054.266	24.110.054.266	-
2524	Kab. Yahukimo	22.898.718.094	22.898.718.094	-
2525	Kab. Supiori	22.898.718.094	22.898.718.094	-
2551	Kota Jayapura	22.898.718.094	22.898.718.094	-
2600	Prop. Bengkulu	856.982.470	856.982.470	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	1.560.819.880	1.560.819.880	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	395.811.050	395.811.050	-
2603	Kab. Rejang Lebong	378.904.308	378.904.308	-
2604	Kab. Seluma	802.379.373	802.379.373	-
2605	Kab. Kaur	414.071.355	414.071.355	-
2606	Kab. Muko-Muko	377.814.548	146.228.945	231.585.603
2607	Kab. Lebong	377.814.548	377.814.548	-
2608	Kab. Kepahiang	381.168.148	381.168.148	-
2651	Kota Bengkulu	377.814.548	377.814.548	-
2800	Prop. Maluku Utara	14.119.420.440	14.119.420.440	-
2801	Kab. Halmahera Barat	4.119.895.655	4.119.895.655	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	5.268.589.910	5.268.589.910	-
2803	Kab. Halmahera Utara	11.081.126.119	11.081.126.119	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	8.392.832.347	8.392.832.347	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	4.341.103.474	4.341.103.474	-
2806	Kab. Halmahera Timur	16.705.419.786	16.705.419.786	-
2851	Kota Ternate	4.009.592.328	4.009.592.328	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	4.015.715.797	4.015.715.797	-
2900	Prop. Banten	121.795.693	121.795.693	-
2901	Kab. Serang	223.044.535	223.044.535	-
2902	Kab. Pandeglang	311.821.301	311.821.301	-
2903	Kab. Lebak	368.219.487	368.219.487	-
2904	Kab. Tangerang	230.453.623	230.453.623	-
2951	Kota Tangerang	223.044.535	223.044.535	-
2952	Kota Cilegon	223.044.535	223.044.535	-
3000	Prop. Bangka Belitung	26.143.931.432	26.143.931.432	-
3001	Kab. Belitung	9.279.080.592	9.279.080.592	-
3002	Kab. Bangka	8.576.096.979	8.576.096.979	-
3003	Kab. Bangka Barat	8.820.541.000	8.820.541.000	-
3004	Kab. Bangka Tengah	14.669.739.746	14.669.739.746	-
3005	Kab. Bangka Selatan	13.835.797.596	13.835.797.596	-
3006	Kab. Belitung Timur	9.260.162.779	9.260.162.779	-
3051	Kota Pangkalpinang	8.059.078.492	8.059.078.492	-
3100	Prop. Gorontalo	76.308.556	76.308.556	-
3101	Kab. Gorontalo	270.777.774	270.777.774	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3102	Kab. Boalemo	249.667.447	249.667.447	-
3103	Kab. Pohuwato	249.368.075	249.368.075	-
3104	Kab. Bone Bolango	228.571.484	228.571.484	-
3151	Kota Gorontalo	217.220.487	217.220.487	-
3200	Prop. Kepulauan Riau	545.423.620.829	545.423.620.829	-
3201	Kab. Riau Kepulauan	215.210.575.505	215.210.575.505	-
3202	Kab. Karimun	217.778.867.101	217.778.867.101	-
3203	Kab. Natuna	957.940.503.674	957.940.503.674	-
3204	Kab. Lingga	213.412.676.471	213.412.676.471	-
3251	Kota Batam	213.297.882.347	213.297.882.347	-
3252	Kota Tanjung Pinang	213.278.104.792	213.278.104.792	-
3300	Prop. Irian Jaya Barat	19.004.151.313	19.004.151.313	-
3301	Kab. Manokwari	4.902.744.267	4.902.744.267	-
3302	Kab. Sorong	32.046.163.067	32.046.163.067	-
3303	Kab. Fak-Fak	4.958.318.385	4.958.318.385	-
3304	Kab. Sorong Selatan	4.853.131.750	4.853.131.750	-
3305	Kab. Raja Ampat	7.627.470.085	7.627.470.085	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	5.997.627.010	5.997.627.010	-
3307	Kab. Teluk Wondama	4.928.902.005	4.928.902.005	-
3308	Kab. Kaimana	7.487.534.813	7.487.534.813	-
3351	Kota Sorong	4.853.131.750	4.853.131.750	-
3400	Prop. Sulawesi Barat	304.546.394	304.546.394	-
3401	Kab. Majene	337.821.542	337.821.542	-
3402	Kab. Mamuju	723.408.870	723.408.870	-
3403	Kab. Mamuju Utara	347.365.174	347.365.174	-
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	367.586.419	367.586.419	-
3405	Kab. Mamasa	352.374.613	-	352.374.613
	Total	36.678.853.189.992	36.673.176.432.062	5.676.757.930

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM MINYAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	195.408.200.840	195.408.200.840	-
0200	Prop. Jawa Barat	90.213.914.344	90.213.914.344	-
0205	Kab. Bogor	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0206	Kab. Sukabumi	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0207	Kab. Cianjur	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0208	Kab. Bekasi	20.448.390.595	20.448.390.595	-
0209	Kab. Karawang	15.558.373.984	15.558.373.984	-
0210	Kab. Purwakarta	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0211	Kab. Subang	7.517.728.983	7.517.728.983	-
0212	Kab. Bandung	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0213	Kab. Sumedang	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0214	Kab. Garut	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0215	Kab. Tasikmalaya	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0216	Kab. Ciamis	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0217	Kab. Cirebon	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0218	Kab. Kuningan	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0219	Kab. Indramayu	17.904.336.615	17.904.336.615	-
0220	Kab. Majalengka	7.967.216.924	7.967.216.924	-
0251	Kota Bandung	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0252	Kota Bogor	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0253	Kota Sukabumi	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0254	Kota Cirebon	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0257	Kota Bekasi	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0258	Kota Depok	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0260	Kota Tasikmalaya	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0261	Kota Cimahi	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0262	Kota Banjar	7.276.865.281	7.276.865.281	-
0300	Prop. Jawa Tengah	857.766.457	857.766.457	-
0301	Kab. Semarang	50.398.027	50.398.027	-
0302	Kab. Kendal	50.398.027	50.398.027	-
0303	Kab. Demak	50.398.027	50.398.027	-
0304	Kab. Grobogan	51.429.224	51.429.224	-
0305	Kab. Pekalongan	50.398.027	50.398.027	-
0306	Kab. Batang	50.398.027	50.398.027	-
0307	Kab. Tegal	50.398.027	50.398.027	-
0308	Kab. Brebes	50.398.027	50.398.027	-
0309	Kab. Pati	50.398.027	50.398.027	-
0310	Kab. Kudus	50.398.027	50.398.027	-
0311	Kab. Pemalang	50.398.027	50.398.027	-
0312	Kab. Jepara	50.398.027	50.398.027	-
0313	Kab. Rembang	50.398.027	50.398.027	-
0314	Kab. Blora	1.714.501.719	1.714.501.719	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM MINYAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0315	Kab. Banyumas	50.398.027	50.398.027	-
0316	Kab. Cilacap	50.398.027	50.398.027	-
0317	Kab. Purbalingga	50.398.027	50.398.027	-
0318	Kab. Banjarnegara	50.398.027	50.398.027	-
0319	Kab. Magelang	50.398.027	50.398.027	-
0320	Kab. Temanggung	50.398.027	50.398.027	-
0321	Kab. Wonosobo	50.398.027	50.398.027	-
0322	Kab. Purworejo	50.398.027	50.398.027	-
0323	Kab. Kebumen	50.398.027	50.398.027	-
0324	Kab. Klaten	50.398.027	50.398.027	-
0325	Kab. Boyolali	50.398.027	50.398.027	-
0326	Kab. Sragen	50.398.027	50.398.027	-
0327	Kab. Sukoharjo	50.398.027	50.398.027	-
0328	Kab. Karanganyar	50.398.027	50.398.027	-
0329	Kab. Wonogiri	50.398.027	50.398.027	-
0351	Kota Semarang	50.398.027	50.398.027	-
0352	Kota Salatiga	50.398.027	50.398.027	-
0353	Kota Pekalongan	50.398.027	50.398.027	-
0354	Kota Tegal	50.398.027	50.398.027	-
0355	Kota Magelang	50.398.027	50.398.027	-
0356	Kota Surakarta	50.398.027	50.398.027	-
0500	Prop. Jawa Timur	27.789.029.284	27.789.029.284	-
0501	Kab. Gresik	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0502	Kab. Mojokerto	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0503	Kab. Sidoarjo	1.423.047.117	1.423.047.117	-
0504	Kab. Jombang	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0505	Kab. Sampang	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0506	Kab. Pamekasan	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0507	Kab. Sumenep	-	-	-
0508	Kab. Bangkalan	2.352.514.036	2.352.514.036	-
0509	Kab. Bondowoso	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0510	Kab. Situbondo	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0511	Kab. Banyuwangi	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0512	Kab. Jember	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0513	Kab. Malang	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0514	Kab. Pasuruan	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0515	Kab. Probolinggo	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0516	Kab. Lumajang	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0517	Kab. Kediri	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0518	Kab. Tulungagung	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0519	Kab. Nganjuk	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0520	Kab. Trenggalek	1.502.211.042	1.502.211.042	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM MINYAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0521	Kab. Blitar	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0522	Kab. Madiun	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0523	Kab. Ngawi	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0524	Kab. Magetan	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0525	Kab. Ponorogo	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0526	Kab. Pacitan	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0527	Kab. Bojonegoro	49.499.205.836	49.499.205.836	-
0528	Kab. Tuban	11.013.477.175	11.013.477.175	-
0529	Kab. Lamongan	1.812.461.042	1.812.461.042	-
0551	Kota Surabaya	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0552	Kota Mojokerto	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0553	Kota Malang	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0554	Kota Pasuruan	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0555	Kota Probolinggo	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0556	Kota Blitar	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0557	Kota Kediri	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0558	Kota Madiun	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0559	Kota Batu	1.502.211.042	1.502.211.042	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	803.877.810.507	803.877.810.507	-
0601	Kab. Aceh Besar	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0602	Kab. Pidie	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0603	Kab. Aceh Utara	52.020.153.618	52.020.153.618	-
0604	Kab. Aceh Timur	2.969.045.584	2.969.045.584	-
0605	Kab. Aceh Selatan	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0606	Kab. Aceh Barat	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0607	Kab. Aceh Tengah	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0609	Kab. Simeuleu	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0610	Kab. Aceh Singkil	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0611	Kab. Bireuen	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0613	Kab. Gayo Lues	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0614	Kab. Aceh Jaya	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0615	Kab. Nagan Raya	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	5.301.355.334	5.301.355.334	-
0617	Kab. Bener Meriah	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0651	Kota Banda Aceh	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0652	Kota Sabang	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0653	Kota Langsa	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0654	Kota Lhokseumawe	2.740.627.479	2.740.627.479	-
0700	Prop. Sumatera Utara	1.417.443.873	1.417.443.873	-
0701	Kab. Deli Serdang	130.820.317	130.820.317	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM MINYAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0702	Kab. Tanah Karo	118.120.323	118.120.323	-
0703	Kab. Langkat	2.035.773.415	2.035.773.415	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	118.120.323	118.120.323	-
0705	Kab. Simalungun	118.120.323	118.120.323	-
0706	Kab. Labuhanbatu	118.120.323	118.120.323	-
0707	Kab. Dairi	118.120.323	118.120.323	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	118.120.323	118.120.323	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	118.120.323	118.120.323	-
0710	Kab. Asahan	118.120.323	118.120.323	-
0711	Kab. Nias	118.120.323	118.120.323	-
0712	Kab. Toba Samosir	118.120.323	118.120.323	-
0713	Kab. Mandailing Natal	118.120.323	118.120.323	-
0714	Kab. Nias Selatan	118.120.323	118.120.323	-
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	118.120.323	118.120.323	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	118.120.323	118.120.323	-
0717	Kab. Samosir	118.120.323	118.120.323	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	118.120.323	118.120.323	-
0751	Kota Medan	118.120.323	118.120.323	-
0752	Kota Tebingtinggi	118.120.323	118.120.323	-
0753	Kota Binjai	878.041.822	878.041.822	-
0754	Kota Pematangsiantar	118.120.323	118.120.323	-
0755	Kota Tanjungbalai	118.120.323	118.120.323	-
0756	Kota Sibolga	118.120.323	118.120.323	-
0757	Kota Padang Sidempuan	118.120.323	118.120.323	-
0900	Prop. Riau	2.049.192.538.940	2.049.192.538.940	-
0901	Kab. Kampar	828.669.392.897	828.669.392.897	-
0902	Kab. Bengkalis	1.912.504.487.351	1.912.504.487.351	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	414.663.452.211	414.663.452.211	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	409.838.357.788	409.838.357.788	-
0906	Kab. Pelalawan	418.475.958.539	418.475.958.539	-
0907	Kab. Rokan Hulu	422.392.888.345	422.392.888.345	-
0908	Kab. Rokan Hilir	1.261.280.914.975	1.261.280.914.975	-
0909	Kab. Siak	1.299.428.130.285	1.299.428.130.285	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	409.838.357.788	409.838.357.788	-
0951	Kota Pekanbaru	409.838.357.788	409.838.357.788	-
0953	Kota Dumai	409.838.357.788	409.838.357.788	-
1000	Prop. Jambi	77.315.301.309	77.315.301.309	-
1001	Kab. Batanghari	19.418.513.689	19.418.513.689	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	82.480.365.399	82.480.365.399	-
1003	Kab. Bungo	17.181.122.513	17.181.122.513	-
1004	Kab. Sarolangun	22.146.958.880	22.146.958.880	-
1005	Kab. Kerinci	17.181.122.513	17.181.122.513	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM MINYAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1006	Kab. Merangin	17.181.122.513	17.181.122.513	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	72.406.137.345	72.406.137.345	-
1008	Kab. Tebo	19.066.978.100	19.066.978.100	-
1009	Kab. Muaro Jambi	22.112.736.330	22.112.736.330	-
1051	Kota Jambi	20.085.397.956	20.085.397.956	-
1100	Prop. Sumatera Selatan	231.026.680.975	231.026.680.975	-
1103	Kab. Musi Banyu Asin	354.357.750.251	354.357.750.251	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	52.623.529.328	52.623.529.328	-
1105	Kab. Muara Enim	56.957.348.166	56.957.348.166	-
1106	Kab. Lahat	43.803.046.350	43.803.046.350	-
1107	Kab. Musi Rawas	72.307.672.137	72.307.672.137	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	35.542.431.688	35.542.431.688	-
1109	Kab. Banyu Asin	51.346.824.936	51.346.824.936	-
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	35.542.431.688	35.542.431.688	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	35.542.431.688	35.542.431.688	-
1112	Kab. Ogan Ilir	37.052.678.320	37.052.678.320	-
1151	Kota Palembang	35.542.431.688	35.542.431.688	-
1153	Kota Prabumulih	42.402.284.285	42.402.284.285	-
1154	Kota Pagar Alam	35.542.431.688	35.542.431.688	-
1155	Kota Lubuk Linggau	35.542.431.688	35.542.431.688	-
1200	Prop. Lampung	123.736.875.335	123.736.875.335	-
1201	Kab. Lampung Selatan	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1202	Kab. Lampung Tengah	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1203	Kab. Lampung Utara	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1204	Kab. Lampung Barat	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1205	Kab. Tulang Bawang	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1206	Kab. Tanggamus	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1207	Kab. Lampung Timur	70.164.288.149	70.164.288.149	-
1208	Kab. Way Kanan	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1251	Kota Bandar Lampung	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1252	Kota Metro	25.308.046.833	25.308.046.833	-
1500	Prop. Kalimantan Selatan	5.034.288.427	5.034.288.427	-
1501	Kab. Banjar	839.006.405	839.006.405	-
1502	Kab. Tanah Laut	839.006.405	839.006.405	-
1503	Kab. Tapin	839.006.405	839.006.405	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	839.006.405	839.006.405	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	839.006.405	839.006.405	-
1506	Kab. Barito Kuala	839.006.405	839.006.405	-
1507	Kab. Tabalong	9.566.855.581	9.566.855.581	-
1508	Kab. Kotabaru	839.006.405	839.006.405	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	839.006.405	839.006.405	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	839.006.405	839.006.405	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM MINYAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1511	Kab. Balangan	1.340.727.677	1.340.727.677	-
1551	Kota Banjarmasin	839.006.405	839.006.405	-
1552	Kota Banjar Baru	839.006.405	839.006.405	-
1600	Prop. Kalimantan Timur	685.328.617.139	685.328.617.139	-
1601	Kab. Kutai	710.446.656.189	710.446.656.189	-
1602	Kab. Pasir	110.042.823.635	110.042.823.635	-
1603	Kab. Bulungan	112.905.623.519	112.905.623.519	-
1604	Kab. Berau	110.042.823.635	110.042.823.635	-
1605	Kab. Nunukan	116.389.677.608	116.389.677.608	-
1606	Kab. Malinau	110.042.823.635	110.042.823.635	-
1607	Kab. Kutai Barat	110.042.823.635	110.042.823.635	-
1608	Kab. Kutai Timur	113.511.858.447	113.511.858.447	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	132.565.650.581	132.565.650.581	-
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	111.851.287.757	111.851.287.757	-
1652	Kota Balikpapan	110.042.823.635	110.042.823.635	-
1653	Kota Tarakan	124.169.799.966	124.169.799.966	-
1654	Kota Bontang	117.365.737.843	117.365.737.843	-
1800	Prop. Sulawesi Tengah	189.000.000	189.000.000	-
1801	Kab. Poso	41.250.000	41.250.000	-
1802	Kab. Donggala	41.250.000	41.250.000	-
1803	Kab. Toli-toli	41.250.000	41.250.000	-
1804	Kab. Banggai	41.250.000	41.250.000	-
1805	Kab. Buol	41.250.000	41.250.000	-
1806	Kab. Morowali	378.250.000	378.250.000	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	41.250.000	41.250.000	-
1808	Kab. Parigi Moutong	41.250.000	41.250.000	-
1809	Kab. Tojo Una-Una	46.500.000	46.500.000	-
1851	Kota Palu	41.250.000	41.250.000	-
2100	Prop. Maluku	697.262.723	697.262.723	-
2101	Kab. Maluku Tengah	-	-	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	130.333.711	130.333.711	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	130.333.711	130.333.711	-
2104	Kab. Pulau Buru	130.333.711	130.333.711	-
2105	Kab. Aru Kepulauan	247.727.145	247.727.145	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	247.727.145	247.727.145	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	1.734.090.015	1.734.090.015	-
2151	Kota Ambon	130.333.711	130.333.711	-
3000	Prop. Bangka Belitung	16.674.748.998	16.674.748.998	-
3001	Kab. Belitung	4.764.178.284	4.764.178.284	-
3002	Kab. Bangka	4.764.178.284	4.764.178.284	-
3003	Kab. Bangka Barat	4.764.178.284	4.764.178.284	-
3004	Kab. Bangka Tengah	4.764.178.284	4.764.178.284	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM MINYAK

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3005	Kab. Bangka Selatan	4.764.178.284	4.764.178.284	-
3006	Kab. Belitung Timur	4.764.178.284	4.764.178.284	-
3051	Kota Pangkalpinang	4.764.178.284	4.764.178.284	-
3200	Prop. Kepulauan Riau	428.700.532.155	428.700.532.155	-
3201	Kab. Riau Kepulauan	170.275.463.101	170.275.463.101	-
3202	Kab. Karimun	170.275.463.101	170.275.463.101	-
3203	Kab. Natuna	827.282.070.296	827.282.070.296	-
3204	Kab. Lingga	170.275.463.101	170.275.463.101	-
3251	Kota Batam	170.275.463.101	170.275.463.101	-
3252	Kota Tanjung Pinang	170.275.463.101	170.275.463.101	-
3300	Prop. Irian Jaya Barat	15.911.104.593	15.911.104.593	-
3301	Kab. Manokwari	3.977.713.648	3.977.713.648	-
3302	Kab. Sorong	29.175.517.199	29.175.517.199	-
3303	Kab. Fak-Fak	3.977.713.648	3.977.713.648	-
3304	Kab. Sorong Selatan	3.977.713.648	3.977.713.648	-
3305	Kab. Raja Ampat	6.512.213.648	6.512.213.648	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	4.090.155.633	4.090.155.633	-
3307	Kab. Teluk Wondama	3.977.713.648	3.977.713.648	-
3308	Kab. Kaimana	3.977.713.648	3.977.713.648	-
3351	Kota Sorong	3.977.713.648	3.977.713.648	-
	Total	**18.817.957.164.466**	**18.817.957.164.466**	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM GAS
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	15.984.082.777	15.984.082.777	-
0200	Prop. Jawa Barat	37.236.359.769	37.236.359.769	-
0205	Kab. Bogor	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0206	Kab. Sukabumi	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0207	Kab. Cianjur	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0208	Kab. Bekasi	3.127.391.304	3.127.391.304	-
0209	Kab. Karawang	10.990.664.245	10.990.664.245	-
0210	Kab. Purwakarta	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0211	Kab. Subang	3.369.978.113	3.369.978.113	-
0212	Kab. Bandung	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0213	Kab. Sumedang	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0214	Kab. Garut	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0215	Kab. Tasikmalaya	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0216	Kab. Ciamis	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0217	Kab. Cirebon	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0218	Kab. Kuningan	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0219	Kab. Indramayu	2.387.977.923	2.387.977.923	-
0220	Kab. Majalengka	2.953.856.142	2.953.856.142	-
0251	Kota Bandung	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0252	Kota Bogor	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0253	Kota Sukabumi	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0254	Kota Cirebon	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0257	Kota Bekasi	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0258	Kota Depok	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0260	Kota Tasikmalaya	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0261	Kota Cimahi	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0262	Kota Banjar	2.990.190.796	2.990.190.796	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	1.985.685.584.098	1.985.685.584.098	-
0601	Kab. Aceh Besar	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0602	Kab. Pidie	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0603	Kab. Aceh Utara	308.953.808.112	308.953.808.112	-
0604	Kab. Aceh Timur	20.251.551.882	20.251.551.882	-
0605	Kab. Aceh Selatan	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0606	Kab. Aceh Barat	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0607	Kab. Aceh Tengah	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0609	Kab. Simeuleu	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0610	Kab. Aceh Singkil	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0611	Kab. Bireuen	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0613	Kab. Gayo Lues	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0614	Kab. Aceh Jaya	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0615	Kab. Nagan Raya	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0617	Kab. Bener Meriah	15.676.636.191	15.676.636.191	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM GAS
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0651	Kota Banda Aceh	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0652	Kota Sabang	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0653	Kota Langsa	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0654	Kota Lhokseumawe	15.676.636.191	15.676.636.191	-
0700	Prop. Sumatera Utara	161.730.135	161.730.135	-
0701	Kab. Deli Serdang	78.290.547	78.290.547	-
0702	Kab. Tanah Karo	13.477.511	13.477.511	-
0703	Kab. Langkat	235.586.030	235.586.030	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	13.477.511	13.477.511	-
0705	Kab. Simalungun	13.477.511	13.477.511	-
0706	Kab. Labuhanbatu	13.477.511	13.477.511	-
0707	Kab. Dairi	13.477.511	13.477.511	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	13.477.511	13.477.511	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	13.477.511	13.477.511	-
0710	Kab. Asahan	13.477.511	13.477.511	-
0711	Kab. Nias	13.477.511	13.477.511	-
0712	Kab. Toba Samosir	13.477.511	13.477.511	-
0713	Kab. Mandailing Natal	13.477.511	13.477.511	-
0714	Kab. Nias Selatan	13.477.511	13.477.511	-
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	13.477.511	13.477.511	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	13.477.511	13.477.511	-
0717	Kab. Samosir	13.477.511	13.477.511	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	13.477.511	13.477.511	-
0751	Kota Medan	13.477.511	13.477.511	-
0752	Kota Tebingtinggi	13.477.511	13.477.511	-
0753	Kota Binjai	63.531.552	63.531.552	-
0754	Kota Pematangsiantar	13.477.511	13.477.511	-
0755	Kota Tanjungbalai	13.477.511	13.477.511	-
0756	Kota Sibolga	13.477.511	13.477.511	-
0757	Kota Padang Sidempuan	13.477.511	13.477.511	-
0900	Prop. Riau	152.250.000	152.250.000	-
0901	Kab. Kampar	30.500.000	30.500.000	-
0902	Kab. Bengkalis	30.500.000	30.500.000	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	30.500.000	30.500.000	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	30.500.000	30.500.000	-
0906	Kab. Pelalawan	30.500.000	30.500.000	-
0907	Kab. Rokan Hulu	30.500.000	30.500.000	-
0908	Kab. Rokan Hilir	30.500.000	30.500.000	-
0909	Kab. Siak	30.500.000	30.500.000	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	30.500.000	30.500.000	-
0951	Kota Pekanbaru	304.500.000	304.500.000	-
0953	Kota Dumai	30.500.000	30.500.000	-
1000	Prop. Jambi	42.377.107.851	42.377.107.851	-
1001	Kab. Batanghari	13.914.998.883	13.914.998.883	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	48.793.185.516	48.793.185.516	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM GAS
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1003	Kab. Bungo	9.417.107.301	9.417.107.301	-
1004	Kab. Sarolangun	9.417.107.301	9.417.107.301	-
1005	Kab. Kerinci	9.417.107.301	9.417.107.301	-
1006	Kab. Merangin	9.417.107.301	9.417.107.301	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	40.880.245.907	40.880.245.907	-
1008	Kab. Tebo	9.417.107.301	9.417.107.301	-
1009	Kab. Muaro Jambi	9.417.107.301	9.417.107.301	-
1051	Kota Jambi	9.417.107.301	9.417.107.301	-
1100	Prop. Sumatera Selatan	197.641.148.892	197.641.148.892	-
1103	Kab. Musi Banyu Asin	381.475.973.063	381.475.973.063	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	31.619.845.978	31.619.845.978	-
1105	Kab. Muara Enim	35.782.465.695	35.782.465.695	-
1106	Kab. Lahat	32.346.389.573	32.346.389.573	-
1107	Kab. Musi Rawas	35.864.398.290	35.864.398.290	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1109	Kab. Banyu Asin	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1112	Kab. Ogan Ilir	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1151	Kota Palembang	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1153	Kota Prabumulih	30.224.378.179	30.224.378.179	-
1154	Kota Pagar Alam	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1155	Kota Lubuk Linggau	30.406.330.598	30.406.330.598	-
1600	Prop. Kalimantan Timur	2.038.823.487.919	2.038.823.487.919	-
1601	Kab. Kutai	2.417.662.900.430	2.417.662.900.430	-
1602	Kab. Pasir	328.427.509.604	328.427.509.604	-
1603	Kab. Bulungan	328.454.454.827	328.454.454.827	-
1604	Kab. Berau	328.427.509.604	328.427.509.604	-
1605	Kab. Nunukan	328.427.509.604	328.427.509.604	-
1606	Kab. Malinau	328.427.509.604	328.427.509.604	-
1607	Kab. Kutai Barat	328.427.509.604	328.427.509.604	-
1608	Kab. Kutai Timur	328.427.509.604	328.427.509.604	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	330.794.994.043	330.794.994.043	-
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	339.169.072.692	339.169.072.692	-
1652	Kota Balikpapan	328.427.509.604	328.427.509.604	-
1653	Kota Tarakan	328.555.790.710	328.555.790.710	-
1654	Kota Bontang	336.947.734.073	336.947.734.073	-
3200	Prop. Kepulauan Riau	112.407.189.589	112.407.189.589	-
3201	Kab. Riau Kepulauan	41.121.419.100	41.121.419.100	-
3202	Kab. Karimun	41.121.419.100	41.121.419.100	-
3203	Kab. Natuna	128.777.210.787	128.777.210.787	-
3204	Kab. Lingga	41.121.419.100	41.121.419.100	-
3251	Kota Batam	41.121.419.100	41.121.419.100	-
3252	Kota Tanjung Pinang	41.121.419.100	41.121.419.100	-
3300	Prop. Irian Jaya Barat	280.726.694	280.726.694	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM GAS
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3301	Kab. Manokwari	70.181.674	70.181.674	-
3302	Kab. Sorong	561.453.388	561.453.388	-
3303	Kab. Fak-Fak	70.181.674	70.181.674	-
3304	Kab. Sorong Selatan	70.181.674	70.181.674	-
3305	Kab. Raja Ampat	70.181.674	70.181.674	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	70.181.674	70.181.674	-
3307	Kab. Teluk Wondama	70.181.674	70.181.674	-
3308	Kab. Kaimana	70.181.674	70.181.674	-
3351	Kota Sorong	70.181.674	70.181.674	-
	Total	12.817.885.216.410	12.817.885.216.410	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0199	Instansi Pusat	457.578.671.019	457.578.671.019	-
0200	Prop. Jawa Barat	2.143.588.209	2.143.588.209	-
0205	Kab. Bogor	4.269.134.178	4.269.134.178	-
0206	Kab. Sukabumi	173.849.256	173.849.256	-
0207	Kab. Cianjur	173.849.256	173.849.256	-
0208	Kab. Bekasi	173.849.256	173.849.256	-
0209	Kab. Karawang	173.849.256	173.849.256	-
0210	Kab. Purwakarta	175.449.256	175.449.256	-
0211	Kab. Subang	173.849.256	173.849.256	-
0212	Kab. Bandung	221.510.056	221.510.056	-
0213	Kab. Sumedang	173.849.256	173.849.256	-
0214	Kab. Garut	246.870.056	246.870.056	-
0215	Kab. Tasikmalaya	184.404.136	184.404.136	-
0216	Kab. Ciamis	173.849.256	173.849.256	-
0217	Kab. Cirebon	173.849.256	173.849.256	-
0218	Kab. Kuningan	173.849.256	173.849.256	-
0219	Kab. Indramayu	173.849.256	173.849.256	-
0220	Kab. Majalengka	173.849.256	173.849.256	-
0251	Kota Bandung	173.849.256	173.849.256	-
0252	Kota Bogor	173.849.256	173.849.256	-
0253	Kota Sukabumi	173.849.256	173.849.256	-
0254	Kota Cirebon	173.849.256	173.849.256	-
0257	Kota Bekasi	173.849.256	173.849.256	-
0258	Kota Depok	173.849.256	173.849.256	-
0260	Kota Tasikmalaya	173.849.256	173.849.256	-
0261	Kota Cimahi	173.849.256	173.849.256	-
0262	Kota Banjar	173.849.256	173.849.256	-
0300	Prop. Jawa Tengah	555.282	555.282	-
0301	Kab. Semarang	32.663	32.663	-
0302	Kab. Kendal	32.663	32.663	-
0303	Kab. Demak	32.663	32.663	-
0304	Kab. Grobogan	32.663	32.663	-
0305	Kab. Pekalongan	32.663	32.663	-
0306	Kab. Batang	32.663	32.663	-
0307	Kab. Tegal	32.663	32.663	-
0308	Kab. Brebes	32.663	32.663	-
0309	Kab. Pati	32.663	32.663	-
0310	Kab. Kudus	32.663	32.663	-
0311	Kab. Pemalang	32.663	32.663	-
0312	Kab. Jepara	32.663	32.663	-
0313	Kab. Rembang	32.663	32.663	-
0314	Kab. Blora	32.663	32.663	-
0315	Kab. Banyumas	32.663	32.663	-
0316	Kab. Cilacap	32.663	32.663	-
0317	Kab. Purbalingga	32.663	32.663	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0318	Kab. Banjarnegara	32.663	32.663	-
0319	Kab. Magelang	32.663	32.663	-
0320	Kab. Temanggung	32.663	32.663	-
0321	Kab. Wonosobo	32.663	32.663	-
0322	Kab. Purworejo	1.110.564	1.110.564	-
0323	Kab. Kebumen	32.663	32.663	-
0324	Kab. Klaten	32.663	32.663	-
0325	Kab. Boyolali	32.663	32.663	-
0326	Kab. Sragen	32.663	32.663	-
0327	Kab. Sukoharjo	32.663	32.663	-
0328	Kab. Karanganyar	32.663	32.663	-
0329	Kab. Wonogiri	32.663	32.663	-
0351	Kota Semarang	32.663	32.663	-
0352	Kota Salatiga	32.663	32.663	-
0353	Kota Pekalongan	32.663	32.663	-
0354	Kota Tegal	32.663	32.663	-
0355	Kota Magelang	32.663	32.663	-
0356	Kota Surakarta	32.663	32.663	-
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	12.858.048	12.858.048	-
0404	Kab. Kulonprogo	51.432.192	51.432.192	-
0500	Prop. Jawa Timur	6.348.400	6.348.400	-
0511	Kab. Banyuwangi	1.659.520	1.659.520	-
0520	Kab. Trenggalek	4.970.880	4.970.880	-
0525	Kab. Ponorogo	18.763.200	18.763.200	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	19.993.575	19.993.575	-
0601	Kab. Aceh Besar	2.469.168	2.469.168	-
0602	Kab. Pidie	6.058.102	6.058.102	-
0606	Kab. Aceh Barat	6.298.325	6.298.325	-
0610	Kab. Aceh Singkil	400.896	400.896	-
0614	Kab. Aceh Jaya	10.219.876	10.219.876	-
0700	Prop. Sumatera Utara	223.181.056	223.181.056	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	138.508.571	138.508.571	-
0707	Kab. Dairi	99.320.637	99.320.637	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	61.433.329	61.433.329	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	280.377.340	280.377.340	-
0713	Kab. Mandailing Natal	258.793.497	258.793.497	-
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	2.967.124	2.967.124	-
0757	Kota Padang Sidempuan	51.323.720	51.323.720	-
0800	Prop. Sumatera Barat	3.420.368.166	3.420.368.166	-
0801	Kab. Agam	378.711.401	378.711.401	-
0802	Kab. Pasaman	382.052.201	382.052.201	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	378.711.401	378.711.401	-
0804	Kab. Solok	379.020.521	379.020.521	-
0805	Kab. Padang Pariaman	378.711.401	378.711.401	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	408.223.721	408.223.721	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM TAMBANG

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1507	Kab. Tabalong	40.843.321.880	40.843.321.880	-
1508	Kab. Kotabaru	66.416.904.566	66.416.904.566	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	17.958.153.156	17.958.153.156	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	43.214.313.462	43.214.313.462	-
1511	Kab. Balangan	39.756.192.146	39.756.192.146	-
1551	Kota Banjarmasin	16.994.117.181	16.994.117.181	-
1552	Kota Banjar Baru	18.714.325.448	18.714.325.448	-
1600	Prop. Kalimantan Timur	215.778.074.688	215.778.074.688	-
1601	Kab. Kutai	79.344.470.997	79.344.470.997	-
1602	Kab. Pasir	62.431.411.623	62.431.411.623	-
1603	Kab. Bulungan	35.797.863.592	35.797.863.592	-
1604	Kab. Berau	51.874.557.129	51.874.557.129	-
1605	Kab. Nunukan	41.697.003.389	41.697.003.389	-
1606	Kab. Malinau	36.477.059.075	36.477.059.075	-
1607	Kab. Kutai Barat	89.276.850.424	89.276.850.424	-
1608	Kab. Kutai Timur	276.827.829.703	276.827.829.703	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	36.001.185.364	36.001.185.364	-
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	46.688.636.760	46.688.636.760	-
1652	Kota Balikpapan	35.564.880.707	35.564.880.707	-
1653	Kota Tarakan	35.564.880.707	35.564.880.707	-
1654	Kota Bontang	35.565.669.238	35.565.669.238	-
1700	Prop. Sulawesi Utara	912.995.648	912.995.648	-
1702	Kab. Minahasa	167.415.281	167.415.281	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	2.312.359.519	2.312.359.519	-
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	144.778.204	144.778.204	-
1705	Kab. Talaud Kepulauan	144.778.204	144.778.204	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	266.575.480	266.575.480	-
1707	Kota Tomohon	144.778.204	144.778.204	-
1708	Kab. Minahasa Utara	176.559.038	176.559.038	-
1751	Kota Manado	144.869.045	144.869.045	-
1753	Kota Bitung	149.869.609	149.869.609	-
1800	Prop. Sulawesi Tengah	70.438.692	70.438.692	-
1802	Kab. Donggala	5.616.208	5.616.208	-
1803	Kab. Toli-toli	5.262.384	5.262 384	-
1806	Kab. Morowali	251.017.352	251.017.352	-
1808	Kab. Parigi Moutong	12.965.554	12.965.554	-
1851	Kota Palu	6.893.273	6.893.273	-
1900	Prop. Sulawesi Selatan	18.099.597.107	18.099.597.107	-
1901	Kab. Pinrang	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1902	Kab. Gowa	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1903	Kab. Wajo	1.625.928.629	1.625.928.629	-
1905	Kab. Bone	1.629.294.567	1.629.294.567	-
1906	Kab. Tana Toraja	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1907	Kab. Maros	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1909	Kab. Luwu	1.744.285.846	1.744.285.846	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1910	Kab. Sinjai	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1911	Kab. Bulukumba	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1912	Kab. Bantaeng	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1913	Kab. Jeneponto	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1914	Kab. Selayar	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1915	Kab. Takalar	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1916	Kab. Barru	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	1.643.415.213	1.643.415.213	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1919	Kab. Soppeng	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1921	Kab. Enrekang	1.629.324.480	1.629.324.480	-
1922	Kab. Luwu Utara	2.012.378.583	2.012.378.583	-
1924	Kab. Luwu Timur	36.119.953.620	36.119.953.620	-
1951	Kota Makassar	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1952	Kota Pare-pare	1.624.612.967	1.624.612.967	-
1953	Kota Palopo	1.624.612.967	1.624.612.967	-
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	6.934.054.114	6.934.054.114	-
2001	Kab. Kendari/Konawe	1.578.042.958	1.578.042.958	-
2002	Kab. Buton	1.517.809.593	1.517.809.593	-
2003	Kab. Muna	1.511.844.783	1.511.844.783	-
2004	Kab. Kolaka	13.892.690.411	13.892.690.411	-
2005	Kab. Konawe Selatan	1.568.738.189	1.568.738.189	-
2006	Kab. Wakatobi	1.511.844.783	1.511.844.783	-
2007	Kab. Bombana	1.533.166.675	1.533.166.675	-
2008	Kab. Kolaka Utara	1.598.389.474	1.598.389.474	-
2051	Kota Kendari	1.511.844.783	1.511.844.783	-
2052	Kota Bau-Bau	1.511.844.783	1.511.844.783	-
2100	Prop. Maluku	1.042.880	1.042.880	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	4.171.520	4.171.520	-
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	22.468.229.286	22.468.229.286	-
2301	Kab. Lombok Barat	5.525.424.337	5.525.424.337	-
2302	Kab. Lombok Tengah	5.524.621.651	5.524.621.651	-
2303	Kab. Lombok Timur	5.524.621.651	2.811.304.431	2.713.317.220
2304	Kab. Bima	5.531.010.065	5.531.010.065	-
2305	Kab. Sumbawa	6.214.616.000	6.214.616.000	-
2306	Kab. Dompu	5.532.846.165	5.532.846.165	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	44.973.713.608	44.973.713.608	-
2351	Kota Mataram	5.524.621.651	5.524.621.651	-
2352	Kota Bima	5.521.442.011	5.521.442.011	-
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	21.851.264	21.851.264	-
2402	Kab. Belu	8.000.000	8.000.000	-
2410	Kab. Manggarai	73.091.456	73.091.456	-
2415	Kab. Manggarai Barat	6.313.600	6.313.600	-
2500	Prop. Papua	213.890.960.108	213.890.960.108	-
2501	Kab. Jayapura	22.454.769.426	22.454.769.426	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2502	Kab. Biak Numfor	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2504	Kab. Yapen Waropen	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2507	Kab. Merauke	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2508	Kab. Jayawijaya	22.503.916.426	22.503.916.426	-
2509	Kab. Paniai	22.879.374.575	22.879.374.575	-
2510	Kab. Nabire	22.881.339.263	22.881.339.263	-
2511	Kab. Puncak Jaya	22.523.352.683	22.523.352.683	-
2512	Kab. Mimika	427.089.523.429	427.089.523.429	-
2513	Kab. Mappi	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2514	Kab. Asmat	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2515	Kab. Boven Digoel	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2516	Kab. Sarmi	23.101.728.781	23.101.728.781	-
2517	Kab. Keerom	22.520.504.055	22.520.504.055	-
2518	Kab. Tolikara	22.540.667.554	22.540.667.554	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	22.480.148.781	22.480.148.781	-
2523	Kab. Waropen	22.495.590.620	22.495.590.620	-
2524	Kab. Yahukimo	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2525	Kab. Supiori	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2551	Kota Jayapura	22.454.769.426	22.454.769.426	-
2600	Prop. Bengkulu	840.675.942	538.177.016	302.498.926
2601	Kab. Bengkulu Utara	1.373.899.263	1.373.899.263	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	209.660.209	209.660.209	-
2603	Kab. Rejang Lebong	191.663.707	191.663.707	-
2604	Kab. Seluma	615.169.712	615.169.712	-
2605	Kab. Kaur	202.302.446	202.302.446	-
2606	Kab. Muko-Muko	191.663.707	75.624.731	116.038.976
2607	Kab. Lebong	191.663.707	191.663.707	-
2608	Kab. Kepahiang	195.017.307	195.017.307	-
2651	Kota Bengkulu	191.663.707	191.663.707	-
2800	Prop. Maluku Utara	9.814.106.215	9.814.106.215	-
2801	Kab. Halmahera Barat	2.828.353.176	2.828.353.176	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	3.394.568.106	3.394.568.106	-
2803	Kab. Halmahera Utara	7.176.319.166	7.176.319.166	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	2.744.674.741	2.744.674.741	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	2.744.674.741	2.744.674.741	-
2806	Kab. Halmahera Timur	14.878.485.436	14.878.485.436	-
2851	Kota Ternate	2.744.674.741	2.744.674.741	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	2.744.674.741	2.744.674.741	-
2900	Prop. Banten	61.765.511	61.765.511	-
2901	Kab. Serang	16.958.255	16.958.255	-
2902	Kab. Pandeglang	16.958.255	16.958.255	-
2903	Kab. Lebak	154.861.678	154.861.678	-
2904	Kab. Tangerang	24.367.343	24.367.343	-
2951	Kota Tangerang	16.958.255	16.958.255	-
2952	Kota Cilegon	16.958.255	16.958.255	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3000	Prop. Bangka Belitung	9.462.858.061	9.462.858.061	-
3001	Kab. Belitung	4.328.432.770	4.328.432.770	-
3002	Kab. Bangka	3.625.559.541	3.625.559.541	-
3003	Kab. Bangka Barat	3.871.700.384	3.871.700.384	-
3004	Kab. Bangka Tengah	9.718.970.477	9.718.970.477	-
3005	Kab. Bangka Selatan	8.887.436.980	8.887.436.980	-
3006	Kab. Belitung Timur	4.308.614.219	4.308.614.219	-
3051	Kota Pangkalpinang	3.110.717.876	3.110.717.876	-
3100	Prop. Gorontalo	6.016.000	6.016.000	-
3102	Kab. Boalemo	24.064.000	24.064.000	-
3200	Prop. Kepulauan Riau	4.315.899.085	4.315.899.085	-
3201	Kab. Riau Kepulauan	3.611.985.108	3.611.985.108	-
3202	Kab. Karimun	6.189.230.740	6.189.230.740	-
3203	Kab. Natuna	1.688.468.431	1.688.468.431	-
3204	Kab. Lingga	1.809.051.892	1.809.051.892	-
3251	Kota Batam	1.688.468.431	1.688.468.431	-
3252	Kota Tanjung Pinang	1.688.468.431	1.688.468.431	-
3300	Prop. Irian Jaya Barat	39.267.147	39.267.147	-
3305	Kab. Raja Ampat	18.392.334	18.392.334	-
3308	Kab. Kaimana	138.676.256	138.676.256	-
	T o t a l	3.629.005.521.129	3.624.647.010.912	4.358.510.217

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0199	Instansi Pusat	922.796.385.903	922.796.385.903	-
0200	Prop. Jawa Barat	200.302.213	200.302.213	-
0205	Kab. Bogor	53.691.781	53.691.781	-
0206	Kab. Sukabumi	50.014.690	50.014.690	-
0207	Kab. Cianjur	73.952.721	73.952.721	-
0208	Kab. Bekasi	16.691.850	16.691.850	-
0209	Kab. Karawang	16.691.850	16.691.850	-
0210	Kab. Purwakarta	34.126.223	34.126.223	-
0211	Kab. Subang	16.691.850	16.691.850	-
0212	Kab. Bandung	18.277.433	18.277.433	-
0213	Kab. Sumedang	17.877.206	17.877.206	-
0214	Kab. Garut	17.063.810	17.063.810	-
0215	Kab. Tasikmalaya	24.492.467	24.492.467	-
0216	Kab. Ciamis	184.581.992	184.581.992	-
0217	Kab. Cirebon	16.691.850	16.691.850	-
0218	Kab. Kuningan	18.316.936	18.316.936	-
0219	Kab. Indramayu	75.127.666	75.127.666	-
0220	Kab. Majalengka	16.691.850	16.691.850	-
0251	Kota Bandung	16.691.850	16.691.850	-
0252	Kota Bogor	16.691.850	16.691.850	-
0253	Kota Sukabumi	16.691.850	16.691.850	-
0254	Kota Cirebon	16.691.850	16.691.850	-
0257	Kota Bekasi	16.691.850	16.691.850	-
0258	Kota Depok	16.691.850	16.691.850	-
0260	Kota Tasikmalaya	16.691.850	16.691.850	-
0261	Kota Cimahi	16.691.850	16.691.850	-
0262	Kota Banjar	16.691.850	16.691.850	-
0300	Prop. Jawa Tengah	975.718.039	975.718.039	-
0301	Kab. Semarang	59.687.197	59.687.197	-
0302	Kab. Kendal	212.806.957	212.806.957	-
0303	Kab. Demak	57.395.177	57.395.177	-
0304	Kab. Grobogan	169.327.469	169.327.469	-
0305	Kab. Pekalongan	91.642.576	91.642.576	-
0306	Kab. Batang	147.988.284	147.988.284	-
0307	Kab. Tegal	102.409.431	102.409.431	-
0308	Kab. Brebes	122.862.601	122.862.601	-
0309	Kab. Pati	87.349.109	87.349.109	-
0310	Kab. Kudus	57.470.822	57.470.822	-
0311	Kab. Pemalang	170.169.255	170.169.255	-
0312	Kab. Jepara	65.731.749	65.731.749	-
0313	Kab. Rembang	71.389.365	71.389.365	-
0314	Kab. Blora	1.048.773.544	1.048.773.544	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0315	Kab. Banyumas	69.106.949	69.106.949	-
0316	Kab. Cilacap	112.195.828	112.195.828	-
0317	Kab. Purbalingga	59.855.305	59.855.305	-
0318	Kab. Banjarnegara	71.094.778	71.094.778	-
0319	Kab. Magelang	66.478.924	66.478.924	-
0320	Kab. Temanggung	66.327.620	66.327.620	-
0321	Kab. Wonosobo	61.913.296	61.913.296	-
0322	Kab. Purworejo	62.954.273	62.954.273	-
0323	Kab. Kebumen	66.151.363	66.151.363	-
0324	Kab. Klaten	57.395.177	57.395.177	-
0325	Kab. Boyolali	121.648.587	121.648.587	-
0326	Kab. Sragen	57.536.787	57.536.787	-
0327	Kab. Sukoharjo	57.395.177	57.395.177	-
0328	Kab. Karanganyar	57.452.352	57.452.352	-
0329	Kab. Wonogiri	74.659.066	74.659.066	-
0351	Kota Semarang	88.727.199	88.727.199	-
0352	Kota Salatiga	57.395.177	57.395.177	-
0353	Kota Pekalongan	57.395.177	57.395.177	-
0354	Kota Tegal	57.395.177	57.395.177	-
0355	Kota Magelang	57.395.177	57.395.177	-
0356	Kota Surakarta	57.395.177	57.395.177	-
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	1.504.160	1.504.160	-
0401	Kab. Bantul	990.640	990.640	-
0402	Kab. Sleman	752.080	752.080	-
0403	Kab. Gunungkidul	2.769.760	2.769.760	-
0404	Kab. Kulonprogo	752.080	752.080	-
0451	Kota Yogyakarta	752.080	752.080	-
0500	Prop. Jawa Timur	783.846.513	783.846.513	-
0501	Kab. Gresik	42.370.081	42.370.081	-
0502	Kab. Mojokerto	42.400.770	42.400.770	-
0503	Kab. Sidoarjo	42.370.081	42.370.081	-
0504	Kab. Jombang	50.502.833	50.502.833	-
0505	Kab. Sampang	42.370.081	42.370.081	-
0506	Kab. Pamekasan	42.370.081	42.370.081	-
0507	Kab. Sumenep	42.370.081	42.370.081	-
0508	Kab. Bangkalan	42.370.081	42.370.081	-
0509	Kab. Bondowoso	99.334.738	99.334.738	-
0510	Kab. Situbondo	64.599.703	64.599.703	-
0511	Kab. Banyuwangi	462.750.345	462.750.345	-
0512	Kab. Jember	156.960.939	156.960.939	-
0513	Kab. Malang	98.630.889	98.630.889	-
0514	Kab. Pasuruan	43.025.120	43.025.120	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0515	Kab. Probolinggo	42.370.081	42.370.081	-
0516	Kab. Lumajang	42.370.081	42.370.081	-
0517	Kab. Kediri	88.918.398	88.918.398	-
0518	Kab. Tulungagung	51.131.216	51.131.216	-
0519	Kab. Nganjuk	122.740.713	122.740.713	-
0520	Kab. Trenggalek	42.921.428	42.921.428	-
0521	Kab. Blitar	78.900.977	78.900.977	-
0522	Kab. Madiun	184.492.000	184.492.000	-
0523	Kab. Ngawi	95.228.234	95.228.234	-
0524	Kab. Magetan	42.370.081	42.370.081	-
0525	Kab. Ponorogo	57.496.459	57.496.459	-
0526	Kab. Pacitan	42.370.081	42.370.081	-
0527	Kab. Bojonegoro	248.790.333	248.790.333	-
0528	Kab. Tuban	252.896.898	252.896.898	-
0529	Kab. Lamongan	88.632.489	88.632.489	-
0551	Kota Surabaya	42.370.081	42.370.081	-
0552	Kota Mojokerto	42.370.081	42.370.081	-
0553	Kota Malang	42.370.081	42.370.081	-
0554	Kota Pasuruan	42.370.081	42.370.081	-
0555	Kota Probolinggo	42.370.081	42.370.081	-
0556	Kota Blitar	42.370.081	42.370.081	-
0557	Kota Kediri	42.370.081	42.370.081	-
0558	Kota Madiun	42.370.081	42.370.081	-
0559	Kota Batu	42.370.081	42.370.081	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	171.430.898	171.430.898	-
0601	Kab. Aceh Besar	11.205.070	11.205.070	-
0602	Kab. Pidie	6.715.007	6.715.007	-
0603	Kab. Aceh Utara	7.276.458	7.276.458	-
0604	Kab. Aceh Timur	7.522.485	7.522.485	-
0605	Kab. Aceh Selatan	7.554.104	7.554.104	-
0606	Kab. Aceh Barat	32.322.637	32.322.637	-
0607	Kab. Aceh Tengah	5.454.618	5.454.618	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	5.454.618	5.454.618	-
0609	Kab. Simeuleu	6.381.362	6.381.362	-
0610	Kab. Aceh Singkil	6.096.879	6.096.879	-
0611	Kab. Bireuen	33.186.706	33.186.706	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	12.230.553	12.230.553	-
0613	Kab. Gayo Lues	5.821.060	5.821.060	-
0614	Kab. Aceh Jaya	5.454.618	5.454.618	-
0615	Kab. Nagan Raya	15.860.960	15.860.960	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	7.005.412	-	7.005.412
0617	Kab. Bener Meriah	20.823.732	20.823.732	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0651	Kota Banda Aceh	5.454.618	5.454.618	-
0652	Kota Sabang	5.454.618	5.454.618	-
0653	Kota Langsa	5.454.618	5.454.618	-
0654	Kota Lhokseumawe	5.454.618	5.454.618	-
0700	Prop. Sumatera Utara	197.347.024	197.347.024	-
0701	Kab. Deli Serdang	16.445.584	16.445.584	-
0702	Kab. Tanah Karo	16.445.584	16.445.584	-
0703	Kab. Langkat	16.445.584	16.445.584	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	16.445.584	16.445.584	-
0705	Kab. Simalungun	42.526.938	42.526.938	-
0706	Kab. Labuhanbatu	50.515.913	50.515.913	-
0707	Kab. Dairi	16.445.584	16.445.584	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	41.296.750	41.296.750	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	124.898.835	124.898.835	-
0710	Kab. Asahan	16.445.584	16.445.584	-
0711	Kab. Nias	16.445.584	-	16.445.584
0712	Kab. Toba Samosir	48.547.240	48.547.240	-
0713	Kab. Mandailing Natal	54.599.493	54.599.493	-
0714	Kab. Nias Selatan	16.445.584	16.445.584	-
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	16.445.584	16.445.584	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	71.133.904	71.133.904	-
0717	Kab. Samosir	76.294.065	76.294.065	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	16.445.584	16.445.584	-
0751	Kota Medan	16.445.584	16.445.584	-
0752	Kota Tebingtinggi	16.445.584	16.445.584	-
0753	Kota Binjai	16.445.584	16.445.584	-
0754	Kota Pematangsiantar	16.445.584	16.445.584	-
0755	Kota Tanjungbalai	16.445.584	16.445.584	-
0756	Kota Sibolga	16.445.584	16.445.584	-
0757	Kota Padang Sidempuan	16.445.584	16.445.584	-
0800	Prop. Sumatera Barat	258.950.575	258.950.575	-
0801	Kab. Agam	28.772.284	28.772.284	-
0802	Kab. Pasaman	106.479.331	106.479.331	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	28.772.284	28.772.284	-
0804	Kab. Solok	29.052.838	29.052.838	-
0805	Kab. Padang Pariaman	28.772.284	28.772.284	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	28.772.284	28.772.284	-
0807	Kab. Tanah Datar	30.751.203	30.751.203	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	29.900.782	29.900.782	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	400.915.615	400.915.615	-
0810	Kab. Dharmasraya	28.772.284	28.772.284	-
0811	Kab. Solok Selatan	63.419.312	63.419.312	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0812	Kab. Pasaman Barat	30.015.778	30.015.778	-
0851	Kota Bukittinggi	28.772.284	28.772.284	-
0852	Kota Padang Panjang	28.772.284	28.772.284	-
0853	Kota Solok	28.772.284	28.772.284	-
0854	Kota Sawahlunto	28.772.284	28.772.284	-
0855	Kota Padang	28.772.284	28.772.284	-
0856	Kota Payakumbuh	28.772.284	28.772.284	-
0857	Kota Pariaman	28.772.284	28.772.284	-
0900	Prop. Riau	4.721.623.165	4.721.623.165	-
0901	Kab. Kampar	1.486.871.033	1.486.871.033	-
0902	Kab. Bengkalis	1.438.052.892	1.438.052.892	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	1.984.883.744	1.984.883.744	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	1.130.539.559	1.130.539.559	-
0906	Kab. Pelalawan	3.751.841.609	3.751.841.609	-
0907	Kab. Rokan Hulu	1.415.890.060	1.415.890.060	-
0908	Kab. Rokan Hilir	1.826.522.019	1.826.522.019	-
0909	Kab. Siak	2.483.126.156	2.483.126.156	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	1.354.954.845	1.354.954.845	-
0951	Kota Pekanbaru	935.211.536	935.211.536	-
0953	Kota Dumai	971.799.680	971.799.680	-
1000	Prop. Jambi	1.589.271.596	1.589.271.596	-
1001	Kab. Batanghari	1.166.767.737	1.166.767.737	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.047.159.797	1.047.159.797	-
1003	Kab. Bungo	927.616.036	927.616.036	-
1004	Kab. Sarolangun	545.800.039	545.800.039	-
1005	Kab. Kerinci	318.058.838	318.058.838	-
1006	Kab. Merangin	397.001.658	397.001.658	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	513.270.920	513.270.920	-
1008	Kab. Tebo	467.306.198	467.306.198	-
1009	Kab. Muaro Jambi	656.046.315	656.046.315	-
1051	Kota Jambi	318.058.838	318.058.838	-
1100	Prop. Sumatera Selatan	476.776.471	476.776.471	-
1103	Kab. Musi Banyu Asin	164.611.925	164.611.925	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	74.228.289	74.228.289	-
1105	Kab. Muara Enim	453.881.286	453.881.286	-
1106	Kab. Lahat	207.049.171	207.049.171	-
1107	Kab. Musi Rawas	273.729.095	273.729.095	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	73.347.664	73.347.664	-
1109	Kab. Banyu Asin	73.347.664	73.347.664	-
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	145.912.881	145.912.881	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	73.347.664	73.347.664	-
1112	Kab. Ogan Ilir	73.347.664	73.347.664	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1151	Kota Palembang	73.347.664	73.347.664	-
1153	Kota Prabumulih	74.259.565	74.259.565	-
1154	Kota Pagar Alam	73.347.664	769.357	72.578.307
1155	Kota Lubuk Linggau	73.347.664	73.347.664	-
1200	Prop. Lampung	41.173.627	-	41.173.627
1201	Kab. Lampung Selatan	9.149.694	9.149.694	-
1202	Kab. Lampung Tengah	9.149.694	9.149.694	-
1203	Kab. Lampung Utara	9.149.694	9.149.694	-
1204	Kab. Lampung Barat	9.149.694	9.149.694	-
1205	Kab. Tulang Bawang	78.602.970	78.602.970	-
1206	Kab. Tanggamus	9.149.694	9.149.694	-
1207	Kab. Lampung Timur	9.149.694	9.149.694	-
1208	Kab. Way Kanan	12.893.980	12.893.980	-
1251	Kota Bandar Lampung	9.149.694	9.149.694	-
1252	Kota Metro	9.149.694	9.149.694	-
1300	Prop. Kalimantan Barat	1.821.279.538	1.821.279.538	-
1301	Kab. Sambas	280.449.532	280.449.532	-
1302	Kab. Sanggau	290.938.170	290.938.170	-
1303	Kab. Sintang	436.840.797	436.840.797	-
1304	Kab. Pontianak	610.203.909	610.203.909	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	1.929.420.472	1.929.420.472	-
1306	Kab. Ketapang	1.769.170.739	1.769.170.739	-
1307	Kab. Bengkayang	277.881.660	277.881.660	-
1308	Kab. Landak	319.478.844	319.478.844	-
1309	Kab. Melawi	527.321.676	527.321.676	-
1310	Kab. Sekadau	277.210.620	277.210.620	-
1351	Kota Pontianak	288.991.100	288.991.100	-
1352	Kota Singkawang	277.210.620	277.210.620	-
1400	Prop. Kalimantan Tengah	14.779.654.862	14.779.654.862	-
1401	Kab. Kapuas	4.601.288.627	4.601.288.627	-
1402	Kab. Barito Utara	9.446.801.155	9.446.801.155	-
1403	Kab. Barito Selatan	2.211.043.914	2.211.043.914	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	4.145.520.416	4.145.520.416	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	3.452.864.154	3.452.864.154	-
1406	Kab. Katingan	8.907.283.114	8.907.283.114	-
1407	Kab. Seruyan	5.537.227.428	5.537.227.428	-
1408	Kab. Sukamara	1.829.155.109	1.829.155.109	-
1409	Kab. Lamandau	3.438.027.762	3.438.027.762	-
1410	Kab. Gunung Mas	3.099.603.241	3.099.603.241	-
1411	Kab. Pulang Pisau	1.894.188.141	1.894.188.141	-
1412	Kab. Murung Raya	6.967.897.028	6.967.897.028	-
1413	Kab. Barito Timur	1.792.493.928	1.792.493.928	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1451	Kota Palangkaraya	1.795.225.413	1.795.225.413	-
1500	Prop. Kalimantan Selatan	310.201.710	310.201.710	-
1501	Kab. Banjar	51.700.284	51.700.284	-
1502	Kab. Tanah Laut	103.539.685	103.539.685	-
1503	Kab. Tapin	51.999.484	51.999.484	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	56.953.289	56.953.289	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	51.700.284	51.700.284	-
1506	Kab. Barito Kuala	127.116.224	127.116.224	-
1507	Kab. Tabalong	324.715.249	324.715.249	-
1508	Kab. Kotabaru	108.183.428	108.183.428	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	51.700.284	51.700.284	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	154.290.167	154.290.167	-
1511	Kab. Balangan	51.700.284	51.700.284	-
1551	Kota Banjarmasin	55.507.884	55.507.884	-
1552	Kota Banjar Baru	51.700.284	51.700.284	-
1600	Prop. Kalimantan Timur	18.786.025.703	18.786.025.703	-
1601	Kab. Kutai	4.725.649.097	4.725.649.097	-
1602	Kab. Pasir	6.273.448.852	6.273.448.852	-
1603	Kab. Bulungan	9.550.858.586	9.550.858.586	-
1604	Kab. Berau	14.381.318.133	14.381.318.133	-
1605	Kab. Nunukan	4.394.059.142	4.394.059.142	-
1606	Kab. Malinau	5.389.067.551	5.389.067.551	-
1607	Kab. Kutai Barat	10.410.160.887	10.410.160.887	-
1608	Kab. Kutai Timur	8.180.738.876	8.180.738.876	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	2.353.483.683	2.353.483.683	-
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	2.425.336.733	2.425.336.733	-
1652	Kota Balikpapan	2.353.188.297	2.353.188.297	-
1653	Kota Tarakan	2.353.604.667	2.353.604.667	-
1654	Kota Bontang	2.353.188.297	2.353.188.297	-
1700	Prop. Sulawesi Utara	90.621.904	90.621.904	-
1702	Kab. Minahasa	22.655.475	22.655.475	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	181.243.808	181.243.808	-
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	22.655.475	22.655.475	-
1705	Kab. Talaud Kepulauan	22.655.475	22.655.475	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	22.655.475	22.655.475	-
1707	Kota Tomohon	22.655.475	22.655.475	-
1708	Kab. Minahasa Utara	22.655.475	22.655.475	-
1751	Kota Manado	22.655.475	22.655.475	-
1753	Kota Bitung	22.655.475	22.655.475	-
1800	Prop. Sulawesi Tengah	1.261.497.205	1.261.497.205	-
1801	Kab. Poso	2.072.400.380	2.072.400.380	-
1802	Kab. Donggala	214.365.324	214.365.324	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1803	Kab. Toli-toli	147.703.626	147.703.626	-
1804	Kab. Banggai	1.375.101.034	1.375.101.034	-
1805	Kab. Buol	138.945.959	138.945.959	-
1806	Kab. Morowali	212.257.194	212.257.194	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	178.051.126	178.051.126	-
1808	Kab. Parigi Moutong	423.450.727	423.450.727	-
1809	Kab. Tojo Una-Una	145.460.732	145.460.732	-
1851	Kota Palu	138.252.712	138.252.712	-
1900	Prop. Sulawesi Selatan	62.999.296	62.999.296	-
1901	Kab. Pinrang	5.876.422	5.876.422	-
1902	Kab. Gowa	5.727.208	5.727.208	-
1903	Kab. Wajo	5.727.208	5.727.208	-
1905	Kab. Bone	13.579.072	13.579.072	-
1906	Kab. Tana Toraja	6.785.034	6.785.034	-
1907	Kab. Maros	5.727.208	5.727.208	-
1909	Kab. Luwu	11.680.255	11.680.255	-
1910	Kab. Sinjai	5.727.208	5.727.208	-
1911	Kab. Bulukumba	5.727.208	5.727.208	-
1912	Kab. Bantaeng	5.727.208	5.727.208	-
1913	Kab. Jeneponto	5.727.208	5.727.208	-
1914	Kab. Selayar	5.727.208	5.727.208	-
1915	Kab. Takalar	5.727.208	5.727.208	-
1916	Kab. Barru	5.727.208	5.727.208	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	13.111.617	13.111.617	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.767.833	5.767.833	-
1919	Kab. Soppeng	5.727.208	5.727.208	-
1921	Kab. Enrekang	5.981.102	5.981.102	-
1922	Kab. Luwu Utara	17.013.348	17.013.348	-
1924	Kab. Luwu Timur	92.021.573	92.021.573	-
1951	Kota Makassar	5.727.208	5.727.208	-
1952	Kota Pare-pare	5.727.208	5.727.208	-
1953	Kota Palopo	5.727.208	5.727.208	-
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	108.996.779	108.996.779	-
2001	Kab. Kendari/Konawe	128.216.572	128.216.572	-
2002	Kab. Buton	33.621.739	33.621.739	-
2003	Kab. Muna	25.117.506	25.117.506	-
2004	Kab. Kolaka	77.618.061	77.618.061	-
2005	Kab. Konawe Selatan	38.674.099	38.674.099	-
2006	Kab. Wakatobi	24.221.506	24.221.506	-
2007	Kab. Bombana	33.122.022	33.122.022	-
2008	Kab. Kolaka Utara	26.952.594	26.952.594	-
2051	Kota Kendari	24.221.506	24.221.506	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2052	Kota Bau-Bau	24.221.506	24.221.506	-
2100	Prop. Maluku	676.680.390	676.680.390	-
2101	Kab. Maluku Tengah	400.936.290	400.936.290	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	193.781.541	193.781.541	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	193.337.253	193.337.253	-
2104	Kab. Pulau Buru	1.125.025.186	1.125.025.186	-
2105	Kab. Aru Kepulauan	193.337.253	193.337.253	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	197.488.546	28.767.702	168.720.844
2107	Kab. Seram Bagian Timur	206.622.216	206.622.216	-
2151	Kota Ambon	196.193.265	196.193.265	-
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	60.689.135	60.689.135	-
2301	Kab. Lombok Barat	15.172.282	15.172.282	-
2302	Kab. Lombok Tengah	15.172.282	15.172.282	-
2303	Kab. Lombok Timur	15.172.282	3.548.476	11.623.806
2304	Kab. Bima	95.756.453	95.756.453	-
2305	Kab. Sumbawa	27.904.180	27.904.180	-
2306	Kab. Dompu	15.172.282	15.172.282	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	27.835.950	27.835.950	-
2351	Kota Mataram	15.172.282	15.172.282	-
2352	Kota Bima	15.398.536	15.398.536	-
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	36.302.885	36.302.885	-
2401	Kab. Kupang	4.840.383	4.840.383	-
2402	Kab. Belu	11.405.077	11.405.077	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	4.840.383	4.840.383	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	4.840.383	1.956.225	2.884.158
2405	Kab. Alor	4.877.717	4.877.717	-
2406	Kab. Sikka	10.338.520	10.338.520	-
2407	Kab. Flores Timur	15.564.237	15.564.237	-
2408	Kab. Ende	28.815.372	28.815.372	-
2409	Kab. Ngada	4.840.383	514.039	4.326.344
2410	Kab. Manggarai	4.840.383	4.840.383	-
2411	Kab. Sumba Timur	4.840.383	4.840.383	-
2412	Kab. Sumba Barat	25.591.517	25.591.517	-
2413	Kab. Lembata	4.840.383	4.840.383	-
2414	Kab. Rote Ndao	4.840.383	4.840.383	-
2415	Kab. Manggarai Barat	4.840.383	4.840.383	-
2451	Kota Kupang	5.055.633	5.055.633	-
2500	Prop. Papua	3.228.057.374	3.228.057.374	-
2501	Kab. Jayapura	3.224.559.224	3.224.559.224	-
2502	Kab. Biak Numfor	261.874.459	261.874.459	-
2504	Kab. Yapen Waropen	1.432.389.437	1.432.389.437	-
2507	Kab. Merauke	265.413.652	265.413.652	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2508	Kab. Jayawijaya	261.874.459	261.874.459	-
2509	Kab. Paniai	261.874.459	261.874.459	-
2510	Kab. Nabire	262.340.513	262.340.513	-
2511	Kab. Puncak Jaya	261.874.459	261.874.459	-
2512	Kab. Mimika	262.077.575	262.077.575	-
2513	Kab. Mappi	261.874.459	261.874.459	-
2514	Kab. Asmat	261.874.459	261.874.459	-
2515	Kab. Boven Digoel	2.244.387.403	2.244.387.403	-
2516	Kab. Sarmi	646.022.383	646.022.383	-
2517	Kab. Keerom	262.030.801	262.030.801	-
2518	Kab. Tolikara	261.874.459	261.874.459	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	261.874.459	261.874.459	-
2523	Kab. Waropen	1.432.389.437	1.432.389.437	-
2524	Kab. Yahukimo	261.874.459	261.874.459	-
2525	Kab. Supiori	261.874.459	261.874.459	-
2551	Kota Jayapura	261.874.459	261.874.459	-
2600	Prop. Bengkulu	16.306.528	16.306.528	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	4.846.408	4.846.408	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	4.076.632	4.076.632	-
2603	Kab. Rejang Lebong	5.166.392	5.166.392	-
2604	Kab. Seluma	5.135.452	5.135.452	-
2605	Kab. Kaur	29.694.700	29.694.700	-
2606	Kab. Muko-Muko	4.076.632	685.656	3.390.976
2607	Kab. Lebong	4.076.632	4.076.632	-
2608	Kab. Kepahiang	4.076.632	4.076.632	-
2651	Kota Bengkulu	4.076.632	4.076.632	-
2800	Prop. Maluku Utara	4.305.314.225	4.305.314.225	-
2801	Kab. Halmahera Barat	1.109.468.270	1.109.468.270	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	1.691.947.595	1.691.947.595	-
2803	Kab. Halmahera Utara	3.722.732.744	3.722.732.744	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	5.466.083.397	5.466.083.397	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	1.414.354.524	1.414.354.524	-
2806	Kab. Halmahera Timur	1.644.860.141	1.644.860.141	-
2851	Kota Ternate	1.082.843.378	1.082.843.378	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	1.088.966.847	1.088.966.847	-
2900	Prop. Banten	60.030.182	60.030.182	-
2901	Kab. Serang	24.012.071	24.012.071	-
2902	Kab. Pandeglang	112.788.837	112.788.837	-
2903	Kab. Lebak	31.283.600	31.283.600	-
2904	Kab. Tangerang	24.012.071	24.012.071	-
2951	Kota Tangerang	24.012.071	24.012.071	
2952	Kota Cilegon	24.012.071	24.012.071	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3000	Prop. Bangka Belitung	6.324.373	6.324.373	-
3001	Kab. Belitung	4.395.329	4.395.329	-
3002	Kab. Bangka	4.284.945	4.284.945	-
3003	Kab. Bangka Barat	2.588.123	2.588.123	-
3004	Kab. Bangka Tengah	4.516.776	4.516.776	-
3005	Kab. Bangka Selatan	2.108.123	2.108.123	-
3006	Kab. Belitung Timur	5.296.067	5.296.067	-
3051	Kota Pangkalpinang	2.108.123	2.108.123	-
3100	Prop. Gorontalo	70.292.556	70.292.556	-
3101	Kab. Gorontalo	88.703.565	88.703.565	-
3102	Kab. Boalemo	43.529.238	43.529.238	-
3103	Kab. Pohuwato	67.293.866	67.293.866	-
3104	Kab. Bone Bolango	46.497.275	46.497.275	-
3151	Kota Gorontalo	35.146.278	35.146.278	-
3201	Kab. Riau Kepulauan	19.633.987	19.633.987	-
3202	Kab. Karimun	10.679.951	10.679.951	-
3203	Kab. Natuna	10.679.951	10.679.951	-
3204	Kab. Lingga	24.668.169	24.668.169	-
3251	Kota Batam	30.457.506	30.457.506	-
3252	Kota Tanjung Pinang	10.679.951	10.679.951	-
3300	Prop. Irian Jaya Barat	2.773.052.879	2.773.052.879	-
3301	Kab. Manokwari	672.774.736	672.774.736	-
3302	Kab. Sorong	2.127.118.271	2.127.118.271	-
3303	Kab. Fak-Fak	728.348.854	728.348.854	-
3304	Kab. Sorong Selatan	623.162.219	623.162.219	-
3305	Kab. Raja Ampat	844.608.220	844.608.220	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	1.655.215.494	1.655.215.494	-
3307	Kab. Teluk Wondama	698.932.474	698.932.474	-
3308	Kab. Kaimana	3.118.889.026	3.118.889.026	-
3351	Kota Sorong	623.162.219	623.162.219	-
3400	Prop. Sulawesi Barat	304.546.394	304.546.394	-
3401	Kab. Majene	155.747.333	155.747.333	-
3402	Kab. Mamuju	541.334.661	541.334.661	-
3403	Kab. Mamuju Utara	165.290.965	165.290.965	-
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	185.512.210	185.512.210	-
3405	Kab. Mamasa	170.300.404	-	170.300.404
	T o t a l	**1.213.212.937.657**	**1.212.714.488.195**	**498.449.462**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	1.092.445.254	1.092.445.254	-
0199	Instansi Pusat	120.679.698.371	120.679.698.371	-
0205	Kab. Bogor	182.074.209	182.074.209	-
0206	Kab. Sukabumi	182.074.209	182.074.209	-
0207	Kab. Cianjur	182.074.209	182.074.209	-
0208	Kab. Bekasi	182.074.209	182.074.209	-
0209	Kab. Karawang	182.074.209	182.074.209	-
0210	Kab. Purwakarta	182.074.209	182.074.209	-
0211	Kab. Subang	182.074.209	182.074.209	-
0212	Kab. Bandung	182.074.209	182.074.209	-
0213	Kab. Sumedang	182.074.209	182.074.209	-
0214	Kab. Garut	182.074.209	182.074.209	-
0215	Kab. Tasikmalaya	182.074.209	182.074.209	-
0216	Kab. Ciamis	182.074.209	182.074.209	-
0217	Kab. Cirebon	182.074.209	182.074.209	-
0218	Kab. Kuningan	182.074.209	182.074.209	-
0219	Kab. Indramayu	182.074.209	182.074.209	-
0220	Kab. Majalengka	182.074.209	182.074.209	-
0251	Kota Bandung	182.074.209	182.074.209	-
0252	Kota Bogor	182.074.209	182.074.209	-
0253	Kota Sukabumi	182.074.209	182.074.209	-
0254	Kota Cirebon	182.074.209	182.074.209	-
0257	Kota Bekasi	182.074.209	182.074.209	-
0258	Kota Depok	182.074.209	182.074.209	-
0260	Kota Tasikmalaya	182.074.209	182.074.209	-
0261	Kota Cimahi	182.074.209	182.074.209	-
0262	Kota Banjar	182.074.209	182.074.209	-
0301	Kab. Semarang	182.074.209	182.074.209	-
0302	Kab. Kendal	182.074.209	182.074.209	-
0303	Kab. Demak	182.074.209	182.074.209	-
0304	Kab. Grobogan	182.074.209	182.074.209	-
0305	Kab. Pekalongan	182.074.209	182.074.209	-
0306	Kab. Batang	182.074.209	182.074.209	-
0307	Kab. Tegal	182.074.209	182.074.209	-
0308	Kab. Brebes	182.074.209	182.074.209	-
0309	Kab. Pati	182.074.209	182.074.209	-
0310	Kab. Kudus	182.074.209	182.074.209	-
0311	Kab. Pemalang	182.074.209	182.074.209	-
0312	Kab. Jepara	182.074.209	182.074.209	-
0313	Kab. Rembang	182.074.209	182.074.209	-
0314	Kab. Blora	182.074.209	182.074.209	-
0315	Kab. Banyumas	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0316	Kab. Cilacap	182.074.209	182.074.209	-
0317	Kab. Purbalingga	182.074.209	182.074.209	-
0318	Kab. Banjarnegara	182.074.209	182.074.209	-
0319	Kab. Magelang	182.074.209	182.074.209	-
0320	Kab. Temanggung	182.074.209	182.074.209	-
0321	Kab. Wonosobo	182.074.209	182.074.209	-
0322	Kab. Purworejo	182.074.209	182.074.209	-
0323	Kab. Kebumen	182.074.209	182.074.209	-
0324	Kab. Klaten	182.074.209	182.074.209	-
0325	Kab. Boyolali	182.074.209	182.074.209	-
0326	Kab. Sragen	182.074.209	182.074.209	-
0327	Kab. Sukoharjo	182.074.209	182.074.209	-
0328	Kab. Karanganyar	182.074.209	182.074.209	-
0329	Kab. Wonogiri	182.074.209	182.074.209	-
0351	Kota Semarang	182.074.209	182.074.209	-
0352	Kota Salatiga	182.074.209	182.074.209	-
0353	Kota Pekalongan	182.074.209	182.074.209	-
0354	Kota Tegal	182.074.209	182.074.209	-
0355	Kota Magelang	182.074.209	182.074.209	-
0356	Kota Surakarta	182.074.209	182.074.209	-
0401	Kab. Bantul	182.074.209	182.074.209	-
0402	Kab. Sleman	182.074.209	182.074.209	-
0403	Kab. Gunungkidul	182.074.209	182.074.209	-
0404	Kab. Kulonprogo	182.074.209	182.074.209	-
0451	Kota Yogyakarta	182.074.209	182.074.209	-
0501	Kab. Gresik	182.074.209	182.074.209	-
0502	Kab. Mojokerto	182.074.209	182.074.209	-
0503	Kab. Sidoarjo	182.074.209	182.074.209	-
0504	Kab. Jombang	182.074.209	182.074.209	-
0505	Kab. Sampang	182.074.209	182.074.209	-
0506	Kab. Pamekasan	182.074.209	182.074.209	-
0507	Kab. Sumenep	182.074.209	182.074.209	-
0508	Kab. Bangkalan	182.074.209	182.074.209	-
0509	Kab. Bondowoso	182.074.209	182.074.209	-
0510	Kab. Situbondo	182.074.209	182.074.209	-
0511	Kab. Banyuwangi	182.074.209	182.074.209	-
0512	Kab. Jember	182.074.209	182.074.209	-
0513	Kab. Malang	182.074.209	182.074.209	-
0514	Kab. Pasuruan	182.074.209	182.074.209	-
0515	Kab. Probolinggo	182.074.209	182.074.209	-
0516	Kab. Lumajang	182.074.209	182.074.209	-
0517	Kab. Kediri	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0518	Kab. Tulungagung	182.074.209	182.074.209	-
0519	Kab. Nganjuk	182.074.209	182.074.209	-
0520	Kab. Trenggalek	182.074.209	182.074.209	-
0521	Kab. Blitar	182.074.209	182.074.209	-
0522	Kab. Madiun	182.074.209	182.074.209	-
0523	Kab. Ngawi	182.074.209	182.074.209	-
0524	Kab. Magetan	182.074.209	182.074.209	-
0525	Kab. Ponorogo	182.074.209	182.074.209	-
0526	Kab. Pacitan	182.074.209	182.074.209	-
0527	Kab. Bojonegoro	182.074.209	182.074.209	-
0528	Kab. Tuban	182.074.209	182.074.209	-
0529	Kab. Lamongan	182.074.209	182.074.209	-
0551	Kota Surabaya	182.074.209	182.074.209	-
0552	Kota Mojokerto	182.074.209	182.074.209	-
0553	Kota Malang	182.074.209	182.074.209	-
0554	Kota Pasuruan	182.074.209	182.074.209	-
0555	Kota Probolinggo	182.074.209	182.074.209	-
0556	Kota Blitar	182.074.209	182.074.209	-
0557	Kota Kediri	182.074.209	182.074.209	-
0558	Kota Madiun	182.074.209	182.074.209	-
0559	Kota Batu	182.074.209	182.074.209	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	1.147.067.522	1.147.067.522	-
0601	Kab. Aceh Besar	127.451.946	127.451.946	-
0602	Kab. Pidie	127.451.946	127.451.946	-
0603	Kab. Aceh Utara	127.451.946	127.451.946	-
0604	Kab. Aceh Timur	127.451.946	127.451.946	-
0605	Kab. Aceh Selatan	127.451.946	127.451.946	-
0606	Kab. Aceh Barat	127.451.946	127.451.946	-
0607	Kab. Aceh Tengah	127.451.946	127.451.946	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	127.451.946	127.451.946	-
0609	Kab. Simeuleu	127.451.946	127.451.946	-
0610	Kab. Aceh Singkil	127.451.946	127.451.946	-
0611	Kab. Bireuen	127.451.946	127.451.946	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	127.451.946	127.451.946	-
0613	Kab. Gayo Lues	127.451.946	127.451.946	-
0614	Kab. Aceh Jaya	127.451.946	127.451.946	-
0615	Kab. Nagan Raya	127.451.946	127.451.946	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	127.451.946	-	127.451.946
0617	Kab. Bener Meriah	127.451.946	127.451.946	-
0651	Kota Banda Aceh	127.451.946	127.451.946	-
0652	Kota Sabang	127.451.946	127.451.946	-
0653	Kota Langsa	127.451.946	127.451.946	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2006

(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0654	Kota Lhokseumawe	127.451.946	127.451.946	-
0701	Kab. Deli Serdang	182.074.209	182.074.209	-
0702	Kab. Tanah Karo	182.074.209	182.074.209	-
0703	Kab. Langkat	182.074.209	182.074.209	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	182.074.209	182.074.209	-
0705	Kab. Simalungun	182.074.209	182.074.209	-
0706	Kab. Labuhanbatu	182.074.209	182.074.209	-
0707	Kab. Dairi	182.074.209	182.074.209	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	182.074.209	182.074.209	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	182.074.209	182.074.209	-
0710	Kab. Asahan	182.074.209	182.074.209	-
0711	Kab. Nias	182.074.209	-	182.074.209
0712	Kab. Toba Samosir	182.074.209	182.074.209	-
0713	Kab. Mandailing Natal	182.074.209	182.074.209	-
0714	Kab. Nias Selatan	182.074.209	182.074.209	-
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	182.074.209	182.074.209	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	182.074.209	182.074.209	-
0717	Kab. Samosir	182.074.209	182.074.209	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	182.074.209	182.074.209	-
0751	Kota Medan	182.074.209	182.074.209	-
0752	Kota Tebingtinggi	182.074.209	182.074.209	-
0753	Kota Binjai	182.074.209	182.074.209	-
0754	Kota Pematangsiantar	182.074.209	182.074.209	-
0755	Kota Tanjungbalai	182.074.209	182.074.209	-
0756	Kota Sibolga	182.074.209	182.074.209	-
0757	Kota Padang Sidempuan	182.074.209	182.074.209	-
0801	Kab. Agam	182.074.209	182.074.209	-
0802	Kab. Pasaman	182.074.209	182.074.209	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	182.074.209	182.074.209	-
0804	Kab. Solok	182.074.209	182.074.209	-
0805	Kab. Padang Pariaman	182.074.209	182.074.209	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	182.074.209	182.074.209	-
0807	Kab. Tanah Datar	182.074.209	182.074.209	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	182.074.209	182.074.209	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	182.074.209	182.074.209	-
0810	Kab. Dharmasraya	182.074.209	182.074.209	-
0811	Kab. Solok Selatan	182.074.209	182.074.209	-
0812	Kab. Pasaman Barat	182.074.209	182.074.209	-
0851	Kota Bukittinggi	182.074.209	182.074.209	-
0852	Kota Padang Panjang	182.074.209	182.074.209	-
0853	Kota Solok	182.074.209	182.074.209	-
0854	Kota Sawahlunto	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0855	Kota Padang	182.074.209	182.074.209	-
0856	Kota Payakumbuh	182.074.209	182.074.209	-
0857	Kota Pariaman	182.074.209	182.074.209	-
0901	Kab. Kampar	182.074.209	182.074.209	-
0902	Kab. Bengkalis	182.074.209	182.074.209	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	182.074.209	182.074.209	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	182.074.209	182.074.209	-
0906	Kab. Pelalawan	182.074.209	182.074.209	-
0907	Kab. Rokan Hulu	182.074.209	182.074.209	-
0908	Kab. Rokan Hilir	182.074.209	182.074.209	-
0909	Kab. Siak	182.074.209	182.074.209	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	182.074.209	182.074.209	-
0951	Kota Pekanbaru	182.074.209	182.074.209	-
0953	Kota Dumai	182.074.209	182.074.209	-
1001	Kab. Batanghari	182.074.209	182.074.209	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	182.074.209	182.074.209	-
1003	Kab. Bungo	182.074.209	182.074.209	-
1004	Kab. Sarolangun	182.074.209	182.074.209	-
1005	Kab. Kerinci	182.074.209	182.074.209	-
1006	Kab. Merangin	182.074.209	182.074.209	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	182.074.209	182.074.209	-
1008	Kab. Tebo	182.074.209	182.074.209	-
1009	Kab. Muaro Jambi	182.074.209	182.074.209	-
1051	Kota Jambi	182.074.209	182.074.209	-
1103	Kab. Musi Banyu Asin	182.074.209	182.074.209	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	182.074.209	182.074.209	-
1105	Kab. Muara Enim	182.074.209	182.074.209	-
1106	Kab. Lahat	182.074.209	182.074.209	-
1107	Kab. Musi Rawas	182.074.209	182.074.209	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	182.074.209	182.074.209	-
1109	Kab. Banyu Asin	182.074.209	182.074.209	-
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	182.074.209	182.074.209	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	182.074.209	182.074.209	-
1112	Kab. Ogan Ilir	182.074.209	182.074.209	-
1151	Kota Palembang	182.074.209	182.074.209	-
1153	Kota Prabumulih	182.074.209	182.074.209	-
1154	Kota Pagar Alam	182.074.209	69.918.558	112.155.651
1155	Kota Lubuk Linggau	182.074.209	182.074.209	-
1201	Kab. Lampung Selatan	182.074.209	182.074.209	-
1202	Kab. Lampung Tengah	182.074.209	182.074.209	-
1203	Kab. Lampung Utara	182.074.209	182.074.209	-
1204	Kab. Lampung Barat	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1205	Kab. Tulang Bawang	182.074.209	182.074.209	-
1206	Kab. Tanggamus	182.074.209	182.074.209	-
1207	Kab. Lampung Timur	182.074.209	182.074.209	-
1208	Kab. Way Kanan	182.074.209	182.074.209	-
1251	Kota Bandar Lampung	182.074.209	182.074.209	-
1252	Kota Metro	182.074.209	182.074.209	-
1301	Kab. Sambas	182.074.209	182.074.209	-
1302	Kab. Sanggau	182.074.209	182.074.209	-
1303	Kab. Sintang	182.074.209	182.074.209	-
1304	Kab. Pontianak	182.074.209	182.074.209	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	182.074.209	182.074.209	-
1306	Kab. Ketapang	182.074.209	182.074.209	-
1307	Kab. Bengkayang	182.074.209	182.074.209	-
1308	Kab. Landak	182.074.209	182.074.209	-
1309	Kab. Melawi	182.074.209	182.074.209	-
1310	Kab. Sekadau	182.074.209	182.074.209	-
1351	Kota Pontianak	182.074.209	182.074.209	-
1352	Kota Singkawang	182.074.209	182.074.209	-
1401	Kab. Kapuas	182.074.209	182.074.209	-
1402	Kab. Barito Utara	182.074.209	182.074.209	-
1403	Kab. Barito Selatan	182.074.209	182.074.209	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	182.074.209	182.074.209	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	182.074.209	182.074.209	-
1406	Kab. Katingan	182.074.209	182.074.209	-
1407	Kab. Seruyan	182.074.209	182.074.209	-
1408	Kab. Sukamara	182.074.209	182.074.209	-
1409	Kab. Lamandau	182.074.209	182.074.209	-
1410	Kab. Gunung Mas	182.074.209	182.074.209	-
1411	Kab. Pulang Pisau	182.074.209	182.074.209	-
1412	Kab. Murung Raya	182.074.209	182.074.209	-
1413	Kab. Barito Timur	182.074.209	182.074.209	-
1451	Kota Palangkaraya	182.074.209	182.074.209	-
1501	Kab. Banjar	182.074.209	182.074.209	-
1502	Kab. Tanah Laut	182.074.209	182.074.209	-
1503	Kab. Tapin	182.074.209	182.074.209	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	182.074.209	182.074.209	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	182.074.209	182.074.209	-
1506	Kab. Barito Kuala	182.074.209	182.074.209	-
1507	Kab. Tabalong	182.074.209	182.074.209	-
1508	Kab. Kotabaru	182.074.209	182.074.209	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	182.074.209	182.074.209	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1511	Kab. Balangan	182.074.209	182.074.209	-
1551	Kota Banjarmasin	182.074.209	182.074.209	-
1552	Kota Banjar Baru	182.074.209	182.074.209	-
1601	Kab. Kutai	182.074.209	182.074.209	-
1602	Kab. Pasir	182.074.209	182.074.209	-
1603	Kab. Bulungan	182.074.209	182.074.209	-
1604	Kab. Berau	182.074.209	182.074.209	-
1605	Kab. Nunukan	182.074.209	182.074.209	-
1606	Kab. Malinau	182.074.209	182.074.209	-
1607	Kab. Kutai Barat	182.074.209	182.074.209	-
1608	Kab. Kutai Timur	182.074.209	182.074.209	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	182.074.209	182.074.209	-
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	182.074.209	182.074.209	-
1652	Kota Balikpapan	182.074.209	182.074.209	-
1653	Kota Tarakan	182.074.209	182.074.209	-
1654	Kota Bontang	182.074.209	182.074.209	-
1702	Kab. Minahasa	182.074.209	182.074.209	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	182.074.209	182.074.209	-
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	182.074.209	182.074.209	-
1705	Kab. Talaud Kepulauan	182.074.209	182.074.209	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	182.074.209	182.074.209	-
1707	Kota Tomohon	182.074.209	182.074.209	-
1708	Kab. Minahasa Utara	182.074.209	182.074.209	-
1751	Kota Manado	182.074.209	182.074.209	-
1753	Kota Bitung	182.074.209	182.074.209	-
1801	Kab. Poso	182.074.209	182.074.209	-
1802	Kab. Donggala	182.074.209	182.074.209	-
1803	Kab. Toli-toli	182.074.209	182.074.209	-
1804	Kab. Banggai	182.074.209	182.074.209	-
1805	Kab. Buol	182.074.209	182.074.209	-
1806	Kab. Morowali	182.074.209	182.074.209	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	182.074.209	182.074.209	-
1808	Kab. Parigi Moutong	182.074.209	182.074.209	-
1809	Kab. Tojo Una-Una	182.074.209	182.074.209	-
1851	Kota Palu	182.074.209	182.074.209	-
1901	Kab. Pinrang	182.074.209	182.074.209	-
1902	Kab. Gowa	182.074.209	182.074.209	-
1903	Kab. Wajo	182.074.209	182.074.209	-
1905	Kab. Bone	182.074.209	182.074.209	-
1906	Kab. Tana Toraja	182.074.209	182.074.209	-
1907	Kab. Maros	182.074.209	182.074.209	-
1909	Kab. Luwu	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1910	Kab. Sinjai	182.074.209	182.074.209	-
1911	Kab. Bulukumba	182.074.209	182.074.209	-
1912	Kab. Bantaeng	182.074.209	182.074.209	-
1913	Kab. Jeneponto	182.074.209	182.074.209	-
1914	Kab. Selayar	182.074.209	182.074.209	-
1915	Kab. Takalar	182.074.209	182.074.209	-
1916	Kab. Barru	182.074.209	182.074.209	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	182.074.209	182.074.209	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	182.074.209	182.074.209	-
1919	Kab. Soppeng	182.074.209	182.074.209	-
1921	Kab. Enrekang	182.074.209	182.074.209	-
1922	Kab. Luwu Utara	182.074.209	182.074.209	-
1924	Kab. Luwu Timur	182.074.209	182.074.209	-
1951	Kota Makassar	182.074.209	182.074.209	-
1952	Kota Pare-pare	182.074.209	182.074.209	-
1953	Kota Palopo	182.074.209	182.074.209	-
2001	Kab. Kendari/Konawe	182.074.209	182.074.209	-
2002	Kab. Buton	182.074.209	182.074.209	-
2003	Kab. Muna	182.074.209	182.074.209	-
2004	Kab. Kolaka	182.074.209	182.074.209	-
2005	Kab. Konawe Selatan	182.074.209	182.074.209	-
2006	Kab. Wakatobi	182.074.209	182.074.209	-
2007	Kab. Bombana	182.074.209	182.074.209	-
2008	Kab. Kolaka Utara	182.074.209	182.074.209	-
2051	Kota Kendari	182.074.209	182.074.209	-
2052	Kota Bau-Bau	182.074.209	182.074.209	-
2101	Kab. Maluku Tengah	182.074.209	182.074.209	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	182.074.209	182.074.209	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	182.074.209	182.074.209	-
2104	Kab. Pulau Buru	182.074.209	182.074.209	-
2105	Kab. Aru Kepulauan	182.074.209	182.074.209	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	182.074.209	69.918.558	112.155.651
2107	Kab. Seram Bagian Timur	182.074.209	182.074.209	-
2151	Kota Ambon	182.074.209	182.074.209	-
2201	Kab. Buleleng	182.074.209	182.074.209	-
2202	Kab. Jembrana	182.074.209	182.074.209	-
2203	Kab. Klungkung	182.074.209	182.074.209	-
2204	Kab. Gianyar	182.074.209	182.074.209	-
2205	Kab. Karangasem	182.074.209	182.074.209	-
2206	Kab. Bangli	182.074.209	182.074.209	-
2207	Kab. Badung	182.074.209	182.074.209	-
2208	Kab. Tabanan	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2251	Kota Denpasar	182.074.209	182.074.209	-
2301	Kab. Lombok Barat	182.074.209	182.074.209	-
2302	Kab. Lombok Tengah	182.074.209	182.074.209	-
2303	Kab. Lombok Timur	182.074.209	69.918.558	112.155.651
2304	Kab. Bima	182.074.209	182.074.209	-
2305	Kab. Sumbawa	182.074.209	182.074.209	-
2306	Kab. Dompu	182.074.209	182.074.209	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	182.074.209	182.074.209	-
2351	Kota Mataram	182.074.209	182.074.209	-
2352	Kota Bima	182.074.209	182.074.209	-
2401	Kab. Kupang	182.074.209	182.074.209	-
2402	Kab. Belu	182.074.209	182.074.209	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	182.074.209	182.074.209	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	182.074.209	182.074.209	-
2405	Kab. Alor	182.074.209	182.074.209	-
2406	Kab. Sikka	182.074.209	182.074.209	-
2407	Kab. Flores Timur	182.074.209	182.074.209	-
2408	Kab. Ende	182.074.209	182.074.209	-
2409	Kab. Ngada	182.074.209	-	182.074.209
2410	Kab. Manggarai	182.074.209	182.074.209	-
2411	Kab. Sumba Timur	182.074.209	182.074.209	-
2412	Kab. Sumba Barat	182.074.209	182.074.209	-
2413	Kab. Lembata	182.074.209	182.074.209	-
2414	Kab. Rote Ndao	182.074.209	182.074.209	-
2415	Kab. Manggarai Barat	182.074.209	182.074.209	-
2451	Kota Kupang	182.074.209	182.074.209	-
2501	Kab. Jayapura	182.074.209	182.074.209	-
2502	Kab. Biak Numfor	182.074.209	182.074.209	-
2504	Kab. Yapen Waropen	182.074.209	182.074.209	-
2507	Kab. Merauke	182.074.209	182.074.209	-
2508	Kab. Jayawijaya	182.074.209	182.074.209	-
2509	Kab. Paniai	182.074.209	182.074.209	-
2510	Kab. Nabire	182.074.209	182.074.209	-
2511	Kab. Puncak Jaya	182.074.209	182.074.209	-
2512	Kab. Mimika	182.074.209	182.074.209	-
2513	Kab. Mappi	182.074.209	182.074.209	-
2514	Kab. Asmat	182.074.209	182.074.209	-
2515	Kab. Boven Digoel	182.074.209	182.074.209	-
2516	Kab. Sarmi	182.074.209	182.074.209	-
2517	Kab. Keerom	182.074.209	182.074.209	-
2518	Kab. Tolikara	182.074.209	182.074.209	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2523	Kab. Waropen	182.074.209	182.074.209	-
2524	Kab. Yahukimo	182.074.209	182.074.209	-
2525	Kab. Supiori	182.074.209	182.074.209	-
2551	Kota Jayapura	182.074.209	182.074.209	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	182.074.209	182.074.209	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	182.074.209	182.074.209	-
2603	Kab. Rejang Lebong	182.074.209	182.074.209	-
2604	Kab. Seluma	182.074.209	182.074.209	-
2605	Kab. Kaur	182.074.209	182.074.209	-
2606	Kab. Muko-Muko	182.074.209	69.918.558	112.155.651
2607	Kab. Lebong	182.074.209	182.074.209	-
2608	Kab. Kepahiang	182.074.209	182.074.209	-
2651	Kota Bengkulu	182.074.209	182.074.209	-
2801	Kab. Halmahera Barat	182.074.209	182.074.209	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	182.074.209	182.074.209	-
2803	Kab. Halmahera Utara	182.074.209	182.074.209	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	182.074.209	182.074.209	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	182.074.209	182.074.209	-
2806	Kab. Halmahera Timur	182.074.209	182.074.209	-
2851	Kota Ternate	182.074.209	182.074.209	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	182.074.209	182.074.209	-
2901	Kab. Serang	182.074.209	182.074.209	-
2902	Kab. Pandeglang	182.074.209	182.074.209	-
2903	Kab. Lebak	182.074.209	182.074.209	-
2904	Kab. Tangerang	182.074.209	182.074.209	-
2951	Kota Tangerang	182.074.209	182.074.209	-
2952	Kota Cilegon	182.074.209	182.074.209	-
3001	Kab. Belitung	182.074.209	182.074.209	-
3002	Kab. Bangka	182.074.209	182.074.209	-
3003	Kab. Bangka Barat	182.074.209	182.074.209	-
3004	Kab. Bangka Tengah	182.074.209	182.074.209	-
3005	Kab. Bangka Selatan	182.074.209	182.074.209	-
3006	Kab. Belitung Timur	182.074.209	182.074.209	-
3051	Kota Pangkalpinang	182.074.209	182.074.209	-
3101	Kab. Gorontalo	182.074.209	182.074.209	-
3102	Kab. Boalemo	182.074.209	182.074.209	-
3103	Kab. Pohuwato	182.074.209	182.074.209	-
3104	Kab. Bone Bolango	182.074.209	182.074.209	-
3151	Kota Gorontalo	182.074.209	182.074.209	-
3201	Kab. Riau Kepulauan	182.074.209	182.074.209	-
3202	Kab. Karimun	182.074.209	182.074.209	-
3203	Kab. Natuna	182.074.209	182.074.209	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3204	Kab. Lingga	182.074.209	182.074.209	-
3251	Kota Batam	182.074.209	182.074.209	-
3252	Kota Tanjung Pinang	182.074.209	182.074.209	-
3301	Kab. Manokwari	182.074.209	182.074.209	-
3302	Kab. Sorong	182.074.209	182.074.209	-
3303	Kab. Fak-Fak	182.074.209	182.074.209	-
3304	Kab. Sorong Selatan	182.074.209	182.074.209	-
3305	Kab. Raja Ampat	182.074.209	182.074.209	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	182.074.209	182.074.209	-
3307	Kab. Teluk Wondama	182.074.209	182.074.209	-
3308	Kab. Kaimana	182.074.209	182.074.209	-
3351	Kota Sorong	182.074.209	182.074.209	-
3401	Kab. Majene	182.074.209	182.074.209	-
3402	Kab. Mamuju	182.074.209	182.074.209	-
3403	Kab. Mamuju Utara	182.074.209	182.074.209	-
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	182.074.209	182.074.209	-
3405	Kab. Mamasa	182.074.209	-	182.074.209
	T o t a l	**200.792.350.330**	**199.670.053.153**	**1.122.297.177**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0100	Prop. DKI Jakarta	768.080.000.000	768.080.000.000	-
0200	Prop. Jawa Barat	565.753.000.000	565.753.000.000	-
0205	Kab. Bogor	806.990.000.000	806.990.000.000	-
0206	Kab. Sukabumi	684.475.000.000	684.475.000.000	-
0207	Kab. Cianjur	675.881.000.000	675.881.000.000	-
0208	Kab. Bekasi	284.954.000.000	284.954.000.000	-
0209	Kab. Karawang	532.138.000.000	532.137.960.000	40.000
0210	Kab. Purwakarta	311.848.000.000	311.847.999.996	4
0211	Kab. Subang	502.815.000.000	502.815.000.000	-
0212	Kab. Bandung	1.168.636.000.000	1.168.636.000.000	-
0213	Kab. Sumedang	500.020.000.000	500.020.000.000	-
0214	Kab. Garut	830.715.000.000	830.715.000.000	-
0215	Kab. Tasikmalaya	648.149.000.000	648.149.000.000	-
0216	Kab. Ciamis	708.553.000.000	708.553.000.000	-
0217	Kab. Cirebon	653.606.000.000	653.606.000.000	-
0218	Kab. Kuningan	485.246.000.000	485.246.000.000	-
0219	Kab. Indramayu	548.042.000.000	548.042.000.000	-
0220	Kab. Majalengka	508.346.000.000	508.346.000.000	-
0251	Kota Bandung	632.379.000.000	632.379.000.000	-
0252	Kota Bogor	302.515.000.000	302.515.000.000	-
0253	Kota Sukabumi	216.741.000.000	216.741.000.000	-
0254	Kota Cirebon	259.313.000.000	259.312.992.000	8.000
0257	Kota Bekasi	420.276.000.000	420.276.000.000	-
0258	Kota Depok	313.205.000.000	313.205.000.000	-
0260	Kota Tasikmalaya	320.075.000.000	320.075.000.000	-
0261	Kota Cimahi	223.858.000.000	223.858.000.000	-
0262	Kota Banjar	157.314.000.000	157.314.000.000	-
0300	Prop. Jawa Tengah	890.420.000.000	890.420.000.000	-
0301	Kab. Semarang	412.468.000.000	412.468.000.000	-
0302	Kab. Kendal	409.296.000.000	409.296.000.000	-
0303	Kab. Demak	408.453.000.000	408.453.000.000	-
0304	Kab. Grobogan	512.838.000.000	512.838.000.000	-
0305	Kab. Pekalongan	377.379.000.000	377.379.000.000	-
0306	Kab. Batang	333.434.000.000	333.434.000.000	-
0307	Kab. Tegal	510.555.000.000	510.555.000.000	-
0308	Kab. Brebes	609.597.000.000	609.597.000.000	-
0309	Kab. Pati	509.573.000.000	509.573.000.000	-
0310	Kab. Kudus	359.184.000.000	359.184.000.000	-
0311	Kab. Pemalang	491.282.000.000	491.281.999.992	8
0312	Kab. Jepara	403.190.000.000	403.190.000.000	-
0313	Kab. Rembang	342.777.000.000	342.777.000.000	-
0314	Kab. Blora	410.074.000.000	410.074.000.000	-
0315	Kab. Banyumas	603.887.000.000	603.887.000.000	-
0316	Kab. Cilacap	661.263.000.000	661.263.000.000	-
0317	Kab. Purbalingga	383.925.000.000	383.925.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0318	Kab. Banjarnegara	422.509.000.000	422.509.000.000	-
0319	Kab. Magelang	502.945.000.000	502.945.000.000	-
0320	Kab. Temanggung	357.822.000.000	357.822.000.000	-
0321	Kab. Wonosobo	359.723.000.000	359.723.000.000	-
0322	Kab. Purworejo	432.013.000.000	432.013.000.000	-
0323	Kab. Kebumen	536.689.000.000	536.688.000.000	1.000.000
0324	Kab. Klaten	635.488.000.000	635.488.000.000	-
0325	Kab. Boyolali	492.181.000.000	492.181.000.000	-
0326	Kab. Sragen	466.851.000.000	466.851.000.000	-
0327	Kab. Sukoharjo	421.438.000.000	421.438.000.000	-
0328	Kab. Karanganyar	421.432.000.000	421.432.000.000	-
0329	Kab. Wonogiri	523.439.000.000	523.439.000.000	-
0351	Kota Semarang	513.812.000.000	513.812.000.000	-
0352	Kota Salatiga	185.429.000.000	185.429.000.000	-
0353	Kota Pekalongan	209.651.000.000	209.651.000.000	-
0354	Kota Tegal	189.007.000.000	189.007.000.000	-
0355	Kota Magelang	216.062.000.000	216.062.000.000	-
0356	Kota Surakarta	334.287.000.000	334.287.000.000	-
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	402.484.000.000	402.484.000.000	-
0401	Kab. Bantul	470.847.000.000	470.847.000.000	-
0402	Kab. Sleman	485.397.000.000	485.397.000.000	-
0403	Kab. Gunungkidul	432.868.000.000	432.868.000.000	-
0404	Kab. Kulonprogo	344.035.000.000	344.035.000.000	-
0451	Kota Yogyakarta	316.832.000.000	316.832.000.000	-
0500	Prop. Jawa Timur	820.773.000.000	820.773.000.000	-
0501	Kab. Gresik	392.884.000.000	392.884.000.000	-
0502	Kab. Mojokerto	398.584.000.000	398.584.000.000	-
0503	Kab. Sidoarjo	524.136.000.000	524.136.000.000	-
0504	Kab. Jombang	465.429.000.000	465.429.000.000	-
0505	Kab. Sampang	330.911.000.000	330.911.000.000	-
0506	Kab. Pamekasan	373.618.000.000	373.618.000.000	-
0507	Kab. Sumenep	432.473.000.000	432.473.000.000	-
0508	Kab. Bangkalan	387.429.000.000	387.429.000.000	-
0509	Kab. Bondowoso	362.750.000.000	362.750.000.000	-
0510	Kab. Situbondo	346.404.000.000	346.404.000.000	-
0511	Kab. Banyuwangi	629.281.000.000	629.281.000.000	-
0512	Kab. Jember	770.394.000.000	770.394.000.000	-
0513	Kab. Malang	795.059.000.000	795.059.000.000	-
0514	Kab. Pasuruan	455.714.000.000	455.714.000.000	-
0515	Kab. Probolinggo	438.188.000.000	438.188.000.000	-
0516	Kab. Lumajang	438.186.000.000	438.186.000.000	-
0517	Kab. Kediri	583.284.000.000	583.284.000.000	-
0518	Kab. Tulungagung	513.252.000.000	513.252.000.000	-
0519	Kab. Nganjuk	492.051.000.000	492.051.000.000	-
0520	Kab. Trenggalek	384.418.000.000	384.418.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0521	Kab. Blitar	539.135.000.000	539.135.000.000	-
0522	Kab. Madiun	386.273.000.000	386.273.000.000	-
0523	Kab. Ngawi	450.161.000.000	450.161.000.000	-
0524	Kab. Magetan	405.061.000.000	405.061.000.000	-
0525	Kab. Ponorogo	442.634.000.000	442.634.000.000	-
0526	Kab. Pacitan	338.655.000.000	338.655.000.000	-
0527	Kab. Bojonegoro	493.589.000.000	493.589.000.000	-
0528	Kab. Tuban	425.062.000.000	425.062.000.000	-
0529	Kab. Lamongan	493.991.000.000	493.991.000.000	-
0551	Kota Surabaya	453.753.000.000	453.753.000.000	-
0552	Kota Mojokerto	198.635.000.000	198.635.000.000	-
0553	Kota Malang	367.435.000.000	367.435.000.000	-
0554	Kota Pasuruan	183.644.000.000	183.644.000.000	-
0555	Kota Probolinggo	199.720.000.000	199.720.000.000	-
0556	Kota Blitar	170.379.000.000	170.379.000.000	-
0557	Kota Kediri	359.132.000.000	359.132.000.000	-
0558	Kota Madiun	214.486.000.000	214.486.000.000	-
0559	Kota Batu	159.797.000.000	159.797.000.000	-
0600	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	460.881.000.000	460.881.000.000	-
0601	Kab. Aceh Besar	322.660.000.000	322.660.000.000	-
0602	Kab. Pidie	391.468.000.000	391.468.000.000	-
0603	Kab. Aceh Utara	199.896.000.000	199.896.000.000	-
0604	Kab. Aceh Timur	244.423.000.000	244.423.000.000	-
0605	Kab. Aceh Selatan	244.851.000.000	244.851.000.000	-
0606	Kab. Aceh Barat	229.450.000.000	229.450.000.000	-
0607	Kab. Aceh Tengah	239.193.000.000	239.193.000.000	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	215.362.000.000	215.362.000.000	-
0609	Kab. Simeuleu	149.309.000.000	149.309.000.000	-
0610	Kab. Aceh Singkil	174.747.000.000	174.747.000.000	-
0611	Kab. Bireuen	308.062.000.000	308.062.000.000	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	171.540.000.000	171.540.000.000	-
0613	Kab. Gayo Lues	179.312.000.000	179.312.000.000	-
0614	Kab. Aceh Jaya	157.363.000.000	157.363.000.000	-
0615	Kab. Nagan Raya	189.358.000.000	189.357.999.600	400
0616	Kab. Aceh Tamiang	188.709.000.000	188.709.000.000	-
0617	Kab. Bener Meriah	184.958.000.000	184.958.000.000	-
0651	Kota Banda Aceh	266.705.000.000	266.705.000.000	-
0652	Kota Sabang	149.841.000.000	149.841.000.000	-
0653	Kota Langsa	184.322.000.000	184.322.000.000	-
0654	Kota Lhokseumawe	168.470.000.000	168.470.000.000	-
0700	Prop. Sumatera Utara	539.718.000.000	539.718.000.000	-
0701	Kab. Deli Serdang	637.495.000.000	637.495.000.000	-
0702	Kab. Tanah Karo	334.102.000.000	334.102.000.000	-
0703	Kab. Langkat	484.070.000.000	484.070.000.000	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	226.435.000.000	226.435.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0705	Kab. Simalungun	528.358.000.000	528.358.000.000	-
0706	Kab. Labuhanbatu	471.211.000.000	471.211.000.000	-
0707	Kab. Dairi	272.430.000.000	272.430.000.000	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	286.227.000.000	286.227.000.000	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	455.036.000.000	455.036.000.000	-
0710	Kab. Asahan	493.236.000.000	493.236.000.000	-
0711	Kab. Nias	315.773.000.000	315.773.000.000	-
0712	Kab. Toba Samosir	210.442.000.000	210.442.000.000	-
0713	Kab. Mandailing Natal	298.969.000.000	298.969.000.000	-
0714	Kab. Nias Selatan	194.107.000.000	194.107.000.000	-
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	127.756.000.000	127.756.000.000	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	199.863.000.000	199.863.000.000	-
0717	Kab. Samosir	184.943.000.000	184.943.000.000	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	303.501.000.000	303.501.000.000	-
0751	Kota Medan	574.568.000.000	574.568.000.000	-
0752	Kota Tebingtinggi	179.085.000.000	179.085.000.000	-
0753	Kota Binjai	226.847.000.000	226.847.000.000	-
0754	Kota Pematangsiantar	251.255.000.000	251.255.000.000	-
0755	Kota Tanjungbalai	174.380.000.000	174.380.000.000	-
0756	Kota Sibolga	163.031.000.000	163.020.000.000	11.000.000
0757	Kota Padang Sidempuan	200.749.000.000	200.749.000.000	-
0800	Prop. Sumatera Barat	477.029.000.000	477.029.000.000	-
0801	Kab. Agam	338.577.000.000	338.577.000.000	-
0802	Kab. Pasaman	232.044.000.000	232.044.000.000	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	311.994.000.000	311.994.000.000	-
0804	Kab. Solok	293.117.000.000	293.117.000.000	-
0805	Kab. Padang Pariaman	320.792.000.000	320.791.999.992	8
0806	Kab. Pesisir Selatan	344.709.000.000	344.709.000.000	-
0807	Kab. Tanah Datar	302.633.000.000	302.633.000.000	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	214.370.000.000	214.370.000.000	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	184.682.000.000	184.682.000.000	-
0810	Kab. Dharmasraya	196.311.000.000	196.311.000.000	-
0811	Kab. Solok Selatan	169.952.000.000	169.952.000.000	-
0812	Kab. Pasaman Barat	243.281.000.000	243.281.000.000	-
0851	Kota Bukittinggi	183.130.000.000	183.130.000.000	-
0852	Kota Padang Panjang	152.317.000.000	152.317.000.000	-
0853	Kota Solok	160.647.000.000	160.647.000.000	-
0854	Kota Sawahlunto	147.938.000.000	147.938.000.000	-
0855	Kota Padang	503.906.000.000	503.906.000.000	-
0856	Kota Payakumbuh	180.808.000.000	180.808.000.000	-
0857	Kota Pariaman	170.463.000.000	170.463.000.000	-
0900	Prop. Riau	92.158.000.000	92.158.000.000	-
0901	Kab. Kampar	185.109.000.000	185.109.000.000	-
0902	Kab. Bengkalis	206.723.000.000	206.723.000.000	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	171.520.000.000	171.520.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0905	Kab. Indragiri Hilir	277.277.000.000	277.277.000.000	-
0906	Kab. Pelalawan	112.312.000.000	112.312.000.000	-
0907	Kab. Rokan Hulu	128.296.000.000	128.295.999.667	333
0908	Kab. Rokan Hilir	91.848.000.000	91.848.000.000	-
0909	Kab. Siak	95.609.000.000	95.609.000.000	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	205.117.000.000	205.117.000.000	-
0951	Kota Pekanbaru	217.387.000.000	217.386.999.996	4
0953	Kota Dumai	93.479.000.000	93.479.000.000	-
1000	Prop. Jambi	374.361.000.000	374.361.000.000	-
1001	Kab. Batanghari	206.716.000.000	206.716.000.000	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	203.894.000.000	203.894.000.000	-
1003	Kab. Bungo	272.081.000.000	272.081.000.000	-
1004	Kab. Sarolangun	215.070.000.000	215.070.000.000	-
1005	Kab. Kerinci	328.866.000.000	328.866.000.000	-
1006	Kab. Merangin	284.584.000.000	284.584.000.000	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	179.410.000.000	179.410.000.000	-
1008	Kab. Tebo	230.584.000.000	230.584.000.000	-
1009	Kab. Muaro Jambi	207.056.000.000	207.056.000.000	-
1051	Kota Jambi	296.729.000.000	296.729.000.000	-
1100	Prop. Sumatera Selatan	421.381.000.000	421.381.000.000	-
1103	Kab. Musi Banyu Asin	145.336.000.000	145.336.000.000	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	247.091.000.000	247.091.000.000	-
1105	Kab. Muara Enim	287.003.000.000	287.002.999.992	8
1106	Kab. Lahat	331.296.000.000	331.296.000.000	-
1107	Kab. Musi Rawas	358.997.000.000	358.997.000.000	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	402.992.000.000	402.992.000.000	-
1109	Kab. Banyu Asin	336.350.000.000	336.348.000.000	2.000.000
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	296.878.000.000	296.878.000.000	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	206.105.000.000	206.105.000.000	-
1112	Kab. Ogan Ilir	237.326.000.000	237.326.000.000	-
1151	Kota Palembang	551.149.000.000	551.149.000.000	-
1153	Kota Prabumulih	133.275.000.000	133.275.000.000	-
1154	Kota Pagar Alam	134.083.000.000	134.083.000.000	-
1155	Kota Lubuk Linggau	161.318.000.000	161.318.000.000	-
1200	Prop. Lampung	460.898.000.000	460.898.000.000	-
1201	Kab. Lampung Selatan	532.654.000.000	532.654.000.000	-
1202	Kab. Lampung Tengah	549.303.000.000	549.303.000.000	-
1203	Kab. Lampung Utara	368.683.000.000	368.683.000.000	-
1204	Kab. Lampung Barat	259.182.000.000	259.182.000.000	-
1205	Kab. Tulang Bawang	362.113.000.000	362.113.000.000	-
1206	Kab. Tanggamus	448.288.000.000	448.288.000.000	-
1207	Kab. Lampung Timur	445.967.000.000	445.967.000.000	-
1208	Kab. Way Kanan	233.913.000.000	233.913.000.000	-
1251	Kota Bandar Lampung	421.911.000.000	421.911.000.000	-
1252	Kota Metro	178.609.000.000	178.609.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1300	Prop. Kalimantan Barat	586.027.000.000	586.027.000.000	-
1301	Kab. Sambas	362.536.000.000	362.536.000.000	-
1302	Kab. Sanggau	354.372.000.000	354.372.000.000	-
1303	Kab. Sintang	445.568.000.000	445.568.000.000	-
1304	Kab. Pontianak	440.092.000.000	440.092.000.000	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	428.832.000.000	428.832.000.000	-
1306	Kab. Ketapang	519.853.000.000	519.853.000.000	-
1307	Kab. Bengkayang	230.690.000.000	230.690.000.000	-
1308	Kab. Landak	298.008.000.000	298.008.000.000	-
1309	Kab. Melawi	234.461.000.000	234.461.000.000	-
1310	Kab. Sekadau	202.150.000.000	202.150.000.000	-
1351	Kota Pontianak	338.325.000.000	338.325.000.000	-
1352	Kota Singkawang	213.713.000.000	213.713.000.000	-
1400	Prop. Kalimantan Tengah	552.000.000.000	552.000.000.000	-
1401	Kab. Kapuas	401.467.000.000	401.467.000.000	-
1402	Kab. Barito Utara	252.519.000.000	252.519.000.000	-
1403	Kab. Barito Selatan	258.011.000.000	258.011.000.000	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	361.003.000.000	361.003.000.000	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	287.301.000.000	287.301.000.000	-
1406	Kab. Katingan	307.642.000.000	307.642.000.000	-
1407	Kab. Seruyan	268.983.000.000	268.983.000.000	-
1408	Kab. Sukamara	206.789.000.000	206.789.000.000	-
1409	Kab. Lamandau	197.112.000.000	197.112.000.000	-
1410	Kab. Gunung Mas	241.987.000.000	241.987.000.000	-
1411	Kab. Pulang Pisau	239.890.000.000	239.890.000.000	-
1412	Kab. Murung Raya	321.168.000.000	321.168.000.000	-
1413	Kab. Barito Timur	205.621.000.000	205.621.000.000	-
1451	Kota Palangkaraya	272.329.000.000	272.329.000.000	-
1500	Prop. Kalimantan Selatan	378.666.000.000	378.666.000.000	-
1501	Kab. Banjar	304.602.000.000	304.602.000.000	-
1502	Kab. Tanah Laut	224.257.000.000	224.257.000.000	-
1503	Kab. Tapin	209.672.000.000	209.672.000.000	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	246.014.000.000	246.014.000.000	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	243.616.000.000	243.616.000.000	-
1506	Kab. Barito Kuala	238.380.000.000	238.380.000.000	-
1507	Kab. Tabalong	207.427.000.000	207.427.000.000	-
1508	Kab. Kotabaru	267.419.000.000	267.419.000.000	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	201.278.000.000	201.278.000.000	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	198.202.000.000	198.202.000.000	-
1511	Kab. Balangan	151.585.000.000	151.585.000.000	-
1551	Kota Banjarmasin	320.165.000.000	320.165.000.000	-
1552	Kota Banjar Baru	169.034.000.000	169.034.000.000	-
1600	Prop. Kalimantan Timur	72.548.000.000	72.548.000.000	-
1601	Kab. Kutai	297.814.000.000	297.814.000.000	-
1602	Kab. Pasir	116.584.000.000	116.584.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1603	Kab. Bulungan	170.177.000.000	170.177.000.000	-
1604	Kab. Berau	213.836.000.000	213.836.000.000	-
1605	Kab. Nunukan	84.154.000.000	84.154.000.000	-
1606	Kab. Malinau	298.085.000.000	298.085.000.000	-
1607	Kab. Kutai Barat	250.487.000.000	250.487.000.000	-
1608	Kab. Kutai Timur	180.189.000.000	180.189.000.000	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	31.970.000.000	31.969.999.992	8
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	207.880.000.000	207.880.000.000	-
1652	Kota Balikpapan	135.092.000.000	135.091.999.992	8
1653	Kota Tarakan	72.991.000.000	72.991.000.000	-
1654	Kota Bontang	75.718.000.000	75.718.000.000	-
1700	Prop. Sulawesi Utara	404.324.000.000	404.324.000.000	-
1702	Kab. Minahasa	282.282.000.000	282.282.000.000	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	384.838.000.000	384.838.000.000	-
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	268.688.000.000	268.688.000.000	-
1705	Kab. Talaud Kepulauan	197.180.000.000	197.180.000.000	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	274.858.000.000	274.857.966.700	33.300
1707	Kota Tomohon	165.638.000.000	165.638.000.000	-
1708	Kab. Minahasa Utara	233.833.000.000	233.833.000.000	-
1751	Kota Manado	330.290.000.000	330.289.868.000	132.000
1753	Kota Bitung	217.379.000.000	217.379.000.000	-
1800	Prop. Sulawesi Tengah	477.668.000.000	477.668.000.000	-
1801	Kab. Poso	313.868.000.000	313.868.000.000	-
1802	Kab. Donggala	413.185.000.000	413.185.000.000	-
1803	Kab. Toli-toli	248.338.000.000	248.338.000.000	-
1804	Kab. Banggai	339.893.000.000	339.893.000.000	-
1805	Kab. Buol	196.463.000.000	196.462.992.000	8.000
1806	Kab. Morowali	308.451.000.000	308.451.000.000	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	196.207.000.000	196.207.000.000	-
1808	Kab. Parigi Moutong	287.236.000.000	287.236.000.000	-
1809	Kab. Tojo Una-Una	193.342.000.000	193.342.000.000	-
1851	Kota Palu	288.076.000.000	288.076.000.000	-
1900	Prop. Sulawesi Selatan	509.538.000.000	509.538.000.000	-
1901	Kab. Pinrang	288.934.000.000	288.934.000.000	-
1902	Kab. Gowa	349.366.000.000	349.366.000.000	-
1903	Kab. Wajo	272.216.000.000	272.216.000.000	-
1905	Kab. Bone	446.420.000.000	446.420.000.000	-
1906	Kab. Tana Toraja	334.596.000.000	334.596.000.000	-
1907	Kab. Maros	260.778.000.000	260.778.000.000	-
1909	Kab. Luwu	265.537.000.000	265.537.000.000	-
1910	Kab. Sinjai	284.703.000.000	284.703.000.000	-
1911	Kab. Bulukumba	246.772.000.000	246.772.000.000	-
1912	Kab. Bantaeng	181.858.000.000	181.858.000.000	-
1913	Kab. Jeneponto	245.022.000.000	245.022.000.000	-
1914	Kab. Selayar	182.506.000.000	182.506.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1915	Kab. Takalar	237.750.000.000	237.750.000.000	-
1916	Kab. Barru	209.175.000.000	209.175.000.000	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	248.228.000.000	248.228.000.000	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	236.037.000.000	236.037.000.000	-
1919	Kab. Soppeng	270.884.000.000	270.884.000.000	-
1921	Kab. Enrekang	208.634.000.000	208.634.000.000	-
1922	Kab. Luwu Utara	239.742.000.000	239.742.000.000	-
1924	Kab. Luwu Timur	190.632.000.000	190.632.000.000	-
1951	Kota Makassar	513.004.000.000	513.004.000.000	-
1952	Kota Pare-pare	187.707.000.000	187.707.000.000	-
1953	Kota Palopo	176.265.000.000	176.265.000.000	-
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	426.354.000.000	426.354.000.000	-
2001	Kab. Kendari/Konawe	364.660.000.000	364.660.000.000	-
2002	Kab. Buton	263.421.000.000	263.421.000.000	-
2003	Kab. Muna	327.414.000.000	327.414.000.000	-
2004	Kab. Kolaka	301.198.000.000	301.198.000.000	-
2005	Kab. Konawe Selatan	246.028.000.000	246.028.000.000	-
2006	Kab. Wakatobi	154.727.000.000	154.727.000.000	-
2007	Kab. Bombana	169.518.000.000	169.518.000.000	-
2008	Kab. Kolaka Utara	183.708.000.000	183.708.000.000	-
2051	Kota Kendari	251.375.000.000	251.375.000.000	-
2052	Kota Bau-Bau	204.347.000.000	204.347.000.000	-
2100	Prop. Maluku	425.137.000.000	425.136.996.000	4.000
2101	Kab. Maluku Tengah	454.583.000.000	454.583.000.000	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	230.449.000.000	230.449.000.000	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	311.805.000.000	311.805.000.000	-
2104	Kab. Pulau Buru	221.498.000.000	221.498.000.000	-
2105	Kab. Aru Kepulauan	152.880.000.000	152.880.000.000	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	228.751.000.000	228.750.000.000	1.000.000
2107	Kab. Seram Bagian Timur	145.919.000.000	145.919.000.000	-
2151	Kota Ambon	291.427.000.000	291.426.999.996	4
2200	Prop. Bali	353.306.000.000	353.306.000.000	-
2201	Kab. Buleleng	422.816.000.000	422.816.000.000	-
2202	Kab. Jembrana	255.025.000.000	255.025.000.000	-
2203	Kab. Klungkung	223.587.000.000	223.587.000.000	-
2204	Kab. Gianyar	314.673.000.000	314.673.000.000	-
2205	Kab. Karangasem	286.423.000.000	286.423.000.000	-
2206	Kab. Bangli	213.228.000.000	213.228.000.000	-
2207	Kab. Badung	167.471.000.000	167.471.000.000	-
2208	Kab. Tabanan	333.754.000.000	333.754.000.000	-
2251	Kota Denpasar	283.845.000.000	283.845.000.000	-
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	404.145.000.000	404.145.000.000	-
2301	Kab. Lombok Barat	372.238.000.000	372.238.000.000	-
2302	Kab. Lombok Tengah	387.044.000.000	387.044.000.000	-
2303	Kab. Lombok Timur	465.490.000.000	465.490.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2304	Kab. Bima	330.942.000.000	330.942.000.000	-
2305	Kab. Sumbawa	272.557.000.000	272.557.000.000	-
2306	Kab. Dompu	231.810.000.000	231.810.000.000	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	103.759.000.000	103.758.999.996	4
2351	Kota Mataram	247.245.000.000	247.245.000.000	-
2352	Kota Bima	183.581.000.000	183.581.000.000	-
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	479.436.000.000	479.436.000.000	-
2401	Kab. Kupang	320.237.000.000	320.236.999.992	8
2402	Kab. Belu	303.447.000.000	303.447.000.000	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	239.558.000.000	239.558.000.000	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	325.363.000.000	325.362.999.996	4
2405	Kab. Alor	229.500.000.000	229.500.000.000	-
2406	Kab. Sikka	247.890.000.000	247.890.000.000	-
2407	Kab. Flores Timur	246.374.000.000	246.374.000.000	-
2408	Kab. Ende	253.522.000.000	253.522.000.000	-
2409	Kab. Ngada	252.052.000.000	252.052.000.000	-
2410	Kab. Manggarai	322.608.000.000	322.608.000.000	-
2411	Kab. Sumba Timur	261.404.000.000	261.404.000.000	-
2412	Kab. Sumba Barat	272.806.000.000	272.806.000.000	-
2413	Kab. Lembata	166.668.000.000	166.668.000.000	-
2414	Kab. Rote Ndao	161.078.000.000	161.078.000.000	-
2415	Kab. Manggarai Barat	186.832.000.000	186.832.000.000	-
2451	Kota Kupang	260.636.000.000	260.636.000.000	-
2500	Prop. Papua	810.237.000.000	810.237.000.000	-
2501	Kab. Jayapura	434.712.000.000	434.712.000.000	-
2502	Kab. Biak Numfor	280.254.000.000	280.254.000.000	-
2504	Kab. Yapen Waropen	228.459.000.000	228.459.000.000	-
2507	Kab. Merauke	534.971.000.000	534.971.000.000	-
2508	Kab. Jayawijaya	324.928.000.000	324.928.000.000	-
2509	Kab. Paniai	379.023.000.000	379.023.000.000	-
2510	Kab. Nabire	360.110.000.000	360.109.999.337	663
2511	Kab. Puncak Jaya	321.773.000.000	321.773.000.000	-
2512	Kab. Mimika	234.121.000.000	234.121.000.000	-
2513	Kab. Mappi	337.334.000.000	337.334.000.000	-
2514	Kab. Asmat	346.621.000.000	346.621.000.000	-
2515	Kab. Boven Digoel	377.443.000.000	377.443.000.000	-
2516	Kab. Sarmi	426.016.000.000	426.016.000.000	-
2517	Kab. Keerom	245.864.000.000	245.864.000.000	-
2518	Kab. Tolikara	254.757.000.000	254.757.000.000	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	300.402.000.000	300.402.000.000	-
2523	Kab. Waropen	271.499.000.000	271.499.000.000	-
2524	Kab. Yahukimo	325.429.000.000	325.429.000.000	-
2525	Kab. Supiori	163.814.000.000	163.814.000.000	-
2551	Kota Jayapura	294.148.000.000	294.148.000.000	-
2600	Prop. Bengkulu	378.050.000.000	378.050.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2601	Kab. Bengkulu Utara	306.941.000.000	306.941.000.000	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	220.405.000.000	220.405.000.000	-
2603	Kab. Rejang Lebong	250.444.000.000	250.444.000.000	-
2604	Kab. Seluma	188.704.000.000	188.704.000.000	-
2605	Kab. Kaur	157.504.000.000	157.503.996.000	4.000
2606	Kab. Muko-Muko	179.120.000.000	179.120.000.000	-
2607	Kab. Lebong	177.362.000.000	177.362.000.000	-
2608	Kab. Kepahiang	168.243.000.000	168.243.000.000	-
2651	Kota Bengkulu	274.185.000.000	274.185.000.000	-
2800	Prop. Maluku Utara	338.605.000.000	338.604.963.000	37.000
2801	Kab. Halmahera Barat	175.876.000.000	175.876.000.000	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	162.370.000.000	162.370.000.000	-
2803	Kab. Halmahera Utara	211.698.000.000	211.698.000.000	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	223.729.000.000	223.729.000.000	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	206.887.000.000	206.887.000.000	-
2806	Kab. Halmahera Timur	165.942.000.000	165.942.000.000	-
2851	Kota Ternate	202.670.000.000	202.670.000.000	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	176.393.000.000	176.392.999.200	800
2900	Prop. Banten	245.294.000.000	245.294.000.000	-
2901	Kab. Serang	548.389.000.000	548.389.000.000	-
2902	Kab. Pandeglang	480.679.000.000	480.679.000.000	-
2903	Kab. Lebak	458.050.000.000	458.050.000.000	-
2904	Kab. Tangerang	508.216.000.000	508.216.000.000	-
2951	Kota Tangerang	293.447.000.000	293.447.000.000	-
2952	Kota Cilegon	170.875.000.000	170.875.000.000	-
3000	Prop. Bangka Belitung	275.690.000.000	275.690.000.000	-
3001	Kab. Belitung	181.269.000.000	181.269.000.000	-
3002	Kab. Bangka	198.810.000.000	198.810.000.000	-
3003	Kab. Bangka Barat	186.185.000.000	186.185.000.000	-
3004	Kab. Bangka Tengah	141.884.000.000	141.884.000.000	-
3005	Kab. Bangka Selatan	150.739.000.000	150.738.996.000	4.000
3006	Kab. Belitung Timur	157.854.000.000	157.854.000.000	-
3051	Kota Pangkalpinang	175.959.000.000	175.959.000.000	-
3100	Prop. Gorontalo	391.390.000.000	391.390.000.000	-
3101	Kab. Gorontalo	309.588.000.000	309.588.000.000	-
3102	Kab. Boalemo	153.134.000.000	153.134.000.000	-
3103	Kab. Pohuwato	166.968.000.000	166.968.000.000	-
3104	Kab. Bone Bolango	177.002.000.000	177.001.999.800	200
3151	Kota Gorontalo	208.305.000.000	208.305.000.000	-
3200	Prop. Kepulauan Riau	178.331.000.000	178.331.000.000	-
3201	Kab. Riau Kepulauan	93.002.000.000	93.002.000.000	-
3202	Kab. Karimun	166.800.000.000	166.800.000.000	-
3203	Kab. Natuna	147.584.000.000	147.583.992.000	8.000
3204	Kab. Lingga	134.386.000.000	134.386.000.000	-
3251	Kota Batam	149.203.000.000	149.203.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3252	Kota Tanjung Pinang	163.052.000.000	163.052.000.000	-
3300	Prop. Irian Jaya Barat	350.541.000.000	350.541.000.000	-
3301	Kab. Manokwari	325.775.000.000	325.775.000.000	-
3302	Kab. Sorong	258.374.000.000	258.374.000.000	-
3303	Kab. Fak-Fak	286.229.000.000	286.229.000.000	-
3304	Kab. Sorong Selatan	363.532.000.000	363.532.000.000	-
3305	Kab. Raja Ampat	216.164.000.000	216.164.000.000	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	262.989.000.000	262.989.000.000	-
3307	Kab. Teluk Wondama	179.608.000.000	179.608.000.000	-
3308	Kab. Kaimana	293.520.000.000	293.520.000.000	-
3351	Kota Sorong	209.559.000.000	209.559.000.000	-
3400	Prop. Sulawesi Barat	255.207.000.000	255.207.000.000	-
3401	Kab. Majene	197.010.000.000	197.010.000.000	-
3402	Kab. Mamuju	281.822.000.000	281.822.000.000	-
3403	Kab. Mamuju Utara	146.419.000.000	146.419.000.000	-
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	275.569.000.000	275.569.000.000	-
3405	Kab. Mamasa	169.600.000.000	169.600.000.000	-
	T o t a l	145.664.200.000.000	145.664.184.719.236	15.280.764

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0205	Kab. Bogor	22.710.000.000	22.710.000.000	-
0206	Kab. Sukabumi	38.050.000.000	38.050.000.000	-
0207	Kab. Cianjur	36.390.000.000	36.390.000.000	-
0208	Kab. Bekasi	18.280.000.000	18.280.000.000	-
0209	Kab. Karawang	28.370.000.000	28.370.000.000	-
0210	Kab. Purwakarta	27.435.000.000	27.435.000.000	-
0211	Kab. Subang	35.360.000.000	35.360.000.000	-
0212	Kab. Bandung	18.080.000.000	18.080.000.000	-
0213	Kab. Sumedang	31.910.000.000	31.910.000.000	-
0214	Kab. Garut	38.750.000.000	38.750.000.000	-
0215	Kab. Tasikmalaya	49.160.000.000	49.160.000.000	-
0216	Kab. Ciamis	52.900.000.000	52.900.000.000	-
0217	Kab. Cirebon	40.910.000.000	40.910.000.000	-
0218	Kab. Kuningan	27.330.000.000	27.330.000.000	-
0219	Kab. Indramayu	38.680.000.000	38.680.000.000	-
0220	Kab. Majalengka	35.020.000.000	35.020.000.000	-
0251	Kota Bandung	14.870.000.000	14.870.000.000	-
0252	Kota Bogor	7.620.000.000	7.620.000.000	-
0253	Kota Sukabumi	17.270.000.000	17.270.000.000	-
0254	Kota Cirebon	17.830.000.000	17.830.000.000	-
0257	Kota Bekasi	7.560.000.000	7.340.000.000	220.000.000
0258	Kota Depok	7.360.000.000	7.360.000.000	-
0260	Kota Tasikmalaya	20.730.000.000	20.730.000.000	-
0261	Kota Cimahi	16.965.000.000	16.965.000.000	-
0262	Kota Banjar	36.140.000.000	36.140.000.000	-
0301	Kab. Semarang	28.340.000.000	28.340.000.000	-
0302	Kab. Kendal	32.040.000.000	32.040.000.000	-
0303	Kab. Demak	29.330.000.000	29.330.000.000	-
0304	Kab. Grobogan	13.020.000.000	13.020.000.000	-
0305	Kab. Pekalongan	25.910.000.000	25.910.000.000	-
0306	Kab. Batang	26.190.000.000	26.168.238.000	21.762.000
0307	Kab. Tegal	28.600.000.000	28.600.000.000	-
0308	Kab. Brebes	13.850.000.000	13.850.000.000	-
0309	Kab. Pati	28.220.000.000	28.220.000.000	-
0310	Kab. Kudus	22.610.000.000	22.368.600.000	241.400.000
0311	Kab. Pemalang	27.760.000.000	27.760.000.000	-
0312	Kab. Jepara	26.080.000.000	26.080.000.000	-
0313	Kab. Rembang	45.910.000.000	45.910.000.000	-
0314	Kab. Blora	11.840.000.000	11.840.000.000	-
0315	Kab. Banyumas	30.250.000.000	30.250.000.000	-
0316	Kab. Cilacap	33.430.000.000	33.430.000.000	-
0317	Kab. Purbalingga	27.440.000.000	27.440.000.000	-
0318	Kab. Banjarnegara	31.865.000.000	31.865.000.000	-
0319	Kab. Magelang	32.080.000.000	32.080.000.000	-
0320	Kab. Temanggung	24.630.000.000	24.630.000.000	-
0321	Kab. Wonosobo	45.890.000.000	45.890.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0322	Kab. Purworejo	26.540.000.000	26.540.000.000	-
0323	Kab. Kebumen	29.060.000.000	29.060.000.000	-
0324	Kab. Klaten	27.530.000.000	27.517.927.000	12.073.000
0325	Kab. Boyolali	24.930.000.000	24.930.000.000	-
0326	Kab. Sragen	36.055.000.000	36.055.000.000	-
0327	Kab. Sukoharjo	23.770.000.000	23.770.000.000	-
0328	Kab. Karanganyar	23.800.000.000	23.800.000.000	-
0329	Kab. Wonogiri	32.410.000.000	32.410.000.000	-
0351	Kota Semarang	8.820.000.000	8.820.000.000	-
0352	Kota Salatiga	26.810.000.000	26.810.000.000	-
0353	Kota Pekalongan	17.510.000.000	17.510.000.000	-
0354	Kota Tegal	7.730.000.000	7.730.000.000	-
0355	Kota Magelang	10.450.000.000	10.450.000.000	-
0356	Kota Surakarta	16.470.000.000	16.470.000.000	-
0401	Kab. Bantul	33.890.000.000	33.890.000.000	-
0402	Kab. Sleman	25.860.000.000	25.860.000.000	-
0403	Kab. Gunungkidul	29.080.000.000	29.080.000.000	-
0404	Kab. Kulonprogo	32.865.000.000	32.865.000.000	-
0451	Kota Yogyakarta	4.800.000.000	4.800.000.000	-
0501	Kab. Gresik	26.230.000.000	26.230.000.000	-
0502	Kab. Mojokerto	21.180.000.000	21.180.000.000	-
0503	Kab. Sidoarjo	25.970.000.000	25.970.000.000	-
0504	Kab. Jombang	11.210.000.000	11.210.000.000	-
0505	Kab. Sampang	30.090.000.000	30.090.000.000	-
0506	Kab. Pamekasan	26.130.000.000	26.130.000.000	-
0507	Kab. Sumenep	14.580.000.000	14.580.000.000	-
0508	Kab. Bangkalan	29.780.000.000	29.780.000.000	-
0509	Kab. Bondowoso	10.610.000.000	10.610.000.000	-
0510	Kab. Situbondo	27.350.000.000	27.350.000.000	-
0511	Kab. Banyuwangi	35.250.000.000	35.250.000.000	-
0512	Kab. Jember	15.480.000.000	15.480.000.000	-
0513	Kab. Malang	35.690.000.000	35.690.000.000	-
0514	Kab. Pasuruan	30.570.000.000	30.570.000.000	-
0515	Kab. Probolinggo	28.180.000.000	28.180.000.000	-
0516	Kab. Lumajang	27.050.000.000	27.050.000.000	-
0517	Kab. Kediri	11.830.000.000	11.830.000.000	-
0518	Kab. Tulungagung	27.440.000.000	27.440.000.000	-
0519	Kab. Nganjuk	26.920.000.000	26.920.000.000	-
0520	Kab. Trenggalek	29.700.000.000	29.700.000.000	-
0521	Kab. Blitar	31.160.000.000	31.160.000.000	-
0522	Kab. Madiun	25.970.000.000	25.970.000.000	-
0523	Kab. Ngawi	25.800.000.000	25.800.000.000	-
0524	Kab. Magetan	44.695.000.000	44.695.000.000	-
0525	Kab. Ponorogo	26.620.000.000	26.620.000.000	-
0526	Kab. Pacitan	28.430.000.000	28.430.000.000	-
0527	Kab. Bojonegoro	12.500.000.000	12.500.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0528	Kab. Tuban	28.350.000.000	28.350.000.000	-
0529	Kab. Lamongan	39.800.000.000	39.800.000.000	-
0551	Kota Surabaya	9.550.000.000	9.550.000.000	-
0552	Kota Mojokerto	20.310.000.000	19.850.000.000	460.000.000
0553	Kota Malang	20.860.000.000	20.860.000.000	-
0554	Kota Pasuruan	19.190.000.000	19.190.000.000	-
0555	Kota Probolinggo	22.350.000.000	22.350.000.000	-
0556	Kota Blitar	16.480.000.000	16.480.000.000	-
0557	Kota Kediri	17.640.000.000	17.640.000.000	-
0558	Kota Madiun	15.235.000.000	15.235.000.000	-
0559	Kota Batu	17.910.000.000	17.910.000.000	-
0601	Kab. Aceh Besar	32.510.000.000	32.510.000.000	-
0602	Kab. Pidie	41.400.000.000	41.400.000.000	-
0603	Kab. Aceh Utara	37.870.000.000	37.870.000.000	-
0604	Kab. Aceh Timur	37.750.000.000	37.750.000.000	-
0605	Kab. Aceh Selatan	27.790.000.000	27.790.000.000	-
0606	Kab. Aceh Barat	26.680.000.000	26.680.000.000	-
0607	Kab. Aceh Tengah	25.830.000.000	25.830.000.000	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	24.440.000.000	24.440.000.000	-
0609	Kab. Simeuleu	26.810.000.000	26.810.000.000	-
0610	Kab. Aceh Singkil	26.820.000.000	26.820.000.000	-
0611	Kab. Bireuen	38.460.000.000	38.460.000.000	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	26.870.000.000	26.870.000.000	-
0613	Kab. Gayo Lues	22.460.000.000	22.460.000.000	-
0614	Kab. Aceh Jaya	25.260.000.000	25.260.000.000	-
0615	Kab. Nagan Raya	25.760.000.000	25.760.000.000	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	27.090.000.000	27.090.000.000	-
0617	Kab. Bener Meriah	28.270.000.000	28.270.000.000	-
0651	Kota Banda Aceh	22.630.000.000	22.630.000.000	-
0652	Kota Sabang	27.490.000.000	27.490.000.000	-
0653	Kota Langsa	21.720.000.000	21.720.000.000	-
0654	Kota Lhokseumawe	18.890.000.000	18.890.000.000	-
0701	Kab. Deli Serdang	30.280.000.000	30.280.000.000	-
0702	Kab. Tanah Karo	26.660.000.000	26.660.000.000	-
0703	Kab. Langkat	29.530.000.000	29.530.000.000	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	25.100.000.000	25.100.000.000	-
0705	Kab. Simalungun	32.920.000.000	32.920.000.000	-
0706	Kab. Labuhanbatu	32.120.000.000	32.120.000.000	-
0707	Kab. Dairi	30.320.000.000	30.320.000.000	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	28.430.000.000	28.430.000.000	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	40.980.000.000	40.980.000.000	-
0710	Kab. Asahan	34.650.000.000	34.650.000.000	-
0711	Kab. Nias	32.290.000.000	32.290.000.000	-
0712	Kab. Toba Samosir	26.270.000.000	26.270.000.000	-
0713	Kab. Mandailing Natal	27.395.000.000	27.395.000.000	-
0714	Kab. Nias Selatan	31.370.000.000	31.370.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
0715	Kab. Pak-Pak Bharat	28.840.000.000	28.840.000.000	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	25.580.000.000	25.460.000.000	120.000.000
0717	Kab. Samosir	23.670.000.000	23.670.000.000	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	29.410.000.000	29.410.000.000	-
0751	Kota Medan	20.480.000.000	20.480.000.000	-
0752	Kota Tebingtinggi	15.170.000.000	15.170.000.000	-
0753	Kota Binjai	19.770.000.000	19.770.000.000	-
0754	Kota Pematangsiantar	16.620.000.000	16.620.000.000	-
0755	Kota Tanjungbalai	16.910.000.000	16.910.000.000	-
0756	Kota Sibolga	9.000.000.000	9.000.000.000	-
0757	Kota Padang Sidempuan	12.180.000.000	12.180.000.000	-
0801	Kab. Agam	29.840.000.000	29.840.000.000	-
0802	Kab. Pasaman	39.845.000.000	39.845.000.000	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	28.620.000.000	28.620.000.000	-
0804	Kab. Solok	31.830.000.000	31.830.000.000	-
0805	Kab. Padang Pariaman	29.070.000.000	29.070.000.000	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	33.910.000.000	33.910.000.000	-
0807	Kab. Tanah Datar	25.710.000.000	25.710.000.000	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	25.170.000.000	25.170.000.000	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	21.790.000.000	21.790.000.000	-
0810	Kab. Dharmasraya	24.420.000.000	24.420.000.000	-
0811	Kab. Solok Selatan	20.760.000.000	20.760.000.000	-
0812	Kab. Pasaman Barat	26.670.000.000	26.670.000.000	-
0851	Kota Bukittinggi	17.320.000.000	17.320.000.000	-
0852	Kota Padang Panjang	9.030.000.000	9.030.000.000	-
0853	Kota Solok	17.350.000.000	17.350.000.000	-
0854	Kota Sawahlunto	18.400.000.000	18.400.000.000	-
0855	Kota Padang	26.050.000.000	26.050.000.000	-
0856	Kota Payakumbuh	17.320.000.000	17.320.000.000	-
0857	Kota Pariaman	23.370.000.000	23.370.000.000	-
0901	Kab. Kampar	19.800.000.000	19.800.000.000	-
0902	Kab. Bengkalis	11.610.000.000	11.610.000.000	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	18.855.000.000	18.855.000.000	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	20.525.000.000	20.525.000.000	-
0906	Kab. Pelalawan	18.395.000.000	18.395.000.000	-
0907	Kab. Rokan Hulu	10.660.000.000	10.660.000.000	-
0908	Kab. Rokan Hilir	17.075.000.000	17.075.000.000	-
0909	Kab. Siak	10.140.000.000	10.140.000.000	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	9.650.000.000	9.650.000.000	-
0951	Kota Pekanbaru	16.395.000.000	16.395.000.000	-
0953	Kota Dumai	8.470.000.000	8.470.000.000	-
1001	Kab. Batanghari	10.030.000.000	10.030.000.000	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	10.440.000.000	10.440.000.000	-
1003	Kab. Bungo	24.690.000.000	24.690.000.000	-
1004	Kab. Sarolangun	10.280.000.000	10.280.000.000	-
1005	Kab. Kerinci	29.715.000.000	29.715.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1006	Kab. Merangin	34.540.000.000	34.540.000.000	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	23.890.000.000	23.890.000.000	-
1008	Kab. Tebo	24.580.000.000	24.580.000.000	-
1009	Kab. Muaro Jambi	13.890.000.000	13.890.000.000	-
1051	Kota Jambi	18.300.000.000	18.300.000.000	-
1103	Kab. Musi Banyu Asin	12.100.000.000	12.100.000.000	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	27.665.000.000	27.665.000.000	-
1105	Kab. Muara Enim	20.510.000.000	20.510.000.000	-
1106	Kab. Lahat	19.865.000.000	19.865.000.000	-
1107	Kab. Musi Rawas	16.020.000.000	16.020.000.000	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	32.530.000.000	32.530.000.000	-
1109	Kab. Banyu Asin	27.330.000.000	27.330.000.000	-
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	30.420.000.000	30.420.000.000	-
1111	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	22.790.000.000	22.790.000.000	-
1112	Kab. Ogan Ilir	27.295.000.000	27.295.000.000	-
1151	Kota Palembang	9.940.000.000	9.940.000.000	-
1153	Kota Prabumulih	20.950.000.000	20.280.000.000	670.000.000
1154	Kota Pagar Alam	23.400.000.000	23.400.000.000	-
1155	Kota Lubuk Linggau	21.990.000.000	21.990.000.000	-
1201	Kab. Lampung Selatan	39.160.000.000	39.160.000.000	-
1202	Kab. Lampung Tengah	37.640.000.000	37.640.000.000	-
1203	Kab. Lampung Utara	37.060.000.000	37.060.000.000	-
1204	Kab. Lampung Barat	25.320.000.000	25.320.000.000	-
1205	Kab. Tulang Bawang	25.860.000.000	25.860.000.000	-
1206	Kab. Tanggamus	31.570.000.000	31.570.000.000	-
1207	Kab. Lampung Timur	36.150.000.000	36.103.636.634	46.363.366
1208	Kab. Way Kanan	31.840.000.000	31.840.000.000	-
1251	Kota Bandar Lampung	27.580.000.000	27.580.000.000	-
1252	Kota Metro	16.210.000.000	16.210.000.000	-
1301	Kab. Sambas	35.190.000.000	35.190.000.000	-
1302	Kab. Sanggau	34.580.000.000	34.580.000.000	-
1303	Kab. Sintang	31.250.000.000	31.250.000.000	-
1304	Kab. Pontianak	36.220.000.000	36.220.000.000	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	29.240.000.000	29.240.000.000	-
1306	Kab. Ketapang	30.620.000.000	30.620.000.000	-
1307	Kab. Bengkayang	30.340.000.000	30.340.000.000	-
1308	Kab. Landak	25.320.000.000	24.963.000.000	357.000.000
1309	Kab. Melawi	26.370.000.000	26.370.000.000	-
1310	Kab. Sekadau	26.130.000.000	26.130.000.000	-
1351	Kota Pontianak	18.580.000.000	18.580.000.000	-
1352	Kota Singkawang	29.120.000.000	29.120.000.000	-
1401	Kab. Kapuas	28.920.000.000	28.920.000.000	-
1402	Kab. Barito Utara	22.400.000.000	22.400.000.000	-
1403	Kab. Barito Selatan	27.980.000.000	27.980.000.000	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	30.890.000.000	30.890.000.000	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	26.190.000.000	26.190.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1406	Kab. Katingan	26.260.000.000	26.260.000.000	-
1407	Kab. Seruyan	32.350.000.000	32.350.000.000	-
1408	Kab. Sukamara	24.710.000.000	24.710.000.000	-
1409	Kab. Lamandau	23.720.000.000	23.720.000.000	-
1410	Kab. Gunung Mas	24.680.000.000	24.680.000.000	-
1411	Kab. Pulang Pisau	41.760.000.000	41.760.000.000	-
1412	Kab. Murung Raya	21.960.000.000	21.960.000.000	-
1413	Kab. Barito Timur	23.760.000.000	23.760.000.000	-
1451	Kota Palangkaraya	23.140.000.000	23.110.000.000	30.000.000
1501	Kab. Banjar	28.890.000.000	28.890.000.000	-
1502	Kab. Tanah Laut	25.990.000.000	25.990.000.000	-
1503	Kab. Tapin	23.360.000.000	23.360.000.000	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	24.070.000.000	24.070.000.000	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	26.550.000.000	26.550.000.000	-
1506	Kab. Barito Kuala	27.070.000.000	27.070.000.000	-
1507	Kab. Tabalong	24.280.000.000	24.280.000.000	-
1508	Kab. Kotabaru	25.520.000.000	25.520.000.000	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	32.240.000.000	32.240.000.000	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	28.370.000.000	28.370.000.000	-
1511	Kab. Balangan	23.620.000.000	23.620.000.000	-
1551	Kota Banjarmasin	19.710.000.000	19.710.000.000	-
1552	Kota Banjar Baru	16.930.000.000	16.930.000.000	-
1601	Kab. Kutai	12.700.000.000	12.700.000.000	-
1602	Kab. Pasir	11.750.000.000	11.750.000.000	-
1603	Kab. Bulungan	10.490.000.000	10.490.000.000	-
1604	Kab. Berau	35.210.000.000	35.210.000.000	-
1605	Kab. Nunukan	24.020.000.000	24.020.000.000	-
1606	Kab. Malinau	21.910.000.000	21.910.000.000	-
1607	Kab. Kutai Barat	28.080.000.000	28.080.000.000	-
1608	Kab. Kutai Timur	9.520.000.000	9.520.000.000	-
1609	Kab. Penajem Paser Utara	27.300.000.000	27.300.000.000	-
1651	Kota Samarinda/Kab. Kutai Kertanegara	8.930.000.000	8.930.000.000	-
1652	Kota Balikpapan	7.940.000.000	7.940.000.000	-
1653	Kota Tarakan	9.490.000.000	9.490.000.000	-
1654	Kota Bontang	5.760.000.000	5.760.000.000	-
1702	Kab. Minahasa	29.000.000.000	29.000.000.000	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	37.940.000.000	37.940.000.000	-
1704	Kab. Sangihe Kepulauan	42.300.000.000	42.300.000.000	-
1705	Kab. Talaud Kepulauan	37.670.000.000	37.670.000.000	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	34.750.000.000	34.750.000.000	-
1707	Kota Tomohon	42.120.000.000	42.120.000.000	-
1708	Kab. Minahasa Utara	38.210.000.000	38.210.000.000	-
1751	Kota Manado	31.800.000.000	31.800.000.000	-
1753	Kota Bitung	20.420.000.000	20.420.000.000	-
1801	Kab. Poso	37.900.000.000	37.807.000.000	93.000.000
1802	Kab. Donggala	37.770.000.000	37.770.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1803	Kab. Toli-toli	29.770.000.000	29.770.000.000	-
1804	Kab. Banggai	32.000.000.000	32.000.000.000	-
1805	Kab. Buol	23.010.000.000	23.010.000.000	-
1806	Kab. Morowali	25.920.000.000	25.920.000.000	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	24.680.000.000	24.680.000.000	-
1808	Kab. Parigi Moutong	30.370.000.000	30.370.000.000	-
1809	Kab. Tojo Una-Una	24.570.000.000	24.570.000.000	-
1851	Kota Palu	20.440.000.000	20.440.000.000	-
1901	Kab. Pinrang	32.570.000.000	32.570.000.000	-
1902	Kab. Gowa	31.310.000.000	31.310.000.000	-
1903	Kab. Wajo	29.870.000.000	29.870.000.000	-
1905	Kab. Bone	32.320.000.000	32.320.000.000	-
1906	Kab. Tana Toraja	29.910.000.000	29.910.000.000	-
1907	Kab. Maros	29.450.000.000	29.450.000.000	-
1909	Kab. Luwu	33.250.000.000	33.250.000.000	-
1910	Kab. Sinjai	32.820.000.000	32.820.000.000	-
1911	Kab. Bulukumba	28.740.000.000	28.740.000.000	-
1912	Kab. Bantaeng	27.415.000.000	27.415.000.000	-
1913	Kab. Jeneponto	29.295.000.000	29.295.000.000	-
1914	Kab. Selayar	26.775.000.000	26.775.000.000	-
1915	Kab. Takalar	28.420.000.000	28.420.000.000	-
1916	Kab. Barru	26.000.000.000	26.000.000.000	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	27.200.000.000	27.200.000.000	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	31.465.000.000	31.465.000.000	-
1919	Kab. Soppeng	24.680.000.000	24.680.000.000	-
1921	Kab. Enrekang	26.830.000.000	26.830.000.000	-
1922	Kab. Luwu Utara	27.585.000.000	27.585.000.000	-
1924	Kab. Luwu Timur	23.910.000.000	23.910.000.000	-
1951	Kota Makassar	14.680.000.000	14.680.000.000	-
1952	Kota Pare-pare	29.960.000.000	29.960.000.000	-
1953	Kota Palopo	25.330.000.000	25.330.000.000	-
2001	Kab. Kendari/Konawe	35.540.000.000	35.540.000.000	-
2002	Kab. Buton	35.170.000.000	35.170.000.000	-
2003	Kab. Muna	32.860.000.000	32.860.000.000	-
2004	Kab. Kolaka	32.265.000.000	32.265.000.000	-
2005	Kab. Konawe Selatan	44.980.000.000	44.980.000.000	-
2006	Kab. Wakatobi	35.460.000.000	35.460.000.000	-
2007	Kab. Bombana	26.630.000.000	26.630.000.000	-
2008	Kab. Kolaka Utara	23.260.000.000	23.260.000.000	-
2051	Kota Kendari	26.030.000.000	26.030.000.000	-
2052	Kota Bau-Bau	29.365.000.000	29.365.000.000	-
2101	Kab. Maluku Tengah	40.020.000.000	40.020.000.000	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	38.930.000.000	38.930.000.000	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	26.010.000.000	26.010.000.000	-
2104	Kab. Pulau Buru	24.020.000.000	24.020.000.000	-
2105	Kab. Aru Kepulauan	29.310.000.000	29.310.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2106	Kab. Seram Bagian Barat	35.800.000.000	35.800.000.000	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	31.160.000.000	31.160.000.000	-
2151	Kota Ambon	25.600.000.000	25.600.000.000	-
2201	Kab. Buleleng	30.090.000.000	30.090.000.000	-
2202	Kab. Jembrana	25.400.000.000	25.400.000.000	-
2203	Kab. Klungkung	28.020.000.000	28.020.000.000	-
2204	Kab. Gianyar	30.530.000.000	30.530.000.000	-
2205	Kab. Karangasem	27.760.000.000	27.760.000.000	-
2206	Kab. Bangli	23.740.000.000	23.740.000.000	-
2207	Kab. Badung	24.350.000.000	24.350.000.000	-
2208	Kab. Tabanan	26.850.000.000	26.850.000.000	-
2251	Kota Denpasar	18.850.000.000	18.850.000.000	-
2301	Kab. Lombok Barat	34.785.000.000	34.785.000.000	-
2302	Kab. Lombok Tengah	36.220.000.000	36.220.000.000	-
2303	Kab. Lombok Timur	30.170.000.000	30.170.000.000	-
2304	Kab. Bima	36.360.000.000	36.360.000.000	-
2305	Kab. Sumbawa	32.410.000.000	32.410.000.000	-
2306	Kab. Dompu	25.630.000.000	25.630.000.000	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	28.750.000.000	28.750.000.000	-
2351	Kota Mataram	37.845.000.000	37.845.000.000	-
2352	Kota Bima	28.840.000.000	28.840.000.000	-
2401	Kab. Kupang	33.070.000.000	33.070.000.000	-
2402	Kab. Belu	28.390.000.000	28.390.000.000	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	29.180.000.000	29.180.000.000	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	41.850.000.000	41.850.000.000	-
2405	Kab. Alor	28.410.000.000	28.410.000.000	-
2406	Kab. Sikka	29.960.000.000	29.960.000.000	-
2407	Kab. Flores Timur	28.110.000.000	28.110.000.000	-
2408	Kab. Ende	29.390.000.000	29.390.000.000	-
2409	Kab. Ngada	33.030.000.000	33.030.000.000	-
2410	Kab. Manggarai	34.850.000.000	34.850.000.000	-
2411	Kab. Sumba Timur	31.720.000.000	31.720.000.000	-
2412	Kab. Sumba Barat	27.880.000.000	27.880.000.000	-
2413	Kab. Lembata	22.460.000.000	22.460.000.000	-
2414	Kab. Rote Ndao	31.705.000.000	31.705.000.000	-
2415	Kab. Manggarai Barat	37.790.000.000	37.790.000.000	-
2451	Kota Kupang	24.250.000.000	24.250.000.000	-
2501	Kab. Jayapura	34.440.000.000	34.440.000.000	-
2502	Kab. Biak Numfor	28.520.000.000	28.520.000.000	-
2504	Kab. Yapen Waropen	28.360.000.000	28.360.000.000	-
2507	Kab. Merauke	40.140.000.000	40.140.000.000	-
2508	Kab. Jayawijaya	36.400.000.000	36.400.000.000	-
2509	Kab. Paniai	41.840.000.000	41.840.000.000	-
2510	Kab. Nabire	29.140.000.000	29.140.000.000	-
2511	Kab. Puncak Jaya	40.380.000.000	40.380.000.000	-
2512	Kab. Mimika	31.040.000.000	31.040.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2513	Kab. Mappi	28.650.000.000	30.570.000.000	(1.920.000.000)
2514	Kab. Asmat	28.040.000.000	28.040.000.000	-
2515	Kab. Boven Digoel	42.565.000.000	42.565.000.000	-
2516	Kab. Sarmi	29.910.000.000	29.910.000.000	-
2517	Kab. Keerom	33.270.000.000	33.270.000.000	-
2518	Kab. Tolikara	37.575.000.000	37.575.000.000	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	39.520.000.000	39.520.000.000	-
2523	Kab. Waropen	20.530.000.000	20.530.000.000	-
2524	Kab. Yahukimo	29.180.000.000	29.180.000.000	-
2525	Kab. Supiori	43.155.000.000	43.155.000.000	-
2551	Kota Jayapura	14.080.000.000	14.080.000.000	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	31.690.000.000	31.690.000.000	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	40.790.000.000	40.790.000.000	-
2603	Kab. Rejang Lebong	45.250.000.000	45.250.000.000	-
2604	Kab. Seluma	29.770.000.000	29.770.000.000	-
2605	Kab. Kaur	31.640.000.000	31.640.000.000	-
2606	Kab. Muko-Muko	29.880.000.000	29.880.000.000	-
2607	Kab. Lebong	29.940.000.000	29.940.000.000	-
2608	Kab. Kepahiang	29.730.000.000	29.730.000.000	-
2651	Kota Bengkulu	24.090.000.000	24.090.000.000	-
2801	Kab. Halmahera Barat	31.840.000.000	31.840.000.000	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	38.880.000.000	38.880.000.000	-
2803	Kab. Halmahera Utara	34.360.000.000	34.360.000.000	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	36.080.000.000	36.080.000.000	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	45.170.000.000	45.170.000.000	-
2806	Kab. Halmahera Timur	40.220.000.000	40.220.000.000	-
2851	Kota Ternate	24.840.000.000	24.840.000.000	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	32.260.000.000	32.260.000.000	-
2901	Kab. Serang	13.540.000.000	12.826.000.000	714.000.000
2902	Kab. Pandeglang	29.020.000.000	29.020.000.000	-
2903	Kab. Lebak	30.410.000.000	30.410.000.000	-
2904	Kab. Tangerang	12.680.000.000	12.560.000.000	120.000.000
2951	Kota Tangerang	8.290.000.000	5.810.000.000	2.480.000.000
2952	Kota Cilegon	5.740.000.000	5.740.000.000	-
3001	Kab. Belitung	26.600.000.000	26.600.000.000	-
3002	Kab. Bangka	26.980.000.000	26.980.000.000	-
3003	Kab. Bangka Barat	23.910.000.000	23.910.000.000	-
3004	Kab. Bangka Tengah	25.710.000.000	25.710.000.000	-
3005	Kab. Bangka Selatan	28.010.000.000	28.010.000.000	-
3006	Kab. Belitung Timur	28.870.000.000	28.870.000.000	-
3051	Kota Pangkalpinang	18.360.000.000	18.360.000.000	-
3101	Kab. Gorontalo	31.830.000.000	31.830.000.000	-
3102	Kab. Boalemo	30.720.000.000	30.720.000.000	-
3103	Kab. Pohuwato	25.660.000.000	25.660.000.000	-
3104	Kab. Bone Bolango	29.210.000.000	29.210.000.000	-
3151	Kota Gorontalo	17.740.000.000	17.740.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
3201	Kab. Riau Kepulauan	10.740.000.000	10.740.000.000	-
3202	Kab. Karimun	13.520.000.000	13.520.000.000	-
3203	Kab. Natuna	8.740.000.000	8.740.000.000	-
3204	Kab. Lingga	19.590.000.000	19.590.000.000	-
3251	Kota Batam	9.610.000.000	9.610.000.000	-
3252	Kota Tanjung Pinang	19.560.000.000	19.560.000.000	-
3301	Kab. Manokwari	35.340.000.000	35.340.000.000	-
3302	Kab. Sorong	33.320.000.000	33.320.000.000	-
3303	Kab. Fak-Fak	30.700.000.000	30.700.000.000	-
3304	Kab. Sorong Selatan	26.680.000.000	26.680.000.000	-
3305	Kab. Raja Ampat	31.380.000.000	31.380.000.000	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	27.790.000.000	27.790.000.000	-
3307	Kab. Teluk Wondama	37.985.000.000	37.985.000.000	-
3308	Kab. Kaimana	23.960.000.000	23.960.000.000	-
3351	Kota Sorong	12.790.000.000	12.790.000.000	-
3400	Prop. Sulawesi Barat	10.000.000.000	10.000.000.000	-
3401	Kab. Majene	25.360.000.000	25.360.000.000	-
3402	Kab. Mamuju	29.570.000.000	29.570.000.000	-
3403	Kab. Mamuju Utara	26.380.000.000	26.380.000.000	-
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	40.210.000.000	40.210.000.000	-
3405	Kab. Mamasa	25.490.000.000	25.490.000.000	-
	T o t a l	11.569.800.000.000	11.566.134.401.634	3.665.598.366

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
PER PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

No.	PROVINSI *)	JUMLAH
1	DKI Jakarta	4.944.000.000
2	Jawa Barat	10.996.000.000
3	Jawa Tengah	10.996.000.000
4	DI. Yogyakarta	15.000.000.000
5	Jawa Timur	13.745.000.000
6	NAD	5.498.000.000
7	Sumatera Utara	5.498.000.000
8	Sumatera Barat	19.373.000.000
9	Riau	119.401.000.000
10	Jambi	8.247.000.000
11	Sumatera Selatan	18.211.431.000
12	Lampung	5.498.000.000
13	Kalimantan Barat	8.247.000.000
14	Kalimantan Tengah	5.498.000.000
15	Kalimantan Selatan	-
16	Kalimantan Timur	190.058.000.000
17	Sulawesi Utara	5.498.000.000
18	Sulawesi Tengah	2.749.000.000
19	Sulawesi Selatan	27.490.000.000
20	Sulawesi Tenggara	10.996.000.000
21	Maluku	-
22	Bali	25.001.000.000
23	NTB	5.498.000.000
24	NTT	5.498.000.000
25	Papua	3.499.280.000.000
26	Bengkulu	5.498.000.000
27	Maluku Utara	9.622.000.000
28	Banten	-
29	Bangka Belitung	5.498.000.000
30	Gorontalo	-
31	Kepulauan Riau	2.749.000.000
32	Irian Jaya Barat	-
33	Sulawesi Barat	2749000000
	TOTAL	**4.049.336.431.000**

*) Ikhtisar Menurut Provinsi (meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
PER PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	DANA PENYESUAIAN			
0100	Prop. DKI Jakarta	4.944.000.000	4.944.000.000	-
0212	Kab. Bandung	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0213	Kab. Sumedang	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0251	Kota Bandung	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0261	Kota Cimahi	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0301	Kab. Semarang	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0302	Kab. Kendal	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0313	Kab. Rembang	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0317	Kab. Purbalingga	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0451	Kota Yogyakarta	15.000.000.000	15.000.000.000	-
0508	Kab. Bangkalan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0519	Kab. Nganjuk	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0520	Kab. Trenggalek	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0526	Kab. Pacitan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0552	Kota Mojokerto	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0611	Kab. Bireuen	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0654	Kota Lhokseumawe	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0713	Kab. Mandailing Natal	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0718	Kab. Serdang Bedagai	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0801	Kab. Agam	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0802	Kab. Pasaman	1.375.000.000	1.375.000.000	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0855	Kota Padang	12.500.000.000	12.500.000.000	-
0900	Prop. Riau	111.154.000.000	111.154.000.000	-
0906	Kab. Pelalawan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	2.749.000.000	2.749.000.000	-
0951	Kota Pekanbaru	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1003	Kab. Bungo	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1006	Kab. Merangin	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1008	Kab. Tebo	2.749.000.000	-	2.749.000.000
1009	Kab. Muaro Jambi	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	2.749.000.000	2.713.431.000	35.569.000
1105	Kab. Muara Enim	5.000.000.000	5.000.000.000	-
1106	Kab. Lahat	5.000.000.000	5.000.000.000	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1110	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1201	Kab. Lampung Selatan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1206	Kab. Tanggamus	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1302	Kab. Sanggau	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1304	Kab. Pontianak	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1306	Kab. Ketapang	2.749.000.000	2.749.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
PER PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1403	Kab. Barito Selatan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1411	Kab. Pulang Pisau	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1600	Prop. Kalimantan Timur	184.560.000.000	184.560.000.000	-
1603	Kab. Bulungan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1654	Kota Bontang	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1702	Kab. Minahasa	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1751	Kota Manado	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1803	Kab. Toli-toli	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1906	Kab. Tana Toraja	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1907	Kab. Maros	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1910	Kab. Sinjai	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1912	Kab. Bantaeng	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1913	Kab. Jeneponto	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1914	Kab. Selayar	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1921	Kab. Enrekang	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1922	Kab. Luwu Utara	2.749.000.000	2.749.000.000	-
1952	Kota Pare-pare	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2001	Kab. Kendari/Konawe	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2003	Kab. Muna	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2004	Kab. Kolaka	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2005	Kab. Konawe Selatan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2201	Kab. Buleleng	2.143.000.000	2.143.000.000	-
2202	Kab. Jembrana	2.143.000.000	2.143.000.000	-
2203	Kab. Klungkung	2.143.000.000	2.143.000.000	-
2204	Kab. Gianyar	2.143.000.000	2.143.000.000	-
2205	Kab. Karangasem	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2206	Kab. Bangli	2.143.000.000	2.143.000.000	-
2207	Kab. Badung	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2208	Kab. Tabanan	2.143.000.000	2.143.000.000	-
2251	Kota Denpasar	2.143.000.000	2.143.000.000	-
2303	Kab. Lombok Timur	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2352	Kota Bima	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2401	Kab. Kupang	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2451	Kota Kupang	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2504	Kab. Yapen Waropen	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2512	Kab. Mimika	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2516	Kab. Sarmi	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2518	Kab. Tolikara	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2604	Kab. Seluma	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2651	Kota Bengkulu	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2801	Kab. Halmahera Barat	2.749.000.000	2.749.000.000	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
PER PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
2802	Kab. Halmahera Tengah	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	2.749.000.000	2.749.000.000	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	1.375.000.000	1.375.000.000	-
3001	Kab. Belitung	2.749.000.000	2.749.000.000	-
3006	Kab. Belitung Timur	2.749.000.000	2.749.000.000	-
3202	Kab. Karimun	2.749.000.000	2.749.000.000	-
3404	Kab. Polewali Mamasa/Mandar	2.749.000.000	2.749.000.000	-
	Total Dana Penyesuaian	**563.837.000.000**	**561.052.431.000**	**2.784.569.000**
	DANA ALOKASI KHUSUS			
2500	Prop. Papua	3.488.284.000.000	3.488.284.000.000	-
	Total Dana Alokasi Khusus	**3.488.284.000.000**	**3.488.284.000.000**	-
TOTAL		**4.052.121.000.000**	**4.049.336.431.000**	**2.784.569.000**

www.peraturan.go.id

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2006	2005
	I. ACEH		**634.523.971.745**	**548.404.168.198**
1	BANDA ACEH	001	210.543.336.000	187.247.162.198
2	LANGSA	002	70.914.725.000	62.057.530.000
3	MEULABOH	003	90.183.936.000	69.697.530.000
4	TAPAK TUAN	074	66.609.351.000	56.866.532.000
5	LHOKSEUMAWE	089	97.782.938.000	82.234.450.000
6	KUTACANE	105	41.900.604.400	40.623.954.000
7	TAKENGON	122	47.748.555.000	41.777.010.000
8	BANDA ACEH (KHUSUS)	175	8.840.526.345	7.900.000.000
	II. MEDAN		**1.031.848.656.332**	**896.038.165.000**
9	MEDAN I	004	191.304.533.000	153.860.347.000
10	PEMATANG SIANTAR	005	97.310.542.000	83.008.855.000
11	PADANG SIDEMPUAN	006	103.216.022.000	90.130.475.000
12	GUNUNG SITOLI	007	50.224.008.700	47.718.524.000
13	RANTAU PRAPAT	075	53.733.902.000	46.255.814.000
14	TANJUNG BALAI	076	73.053.854.000	64.310.186.000
15	SIBOLGA	106	51.939.026.000	43.370.092.000
16	SIDIKALANG	119	72.457.497.900	68.054.552.000
17	TEBING TINGGI	124	119.565.548.000	104.989.924.000
18	BALIGE	125	87.253.486.732	80.559.545.000
19	MEDAN II	123	131.790.236.000	113.779.851.000
	III. PADANG		**598.330.572.775**	**527.861.947.000**
20	PADANG	010	222.294.429.000	191.223.001.000
21	BUKIT TINGGI	011	166.566.858.000	145.589.505.000
22	SIJUNJUNG	077	55.411.891.133	52.627.289.000
23	SOLOK	090	68.139.628.000	59.532.402.000
24	LUBUK SIKAPING	091	52.104.164.742	44.962.885.000
25	PAINAN	142	33.813.601.900	33.926.865.000
	IV. PEKANBARU		**449.910.922.899**	**303.351.176.146**
26	PEKANBARU	008	172.878.076.000	116.496.480.746
27	TANJUNG PINANG	009	106.096.904.000	75.060.869.000
28	RENGAT	092	84.887.830.000	63.902.381.000
29	DUMAI	120	41.155.620.699	42.538.302.000
30	BATAM	137	44.892.492.200	5.353.143.400
	V. JAMBI		**333.699.307.500**	**290.877.257.000**
31	JAMBI	012	150.384.195.000	125.129.575.000
32	SUNGAI PENUH	013	32.443.591.500	32.975.442.000
33	MUARA BUNGO	078	54.377.670.000	48.335.592.000
34	KUALA TUNGKAL	143	43.294.045.000	37.160.403.000
35	BANGKO	159	53.199.806.000	47.276.245.000

www.peraturan.go.id

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2006	2005
	VI. PALEMBANG		**530.312.369.500**	**458.596.387.000**
36	PALEMBANG	014	254.578.351.000	213.679.955.000
37	LUBUK LINGGAU	070	58.328.261.000	49.748.198.000
38	BATURAJA	109	75.250.704.500	70.577.293.000
39	LAHAT	144	85.449.299.000	77.447.185.000
40	SEKAYU	160	56.705.754.000	47.143.756.000
	VII. BANDAR LAMPUNG		**472.232.502.138**	**432.147.722.000**
41	BANDAR LAMPUNG	017	233.781.294.000	205.007.094.000
42	KOTABUMI	116	89.656.254.838	91.108.216.000
43	METRO	126	123.021.607.000	109.884.596.000
44	LIWA	145	25.773.346.300	26.147.816.000
	VIII. BENGKULU		**263.238.177.400**	**235.346.777.000**
45	BENGKULU	016	123.833.042.000	126.076.154.000
46	MANNA	121	60.561.729.000	53.267.076.000
47	CURUP	146	58.517.147.400	56.003.547.000
48	MUKO MUKO		20.326.259.000	
	IX. PANGKAL PINANG		**167.587.539.648**	**143.171.532.000**
49	PANGKAL PINANG	015	131.437.539.748	110.435.984.000
50	TANJUNG PANDAN	107	36.149.999.900	32.735.548.000
	X. SERANG		**349.036.032.133**	**313.227.924.000**
51	SERANG	020	186.746.021.000	159.390.188.000
52	TANGERANG	127	111.584.522.133	108.804.642.000
53	RANGKASBITUNG	161	50.705.489.000	45.033.094.000
	XII. JAKARTA		**2.869.269.209.060**	**2.509.888.656.889**
54	JAKARTA I	018	470.507.725.360	514.268.138.628
55	JAKARTA II	019	1.825.696.838.700	1.469.592.768.765
56	JAKARTA III	088	217.826.056.000	226.323.563.519
57	JAKARTA IV	133	174.749.763.000	150.799.284.774
58	JAKARTA V	139	180.488.826.000	148.904.901.203
59	**JAKARTA VI**	140	**10.000.000.000**	**26.600.000.000**
	XII. BANDUNG		**1.809.381.751.200**	**1.481.842.182.670**
60	PURWAKARTA	021	103.190.708.000	88.457.483.000
61	BANDUNG I	022	248.061.959.000	200.569.551.000
62	BOGOR	023	228.797.814.000	190.470.764.000
63	CIREBON	024	175.988.206.000	152.288.043.000
64	TASIKMALAYA	025	210.488.159.000	180.389.564.000
65	KARAWANG	086	56.575.771.100	54.426.230.670
66	SUMEDANG	087	60.086.717.000	54.326.168.000
67	GARUT	096	96.030.899.000	82.406.011.000

www.peraturan.go.id

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2006	2005
68	SUKABUMI	128	186.314.316.000	160.895.421.000
69	KUNINGAN	147	99.602.014.100	97.123.271.000
70	BEKASI	171	90.973.691.000	8.825.735.000
71	BANDUNG II	095	253.271.497.000	211.663.941.000
	XIII. SEMARANG		**1.875.651.280.600**	1.692.924.799.000
72	SEMARANG I	026	201.609.458.000	173.964.921.000
73	PURWOREJO	027	104.596.440.000	94.501.824.000
74	SURAKARTA	028	182.448.096.000	158.087.851.000
75	PURWOKERTO	029	126.811.169.000	112.195.249.000
76	PEKALONGAN	072	92.026.748.300	89.923.516.000
77	SEMARANG II	134	148.853.190.000	134.583.353.000
78	PATI	097	100.351.112.000	89.466.075.000
79	MAGELANG	115	123.317.927.300	125.520.279.000
80	TEGAL	118	193.395.100.000	173.576.538.000
81	KUDUS	129	129.610.348.000	113.787.249.000
82	CILACAP	130	73.889.810.000	64.418.988.000
83	KLATEN	148	122.744.510.000	111.243.022.000
84	SRAGEN	162	95.156.646.000	85.115.721.000
85	PURWODADI	163	97.803.389.000	89.848.975.000
86	BANJARNEGARA	164	83.037.337.000	76.691.238.000
	XIV. YOGYAKARTA		**350.532.366.700**	313.270.320.000
87	YOGYAKARTA	030	265.261.386.000	267.791.908.000
88	WONOSARI	149	49.868.222.000	45.478.412.000
89	WATES	176	35.402.758.700	
	XV. SURABAYA		**2.120.047.709.294**	1.870.968.911.002
90	SURABAYA I	031	304.568.425.000	240.339.438.000
91	MALANG	032	281.643.839.000	243.813.833.000
92	MADIUN	033	226.731.782.000	198.928.000.000
93	KEDIRI	034	187.441.652.094	184.281.658.000
94	BONDOWOSO	035	143.077.737.000	128.078.992.000
95	PAMEKASAN	036	169.009.668.000	148.347.835.000
96	BOJONEGORO	073	106.567.881.000	96.369.120.000
97	MOJOKERTO	098	130.806.496.000	114.904.391.000
98	PACITAN	099	37.353.337.000	33.754.685.000
99	BANYUWANGI	100	68.174.672.000	60.378.858.000
100	JEMBER	131	136.626.988.300	132.777.792.000
101	BLITAR	150	122.160.067.900	117.128.451.000
102	SIDOARJO	165	74.123.303.000	62.765.147.000
103	TUBAN	166	46.632.065.000	41.518.056.000
104	SURABAYA II	135	85.129.796.000	67.582.655.002
	XVI. PONTIANAK		**518.720.725.098**	466.959.761.000
105	PONTIANAK	042	175.739.037.298	155.694.798.000
106	SINTANG	076	73.760.403.000	65.373.632.000

www.peraturan.go.id

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2006	2005
107	SINGKAWANG	093	82.593.406.800	78.698.747.000
108	KETAPANG	094	56.080.289.000	48.766.132.000
109	PUTUSSIBAU	117	44.041.548.000	40.235.564.000
110	SANGGAU	167	86.506.041.000	78.190.888.000
	XVII. PALANGKARAYA		**456.804.940.600**	413.147.870.500
111	PALANGKARAYA	043	189.765.100.000	170.593.971.500
112	SAMPIT	044	91.116.437.000	85.046.987.000
113	BUNTOK	080	106.441.076.000	94.122.681.000
114	PANGKALAN BUN	102	69.482.327.600	63.384.231.000
	XVIII. BANJARMASIN		**409.105.174.998**	357.027.048.000
115	BANJARMASIN	045	223.152.983.999	184.455.163.000
116	KOTABARU	081	53.208.772.000	44.334.571.000
117	BARABAI	110	51.030.433.966	50.844.077.000
118	TANJUNG	151	54.827.550.033	54.160.184.000
119	PELAIHARI	168	26.885.435.000	23.233.053.000
	XIX. SAMARINDA		**337.361.087.380**	261.022.706.000
120	SAMARINDA	046	172.977.744.415	125.170.369.000
121	BALIKPAPAN	047	54.003.549.632	47.824.003.000
122	TARAKAN	048	67.585.554.000	55.517.958.000
123	NUNUKAN	152	12.890.436.333	10.485.749.000
124	TANJUNG REDEP	153	29.903.803.000	22.024.627.000
	XX. DENPASAR		**382.940.095.400**	331.662.972.000
125	DENPASAR	037	229.895.627.000	188.527.215.000
126	SINGARAJA	132	73.902.053.400	72.773.943.000
127	AMLAPURA	154	79.142.415.000	70.361.814.000
	XXI. MATARAM		**356.640.378.333**	312.233.039.001
128	MATARAM	038	182.488.410.000	157.475.541.001
129	BIMA	071	75.534.287.767	71.111.569.000
130	SUMBAWA BESAR	101	45.812.691.566	37.558.157.000
131	SELONG	169	52.804.989.000	46.087.752.000
	XXII. KUPANG		**511.567.646.816**	451.121.841.001
132	KUPANG	039	225.059.585.000	170.059.415.001
133	ENDE	040	49.713.609.250	48.350.371.000
134	WAINGAPU	041	58.138.296.000	50.539.861.000
135	RUTENG	111	79.824.485.000	70.451.285.000
136	ATAMBUA	172	53.571.264.566	72.421.717.000
137	LARANTUKA	174	45.260.407.000	39.299.192.000
	XXIII. MAKASAR		**968.022.568.500**	853.111.361.000
138	MAKASSAR I	054	177.424.354.000	159.816.729.000
139	WATAMPONE	055	102.267.996.100	99.159.202.000

www.peraturan.go.id

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2006	2005
140	BANTAENG	056	79.237.239.000	90.657.175.000
141	PARE-PARE	057	132.444.686.000	116.189.633.000
142	PALOPO	058	86.690.899.400	81.606.856.000
143	MAJENE	059	68.351.628.000	119.281.261.000
144	MAKASAR II	136	166.799.806.600	134.743.236.000
145	BENTENG	155	22.831.837.000	19.007.694.000
146	MAKALE	170	32.096.710.400	32.649.575.000
147	SINJAI	177	28.916.506.000	-
148	MAMUJU	178	70.960.906.000	-
	XXIV. PALU		**370.390.655.233**	**327.126.461.000**
149	PALU	051	180.383.173.000	157.514.836.000
150	POSO	052	86.275.141.000	75.411.314.000
151	LUWUK	053	59.755.870.000	51.211.167.000
152	TOLI-TOLI	082	43.976.471.233	42.989.144.000
	XXV. KENDARI		**323.498.510.332**	**292.729.140.000**
153	KENDARI	060	175.835.052.000	139.265.949.000
154	BAU-BAU	103	61.895.696.466	74.275.957.000
155	KOLAKA	156	52.562.230.000	46.266.315.000
156	RAHA	157	33.205.531.866	32.920.919.000
	XXVI. GORONTALO		**157.130.584.587**	**138.694.106.000**
157	GORONTALO	050	121.029.587.587	138.694.106.000
158	MARISA		36.100.997.000	
	XXVII. MANADO		**339.440.642.500**	**296.000.864.000**
159	MANADO	049	200.644.609.000	213.468.027.000
160	TAHUNA	083	27.468.984.500	44.275.289.000
161	KOTAMOBAGU	158	42.912.005.000	38.257.548.000
162	BITUNG	179	68.415.044.000	
	XXVIII. TERNATE		**210.161.508.600**	**181.561.703.000**
163	TERNATE	062	172.506.444.000	159.117.805.000
22	TOBELO	112	37.655.064.600	22.443.898.000
	XXIX. AMBON		**307.253.554.400**	**263.885.511.000**
165	AMBON	061	144.304.746.000	120.718.122.000
166	TUAL	084	43.904.988.000	38.061.811.000
167	SAUMLAKI	104	32.337.021.400	29.153.060.000
168	MASOHI	173	86.706.799.000	75.952.518.000
	XXX. JAYAPURA		**1.079.978.190.800**	**965.681.704.050**
169	JAYAPURA	063	300.515.787.000	265.621.993.050
170	BIAK	064	57.130.316.000	49.690.615.000
171	MANOKWARI	065	121.745.347.000	106.188.469.000
172	SORONG	066	116.304.750.000	102.124.849.000

www.peraturan.go.id

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2006	2005
173	FAK-AK	067	62.657.585.000	53.592.952.000
174	MERAUKE	068	150.869.896.500	140.890.667.000
175	NABIRE	085	76.088.303.000	68.310.722.000
176	WAMENA	113	122.226.891.000	108.343.333.000
177	SERUI	138	51.677.198.000	46.284.280.000
178	TIMIKA	141	20.762.117.300	24.633.824.000
JUMLAH			20.594.618.632.501	17.956.484.012.457

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2006
(dalam rupiah)

NO.	NO REKENING	NAMA REKENING	2006	2005
1	513000000	Rekening Dana Investasi	314.873.612.565,72	1.387.979.553.556
2	519000102	Rekening Pembangunan Daerah	186.302.586.420,30	858.574.897.905
3	508000071	Penerimaan Pertambangan dan perikanan	93.387.943.922,44	98.680.118.291
4	508000084	Penerimaan Panas Bumi	408.924.235.585,91	1.077.306.380.789
5	510000149	Subsidi Bunga SEDP 3	0,00	992.035.450
6	510000265	Pembiayaan Proyek RDA	0,00	9.608.768.719
7	519000002	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	39.490.833.881
8	519000003	Dana Hasil Divestasi Sahan-saham BUMN Dalam Rupiah	32.048.184,06	32.048.184
9	519000114	Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan PSDH	0,00	317.456.249
10	519000115	Pungutan Pengusahaan dan Hasil Perikanan	0,00	0,00
11	555000904	Dana Untuk Pembayaran Kewajiban	0,00	92.496.361.849
12	600000411	Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing	1.151.490.051.659,20	10.720.482.154.138
13	607000111	RDI JPY	941.202.831.224,48	1.121.092.657.633
14	607000311	RDI AUD	66.383.994.746,50	49.950.024.923
15	607000411	RDI USD	800.614.502.663,80	324.138.112.443
16	607000511	RDI GBP	376.000.363.869,15	398.980.242.995
17	607000990	RDI SDR	4.558.696.900,38	4.723.295.497
18	607000991	RDI EUR	1.101.909.110.886,45	1.124.843.819.596
19	607001991	RDI EUR (ex.607.000512-NLG)	229.591.715.894,43	225.752.715.255
20	607002991	RDI EUR (ex.607.000513-FRF)	178.513.359.219,61	175.528.439.239
21	607003991	RDI EUR (ex.607.000514-DEM)	14.687.241.457,65	14.441.656.249
22	607004991	RDI EUR (ex.607.000515-ATS)	46.963.234.619,89	46.177.962.873
23	607005991	RDI EUR (ex.607.000516-BEF)	1.678.858.022,54	1.650.785.855
24	609017411	Menkeu u/Penampungan Dana Hasil Divestasi Saham BUMN dlm Valas	0,00	0,00
25	500000001	Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan reksus kosong dan *reimbursement* dari lender	123.022.956,36	450.814.922.334
26	500000002	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih (SAL)	305.609.932.283,00	48.181.777.440
27	500000003	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk pengelolaan Surat Utang Negara	0,00	0,00
28	500000004	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR	26.440.123.754,01	21.195.024.948
29	502000001	Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Rekapitulasi Perbankan	0,00	0,00
30	502000002	Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan	83.809.786.304,21	4.583.809.786.304
31	502000003	SUB BUN Dana DAK-DR tahun 2002 yang belum disalurkan	0,00	16.168.946.303
32	510000239	Rekening Khusus Menteri Keuangan karena penjualan saham PT Telkom di pasar domestik	1.149.713.754,50	1.083.320.878
33	510000242	Reksus Depkeu untuk pembiayaan proyek SPL VIII *sector education* INP-190ECF	5.544.399.708,36	5.544.399.708
34	510000247	Reksus Depkeu untuk proyek *sector health* SPL IX INP-20 OECF	3.771.700.817,31	3.771.700.817
35	510000251	Reksus Depkeu untuk proyek *sector education and human resources dev. SPL X INP21 OECF*	152.846.605.150,87	152.846.605.151
36	510000252	Reksus Depkeu untuk *sector Social Welfare* SPL X INP-20 OECF	988.031,94	988.032
37	510000253	Reksus Depkeu untuk *sector health* SPL X INP-20 OECF	2.740.339.566,59	2.740.339.567
38	510000266	SUB BUN (Rp) dlm rangka monetisasi *non project type grant aid*	123.092.255,00	123.092.255
39	510000267	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk monetasi *non project type grant aid* 2000	109.748.651.934,35	147.739.547.109
40	510000268	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk *increase of food* (SKR) 2000	26.029.871.121,41	32.656.175.121
41	510000269	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk *increase of food* (SKR) 2001	40.127.382.582,00	37.860.430.292
42	510000270	Rekening khusus Depkeu (Rp) untuk monetisasi *non project type grant aid* 2001	154.731.029.688,82	154.131.029.689
43	510000271	Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk menampung sisa saldo SPL XI INP 22 dan SPL XII INP 23	8.276.997.785,87	38.836.828.844
44	510000272	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah luar negeri dalam rangka bencana alam nasional di NAD dan Sumut	27.995.000,00	27.995.000
45	510000274	*Increase of food production* (SKR) 2003	26.233.193.432,00	10.417.282.228
46	510000275	*Non project grant aid* 2002	118.300.839.169,00	30.537.909.830

www.peraturan.go.id

NO.	NO REKENING	NAMA REKENING	2006	2005
47	510000276	*Non project grant aid* 2003	49.798.286.924,00	7.689.777.680
48	519000111	BUN Setoran BULOG hasil penjualan beras pinjaman luar negeri dalam rupiah	0,00	85.305.612.500
49	519000116	Rekening penerimaan Tim Pemberesan BPPN	12.651.311,00	5
50	519999001	Penerimaan Fee Penjaminan BPR	0,00	37.687.739.800
51	555000150	Departemen Keuangan karena pembayaran hutang pokok dan biaya kredit atas PKE berbagai proyek	2.957.149,48	2.957.149
52	555000213	Departeman Keuangan Rekening Pembiayaan Industri Strategis dan Pengeluaran Lainnya	410.058.516,39	410.058.516
53	555000215	Rekening Cadangan CAR Bank-bank Pemerintah	36.000.000.000,00	36.000.000.000
54	555000216	Rekening Cadangan Anggaran Lain-lain	69.856.901.796,94	69.856.901.797
55	600500411	Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD)	0,00	0,00
56	600502411	Rekening Sub BUN dalam Valuta USD	3.806.594.579.799,00	2.751.753.137.833
57	602074411	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm USD	2.558.642.966,00	2.788.410.239
58	602075111	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm JPY	0,00	0,00
59	602076991	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm EUR	0,00	0,00
60	609020411	Menkeu Cq. DJA untuk menampung Pengelolaan SUN dlm USD	0,00	0,00
61	519000001	Menkeu pemberian fas. Kredit kend. Perorangan u/ Pej. Eselon 1 s/d 4	305.340.000,00	0,00
62	603000111	Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan ninth port Project	594.571.538,76	0,00
63	603001111	Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XIX	39.350.563.854,77	0,00
64	603002111	Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan tenth roads	34.658.808.849,43	0,00
65	603003111	Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XX	17.523.373.881,72	0,00
66	604010411	Depkeu k/ PISA dlm rangka Suralaya Steam power plant	5.594.044.977,40	0,00
67	604013411	Depkeu k/ PISA dlm rangka jakarta and west java subst & trans	533.984,00	0,00
68	604014411	Depkeu k/ PISA dlm rangka Trans lintas muara tawar cibatu	7.293.645.964,00	0,00
69	604016411	Depkeu k/ PISA dlm rangka minahasa dan palu diesel	2.681.009.729,20	0,00
70	604017411	Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek grati ccpp	10.114.115.627,00	0,00
71	604018411	Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek ombilin SPP	1.857.600.087,20	0,00
72	605000411	Rekening Pinjaman Obligasi RI tgl 25071996	71.894.229.939,40	0,00
73	609000111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan	210.405.977.504,76	0,00
74	609000412	Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat	4.570.213.075,30	0,00
75	609000517	Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat	25.171.129.019,51	0,00
76	609000522	Depkeu dlm rangka proyek PLC minahasa loan NIB	60.330,06	0,00
77	609001111	Rekening giro pemerintah lainnya	65.171.829.015,35	0,00
78	609002411	Reksus menkeu qq. PT. Telkom	686.293.867.923,40	0,00
79	609005111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untied AJDF	11.059.652.122,89	0,00
80	609005411	Proyek Implementation Unit Universitas Sumatera Utara	7.972.146,60	0,00
81	609006111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan two step loan 6	41.973.658.153,00	0,00
82	609015411	Proyek Implementation Unit Universitas Hasanudin	2.912.648,20	0,00
83	609016411	Imprest account Dirjen Geologi 641-INO ADB	91.282,40	0.00
84	609019411	Rek. Giro Pemerintah sehub. Reklasifkasi pembay fas. Rediskonto web PT. INDOvest	146.164.272.225,40	0,00
85	609021411	Bunas	435.666.000,00	0,00
JUMLAH			12.331.109.271.480,70	26.503.223.018.938,70

www.peraturan.go.id

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.918.438.682	293.895.973
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	11.998.028.596	1.601.258.343
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.897.054.594	2.103.733.219
4	05	MAHKAMAH AGUNG	8.709.459.479	7.999.164.763
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	11.741.214.514	0
6	07	KEPRESIDENAN	8.618.370.869	6.093.214.836
7	08	WAKIL PRESIDEN	2.700.274.166	2.768.456.670
8	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	5.031.727.528	5.948.352.705
9	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	545.903.716.055	266.509.334.883
10	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	601.536.072	0
11	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	10.519.059.966	0
12	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	7.371.918.674	7.927.765.695
13	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	23.394.944.241	22.662.861.220
14	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	9.293.956.336	3.115.587.471
15	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.096.358.938	3.881.762.586
16	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	46.421.283.900	637.962.461
17	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	109.158.505.291	67.017.296.975
18	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	142.462.285.248	94.681.993.918
19	25	DEPARTEMEN AGAMA	69.188.968.556	12.790.608.737
20	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	27.206.823.300	11.540.317.687
21	27	DEPARTEMEN SOSIAL	5.571.325.733	5.040.523.393
22	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	16.323.333.349	29.476.787.399
23	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.560.307.774	13.730.131.860
24	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	191.386.598	0
25	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	24.916.500	424.685.967
26	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.280.216.195	4.007.240.146
27	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.608.844.798	460.968.232
28	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	4.427.437.171	6.044.136.701
29	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	3.642.181.723	4.081.170.409
30	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.015.374.466	171.052.750
31	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.538.827.897	5.600.600.841
32	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	507.084.681	4.072.583.409
33	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	16.805.080	392.823.565
34	54	BADAN PUSAT STATISTIK	5.962.481.817	2.350.889.349
35	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	50.000	846.392.211
36	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	11.186.578.522	24.376.538.666
37	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0	-400.000
38	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	961.562.214	12.246.112.829
39	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	95.306.626.439	183.290.578
40	62	SUBSIDI DAN TRANSFER	6.129.857.105	0
41	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	65.702.303	667.737.573
42	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	944.000	7.619.550
43	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.118.983.024	3.335.256.696
44	67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	59.507.400	258.072.775
45	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4.295.337.416	10.378.774.468
46	69	BELANJA LAIN LAIN	140.984.289.229	0
47	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-3	131.444.163
48	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	47.776.573	13.678.443
49	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4.976.072.576	0

www.peraturan.go.id

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
50	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	958.969.056	961.483.337
51	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	75.243.032	0
52	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	337.222.158	0
53	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	534.151.112	0
54	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	490.408.383	0
55	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	17.269.677	0
56	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	39.540.756	0
57	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	351.329.278	0
58	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	643.677.015	0
59	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	854.513.086	0
60	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	57.343.136.800	23.313.752.666
61	91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	897.356	0
62	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.520.682.508	355.503.991
63	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	385.781.300	433.279.120
64	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	14.114.115.312	273.551.123
65	95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.084.515.865	0
66	100	KOMISI YUDISIAL RI	573.363.400	0
JUMLAH			1.457.362.551.679	671.209.250.352

www.peraturan.go.id

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134.850.000	0
2	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	9.355.901	0
3	05	MAHKAMAH AGUNG	27.404.362	205.435.275
4	06	KEJAKSAAN AGUNG	17.466.266	27.416.300
5	07	KEPRESIDENAN	1.832.800.341	0
6	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	266.743.316.420	785.833.326.942
7	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	0	17.881.818.183
8	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	6.062.318.494	11.286.167.895
9	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	85.907.531.316	1.485.201.990
10	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	37.698.236	922.018.355
11	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	4.946.871.704	1.689.647.856
12	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	330.468.215	0
13	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	3.293.849.776	5.877.680.863
14	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	0	47.704.839.448
15	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	11.091.103.413	0
16	25	DEPARTEMEN AGAMA	1.000.000	312.906.000
17	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	113.780.000	312.394.063
18	27	DEPARTEMEN SOSIAL	0	0
19	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	933.855.746	2.382.616.896
20	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1.470.416.200
21	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	0	493.280.067
22	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	2.111.980	0
23	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.000.000	0
24	54	BADAN PUSAT STATISTIK	0	115.520.208
25	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	20.705.419.596	60.226.887.322
26	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.318.000	0
27	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	26.284.868.236	17.647.064.354
28	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.432.532	569.358
29	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	0	10.345.619
30	67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	0	1.626.187
31	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	0	583.630
32	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	203.782	0
33	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	708.136.995	0
34	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	199.089.046	0
35	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	6.122.268	0
36	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	23.320.388	0
37	91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	0	10.000.000
38	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	21.429.775	0
JUMLAH			**429.489.122.788**	**955.897.763.011**

www.peraturan.go.id

RINCIAN TUNGGAKAN PAJAK PER JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2006

(Rp dalam ribuan, $: dalam satuan)

NO	JENIS PAJAK		TUNGGAKAN AWAL	TUNGGAKAN AKHIR	KETERANGAN
1.	**Pajak Penghasilan**				
	PPh Pasal 25 Orang Pribadi		781.823.536	838.469.005	
	PPh Pasal 25 Badan		7.527.861.707	9.435.879.253	
		US$	193.721.775	151.455.427	
	PPh Pasal 21		949.109.971	1.028.495.904	
		US$	34.841	34.841	
	PPh Pasal 22		59.458.817	72.388.295	
		US$	-	-	
	PPh Pasal 23/26		2.040.828.506	2.261.154.902	
		US$	68.964.336	62.041.675	
	PPh Pasal 4 (2)		997.967.739	857.195.854	
		US$	-	-	
	PPh Pasal 15		66.701.627	14.148.959	
	PPh Pasal 19		331.844.296	6.875.866	
	Sub Total (Rp)		12.755.596.198	14.514.608.039	
	Sub Total (US$)		262.720.952	213.531.943	
2.	**PPN dan PPnBM**		-	-	
	PPN		9.831.523.409	10.667.459.381	
		US$	15.362	(0)	
	PPnBM		40.197.267	80.510.027	
	Sub Total (Rp)		9.871.720.676	10.747.969.408	
	Sub Total (US$)		15.362	(0)	
3.	Bunga Penagihan		666.420.924	544.558.272	
		US$	14.299.324	81.315.040	
4.	PKK		-	1.728.600	
		US$	-	-	
5.	PBB		3.961.396.954	3.571.729.863	
		US$	-	-	
6.	BPHTB		265.995.548	240.543.620	
		US$	-	-	
	Total (Rp)		**27.521.130.301**	**29.621.137.802**	
	Total (US$)		**277.035.639**	**294.846.983**	

www.peraturan.go.id

RINCIAN TUNGGAKAN PAJAK PER TAHUN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2006

(Rp dalam ribuan, $: dalam satuan)

NO	JENIS PAJAK	TUNGGAKAN AWAL	TUNGGAKAN AKHIR	KETERANGAN
1	Tahun Pajak 2006	257.857	297.579.672	
	US$	-	2.913.371	
1	Tahun Pajak 2005	1.464.572.736	1.975.756.075	
	US$	572.736	374.643	
2	Tahun Pajak 2004	2.783.866.158	7.054.180.451	
	US$	1.194.963	3.274.939	
3	Tahun Pajak 2003	4.754.572.477	3.606.647.322	
	US$	3.375.248	2.647.269	
4	Tahun Pajak 2002	4.792.520.000	3.693.360.297	
	US$	34.967.044	10.597.245	
5	Tahun Pajak 2001	2.767.509.614	2.346.450.748	
	US$	200.359.901	259.398.921	
6	Tahun Pajak 2000	1.911.801.468	1.775.110.320	
	US$	5.826.270	3.482.490	
7	Tahun Pajak 1999	2.639.378.901	2.530.305.922	
	US$	7.930.324	3.630.054	
8	Tahun Pajak 1998	2.153.629.596	2.016.647.143	
	US$	4.756.000	1.729.199	
9	Tahun Pajak 1997	1.476.329.007	1.312.976.802	
	US$	5.045.564	4.888.708	
10	Tahun Pajak 1996	552.970.773	1.018.448.273	
	US$	11.560.274	887.486	
11	Tahun Pajak 1995	839.911.699	796.329.739	
	US$	1.447.316	1.022.657	
12	Tahun Pajak 1984 s.d 1994	1.356.309.404	1.174.772.246	
13	Tahun Pajak 1983 & sebelumnya	27.500.611	22.572.791	
	Total (Rp)	**27.521.130.301**	**29.621.137.802**	
	Total (US$)	**277.035.639**	**294.846.983**	

www.peraturan.go.id

RINCIAN TUNGGAKAN PAJAK PER KANTOR WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2006

(Rp dalam ribuan, $: dalam satuan)

NO	JENIS PAJAK	TUNGGAKAN AWAL	TUNGGAKAN AKHIR	KETERANGAN
1	Kanwil DJP NAD	147.867.709	137.767.745	
2	Kanwil DJP Sumbagut I	721.750.697	641.689.522	
3	Kanwil DJP Sumbagut II	313.398.603	324.357.804	
4	Kanwil DJP Sumbagteng	1.051.694.747	1.077.102.673	
	US$	1.233.636	833.739	
5	Kanwil DJP Jambi	125.804.657	123.145.126	
6	Kanwil DJP Sumsel & Kep. Babel	304.416.700	321.007.786	
7	Kanwil DJP Bengkulu & Lampung	245.527.752	269.646.192	
8	Kanwil DJP Jakarta I	2.674.229.522	3.585.565.369	
	US$	4.600	-	
9	Kanwil DJP Jakarta II	1.027.728.514	884.288.888	
10	Kanwil DJP Jakarta III	2.329.655.505	2.412.750.435	
11	Kanwil DJP Jakarta IV	809.162.157	854.181.137	
12	Kanwil DJP Jakarta V	722.781.946	925.504.355	
13	Kanwil DJP Jkt Khusus	7.160.009.291	8.485.822.928	
	US$	243.285.785	289.427.324	
14	Kanwil DJP Jawa Bag. Barat I	628.199.007	649.593.505	
	US$	-	-	
15	Kanwil DJP Jawa Bag. Barat II	1.012.143.327	1.027.993.136	
16	Kanwil DJP Jawa Bag. Barat III	598.456.185	512.902.415	
	US$	4.006.207	4.551.822	
17	Kanwil DJP Jawa Bag. Tengah I	538.784.078	564.042.119	
18	Kanwil DJP Jawa Bag. Tengah II	353.591.704	345.993.016	
19	Kanwil DJP Jawa Bag. Timur I	734.983.512	781.187.615	
20	Kanwil DJP Jawa Bag. Timur II	323.639.143	338.870.257	
21	Kanwil DJP Jawa Bag. Timur III	378.728.750	406.848.207	
22	Kanwil DJP Kalbar	219.535.291	205.225.593	
23	Kanwil DJP Kalsel & Kalteng	334.080.262	416.471.042	
24	Kanwil DJP Kaltim	1.095.198.580	975.119.419	
25	Kanwil DJP Sulsel & Sultra	331.078.301	317.435.689	
26	Kanwil DJP Sulbagut	113.517.666	122.776.666	
27	Kanwil DJP Sulteng	105.099.446	96.489.699	
28	Kanwil DJP Bali	299.134.494	279.408.607	
29	Kanwil DJP NTB & NTT	155.879.770	157.044.926	
30	Kanwil DJP Maluku dan Papua	419.180.442	443.795.487	
31	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.245.872.542	1.937.110.443	
	US$	28.505.410	34.097	
	Total (Rp)	**27.521.130.301**	**29.621.137.802**	
	Total (US$)	**277.035.639**	**294.846.983**	

www.peraturan.go.id

DAFTAR PIUTANG PENERIMAAN PUNGUTAN EKSPOR
PERHITUNGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006

No.	Nama Perusahaan	Surat Tagihan		SELISIH	DENDA ADM ATAS (Rp)		TOTAL
		Nomor	Tanggal	KURANG (Rp)	TERLAMBAT	KURANG	TAGIHAN (Rp)
1	CV. Antara	S-2031/AP/2006	09-Aug-06	122.021.836	36.606.551	0	158.628.387
2	CV. Antara	S-2399/AP/2006	07-Sep-06	122.036.720	14.644.406	0	136.681.126
3	CV. Makmur Bersama	S-2034/AP/2006	09-Aug-06	382.648.878	109.568.861	0	492.217.739
4	CV. United Profit International	S-1486/AP/2006	29-Jun-06	610.653.584	146.556.860	0	757.210.445
5	CV. United Profit International	S-1916/AP/2006	02-Aug-06	116.398.378	30.263.578	0	146.661.957
6	PT. Agrabudi Jaya Bersama	S-1914/AP/2006	02-Aug-06	3.863.071.917	1.086.703.012	0	4.949.774.929
7	PT. Alpha Archipelago Energi	S-1310/AP/2006	16-Jun-06	113.485.932	24.966.905	0	138.452.837
8	PT. Asia Pacific Coalindo	S-1283/AP/2006	15-Jun-06	1.081.707.726	281.244.009	0	1.362.951.735
9	PT. Bahari Cakrawala Sebuku	S-1219/AP/2006	12-Jun-06	18.041.005.920	4.639.139.535	0	22.680.145.455
10	PT. Bara Jaya Utama	S-1210/AP/2006	12-Jun-06	3.984.705.432	995.008.532	0	4.979.713.964
11	PT. Bara Multi Sugih Sentosa	S-2080/AP/2006	15-Aug-06	9.288.935.978	2.499.977.355	0	11.788.913.333
12	PT. Batu Kali Welang Ampuh	S-1881/AP/2006	31-Jul-06	800.918.646	319.791.133	5.137.850	1.125.847.629
13	PT. Berkat Banua Indah	S-1306/AP/2006	16-Jun-06	946.587.120	265.044.394	0	1.211.631.514
14	PT. Borneo Indobara	S-1221/AP/2006	12-Jun-06	2.400.881.178	551.142.649	0	2.952.023.827
15	PT. Borneo Indobara	S-2400/AP/2006	07-Sep-06	714.161.595	157.115.551	0	871.277.146
16	PT. Borneo Omega Group	S-1307/AP/2006	16-Jun-06	688.850.400	192.878.112	0	881.728.512
17	PT. Bukit Bara Interprice	S-1913/AP/2006	02-Aug-06	613.003.695	154.542.254	0	767.545.949
18	PT. Bumi Dharma Kencana	S-1282/AP/2006	15-Jun-06	2.236.199.645	626.959.755	0	2.863.159.400
19	PT. Bumi Dharma Kencana	S-2030/AP/2006	09-Aug-06	559.677.450	145.516.137	0	705.193.587
20	PT. Bumi Dharma Kencana	S-2397/AP/2006	07-Sep-06	103.735.919	149.090.486	10.373.592	263.199.996
21	PT. Cahaya Timur Permai	S-1209/AP/2006	12-Jun-06	76.585.488	18.380.517	0	94.966.005
22	PT. Cipta Mandiri Sejati	S-1974/AP/2006	07-Aug-06	3.595.641.952	984.293.063	0	4.579.935.015
23	PT. Corsindo Global Trading	S-1615/AP/2006	10-Jul-06	45.451.939	46.398.275	9.090.388	100.940.602
24	PT. Dasa Eka Jasatama	S-2079/AP/2006	15-Aug-06	15.113.099.292	4.025.116.455	0	19.138.215.747
25	PT. Dewata Utama	S-1312/AP/2006	19-Jun-06	539.827.947	140.355.266	0	680.183.213
26	CV. Elang Alam Perkasa	S-1977/AP/2006	07-Aug-06	282.300	62.106	0	344.406
27	PT. Emirates Trading Agency	S-1483/AP/2006	29-Jun-06	34.899.707	55.003.924	6.281.947	96.185.578
28	PT. Global Inti Trade	S-1484/AP/2006	29-Jun-06	55.309.702	13.274.329	0	68.584.031
29	PT. Global Inti Trading QQ	S-1482/AP/2006	29-Jun-06	54.597.957	14.195.469	0	68.793.426
30	PT. Harjomas Makmur	S-2396/AP/2006	07-Sep-06	471.010.365	103.622.280	0	574.632.645
31	PT. Indodharma Multi Perkasa	S-2398/AP/2006	07-Sep-06	187.836.513	37.498.507	18.783.651	244.118.671
32	PT. Indodharma Multi Perkasa	S-1218/AP/2006	12-Jun-06	11.197.948.874	3.016.410.413	0	14.214.359.286
33	PT. Indominco Mandiri	S-1979/AP/2006	07-Aug-06	3.723.874.210	5.209.873.540	601.032.885	9.534.780.635
34	PT. Indomineratama Prayasa	S-1215/AP/2006	12-Jun-06	959.732.745	240.337.979	0	1.200.070.724
35	PT. Indotai International	S-1220/AP/2006	12-Jun-06	3.516.978.611	999.556.165	0	4.516.534.776
36	PT. Jorong Barutama Greston	S-2081/AP/2006	15-Aug-06	13.165.445.236	3.477.418.734	0	16.642.863.970
37	PT. Kalimantan Energi Lestari	S-1485/AP/2006	29-Jun-06	1.088.440.388	309.380.860	0	1.397.821.248
38	PT. Kalimantan Energi Utama	S-1315/AP/2006	16-Jun-06	1.091.391.075	261.933.858	0	1.353.324.933
39	PT. Mandiri Intiperkasa	S-1616/AP/2006	10-Jul-06	889.968.868	927.330.877	147.193.646	1.964.493.391
40	PT. Marunda Graha Mineral	S-1216/AP/2006	12-Jun-06	4.387.103.861	1.129.829.879	0	5.516.933.740
41	PT. Marunda Graha Mineral	S-2033/AP/2006	09-Aug-06	1.640.569.509	387.657.476	0	2.028.226.985
42	PT. Mega Citra Prima Coal	S-1912/AP/2006	02-Aug-06	1.654.105.897	434.139.653	0	2.088.245.550
43	PT. Mega Putra Citra Primacoal	S-2032/AP/2006	09-Aug-06	519.606.389	116.918.937	0	636.525 326
44	PT. Padang Bara Sukses Makmur	S-2375/AP/2006	06-Sep-06	499.423.397	152.415.794	0	651.839.190
45	PT. Prima Multitrada	S-1973/AP/2006	07-Aug-06	4.616.576.677	1.207.805.543	0	5.824.382.219
46	PT. Surya Sakti Darma Kencana	S-1311/AP/2006	19-Jun-06	241.011.972	0	28.921.437	269.933.408
47	PT. Trinity Artha Nugraha	S-1313/AP/2006	19-Jun-06	308.900.532	80.314.138	0	389.214.670
48	PT. Trubaindo Coal Mining	S-1975/AP/2006	07-Aug-06	276.334.179	1.015.190.127	40.417.194	1.331.941.500
49	PT. TTI Trans Global	S-1316/AP/2006	19-Jun-06	4.189.858.940	1.176.589.453	0	5.366.448.393

www.peraturan.go.id

DAFTAR PIUTANG PENERIMAAN PUNGUTAN EKSPOR
PERHITUNGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006

No.	Nama Perusahaan	Surat Tagihan		SELISIH	DENDA ADM ATAS (Rp)		TOTAL
		Nomor	Tanggal	KURANG (Rp)	TERLAMBAT	KURANG	TAGIHAN (Rp)
50	PT. Tunas Karya Wijaya Agung	S-1978/AP/2006	07-Aug-06	483.877.665	125.808.193	0	609.685.858
51	PT. Wahana Eka Pratama	S-1317/AP/2006	19-Jun-06	462.262.239	110.942.937	0	573.205.177
52	PT. Kitadin	S-802/WBC.10/KP.03/2006	25 Juli 2006	0	288.894.095	0	288.894.095
	J u m l a h			121.878.642.371	38.533.708.917	867.232.590	161.279.583.878

Keterangan :

1. Piutang Pungutan Ekspor tersebut, berdasarkan pelimpahan tagihan dari KPBC yang diterima dan telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Anggaran.
2. Jumlah piutang tersebut telah dikurangkan dengan pembayaran/pelunasan berdasarkan bukti setor yang diterima oleh Ditjen Anggaran.

www.peraturan.go.id

PIUTANG BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	40.154.563.198	0
2	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	22.598.801.458.415	14.137.680.262
3	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	1.235.032.417	0
4	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	2.507.836.773	288.267.800
5	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.852.257.897.999	974.538.098.156
6	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	565.550.009.305	449.185.419.934
7	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	198.682.451.772	151.599.729.738
8	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.600.000	0
9	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	167.671.912.927	12.201.500
10	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.489.965	0
11	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.417.546.700	67.244.000
12	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	960.000.000	0
13	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	245.917.200	1.314.667.200
14	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	405.690.000	0
15	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	222.698.208.460	187.818.817.264
16	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	224.400.000	673.346.850
17	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL		19.679.553
18	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	4.559.038.266	0
19	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	110.000.000	0
20	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	381.198.683	0
21	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	788.410.784	1.157.498.053
JUMLAH			**25.658.717.662.864**	**1.780.812.650.310**

www.peraturan.go.id

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI DAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	65.800.000	-
2	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.348.436	2.152.733
3	06	KEJAKSAAN AGUNG	4.750.000	145.520.000
4	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	226.000.000	-
5	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.258.779.925	44.151.600
6	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	58.837.410	19.273.380
7	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	744.449.467	7.950.000
8	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	38.103.800	104.427.120
9	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51.443.034	256.762.417
10	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	439.489.073	427.262.925
11	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	2.273.385.172	2.075.545.956
12	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	58.960.400	63.401.800
13	27	DEPARTEMEN SOSIAL		4.070.672
14	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	93.166.700	324.778.619
15	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.249.500	10.088.900
16	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	30.891.600	-
17	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI		17.200.000
18	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	51.500.000	-
19	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM		800.000
20	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	71.250.000	45.000.000
21	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-	4.003.659.577
22	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.890.000	9.228.956
23	54	BADAN PUSAT STATISTIK	24.281.800	17.813.500
24	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.800.000	1.200.000
25	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	175.000.000	375.000.000
26	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	48.261.290	89.639.047
27	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	22.048.497	56.333.545
28	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	11.200.000	-
29	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	7.200.000	-
30	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.000.000	-
31	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.080.000	-
32	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	6.378.713.832	-
JUMLAH			**12.153.879.936**	**8.101.260.747**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
PENERIMAAN BUNGA DAN DENDA PINJAMAN PENDANAAN KUMK-DANA EKS SU-005
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2006
(DALAM RUPIAH)

NO.	BUMN PENGELOLA / LKP	HAK TAGIH 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2006				TELAH DIBAYAR 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2006				PIUTANG BUNGA DAN DENDA PER 31 DES 06	
		TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA	BUNGA DAN DENDA TAHUN 2006			TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA	PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA TAHUN 2006			PIUTANG TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PIUTANG TAHUN 2006
			BUNGA (ACRUAL)	DENDA (ACRUAL)	JUMLAH		BUNGA	DENDA	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)=(3)-(7)	(12)=(6)-(10)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.155.047.688	42.240.487.205	(15.759.711)	42.224.727.495	3.155.047.688	40.236.377.616	(15.759.711)	40.220.617.905	-	2.004.109.589
2	PT PNM (Persero)	1.936.067.280	33.686.910.504	1.096.347.249	34.783.257.753	1.936.067.280	32.083.622.833	1.096.347.249	33.179.970.082	-	1.603.287.671
3	PT BRI (Persero) Tbk	3.910.289.483	60.343.570.836	3.297.175	60.346.868.010	3.910.289.483	57.480.557.137	-	57.480.557.137	-	2.866.310.873
4	PT BNI (Persero) Tbk	1.165.033.959	12.996.064.932	(2.478.431)	12.993.586.500	1.165.033.959	12.996.064.932	(2.478.431)	12.993.586.500	-	-
5	Bank Bukopin	2.531.502.247	42.240.487.206	(1.400.000)	42.239.087.206	2.531.502.247	40.236.377.617	(1.400.000)	40.234.977.617	-	2.004.109.589
6	PT BTN (Persero)	1.547.029.151	24.137.421.260	-	24.137.421.260	1.547.029.151	22.992.215.781	-	22.992.215.781	-	1.145.205.479
7	Perum Pegadaian	1.547.029.151	31.445.222.158	(4.798)	31.445.217.359	1.547.029.151	29.670.153.665	(4.798)	29.670.148.867	-	1.775.068.493
8	BPD Aceh	196.101.664	1.810.306.594	64.749.829	1.875.056.423	196.101.664	1.299.606.493	61.607.401	1.361.213.894	-	513.842.529
9	BPD Bengkulu	77.435.174	1.206.897.643	2.121.532	1.209.019.175	77.435.174	866.404.329	-	866.404.329	-	342.614.846
10	BPD Sumatera Utara	193.684.634	3.017.177.658	9.665.180	3.026.842.837	193.684.634	2.874.026.973	9.665.180	2.883.692.152	-	143.150.685
11	BPD Sumatera Selatan	309.405.830	4.827.484.252	-	4.827.484.252	309.405.830	4.598.443.156	-	4.598.443.156	-	229.041.096
12	BPD Sumatera Barat	270.730.101	4.771.037.625	1.429.703	4.772.467.328	270.730.101	4.513.366.392	1.429.703	4.514.796.095	-	257.671.233
13	BPD Riau	194.197.414	3.017.177.658	53.227.615	3.070.405.272	194.197.414	2.874.026.973	226.772	2.874.253.744	-	196.151.528
14	BPD Lampung	116.027.186	1.804.748.113	1.429.070	1.806.177.183	116.027.186	1.718.857.702	386.870	1.719.244.572	-	86.932.611
15	BPD Jambi	25.329.892	241.374.213	20.950	241.395.162	25.329.892	229.922.158	-	229.922.158	-	11.473.004

www.peraturan.go.id

NO.	BUMN PENGELOLA / LKP	HAK TAGIH 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2006				TELAH DIBAYAR 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2006				PIUTANG BUNGA DAN DENDA PER 31 DES 06	
		TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA	BUNGA DAN DENDA TAHUN 2006			TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA	PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA TAHUN 2006			PIUTANG TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PIUTANG TAHUN 2006
			BUNGA (ACRUAL)	DENDA (ACRUAL)	JUMLAH		BUNGA	DENDA	JUMLAH		
16	BPD DKI Jakarta	386.757.288	6.501.400.153	36.160.922	6.537.561.075	386.757.288	6.157.838.510	414.073	6.158.252.583	-	379.308.492
17	BPD Jawa Barat	402.056.674	6.034.355.315	103.759.313	6.138.114.628	402.056.674	5.748.053.945	37.009.695	5.785.063.640	-	353.050.988
18	BPD DI Yogyakarta	116.027.186	2.936.310.225	-	2.936.310.225	116.027.186	2.793.159.540	-	2.793.159.540	-	143.150.685
19	BPD Jawa Tengah	463.668.321	6.034.355.315	137.823.967	6.172.179.282	463.668.321	5.748.053.945	79.216.237	5.827.270.182	-	344.909.100
20	BPD Jawa Timur	386.757.288	8.656.365.152	273.939.609	8.930.304.761	386.757.288	8.186.830.905	184.531.989	8.371.362.894	-	558.941.867
21	BPD Bali	270.730.101	4.224.048.721	52.437.817	4.276.486.537	270.730.101	4.023.637.762	9.570.657	4.033.208.418	-	243.278.119
22	BPD Nusa Tenggara Barat	124.637.810	3.755.165.049	1.067.092	3.756.232.142	124.637.810	3.541.899.149	1.067.092	3.542.966.241	-	213.265.900
23	BPD Nusa Tenggara Timur	166.305.634	2.594.772.785	1.579	2.594.774.365	166.305.634	2.471.663.196	1.579	2.471.664.776	-	123.109.589
24	BPD Sulawesi Selatan	271.902.138	4.224.048.721	25.395.440	4.249.444.161	271.902.138	4.023.637.762	6.420.297	4.030.058.059	-	219.386.102
25	BPD Sulawesi Tengah	144.801.929	2.259.262.629	29.353.139	2.288.615.768	144.801.929	2.152.071.397	3.270.442	2.155.341.838	-	133.273.930
26	BPD Sulawesi Tenggara	26.196.984	255.856.665	28.276.595	284.133.260	26.196.984	243.717.487	24.088.290	267.805.777	-	16.327.483
27	BPD Kalimantan Selatan	154.702.915	2.413.742.126	14.981	2.413.757.107	154.702.915	2.299.221.578	14.981	2.299.236.559	-	114.520.548
28	BPD Kalimantan Tengah	261.864.030	2.413.742.126	267.636.039	2.681.378.165	261.864.030	2.299.221.578	205.785.623	2.505.007.201	-	176.370.964
29	BPD Kalimantan Barat	255.879.263	3.620.613.189	(170.217)	3.620.442.972	255.879.263	3.448.832.367	(170.217)	3.448.662.150	-	171.780.822
30	BPD Kalimantan Timur	233.863.096	3.807.431.124	263.003.033	4.070.434.157	233.863.096	3.612.746.193	156.372.805	3.769.118.998	-	301.315.159
31	BPD Maluku	242.053.615	3.308.637.019	1.441.025	3.310.078.044	242.053.615	3.151.657.978	10.718.814	3.162.376.792	-	147.701.252
32	BPD Papua	419.848.503	4.224.048.721	191.115.811	4.415.164.532	419.848.503	4.023.637.762	153.204.795	4.176.842.556	-	238.321.975
	JUMLAH	21.502.963.627	335.050.522.891	2.623.901.507	337.674.424.398	21.502.963.627	318.595.904.809	2.021.537.387	320.617.442.196	-	17.056.982.202

Catatan :

- Penerimaan Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK telah ditransfer ke Rekening Penampungan Dana SUP No. : 0329-01-000510-30-8 di BRI Cabang Veteran, Jakarta.

www.peraturan.go.id

DAFTAR NILAI ASET DAN KEWAJIBAN 18 BANK DALAM LIKUIDASI
(Dalam Rupiah)

No	Nama Bank	Sisa Kewajiban BLBI s.d TW IV 2006	Nilai Aset	
			Nilai Buku	Nilai Realisasi
1.	PT Anrico Bank (DL)	200.547.771.036	140.362.496.467	28.672.828.420
2.	PT Astria Raya Bank (DL)	446.968.657.099	68.136.922.279	91.854.447.936
3.	Bank Citrahasta Danamanunggal (DL)	176.703.978.098	174.306.147.776	157.113.031.324
4.	PT Bank Dwipa Semesta (DL)	103.135.862.531	117.597.840.000	35.188.070.000
5.	PT Bank Guna Internasional	67.500.000.000	134.761.850.000	74.821.250.000
6.	PT Bank Harapan Sentosa (DL)	3.280.454.256.353	167.218.382.491	102.401.501.798
7.	PT Bank Industri (DL)	232.346.229.327	117.260.417.954	113.797.443.390
8.	PT Bank Jakarta (DL)	90.034.069.938	153.387.099.982	80.626.420.734
9.	PT Bank Kosaghara Semesta (DL)	154.940.412.220	157.047.143.197	0
10.	PT. Bank Mataram Dhanarta (DL)	305.577.209.867	7.890.283.493	0
11.	PT Bank Pacific (DL)	1.801.343.358.572	1.610.120.915	585.407.958.652
12.	PT Bank Pinaesaan	662.627.810.819	114.483.054.130	72.050.580.000
13.	PT Sejahtera Bank Umum (DL)	829.962.297.979	1.120.861.906.862	346.618.634.564
14.	PT South East Asia Bank (DL)	800.096.303.925	190.101.642.908	90.328.050.339
15.	PT Bank Umum Majapahit Jaya (DL)	6.054.789.643	48.238.579.834	0
16.	Bank Asiatic (DL)	886.597.719.823	0	0
17.	Bank Dagang Bali (DL)	1.331.516.911.477	0	0
18.	Bank Global (DL)	804.234.270.396	0	0
	TOTAL	12.180.641.909.103	2.713.263.888.287	1.778.880.217.157

www.peraturan.go.id

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.586.345.936	3.281.874.728
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.938.062.798	1.949.218.198
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4.739.502.147	1.132.417.155
4	05	MAHKAMAH AGUNG	5.590.378.453	19.725.372.275
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	0	99.134.240
6	07	KEPRESIDENAN	64.205.898.551	52.113.258.631
7	08	WAKIL PRESIDEN	956.513.066	419.651.293
8	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	334.321.655	557.431.590
9	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	5.832.166.675	2.297.793.126
10	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN		5.260.284.500.168
11	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	18.404.750.813	11.554.943.073
12	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	83.265.789.110	67.529.048.955
13	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	19.499.958.199	4.523.950.485
14	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	973.951.915	0
15	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.551.907.878	4.400.244.840
16	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	201.635.396.590	184.103.135.848
17	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	6.285.855.424	8.392.222.811
18	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	178.291.519.092	152.242.625.592
19	25	DEPARTEMEN AGAMA	560.325.246	937.538.078
20	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.743.586.112	3.834.644.320
21	27	DEPARTEMEN SOSIAL	83.520.161.912	34.814.305.359
22	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	5.379.745.296	7.163.391.780
23	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	526.583.916	87.059.993.390
24	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	5.769.374.614	39.666.492.604
25	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	22.767.400	34.442.750
26	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	795.657.921	394.890.400
27	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.107.827	36.561.446
28	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	952.096.000	356.483.845
29	41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	234.008.480	148.562.643
30	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	32.830.500	29.757.497.762
31	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	522.822.610	0
32	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	22.132.900	9.600.000
33	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.602.500	1.899.500
34	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	67.211.950	3.699.148.814
35	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	458.689.752	542.178.170
36	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	12.151.300	1.727.700
37	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3.250.000	1.887.500
38	54	BADAN PUSAT STATISTIK	4.539.830.281	3.486.426.287
39	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	575.485.680	196.527.000
40	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.462.760.895	1.427.987.944
41	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	25.000.000	68.557.520
42	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.467.866.091	982.331.781
43	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	618.428.379.304	809.057.502.780
44	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	15.771.174.622	3.492.820.500
45	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	15.429.120	17.144.034
46	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	199.565.925	52.298.175
47	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	4.327.130.947	1.895.510.000
48	67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	3.593.425	0

www.peraturan.go.id

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
49	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	67.417.476.341	231.705.714.864
50	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	377.997.315	217.834.650
51	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	9.729.767.266	8.794.007.975
52	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	72.278.699.743	0
53	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	620.046.088	538.700.525
54	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	232.114.863	0
55	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	327.395.938	0
56	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4.374.538.846	0
57	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.196.937.288	0
58	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.979.280.234	0
59	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	66.270.510.260	0
60	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	46.321.840	0
61	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	149.979.324	0
62	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.067.183.134	0
63	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	142.056.875	0
64	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.355.869.476	0
65	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.911.268.766	0
66	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.230.606.108	1.003.966.915
67	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	138.833.080	0
68	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	850.674.192	154.769.525
69	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	452.392.778.617	87.930.000
70	95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.114.252.277	0
71	100	KOMISI YUDISIAL RI	146.030.993	0
JUMLAH			**2.050.894.259.692**	**7.046.248.099.544**

www.peraturan.go.id

POSISI PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PEMINJAM
Per 31 DESEMBER 2006
dalam Juta Rupiah

Pengembalian Rupiah dan Subtotal Valas Ekivalen Rupiah

No.	SEKTOR / URAIAN	PEMERINTAH DAERAH			BPIS	KEUANGAN	INDUSTRI	PERTANIAN	KEHUTANAN	PU	PERHUBUNGAN	PERTAMB & ENERGI	PARPOSTEL	KOPERASI	JUMLAH SLA+RDI+RPD RUPIAH	JUMLAH (SLA+RDI) VALAS	JUMLAH KESELURUHAN
		PDAM	PEMDA	JUMLAH												(Ekivn. Rupiah)	(VALAS + RUPIAH)
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14= 1 s.d13)	(15)	(16= 14 + 15)
1	Total Penarikan Pinjaman berjalan	3.782.229,16	1.597.712,41	5.379.941,56	2.236.035,64	9.609.140,80	1.389.486,24	1.958.390,71	47.429,57	843.137,68	378.807,87	15.454.847,59	3.360.834,23	31.284,65	40.689.336,54	45.171.507,33	85.860.843,87
2	Angsuran Pokok	831.546,10	769.647,59	1.601.193,69	3.112,16	4.505.256,49	494.689,25	575.009,35	29.126,54	390.116,65	232.242,04	7.142.291,28	1.810.501,82	2.790,84	16.786.330,11	19 204.205,28	35.990.535,38
3	Equity Pokok Pinjaman berjalan	0,00	0,00	0,00	887.998,09	772.074,03	336.369,10	0,00	0,00	59.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.470,48	0,00	2.055.470,48
4	Outstanding Pokok (1 - 2 - 3)	2.950.683,06	828.064,81	3.778.747,87	1.344.925,39	4.331.810,29	558.427,88	1.383.381,36	18.303,03	393.991,77	146.565,83	8.312.556,30	1.550.332,42	28.493,81	21.847.535,95	25 967.302,05	47.814.838,00
5	. Tunggakan Pokok	1.126.009,67	244.848,91	1.370.858,58	51.968,01	1.026.964,02	321.060,84	1.094.095,07	2.634,36	140.635,35	48.722,86	0,00	2,66	24.764,29	4.081.706,04	2 230.779,51	6.312.485,55
6	Pokok Belum Jatuh Tempo (4 - 5)	1.824.673,39	583.215,90	2.407.889,29	1.292.957,38	3.304.846,26	237.367,04	289.286,29	15.668,66	253.356,42	97.842,97	8.312.556,30	1.550.329,75	3.729,53	17.765.829,91	23.736.522,54	41.502.352,46
7	Tunggakan Bunga,CC,Denda Telah Jatuh Tempo	2.725.565,73	503.795,71	3.229.361,45	112.493,67	2.005.329,30	921.351,70	1.537.195,74	1.359,35	99.371.53	145.675,37	0,00	5.787,55	35.570,76	8.093.496,42	2.272.405,07	10.365.901,49
8	Total Tunggakan per 31-12-06 (5 + 7)	3.851.575,40	748.644,62	4.600.220,02	164.461,68	3.032.293,32	1.242.412,55	2.631.290,81	3.993,71	240.006,88	194.398,23	0,00	5.790,22	60.335,05	12.175.202,46	4.503.184,57	16.678.387,04
9	Total Piutang Pemerintah Per 31-12-06 (4 + 7)	5.676.248,79	1.331.860,53	7.008.109,32	1.457.419,06	6.337.139,58	1.479.779,59	2.920.577,11	19.662,37	493.363,30	292.241,19	8.312.556,30	1.556.119,97	64.064,58	29.941.032,37	28.239.707,12	58.180.739,49
10	Kewajiban Akrual Bunga, CC, Denda s.d 31-12-06	169.260,23	37.745,96	207.006,19	5.788,87	65.844,34	14.876,32	87.718,44	185,22	22.267,31	3.244,43	152.250,12	52.094,15	1.231,67	612.507,55	418.833,10	1.031.340,65
11	Total Piutang Pemerintah termasuk Kewajiban Akrual Per 31-12-06 (9+10)	5.845.509,02	1 369.606,49	7.215.115,51	1.463.207,94	6.402.983,93	1.494.655,91	3.008.295,54	19.847,59	515.631.11	295.485,62	8.464.806,42	1.608.214,12	65.296,25	30.553.539,93	28.658.540,21	59.212.080,14

www.peraturan.go.id

OUTSTANDING PENARIKAN PINJAMAN PENDANAAN KUMK-EKS DANA SU-005
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2006

(dalam rupiah)

NO	BUMN PENGELOLA / LKP	PLAFON PINJAMAN	OUTSTANDING 1 JAN 2006	MUTASI PINJAMAN 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2006		OUTSTANDING 31 DES 2006
				PENARIKAN PINJAMAN	ANGSURAN POKOK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
1	PT Bank Mandiri (Per	350.000.000.000	350.000.000.000	-	-	350.000.000.000
2	PT PNM (Persero)	340.000.000.000	250.000.000.000	30.000.000.000	-	280.000.000.000
3	PT BRI (Persero) Tbk	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-	500.000.000.000
4	PT BNI (Persero) Tbk	-	150.000.000.000	(150.000.000.000)	-	-
5	Bank Bukopin	435.000.000.000	350.000.000.000	-	-	350.000.000.000
6	PT BTN (Persero)	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-	200.000.000.000
7	Perum Pegadaian	410.000.000.000	200.000.000.000	110.000.000.000	-	310.000.000.000
8	BPD Aceh	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
9	BPD Bengkulu	20.000.000.000	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
10	BPD Sumatera Utara	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
11	BPD Sumatera Selata	40.000.000.000	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
12	BPD Sumatera Barat	45.000.000.000	35.000.000.000	10.000.000.000	-	45.000.000.000
13	BPD Riau	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
14	BPD Lampung	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
15	BPD Jambi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
16	BPD DKI Jakarta	60.000.000.000	50.000.000.000	10.000.000.000	-	60.000.000.000
17	BPD Jawa Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
18	BPD DI Yogyakarta	75.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	-	25.000.000.000
19	BPD Jawa Tengah	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
20	BPD Jawa Timur	112.000.000.000	50.000.000.000	32.000.000.000	-	82.000.000.000
21	BPD Bali	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000
22	BPD Nusa Tenggara B	37.245.000.000	27.245.000.000	10.000.000.000	-	37.245.000.000
23	BPD Nusa Tenggara T	21.500.000.000	21.500.000.000	-	-	21.500.000.000
24	BPD Sulawesi Selatan	50.000.000.000	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000
25	BPD Sulawesi Tengah	18.720.000.000	18.720.000.000	-	-	18.720.000.000
26	BPD Sulawesi Tengga	2.120.000.000	2.120.000.000	-	-	2.120.000.000
27	BPD Kalimantan Sela	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
28	BPD Kalimantan Teng	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
29	BPD Kalimantan Bara	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000
30	BPD Kalimantan Timu	34.000.000.000	30.000.000.000	4.000.000.000	-	34.000.000.000
31	BPD Maluku	27.415.000.000	27.415.000.000	-	-	27.415.000.000
32	BPD Papua	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000
	JUMLAH	3.100.000.000.000	2.684.000.000.000	66.000.000.000	-	2.750.000.000.000

www.peraturan.go.id

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2006
(dalam jutaan rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN PELAPORAN	STATUS	% SAHAM NEGARA	TOTAL EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	ASURANSI					
	1 PT Asuransi ABRI (ASABRI)	2006	Audited	100,00%	480.913	480.913
	2 PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	2006	Audited	100,00%	528.685	528.685
	3 PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	2006	Audited	100,00%	590.298	590.298
	4 PT Asuransi Jasa Raharja	2006	Audited	100,00%	1.224.797	1.224.797
	5 PT Asuransi Jiwasraya	2006	Audited	100,00%	431.094	431.094
	6 PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	2006	Audited	100,00%	1.570.292	1.570.292
	7 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	2006	Unaudited	100,00%	2.860.287	2.860.287
	8 PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	2006	Audited	100,00%	(60.181)	(60.181)
	9 PT Taspen	2006	Unaudited	100,00%	1.652.363	1.652.363
	TOTAL				**9.278.547**	**9.278.547**
2	JASA PEMBIAYAAN					
	1 Perum Pegadaian	2006	Audited	100,00%	1.131.582	1.131.582
	2 Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)	2006	Audited	100,00%	295.064	295.064
	3 PT Danareksa	2006	Audited	100,00%	671.153	671.153
	4 PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	2006	Audited	100,00%	101.031	101.031
	5 PT PANN Multi Finance	2006	Audited	93,04%	(1.512.923)	(1.407.624)
	6 PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	2006	Audited	100,00%	436.240	436.240
	7 PT Sarana Multigriya Finansial*	2006	Audited	100,00%	1.115.775	1.115.775
	TOTAL				**2.237.922**	**2.343.221**
3	PERBANKAN					
	1 PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	2006	Audited	100,00%	3.993.562	3.993.562
	2 PT Bank Mandiri, Tbk	2006	Audited	69,11%	26.340.670	18.204.037
	3 PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	2006	Audited	99,12%	14.794.269	14.664.079
	4 PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	2006	Audited	56,97%	16.878.808	9.615.857
	5 PT Bank Tabungan Negara (BTN)	2006	Audited	100,00%	1.760.276	1.760.276
	TOTAL				**63.767.585**	**48.237.811**
4	ANEKA INDUSTRI					
	1 PT Garam	2006	Prognosa	100,00%	213.045	213.045
	2 PT Industri Gelas (IGLAS)	2006	Unaudited	63,82%	7.740	4.940
	3 PT Industri Soda Indonesian (ISI)	2006	RKAP	100,00%	(83.493)	(83.493)
	TOTAL				**137.292**	**134.491**
5	INDUSTRI FARMASI					
	1 PT Biofarma	2006	Audited	100,00%	514.739	514.739
	2 PT Indo Farma, Tbk	2006	Audited	80,66%	280.486	226.240
	3 PT Kimia Farma, Tbk	2006	Audited	90,03%	870.654	783.850
	TOTAL				**1.665.878**	**1.524.828**
6	INDUSTRI SANDANG					
	1 PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	2006	Unaudited	100,00%	(111.324)	(111.324)
	2 PT Primissima	2006	Prognosa	52,79%	25.336	13.375
	TOTAL				**(85.988)**	**(97.949)**
7	JASA KONSTRUKSI					
	1 Perum Pembangunan Perumahan Nasional	2006	Unaudited	100,00%	532.589	532.589
	2 PT Adhi Karya	2006	Audited	51,00%	440.661	224.737
	3 PT Brantas Abipraya	2006	Unaudited	100,00%	(53.033)	(53.033)
	4 PT Hutama Karya (HK)	2006	Audited	100,00%	230.305	230.305
	5 PT Istaka Karya	2006	Unaudited	100,00%	(101.324)	(101.324)
	6 PT Nindya Karya	2006	Unaudited	100,00%	75.167	75.167
	7 PT Pembangunan Perumahan (PP)	2006	Audited	51,00%	281.964	143.802
	8 PT Waskita Karya	2006	Audited	100,00%	325.536	325.536
	9 PT Wijaya Karya (WIKA)	2006	Audited	100,00%	402.258	402.258
	TOTAL				**2.134.123**	**1.780.036**
8	KAWASAN INDUSTRI					
	1 PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	2006	Audited	88,74%	348.045	308.855
	2 PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	2006	Audited	60,00%	49.956	29.973
	3 PT Kawasan Industri Medan (KIM)	2006	Audited	60,00%	45.737	27.442

www.peraturan.go.id

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2006
(dalam jutaan rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN PELAPORAN	STATUS	% SAHAM NEGARA	TOTAL EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
	4 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	2006	Unaudited	60,00%	25.230	15.138
	5 PT Pengembangan Daerah Industri - Pulau Batam	2006	Audited	100,00%	32.632	32.632
	TOTAL				**501.600**	**414.041**
9	KONSULTAN KONSTRUKSI					
	1 PT Bina Karya	2006	Prognosa	100,00%	4.628	4.628
	2 PT Indah Karya	2006	Unaudited	100,00%	4.675	4.675
	3 PT Indra Karya	2006	Prognosa	100,00%	8.247	8.247
	4 PT Virama Karya	2006	Prognosa	100,00%	15.213	15.213
	5 PT Yodya Karya	2006	Unaudited	100,00%	8.643	8.643
	TOTAL				**41.407**	**41.407**
10	ANGKUTAN DARAT					
	1 Perum DAMRI	2006	Unaudited	100,00%	89.794	89.794
	2 PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta**	2006	Unaudited	100,00%	(93.953)	(93.953)
	3 PT Kereta Api Indonesia (KAI)	2006	Unaudited	100,00%	3.232.071	3.232.071
	TOTAL				**3.227.912**	**3.227.912**
11	JASA PENILAI					
	1 PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	2006	Audited	100,00%	50.749	50.749
	2 PT Sucofindo	2006	Unaudited	95,00%	366.316	348.001
	3 PT Surveyor Indonesia (SI)	2006	Unaudited	85,12%	238.938	203.384
	TOTAL				**656.003**	**602.133**
12	KEBANDARUDARAAN					
	1 PT Angkasa Pura I (AP I)	2006	Audited	100,00%	4.535.864	4.535.864
	2 PT Angkasa Pura II (AP II)	2006	Audited	100,00%	5.416.743	5.416.743
	TOTAL				**9.952.606**	**9.952.606**
13	PARIWISATA					
	1 PT Bali Tourism & Development Corporation	2006	Unaudited	100,00%	177.273	177.273
	2 PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	2006	Unaudited	100,00%	41.329	41.329
	3 PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	2006	Audited	100,00%	88.469	88.469
	TOTAL				**307.071**	**307.071**
14	PELABUHAN					
	1 PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	2006	Audited	100,00%	1.045.050	1.045.050
	2 PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	2006	Audited	100,00%	3.664.974	3.664.974
	3 PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	2006	Unaudited	100,00%	2.108.679	2.108.679
	4 PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	2006	Audited	100,00%	817.272	817.272
	TOTAL				**7.635.975**	**7.635.975**
15	PELAYARAN					
	1 PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2006	Prognosa	100,00%	867.222	867.222
	2 PT Djakarta Lloyd	2006	Prognosa	100,00%	540.186	540.186
	3 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	2006	Unaudited	100,00%	35.746	35.746
	4 PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	2006	Prognosa	100,00%	4.356.316	4.356.316
	TOTAL				**5.799.471**	**5.799.471**
16	PENGERUKAN					
	1 PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	2006	Unaudited	100,00%	164.837	164.837
	TOTAL				**164.837**	**164.837**
17	PENUNJANG KONSTRUKSI					
	1 PT Amarta Karya	2006	Unaudited	100,00%	8.519	8.519
	2 PT Jasa Marga	2006	Audited	100,00%	2.385.547	2.385.547
	TOTAL				**2.394.066**	**2.394.066**
18	PERDAGANGAN					
	1 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	2006	Unaudited	100,00%	(483.415)	(483.415)
	2 PT PP Berdikari	2006	Unaudited	100,00%	149.861	149.861
	3 PT Sarinah	2006	Unaudited	100,00%	83.096	83.096
	TOTAL				**(250.458)**	**(250.458)**
19	USAHA PENERBANGAN					
	1 PT Garuda Indonesia (GIA)	2006	Unaudited	100,00%	757.320	757.320
	PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	2006	Unaudited	93,20%	(1.427.071)	(1.330.030)

www.peraturan.go.id

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2006
(dalam jutaan rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN PELAPORAN	STATUS	% SAHAM NEGARA	TOTAL EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	TOTAL				**(669.751)**	**(572.710)**
20	JASA LAINNYA					
	1 Perum Jasa Tirta I	2006	Unaudited	100,00%	53.896	53.896
	2 Perum Jasa Tirta II	2006	Audited	100,00%	262.343	262.343
	3 PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	2006	Unaudited	100,00%	832.265	832.265
	TOTAL				**1.148.504**	**1.148.504**
21	KEHUTANAN					
	1 Perum Perhutani	2006	Unaudited	100,00%	1.208.096	1.208.096
	2 PT Inhutani I	2006	Prognosa	100,00%	320.782	320.782
	3 PT Inhutani II	2006	Prognosa	100,00%	183.331	183.331
	4 PT Inhutani III	2006	Prognosa	100,00%	340.718	340.718
	5 PT Inhutani IV	2006	Prognosa	100,00%	72.745	72.745
	6 PT Inhutani V	2006	Prognosa	100,00%	20.646	20.646
	TOTAL				**2.146.318**	**2.146.318**
22	KERTAS					
	1 PT Kertas Leces	2006	Unaudited	100,00%	(256.095)	(256.095)
	TOTAL				**(256.095)**	**(256.095)**
23	LOGISTIK					
	1 Perum Bulog	2006	Prognosa	100,00%	6.280.502	6.280.502
	2 PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	2006	Audited	100,00%	64.238	64.238
	3 PT Pos Indonesia (POSINDO)	2006	Audited	100,00%	598.152	598.152
	4 PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	2006	Unaudited	100,00%	(8.200)	(8.200)
	TOTAL				**6.934.692**	**6.934.692**
24	PERCETAKAN & PENERBITAN					
	1 Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	2006	Prognosa	100,00%	85.160	85.160
	2 Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	2006	Unaudited	100,00%	595.126	595.126
	3 PT Balai Pustaka (BP)	2006	Unaudited	100,00%	(32.816)	(32.816)
	4 PT Pradnya Paramita	2006	Unaudited	100,00%	4.591	4.591
	TOTAL				**652.061**	**652.061**
25	PERIKANAN					
	1 Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	2006	Unaudited	100,00%	82.218	82.218
	2 PT Perikanan Nusantara	2006	Prognosa	100,00%	(6.201)	(6.201)
	TOTAL				**76.017**	**76.017**
26	PERKEBUNAN					
	1 PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	2006	Unaudited	100,00%	9.433	9.433
	2 PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	2006	Audited	100,00%	59.766	59.766
	3 PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	2006	Audited	100,00%	1.291.841	1.291.841
	4 PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	2006	Audited	100,00%	1.361.715	1.361.715
	5 PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	2006	Audited	100,00%	190.565	190.565
	6 PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	2006	Audited	100,00%	703.105	703.105
	7 PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	2006	Unaudited	100,00%	319.340	319.340
	8 PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	2006	Audited	100,00%	789.126	789.126
	9 PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	2006	Audited	100,00%	624.690	624.690
	10 PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	2006	Unaudited	100,00%	762.147	762.147
	11 PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	2006	Unaudited	100,00%	382.922	382.922
	12 PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	2006	Unaudited	100,00%	396.861	396.861
	13 PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	2006	Audited	100,00%	650.336	650.336
	14 PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	2006	Prognosa	100,00%	(18.419)	(18.419)
	15 PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	2006	Unaudited	100,00%	582.379	582.379
	TOTAL				**8.105.807**	**8.105.807**
27	PERTANIAN					
	1 PT Pertani	2006	Unaudited	100,00%	48.149	48.149
	2 PT Sang Hyang Seri (SHS)	2006	Unaudited	100,00%	149.781	149.781
	TOTAL				**197.929**	**197.929**
28	PUPUK					
	1 PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	2006	Audited	100,00%	8.581.693	8.581.693

www.peraturan.go.id

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2006
(dalam jutaan rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN PELAPORAN	STATUS	% SAHAM NEGARA	TOTAL EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
	TOTAL				**8.581.693**	**8.581.693**
29	BAJA & KONSTRUKSI BAJA					
	1 PT Barata Indonesia	2006	Audited	100,00%	86.478	86.478
	2 PT Boma Bisma Indra (BBI)	2006	Lap. Semeste	100,00%	(83.618)	(83.618)
	3 PT Krakatau Steel (KS)	2006	Unaudited	100,00%	5.009.318	5.009.318
	TOTAL				**5.012.178**	**5.012.178**
30	DOK DAN PERKAPALAN					
	1 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	2006	Unaudited	99,40%	(1.967.579)	(1.955.774)
	2 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	2006	Unaudited	100,00%	54.115	54.115
	3 PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	2006	Prognosa	100,00%	4.625	4.625
	4 PT PAL Indonesia	2006	Unaudited	100,00%	1.311.418	1.311.418
	TOTAL				**(597.420)**	**(585.615)**
31	ENERGI					
	1 PT Konversi Energi Abadi (KONEBA)	2006	Audited	100,00%	14.967	14.967
	2 PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	2006	Audited	55,26%	5.576.033	3.081.093
	3 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	2006	Unaudited	100,00%	140.228.798	140.228.798
	4 PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	2006	Audited	65,02%	2.295.460	1.492.448
	TOTAL				**148.115.258**	**144.817.306**
32	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
	1 PT Batan Teknologi	2006	Audited	100,00%	31.663	31.663
	2 PT Industri Kereta Api (INKA)	2006	Audited	100,00%	50.587	50.587
	3 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	2006	Audited	100,00%	488.908	488.908
	4 PT LEN Industri	2006	Audited	100,00%	66.184	66.184
	5 PT Dirgantara Indonesia*	2006	Unaudited	92,90%	(105.820)	(98.307)
	TOTAL				**531.521**	**539.034**
33	INDUSTRI PERTAHANAN					
	1 PT Dahana	2006	Unaudited	100,00%	122.854	122.854
	2 PT PINDAD		Audited	100,00%	167.317	167.317
	TOTAL				**290.171**	**290.171**
34	PERTAMBANGAN					
	1 PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	2006	Audited	65,00%	4.281.602	2.783.042
	2 PT Pertamina	2006	Prognosa	100,00%	136.227.441	136.227.441
	3 PT Sarana Karya	2006	Unaudited	100,00%	(1.701)	(1.701)
	4 PT Timah, Tbk	2006	Audited	65,00%	1.676.629	1.089.809
	TOTAL				**142.183.971**	**140.098.590**
35	SEMEN					
	1 PT Semen Baturaja	2006	Audited	100,00%	142.590	142.590
	2 PT Semen Gresik, Tbk	2006	Audited	51,01%	5.499.614	2.805.353
	TOTAL				**5.642.204**	**2.947.943**
36	TELEKOMUNIKASI					
	1 Perum Produksi Film Negara (PFN)	2006	Prognosa	100,00%	28.292	28.292
	2 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	2006	Lap. Triwulan	51,19%	27.509.046	14.081.881
	TOTAL				**27.537.338**	**14.110.172**
	GRAND TOTAL				**465.198.244**	**427.734.043**

www.peraturan.go.id

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	STATUS	% SAHAM KEPEMILIKAN RI	NILAI EKUITAS	KEPEMILIKAN PEMERINTAH
1	PT Atmindo	2006	Audited	36,60%	16.321	5.973
2	PT Semen Kupang	2005	Audited	38,50%	58.064	22.355
3	PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)	2006	Lap. Triwulan	41,12%	3.285.002	1.350.793
4	PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)	2006	Audited	45,00%	852.016	383.407
5	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2006	Unaudited	50,00%	126.417	63.209
6	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	2006	Audited	50,00%	112.587	56.293
7	PT Kertas Padalarang	2006	Audited	40,77%	17.838	7.273
	J U M L A H I					***1.889.303***

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	STATUS		% SAHAM KEPEMILIKAN RI	JUMLAH SAHAM	KEPEMILIKAN PEMERINTAH
1	PT Bank Bukopin	2006	Unaudited	A	0,09%	4.736.255	47.363
				B	18,38%	1.034.232.376	103.423
2	PT Rekayasa Industri (REKIND)	2006	Audited		4,97%	2.500	2.500
3	PT Freeport Indonesia	2006	Audited	Biasa	9,36%	21.300	19.213
4	PT Bahana PUI (BPUI)	2006	Audited	Prioritas	7,11%	1.600	1.600
		2006	Audited	Biasa	10,67%	2.400	2.400
5	PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *)	-	-	-	-	-	-

www.peraturan.go.id

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

6	PT Indosat, Tbk	2005	Audited	Seri B	14,50%	776.624.999	776.625
7	PT Kertas Basuki Rahmat	2006	Audited		10,00%	25.000	25.000
8	PT Kertas Blabak	2006	Audited		0,84%	531	531
9	PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)	-	-	-	-	-	-
10	PT Asean Copper Product	-	-	-	-	-	-
11	PT JIHD Tbk.	2006	Audited		1,33%	12.834.760.680	12.835
12	PT Intirub	2005	Audited		9,90%	4.129	4.129
13	PT Socfindo	2006	Audited		10,00%	42.250	4.225
14	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)	2005	Audited		5,00%	49.578	2.479
	J U M L A H I I						***1.002.322***
J U M L A H I + II							**2.891.625**

Keterangan :

*). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2006 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN.

www.peraturan.go.id

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2006

NO	LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL	TOTAL PENYERTAAN		TELAH DIBAYAR	
		USD	IDR	USD	IDR*)
1.	ADB	2.863.000.000	25.824.260.000.000	209.000.000	1.885.180.000.000
2.	IMF	3.128.000.000	28.214.560.000.000	3.128.000.000	28.214.560.000.000
	World Bank :				
3.	IBRD	1.870.000.000	16.867.400.000.000	180.000.000	1.623.600.000.000
4.	IDA	15.000.000	135.300.000.000	-	24.570.195.827
5.	IFC	29.000.000	261.580.000.000	29.000.000	261.580.000.000
6.	MIGA	20.000.000	180.400.000.000	4.000.000	36.080.000.000
7.	IDB	265.000.000	2.390.300.000.000	116.000.000	1.046.320.000.000
	IDB Group :				
8.	Export Financing Scheme	2.000.000	18.040.000.000	1.000.000	9.020.000.000
9.	Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit	400.000	3.608.000.000	200.000	1.804.000.000
10.	Bank for International Settlements	60.000.000	541.200.000.000	60.000.000	541.200.000.000
11.	IFAD			41.959.000	378.470.180.000
12.	Common Fund for Commodities			1.292.506	11.658.404.120
	TOTAL	8.252.400.000	74.436.648.000.000	3.770.451.506	34.034.042.779.947

Keterangan:

*) : Konversi ke dalam iDR menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2006
USD 1= Rp 9.020

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	855.562.990	855.562.990
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	65.274.646.000	64.697.982.000
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	146.110.411.622	49.920.109.970
4	05	MAHKAMAH AGUNG	59.206.649.510	76.235.612.214
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	127.607.217.392	120.258.513.892
6	07	KEPRESIDENAN	226.159.135.460	226.287.908.210
7	08	WAKIL PRESIDEN	27.300.216.000	27.300.216.000
8	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	65.313.937.117	56.454.437.117
9	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	44.884.756.000	44.884.756.000
10	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	28.937.235.521.024	30.299.578.235.287
11	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	118.795.748.723	157.279.771.000
12	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.192.038.786.976	1.033.251.195.446
13	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	927.482.602.939	664.868.559.497
14	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	80.741.024.866	72.014.578.266
15	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	229.362.662.271	267.554.571.503
16	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	718.286.414.172	1.791.532.986.075
17	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	5.398.070.887.690	4.116.017.737.595
18	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	1.205.198.675.165	187.562.069.000
19	25	DEPARTEMEN AGAMA	1.012.402.069.213	567.313.776.741
20	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	96.389.983.023	64.213.941.205
21	27	DEPARTEMEN SOSIAL	65.250.944.238	61.211.980.311
22	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	70.417.607.455	54.883.040.000
23	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	186.024.510.769	363.343.986.646
24	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	5.912.945.327.055	3.624.048.254.519
25	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	499.335.699.689	205.714.030.000
26	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	10.613.601.978	91.559.827.302
27	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	12.202.150.000	12.829.925.000
28	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	27.185.789.853	27.185.789.853
29	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	120.600.000	120.600.000
30	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	0	77.657.776.216
31	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.348.759.075	3.368.329.000
32	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	26.613.296.671	11.803.883.451
33	54	BADAN PUSAT STATISTIK	24.381.734.000	19.554.651.750
34	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	15.072.368.243	15.000.401.500
35	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	147.452.635.000	144.462.635.000
36	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	27.814.000.000	27.814.000.000
37	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	449.048.602.940	36.497.228.470
38	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	32.195.885.830.499	33.526.731.299.551
39	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.187.691.016	2.983.215.000
40	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	5.196.725.979	5.196.725.979
41	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	19.550.918.916	18.161.067.850
42	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	21.408.583.595	9.922.844.320
43	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8.731.800.000	8.731.800.000
44	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	49.497.690.816	49.497.690.816
45	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	32.040.456.851	0
46	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	13.396.875.232	0
47	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	11.014.434.840	0
48	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	25.203.714.090	0
49	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	14.238.000	0
50	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19.316.681.000	0
51	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	236.082.133.445	0
52	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.009.013.000	0
53	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	79.048.944.152	0
54	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	84.678.922.865	0

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
55	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	251.543.575.590	0
56	91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT		227.082.087.500
57	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.275.825.101	541.781
58	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	163.574.708.198	4.779.025.000
59	-	LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA	21.464.384.000	0
60	-	LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	21.871.918.029	0
61	-	BPKS SABANG	8.733.404.550	0
JUMLAH			**81.443.273.004.883**	**78.518.225.156.823**

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	84.683.825.681	76.987.287.781
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	244.657.533.165	202.915.396.000
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	183.159.486.978	122.452.541.119
4	05	MAHKAMAH AGUNG	238.498.256.933	116.886.048.881
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	423.846.503.298	349.602.015.561
6	07	KEPRESIDENAN	763.732.302.082	785.195.437.599
7	08	WAKIL PRESIDEN	57.930.937.302	38.418.718.695
8	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	334.429.178.258	249.017.200.193
9	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	739.188.582.946	597.725.347.547
10	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	32.352.987.337.462	89.911.441.781.540
11	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.232.166.301.488	564.587.096.759
12	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	3.595.602.871.078	2.920.012.982.032
13	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	2.147.977.890.239	2.253.710.463.516
14	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	917.201.828.739	513.932.694.460
15	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.533.419.533.801	2.319.463.474.891
16	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	4.531.253.507.764	4.274.165.991.954
17	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	6.099.332.125.289	4.351.569.558.994
18	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	2.707.000.793.990	1.834.773.586.347
19	25	DEPARTEMEN AGAMA	915.062.881.825	536.965.048.906
20	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	580.664.722.171	377.406.787.985
21	27	DEPARTEMEN SOSIAL	289.528.871.244	188.973.955.901
22	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.634.022.994.600	819.814.811.275
23	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.023.539.368.289	733.408.738.666
24	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	2.604.676.343.013	2.769.652.625.668
25	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	27.444.367.993	18.899.979.130
26	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	21.584.224.939	18.016.938.948
27	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.235.417.472	12.026.483.300
28	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	96.108.122.000	78.199.099.000
29	41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	36.992.516.905	29.655.861.384
30	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	277.043.978.559	1.924.190.847.290
31	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	122.140.277.805	105.533.345.000
32	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	113.048.050.303	74.697.629.474
33	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	20.202.541.250	13.612.277.578
34	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	29.636.752.428	385.943.754.802
35	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	798.753.654.071	580.659.615.710
36	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.412.208.853.795	800.692.666.050
37	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12.995.642.280	4.857.459.750
38	54	BADAN PUSAT STATISTIK	281.786.436.000	245.925.301.363
39	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	63.183.563.598	49.882.028.386
40	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	467.320.941.600	411.344.370.183
41	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	56.457.296.362	38.654.452.000
42	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	699.836.227.195	278.983.890.380
43	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	34.202.445.070.994	12.954.619.462.493
44	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	226.700.303.400	113.614.261.300
45	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	53.068.796.048	23.756.641.125
46	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	70.741.306.239	61.013.823.098
47	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	246.427.076.388	187.666.627.341
48	67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	25.000.665.560	21.319.060.185
49	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	144.174.197.948	121.868.706.017
50	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	4.947.432.648	2.837.916.464
51	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	394.669.496.302	273.723.977.505
52	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	105.290.991.416	105.604.058.416
53	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	25.023.573.262	18.166.004.000

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
54	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	5.784.612.757	0
55	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	589.870.350.083	0
56	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	257.679.764.629	0
57	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	712.699.646.001	0
58	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	158.961.437.943	0
59	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	293.184.976.538	0
60	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	10.802.928.713	0
61	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	34.034.421.725	0
62	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	65.034.069.409	0
63	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	89.850.939.041	0
64	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	152.356.027.801	0
65	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	184.810.017.414	0
66	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	420.496.065.152	192.553.031.155
67	91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	17.666.373.840	13.238.843.000
68	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	35.049.534.188	24.269.680.414
69	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	55.639.303.174	21.129.424.887
70	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	733.888.261.632	25.059.319.970
71	95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	5.884.729.500	0
72	100	KOMISI YUDISIAL RI	7.910.376.400	0
73	-	LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.408.058.122.000	0
74	-	LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.419.864.760.188	0
75	-	BPKS SABANG	922.575.800	0
		JUMLAH	**111.945.481.046.323**	**136.141.296.429.368**

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	Tahun 2006	Tahun 2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	231.789.534.471	153.578.102.971
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	485.904.519.212	454.697.051.000
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	196.848.771.793	151.449.559.802
4	05	MAHKAMAH AGUNG	118.344.705.023	142.188.268.987
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	273.142.928.423	224.647.243.075
6	07	KEPRESIDENAN	750.603.922.695	673.438.533.380
7	08	WAKIL PRESIDEN	27.499.752.105	22.099.041.866
8	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	358.434.514.189	240.620.313.379
9	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	261.489.391.188	231.732.044.000
10	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	6.366.133.185.897	6.265.153.966.496
11	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	763.043.480.537	707.351.382.455
12	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	2.215.579.784.049	1.669.646.772.446
13	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	781.800.234.548	532.385.560.266
14	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	308.298.307.729	175.483.132.175
15	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	307.396.155.315	367.359.542.932
16	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	3.650.189.154.965	1.976.481.934.629
17	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	9.754.071.759.852	3.842.090.281.082
18	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	970.602.710.600	663.733.487.711
19	25	DEPARTEMEN AGAMA	3.178.811.393.772	2.187.286.832.806
20	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	875.703.294.808	542.990.846.981
21	27	DEPARTEMEN SOSIAL	242.098.151.246	205.570.584.939
22	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	270.990.661.471	248.395.451.041
23	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	627.649.122.742	287.325.795.028
24	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	596.653.582.656	761.025.920.919
25	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	518.268.400	0
26	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	193.920.196.898	168.544.595.700
27	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	118.528.751.715	808.867.691.237
28	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	18.037.030.039	13.414.775.000
29	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	348.054.734.905	76.846.771.326
30	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	90.900.000	90.900.000
31	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	10.143.448.000	339.454.316.998
32	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	180.648.174.094	128.322.559.893
33	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	65.193.977.136	58.840.040.450
34	54	BADAN PUSAT STATISTIK	74.999.807.000	85.603.312.006
35	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	25.683.022.400	25.823.757.498
36	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	86.461.475.600	78.104.329.000
37	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93.067.315.610	77.127.796.870
38	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	237.648.889.492	151.845.169.981
39	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	14.733.031.755.211	14.125.279.879.457
40	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	57.533.502.573	29.438.550.121
41	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11.771.283.303	1.852.922.943
42	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	94.628.272.885	94.628.272.885
43	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	141.734.882.837	40.056.893.890
44	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	76.937.292.408	15.491.453.126
45	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	6.470.495.720	6.731.745.720
46	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	105.976.858.108	48.919.315.931

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	Tahun 2006	Tahun 2005
1	2	3	4	5
47	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	59.811.711.343	52.590.884.043
48	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	193.677.309.862	0
49	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	301.408.514.758	0
50	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	120.224.716.344	0
51	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	48.999.680.390	0
52	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	22.511.510.710	0
53	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	24.625.770.000	0
54	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	123.923.502.399	0
55	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	79.391.336.675	0
56	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	136.165.871.315	0
57	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	281.321.162.233	0
58	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	189.232.665.191	114.941.706.357
59	91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	141.395.131.750	1.976.300.000
60	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	14.308.676.258	1.908.067.168
61	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	416.397.950.498	1.406.587.450
62	-	LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA	581.617.932.000	0
63	-	LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	157.251.595.082	0
64	-	BPKS SABANG	39.443.352.465	0
JUMLAH			**53.225.867.742.893**	**39.274.840.245.416**

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	9.790.961.500	9.002.238.000
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	16.959.448.900	12.027.154.000
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.540.616.568	712.650.568
4	05	MAHKAMAH AGUNG	12.102.718.172	15.855.778.644
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	2.052.348.494	1.891.622.494
6	07	KEPRESIDENAN	20.225.452.018	10.610.257.326
7	08	WAKIL PRESIDEN	88.417.355	0
8	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	30.205.119.412	51.581.991.162
9	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.886.116.000	1.836.336.000
10	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	71.325.330.483	66.834.234.118
11	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	80.587.850.133	182.741.907.375
12	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	5.506.605.625	4.643.635.717
13	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	18.582.483.673.492	2.741.097.596.788
14	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	7.994.036.610.589	3.139.450.813.004
15	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	178.061.368.175	76.994.658.523
16	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	206.240.238.924	50.163.132.000
17	25	DEPARTEMEN AGAMA	37.170.683.556	34.368.691.156
18	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	199.085.364.949	45.801.780.438
19	27	DEPARTEMEN SOSIAL	71.633.459.701	66.877.427.501
20	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	32.803.596.000	27.211.301.000
21	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	491.082.591.947	316.698.161.883
22	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	52.793.701.705.988	43.143.690.740.448
23	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	11.316.000	0
24	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.182.715.000	854.717.000
25	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	14.562.240.186	78.691.104.428
26	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	1.089.445.000	360.475.000
27	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	6.121.014.000	5.987.914.000
28	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	119.465.000	99.465.000
29	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.283.366.550	18.451.123.569
30	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	44.562.577.468	39.059.882.168
31	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	24.552.789.144	580.017.000
32	54	BADAN PUSAT STATISTIK	50.000.000	19.370.000
33	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	179.114.000	179.114.000
34	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.007.613.000	617.600.000
35	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0	0
36	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.399.173.042	6.755.547.142
37	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	147.752.458.418	364.439.530.740
38	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	918.039.463	438.972.000
39	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.118.864.580	1.118.864.580
40	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.257.031.557	4.177.062.267
41	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	377.408.309	0
42	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	423.400.690	54.987.890
43	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	123.929.670.987	7.431.174.539
44	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	158.674.478.945	0
45	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	32.401.892.612	0
46	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	30.408.837.811	0
47	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	8.728.140.436	0
48	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	2.799.665.000	0
49	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	66.319.200	0
50	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4.978.895.674	0
51	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.841.792.840	0
52	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.849.346.805	0
53	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	8.415.812.310	0
54	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	834.338.000	24.000.000

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
55	91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	16.820.535.944	2.052.633.480
56	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.952.362.836	64.637.000
57	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	849.524.500	849.524.500
58	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	491.645.399.585	0
59	-	LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA	135.532.940.000	0
60	-	BPKS SABANG	35.392.777.450	0
		JUMLAH	**82.173.661.040.323**	**50.532.399.824.448**

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	840.807.320	765.983.620
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.632.373.300	1.873.073.000
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	13.772.957.435	1.247.379.795
4	05	MAHKAMAH AGUNG	9.259.536.405	2.639.825.588
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	9.448.360.565	8.920.655.390
6	07	KEPRESIDENAN	2.935.805.184	2.537.807.810
7	08	WAKIL PRESIDEN	763.567.080	40.740.000
8	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	2.292.488.385	1.849.083.821
9	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	23.677.769.722	22.101.474.429
10	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	32.196.594.025	31.984.538.525
11	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	12.501.419.134	4.024.719.000
12	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	388.017.557.872	124.028.153.940
13	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	196.597.961.987	91.321.999.583
14	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	13.371.657.105	5.300.073.772
15	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	221.546.018.033	189.620.547.111
16	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	66.218.134.903	86.326.991.005
17	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	1.807.892.314.964	195.775.606.970
18	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	51.218.635.271	10.957.634.625
19	25	DEPARTEMEN AGAMA	64.002.010.878	16.632.895.081
20	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	25.511.782.722	21.269.270.500
21	27	DEPARTEMEN SOSIAL	4.451.660.645	2.687.131.332
22	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	4.570.902.280	3.702.469.280
23	32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.734.036.808	6.411.823.788
24	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	845.450.540.864	665.845.829.315
25	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	736.280.000	13.846.000
26	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.455.000	4.455.000
27	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.153.946.150	675.000
28	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6.249.383.000	5.186.042.000
29	41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	894.212.231	583.571.901
30	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	1.452.397.290	52.051.184.123
31	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	5.217.472.000	8.543.063.000
32	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	90.643.934	87.218.934
33	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	112.310.000	69.960.000
34	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	3.350.000	1.936.597.008
35	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	423.696.964	423.696.964
36	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.329.253.350	941.108.350
37	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1.376.988.904	133.164.000
38	54	BADAN PUSAT STATISTIK	88.273.000	860.454.923
39	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	908.449.685	4.167.000
40	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	24.679.108.700	23.705.717.000
41	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	47.146.090.214	33.815.899.000
42	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.774.868.644	2.822.079.697
43	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	13.390.538.000	11.960.494.000
44	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.542.315.536	657.930.250
45	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	170.605.158	68.750.110
46	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	188.669.970	188.669.970
47	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	6.619.868.560	3.217.901.500
48	67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	3.795.065.000	1.194.250.000

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
49	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.996.113.808	8.155.302.383
50	70	DANA PERIMBANGAN	44.237.199.966	0
51	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.588.415.225	61.946.325
52	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	8.243.772.964	10.600.040.378
53	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.257.172.375	0
54	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.282.801.200	988.681.000
55	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	595.729.360	0
56	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	32.104.355.407	0
57	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.454.718.463	0
58	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	29.169.597.718	0
59	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	3.730.031.858	0
60	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	569.574.000	0
61	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	650.377.992	0
62	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.077.924.190	0
63	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.514.286.786	0
64	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	61.134.000	0
65	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	245.014.153	0
66	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	882.149.821	0
67	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	3.593.889.510	1.279.000.519
68	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.530.928.995	1.502.843.495
69	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	153.956.459	38.159.650
70	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	15.976.301.914	0
71	100	KOMISI YUDISIAL RI	109.527.400	0
72	-	LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA	9.595.404.000	0
JUMLAH			**4.101.873.511.741**	**1.668.962.576.760**

www.peraturan.go.id

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT		40.633.482.905
2	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.112.012.000	0
3	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	14.986.136.765	28.034.902.622
4	05	MAHKAMAH AGUNG	0	0
5	06	KEJAKSAAN AGUNG	234.400.032.733	123.530.206.773
6	07	KEPRESIDENAN	2.090.500.000	0
7	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	106.846.963.282	7.374.025.350
8	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN		140.870.164.000
9	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	5.184.588.880	101.198.276.648
10	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	848.522.774.583	380.620.754.915
11	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	7.669.200.900	0
12	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	7.406.456.360	0
13	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.767.654.465.894	5.739.799.765.571
14	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	2.863.649.090.202	56.317.890.250
15	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	0	30.970.405.706
16	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	21.601.370.016	4.900.219.000
17	25	DEPARTEMEN AGAMA	41.651.297.868	3.181.556.450
18	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		93.808.172
19	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.092.939.159.593	36.253.950.712
20	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	492.017.130	0
21	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	0	8.948.425.100
22	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	27.964.105.400	217.143.585.204
23	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	2.349.363.000	212.208.264.940
24	50	BADAN INTELIJEN NEGARA		22.868.941.100
25	54	BADAN PUSAT STATISTIK	908.933.340	0
26	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	24.135.340.000	24.135.340.000
27	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	142.083.790.000	685.642.123.991
28	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0	8.153.456.960
29	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	8.741.939.000	0
30	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL		14.131.513.900
31	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	202.917.003.795	53.889.750.418
32	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	14.971.291.384	0
33	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	135.908.000	0
34	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	17.223.453.000	0
35	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.407.453.970	0
36	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.458.027.155	0
37	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	191.489.658.619	3.298.258.400
38	91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	30.829.321.305	28.898.785.240
39	92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.186.827.000	17.694.640.470
40	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	66.991.239.693	0
41	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	2.269.797.749.321	40.850.418.866
JUMLAH			**11.034.797.470.188**	**8.031.642.913.663**

www.peraturan.go.id

ASET LAINNYA - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		8140000
2	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.834.887.921	1.992.598.642
3	06	KEJAKSAAN AGUNG	130.138.627	130.680.000
4	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	27.441.077.789	19753340170
5	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	4.220.050.740	4.518.267.308
6	13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	213.092.747	373.956.697
7	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	5.444.402.659	5.707.538.387
8	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	410.285.935	-
9	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	29.779.821	37.579.821
10	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.440.000	-
11	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	160.787.416	10.581.015
12	23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	217.057.320	-
13	24	DEPARTEMEN KESEHATAN	931.162.681	-
14	25	DEPARTEMEN AGAMA		150.000
15	27	DEPARTEMEN SOSIAL	88.238.012	47.000.000
16	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	987.102.217	1028254849
17	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	33.547.200	-
18	40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	175.793.055	175793055
19	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI		8.552.590.582
20	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	13.550.000	14.050.000
21	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA		21.944.406.872
22	50	BADAN INTELIJEN NEGARA		17.724.053
23	54	BADAN PUSAT STATISTIK	50.893.825	46.689.125
24	55	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	340.000	1.540.000
25	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	384.765.026	2.717.076.749
26	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.103.623	39.103.632
27	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	12.870.645	222.796.283
28	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	8.088.914.827	0
29	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	58.500.000	0
30	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	60.370.000	0
31	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	18.770.000	0
JUMLAH			**51.048.922.086**	**67.339.857.240**

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
79	601	185411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Region Roads Proj Loan 4307-IND IBRD	296.817.712,40
80	601	193411	Reksus Depkeu u/ Proyek Cap'ty B'ding for F'cial G'ment Loan 1620-INO ADB	4.356.750,20
81	601	199411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Junior Secondary Educ 1573-INO ADB	159.654,00
82	601	200411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 1583-INO ADB	9.193.184,00
83	601	201411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 458-ID IFAD	8.214.514,00
84	601	203411	Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Building for Establishment of a Competitive Elect Market 1674-INO ADB	451.631,40
85	601	204411	Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Profincial Healt Project Ina Loan IDA 3381 IND	19.611.225.099,00
86	601	205411	Reksus Depkeu u/ pembiayaan Second Water and Sanitation for Low Income communitiesw Project IDA-3382-IND	14.724.632.612,00
87	601	206411	Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project ADB 1765-INO (SF)	3.427,60
88	601	207411	Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project No.1766 INO ADB	7.602,80
89	601	208411	Reksus Depkeu Participatory Intregrated Dev. In Ranfed Areas Proj PIDRA 539-ID IFAD	7.486,60
90	601	209411	Reksus Depkeu u/ Proyek Decentralized Health Services 1810-IND ADB	9.471,00
91	601	213411	Reksus Depkeu U/P : Technological and Professional Skills Dev.Sector Proj. 1792-INO ADB	7.872.746,20
92	601	214411	Reksus ADB No.1770-INO dalam USD (Marine & Coastal Resources Managmnt Proj)	2.157.674,20
93	601	215411	Reksus ADB No.1798-INO Road Rehab. Sector Project dlm Valas USD	0,00
94	601	216411	Reksus Depkeu U/State Owned Enterprise Gov. Privattn. Prog. Loan ADB No.1866-INO dlm USD	0,00
95	601	217411	Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project Loan IBRD 4612-IND/Credit 3519-IND dalam Valuta USD	102.503.181,06
96	601	219411	Reksus Depkeu Second Kecamatan Dev. Proj. Loan IBRD No.4627-IND/IDA No.3535-IND/GRANT TF-051369	1.280.354.453,00
97	601	221411	Reksus ADB No.1863-INO (SF) Decentralizes Basic Education Proj	22.343.341.517,20
98	601	222411	Reksus Depkeu Provincial Health Proj II Loan IDA Credit No.3537-IND & IBRD Loan No.4629-IND dlm Valas USD	158.783.522.825,00
99	601	223411	Reksus ADB No.1965-INO Financial Governance & Social Security Reform (FGSSR) dalam Valuta USD	0,00
100	601	224411	Reksus Depkeu u/ Second Urban Poverty Proj Loan IBRD No.4664-IND/Credit IDA 3658-IND dalam Valas USD	19.480.082.327,20
101	601	226411	Reksus Depkeu Gas Transmission & Distribution Phase 2 Project (EIB Loan No.F1 20.630 Indon) dalam Valas USD	1.737.733.487,60
102	601	227411	Reksus Depkeu Global Dev. Network Proj (Loan IBRD 4669-IND) dalam Valas USD	6.105.513.795,00
103	601	228411	Reksus Depkeu u/ pembiayaan Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Project Loan IBRD 4696-IND	27.055.073.096,00
104	601	229411	Reksus Depkeu o/ Poor Farmer Income Improvement Through Innvt Proj (PF13P) Loan ADB 1909-IND dalam Valas USD	20.633.701,00

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
105	601	230411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehab & Management Proj Phase II (COREMAP II) - ADB No.1962-INO (SF) dlm USD	751.997,40
106	601	232411	Reksus Depkeu Government Finance Management Revenue Adm. Project Loan No.4762 IND/IDA Credit 4026	27.014.584.300,00
107	601	233411	Reksus Depkeu Health Workforce & Service Project Loan IBRD 4702-IND/IDA Credit 3784-IND dlm valuta USD	29.831.933.494,00
108	601	234411	Reksus ADB No.601-ID East Kalimantan Local Communities Empowerment Programme (EKLCEP)	0,00
109	601	235411	Reksus Advance for Preparation of Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Letter Agreement No.P4080	76.349.519,40
110	601	236411	Reksus Depkeu Land Management & Policy Dev. Project Loan/Credit No.4731/3884-IND dalam valas USD	32.141.026.343,80
111	601	238411	Reksus Depkeu Second Eastern Indonesia Transport Project (EIRTP-2) LA No.4744-IND	76.566.921.514,60
112	601	239411	Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2126-IND dalam Valas USD	0,00
113	601	240411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project-Loan IBRD No.4710-INO/IDA Credit 3806-IND dalam Valas USD	1.093.239.334,00
114	601	241411	Reksus Depkeu U/ The Improvement O/ Land & Irrigation System at Farm Level Project IDB No.IND-0080	0,00
115	601	242411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehab & Management Proj Phase II (Coremep II) IBRD No.4740-IND/IDA No.3910-IND dlm USD	5.505.013.152,00
116	601	243411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2074-INO dalam Valas USD	21.828,40
117	601	244411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2075-INO dalam Valas USD	2.886,40
118	601	245411	Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2127-IND dalam Valas USD	15.830.581.668,00
119	601	246411	Reksus Depkeu u/ Support for Poor & Disadvantaged Area Project Loan IBRD No.4788-IND/IDA No.4076-IND dalam USD	3.450.406.979,00
120	601	247411	Reksus Depkeu u/ Indonesia Managing High Educ f/ Relevance & Efficiency Proj IBRD No.4789-IND/IDA No.4077-IND	10.713.414,00
121	601	248411	Reksus Depkeu u/ Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) Loan ADB 2072-INO	2.313.269,20
122	601	251411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project Phase II Loan IBRD No.4771-IND/IDA CR No.4045-IND	5.616.663,80
123	601	252411	Reksus Depkeu u/ Third Urban Poverty Project Loan IBRD No.4779-IND/IDA CR 4063-IND	44.303.597.500,80
124	601	253411	Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2192-INO	0,00
125	601	254411	Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2193-INO	0,00
126	601	255411	Reksus Depkeu u/ Initatives for Local Governance Reform Project (ILGRP) Loan IBRD No.4790-IND/IDA CR no.4078-IND	19.370.742.248,00
127	601	256411	Reksus Depkeu u/ Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt PRJ-WISMP Loan IBRD No.4711-IND/IDA GR No.3807-IND	16.912.825.622,00
128	601	257411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2163-IND	9.820.211.645,20
129	601	258411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2164-IND (SF)	10.735.391.669,20

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
130	601	259411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Loan IBRD 4786-IND	0,00
131	601	260411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2064 (SF)-INO	0,00
132	601	261411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2065 (SF)-INO	992,20
133	601	262411	Reksus Depkeu u/ Rural Infrastructur Support Proj (RISP) Loan ADB No.2221-INO (SF)	233.257,20
134	601	263411	Reksus Depkeu u/Decentr Basic Educ Proj DBEP-Grant Co-Fin fr the Gov Netherlands Loan No.1863-INO ADB	0,00
135	601	264411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Educ & Dev Proj (ECED), Loan IDA Credit No.4205-IND	0,00
136	601	265411	Reksus Depkeu u/ Proyek Infrastruktur Reform Sector Development Program (IRSDP) 2263-INO ADB	0,00
137	601	266411	Reksus Depkeu u/ Second Development Policy Support Program (DPSP 2), Loan ADB 2305-INO ADB	0,00
138	601	002991	Reksus Depkeu karena Penerimaan Pinjaman dari Belanda dlm EUR	117.809.653,02
139	601	003991	Reksus Depkeu u/ Proyek Integrated Infrastructur Dev. 1990.01Dutch dlm Valuta EUR	4.376.131,68
140	601	004991	Reksus Depkeu u/Trade Support Program (TSP) No.70539501 dalam valuta EUR	5.162.361.172,47
141	602	075111	Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta JPY	0,00
142	602	001311	Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-G001	0,00
143	602	001411	Reksus Depkeu Jap.Soc.F/Grant for the Sec.Supp.for FEM Head House in Conf A/PRJT/F Agree No. TF-054209 D/Val.USD	0,00
144	602	002411	Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev F/Grant for the Improve. O.T. Qual of Educ. Serv. T.E. Part Central Java & Yogyakarta Grant TF-053814	318.950.447,20
145	602	003411	Reksus Depkeu u/ Proyek Kerinci Seblat Integrated Conser & Dev TF-28312 GEF Grant	2.435.400,00
146	602	012411	Reksus Depkeu u/ Proyek Strenghthening Management of External Dev. Financing for Public Inv TF-27184 IBRD	1.353.000.000,00
147	602	018411	Reksus Depkeu u/ Pemb. Australian Gov.Grant for Second Water & Sanitation for Low Income Comm Proj (GRANT TF-023692)	2.490.114.418,00
148	602	028411	Reksus Depkeu u/ Proyek Grant for the Water Resources & Irrigation Reform Implementation Prog (TF-027755 Grant)	4.584.685,60
149	602	030411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Develop Fund Grant for the Widows & Poverty Project, Grant No.TF-026564 Valuta USD	67.559,80
150	602	033411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Dev. Grant for Squatter Sett. Pillots Assistant Proj.Grant No.TF-026563 dalam valuta USD	0,00
151	602	034411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japanese Grant for Prep of the Land Mgt & Policy Dev.Prog (Grant No.TF-026379) dalam valuta USD	0,00
152	602	036411	Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project (Grant No.TF-029805) dalam valuta USD	11.439,54
153	602	041411	Reksus Depkeu Grant for Increasing Accs to Statit Data for Lcl.Pol Dec.Making (TF-050609) dalam valuta USD	3.928.119,80
154	602	048411	Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev Fund Grant for Educ & Employ Opport for undereducated youth Grant TF-051701-IND	200.875,40

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
155	602	050411	Reksus Depkeu u/ Grant for Prog. Enhancing Grant TF.051941	0,00
156	602	053411	Reksus Depkeu DFID Grant for Initiatives for Local Governance Reform Project (Grant No.TF-052572) dalam USD	857.260,80
157	602	054411	Reksus Depkeu Japan Social Dev. Fund Grant for the Marginal Fishing Community Dev. Pilot Proj.No.TF-026799 dalam USD	0,00
158	602	055411	Reksus Depkeu Grant TF-052800 (Japan Grant for the Prepare of a Proposed Recov.Support Conflict Ridden Areas Proj. USD	0,00
159	602	056411	Reksus Depkeu Grant TF-053002 (Poverty Reduction Strategy Trust Fund Grant for Capacity Building) dalam USD	211.428,80
160	602	060411	Reksus Depkeu ASEM Grant for Housing Finance Policy Reform-Grant TF-052962 dalam valuta USD	0,00
161	602	061411	Reksus Depkeu IDF Grant for Dev.Procure.Training Providers t/ Facilities, Certicator/Procure.Prof Grant TF-052481-USD	270.600.000,00
162	602	062411	Reksus Depkeu PHRD Grant for the Prep.of Prop.Gov.Fin.Mng.& Rev Adm.Proj.Grant Agreement No. TF-053116 dalam valuta USD	0,00
163	602	063411	Reksus Depkeu Japan Grant for the Prep. Of Farmer Empow. Through Agric.Tech. & Information Proj Grant TF-052678 dalam valuta USD	0,00
164	602	064411	Reksus Depkeu Grant TF-053117 (Jap Grant for the Implementation of the Second Provicial Health Project) dalam valuta USD	94.796.017,00
165	602	066411	Reksus Depkeu Grant TF-053282 (Asem Grant for Designing Effective Community Empowerment Programs) dalam valuta USD	40.559.602,60
166	602	068411	Reksus Depkeu u/ IDF Grant for Strengthening of Indonesian Institute of Acc No Grant TF-053499 dalam valuta USD	184.206.440,00
167	602	069411	Reksus Depkeu u/ Asem Grant for Dev. Capacity in the Cptl Market and non Bank Financial Inst No Grant TF-053347 dalam valuta USD	34.636,80
168	602	070411	Reksus Depkeu u/ Asem Grant For Strenght Fiscal Policy Analisys Capacity in Ministry of Finance Grant TF-053895 dalam USD	617.860.709,40
169	602	073411	Reksus Depkeu u/ PHRD Grant for the Preparation of Higher Education for Competitivenes (Grant TF-053737) dalam USD	0,00
170	602	074411	Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta USD	2.667.853.336,50
171	602	075411	Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant Support to Basic Education Reform Project Grant TF-054419 dalam valuta USD	33.645.321,60
172	602	076411	Reksus Depkeu ASEM Grant for Rural Investment Climate Survey Grant IBRD No. TF-053367	2.722.236,00
173	602	077411	Reksus Depkeu JDF for Upper Semarang Land Conservation & Poverty Allevation Proj. Grant IBRD No.TF-053816	4.057.466,60
174	602	078411	Reksus Depkeu ASEM Grant For Institusional Strengtening for Dept of Community & Village Dev. Grant IBRD No.TF-053785 dlm USD	0,00
175	602	079411	Coral reef rehabilition and management proj. phase II (Coremap II) IBRD no.TF-053350 Grant	2.307.113.681,40
176	602	080411	Government financial management & revenue administration project grant IBRD No. TF-053556 dalam USD	2.169.794.825,00
177	602	081411	Reksus Depkeu u/ IDF Grant f/ Strengthening National Capacity f/ Public Monitor Local Gov.Reform Grant IBRD No.TF-054921	249.857.066,80
178	602	082411	Reksus Depkeu u/Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Grant Dlm Valuta USD, Grant 0002-INO	6.152.451,00
179	602	083411	Reksus Depkeu u/IDF Grant F/Devlp.The Cap.O/the Minst.Of Forgn Aff to Supp.Wom.Migrn.Works Grant IBRD TF-054332 dlm USD	208.223.813,60

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
180	602	084411	Reksus Depkeu u/Community water services and health Aceh/Nias North Sumatera Project, Grant 0003-INO (SF)	14.432.000.000,00
181	602	085411	Reksus Depkeu u/State Audit Reform Sector Development Project Loan ADB No.2127-INO	2.137.769.675,80
182	602	086411	Reksus Depkeu u/Initiatives for local governance reform project (ILGRP) IBRD Grant No.TF-055913	10.458.060.855,00
183	602	087411	Reksus Depkeu u/Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt Project WISMP IBRD Grant No.TF-052124	8.725.385.963,80
184	602	088411	Reksus Depkeu u/Support for poor and disadvantaged areas project (SPADA) Grant IBRD No.TF-054749	2.467.974.016,20
185	602	089411	Reksus Depkeu u/ Search and Tsunami Emergency Supp.Prj d/ Hbh.Pem.Belanda Sec.FDCRY.OVSGHT. Supp.Grant Agreement ADB No.0002-INO	1.047.503.424,00
186	602	090411	Reksus Depkeu u/ Strengthening Forensic AU Dit Capacity of State Audt Board (BPK) (IDF Grant) No.TF-056263)	198.663.876,40
187	602	091411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Project IBRD No.TF-053555-IND	0,00
188	602	092411	Reksus Depkeu u/ European Union Grant F/N USA Tengg.Brt. Wtr. RSRC.Mng.Program Letter Agreement no.TF-055997	1.037.085.594,60
189	602	093411	Reksus Depkeu u/ Preparation of National Roads Improvement Project IBRD Grant No.TF-054589	1.804.000.000,00
190	602	094411	Reksus Depkeu u/ Western Java Enviromental Management Project/Addaptive Program Loan (Apl2) IBRD Grant TF-0513118-IND	0,00
191	602	095411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project, Grant ADB No.2064/2065-INO	0,00
192	602	096411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Educ & Dev Proj (ECED), IBRD Grant No.TF-056841	0,00
193	602	097411	Reksus Depkeu u/ Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera, Grant JFPR 9074-INO	4.510.000.000,00
194	602	098411	Deutch Grant (Grant 0047-INO)	23.073.301.343,40
195	602	099411	Reksus Depkeu u/ Proyek From Best Practice Policy Formulation Project IDF Grant TF-057276-IND dalam USD	0,00
196	602	000517	Reksus Depkeu u/ Proyek : Cirebon-Jakarta Water Supply Swiss Grant	1.303.606.624,02
197	602	002991	Reksus Netherlands Grant for Cofinancing the Second Kecamatan Development Project (Grant No.TF-051369) dlm Val.Euro	3.644.981.803,00
198	602	003991	Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant for the Second Schools Improvement Grants Prog (Grant No.TF051575-IND) dlm Val.EUR	0,00
199	602	076991	Reksus Depkeu u/ Menampung Hibah dari Luar Negeri dlm Rangka Bencana Alam Nasional dalam Val.EUR	0,00
			Jumlah	845.909.266.282

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
1	601	002111	Reksus Depkeu k/ Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank of Japan (SeconD Exim Uniter Loan)	709.194.110,90
2	601	007111	Reksus Depkeu k/ Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Third Exim United Loan)	16.163.878,29
3	601	027111	Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Plantation and Development Citarik S/Watersheip IP 455 OECF	877.750.200,51
4	601	030111	Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP-458A OECF	0,00
5	601	031111	Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP-458B OECF	0,00
6	601	032111	Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP-458-C OECF	0,00
7	601	041111	Reksus Depkeu u/ Proyek Gajah Mada University Development IP-494 OECF Gajah Mada University Development IP-494 OECF	196.646.897,10
8	601	045111	Reksus Depkeu u/ Proyek Pengemb. Pras. Pedes (P2D) Rural Areas Infras.Dev.Proj (III) IP-506 JBIC dlm JPY	1.682.586.912,15
9	601	046111	Reksus Depkeu u/ Develop. Policy Loan (Loan Agreement No.INP-27)	0,00
10	601	047111	Reksus Depkeu u/ Develop. Policy Loan (Loan Agreement No.INP-28)	0,00
11	601	048111	Reksus Depkeu u/ Profesional Human Resources Development Project-III (Overseas Program), Project Loan JBIC-535A	4.790.812.139,70
12	601	049111	Reksus Depkeu u/ Profesional Human Resources Development Project-III (Overseas Program), Project Loan JBIC-535B	8.960.392.044,56
13	601	050111	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan FKIK UIN Syarif Hidayatullah IP-530 JBIC	0,00
14	601	001311	Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001	93.239.704.511,29
15	601	007411	Reksus Depkeu u/ Proyek Inc.Gen.F/Marginal Farmer & Landless 215-ID IFAD	1.138.251.569,40
16	601	019411	Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Development 652/953-INO ADB	148.739,80
17	601	023411	Reksus Depkeu u/ Proyek East Java Rainfed Agriculture 255-ID IFAD	1.040.383.939,00
18	601	030411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tree Corp Smallholder Sec for 1118-INO ADB	832.726,40
19	601	032411	Reksus Depkeu u/ Proy. Central Java Ground Water 1126-INO ADB	135.660,80
20	601	033411	Reksus Depkeu u/ Proy. Third Non Formal Education 3431-IND IBRD	360,80
21	601	042411	Reksus Depkeu u/ Proyek Tree Corp Smallholder Development 3464-IND IBRD	927.707,00
22	601	043411	Reksus Depkeu u/ Proyek South Sumatera Smallholder Tree Crops 301-ID IFAD	0,00
23	601	047411	Reksus Depkeu u/ Proyek Smallholder Tree Crop Processing 1186-INO ADB	87.764,60
24	601	048411	Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Farmer Development 1184-INO SF ADB	200.875,00
25	601	056411	Reksus Depkeu u/ Proyek Water Supply & Sanitation for Low Income Communities 3629-IND IBRD	2.425.478,00
26	601	057411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sustainable Agriculture Dev. In Irja 1258-INO ADB	199.432,20
27	601	061411	Reksus Depkeu u/ Proyek National Watershed Management & Conservation 3658-IND IBRD	52.892.648,60

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
28	601	063411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Urban Develop (Sect) 1292-INO ADB	0,00
29	601	066411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Cashew Dev 350-ID IFAD	73.547.095,40
30	601	073411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Health and Population Project 1299-INO ADB	270,60
31	601	077411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Accountancy Development Projec 3801-IND IBRD	0,00
32	601	078411	Reksus Depkeu u/ Proyek Ozone Project Trust Fund TF 021982-IND IBRD	9.254.672.979,20
33	601	080411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Profesional Human Resources Development 3825-IND IBRD	332.670.859,40
34	601	081411	Reksus Depkeu u/ Proyek Cap'ty B'ding Pry in the Water Rçes Sec 1339-INO ADB	105.443,80
35	601	087411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Agric.Research Manag Project 3886-IND IBRD	25.459.220,60
36	601	088411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Water Supply and Sanit.Sect. Project 1352-INO ADB	0,00
37	601	089411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tech.Ass.Proj.F/Publ.&Priv.p/o INF-3913-IND IBRD	0,00
38	601	093411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Rainfed Agric.Develop.Project 1351-INO SF ADB	133.405,80
39	601	095411	Reksus Depkeu u/ Proyek Private Junior Second Education Project 1359-INO ADB	17.047,80
40	601	096411	Reksus Depkeu u/ Proyek Senior Secondary Education Project 1360-INO ADB	17.498,80
41	601	099411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Farm Sys & LI396-ID IFAD	8.588.126.549,20
42	601	103411	Reksus Depkeu u/ Proyek Engineering Education Development Project 1432-INO ADB	1.187.483,00
43	601	105411	Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Area Development 3984-IND IBRD	197.538.992,20
44	601	107411	Reksus Depkeu u/ Proyek Basic Education Project 1442-INO ADB	7.847,40
45	601	108411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Agricultural Area Development 4007-IND IBRD	35.536.364,60
46	601	118411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Urban Development Sector 1383-INO ADB	1.461.330,20
47	601	119411	Reksus Depkeu u/ Proyek East Java and EastNusaTeng Jun Sec.Ed Proj 4042-IND IBRD	0,00
48	601	120411	Reksus Depkeu u/ Proyek Central Ind.Junior Second Education Project 4062-IND IBRD	0,00
49	601	121411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Junior Second Education Project 4095-IND IBRD	0,00
50	601	122411	Reksus Depkeu u/ Proyek Indonesia-Gas Transmission & Dist Loan European Invest.Bank (EIB)	223.062.886,20
51	601	123411	Reksus Depkeu u/ Proyek ADB Gas Transmission & Dist Loan the Exp-Imp Bank of Japan (EBJ)	56.364.532.921,40
52	601	124411	Reksus Depkeu u/ Proyek West Java Urban Dev (Sector) Project 1384-INO ADB	227.632.328,00

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING KHUSUS PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2006

NO.	NOMOR REKENING		NAMA REKENING	Nominal Rupiah
53	601	126411	Reksus Depkeu u/ Proyek Integr.Pest.Manag.for Smallh.Est.Crops 1469-INO ADB	33.825,00
54	601	127411	Reksus Depkeu u/ Proyek Family Health and Nutrition 1471-INO ADB	71.528,60
55	601	128411	Reksus Depkeu u/ Proyek North Java Flood Control Sector 1425/1426-INO ADB	0,00
56	601	129411	Reksus Depkeu u/ Proyek Segara Anakan Cons.& Development 1475/1476-INO ADB	102.174.681,40
57	601	130411	Reksus Depkeu u/ Proyek South Java Flood Control Sector 1479-INO ADB	673.072,40
58	601	131411	Reksus Depkeu u/ Proyek Farmer Managed Irrigation System 1378-INO ADB	12.718,20
59	601	133411	Reksus Depkeu u/ Proyek Intensified Iodine Def. Control Project 4125-IND IBRD	5.014.398,40
60	601	138411	Reksus Depkeu u/ Proyek Metropolitan Botabek Urban Development Proj. 1511-INO ADB	3.693.148,80
61	601	139411	Reksus Depkeu u/ Proyek North Java Roads Improvement 1428-INO ADB	0,00
62	601	145411	Reksus Depkeu u/ Proyek Participatory Dev Of Agric Tech 1526-INO ADB	3.968,80
63	601	148411	Reksus Depkeu u/ Proyek Safe Motherhood Partner & Family Approach 4207-IND IBRD	39.842.693,00
64	601	149411	Reksus Depkeu u/ Proyek Intensf Communicable Deseases Contr Proj 1523-INO ADB	12.898,90
65	601	150411	Reksus Depkeu u/ Proyek Pembiayaan Dev. Madrasah Aliyah 1519-INO ADB	79.917,20
66	601	155411	Reksus Depkeu u/ Proyek Quality of Undergraduate Education 4193 IBRD	5.487,67
67	601	159411	Reksus Depkeu u/ Proyek Information Infrastructure Dev.Project 4244-IND IBRD	733,48
68	601	160411	Reksus Depkeu u/ Proyek Northern Sumatera Irrigated Agric Sect 1579-INO ADB	162.630,60
69	601	161411	Reksus Depkeu u/ Proyek Metropol Medan Urban Dev Project 1587-INO ADB	0,00
70	601	164411	Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Bldg in Urban Infrastructure MG 1572-INO ADB	68.642,20
71	601	165411	Reksus Depkeu u/ Proyek Coastal Comm Dev & Fisheries Res Mgt 1570/1571-INO ADB	6.842.481,80
72	601	166411	Reksus Depkeu u/ Proyek Central Sulawesi I'ted Area Dev & Action 1605-INO ADB	181.753,00
73	601	169411	Reksus Depkeu u/ Proyek Coral Reef Rehab and Manag Proj 1613-INO ADB	947.911,80
74	601	173411	Reksus Depkeu u/ Proyek Maluku Regional Dev Loan 4306-IND IBRD	0,00
75	601	174411	Reksus Depkeu u/ Proyek Railway Efficiency Project Loan 4106-IND IBRD	0,00
76	601	178411	Reksus Depkeu u/ Proyek Early Child Development Loan No. 4378-IND IBRD	160.285,40
77	601	179411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Junior Secondary Educ Proj 1574-INO ADB	310.768.766,00
78	601	180411	Reksus Depkeu u/ Proyek Health Nutrition Dev 1676-INO ADB	0,00

www.peraturan.go.id

RINCIAN REKENING ESCROW DANA MORATORIUM ACEH DAN NIAS
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No	Bank	Nama Rekening	Nomor Seri Rekening	Nilai Deposito
1	Bank Bukopin Cabang Banda Aceh	Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan	1003633-13-2	200.000.000.000
2	Bank Bukopin Cabang Banda Aceh	Deposito Nomor Seri 254995		200.000.000.000
3	Bank Bukopin KPO MT Haryono	Deposito Nomor Seri 254995		559.300.000.000
4	Bank BRI Cabang Banda Aceh	Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan	0037-01-001822-30-1	200.000.000.000
5	Bank BRI Cabang Banda Aceh	Deposito Nomor Seri DB9753971		200.000.000.000
6	Bank BRI Cabang Jakarta Veteran	Deposito Nomor Seri DB9729152		500.000.000.000
7	Bank BNI Cabang Banda Aceh	Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan	107194824	200.000.000.000
8	Bank BNI Cabang Banda Aceh	Deposito Nomor Seri AB312007		200.000.000.000
9	Bank BNI KCU Menteng	Deposito Nomor Seri AB281976		500.000.000.000
10	Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh	Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan	100000074	200.000.000.000
11	Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh	Deposito Nomor Seri D121177		200.000.000.000
12	Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	Deposito Nomor Seri D102857		500.000.000.000
13	Bank BPD Aceh	Dana Moratorium QQ Dirjen Perbendaharaan	01001.01.121315.9	200.333.333.333
14	Bank BPD Aceh	Deposito Nomor Seri 060968		200.000.000.000
15	Bank Mandiri Cabang Jakarta Juanda	Jasa Giro Dana Moratorium	119-00-0446158-6	3.837.658.825
16	Bank Mandiri Cabang Jakarta Juanda	Deposito Nomor Seri AA884843		500.000.000.000
17	Bank Indonesia	Dana MoratoriumUntuk NAD dan NIAS	519,000118	83.300.000.000,00
	Jumlah			4.646.770.992.158

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING ESCROW SUBSIDI/PSO DAN DANA BAGI HASIL
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No.	REKENING ESCROW			REKENING	SALDO AKHIR
	JENIS/BANK	NAMA REKENING	NO. REKENING		31-Des-06
	SUBSIDI/PSO				
1	BRI KCK Sudirman	Cadangan Subsidi Pangan Tahun Anggaran 2001	0206-01-000089-30-1	Perum Bulog	65.921.450.580
2	BRI KCK Sudirman	Rekening Cadangan Dana Subsidi Pangan TA 2003	0206-01-001939-30-5	Perum Bulog	155.178.346.179
3	BRI Cab Jakarta Kebayoran Baru	CadanganSubsidi/PSO	0193-01-000747-30-4	Dirjen Perbendaharaan	2.610.944.907.327
4	BRI Cab Jakarta Veteran	CadanganSubsidi/PSO	0329-01-001890-30-3	Dirjen Perbendaharaan	82.916.000.000
5	Bank Bukopin KPO MT Haryono	Rekening Titipan Subsidi Pangan	1016053-01-1	Perum Bulog	382.597.026.468
6	Bank Bukopin KPO MT Haryono	Rekening Titipan Subsidi Pangan	1016977-01-9	Perum Bulog	54.043.913.463
7	Bank Bukopin KPO MT Haryono	CadanganSubsidi/PSO	1016977-01-5	Dirjen Perbendaharaan	359.271.304.945
8	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan	0094720712	Dirjen Perbendaharaan	14.032.115.059
9	Bank BNI KCU Jakarta Kota	Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan	0114846647	Dirjen Perbendaharaan	463.645.305.445
10	Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini	CadanganSubsidi/PSO	123-00-46-0456750-0	Dirjen Perbendaharaan	54.621.281.363
11	Bank jabar Cabang Khusus Jakarta	CadanganSubsidi/PSO	0074-001ZY3-001	Dirjen Perbendaharaan	424.094.402.896
	Jumlah				4.667.266.053.725
	DANA BAGI HASIL				
1	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DBH SDA Kehutanan	0010560801	Dirjen Perbendaharaan	1.141.489.174.161
2	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DBH SDA Perikanan	0010560798	Dirjen Perbendaharaan	181.960.711.503

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING ESCROW SUBSIDI/PSO DAN DANA BAGI HASIL
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No.	REKENING ESCROW			REKENING	SALDO AKHIR 31-Des-06
	JENIS/BANK	NAMA REKENING	NO. REKENING		
3	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DBH SDA Pertambangan Umum	0010560812	Dirjen Perbendaharaan	540.086.557.467
4	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DAK DR	0013630358	Dirjen Perbendaharaan	1.225.819.452.770
5	Bank Indonesia	Sub BUN Dana DAK DR Tahun 2002 Yang Belum Disalurkan	502.000.003	Dirjen Perbendaharaan	16.168.946.303
	Jumlah				3.105.524.842.204

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING - REKENING ESCROW DANA REBOISASI
PER 31 DESEMBER 2006
(dalam rupiah)

No.	BANK	NAMA REKENING	NO. REKENING	REKENING	SALDO AKHIR 31-Des-06
1	PT. BANK MANDIRI KCK JAKARTA PLAZA	Menkeu-DJA Cadangan Reboisasi	070-00-0021024-0	Dirjen Perbendaharaan	4.583.110.228.026
2	PT. BNI Cab. Taman Niaga Suwarna	Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Reboisasi	19700977	Dirjen Perbendaharaan	1.467.699.430.382
3	PT. BNI Cab. Jakarta Kramat	Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Jasa Giro Reboisasi	10560776	Dirjen Perbendaharaan	414.018.350.382
4	PT. BNI KCU TANGERANG	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	0019717937	Dirjen Perbendaharaan	105.852.045.247
5	PT. BNI KCU TANGERANG	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	0019717926	Dirjen Perbendaharaan	2.086.798.662.506
6	Bank BNI KCU Jakarta Kota	Cadangan Dana Reboisasi	94697884	Dirjen Perbendaharaan	36.042.243.000
7	Bank DKI Cabang Utama Juanda	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	101.01.07211-5	Dirjen Perbendaharaan	284.921.805.996
8	Bank DKI Cabang Utama Juanda	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	101.01.07212-3	Dirjen Perbendaharaan	59.570.502.324
9	Bank BNI KCU Jakarta Kota	Cadangan Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan	1.018.896.016	Dirjen Perbendaharaan	300.000.000.000
10	Bank BRI Cabang Jakarta Veteran	Cadangan Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan	0329.01.001767.30.6	Dirjen Perbendaharaan	851.884.503.672
11	Bank Jabar Cabang Utama Jakarta	Cadangan Jasa Giro Dana Reboisasi	0074-001ONX-001	Dirjen Perbendaharaan	105.166.165.000
	Jumlah				**10.295.063.936.535,20**

www.peraturan.go.id

SALDO REKENING DANA CADANGAN
PER 31 DESEMBER 2006
(dalam rupiah)

No.	JENIS/BANK	NAMA REKENING	NO. REKENING	REKENING	JUMLAH
	INFRASTRUKTUR				
1	Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol	Cadangan Infrastruktur	122.0004552330	Dirjen Perbendaharaan	500.143.835.616
2	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Cadangan Infrastruktur	0329-01-001894-30-7	Dirjen Perbendaharaan	500.000.000.000,00
3	Bank BNI kantor Cabang Utama Jakarta Kota	Cadangan Infrastruktur	115424635	Dirjen Perbendaharaan	500.125.000.000,00
4	Bank Bukopin KPO MT Haryono	Cadangan Infrastruktur	1019827018	Dirjen Perbendaharaan	500.000.000.000,00
		TOTAL CADANGAN INFRASTRUKTUR			**2.000.268.835.616**
	PMN				
1	Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol	Cadangan PMN	122.0004553643	Dirjen Perbendaharaan	450.000.000.000
2	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Cadangan PMN	0329-01-001895-30-3	Dirjen Perbendaharaan	372.000.000.000,00
3	Bank BNI kantor Cabang Utama Jakarta Kota	Cadangan PMN	0115556355	Dirjen Perbendaharaan	300.050.000.000,00
4	Bank Bukopin KPO MT Haryono	Cadangan PMN	1019826-01-1	Dirjen Perbendaharaan	500.000.000.000,00
		TOTAL CADANGAN PMN			**1.622.050.000.000**
	JASA PERBENDAHARAAN				
1	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Jasa Perbendaharaan	0115581122	Dirjen Perbendaharaan	461.506.000
		TOTAL CADANGAN JASA PERBENDAHARAAN			**461.506.000,00**

www.peraturan.go.id

ASET LAINNYA - ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	312.150.000	0
2	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	21.849.594	0
3	12	DEPARTEMEN PERTAHANAN		5.166.720.000
4	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	11.690.734.880	0
5	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	147.763.000	0
6	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	226.821.512.459	0
7	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.628.296.253	0
8	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	2.623.882.500	6.548.157.380
9	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	247.638.477.353	36.868.844.000
10	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	529.100.000	0
11	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3.485.481.799	1.589.807.799
12	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.956.192.669	0
13	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.631.707.975	0
14	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	118.205.400	0
15	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	2.759.056.250	0
16	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2.754.279.367	0
17	83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	38.039.060.197	0
18	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	617.040.000	0
19	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.584.086.450	0
20	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.137.956.557	0
21	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	222.325.000	0
JUMLAH			**569.719.157.703**	50.173.529.179

www.peraturan.go.id

ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(dalam rupiah)

NO	BA	URAIAN BA	2006	2005
1	2	3	4	5
1	02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.018.778.620	1.018.778.620
2	05	MAHKAMAH AGUNG		183.486.001
3	10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI		46.345.798
4	11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	68.076.028.987	0
5	15	DEPARTEMEN KEUANGAN	22.841.123.988	14.739.100.783
6	18	DEPARTEMEN PERTANIAN	6.471.812.132	2.305.684.201
7	19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN		190.934.840
8	20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	208.819.883	49.820.000
9	22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	237.388.749.322	27.119.044.426
10	25	DEPARTEMEN AGAMA	11.507.254.295	4.523.134.055
11	26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	207.300.000	0
12	29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	550.618.668.584	1.456.022.497.091
13	33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	4.355.776.372	16.719.631.440
14	41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	87.085.726.235	0
15	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI		8.022.151.140
16	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP		3.011.343.000
17	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	58.249.044.256	331.479.349
18	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		30.000.000
19	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	2.219.000	912.173.607
20	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL		2.658.086.451
21	54	BADAN PUSAT STATISTIK	94.339.854	1.678.723.220
22	59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89.600.000	0
23	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		500.500.000
24	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.071.335.642	203.507.975
25	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	0	81.867.516
26	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	516.046.278	2.519.082.738
27	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM		4.800.000
28	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	720.159.710	
29	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	359.089.620	0
30	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	94.550.000	0
31	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	5.334.947.672	0
32	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	295.925.903	0
33	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	125.820.000	0
34	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	18.048.316.931	0
35	90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	13.073.202.148	45.072.964.797
36	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	8.232.435.016	0
37	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	121.021.665.470	1.358.673.030
JUMLAH			**1.217.108.735.918**	**1.589.303.810.078**

www.peraturan.go.id

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA PPA
UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2005 - 31 DESEMBER 2006

NO	JENIS ASET	SATUAN ASET	SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA 31-Des-05		SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2006	
			ITEM ASET	NILAI ASET (Rp)	ITEM ASET	NILAI ASET (Rp)
1	Aset Saham Bank	Bank	6	674.050.038.521	6	142.563.236.654
2	Aset Saham Non Bank	Perusahaan	24	315.769.321.428	24	315.769.321.428
3	Aset Hak Tagih	Debitur	1.219	3.818.702.210.337	388	1.316.953.062.340
4	Aset Properti	Unit	3.935	3.106.076.424.012	3.890	1.884.301.689.354
5	Surat Berharga	Perusahaan	11	17.280.632.209	11	17.128.634.432
6	Saham dan Kredit	Perusahaan	4	961.512.830.149	3	705.791.122.704
	JUMLAH		5.199	8.893.391.456.656	4.322	4.382.507.066.912

KETERANGAN :
1) Pencatatan kembali lembar saham 3 (tiga) bank yang terkait dengan SBH
2) Termasuk penyesuaian nilai aset hak tagih sesuai KMK No. 645/KMK.01/2006
3) Termasuk penyesuaian nilai aset properti sesuai KMK No. 669/KMK.06/2006
4) Penyesuaian nilai aset surat berharga sesuai KMK No. 394/.01/2004

www.peraturan.go.id

ASET EKS BPPN YANG DIKELOLA TIM KOORDINASI
per 31 Desember 2006
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS ASET	JUMLAH ASET	NILAI PENGALIHAN
1.	Surat Berharga		
	- Surat Berharga Treasury	36	336.744.406.680
	- Surat Berharga Non Treasury	121	169.269.366.213
	- Surat Berharga terkait PKPS	2	18.100.848.909
2.	Penyertaan di Bank Lainnya	8	-
3.	Penyertaan Non Bank	21	25.321.044.355
4.	Pinjaman yang diberikan		
	- Dikelola BPPN	13.950	2.702.947.038.220
	- Dikelola BDI	1	19.489.668.884
5.	Aktiva Non Inti		
	- NCA Properti	701	123.228.291.946
	- NCA Non Properti	7	293.510.290.511
	- Inventaris	76.413	8.134.769.815
6.	Tagihan PKPS	17	2.235.982.000.000
7.	Piutang Bank	13	1.249.659.000.000
8.	Piutang Non Bank	3	20.000.000
9.	Penempatan Antar Bank dan Nostro	2	83.698.000.000
10.	Aktiva Lainnya	7	93.971.000.000
TOTAL		91.302	7.360.075.725.532

www.peraturan.go.id

PIUTANG NEGARA NON PERBANKAN INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA
POSISI PER 31 DESEMBER 2006
(dalam rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	2006	2005
1	DEPARTEMEN KEHUTANAN	272.362.412.002	219.344.125.374
2	DEPARTEMEN AGAMA	33.318.288	33.318.288
3	DEPARTEMEN PERTANIAN	10.512.240.193	18.580.515.766
4	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	12.500.000	20.050.000
5	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	4.960.000	4.960.000
6	PEMDA	1.259.434.315	1.738.569.671
7	DEPARTEMEN ENERGI DAN SDM	3.936.886.183.318	19.667.807.052
8	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	98.182.108	99.318.472
9	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.950.440.185	2.321.200.185
10	DEPARTEMEN KEUANGAN	391.522.526.131	385.172.797.452
11	DEPARTEMEN KESEHATAN	4.331.099.748	4.264.738.331
12	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	779.404.320	1.107.544.813
13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM	15.308.780	15.308.780
14	BAKOSUTARNAL	60.664.688.494	66.130.118.869
15	BATAN		5.271.597.133
16	BPN	405.690.000	507.682.461
17	BPPT	81.670.449.361	48.651.421.067
18	BPS	4.398.836.804	4.504.493.887
19	IJJDI	47.518.143	47.518.143
20	DEPKIMPRASWIL	450.000.000	-
21	BPK	1.834.692.216	1.990.054.501
22	LEMIGAS	1.061.392.307	1.156.209.984
Jumlah		**4.770.301.276.713**	**780.629.350.227**

Dikonversikan dengan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2006

www.peraturan.go.id

BAGIAN LANCAR UTANG LUAR NEGERI
(PROYEKSI PEMBAYARAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2007)
(Dalam Juta Rupiah)

JENIS PINJAMAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
BILATERAL	431.936	1.259.383	513.074	1.822.046	1.040.249	5.716.813	373.784	1.235.822	525.363	1.931.982	1.073.122	6.012.512	21.936.089
COMMERCIAL CREDIT	0	0	12.032	0	915	7.380	0	0	16.210	0	1.526	7.851	45.913
EXPORT CREDIT	849.177	1.155.244	724.721	611.448	501.413	2.558.488	651.383	1.216.533	626.331	565.363	475.399	2.559.774	12.495.274
LEASING	30.820	17.043	28.218	126.105	53.333	14.696	0	17.043	28.218	126.105	53.333	1.287	496.202
MULTILATERAL	2.029.359	1.070.014	1.746.241	1.745.061	1.555.123	1.375.354	1.992.843	1.012.096	1.508.939	1.771.528	1.536.281	1.365.624	18.708.464
GRAND TOTAL	3.341.293	3.501.684	3.024.285	4.304.660	3.151.034	9.672.731	3.018.011	3.481.495	2.705.062	4.394.978	3.139.661	9.947.048	53.681.942

www.peraturan.go.id

BAGIAN LANCAR - OBLIGASI NEGARA JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No.	Series	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Principle Indexation 1)	Indexed 2) Principle	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**15.453.245.000.000**		-	**15.453.245.000.000**	**(2.411.288.372)**	**15.450.833.711.628**
1.	FR0005	15/07/2007	11.747.245.000.000	12,25%	-	11.747.245.000.000	-	11.747.245.000.000
2.	FR0029	15/04/2007	3.706.000.000.000	9,50%	-	3.706.000.000.000	(2.411.288.372)	3.703.588.711.628
VARIABLE RATE BOND			**9.040.826.000.000**		-	**9.040.826.000.000**	-	**9.040.826.000.000**
1.	VR0011	25/02/2007	4.190.627.000.000	9,50%	-	4.190.627.000.000	-	4.190.627.000.000
2.	VR0012	25/09/2007	4.850.199.000.000	9,50%	-	4.850.199.000.000	-	4.850.199.000.000
SU			**1.586.469.279.543**		-	**1.586.469.279.543**	-	**1.586.469.279.543**
1.	SU007	01/02/2007	509.352.721.728	0,10%	-	509.352.721.728	-	509.352.721.728
2.	SU007	01/08/2007	534.820.357.815	0,10%	-	534.820.357.815	-	534.820.357.815
3.	SU005	10/12/2007	542.296.200.000	9,50%	-	542.296.200.000	-	542.296.200.000
GRAND TOTAL			26.080.540.279.543		-	26.080.540.279.543	(2.411.288.372)	**26.078.128.991.171**

1) Applied to International Bonds
2) Net after accrued principle indexation

www.peraturan.go.id

UTANG BUNGA OBLIGASI
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No.	Series	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Principle	Indexed Principle	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			**238.564.501.000.000**		0	**238.564.501.000.000**	**6.250.198.367.506**
1	FR0002	15/06/2009	17.455.057.000.000	14,00000%	0	17.455.057.000.000	107.418.420.778
2	FR0005	15/07/2007	11.747.245.000.000	12,25000%	0	11.747.245.000.000	660.864.761.965
3	FR0010	15/03/2010	11.419.678.000.000	13,15000%	0	11.419.678.000.000	443.871.464.182
4	FR0011	15/05/2010	800.000.000.000	13,55000%	0	800.000.000.000	13.774.400.000
5	FR0012	15/05/2010	2.425.141.000.000	12,62500%	0	2.425.141.000.000	38.906.537.063
6	FR0013	15/09/2010	5.287.601.000.000	15,42500%	0	5.287.601.000.000	241.077.592.393
7	FR0014	15/11/2010	1.349.947.000.000	15,57500%	0	1.349.947.000.000	26.716.801.077
8	FR0015	15/02/2011	6.534.938.000.000	13,40000%	0	6.534.938.000.000	328.380.634.500
9	FR0016	15/08/2011	6.237.937.000.000	13,45000%	0	6.237.937.000.000	314.622.828.469
10	FR0017	15/01/2012	10.257.063.000.000	13,15000%	0	10.257.063.000.000	619.424.034.570
11	FR0018	15/07/2012	7.209.062.000.000	13,17500%	0	7.209.062.000.000	436.184.296.310
12	FR0019	15/06/2013	11.856.341.000.000	14,25000%	0	11.856.341.000.000	74.268.120.024
13	FR0020	15/12/2013	11.856.341.000.000	14,27500%	0	11.856.341.000.000	74.398.539.775
14	FR0021	15/12/2010	2.909.000.000.000	14,50000%	0	2.909.000.000.000	18.541.966.000
15	FR0022	15/09/2011	8.939.000.000.000	12,00000%	0	8.939.000.000.000	317.066.330.000
16	FR0023	15/12/2012	13.432.500.000.000	11,00000%	0	13.432.500.000.000	64.946.137.500
17	FR0024	15/10/2010	5.155.000.000.000	12,00000%	0	5.155.000.000.000	130.859.675.000
18	FR0025	15/10/2011	8.803.000.000.000	10,00000%	0	8.803.000.000.000	186.218.662.000
19	FR0026	15/10/2014	11.382.000.000.000	11,00000%	0	11.382.000.000.000	264.847.758.000
20	FR0027	15/06/2015	5.000.000.000.000	9,50000%	0	5.000.000.000.000	20.880.000.000
21	FR0028	15/07/2017	3.000.000.000.000	10,00000%	0	3.000.000.000.000	137.772.000.000
22	FR0029	15/04/2007	3.706.000.000.000	9,50000%	0	3.706.000.000.000	74.475.776.000
23	FR0030	15/05/2016	5.330.000.000.000	10,75000%	0	5.330.000.000.000	72.807.800.000
24	FR0031	15/11/2020	11.469.000.000.000	11,00000%	0	11.469.000.000.000	160.313.682.000
25	FR0032	15/07/2018	1.560.000.000.000	15,00000%	0	1.560.000.000.000	107.462.160.000
26	FR0033	15/03/2013	9.945.000.000.000	12,50000%	0	9.945.000.000.000	367.447.860.000
27	FR0034	15/06/2021	10.379.000.000.000	12,80000%	0	10.379.000.000.000	58.392.254.000
28	FR0035	15/06/2022	6.600.000.000.000	12,90000%	0	6.600.000.000.000	37.422.000.000
29	FR0036	15/09/2019	3.711.000.000.000	11,50000%	0	3.711.000.000.000	126.144.312.000
30	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	0	2.450.000.000.000	86.901.500.000
31	FR0038	15/08/2018	3.083.000.000.000	11,60000%	0	3.083.000.000.000	134.110.500.000
32	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	0	4.175.000.000.000	183.958.850.000
33	FR0040	15/09/2025	8.716.000.000.000	11,00000%	0	8.716.000.000.000	283.392.024.000
34	FR0041	15/11/2008	1.100.000.000.000	9,25000%	0	1.100.000.000.000	12.929.400.000
35	ORI001	09/08/2009	3.283.650.000.000	12,05000%	0	3.283.650.000.000	23.399.289.900
VARIABLE RATE BOND			**180.186.698.000.000**		0	**180.186.698.000.000**	**2.077.212.220.576**
1	VR0011	25/02/2007	4.190.627.000.000	9,50000%	0	4.190.627.000.000	38.943.496.711
2	VR0012	25/09/2007	4.850.199.000.000	9,50000%	0	4.850.199.000.000	7.677.865.017
3	VR0013	25/01/2008	7.931.765.000.000	11,35938%	0	7.931.765.000.000	164.036.831.965
4	VR0014	25/08/2008	9.332.111.000.000	9,50000%	0	9.332.111.000.000	86.723.307.523
5	VR0015	25/12/2008	9.063.334.000.000	9,50000%	0	9.063.334.000.000	14.347.257.722
6	VR0016	25/07/2009	9.799.580.000.000	11,35938%	0	9.799.580.000.000	202.665.113.980
7	VR0017	25/06/2011	4.008.666.000.000	9,50000%	0	4.008.666.000.000	6.345.718.278
8	VR0018	25/10/2012	1.065.483.000.000	11,35938%	0	1.065.483.000.000	22.035.253.923
9	VR0019	25/12/2014	11.406.226.000.000	9,50000%	0	11.406.226.000.000	18.056.055.758
10	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	11,35938%	0	9.899.007.000.000	204.721.363.767
11	VR0021	25/11/2015	7.546.328.000.000	9,50000%	0	7.546.328.000.000	70.128.026.104
12	VR0022	25/03/2016	9.666.749.000.000	9,50000%	0	9.666.749.000.000	15.302.463.667
13	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	11,35938%	0	8.652.056.000.000	178.933.170.136
14	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	9,50000%	0	9.909.300.000.000	92.087.124.900
15	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	9,50000%	0	6.909.300.000.000	10.937.421.900
16	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	11,35938%	0	5.442.142.000.000	112.548.938.702

www.peraturan.go.id

UTANG BUNGA OBLIGASI
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No.	Series	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Principle	Indexed Principle	Accrued Interest
17	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	11,35938%	0	5.442.142.000.000	112.548.938.702
18	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	9,50000%	0	7.033.994.000.000	65.366.906.242
19	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	9,50000%	0	12.212.320.000.000	113.489.089.760
20	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	9,50000%	0	10.503.015.000.000	16.626.272.745
21	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	11,35938%	0	25.322.354.000.000	523.691.603.074
SU DAN SRBI			**274.366.754.841.443**		**0**	**274.366.754.841.443**	**279.207.834.755**
1	SU002	01/04/2018	20.000.000.000.000	1,00000%	0	20.000.000.000.000	49.863.013.699
2	SU004	01/12/2018	53.779.500.000.000	3,00000%	0	53.779.500.000.000	132.606.986.301
3	SU005	10/12/2009	2.711.481.000.000	9,50000%	0	2.711.481.000.000	14.820.286.562
4	SU007	01/08/2025	54.862.150.308.421	0,10000%	0	54.862.150.308.421	22.846.703.690
5	SRBI01	01/08/2033	143.013.623.533.022	0,10000%	0	143.013.623.533.022	59.070.844.503
INTERNATIONAL BOND			**52.072.000.000.000**		**(2.462.000.000.000)**	**49.610.000.000.000**	**1.060.517.694.628**
1.	RI0014	10/03/2014	8.554.000.000.000	6,75000%	466.000.000.000	9.020.000.000.000	188.373.480.663
2.	RI0015	20/04/2015	9.613.000.000.000	7,25000%	(593.000.000.000)	9.020.000.000.000	129.352.747.253
3.	RI0016	12/01/2016	9.099.000.000.000	7,50000%	(981.000.000.000)	8.118.000.000.000	279.607.744.565
4.	RI0017	09/03/2017	9.370.000.000.000	6,87500%	(350.000.000.000)	9.020.000.000.000	193.574.930.939
5.	RI0035	12/10/2035	15.436.000.000.000	8,50000%	(1.004.000.000.000)	14.432.000.000.000	269.608.791.208
GRAND TOTAL			**745.189.953.841.443**		**(2.462.000.000.000)**	**742.727.953.841.443**	**9.667.136.117.465**

www.peraturan.go.id

OBLIGASI NEGARA JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No.	Series	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Principle Indexation 1)	Indexed 2) Principle	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**223.111.256.000.000**			**223.111.256.000.000**	**(2.968.375.175.775)**	**220.142.880.824.225**
1	FR0002	15/06/2009	17.455.057.000.000	14,00000%	-	17.455.057.000.000	-	17.455.057.000.000
2	FR0010	15/03/2010	11.419.678.000.000	13,15000%	-	11.419.678.000.000	-	11.419.678.000.000
3	FR0011	15/05/2010	800.000.000.000	13,55000%	-	800.000.000.000	-	800.000.000.000
4	FR0012	15/05/2010	2.425.141.000.000	12,62500%	-	2.425.141.000.000	-	2.425.141.000.000
5	FR0013	15/09/2010	5.287.601.000.000	15,42500%	-	5.287.601.000.000	-	5.287.601.000.000
6	FR0014	15/11/2010	1.349.947.000.000	15,57500%	-	1.349.947.000.000	-	1.349.947.000.000
7	FR0015	15/02/2011	6.534.938.000.000	13,40000%	-	6.534.938.000.000	-	6.534.938.000.000
8	FR0016	15/08/2011	6.237.937.000.000	13,45000%	-	6.237.937.000.000	-	6.237.937.000.000
9	FR0017	15/01/2012	10.257.063.000.000	13,15000%	-	10.257.063.000.000	59.023.278.304	10.316.086.278.304
10	FR0018	15/07/2012	7.209.062.000.000	13,17500%	-	7.209.062.000.000	-	7.209.062.000.000
11	FR0019	15/06/2013	11.856.341.000.000	14,25000%	-	11.856.341.000.000	-	11.856.341.000.000
12	FR0020	15/12/2013	11.856.341.000.000	14,27500%	-	11.856.341.000.000	-	11.856.341.000.000
13	FR0021	15/12/2010	2.909.000.000.000	14,50000%	-	2.909.000.000.000	(23.263.433.887)	2.885.736.566.113
14	FR0022	15/09/2011	8.939.000.000.000	12,00000%	-	8.939.000.000.000	(44.417.511.375)	8.894.582.488.625
15	FR0023	15/12/2012	13.432.500.000.000	11,00000%	-	13.432.500.000.000	(328.218.535.287)	13.104.281.464.713
16	FR0024	15/10/2010	5.155.000.000.000	12,00000%	-	5.155.000.000.000	(126.666.384.737)	5.028.333.615.263
17	FR0025	15/10/2011	8.803.000.000.000	10,00000%	-	8.803.000.000.000	(203.833.257.468)	8.599.166.742.532
18	FR0026	15/10/2014	11.382.000.000.000	11,00000%	-	11.382.000.000.000	(385.235.870.166)	10.996.764.129.834
19	FR0027	15/06/2015	5.000.000.000.000	9,50000%	-	5.000.000.000.000	(159.894.323.250)	4.840.105.676.750
20	FR0028	15/07/2017	3.000.000.000.000	10,00000%	-	3.000.000.000.000	(74.627.264.325)	2.925.372.735.675
21	FR0030	15/05/2016	5.330.000.000.000	10,75000%	-	5.330.000.000.000	(148.188.221.866)	5.181.811.778.134
22	FR0031	15/11/2020	11.469.000.000.000	11,00000%	-	11.469.000.000.000	(1.256.683.355.692)	10.212.316.644.308
23	FR0032	15/07/2018	1.560.000.000.000	15,00000%	-	1.560.000.000.000	(73.155.712.240)	1.486.844.287.760
24	FR0033	15/03/2013	9.945.000.000.000	12,50000%	-	9.945.000.000.000	(52.065.643.049)	9.892.934.356.951
25	FR0034	15/06/2021	10.379.000.000.000	12,80000%	-	10.379.000.000.000	239.434.984.178	10.618.434.984.178
26	FR0035	15/06/2022	6.600.000.000.000	12,90000%	-	6.600.000.000.000	(30.460.881.024)	6.569.539.118.976
27	FR0036	15/09/2019	3.711.000.000.000	11,50000%	-	3.711.000.000.000	(70.094.772.699)	3.640.905.227.301
28	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	-	2.450.000.000.000	(155.335.558.974)	2.294.664.441.026
29	FR0038	15/08/2018	3.083.000.000.000	11,60000%	-	3.083.000.000.000	(32.015.294.121)	3.050.984.705.879
30	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	-	4.175.000.000.000	(59.180.712.100)	4.115.819.287.900
31	FR0040	15/09/2025	8.716.000.000.000	11,00000%	-	8.716.000.000.000	(34.514.296.557)	8.681.485.703.443
32	FR0041	15/11/2008	1.100.000.000.000	9,25000%	-	1.100.000.000.000	(8.982.409.440)	1.091.017.590.560
33	ORI001	09/08/2009	3.283.650.000.000	12,05000%	-	3.283.650.000.000	-	3.283.650.000.000
VARIABLE RATE BOND			**171.145.872.000.000**		**-**	**171.145.872.000.000**	**-**	**171.145.872.000.000**
1.	VR0013	25/01/2008	7.931.765.000.000	11,35938%	-	7.931.765.000.000	-	7.931.765.000.000
2.	VR0014	25/08/2008	9.332.111.000.000	9,50000%	-	9.332.111.000.000	-	9.332.111.000.000
3.	VR0015	25/12/2008	9.063.334.000.000	9,50000%	-	9.063.334.000.000	-	9.063.334.000.000
4.	VR0016	25/07/2009	9.799.580.000.000	11,35938%	-	9.799.580.000.000	-	9.799.580.000.000
5.	VR0017	25/06/2011	4.008.666.000.000	9,50000%	-	4.008.666.000.000	-	4.008.666.000.000
6.	VR0018	25/10/2012	1.065.483.000.000	11,35938%	-	1.065.483.000.000	-	1.065.483.000.000
7.	VR0019	25/12/2014	11.406.226.000.000	9,50000%	-	11.406.226.000.000	-	11.406.226.000.000
8.	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	11,35938%	-	9.899.007.000.000	-	9.899.007.000.000
9.	VR0021	25/11/2015	7.546.328.000.000	9,50000%	-	7.546.328.000.000	-	7.546.328.000.000
10.	VR0022	25/03/2016	9.666.749.000.000	9,50000%	-	9.666.749.000.000	-	9.666.749.000.000
11.	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	11,35938%	-	8.652.056.000.000	-	8.652.056.000.000
12.	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	9,50000%	-	9.909.300.000.000	-	9.909.300.000.000
13.	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	9,50000%	-	6.909.300.000.000	-	6.909.300.000.000
14.	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	11,35938%	-	5.442.142.000.000	-	5.442.142.000.000
15.	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	11,35938%	-	5.442.142.000.000	-	5.442.142.000.000
16.	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	9,50000%	-	7.033.994.000.000	-	7.033.994.000.000
17.	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	9,50000%	-	12.212.320.000.000	-	12.212.320.000.000
18.	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	9,50000%	-	10.503.015.000.000	-	10.503.015.000.000
19.	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	11,35938%	-	25.322.354.000.000	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG KPD BI			**272.780.285.561.900**		**-**	**272.780.285.561.900**	**-**	**272.780.285.561.900**
1.	SU002	01/04/2025	20.000.000.000.000	1,00000%	-	20.000.000.000.000	-	20.000.000.000.000
2.	SU004	01/12/2025	53.779.500.000.000	3,00000%	-	53.779.500.000.000	-	53.779.500.000.000
3.	SU005	10/12/2009	2.169.184.800.000	9,50000%	-	2.169.184.800.000	-	2.169.184.800.000
4.	SU007	01/08/2025	53.817.977.228.878	0,10000%	-	53.817.977.228.878	-	53.817.977.228.878
5.	SRBI01	01/08/2033	143.013.623.533.022	0,10000%	-	143.013.623.533.022	-	143.013.623.533.022

www.peraturan.go.id

OBLIGASI NEGARA JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Rupiah)

No.	Series	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Principle Indexation 1)	Indexed 2) Principle	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
INTERNATIONAL BOND			52.072.000.000.000		(2.462.000.000.000)	49.610.000.000.000	846.525.092.318	50.456.525.092.318
1.	RI0014	10/03/2014	8.554.000.000.000	6,75000%	466.000.000.000	9.020.000.000.000	(45.712.761.058)	8.974.287.238.942
2.	RI0015	20/04/2015	9.613.000.000.000	7,25000%	(593.000.000.000)	9.020.000.000.000	(64.766.666.168)	8.955.233.333.832
3.	RI0016	12/01/2016	9.099.000.000.000	7,50000%	(981.000.000.000)	8.118.000.000.000	(61.362.247.495)	8.056.637.752.505
4.	RI0017	09/03/2017	9.370.000.000.000	6,87500%	(350.000.000.000)	9.020.000.000.000	(76.296.307.616)	8.943.703.692.384
5.	RI0035	12/10/2035	15.436.000.000.000	8,50000%	(1.004.000.000.000)	14.432.000.000.000	1.094.663.074.655	15.526.663.074.655
GRAND TOTAL			719.109.413.561.900		(2.462.000.000.000)	716.647.413.561.900	(2.121.850.083.457)	714.525.563.478.443

1) Applied to International Bonds
2) Net after accrued principle indexation

www.peraturan.go.id

POSISI (OUTSTANDING) UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PER JENIS PINJAMAN DAN NEGARA KREDITOR

PER 31 DESEMBER 2006

(Dalam Rupiah)

JENIS PINJAMAN / NEGARA	JUMLAH
BILATERAL	**287.136.406.710.175**
AUSTRIA	10.326.290.740.078
BELGIUM	1.717.118.778.565
BRUNEI	508.915.544.742
CANADA	1.978.965.737.643
DENMARK	201.925.762.762
FINLAND	94.102.250.832
FRANCE	19.787.688.870.643
GERMANY, FED.REP. OF	21.251.545.882.005
ITALY	1.269.050.318.065
JAPAN	186.383.444.472.013
KOREA, REP. OF	1.484.588.734.721
KUWAIT	570.308.383.822
NETHERLANDS	8.279.334.352.104
NORWAY	3.387.185.890
POLAND	0
SAUDI ARABIA	359.228.728.675
SPAIN	4.026.595.574.082
SWEDEN	33.838.874.564
SWITZERLAND	568.895.990.408
UNITED KINGDOM	10.013.024.101.131
UNITED STATES	18.278.156.427.432
MULTILATERAL	**169.907.347.405.802**
A D B	84.871.062.387.963
E I B	983.942.939.551
I B R D	66.935.677.498.360
I D A	11.922.142.312.532
I D B	3.578.245.761.780
I F A D	664.992.961.459
N I B	951.283.544.157
EXPORT CREDIT	**101.200.169.287.483**
AUSTRALIA	7.569.245.111.791
AUSTRIA	4.647.233.374.274
BELGIUM	1.155.107.554.772
CANADA	2.089.741.963.298
CHINA. P.R. OF	739.887.128.156
DENMARK	632.023.755.804

www.peraturan.go.id

POSISI (OUTSTANDING) UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH RI PER JENIS PINJAMAN DAN NEGARA KREDITOR

PER 31 DESEMBER 2006

(Dalam Rupiah)

JENIS PINJAMAN / NEGARA	JUMLAH
BILATERAL	**287.136.406.710.175**
FINLAND	83.159.781.061
FRANCE	3.288.009.332.418
GERMANY, FED.REP. OF	13.381.974.970.937
HONG KONG	53.901.956.834
HUNGARY	10.391.962.746
ITALY	110.816.355.400
JAPAN	33.558.707.725.059
KOREA, REP. OF	1.561.716.983.904
MALAYSIA	101.504.695.644
NETHERLANDS	9.470.451.741.958
NORWAY	1.037.633.799.532
POLAND	348.092.495.916
SINGAPORE	898.239.216.434
SOUTH AFRICA	0
SPAIN	1.302.696.586.556
SWEDEN	389.349.956.072
SWITZERLAND	3.081.470.738.089
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)	119.495.927.210
UNITED KINGDOM	6.091.615.473.589
UNITED STATES	9.477.700.700.028
COMMERCIAL CREDIT	**560.782.401.960**
JAPAN	189.330.476.500
SINGAPORE	102.343.075.780
UNITED KINGDOM	269.108.840.660
LEASING	**627.075.045.295**
JAPAN	627.075.045.295
TOTAL	**559.431.780.850.715**

*) Kurs tengah (neraca) 31 Desember 2006

www.peraturan.go.id

PENERTIBAN REKENING PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

I. Rekening per Kementerian Negara/Lembaga Berdasarkan Pembahasan Bersama Per 28 Februari 2007

No.	BA	Kementerian Negara/ Lembaga	Temuan Tim BPK		Tambahan Rekening		Jumlah Keseluruhan	
			Rek.	Rupiah	Rek.	Rupiah	Rek.	Rupiah
1	5	MA	9	7.458.632.573			9	7.458.632.573
2	6	Kejaksaan Agung	7	259.470.869.920			7	259.470.869.920
3	10	Dalam Negeri	15	26.507.689.803			15	26.507.689.803
4	11	Luar Negeri	25	349.656.827.800			25	349.656.827.800
5	12	Pertahanan	136	1.847.307.813.167	3	182.263.006.692	139	2.029.570.819.859
6	13	Hukum dan HAM	82	49.481.656.414			82	49.481.656.414
7	15	Keuangan	260	1.126.893.034.668	1.062	8.475.614.274.217	1.322	9.602.507.308.885
8	18	Pertanian	6	1.162.241.530			6	1.162.241.530
9	19	Perindustrian	5	2.730.949.710			5	2.730.949.710
10	20	ESDM	217	67.323.857.072			217	67.323.857.072
11	22	Perhubungan	7	1.042.772.090			7	1.042.772.090
12	23	Diknas	15	4.150.481.637			15	4.150.481.637
13	24	Kesehatan	53	93.850.018.429			53	93.850.018.429
14	25	Agama	92	3.819.820.681.863	6	394.107.270.036	98	4.213.927.951.899
15	26	Depnakertrans	37	136.145.765.013	63	3.150.000.000	100	139.295.765.013
16	27	Sosial	9	11.780.959.618	1	3.500.000.000	10	15.280.959.618
17	29	Kehutanan	40	319.583.074.510			40	319.583.074.510
18	32	DKP	7	547.844.422			7	547.844.422
19	33	PU	7	443.940.693			7	443.940.693
20	40	Budpar	91	229.477.458			91	229.477.458
21	42	Menristek	1	1.705.711.430			1	1.705.711.430
22	43	Lingkungan Hidup	2	74.127.024			2	74.127.024
23	44	Koperasi & UKM	3	5.715.074.924			3	5.715.074.924
24	54	BPS	2	53.744.690			2	53.744.690
25	55	Bapenas	9	4.889.265.309			9	4.889.265.309
26	59	Kominfo	3	42.494.154			3	42.494.154
27	60	POLRI	123	224.978.739.341	1.034	64.056.000.045	1.157	289.034.739.386
28	79	LIPI	1	98.752.084			1	98.752.084
29	80	BATAN	2	169.333.114			2	169.333.114
30	81	BPPT	24	6.961.061.523			24	6.961.061.523
31	90	Perdagangan	2	481.614.657			2	481.614.657
32	92	Menpora	3	84.914.698			3	84.914.698
33	94	BRR	3	50.202.599.452			3	50.202.599.452
34		Otorita Batam	1	273.848.721			1	273.848.721
35		BP Migas	4	116.416.036.296			4	116.416.036.296
Jumlah			1.303	8.537.735.905.807	2.169	9.122.690.550.990	3.472	17.660.426.456.79

www.peraturan.go.id

II. Rekening Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah	Rupiah
1	11	Luar Negeri	2	218.226.187.421,10
2	12	Pertahanan	14	1.937.256.510.703
3	15	Keuangan	11	4.847.372.081
4	18	Pertanian	2	1.103.258.371
5	22	Perhubungan	5	348.393.736
6	23	Pendidikan Nasional	9	1.703.890.318
7	24	Kesehatan	2	2.361.160
8	25	Agama	8	37.816.142.409
9	26	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	9.294.346.494
10	27	Sosial	2	41.840.572
11	29	Kehutanan	12	6.345.776.725
12	32	Kelautan dan Perikanan	2	70.605.047
13	33	Kimpraswil (Pekerjaan Umum)	4	405.798.744
14	43	Lingkungan Hidup	2	74.127.024
15	44	Koperasi dan UKM	3	5.715.074.925
16	55	Bappenas	7	4.879.873.382
17	60	POLRI	1.078	98.119.153.257
18	90	Perdagangan	2	481.614.657
Jumlah			**1.173**	**2.326.732.327.027**

III. Rekening Bendahara Penerimaan pada Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Rek.	Jumlah Rupiah
1	12	Pertahanan	2	223.576.445
2	15	Keuangan	24	34.872.457.986
3	18	Pertanian	1	2.200.000
4	22	Perhubungan	2	694.378.354
5	24	Kesehatan	1	74.744.569.292
6	25	Agama	21	1.122.165.690.376
7	29	Kehutanan	6	298.362.709.712
Jumlah			**57**	**1.531.065.582.165**

www.peraturan.go.id

IV. Rekening Non Uang Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Rek.	Rupiah
1	10	Dalam Negeri	2	25.917.372.805
2	11	Luar Negeri	3	892.738.079
3	12	Pertahanan	7	30.019.041.400
4	15	Keuangan	5	60.286.093
5	19	Perindustrian	3	612.587.827
6	26	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	8.097.715
7	27	Sosial	1	120.473.339
8	32	Kelautan dan Perikanan	1	1.051.500
9	54	BPS	1	50.685.694
10	55	Bappenas	1	2.617.162
11	59	Komunikasi dan Informatika	2	37.278.243
12	60	POLRI	47	42.574.897.856
13	92	Pemuda dan Olah Raga	1	82.237.222
14		BP Migas	4	116.416.036.296
Jumlah			**79**	**216.795.401.231**

V. Rekening Escrow pada Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Rek.	Rupiah
1	15	Keuangan	5	301.580.265.819
Jumlah			**5**	**301.580.265.819**

VI. Rekening Jaminan pada Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Rek.	Rupiah
1	15	Keuangan	927	2.489.189.795.844
2	20	ESDM	207	34.458.161.055
3	26	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83	115.009.200.000
4	29	Kehutanan	4	2.754.737.585
Jumlah			**1.221**	**2.641.411.894.484**

www.peraturan.go.id

VII. Rekening Titipan pada Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Rek.	Rupiah
1	6	Kejaksaan Agung	6	258.103.630.990
2	12	Pertahanan	64	45.209.455.183
3	15	Keuangan	36	1.288.157.075.166
4	18	Pertanian	1	29.374.052
5	19	Perindustrian	1	346.841.179
6	20	ESDM	8	6.805.444.864
7	25	Agama	15	1.939.920.150.222
8	26	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	14.566.822.658
9	29	Kehutanan	5	2.991.402.668
10	32	Kelautan dan Perikanan	1	15.470.238
11	42	Riset dan Teknologi	1	1.705.711.430
12	55	Bappenas	1	6.774.764
13	60	POLRI	5	5.100.428.777
14	81	BPPT	22	6.200.367.822
15	92	Pemuda dan Olah Raga	2	2.677.476
16		Otorita Batam	1	273.848.721
Jumlah			**173**	**3.570.783.595.675**

VIII. Rekening Sumbangan dan Penerimaan Lain-lain

No.	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Rek.	Rupiah
1	5	Mahkamah Agung	9	7.458.632.573
2	6	Kejaksaan Agung	1	19.119.465
3	10	Dalam Negeri	3	168.781.884
4	11	Luar Negeri	20	130.537.902.300
5	12	Pertahanan	8	1.917.303.406
6	15	Keungan	17	670.946.016.039
7	18	Pertanian	1	18.530.340
8	19	Perindustrian	1	1.771.520.703
9	20	ESDM	1	21.060.251.153
10	23	Pendidikan Nasional	5	2.445.156.843
11	24	Kesehatan	3	13.092.264
12	25	Agama	31	1.067.666.160.442
13	26	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	417.298.146
14	27	Sosial	7	15.118.645.706
15	29	Kehutanan	12	9.098.456.083
16	32	Kelautan dan Perikanan	1	374.031.080
17	33	Kimpraswil (Pekerjaan Umum)	3	38.141.949
18	40	Kebudayaan dan Pariwisata	91	229.477.459
19	54	BPS	1	3.058.996
20	59	Kominfo	1	5.215.910
21	60	POLRI	27	143.240.259.497
22	79	LIPI	1	98.752.084
23	80	Badan Tenaga Nuklir Nasional	2	169.333.115
24	81	BPPT	2	760.693.702
25	94	BRR NAD-Nias	3	50.202.599.452
Jumlah			**256**	**2.123.779.865.068**

www.peraturan.go.id

IX. Rekening Kementerian Negara/Lembaga yang Tidak Jelas

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah	
		Rekening	Rupiah
1	Dalam Negeri	10	421.535.114
2	Pertahanan	44	14.944.932.723
3	Hukum dan HAM	82	49.481.656.415
4	Keuangan	3	7.224.987.543
5	Pertanian	1	8.878.767
6	ESDM	1	5.000.000.000
7	Kesehatan	47	19.089.995.713
8	Agama	23	46.359.808.450
9	Kehutanan	1	29.991.737
10	Kelautan dan Perikanan	2	86.686.557
Jumlah		214	142.648.473.019

X. Rekening yang Sudah Ditutup

No.	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Rek.	Rupiah
1	6	Kejaksaan Agung	1	1.329.000.000
2	10	Dalam Negeri	1	2.000.000
3	11	Luar Negeri	9	1.279.202.018
4	12	Pertahanan	13	14.160.429.147
5	13	Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	1.000.000
6	15	Keuangan	23	5,074.805.372.494
7	18	Pertanian	2	1.118.384.737
8	19	Perindustrian	1	1.771.520.703
9	20	Energi dan Sumber Daya Mineral	5	1.562.661.568
10	22	Perhubungan	2	185.545.568
11	23	Pendidikan Nasional	2	21.020.867
12	25	Agama	1	240.495.115.512
13	26	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	200.030.948
14	27	Sosial	2	62.813.580
15	29	Kehutanan	7	5.665.789.380
16	32	Kelautan dan Perikanan	2	70.605.048
17	33	Kimpraswil (Pekerjaan Umum)	1	1.526.345
18	43	Lingkungan Hidup	1	1.315.000
19	44	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	105.373.344
20	54	BPS	1	50.685.694
21	55	Bappenas	3	9.868.040
22	59	Komunikasi dan Informatika	1	5.215.910
23	81	BPPT	1	221.724.338
Jumlah			88	5,343.126.200.242

www.peraturan.go.id

DAFTAR REKENING YANG DITUTUP DAN MASUK KE REKENING BUN NO. 502.000000 TAHUN 2006

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo Terakhir	Tgl / No. Nota Kredit	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	600.502411	Pemindahbukuan ke Rek.BUN	USD279,934,195.10	02-01-06/15	(USD279,000,000.00) Rp.2.719.134.000.000,00	
	600.001411	Rekening valas (USD) Pemerintah dalam rangka EXIM JAPAN TSL 7 to Indonesia	USD141,479,243.25			Ekuivalen USD279,000,000.00 berasal dari penutupan Rek. No. 600.001411 dan 600.002411.
	600.002411	Sub BUN dalam USD untuk menampung setoran pihak ketiga	USD138,454,951.85			Saldo di Rek. 600.502411 : USD934,195.10
2.	519.000002	Menteri Keuangan : Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.490.833.880,83	04-04-06/102	38.586.135.575,48	Rp38.586.135.575,48 (BG.FB 345761) Rp904.698.305,35 (BG.FB 345759) masuk ke Rek. Pertamina sesuai S-2236/PB/2003 tgl 28-03-06
3.	0206-01-000018-30-0 BRI KCK Jakarta	Penampungan Cadangan Dana Resiko Kredit TRI	1.551.716.990,86	31-05-06/966	1.551.681.990,86	Sesuai S-3684/PB/2006 tgl 29-05-06 Dipotong Rp35.000 biaya transfer

www.peraturan.go.id

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo Terakhir	Tgl / No. Nota Kredit	Jumlah (Rp)	Keterangan
4.	555.000904	Dana untuk pembayaran berbagai kewajiban	92.496.361.848,66	07-07-06/195	92.496.361.848,66	Ditutup 07-07-06 BGFB 456526
5.	519.000114	Depkeu: Iuran Hak Pengusaha Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan	317.456.249,38	07-07-06/196	317.456.249,38	Ditutup 07-07-06 BGFB 456526
6.	519.000111	BUN setoran BULOG Hasil Penjualan Beras Pinjaman Luar Negeri dalam Rupiah	85.305.612.500,00	03-8-06/145	85.305.612.500,00	Dtutup tanggal 03-8-2006 sesuai dengan S-5570/PB/2006 tanggal 31/07/06
7.	2060103914460 7 BRI Kantor Pusat Jakarta	Dirjen Lembaga Keuangan: KUD APDI/PWIJA	28.066.908	07-08-06/207	28.066.908	ND.BV.097-KCK/PDJ/08/06 Tgl 04-08-06
8.	519.999001	Penerimaan Fee Penjaminan BPR	35.191.927.286,72	08-08-06/271	35.191.927.286,72	Ditutup 08-08-06 BGFB 456402 sesuai S-5794/PB/2006 tgl 08-08-06
9.	227090101 Bukopin, Kantor Pusat	Rekening Induk KRD Peralatan KUD	34.327.908	14-08-06/408	34.327.908	Sisa dana rek. tutup untuk peralatan KUD (561.000920)
10.	0206-01-001905-30-6 BRI Jl. Jend Sudirman	Escrow Ditjen Perbendaharaan: Beras Bulog 2002	174.622.493.098	01-09-06/39	174.622.468.098	Sesuai S-5809/PB/2006 Tgl 09-08-06 Dipotong Rp50.000 biaya transfer
11.	070-00-0012505-9 Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri 070-00-0116856-1 Bank Mandiri cab. Jakarta	Menkeu DJA Dana Reboisasi Menkeu- Jasa Giro Cadangan Reboisasi	4.001,17	01-09-06/53	4.001,17	Sesuai S-6000/PB/2006

www.peraturan.go.id

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo Terakhir	Tgl / No. Nota Kredit	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Plaza Mandiri					
12.	0206-02-000228-30-9 BRI Jl. Jend Sudirman	The Ministry of Finance-of Escrow Menkeu PL-480	(USD7,248,103.59)	04-09-06/101	65.383.887.166,50	Sesuai S-5809/PB/2006 masuk ke BUN sebesar USD7,240,740.55
13.	0206-02-000356-30-6 BRI Jl. Jend Sudirman	Escrow Menkeu cq. Ditjen Perbendaharaan	USD6,098,081.66	04-09-06/102	54.995.777.333,70	Sesuai S-5809/PB/2006 tgl 09-8-06 masuk BUN sebesar USD6,090,340.79
14.	510.000149	Ditjen Lembaga Keuangan qq Subsidi Bunga bagi BDU swanas & BPD a/ Pemb. KIK/KMKP dlm rangka SEDP-3	992.035.449,62	08-09-06/242	992.035.449,62	Ditutup tgl 08-08-06 BGFB 456501 sesuai S-6518/PB/2006 tgl 08-09-06
15.	555.000212	Depkeu Rekening CAP	1.730.000.000.000	05-12-06/123	1.730.000.000.000	BGBI No. FB466651 tgl 05-12-06
16.	0090250030 BSM Jakarta Thamrin	Jasa Giro qq Dana Moratorium		26-12-06/553	48.396.758.134,09	
17.	600.001411 600.002411	Rekening valas (USD) Pemerintah dalam rangka EXIM JAPAN TSL 7 to Indonesia Sub BUN dalam USD untuk menampung setoran pihak ketiga		29-12-06/985	8.426.439.802	
		JUMLAH			5.055.462.940.252,18	

www.peraturan.go.id

RINCIAN ARUS KAS DARI PENDAPATAN ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2006	2005
I. PERBANKAN	**3.789.939.697.731,38**	**3.795.322.827.630,00**
1. PT Bank Mandiri	207.942.000.000,00	986.944.000.000,00
2. PT Bank Negara Indonesia	701.101.724.450,00	1.554.244.848.025,00
3. PT Bank Rakyat Indonesia	1.093.260.000.000,00	1.070.510.000.000,00
4. PT Bank Tabungan Negara	152.844.245.737,00	92.536.037.143,00
5. PT Bank Ekspor Indonesia	87.222.372.184,00	91.087.942.462,00
6. PT Bank Bukopin	25.098.593.852,38	
7. Bank Indonesia	1.522.470.761.508,00	
II. ASURANSI	**431.960.687.705,00**	**248.268.731.170,00**
1. PT Asuransi Jiwasraya	0,00	11.451.178.000,00
2. PT Jasindo	13.207.472.000,00	12.435.700.000,00
3. PT Askes	54.434.420.641,00	36.576.588.400,00
4. PT Jamsostek	220.367.995.064,00	105.266.064.770,00
5. PT ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia)	8.474.000.000,00	12.697.400.000,00
6. PT Asuransi Jasa Raharja	117.801.700.000,00	69.841.800.000,00
7. PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia)	17.675.100.000,00	
III. PEMBIAYAAN	**97.155.000.000,00**	**96.328.604.000,00**
1. PT PNM (Permodalan Nasional Madani	20.290.000.000,00	29.347.200.000,00
2. Perum Pegadaian	68.835.000.000,00	58.501.404.000,00
3. Perum SPU (Sarana Pengembangan Usaha)	8.030.000.000,00	8.480.000.000,00
IV. JASA KONSTRUKSI	**66.376.891.209,05**	**107.186.967.448,08**
1. PT Adhi Karya	11.921.644.370,40	17.973.797.655,00
2. PT Waskita Karya	14.106.185.000,00	20.978.483.000,00
3. PT Hutama Karya	6.328.229.280,00	25.392.392.033,00
4. PT Nindya Karya	909.000.000,00	2.480.435.114,00
5. PT Pembangunan Perumahan	16.092.925.377,93	13.788.241.646,08
6. PT Wijaya Karya	16.770.489.000,00	26.573.618.000,00
7. PT Virama Karya	248.418.180,72	
V. PENUNJANG KONSTRUKSI	**94.024.195.657,64**	**94.534.762.500,00**
1. PT Jasa Marga	94.024.195.657,64	94.534.762.500,00
VI. JASA PENILAI	**11.826.514.560,00**	**7.882.786.400,00**
1. PT Surveyor Indonesia	8.536.514.560,00	4.955.686.400,00
2. PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)	3.290.000.000,00	2.927.100.000,00
VII. JASA LAINNYA	**191.270.967.655,00**	**40.359.228.139,00**
1. Perum Jasa Tirta I	546.940.000,00	427.000.000,00
2. Perum Jasa Tirta II	2.180.780.000,00	488.000.000,00
3. PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset)	188.543.247.655,00	39.444.228.139,00

www.peraturan.go.id

RINCIAN ARUS KAS DARI PENDAPATAN ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2006	2005
VIII. PELABUHAN	**351.096.228.830,00**	**238.113.099.000,00**
1. PT Pelabuhan Indonesia I	29.735.000.000,00	20.473.500.000,00
2. PT Pelabuhan Indonesia II	210.013.062.905,00	126.127.000.000,00
3. PT Pelabuhan Indonesia III	102.529.165.925,00	85.060.000.000,00
4. PT Pelabuhan Indonesia IV	8.819.000.000,00	6.452.599.000,00
IX. KEBANDARUDARAAN	**111.085.532.400,00**	**213.128.298.000,00**
1. PT Angkasa Pura I	66.972.889.400,00	80.363.298.000,00
2. PT Angkasa Pura II	44.112.643.000,00	132.765.000.000,00
X. LOGISTIK	**3.694.000.000,00**	**2.767.134.690,81**
1. PT BGR (Bhanda Ghara Reksa)	3.694.000.000,00	2.767.134.690,81
XI. JASA PERDAGANGAN	**1.451.048.000,00**	**1.132.653.027,00**
1. PT Sarinah	1.451.048.000,00	1.132.653.027,00
XII. INDUSTRI FARMASI	**30.871.213.972,00**	**56.239.150.646,00**
1. PT Kimia Farma	14.267.928.472,00	20.876.768.846,00
2. PT Bio Farma	16.603.285.500,00	35.362.381.800,00
XIII. PARIWISATA	**11.153.694.104,00**	**10.042.643.542,00**
1. PT Pengembangan Priwisata Bali	11.153.694.104,00	8.677.944.627,00
2. PT TWC Borobudur	0,00	1.364.698.915,00
XIV. KAWASAN INDUSTRI	**8.736.732.623,39**	**9.052.407.465,00**
1. PT Kawasan Berikat Nusantara	7.880.994.671,41	7.835.869.823,00
2. PT Kawasan Industri Makasar	364.745.438,98	972.024.239,00
3. PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	30.000.000,00	244.513.403,00
4. PT Kawasan Industri Medan	460.992.513,00	
XV. DOK DAN PERKAPALAN	**1.000.000.000,00**	**6.241.400.000,00**
1. PT PAL Indonesia	1.000.000.000,00	6.241.400.000,00
XVI. PERKEBUNAN	**304.839.603.991,00**	**224.978.155.675,00**
1. Perkebunan Nusantara III	83.374.591.000,00	77.823.068.126,00
2. Perkebuann Nusantara IV	77.430.285.005,00	70.105.269.236,00
3. Perkebunan Nusantara V	29.361.243.250,00	30.054.851.750,00
4. Perkebunan Nusantara VI	447.501.812,00	233.000.000,00
5. Perkebunan Nusantara VII	25.230.183.724,00	21.750.000.000,00
6. Perkebunan Nusantara VIII	8.013.857.900,00	3.679.000.000,00
7. Perkebunan Nusantara X	21.747.546.900,00	5.970.000.000,00
8. Perkebuann Nusantara XI	43.242.289.800,00	3.434.635.756,00
9. Perkebunan Nusantara XII	6.859.098.000,00	4.026.314.607,00
10. Perkebunan Nusantara XIII	9.133.006.600,00	7.902.016.200,00

www.peraturan.go.id

RINCIAN ARUS KAS DARI PENDAPATAN ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2006	2005
XVII. PERTANIAN	908.347.000,00	373.106.536,00
1. PT Sang Hyang Seri	908.347.000,00	373.106.536,00
XVIII. PUPUK	193.107.761.905,00	92.763.364.065,00
1. PT Pupuk Sriwidjaya	131.203.000.000,00	87.698.454.000,00
2. PT ASEAN Bintulu Fertilizer	61.904.761.905,00	5.064.910.065,00
XIX. PERCETAKAN & PENERBITAN	34.642.320.107,00	21.124.444.859,00
1. Perum Peruri	34.642.320.107,00	19.500.000.000,00
2. Perum Percetakan Negara RI	0,00	1.624.444.859,00
XX. PERTAMBANGAN	219.060.547.381,00	209.879.900.000,00
1. PT Aneka Tambang	186.067.847.381,00	159.315.200.000,00
2. PT Timah	32.992.700.000,00	50.564.700.000,00
XXI. ENERGI	436.688.312.932,98	269.400.881.304,00
1. Perusahaan Gas Negara	281.755.203.032,77	138.355.677.241,00
2. PT Bukit Asam	154.933.109.900,21	131.045.204.063,00
XXII. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	7.286.543.630,00	13.206.555.031,00
1. PT Industri Telekomunikasi Indonesia	7.228.489.000,00	13.071.000.000,00
2. PT Batan Teknologi	58.054.630,00	135.555.031,00
XXIII. BAJA & KONSTRUKSI BAJA	94.798.000.000,00	100.000.000.000,00
1. PT Krakatau Steel	94.798.000.000,00	100.000.000.000,00
XXIV. TELEKOMUNIKASI	2.760.736.235.930,00	1.495.456.847.110,00
1. PT Telkom	2.760.736.235.930,00	1.495.456.847.110,00
XXV. INDUSTRI PERTAHANAN	6.352.168.550,00	2.000.000.000,00
1. PT Dahana	6.352.168.550,00	2.000.000.000,00
XXVI. SEMEN	139.481.286.672,00	94.174.421.508,00
1. PT Semen Gresik	134.061.790.672,00	92.934.421.508,00
2. PT Semen Baturaja	5.419.496.000,00	1.240.000.000,00
XXVII. USAHA ANEKA INDUSTRI	0,00	703.000.000,00
1. PT Garam		703.000.000,00
XXVIII. BUMN DENGAN SAHAM MINORITAS	1.501.325.032.055,85	1.347.410.024.104,00
1. PT Bank Bukopin	0,00	22.865.141.297,00
2. PT Asuransi Kredit Indonesia	0,00	18.435.825.000,00
3. PT Rekayasa Industri	0,00	898.975.000,00
4. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2.168.829.275,85	1.774.912.567,00
5. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	0,00	3.858.456.150,00
6. PT Socfin Indonesia	31.781.365.300,00	7.125.074.700,00

www.peraturan.go.id

RINCIAN ARUS KAS DARI PENDAPATAN ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2005
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2006	2005
7. PT Indosat	0,00	119.778.873.750,00
8. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	825.682.160,00	609.210.240,00
9. PT Freeport Indonesia	1.466.549.155.320,00	1.172.063.555.400,00
XXVIII. BUMN YANG BELUM TERIDENTIFIKASI	121.247.624.720,88	24.379.391.698,00
XXIX. PERTAMINA	11.950.940.045.643,00	4.000.000.000.000,00
Jumlah Laba BUMN	22.973.056.234.957,20	12.822.450.785.547,90
DIVIDEN TAHUN BUKU SEBELUMNYA		4.631.846.768,00
DENDA BUNGA TAHUN BUKU 2005		4.690.215.819,51
DENDA BUNGA TAHUN BUKU SEBELUMNYA		3.384.921.451,86
DIVIDEN TAHUN ANGGARAN 2006	22.973.056.234.957,20	12.835.157.769.587,30

www.peraturan.go.id

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA TAHUN 2006

I. Pendahuluan

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) ini disusun untuk memenuhi amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara. Dalam pasal 16 UU dimaksud, disebutkan bahwa:

(1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2006 dan berakhir 31 Desember 2006, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

II. Portofolio SUN

Surat Utang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Tujuan penerbitan SUN ialah untuk: (1) membiayai defisit APBN, (2) menutup kekurangan kas jangka pendek, dan (3) mengelola portofolio utang negara.

A. Jenis SUN

Secara umum SUN dapat dibedakan atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sampai akhir tahun 2006, Pemerintah baru menerbitkan ON dan belum pernah menerbitkan SPN. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap dan ON dengan tingkat bunga mengambang.

1. Obligasi Negara Berdenominasi Rupiah

Obligasi negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* - FR dan ORI)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik. Sebelum tahun 2006, obligasi berbunga tetap hanya didominasi obligasi seri FR (Fixed Rate) yang kuponnya dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annual*). Namun pada tahun 2006, tepatnya bulan Agustus 2006, Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi berbunga tetap untuk investor ritel yang disingkat ORI - Obligasi Negara Ritel Indonesia. Berbeda dengan obligasi seri FR, kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). Penerbitan ORI secara khusus akan dijelaskan pada bagian lainnya.
Berdasarkan posisi akhir tahun 2006, terdapat 34 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 9,25% (FR0041, jatuh tempo 15 Nopember 2008) sampai 15,575% (FR0014, jatuh

www.peraturan.go.id

tempo 15 Nopember 2010), dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2007 sampai 2026. Selain itu terdapat satu seri ORI, yaitu ORI001, dengan tingkat kupon 12,05% yang akan jatuh tempo tahun 2009. Baik obligasi jenis FR maupun ORI, dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

b. **Obligasi berbunga mengambang (*variable rate bonds* - VR)**

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2006, terdapat 21 seri VR yang masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2007 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

c. **Surat utang kepada BI (SU)**

Dalam rangka program penjaminan perbankan dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), pada tahun 1998 dan 1999 Pemerintah menerbitkan empat seri SU, yaitu SU-001, SU-002, SU-003 dan SU-004, dengan total nominal sebesar Rp218,3 triliun. SU-001 dan SU-003 merupakan SU yang diterbitkan dalam rangka BLBI yang dikucurkan oleh Bank Indonesia saat krisis moneter tahun 1998/1999. SU-002 merupakan penyertaan modal negara pada Bank Ekspor Impor Indonesia. Sementara SU-004 merupakan surat utang yang diterbitkan dalam rangka program penjaminan Pemerintah.
Sesuai dengan *terms & conditions* awalnya, Obligasi jenis ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 3% yang diperhitungkan atas pokok yang diindeks berdasarkan inflasi. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Sementara pokok utang diamortisasi (dicicil) setiap enam bulan sekali secara proporsional atas dasar pokok yang telah diindeks. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga, dan dimulai setelah masa tenggang (*grace period*) berakhir.
Sebagai bagian dari penyelesaian BLBI, Pemerintah dan BI telah sepakat untuk mengganti SU-001 dan SU-003 dengan menerbitkan surat utang jenis baru yaitu SRBI (*Special Rate Bank Indonesia*) pada tanggal 7 Agustus 2003 dengan seri SRBI-01/MK/2003. Sementara untuk SU-002 dan SU-004, pada tahun 2006 Pemerintah bersama BI telah menyepakati restrukturisasi *terms and condition*-nya. Secara umum, klausul indeksasi pokok SU-002 dan SU-004 terhadap inflasi telah dihapus, tingkat bunga SU-002 diturunkan menjadi 1% per tahun, jatuh tempo cicilan terakhir diperpanjang sampai tahun 2025, dan diterbitkan SU-007 untuk membayar tunggakan bunga SU-002 dan SU-004 serta perhitungan indeksasi sampai akhir tahun 2005. Penjelasan rinci mengenai hasil restrukturisasi SU akan dijelaskan secara terpisah pada bagian lain.
Selain SU-001, SU-002, SU-003 dan SU-004, Pemerintah juga menerbitkan SU-005 untuk pembiayaan kredit program. Obligasi ini jatuh tempo tahun 2009, dan memiliki tingkat kupon yang ditetapkan berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 3 bulan. SU-005 memiliki plafon sebesar Rp9,97 triliun, namun demikian jumlah realisasi yang menjadi utang pemerintah hanyalah jumlah dana yang sudah disalurkan dalam rangka pembiayaan beberapa skim kredit program, yang per posisi akhir tahun 2006 berjumlah Rp2,71 triliun.
Pada tanggal 6 September 2001, Pemerintah juga telah menerbitkan SU-006 sebesar nominal Rp40.000.000.000.000. Jumlah nominal atas SU-006 ini merupakan jumlah maksimum yang dapat ditarik oleh Pemerintah yang digunakan untuk program penjaminan perbankan, sehingga baru akan efektif menjadi utang jika memang sudah ditarik. Sampai 31 Desember 2006 Pemerintah belum menarik sama sekali, sehingga nilai utang Pemerintah atas SU-006 per tanggal 31 Desember 2006 adalah nol.

d. **SRBI (Special Rate Bank Indonesia)**

SRBI, yang lengkapnya SRBI-01/MK/2003, adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka penyelesaian bantuan likuiditas BI. Nilai nominal penerbitan SRBI adalah sebesar Rp144.536.094.294.530,00 atau sama dengan jumlah nominal SU-001 dan SU-003. SRBI

www.peraturan.go.id

jatuh tempo tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1% setahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Pada tahun 2006, berdasarkan hasil audit BPK, rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia lebih dari 10%, sehingga pada tahun 2006 Bank Indonesia menggunakan kelebihan tersebut untuk mengurangi saldo SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1,52 triliun.

2. Obligasi Negara Berdenominasi Mata Uang Asing

Pada bulan Maret 2006, Pemerintah menerbitkan ON berdenominasi USD (Dollar Amerika), yaitu INDO-17 dan reopening INDO-35 dengan total nominal penerbitan sebesar USD2.000.000.000. INDO-17 diterbitkan dengan nilai nominal USD1.000.000.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2017 dengan tingkat kupon tetap sebesar 6,875% setahun. Sementara INDO-35 diterbitkan kembali (*reopening*) dengan nominal sebesar USD1.000.000.000. INDO-35 memiliki kupon 8,5% dan jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2035. Seluruh seri ON berdenominasi USD di atas dapat diperdagangkan/ diperjualbelikan. Penjelasan rinci penerbitan SUN valas tahun 2006 dibahas pada bagian lain.

B. Saldo SUN dan Perubahannya

Surat Utang Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Posisi SUN per 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006 masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun ringkasan perubahan posisi SUN tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Ringkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2006

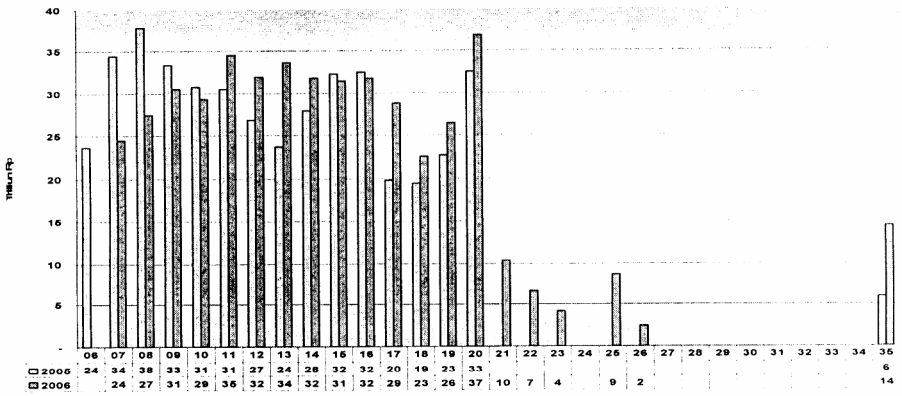
Obligasi Negara	31 Desember 2005 (Juta Rp)	31 Desember 2006 (Juta Rp)	Selisih (Juta Rp)
Seri Fixed Rate	189.156.022	238.564.501	49.408.479
Seri Variable Rate	210.683.330	180.186.698	-30.496.632
SU	114.295.416	131.353.131	17.057.715
SRBI	144.536.094	143.013.623	-1.522.471
Obl. internasional (USD)	*3.500.000.000*	*5.500.000.000*	*2.000.000.000*
Obligasi internasional*	34.405.000	49.610.000	15.205.000
Total	693.075.862	742.727.954	49.652.091

*Kurs pada tanggal 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp9.830/USD dan Rp9.020/USD.

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SUN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SUN berbunga mengambang (VR). Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi fixed rate bonds dalam portofolio SUN.

Mengacu pada perubahan yang terjadi, maka perbandingan struktur jatuh tempo pokok SUN yang dapat diperdagangkan (*tradable bonds*), pada akhir tahun 2005 dan akhir tahun 2006 adalah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id



Grafik 33: Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN yang Dapat Diperdagangkan

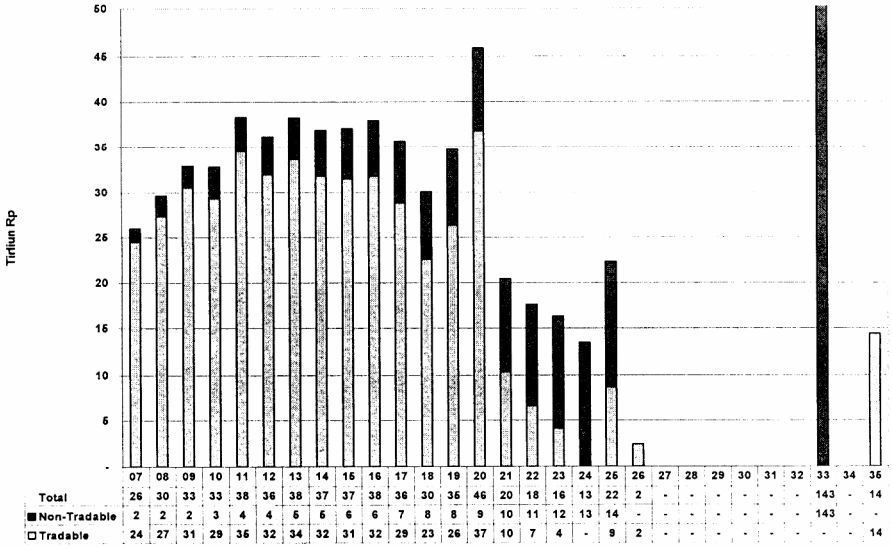
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah berupaya untuk mengurangi risiko refinancing khususnya dalam waktu tiga tahun ke depan. SUN tradable yang jatuh tempo tahun 2007, 2008 dan 2009 berdasarkan posisi 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp105,56 triliun, sementara berdasarkan posisi 31 Desember 2006, SUN tradable yang jatuh tempo pada periode yang sama jumlahnya turun menjadi Rp82,46 triliun, atau terdapat penurunan sebesar Rp23,10 triliun. Ini menunjukkan adanya upaya sistematis dan terencana, untuk menggeser porsi SUN yang jatuh tempo tahun 2007 - 2009 ke tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan struktur jatuh tempo yang lebih merata dan lebih *sustainable* sehingga tidak ada tekanan fiskal pada tahun tertentu. Struktur jatuh tempo utang Pemerintah yang ideal ialah yang sesuai dengan daya dukung fiskal setiap tahunnya. Jadi, pada tahun-tahun dimana penerimaan negara diperkirakan meningkat, maka tahun-tahun itu memperoleh porsi jatuh tempo utang yang lebih besar, demikian juga sebaliknya. Namun demikian, mengingat sangat sulit memperkirakan penerimaan Pemerintah dalam jangka panjang, maka dalam rangka *prudent debt management* dapat diasumsikan struktur jatuh tempo yang baik ialah yang *smooth* (merata) dengan kecenderungan sedikit *upward sloping*, dan dalam jumlah yang tidak terlampau tinggi setiap tahunnya. Saat ini Pemerintah memperkirakan jumlah jatuh tempo pokok (belum termasuk bunga) sebesar Rp35 triliun sampai Rp40 triliun setiap tahunnya sudah cukup tinggi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menurunkannya. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan pembelian kembali *(buyback)*, pertukaran *(debt switching)* dan lain sebagainya.

Adapun struktur jatuh tempo SUN secara keseluruhan, termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan, pada posisi akhir tahun 2006 adalah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006 (*Audited*)



	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Total	26	30	33	33	38	36	38	37	37	38	36	30	35	46	20	18	16	13	22	2	-	-	-	-	-	-	143	-	14
■ Non-Tradable	2	2	2	3	4	4	5	6	6	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	-	-	-	-	-	-	-	143	-	-
□ Tradable	24	27	31	29	35	32	34	32	31	32	29	23	26	37	10	7	4	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	14

Grafik 34: Perbandingan Struktur Jatuh Tempo SUN 31 Desember 2006

Secara umum, struktur jatuh tempo SUN secara keseluruhan menunjukkan struktur yang upward sloping di *short-term*, merata di *medium-term*, dan *downward sloping* di *long-end*. Struktur ini cukup baik, paling tidak untuk jangka pendek, karena risiko refinancing untuk jangka pendek relatif rendah. Pemerintah akan terus berupaya melakukan restrukturisasi profil jatuh tempo SUN secara keseluruhan baik melalui *debt switching*, *regular issuance*, maupun *cash buyback*.

Pada sebagian besar SUN yang tidak dapat diperdagangkan, *terms and condition*-nya memiliki opsi pelunasan pokok dengan tunai atau dengan menerbitkan SUN baru yang dapat diperdagangkan, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi Pemerintah. *Spike* yang terjadi pada tahun 2033 (Rp143 triliun), adalah SUN seri SRBI-01 yang dapat diperpanjang saat jatuh tempo, dan pelunasannya bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan setiap tahun, apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10% (lihat penjelasan mengenai SRBI-01 pada bagian sebelumnya).

III. Kegiatan Pengelolaan SUN Tahun 2006

Kegiatan pengelolaan SUN meliputi penerbitan SUN, pelunasan pokok dan pembelian kembali, pertukaran obligasi, pembayaran bunga dan biaya lainnya, pengelolaan portofolio dan risiko, pengembangan produk dan infrastruktur SUN, serta kegiatan lainnya seperti restrukturisasi utang kepada Bank Indonesia.

A. Penerbitan SUN

Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan SUN neto dalam APBN 2006 sebesar Rp35.771.320.000.000,00. SUN neto sebesar Rp35.771.320.000.000,00 artinya Pemerintah memperoleh fleksibilitas untuk menerbitkan SUN dalam jumlah berapa pun dan membeli kembali SUN dalam jumlah berapapun, sepanjang jumlah netonya (termasuk yang jatuh tempo) tidak melampaui Rp35.771.320.000.000,00. Sepanjang tahun 2006, Pemerintah telah menerbitkan SUN baik dalam denominasi Rupiah maupun dalam denominasi valas. Penerbitan dilakukan baik melalui lelang, maupun *bookbuilding*.

www.peraturan.go.id

1. **Penerbitan SUN Berdenominasi Rp Melalui Lelang**

   Sepanjang tahun 2006, Pemerintah telah melakukan lelang penerbitan ON berdenominasi Rupiah sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang diselenggarakan setiap bulan, mulai bulan Januari sampai Oktober. *Oversubscription*, yaitu jumlah bids yang masuk dibandingkan dengan jumlah target awal yang diumumkan, berkisar dari 1,1 kali (tahun sebelumnya 1 kali) sampai 7,7 kali (tahun sebelumnya 6,2 kali) dengan rata-rata 3,5 kali (tahun sebelumnya 2,6 kali). Hal ini merupakan salah satu indikator semakin tingginya kepercayaan investor terhadap SUN.
   Total nilai nominal ON berdenominasi Rupian yang diterbitkan Pemerintah tahun 2006 melalui lelang mencapai Rp39.295.000.000.000,00, dengan kupon berkisar antara 9,25% sampai 12,90% (tahun sebelumnya berkisar antara 9,5% sampai 15%), dan waktu jatuh temponya bervariasi dari tahun 2008 sampai tahun 2026 (tahun sebelumnya jatuh temponya dari tahun 2007 sampai 2020).
   Berdasarkan statistik singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2006 Pemerintah berhasil menerbitkan ON secara lelang dengan *cost* yang lebih rendah, dengan jatuh tempo yang lebih panjang dan dengan animo investor yang lebih tinggi. Detail realisasi penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2006 dapat dilihat pada Lampiran 3.

2. **Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)**

   Pada tanggal 9 Agustus 2006, untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara berbasis ritel, atau disebut sebagai Obligasi Negara Ritel (ORI) dengan seri ORI-001. ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. Penerbitan ORI-001 merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2005 - 2009 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 447/KMK.06/2005.
   Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana.
   ORI001 jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2009 atau memiliki umur 3 tahun, tingkat kuponnya 12,05% yang dibayar bulanan, dan dapat diperjualbelikan. ORI001 diterbitkan dengan metode *bookbuilding*, melalui Agen Penjual baik bank maupun perusahaan sekuritas. ORI001 dapat dibeli dengan kelipatan Rp5.000.000,00 dengan minimum pemesanan Rp5.000.000,00. Pada saat penerbitan, ORI001 ditargetkan mampu terjual sebesar Rp2 triliun. Namun hasil *bookbuilding* menunjukkan animo masyarakat yang sangat besar, dimana jumlah keseluruhan pemesananan mencapai Rp3.283.650.000.000,00 atau 164% dari target semula. Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan keseluruhan Rp3.283.650.000.000,00, dengan pertimbangan:
   - perlunya menjaga *confidence* dari investor ritel yang telah menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, dan
   - perlunya mengurangi tekanan untuk menerbitkan obligasi negara reguler.

3. **Penerbitan SUN Berdenominasi USD**

   Untuk memenuhi target pembiayaan SUN neto tahun 2006 sebesar Rp35,77 triliun, Pemerintah berupaya sedapat mungkin memenuhinya dengan melakukan penerbitan SUN berdenominasi Rupiah. Hal ini juga sejalan dengan strategi Pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Pengelolaan Utang Negara tahun 2005 - 2009 yang mengutamakan utang dalam mata uang Rupiah dan mengurangi utang dalam valuta asing.

www.peraturan.go.id

Namun demikian, mengingat daya serap pasar SUN Rupiah yang sedang tumbuh dan masih terbatas, maka sebagian pemenuhan target pembiayaan SUN neto tahun 2006 dilakukan melalui penerbitan SUN berdenominasi USD (International Bonds). Penerbitan international bonds ini juga dilakukan untuk menjaga kontinuitas *supply* di pasar internasional agar tercipta benchmark USD *bonds* yang likuid.
Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi pasar obligasi dalam negeri, kebutuhan pembentukan *benchmark* Indonesian USD *bonds*, kebutuhan untuk meningkatkan cadangan devisa negara dalam valas, kebutuhan untuk membayar kewajiban valas lainnya yang jatuh tempo, dan peningkatan risiko yang akan dihadapi dari penerbitan SUN berdenominasi valas, Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan SUN berdenominasi USD.
Penerbitan SUN berdenominasi USD dilakukan dua kali, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober. Secara rinci, informasi mengenai penerbitan SUN berdenominasi USD tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Penerbitan SUN Berdenominasi Valas Tahun 2006

Item	Maret 2006 (Dual Tranches)	
Seri	INDO-17	INDO-35
Tanggal Penerbitan	9 Maret 2006	9 Maret 2006
Tanggal Jatuh Tempo	9 Maret 2017	12 Oktober 2035
Nominal (USD)	1.000.000.000	1.000.000.000
Kupon	6,875%	8,500%
Clean Price (%)	99,052	113,454
Clean Proceeds (USD)	990.520.000	1.134.540.000
Underwriter's Fee	10 bps dari clean proceeds	10 bps dari clean proceeds
Underwriter's Fee (USD)	990.520	1.134.540
Underwriter's Out of Pocket Expenses/OPE (USD)	470.000	
Joint Lead Managers	Barclays Capital, JPMorgan, UBS Investment Bank	
Listing	Singapore Exchange Securities Trading Limited	
Rating		
- Standard and Poors	B+	
- Fitch	BB-	
- Moody's	B2	

B. Pelunasan Pokok dan Pembelian Kembali

Pokok SUN dapat berkurang melalui pelunasan baik sebelum jatuh tempo, maupun saat jatuh tempo. Sepanjang tahun 2006, nominal SUN telah berkurang sebanyak Rp56,37 triliun, yang terdiri dari: (i) pelunasan SUN jatuh tempo sebesar Rp25,14 triliun, (ii) pelunasan SUN dalam rangka *debt switching* sebesar Rp31,18 triliun, dan (iii) pelunasan SUN dalam rangka divestasi BPD sebesar Rp47,29 miliar.

1. Pelunasan SUN Jatuh Tempo

Seluruh SUN yang jatuh tempo tahun 2006 dibayar tepat pada waktunya secara tunai. Seri-seri SUN yang jatuh tempo tahun 2006 dan jumlahnya ialah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Tabel 20
SUN Jatuh Tempo Tahun 2006

Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal
FR0004	15 Februari 2006	13.317.430.000.000
VR0009	25 Maret 2006	3.226.672.000.000
VR0010	25 Oktober 2006	7.075.410.000.000
SRBI-01	Eff. 1 Januari 2006	1.522.470.761.508
Total		**25.141.982.761.508**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Pada tahun 2006, berdasarkan hasil audit BPK, rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia lebih dari 10%, sehingga pada tahun 2006 kelebihan tersebut digunakan untuk mengurangi saldo SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1,52 triliun. Pelunasan ini efektif terhitung sejak 1 Januari 2006.

2. Pelunasan SUN Melalui Pertukaran Obligasi (*Debt Switching*)

Pertukaran obligasi atau *debt switching* umumnya dilakukan dengan dua alasan utama, yaitu: (i) memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN (oleh karena itu sering juga disebut sebagai *debt reprofiling*), dan (ii) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SUN, yaitu dengan menarik obligasi yang tidak likuid *(off-the-run bonds)* dan menggantinya dengan obligasi yang lebih likuid *(on-the-run bonds)*. Pada tahun 2006, Pemerintah telah melakukan *debt switching* melalui lelang sebanyak 12, dengan nilai nominal total sebesar Rp31.179.000.000.000,00. Seri-seri SUN yang ditarik diutamakan pada SUN yang jatuh tempo antara 2007 sampai dengan 2011 dengan pertimbangan untuk menurunkan *refinancing risk* periode tersebut. Sementara SUN yang diterbitkan bervariasi, dari SUN yang jatuh temponya 2011 sampai yang jatuh temponya tahun 2025. Program *debt switching* ini, selain menurunkan *refinancing risk*, juga menurunkan *interest rate risk*, mengingat kurang lebih 65% SUN yang ditarik merupakan SUN seri Variable Rate (VR). *Debt switching* dilakukan dengan metode lelang, dimana harga SUN pengganti yang diterbitkan, telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga investor hanya menyampaikan penawaran harga atas seri-seri SUN yang akan ditukar. Mengingat transaksi penukaran dilakukan secara *one-to-one* (jumlah unit yang ditarik sama dengan yang diterbitkan), maka tidak ada dampak langsung terhadap *net additional debt*; selisih harga diselesaikan secara tunai. Rincian seri-seri yang ditukar dapat dilihat pada Lampiran 4.

3. Pelunasan SUN dalam Rangka Divestasi BPD

Pelunasan ON melalui program divestasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tanggal 18 desember 2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi. Sebagai kelanjutan dari program yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2006 Pemerintah melakukan divestasi terhadap kepemilikan Pemerintah pada BPD Aceh dengan nilai nominal sebesar Rp47.291.000.000,00. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2006, dari 12 BPD yang direkapitalisasi, masih terdapat satu BPD yang belum didivestasi yaitu BPD Maluku.

C. Pembayaran Bunga dan Biaya Penerbitan

Pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN meliputi: (i) bunga dan biaya penerbitan SUN Rupiah, dan (ii) bunga dan biaya penerbitan SUN valas.

1. Bunga dan Biaya Penerbitan SUN Berdenominasi Rupiah

Pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2006 secara total mencapai Rp54.055.077.540.791,00. Secara rinci, pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN terdiri dari berbagai komponen sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Pembayaran bunga SUN domestik	Rp 52.854.986.173.285
Discount SUN	1.089.101.198.600
Loss on bonds redemption	649.996.307.563
Pembayaran biaya/kewajiban lainnya	18.459.528.900
Premium SUN	(488.906.373.000)
Gain on bonds redemption	51.575.792.275
Pengembalian *discount*	16.094.015.288
Pengembalian bunga	889.486.994
Total	**Rp54.055.077.540.791**

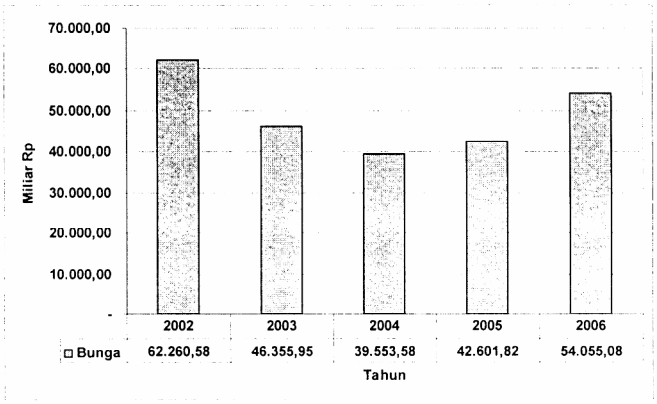
Gain on bonds redemption atau *loss on bonds redemption* adalah kenaikan atau penurunan ekuitas yang terjadi akibat perbedaan jumlah kas yang dibayar Pemerintah dengan nilai nominal SUN dalam transaksi pembelian kembali SUN sebelum jatuh tempo, baik melalui *cash buyback* maupun *debt switching*. *Gain on bonds redemption* timbul akibat lebih kecilnya cash yang dibayar oleh Pemerintah dibandingkan dengan nilai buku SUN yang dibeli. Sebagai contoh, Obligasi Negara yang saat terbit harganya 100 (par), kemudian setelah beberapa tahun kemudian dibeli kembali oleh Pemerintah pada harga 90, maka terdapat keuntungan sebesar 10, yaitu nilai buku, 100 (tidak ada amortisasi diskon atau premium) dikurangi harga beli, 90. Dan sebaliknya untuk *loss on bonds redemption*.

Sementara, pengembalian *discount* terjadi jika obligasi yang dibeli kembali oleh Pemerintah ialah obligasi yang saat terbit harganya *discount*. *Discount* ini akan diamortisasi sepanjang umur obligasi tersebut. Jika sebelum jatuh temponya, obligasi ini dibeli kembali, maka atas *discount* yang belum teramortisasi, harus dikembalikan secara proporsional berdasarkan jumlah nominal obligasi yang dibeli kembali. Baik *gain on bonds redemption* maupun pengembalian *discount* merupakan bagian dari pos Bunga dan Biaya Penerbitan, karena sifatnya kurang lebih sama dengan biaya penerbitan dalam hal terjadinya bukan saat penerbitan namun saat pembelian kembali, namun arahnya berlawanan, yaitu sebagai faktor pengurang.

Pengembalian bunga tahun 2006 merupakan pengembalian bunga yang diterima Bank Indonesia atas obligasi SRBI-01. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelunasanan pokok SRBI-01 dapat bersumber dari surplus Bank Indonesia. Mengingat surplus Bank Indonesia baru dapat ditetapkan setelah laporan keuangan BI diaudit oleh BPK, maka akan ada *lag* waktu sampai ditetapkannya hasil audit oleh BPK. Sebelum hasil audit ditetapkan, maka jumlah bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah masih dihitung dari pokok sebelum audit. Setelah BPK menetapkan hasil audit, dan surplus BI yang akan digunakan untuk melunasi pokok SRBI-01 dapat ditetapkan, maka porsi bunga yang telah dibayar oleh Pemerintah harus dikembalikan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah.

Realisasi pembayaran bunga SUN domestik tahun 2002 - 2006, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

www.peraturan.go.id



Grafik 35: Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Domestik 2002 - 2006

Pembayaran bunga sejak tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan diakibatkan oleh terutama meningkatnya porsi penerbitan SUN neto dari Rp6,87 triliun tahun 2004 menjadi Rp22,21 triliun tahun 2005, dan Rp35,77 triliun tahun 2006.

2. **Bunga dan Biaya Penerbitan SUN Berdenominasi USD**

Sepanjang tahun 2006, pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN valas mencapai USD132.292.779,50. Pembayaran tersebut meliputi beberapa pos anggaran sebagai berikut:

Pembayaran bunga SUN valas	USD 326.854.167,00
Pembayaran biaya atau kewajiban lainnya	3.041.834,90
Discount SUN berdenominasi USD	9.480.000,00
Premium SUN berdenominasi USD	134.540.000,00
Total	**USD204.836.001,90**

Biaya atau kewajiban lainnya penerbitan SUN berdenominasi valas meliputi: *underwriter's fee, underwriter's OPE* (lihat Table 3), *rating fee*, pajak atas *underwriter's fee*, serta *trustee, fiscal & paying agent fee.*
Dalam mata uang Rupiah (menggunakan kurs transaksi), pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN valas dimaksud mencapai Rp1.871.792.307.691,7, dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran bunga SUN valas	Rp 2.999.623.503.015,00
Pembayaran biaya atau kewajiban lainnya	27.835.524.676,70
Discount SUN berdenominasi USD	86.675.640.000,00
Premium SUN berdenominasi USD	1.242.342.360.000,00
Total	**Rp1.871.792.307.691,70**

D. Pengelolaan Portofolio dan Risiko

Mengingat semakin meningkatnya peran SUN dalam porsi pembiayaan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang, dan dalam rangka mewujudkan *prudent debt management*, perlu dilakukan pengelolaan portofolio dan risiko dengan sebaik-baiknya. Perencanaan jenis dan penetapan tenor SUN yang akan diterbitkan, dibeli kembali atau ditukar, perlu diselaraskan dengan profil portofolio dan risiko yang dikehendaki.

www.peraturan.go.id

Perkembangan beberapa indikator profil portofolio dan risiko SUN tahun 2004, 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Indikator Risiko dan Portofolio SUN 2004 - 2006

Indikator	2004	2005	2006
Interest Rate Risk:			
Proporsi ON dengan tingkat bunga mengambang (% dari total portofolio) - incl. SU-005 & HB	33,92%	30,77%	24,63%
Nominal ON dengan tingkat bunga mengambang (triliun Rp)	224,64	213,27	182,90
Interest Rate Fixing (% dari tradable bonds)	57,34%	51,58%	41,77%
Average Time to Refixing (tahun)	2,48	3,52	5,23
Currency Exposure:			
Proporsi international bonds (% of tradable bonds)	2,27%	7,92%	10,59%
Nominal international bonds (Triliun Rp)	9,29	34,41	49,61
Refinancing Risk Indikators:			
ON jatuh tempo dalam 1 tahun (% dari tradable)	4,82%	5,44%	5,23%
ON jatuh tempo dalam 1 tahun (nominal - triliun Rp)	19,69	23,63	24,49
Average time to maturity tradable bonds (tahun)	7,12	7,52	8,43
Sensitivity Analysis:			
1% kenaikan suku bunga SBI (miliar Rp)	2.219	2.133	1.829
Rp100 depresiasi Rupiah terhadap USD (miliar Rp)	6,75	25,85	41,23

Secara umum terdapat penurunan risiko tingkat bunga/ *interest rate risk*. Hal ini dapat dilihat dari turunnya porsi ON dengan tingkat bunga mengambang dari 33,92% menjadi 24,63%. Sebagaimana diketahui ON dengan tingkat bunga mengambang sangat berisiko karena tingkat bunganya dikaitkan dengan tingkat bunga SBI yang besarnya tergantung kondisi pasar. *Interest rate fixing* ialah jumlah SUN yang terekspos perubahan *interest rate* dalam waktu kurang dari 1 tahun, sementara *average time to refixing* menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan seluruh portofolio untuk me-*reset* kupon. Kedua indikator ini menunjukkan arah yang menggembirakan, dimana *interest rate fixing* cenderung menurun sementara *average time to refix* cenderung meningkat.

Currency exposure menunjukkan perkembangan yang negatif dalam arti terdapat peningkatan risiko nilai tukar Rupiah akibat peningkatan pokok SUN berdenominasi USD yang diterbitkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya saldo SUN valas dalam portofolio SUN. Tahun 2006 Pemerintah menerbitkan SUN valas senilai USD2 miliar, sehingga total SUN valas yang outstanding akhir tahun 2006 menjadi sebesar USD5,5 miliar. Penerbitan SUN valas tidak dapat dihindari mengingat masih terbatasnya daya serap pasar domestik, dan mencegah crowding out di pasar domestik. Selain itu penerbitan SUN valas juga diperlukan untuk membentuk *benchmark* dalam mata uang asing, khususnya USD.

Refinancing risk indicator untuk jangka pendek menunjukkan tingkat risiko yang terkendali, yang digambarkan oleh turunnya porsi ON yang jatuh tempo dalam satu tahun pada akhir tahun 2006 setelah sebelumnya sempat meningkat pada akhir tahun 2005. Namun demikian rata-rata jatuh tempo, sebagai indikator refinancing risk jangka menengah panjang, menunjukkan trend perbaikan yang konsisten. Analisis sensitivitas menunjukkan perbaikan dari sisi tingkat bunga. Sensitivitas beban bunga Pemerintah jauh menurun, dari Rp2,2 triliun pada tahun 2004 untuk setiap kenaikan 1% SBI menjadi Rp1,8 triliun pada tahun 2006 untuk setiap kenaikan 1% SBI. Namun demikian, sensitivitas nilai tukar semakin meningkat. Hal ini dapat dipahami mengingat porsi SUN berdenominasi USD meningkat.

www.peraturan.go.id

E. Pengembangan Produk dan Infrastruktur SUN/SBSN

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah merencanakan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). RUU tentang SBSN ini, secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.
- Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (underlying asset).
- Kewenangan Pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas-tugas Badan Hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara;
- Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Pada saat ini, RUU tentang SBSN tersebut telah selesai diharmonisasikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan akan segera disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan sebagai bagian dari Prolegnas tahun 2007. Diharapkan pada semester pertama tahun 2007, RUU dimaksud telah disahkan oleh DPR sehingga Pemerintah tidak kehilangan momentum untuk menerbitkan SBSN pada tahun 2007.

2. Sistem Dealer Utama

Pada tahun 2006 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama. Dealer Utama (Primary Dealers - PD) ialah lembaga keuangan (bank dan perusahaan efek), yang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah (selaku penerbit surat utang), menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun pasar sekunder dengan imbalan/hak (rights) berupa 'direct payment' atau 'special rights'. Tujuan pembentukan sistem dealer utama ialah:

- Memelihara dan mengembangkan tingkat permintaan SUN yang stabil di pasar perdana;

www.peraturan.go.id

- Mendorong efisiensi pembentukan harga lelang dengan meningkatkan competitiveness antar-peserta lelang;
- Meningkatkan likuiditas pasar SUN melalui kegiatan market making pada pasar sekunder. PDs dapat berperan sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan fungsi sebagai liquidity enhancer;
- Menyediakan kuotasi harga dua arah dalam rangka menciptakan mekanisme pembentukan harga yang transparan (price discovery mechanism);
- Menyediakan informasi pasar yang relevan.

Bagi Pemerintah, sistem dealer utama perlu diterapkan mengingat permintaan SUN di pasar perdana masih berfluktuatif yang berpotensi meningkatkan risiko refinancing akibat undersubscription. Bagi investor, sistem dealer utama akan membantu dalam menciptakan likuiditas, mengingat dealer utama memiliki kewajiban menyediakan kuotasi harga dua arah. Selain itu, sistem ini juga akan menciptakan pembentukan harga yang lebih transparan dan tidak bias.

F. Restrukturisasi Surat Utang kepada Bank Indonesia

Dalam rangka program penjaminan perbankan, pada tahun 1998 dan 1999 Pemerintah menerbitkan SU kepada Bank Indonesia, yaitu seri-seri SU-001, SU-002, SU-003 dan SU-004 dengan total nominal sebesar Rp218.315.594.294.530,00. Sebagai bagian dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pada tanggal 7 Agustus 2003 seri-seri SU-001 dan SU-003 dengan total nilai nominal Rp144.536.094.294.530,00 diganti dengan seri baru yaitu seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI) dengan jumlah nominal yang sama.

Sedangkan untuk seri-seri SU yang lain, yaitu SU-002 dan SU-004, pada bulan April 2006 Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor: SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999. Pada intinya, pokok-pokok yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama dimaksud antara lain:

a. Klausul indeksasi pokok terhadap inflasi dihapus efektif tanggal 31 Desember 2005,
b. Tingkat bunga SU-002/MK/1998 diturunkan dari 3% menjadi 1%,
c. Jatuh tempo Surat Utang pasca restrukturisasi diperpanjang sampai 2025 dari yang sebelumnya 2018, dan
d. Perhitungan indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dikonversi menjadi surat utang baru (SU-007) dengan tingkat bunga 0,1% dan jatuh tempo tahun 2025.

Tabel 22

Hasil Restrukturisasi SU-002 dan SU-004

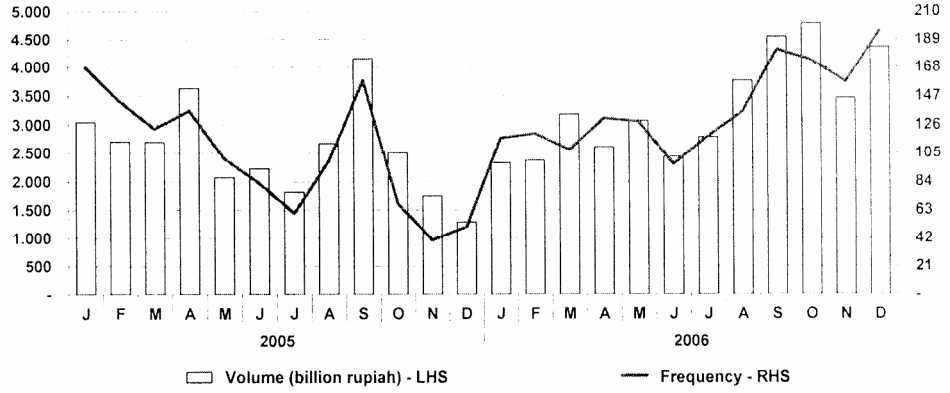
Sebelum Restrukturisasi		Sesudah Restrukturisasi	
SU-002	Rp20.000.000.000.000	SU-002	Rp20.000.000.000.000
SU-004	Rp53.779.500.000.000	SU-004	Rp53.779.500.000.000
Tagihan Indeksasi SU-002	Rp11.231.072.464.569	SU-007	Rp11.231.072.464.569
Tagihan Indeksasi SU-004	Rp26.701.607.763.086	SU-007	Rp26.701.607.763.086
Utang Bunga SU-002	Rp4.637.582.864.105	SU-007	Rp4.637.582.864.105
Utang Bunga SU-004	Rp12.291.887.216.661	SU-007	Rp12.291.887.216.661

SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1% setahun (dari sebelumnya 3%), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018), dan tidak diindeks terhadap inflasi. SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3% setahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018), dan tidak diindeks terhadap inflasi. Sementara SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1% setahun dan pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025.

www.peraturan.go.id

IV. Kondisi Pasar SUN Tahun 2006

Pasar SUN tahun 2006 secara umum diwarnai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan SUN. Hal ini nampak dari meningkatnya volume rata-rata perdagangan SUN harian dari sekitar Rp2,3 triliun per hari pada bulan Januari 2006 menjadi Rp4,4 triliun per hari pada bulan Desember 2006. Hal ini kontras dengan tahun sebelumnya yang cenderung menunjukkan trend menurun sampai akhir tahun. Perbaikan kondisi makro ekonomi yang ditandai dengan rendahnya inflasi dan turunnya suku bunga referensi Bank Indonesia, diikuti dengan kestabilan politik dan peningkatan rating/outlook sovereign credit, menjadi driver utama peningkatan aktivitas perdagangan SUN tahun 2006.



Grafik 36: Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara di Pasar Sekunder

Adapun rata-rata perdagangan harian obligasi negara sepanjang tahun 2006, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan rata-rata perdagangan harian obligasi negara lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 23
Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara

Rata-rata Perdagangan Harian Obligasi Negara Tahun 2002 - 2006					
	2002	2003	2004	2005	2006
Obligasi Negara					
Volume (Milliar Rp)	522	1.395	2.140	2.549	3.311
Frekuensi	16	51	113	102	139

Sementara itu, kepemilikan SUN per akhir tahun 2006 menunjukkan shifting dari investor perbankan ke kelompok investor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan SUN pada perbankan dari Rp290 triliun pada akhir tahun 2005 menjadi Rp269 triliun pada akhir tahun 2006. Kelompok investor lain hampir semua mengalami peningkatan, kecuali Dana Pensiun yang cenderung stagnan. Khususnya untuk Asing terdapat peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp11 triliun pada akhir tahun 2004 menjadi Rp31 triliun pada akhir tahun 2005, dan Rp55 triliun pada akhir tahun 2006. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor asing yang semakin meningkat terhadap SUN. Namun di lain pihak, meningkatnya kepemilikan SUN oleh pihak asing juga perlu dicermati, khususnya risiko *sudden reversal* yang berpotensi membahayakan pasar SUN secara keseluruhan.

www.peraturan.go.id

Tabel 24
Komposisi Kepemilikan Obligasi Negara yang Dapat Diperdagangkan

Pemilik/Jumlah	Des'05	Des'06	Mar'07	Jun'07	Sep'07	Des'07
BANK	298	290	278	277	281	285
Bank BUMN Rekap	159	155	153	154	154	153
Bank Swasta Rekap	95	85	83	82	81	81
Bank Non Rekap	32	46	39	39	41	33
BPD	1	4	2	3	4	3
Institusi Pemerintah	11	11	7	7	8	8
Bank Indonesia	-	11	7	7	8	8
Departemen Keuangan	-	-	-	-	-	-
NON BANK	112	100	114	123	136	124
Reksadana	54	9	9	14	19	21
Asuransi	27	32	32	33	34	35
Asing	11	31	46	48	55	55
Dana Pensiun	16	22	22	23	23	23
Sekuritas	0	0	0	0	0	1
Lain-lain	3	5	5	4	6	7
TOTAL	398	400	400	407	425	417

Dengan memperhatikan kondisi di atas, Pemerintah akan terus mengupayakan pengembangan pasar sekunder SUN khususnya dan pasar keuangan secara umum, yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan pendanaan Pemerintah yang relatif murah.

V. Pencapaian Target APBN

Target APBN atas pengelolaan SUN ditetapkan dalam tiga pos yaitu pos Surat Utang Negara (neto), Bunga Utang Dalam Negeri, dan Bunga Utang Luar Negeri. Namun demikian pos Bunga Utang Luar Negeri tidak hanya digunakan untuk menampung beban pembayaran bunga SUN dalam valuta asing, namun juga untuk menampung beban bunga utang luar negeri dalam bentuk pinjaman.

A. Surat Utang Negara (neto)

Mulai tahun 2005, DPR telah menyetujui penerapan konsep net penerbitan SUN. Net penerbitan SUN ialah selisih antara SUN yang diterbitkan dengan yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SUN di APBN ditetapkan dalam bentuk net penerbitan SUN, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SUN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah net penerbitan tidak melebihi yang telah ditetapkan DPR.
Untuk tahun 2006 target net penerbitan SUN (SUN neto) ditetapkan sebesar Rp35.771.320.000.000,00. Realisasinya mencapai Rp35.985.507.347.969,00, dengan rincian sebagai berikut:

Penerbitan SUN		
Penerbitan Reguler - Rupiah	42.578.650.000.000,00	
Penerbitan Via Switching	31.179.000.000.000,00	
Accrued Interest	1.689.768.517.000,00	
	75.447.418.517.000,00	
Penerbitan Reguler - Valas	18.466.901.169.540,00	
Accrued Interest	320.496.746.922,00	
	18.787.397.916.462,00	
Total Penerbitan SUN		**94.234.816.433.462,00**
Pelunasan SUN		
SUN Jatuh Tempo - Rupiah	25.141.982.761.508,00	
Pelunasan Via Switching	31.179.000.000.000,00	
Pembelian Kembali (Divestasi BPD Aceh)	47.291.000.000,00	
Accrued Interest - Rp	1.567.098.452.000,00	
Accrued Interest - Valas	313.936.871.985,00	
Total Pelunasan SUN		**58.249.309.085.493,00**
	SUN Netto	**35.985.507.347.969,00**
	Target APBN-P 2006	**35.771.320.000.000,00**
	Selisih Lebih	**214.187.347.969,00**

www.peraturan.go.id

Dengan demikian, terdapat kelebihan dari target sebesar Rp214 miliar. Komponen utama kelebihan ini ialah adanya *temporary effect* dari *net accrued interest* sebesar kurang lebih positif Rp130 miliar.

B. Bunga Utang Dalam Negeri

Berdasarkan APBN-P tahun 2006, beban Bunga Utang Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp58.154,8 miliar. Sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2006 secara total mencapai Rp54.055.077.540.791,00. Secara rinci, pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN terdiri dari berbagai komponen sebagai berikut:

Pembayaran bunga SUN domestik	Rp52.854.986.173.285
Discount SUN	1.089.101.198.600
Loss on bonds redemption	649.996.307.563
Pembayaran biaya/kewajiban lainnya	18.459.528.900
Premium SUN	488.906.373.000
Gain on bonds redemption	51.575.792.275
Pengembalian *discount*	16.094.015.288
Pengembalian bunga	889.486.994
Total	**Rp54.055.077.540.791**

Dengan demikian realisasi pembayaran bunga lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar kurang lebih Rp4,1 triliun (Rp58,1 triliun APBN-P - Rp54,1 triliun realisasi). Selisih ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Turunnya tingkat bunga SBI 3 bulan yang menjadi dasar penghitungan bunga SUN seri VR (Variable Rate). Sebagaimana diketahui, SBI 3 bulan pada bulan Januari 2006 sebesar 12,92% sementara pada bulan Juli 2006 turun menjadi 12,16% hingga pada bulan Desember 2006 terus turun menjadi 9,5%. Penurunan ini turut menurunkan pembayaran bunga SUN seri VR sepanjang tahun 2006. tidak hanya itu, penurunan SBI 3 bulan juga turut menurunkan tingkat bunga pasar *along the curve*, sehingga turut menurunkan pembayaran bunga dan beban diskonto atas penerbitan ON berjenis *fixed rate* tahun 2006.
- Terus dilakukannya program debt switching yang secara terukur dan sistematis dalam jumlah yang cukup besar. Sepanjang tahun 2006, Pemerintah telah melakukan pertukaran SUN sebesar total Rp31,18 triliun. Dalam environment suku bunga pasar yang cenderung menurun, dengan melakukan debt switching, Pemerintah tidak hanya memperoleh struktur jatuh tempo pokok SUN yang semakin baik, namun juga memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Jadi dengan program debt switching, Pemerintah menarik SUN yang berbunga tinggi dan menggantinya dengan SUN yang bunganya lebih rendah.

C. Bunga Utang Luar Negeri

Pos bunga utang luar negeri meliputi pembayaran bunga utang luar negeri dalam bentuk *loan* (pinjaman) maupun obligasi (SUN valas). Khusus untuk SUN valas, sepanjang tahun 2006, realisasi pembayaran bunganya mencapai USD132.292.779,50. Pembayaran tersebut meliputi beberapa pos anggaran sebagai berikut:

Pembayaran bunga SUN valas	USD 326.854.167,00
Pembayaran biaya atau kewajiban lainnya	3.041.834,90
Discount SUN berdenominasi USD	9.480.000,00
Premium SUN berdenominasi USD	134.540.000,00
Total	**USD204.836.001,90**

Dalam mata uang Rupiah (menggunakan kurs transaksi), pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN valas dimaksud mencapai Rp1.871.792.307.691,70 dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran bunga SUN valas	Rp 2.999.623.503.015,00
Pembayaran biaya atau kewajiban lainnya	27.835.524.676,70
Discount SUN berdenominasi USD	86.675.640.000,00
Premium SUN berdenominasi USD	1.242.342.360.000,00
Total	**Rp1.871.792.307.691,70**

www.peraturan.go.id

Lampiran 1

GOVERNMENT SECURITIES

As of 30-Des-05

No	Series	First Issued Date	Maturity Date	Next Coupon Date	Coupon	Face Value	
A. TRADABLE SECURITIES							
1. Rupiah Denominated							
a. Fixed Coupon							
1	FR0002	28-Mei-99	15-Jun-09	15-Jun-06	14,0000%	Rp	20.011.798.000.000,00
2	FR0004	28-Mei-99	15-Feb-06	15-Feb-06	12,1250%	Rp	13.317.430.000.000,00
3	FR0005	28-Mei-99	15-Jul-07	15-Jan-06	12,2500%	Rp	15.992.245.000.000,00
4	FR0010	20-Nop-02	15-Mar-10	15-Mar-06	13,1500%	Rp	12.012.678.000.000,00
5	FR0011	20-Nop-02	15-Mei-10	15-Mei-06	13,5500%	Rp	800.000.000.000,00
6	FR0012	20-Nop-02	15-Mei-10	15-Mei-06	12,6250%	Rp	2.488.141.000.000,00
7	FR0013	20-Nop-02	15-Sep-10	15-Mar-06	15,4250%	Rp	5.453.601.000.000,00
8	FR0014	20-Nop-02	15-Nop-10	15-Mei-06	15,5750%	Rp	1.349.947.000.000,00
9	FR0015	20-Nop-02	15-Feb-11	15-Feb-06	13,4000%	Rp	7.264.938.000.000,00
10	FR0016	20-Nop-02	15-Agust-11	15-Feb-06	13,4500%	Rp	7.264.937.000.000,00
11	FR0017	20-Nop-02	15-Jan-12	15-Jan-06	13,1500%	Rp	7.209.063.000.000,00
12	FR0018	20-Nop-02	15-Jul-12	15-Jan-06	13,1750%	Rp	7.209.062.000.000,00
13	FR0019	20-Nop-02	15-Jun-13	15-Jun-06	14,2500%	Rp	11.856.341.000.000,00
14	FR0020	20-Nop-02	15-Des-13	15-Jun-06	14,2750%	Rp	11.856.341.000.000,00
15	FR0021	24-Des-02	15-Des-10	15-Jun-06	14,5000%	Rp	3.000.000.000.000,00
16	FR0022	10-Apr-03	15-Sep-11	15-Mar-06	12,0000%	Rp	2.700.000.000.000,00
17	FR0023	11-Sep-03	15-Des-12	15-Jun-06	11,0000%	Rp	11.332.500.000.000,00
18	FR0024	06-Nop-03	15-Okt-10	15-Apr-06	12,0000%	Rp	5.700.000.000.000,00
19	FR0025	29-Apr-04	15-Okt-11	15-Apr-06	10,0000%	Rp	8.804.000.000.000,00
20	FR0026	26-Agust-04	15-Okt-14	15-Apr-06	11,0000%	Rp	6.750.000.000.000,00
21	FR0027	27-Jan-05	15-Jun-15	15-Jun-06	9,5000%	Rp	5.000.000.000.000,00
22	FR0028	24-Feb-05	15-Jul-17	15-Jan-06	10,0000%	Rp	3.000.000.000.000,00
23	FR0029	28-Apr-05	15-Apr-07	15-Apr-06	9,5000%	Rp	4.670.000.000.000,00
24	FR0030	19-Mei-05	15-Mei-16	15-Mei-06	10,7500%	Rp	5.330.000.000.000,00
25	FR0031	16-Jun-05	15-Nop-20	15-Mei-06	11,0000%	Rp	7.223.000.000.000,00
26	FR0032	01-Sep-05	15-Jul-18	15-Jan-06	15,0000%	Rp	1.560.000.000.000,00
	Total Fixed Rate					Rp	**189.156.022.000.000,00**
b. Variable Coupon							
1	VR0009	28-Mei-99	25-Mar-06	25-Mar-06	12,83331%	Rp	3.229.756.000.000,00
2	VR0010	28-Mei-99	25-Okt-06	25-Jan-06	12,08651%	Rp	7.078.494.000.000,00
3	VR0011	28-Mei-99	25-Feb-07	25-Feb-06	12,68922%	Rp	5.311.352.000.000,00
4	VR0012	28-Mei-99	25-Sep-07	25-Mar-06	12,83331%	Rp	8.465.924.000.000,00
5	VR0013	28-Mei-99	25-Jan-08	25-Jan-06	12,08651%	Rp	11.655.279.000.000,00
6	VR0014	28-Mei-99	25-Agust-08	25-Feb-06	12,68922%	Rp	13.658.625.000.000,00
7	VR0015	28-Mei-99	25-Des-08	25-Mar-06	12,83331%	Rp	12.426.786.000.000,00
8	VR0016	28-Mei-99	25-Jul-09	25-Jan-06	12,08651%	Rp	13.363.032.000.000,00
9	VR0017	25-Jun-02	25-Jun-11	25-Mar-06	12,83331%	Rp	4.483.666.000.000,00
10	VR0018	25-Okt-02	25-Okt-12	25-Jan-06	12,08651%	Rp	1.065.483.000.000,00
11	VR0019	20-Nop-02	25-Des-14	25-Mar-06	12,83331%	Rp	11.406.226.000.000,00
12	VR0020	20-Nop-02	25-Apr-15	25-Jan-06	12,08651%	Rp	9.899.007.000.000,00
13	VR0021	20-Nop-02	25-Nop-15	25-Feb-06	12,68922%	Rp	7.546.328.000.000,00
14	VR0022	20-Nop-02	25-Mar-16	25-Mar-06	12,83331%	Rp	9.666.749.000.000,00
15	VR0023	20-Nop-02	25-Okt-16	25-Jan-06	12,08651%	Rp	8.652.056.000.000,00
16	VR0024	20-Nop-02	25-Feb-17	25-Feb-06	12,68922%	Rp	9.909.300.000.000,00
17	VR0025	20-Nop-02	25-Sep-17	25-Mar-06	12,83331%	Rp	6.909.300.000.000,00
18	VR0026	20-Nop-02	25-Jan-18	25-Jan-06	12,08651%	Rp	5.442.142.000.000,00
19	VR0027	20-Nop-02	25-Jul-18	25-Jan-06	12,08651%	Rp	5.442.142.000.000,00
20	VR0028	20-Nop-02	25-Agust-18	25-Feb-06	12,68922%	Rp	7.033.994.000.000,00
21	VR0029	20-Nop-02	25-Agust-19	25-Feb-06	12,68922%	Rp	12.212.320.000.000,00
22	VR0030	20-Nop-02	25-Des-19	25-Mar-06	12,83331%	Rp	10.503.015.000.000,00
23	VR0031	20-Nop-02	25-Jul-20	25-Jan-06	12,08651%	Rp	25.322.354.000.000,00
	Total Variable Coupon					Rp	**210.683.330.000.000,00**
	Total Rupiah Denominated					Rp	**399.839.352.000.000,00**

www.peraturan.go.id

2. US Dollar Denominated							
a. Fixed Coupon							
1	INDO-14	10-Mar-04	10-Mar-14	10-Mar-06	6,7500%	USD	1.000.000.000,00
2	INDO-15	20-Apr-05	20-Apr-15	20-Apr-06	7,2500%	USD	1.000.000.000,00
3	INDO-16	12-Okt-05	15-Jan-16	15-Jan-06	7,5000%	USD	900.000.000,00
4	INDO-35	12-Okt-05	12-Okt-35	12-Apr-06	8,5000%	USD	600.000.000,00
	Total Fixed Coupon					USD	3.500.000.000,00
	Total US Denominated /equivalen in Rupiah (1)					Rp	**34.405.000.000.000,00**
	TOTAL TRADABLE SECURITIES					Rp	**434.244.352.000.000,00**
NON-TRADABLE SECURITIES (2)							
1. Fixed Coupon							
1	SU-002/MK/1998 (3)	23-Okt-98	2003-2018		3%	Rp	31.231.072.464.569,00
2	SU-004/MK/1999 (3)	28-Mei-99	2004-2018		3%	Rp	80.481.107.763.086,00
3	SRBI-01/MK/2003 (4)	07-Agust-03	01-Agust-33	01-Feb-06	0,10%	Rp	144.536.094.294.530,00
	Total Fixed Coupon					Rp	**256.248.274.522.185,00**
2. Variable Coupon							
1	SU-005/MK/1999 (5)	29-Des-99	2004-2009	10-Jun-05	3 mos. SBI	Rp	2.583.236.000.000,00
	Total Variable Coupon					Rp	**2.583.236.000.000,00**
	TOTAL NON TRADABLE SECURITIES					Rp	**258.831.510.522.185,00**
GRAND TOTAL						Rp	**693.075.862.522.185,00**

Notes:

1) Assumed exchange rate for conversion (Inds Rp/US Dollar) : 9.830,00
2) Non-tradable Securities are held by Bank Indonesia, incl. SU-006/MK/2001 issued in 6 Sept. 2001 in the amount of Rp40,0 trillions that
3) These bonds were issued for guarantee program financing. Its interest based on inflation ajusted principle. Inflation rate for 2004 was
4) This bond was issued to replace SU-001 and SU-003. Its effective date is August 1, 2003.
5) The original nominal amount of this bond is Rp9,97 trillions.
6) Original Face Value of SU-002/MK/1998 is Rp20.000.000.000.000,00
7) Original Face Value of SU-004/MK/1999 is Rp53.779.500.000.000,00

www.peraturan.go.id

Lampiran 2

GOVERNMENT SECURITIES

As of 31-Des-06

No	Series	First Issued Date	Maturity Date	Next Coupon Date	Coupon	Face Value	
A. TRADABLE SECURITIES							
1. Rupiah Denominated							
a. Fixed Coupon							
1	FR0002	28-Mei-99	15-Jun-09	15-Jun-07	14,0000%	Rp	17.455.057.000.000,00
2	FR0005	28-Mei-99	15-Jul-07	15-Jan-07	12,2500%	Rp	11.747.245.000.000,00
3	FR0010	20-Nop-02	15-Mar-10	15-Mar-07	13,1500%	Rp	11.419.678.000.000,00
4	FR0011	20-Nop-02	15-Mei-10	15-Mei-07	13,5500%	Rp	800.000.000.000,00
5	FR0012	20-Nop-02	15-Mei-10	15-Mei-07	12,6250%	Rp	2.425.141.000.000,00
6	FR0013	20-Nop-02	15-Sep-10	15-Mar-07	15,4250%	Rp	5.287.601.000.000,00
7	FR0014	20-Nop-02	15-Nop-10	15-Mei-07	15,5750%	Rp	1.349.947.000.000,00
8	FR0015	20-Nop-02	15-Feb-11	15-Feb-07	13,4000%	Rp	6.534.938.000.000,00
9	FR0016	20-Nop-02	15-Agust-11	15-Feb-07	13,4500%	Rp	6.237.937.000.000,00
10	FR0017	20-Nop-02	15-Jan-12	15-Jan-07	13,1500%	Rp	10.257.063.000.000,00
11	FR0018	20-Nop-02	15-Jul-12	15-Jan-07	13,1750%	Rp	7.209.062.000.000,00
12	FR0019	20-Nop-02	15-Jun-13	15-Jun-07	14,2500%	Rp	11.856.341.000.000,00
13	FR0020	20-Nop-02	15-Des-13	15-Jun-07	14,2750%	Rp	11.856.341.000.000,00
14	FR0021	24-Des-02	15-Des-10	15-Jun-07	14,5000%	Rp	2.909.000.000.000,00
15	FR0022	10-Apr-03	15-Sep-11	15-Mar-07	12,0000%	Rp	8.939.000.000.000,00
16	FR0023	11-Sep-03	15-Des-12	15-Jun-07	11,0000%	Rp	13.432.500.000.000,00
17	FR0024	06-Nop-03	15-Okt-10	15-Apr-07	12,0000%	Rp	5.155.000.000.000,00
18	FR0025	29-Apr-04	15-Okt-11	15-Apr-07	10,0000%	Rp	8.803.000.000.000,00
19	FR0026	26-Agust-04	15-Okt-14	15-Apr-07	11,0000%	Rp	11.382.000.000.000,00
20	FR0027	27-Jan-05	15-Jun-15	15-Jun-07	9,5000%	Rp	5.000.000.000.000,00
21	FR0028	24-Feb-05	15-Jul-17	15-Jan-07	10,0000%	Rp	3.000.000.000.000,00
22	FR0029	28-Apr-05	15-Apr-07	15-Apr-07	9,5000%	Rp	3.706.000.000.000,00
23	FR0030	19-Mei-05	15-Mei-16	15-Mei-07	10,7500%	Rp	5.330.000.000.000,00
24	FR0031	16-Jun-05	15-Nop-20	15-Mei-07	11,0000%	Rp	11.469.000.000.000,00
25	FR0032	01-Sep-05	15-Jul-18	15-Jan-07	15,0000%	Rp	1.560.000.000.000,00
26	FR0033	26-Jan-06	15-Mar-13	15-Mar-07	12,5000%	Rp	9.945.000.000.000,00
27	FR0034	26-Jan-06	15-Jun-21	15-Jun-07	12,8000%	Rp	10.379.000.000.000,00
28	FR0035	16-Feb-06	15-Jun-22	15-Jun-07	12,9000%	Rp	6.600.000.000.000,00
29	FR0036	20-Apr-06	15-Sep-19	15-Mar-07	11,5000%	Rp	3.711.000.000.000,00
30	FR0037	18-Mei-06	15-Sep-26	15-Mar-07	12,0000%	Rp	2.450.000.000.000,00
31	FR0038	24-Agust-06	15-Agust-18	15-Feb-07	11,6000%	Rp	3.083.000.000.000,00
32	FR0039	24-Agust-06	15-Agust-23	15-Feb-07	11,7500%	Rp	4.175.000.000.000,00
33	FR0040	21-Sep-06	15-Sep-25	15-Mar-07	11,0000%	Rp	8.716.000.000.000,00
34	ORI001	09-Agust-06	09-Agust-09	09-Jan-07	12,0500%	Rp	3.283.650.000.000,00
35	FR0041	24-Nop-06	15-Nop-08	15-Mei-07	9,2500%	Rp	1.100.000.000.000,00
	Total Fixed Rate					Rp	**238.564.501.000.000,00**
b. Variable Coupon							
1	VR0011	28-Mei-99	25-Feb-07	25-Feb-07	9,50000%	Rp	4.190.627.000.000,00
2	VR0012	28-Mei-99	25-Sep-07	25-Mar-07	9,50000%	Rp	4.850.199.000.000,00
3	VR0013	28-Mei-99	25-Jan-08	25-Jan-07	11,35938%	Rp	7.931.765.000.000,00
4	VR0014	28-Mei-99	25-Agust-08	25-Feb-07	9,50000%	Rp	9.332.111.000.000,00
5	VR0015	28-Mei-99	25-Des-08	25-Mar-07	9,50000%	Rp	9.063.334.000.000,00
6	VR0016	28-Mei-99	25-Jul-09	25-Jan-07	11,35938%	Rp	9.799.580.000.000,00
7	VR0017	25-Jun-02	25-Jun-11	25-Mar-07	9,50000%	Rp	4.008.666.000.000,00
8	VR0018	25-Okt-02	25-Okt-12	25-Jan-07	11,35938%	Rp	1.065.483.000.000,00
9	VR0019	20-Nop-02	25-Des-14	25-Mar-07	9,50000%	Rp	11.406.226.000.000,00
10	VR0020	20-Nop-02	25-Apr-15	25-Jan-07	11,35938%	Rp	9.899.007.000.000,00
11	VR0021	20-Nop-02	25-Nop-15	25-Feb-07	9,50000%	Rp	7.546.328.000.000,00
12	VR0022	20-Nop-02	25-Mar-16	25-Mar-07	9,50000%	Rp	9.666.749.000.000,00
13	VR0023	20-Nop-02	25-Okt-16	25-Jan-07	11,35938%	Rp	8.652.056.000.000,00
14	VR0024	20-Nop-02	25-Feb-17	25-Feb-07	9,50000%	Rp	9.909.300.000.000,00
15	VR0025	20-Nop-02	25-Sep-17	25-Mar-07	9,50000%	Rp	6.909.300.000.000,00
16	VR0026	20-Nop-02	25-Jan-18	25-Jan-07	11,35938%	Rp	5.442.142.000.000,00
17	VR0027	20-Nop-02	25-Jul-18	25-Jan-07	11,35938%	Rp	5.442.142.000.000,00

www.peraturan.go.id

18	VR0028	20-Nop-02	25-Agust-18	25-Feb-07	9,50000%	Rp	7.033.994.000.000,00
19	VR0029	20-Nop-02	25-Agust-19	25-Feb-07	9,50000%	Rp	12.212.320.000.000,00
20	VR0030	20-Nop-02	25-Des-19	25-Mar-07	9,50000%	Rp	10.503.015.000.000,00
21	VR0031	20-Nop-02	25-Jul-20	25-Jan-07	11,35938%	Rp	25.322.354.000.000,00
	Total Variable Coupon					Rp	**180.186.698.000.000,00**
	Total Rupiah Denominated					Rp	**418.751.199.000.000,00**
2. US Dollar Denominated							
a. Fixed Coupon							
1	INDO-14	10-Mar-04	10-Mar-14	10-Mar-07	6,7500%	USD	1.000.000.000,00
2	INDO-15	20-Apr-05	20-Apr-15	20-Apr-07	7,2500%	USD	1.000.000.000,00
3	INDO-16	12-Okt-05	15-Jan-16	15-Jan-07	7,5000%	USD	900.000.000,00
4	INDO-35	12-Okt-05	12-Okt-35	12-Apr-07	8,5000%	USD	1.600.000.000,00
5	INDO-17	09-Mar-06	09-Mar-17	09-Mar-07	6,8750%	USD	1.000.000.000,00
	Total Fixed Coupon					USD	5.500.000.000,00
	Total US Denominated /equivalen in Rupiah (1)					Rp	**49.610.000.000.000,00**
	TOTAL TRADABLE SECURITIES					Rp	**468.361.199.000.000,00**
NON-TRADABLE SECURITIES (2)							
1. Fixed Coupon							
1	SU-002/MK/1998	23-Okt-98	01-Apr-25	01-Apr-07	1,00%	Rp	20.000.000.000.000,00
2	SU-004/MK/1999	28-Mei-99	01-Des-25	01-Jun-07	3,00%	Rp	53.779.500.000.000,00
3	SU-007/MK/2006	01-Jan-06	01-Agust-25	01-Feb-07	0,10%	Rp	54.862.150.308.421,00
4	SRBI-01/MK/2003	07-Agust-03	01-Agust-33	01-Feb-07	0,10%	Rp	143.013.623.533.022,00
	Total Fixed Coupon					Rp	**271.655.273.841.443,00**
2. Variable Coupon							
1	SU-005/MK/1999	29-Des-99	10 Desember 2009	10-Jun-07	9,5000%	Rp	2.711.481.000.000,00
	Total Variable Coupon					Rp	**2.711.481.000.000,00**
	TOTAL NON TRADABLE SECURITIES					Rp	**274.366.754.841.443,00**
GRAND TOTAL						Rp	**742.727.953.841.443,00**

Notes:

1) Assumed exchange rate for conversion (Inds Rp/US Dollar) : 9.020,00

2) Non-tradable Securities are held by Bank Indonesia, incl. SU-006/MK/2001 issued in 6 Sept. 2001 in the amount of Rp40,0 trillions that has not been used.

www.peraturan.go.id

Lampiran 3

REALISASI PENERBITAN SUN DOMESTIK 2006

No	Tanggal Lelang	Tanggal Penerbitan	Seri	Coupon	Jatuh Tempo	Nominal	Clean Proceeds	Accrued Interest	Discount	Premium	Penerimaan Penerbitan	Akumulasi
						MAP 711424		MAP 711423				
Reg	24-Jan-06	26-Jan-06	FR0033	12,50000%	15-Mar-13	3.800.000.000.000	3.720.462.860.900	174.515.000.000	79.537.139.100		3.974.515.000.000	3.974.515.000.000
Reg	24-Jan-06	26-Jan-06	FR0034	12,80000%	15-Jun-21	2.050.000.000.000	1.976.488.319.000	30.276.450.000	73.511.681.000		2.080.276.450.000	6.054.791.450.000
Reg	14-Feb-06	16-Feb-06	FR0033	12,50000%	15-Mar-13	1.820.000.000.000	1.782.336.166.000	96.782.140.000	37.663.834.000		1.916.782.140.000	7.971.573.590.000
Reg	14-Feb-06	16-Feb-06	FR0035	12,90000%	15-Jun-22	1.500.000.000.000	1.442.546.455.000	33.490.500.000	57.453.545.000		1.533.490.500.000	9.505.064.090.000
DS	16-Feb-06	21-Feb-06	FR0034	12,80000%	15-Jun-21	280.000.000.000	270.088.000.000	9.166.320.000	9.911.000.000		289.166.320.000	9.794.230.410.000
Reg	14-Mar-06	16-Mar-06	FR0023	11,00000%	15-Des-12	2.100.000.000.000	1.967.342.713.000	57.750.000.000	132.657.287.000		2.157.750.000.000	11.951.980.410.000
Reg	14-Mar-06	16-Mar-06	FR0035	12,90000%	15-Jun-22	5.100.000.000.000	5.125.158.020.000	164.475.000.000		25.158.020.000	5.264.475.000.000	17.216.455.410.000
DS	23-Mar-06	28-Mar-06	FR0022	12,00000%	15-Sep-11	6.289.000.000.000	6.256.297.200.000	26.659.071.000	32.702.800.000		6.315.659.071.000	23.532.114.481.000
Reg	18-Apr-06	20-Apr-06	FR0026	11,00000%	15-Okt-14	1.750.000.000.000	1.662.882.933.000	2.630.250.000	87.117.067.000		1.752.630.250.000	25.284.744.731.000
Reg	18-Apr-06	20-Apr-06	FR0036	11,50000%	15-Sep-19	1.500.000.000.000	1.450.484.645.000	16.875.000.000	49.515.355.000		1.516.875.000.000	26.801.619.731.000
DS	09-Mei-06	12-Mei-06	FR0036	11,50000%	15-Sep-19	2.211.000.000.000	2.186.679.000.000	40.074.375.000	24.321.000.000		2.251.074.375.000	29.052.694.106.000
Reg	16-Mei-06	18-Mei-06	FR0026	11,00000%	15-Okt-14	-	-	-	-		-	29.052.694.106.000
Reg	16-Mei-06	18-Mei-06	FR0037	12,00000%	15-Sep-26	1.300.000.000.000	1.259.450.270.000	27.131.000.000	40.549.730.000		1.327.131.000.000	30.379.825.106.000
Reg	13-Jun-06	15-Jun-06	FR0026	11,00000%	15-Okt-14	1.975.000.000.000	1.777.025.285.000	36.207.675.000	197.974.715.000		2.011.207.675.000	32.391.032.781.000
Reg	13-Jun-06	15-Jun-06	FR0037	12,00000%	15-Sep-26	1.150.000.000.000	1.030.766.761.000	34.500.000.000	119.233.239.000		1.184.500.000.000	33.575.532.781.000
DS	27-Jun-06	30-Jun-06	FR0017	13,15000%	15-Jan-12	3.048.000.000.000	3.112.922.400.000	183.797.448.000		64.922.400.000	3.231.797.448.000	36.807.330.229.000
Reg	11-Jul-06	13-Jul-06	FR0033	12,50000%	15-Mar-13	4.325.000.000.000	4.378.934.182.000	176.291.325.000		53.934.182.000	4.501.291.325.000	41.308.621.554.000
Reg	11-Jul-06	13-Jul-06	FR0034	12,80000%	15-Jun-21	1.300.000.000.000	1.333.146.271.000	12.729.600.000		33.146.271.000	1.312.729.600.000	42.621.351.154.000
DS	25-Jul-06	28-Jul-06	FR0034	12,80000%	15-Jun-21	2.365.000.000.000	2.426.253.500.000	35.564.870.000		61.253.500.000	2.400.564.870.000	45.021.916.024.000
Reg		09-Agust-06	ORI001	12,05000%	09-Agust-09	3.283.650.000.000	3.283.650.000.000	-			3.283.650.000.000	48.305.566.024.000
DS	08-Agust-06	11-Agust-06	FR0034	12,80000%	15-Jun-21	4.384.000.000.000	4.616.352.000.000	87.390.656.000		232.352.000.000	4.471.390.656.000	52.776.956.680.000
Reg	22-Agust-06	24-Agust-06	FR0038	11,60000%	15-Agust-18	1.950.000.000.000	1.922.742.741.500	5.532.150.000	27.257.258.500		1.955.532.150.000	54.732.488.830.000
Reg	22-Agust-06	24-Agust-06	FR0039	11,75000%	15-Agust-23	4.175.000.000.000	4.114.561.783.000	11.998.950.000	60.438.217.000		4.186.998.950.000	58.919.487.780.000
DS	29-Agust-06	01-Sep-06	FR0038	11,60000%	15-Agust-18	236.000.000.000	232.979.200.000	1.264.724.000	3.020.800.000		237.264.724.000	59.156.752.504.000

www.peraturan.go.id

Lampiran 3

REALISASI PENERBITAN SUN DOMESTIK 2006

No	Tanggal Lelang	Tanggal Penerbitan	Seri	Coupon	Jatuh Tempo	Nominal	Clean Proceeds	Accrued Interest	Discount	Premium	Penerimaan Penerbitan	Akumulasi
						MAP 711424		MAP 711423				
DS	12-Sep-06	15-Sep-06	FR0038	11,600000%	15-Agust-18	897.000.000.000	894.309.000.000	8.765.484.000	2.691.000.000		905.765.484.000	60.062.517.988.000
Reg	19-Sep-06	21-Sep-06	FR0040	11,000000%	15-Sep-25	2.400.000.000.000	2.367.903.919.000	4.375.200.000	32.096.081.000		2.404.375.200.000	62.466.893.188.000
DS	26-Sep-06	29-Sep-06	FR0040	11,000000%	15-Sep-25	125.000.000.000	122.075.000.000	531.750.000	2.925.000.000		125.531.750.000	62.592.424.938.000
Reg	10-Okt-06	12-Okt-06	FR0041	9,250000%	15-Nop-08	1.100.000.000.000	1.089.968.550.000	41.474.400.000	10.031.450.000		1.141.474.400.000	63.733.899.338.000
DS	17-Okt-06	20-Okt-06	FR0031	11,000000%	15-Nop-20	4.246.000.000.000	4.237.508.000.000	200.530.088.000	8.492.000.000		4.446.530.088.000	68.180.429.426.000
DS	21-Nop-06	24-Nop-06	FR0026	11,000000%	15-Okt-14	907.000.000.000	925.140.000.000	10.963.816.000		18.140.000.000	917.963.816.000	69.098.393.242.000
DS	05-Des-06	08-Des-06	FR0040	11,000000%	15-Sep-25	6.191.000.000.000	6.191.000.000.000	158.025.275.000	-	-	6.349.025.275.000	75.447.418.517.000
				Reguler (Reg)		42.578.650.000.000	41.685.851.874.400	927.034.640.000	1.005.036.598.600	112.238.473.000	43.505.684.640.000	606.248.137.054.000
				Debt Switching (DS)		31.179.000.000.000	31.471.603.300.000	762.733.877.000	84.064.600.000	376.667.900.000	31.941.733.877.000	591.523.178.545.000
				TOTAL		73.757.650.000.000	73.157.455.174.400	1.689.768.517.000	1.089.101.198.600	488.906.373.000	75.447.418.517.000	1.197.771.315.599.000

www.peraturan.go.id

Lampiran 4

Rincian Transaksi Debt Switching Tahun 2006

No	Tanggal Setelmen	Seri yang Ditarik	Nominal	Pembayaran Bunga Berjalan	Pembayaran Pokok	Total Cash Paid	Seri yang Diterbitkan	Kupon	Jatuh Tempo	Nominal	Clean Proceeds	Accrued Interest	Discount (Premium)
1	21-Feb-06	VR0011	20.000.000.000	608.880.000	19.970.000.000	20.578.880.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	20.000.000.000	19.292.000.000	478.240.000	708.000.000
		VR0012	100.000.000.000	2.067.600.000	99.650.000.000	101.717.600.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	100.000.000.000	96.460.000.000	2.391.200.000	3.540.000.000
		VR0013	160.000.000.000	1.549.920.000	159.235.000.000	160.784.920.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	160.000.000.000	154.336.000.000	3.825.920.000	5.664.000.000
			280.000.000.000	**4.226.400.000**	**278.855.000.000**	**283.081.400.000**				**280.000.000.000**	**270.088.000.000**	**6.695.360.000**	**9.912.000.000**
2	28-Mar-06	FR0002	128.000.000.000	5.070.720.000	135.020.000.000	140.090.720.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	128.000.000.000	127.334.400.000	542.592.000	665.600.000
		FR0005	615.000.000.000	14.984.475.000	617.724.000.000	632.708.475.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	615.000.000.000	611.802.000.000	2.606.985.000	3.198.000.000
		FR0029	151.000.000.000	6.463.102.000	147.683.000.000	154.146.102.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	151.000.000.000	150.214.800.000	640.089.000	785.200.000
		VR0011	195.000.000.000	2.193.945.000	194.857.500.000	197.051.445.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	195.000.000.000	193.986.000.000	826.605.000	1.014.000.000
		VR0012	1.067.000.000.000	1.107.546.000	1.062.961.500.000	1.064.069.046.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	1.067.000.000.000	1.061.451.600.000	4.523.013.000	5.548.400.000
		VR0013	1.904.000.000.000	42.350.672.000	1.897.097.000.000	1.939.447.672.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	1.904.000.000.000	1.894.099.200.000	8.071.056.000	9.900.800.000
		VR0014	602.000.000.000	6.773.102.000	599.002.500.000	605.775.602.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	602.000.000.000	598.869.600.000	2.551.878.000	3.130.400.000
		VR0015	1.615.000.000.000	1.676.370.000	1.605.573.000.000	1.607.249.370.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	1.615.000.000.000	1.606.602.000.000	6.845.985.000	8.398.000.000
		VR0016	12.000.000.000	266.916.000	11.910.000.000	12.176.916.000	FR0022	12,00%	15-Sep-11	12.000.000.000	11.937.600.000	50.868.000	62.400.000
			6.289.000.000.000	**80.886.848.000**	**6.271.828.500.000**	**6.352.715.348.000**				**6.289.000.000.000**	**6.256.297.200.000**	**26.659.071.000**	**32.702.800.000**
3	12-Mei-06	FR0002	-	-	-	-	FR0036	11,50%	15-Sep-19	-	-	-	-
		FR0005	95.000.000.000	3.761.335.000	95.475.000.000	99.236.335.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	95.000.000.000	93.955.000.000	1.721.875.000	1.045.000.000
		FR0029	60.000.000.000	420.480.000	58.650.000.000	59.070.480.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	60.000.000.000	59.340.000.000	1.087.500.000	660.000.000
		VR0011	10.000.000.000	275.840.000	9.990.000.000	10.265.840.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	10.000.000.000	9.890.000.000	181.250.000	110.000.000
		VR0012	30.000.000.000	498.120.000	29.960.000.000	30.458.120.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	30.000.000.000	29.670.000.000	543.750.000	330.000.000
		VR0013	115.000.000.000	679.190.000	114.790.000.000	115.469.190.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	115.000.000.000	113.735.000.000	2.084.375.000	1.265.000.000
		VR0014	806.000.000.000	22.232.704.000	803.808.000.000	826.040.704.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	806.000.000.000	797.134.000.000	14.608.750.000	8.866.000.000
		VR0015	570.000.000.000	9.464.280.000	567.685.000.000	577.149.280.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	570.000.000.000	563.730.000.000	10.331.250.000	6.270.000.000
		VR0016	525.000.000.000	3.100.650.000	520.275.000.000	523.375.650.000	FR0036	11,50%	15-Sep-19	525.000.000.000	519.225.000.000	9.515.625.000	5.775.000.000
			2.211.000.000.000	**40.432.599.000**	**2.200.633.000.000**	**2.241.065.599.000**				**2.211.000.000.000**	**2.186.679.000.000**	**40.074.375.000**	**24.321.000.000**
4	30-Jun-06	FR0002	190.000.000.000	1.090.220.000	198.512.500.000	199.602.720.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	190.000.000.000	194.047.000.000	11.457.190.000	(4.047.000.000)
		FR0005	20.000.000.000	1.123.480.000	20.035.000.000	21.158.480.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	20.000.000.000	20.426.000.000	1.206.020.000	(426.000.000)
		FR0029	18.000.000.000	355.036.000	17.645.000.000	18.000.086.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	18.000.000.000	18.383.400.000	1.085.418.000	(383.400.000)

www.peraturan.go.id

Lampiran 4
Rincian Transaksi Debt Switching Tahun 2006

No	Tanggal Setelmen	Seri yang Ditarik	Nominal	Pembayaran Bunga Berjalan	Pembayaran Pokok	Total Cash Paid	Seri yang Diterbitkan	Kupon	Jatuh Tempo	Nominal	Clean Proceeds	Accrued Interest	Discount (Premium)
		VR0011	107.000.000.000	1.272.658.000	106.989.500.000	108.262.158.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	107.000.000.000	109.279.100.000	6.452.207.000	(2.279.100.000)
		VR0012	286.000.000.000	472.472.000	285.900.000.000	286.372.472.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	286.000.000.000	292.091.800.000	17.246.086.000	(6.091.800.000)
		VR0013	-	-	-	-	FR0017	13,15%	15-Jan-12	-	-	-	-
		VR0014	706.000.000.000	8.397.164.000	705.969.000.000	714.366.164.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	706.000.000.000	721.037.800.000	42.572.506.000	(15.037.800.000)
		VR0015	212.000.000.000	350.224.000	211.974.500.000	212.324.724.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	212.000.000.000	216.515.600.000	12.783.812.000	(4.515.600.000)
		VR0016	1.509.000.000.000	34.599.861.000	1.509.000.000.000	1.543.599.861.000	FR0017	13,15%	15-Jan-12	1.509.000.000.000	1.541.141.700.000	90.994.209.000	(32.141.700.000)
			3.048.000.000.000	**47.661.165.000**	**3.056.025.500.000**	**3.103.686.665.000**				**3.048.000.000.000**	**3.112.922.400.000**	**183.797.448.000**	**(64.922.400.000)**
5	28-Jul-06	FR0002	5.000.000.000	82.240.000	5.275.000.000	5.357.240.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	5.000.000.000	5.129.500.000	75.190.000	(129.500.000)
		FR0005	291.000.000.000	1.259.157.000	292.044.000.000	293.303.157.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	291.000.000.000	298.536.900.000	4.376.058.000	(7.536.900.000)
		FR0029	143.000.000.000	3.860.285.000	140.898.500.000	144.758.785.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	143.000.000.000	146.703.700.000	2.150.434.000	(3.703.700.000)
		VR0011	90.000.000.000	1.903.050.000	90.000.000.000	91.903.050.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	90.000.000.000	92.331.000.000	1.353.420.000	(2.331.000.000)
		VR0012	1.308.000.000.000	14.261.124.000	1.307.771.000.000	1.322.032.124.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	1.308.000.000.000	1.341.877.200.000	19.669.704.000	(33.877.200.000)
		VR0013	236.000.000.000	233.876.000	235.926.500.000	236.160.376.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	236.000.000.000	242.112.400.000	3.548.968.000	(6.112.400.000)
		VR0014	185.000.000.000	3.911.825.000	184.882.500.000	188.794.325.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	185.000.000.000	189.791.500.000	2.782.030.000	(4.791.500.000)
		VR0015	107.000.000.000	1.166.621.000	106.931.500.000	108.098.121.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	107.000.000.000	109.771.300.000	1.609.066.000	(2.771.300.000)
		VR0016	-	-	-	-	FR0034	12,80%	15-Jun-21	-	-	-	-
			2.365.000.000.000	**26.678.178.000**	**2.363.729.000.000**	**2.390.407.178.000**				**2.365.000.000.000**	**2.426.253.500.000**	**35.564.870.000**	**(61.253.500.000)**
6	11-Agust-06	FR0002	526.000.000.000	11.468.378.000	559.383.500.000	570.851.878.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	526.000.000.000	553.878.000.000	10.485.284.000	(27.878.000.000)
		FR0005	626.000.000.000	5.626.488.000	630.185.500.000	635.811.988.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	626.000.000.000	659.178.000.000	12.478.684.000	(33.178.000.000)
		FR0029	127.000.000.000	3.889.756.000	125.370.000.000	129.259.756.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	127.000.000.000	133.731.000.000	2.531.618.000	(6.731.000.000)
		VR0011	65.000.000.000	1.675.050.000	65.000.000.000	66.675.050.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	65.000.000.000	68.445.000.000	1.255.710.000	(3.445.000.000)
		VR0012	592.000.000.000	9.192.576.000	591.972.500.000	601.165.076.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	592.000.000.000	623.376.000.000	11.860.928.000	(31.376.000.000)
		VR0013	730.000.000.000	4.100.410.000	729.740.000.000	733.840.410.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	730.000.000.000	768.690.000.000	14.551.820.000	(38.690.000.000)
		VR0014	176.000.000.000	4.535.520.000	175.955.000.000	180.490.520.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	176.000.000.000	185.328.000.000	3.508.384.000	(9.328.000.000)
		VR0015	30.000.000.000	465.840.000	30.000.000.000	30.465.840.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	30.000.000.000	31.590.000.000	598.020.000	(1.590.000.000)
		VR0016	1.512.000.000.000	8.492.904.000	1.505.600.000.000	1.514.092.904.000	FR0034	12,80%	15-Jun-21	1.512.000.000.000	1.592.136.000.000	30.140.208.000	(80.136.000.000)
			4.384.000.000.000	**49.446.922.000**	**4.413.206.500.000**	**4.462.653.422.000**				**4.384.000.000.000**	**4.616.352.000.000**	**87.390.656.000**	**(232.352.000.000)**

www.peraturan.go.id

Lampiran 4
Rincian Transaksi Debt Switching Tahun 2006

No	Tanggal Setelmen	Seri yang Ditarik	Nominal	Pembayaran Bunga Berjalan	Pembayaran Pokok	Total Cash Paid	Seri yang Diterbitkan	Kupon	Jatuh Tempo	Nominal	Clean Proceeds	Accrued Interest	Discount (Premium)
7	01-Sep-06	FR0002	141.000.000.000	4.206.876.000	150.024.000.000	154.230.876.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	141.000.000.000	139.195.200.000	755.619.000	1.804.800.000
		FR0005	-	-	-	-	FR0038	11,60%	15-Agust-18	-	-	-	-
		FR0029	-	-	-	-	FR0038	11,60%	15-Agust-18	-	-	-	-
		VR0011	51.000.000.000	110.211.000	51.000.000.000	51.110.211.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	51.000.000.000	50.347.200.000	273.309.000	652.800.000
		VR0012	9.000.000.000	202.194.000	9.000.000.000	9.202.194.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	9.000.000.000	8.884.800.000	48.231.000	115.200.000
		VR0013	10.000.000.000	125.550.000	10.000.000.000	10.125.550.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	10.000.000.000	9.872.000.000	53.590.000	128.000.000
		VR0014	25.000.000.000	54.025.000	25.000.000.000	25.054.025.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	25.000.000.000	24.680.000.000	133.975.000	320.000.000
		VR0015	-	-	-	-	FR0038	11,60%	15-Agust-18	-	-	-	-
		VR0016	-	-	-	-	FR0038	11,60%	15-Agust-18	-	-	-	-
			236.000.000.000	4.698.856.000	245.024.000.000	249.722.856.000				236.000.000.000	232.979.200.000	1.264.724.000	3.020.800.000
8	15-Sep-06	FR0002	150.000.000.000	5.278.650.000	160.700.000.000	165.978.650.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	150.000.000.000	149.550.000.000	1.465.800.000	450.000.000
		FR0005	126.000.000.000	2.600.514.000	127.481.000.000	130.081.514.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	126.000.000.000	125.622.000.000	1.231.272.000	378.000.000
		FR0029	130.000.000.000	5.162.690.000	128.980.000.000	134.142.690.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	130.000.000.000	129.610.000.000	1.270.360.000	390.000.000
		VR0011	50.000.000.000	324.100.000	50.000.000.000	50.324.100.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	50.000.000.000	49.850.000.000	488.600.000	150.000.000
		VR0012	-	-	-	-	FR0038	11,60%	15-Agust-18	-	-	-	-
		VR0013	55.000.000.000	944.900.000	55.000.000.000	55.944.900.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	55.000.000.000	54.835.000.000	537.460.000	165.000.000
		VR0014	386.000.000.000	2.502.052.000	386.000.000.000	388.502.052.000	FR0038	11,60%	15-Agust-18	386.000.000.000	384.842.000.000	3.771.992.000	1.158.000.000
		VR0015	-	-	-	-	FR0038	11,60%	15-Agust-18	-	-	-	-
		VR0016	-	-	-	-	FR0038	11,60%	15-Agust-18	-	-	-	-
			897.000.000.000	16.812.906.000	908.161.000.000	924.973.906.000				897.000.000.000	894.309.000.000	8.765.484.000	2.691.000.000
9	29-Sep-06	FR0002	25.000.000.000	1.013.650.000	27.187.500.000	28.201.150.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	25.000.000.000	24.415.000.000	106.350.000	585.000.000
		FR0005	100.000.000.000	2.529.900.000	102.350.000.000	104.879.900.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	100.000.000.000	97.660.000.000	425.400.000	2.340.000.000
		FR0029	-										
		VR0011	-										
		VR0012	-										
		VR0013	-										
		VR0014	-										

www.peraturan.go.id

Lampiran 4

Rincian Transaksi Debt Switching Tahun 2006

No	Tanggal Setelmen	Seri yang Ditarik	Nominal	Pembayaran Bunga Berjalan	Pembayaran Pokok	Total Cash Paid	Seri yang Diterbitkan	Kupon	Jatuh Tempo	Nominal	Clean Proceeds	Accrued Interest	Discount (Premium)
		VR0015	-										
		VR0016	-										
			125.000.000.000	3.543.550.000	129.537.500.000	133.081.050.000				125.000.000.000	122.075.000.000	531.750.000	2.925.000.000
10	20-Okt-06	FR0002	883.000.000.000	42.895.257.000	969.944.000.000	1.012.839.257.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	883.000.000.000	881.234.000.000	41.702.324.000	1.766.000.000
		FR0005	1.255.000.000.000	40.522.695.000	1.280.045.000.000	1.320.567.695.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	1.255.000.000.000	1.252.490.000.000	59.271.140.000	2.510.000.000
		FR0029	95.000.000.000	123.975.000	94.990.000.000	95.113.975.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	95.000.000.000	94.810.000.000	4.486.660.000	190.000.000
		VR0011	310.000.000.000	5.358.660.000	310.000.000.000	315.358.660.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	310.000.000.000	309.380.000.000	14.640.680.000	620.000.000
		VR0012	35.000.000.000	273.070.000	35.000.000.000	35.273.070.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	35.000.000.000	34.930.000.000	1.652.980.000	70.000.000
		VR0013	385.000.000.000	11.066.055.000	385.000.000.000	396.066.055.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	385.000.000.000	384.230.000.000	18.182.780.000	770.000.000
		VR0014	1.183.000.000.000	20.449.338.000	1.183.000.000.000	1.203.449.338.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	1.183.000.000.000	1.180.634.000.000	55.870.724.000	2.366.000.000
		VR0015	100.000.000.000	780.200.000	99.950.000.000	100.730.200.000	FR0031	11,00%	15-Nop-20	100.000.000.000	99.800.000.000	4.722.800.000	200.000.000
		VR0016	-	-	-	-							
			4.246.000.000.000	121.469.250.000	4.357.929.000.000	4.479.398.250.000				4.246.000.000.000	4.237.508.000.000	200.530.088.000	8.492.000.000
11	24-Nop-06	FR0002	110.000.000.000	6.816.370.000	121.360.000.000	128.176.370.000	FR0026	11,00%	15-Okt-14	110.000.000.000	112.200.000.000	1.329.680.000	(2.200.000.000)
		FR0005	662.000.000.000	29.088.280.000	677.124.000.000	706.212.280.000	FR0026	11,00%	15-Okt-14	662.000.000.000	675.240.000.000	8.002.256.000	(13.240.000.000)
		FR0029	-	-	-	-	FR0026	11,00%	15-Okt-14	-	-	-	-
		VR0011	29.000.000.000	814.610.000	29.000.000.000	29.814.610.000	FR0026	11,00%	15-Okt-14	29.000.000.000	29.580.000.000	350.552.000	(580.000.000)
		VR0012	-	-	-	-	FR0026	11,00%	15-Okt-14	-	-	-	-
		VR0013	61.000.000.000	564.860.000	61.000.000.000	61.564.860.000	FR0026	11,00%	15-Okt-14	61.000.000.000	62.220.000.000	737.368.000	(1.220.000.000)
		VR0014	20.000.000.000	561.800.000	20.000.000.000	20.561.800.000	FR0026	11,00%	15-Okt-14	20.000.000.000	20.400.000.000	241.760.000	(400.000.000)
		VR0015	25.000.000.000	468.100.000	25.000.000.000	25.468.100.000	FR0026	11,00%	15-Okt-14	25.000.000.000	25.500.000.000	302.200.000	(500.000.000)
		VR0016	-	-	-	-	FR0026	11,00%	15-Okt-14	-	-	-	-
			907.000.000.000	38.314.020.000	933.484.000.000	971.798.020.000				907.000.000.000	925.140.000.000	10.961.816.000	(18.140.000.000)
12	08-Des-06	FR0002	385.000.000.000	25.918.970.000	425.710.000.000	451.628.970.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	385.000.000.000	385.000.000.000	9.827.125.000	-
		FR0005	455.000.000.000	22.113.455.000	465.825.000.000	487.938.455.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	455.000.000.000	455.000.000.000	11.613.875.000	-
		FR0010	593.000.000.000	18.094.802.000	653.153.000.000	671.247.802.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	593.000.000.000	593.000.000.000	15.136.325.000	-
		FR0011	-	-	0	-	FR0040	11,00%	15-Sep-25	-	-	-	-

www.peraturan.go.id

Lampiran 4

Rincian Transaksi Debt Switching Tahun 2006

No	Tanggal Setelmen	Seri yang Ditarik	Nominal	Pembayaran Bunga Berjalan	Pembayaran Pokok	Total Cash Paid	Seri yang Diterbitkan	Kupon	Jatuh Tempo	Nominal	Clean Proceeds	Accrued Interest	Discount (Premium)
		FR0012	63.000.000.000	505.323.000	68.377.000.000	68.882.323.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	63.000.000.000	63.000.000.000	1.608.075.000	-
		FR0013	166.000.000.000	5.941.638.000	195.011.000.000	200.952.638.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	166.000.000.000	166.000.000.000	4.237.150.000	-
		FR0014	-	-	-	-	FR0040	11,00%	15-Sep-25	-	-	-	-
		FR0015	730.000.000.000	30.568.750.000	813.360.000.000	843.928.750.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	730.000.000.000	730.000.000.000	18.633.250.000	-
		FR0016	1.027.000.000.000	43.165.837.000	1.155.371.500.000	1.198.537.337.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	1.027.000.000.000	1.027.000.000.000	26.214.175.000	-
		FR0021	91.000.000.000	6.345.157.000	104.495.000.000	110.840.157.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	91.000.000.000	91.000.000.000	2.322.775.000	-
		FR0022	50.000.000.000	1.392.250.000	53.600.000.000	54.992.250.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	50.000.000.000	50.000.000.000	1.276.250.000	-
		FR0024	545.000.000.000	9.702.090.000	582.500.500.000	592.202.590.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	545.000.000.000	545.000.000.000	13.911.125.000	-
		FR0025	1.000.000.000	14.835.000	997.000.000	1.011.835.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	1.000.000.000	1.000.000.000	25.525.000	-
		FR0029	240.000.000.000	3.382.320.000	240.745.000.000	244.127.320.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	240.000.000.000	240.000.000.000	6.126.000.000	-
		VR0011	190.000.000.000	637.640.000	190.000.000.000	190.637.640.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	190.000.000.000	190.000.000.000	4.849.750.000	-
		VR0012	185.000.000.000	4.272.205.000	185.000.000.000	189.272.205.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	185.000.000.000	185.000.000.000	4.722.125.000	-
		VR0013	63.000.000.000	855.666.000	62.960.000.000	63.815.666.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	63.000.000.000	63.000.000.000	1.608.075.000	-
		VR0014	233.000.000.000	781.948.000	232.827.000.000	233.608.948.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	233.000.000.000	233.000.000.000	5.947.325.000	-
		VR0015	699.000.000.000	16.142.007.000	698.851.500.000	714.993.507.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	699.000.000.000	699.000.000.000	17.841.975.000	-
		VR0016	-	-	-	-	FR0040	11,00%	15-Sep-25	-	-	-	-
		VR0017	475.000.000.000	10.969.175.000	474.130.000.000	485.099.175.000	FR0040	11,00%	15-Sep-25	475.000.000.000	475.000.000.000	12.124.375.000	-
			6.191.000.000.000	200.804.068.000	6.602.913.500.000	6.803.717.568.000				6.191.000.000.000	6.191.000.000.000	158.025.275.000	-

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17	18	19=14 s/d 18	20	21=19*20
1	ANEKA INDUSTRI	PT Garam	5	KS	120.517	136.665	52.526	309.709	88.963	7.701	96.665	-	200.000	-	-	-	13.045	213.045	100,00%	213.045
		PT Industri Gelas (IGLAS)	2	TS	73.956	154.566	-	228.522	142.157	78.625	220.782	-	47.007	-	-	94.583	(133.850)	7.740	63,82%	4.940
		PT Industri Soda Indonesian (ISI)	6	TS	13.800	138.912	4.863	157.576	113.171	127.397	241.069	-	15.000	-	-	4.420	(102.913)	(83.493)	100,00%	(83.493)
2	ANGKUTAN DARAT	Perum DAMRI	2	S	28.880	172.565	2.742	204.187	67.596	46.796	114.393	-	19.700	110.811	9.636	1.738	(52.091)	89.794	100,00%	89.794
		PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta	2	TS	112.723	17.103	1.808	131.635	225.588	-	225.588		231.769	153.820	-	9.901	(489.442)	(93.953)	100,00%	(93.953)
		PT Kereta Api Indonesia (KAI)	2	S	1.968.484	2.324.455	295.313	4.588.252	1.065.669	290.513	1.356.182	-	2.200.000	-	696.820	185.864	149.387	3.232.071	100,00%	3.232.071
3	ASURANSI	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	1	S	51.877	3.397.698	1.965	3.451.539	24.238	2.946.389	2.970.627	-	90.000	(78)	-	15.247	375.743	480.913	100,00%	480.913
		PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	1	KS	39.716	558.694	18.622	617.032	27.350	60.497	88.147	-	300.000	-	-	-	228.685	528.685	100,00%	528.685
		PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	1	S	625.931	931.548	12.815	1.570.294	845.915	130.771	976.686	3.310	155.000	-	-	-	435.298	590.298	100,00%	590.298
		PT Asuransi Jasa Raharja	1	S	158.466	1.849.142	5.291	2.012.899	727.577	3.795	731.372	56.731	500.000	-	-	-	724.797	1.224.797	100,00%	1.224.797
		PT Asuransi Jiwasraya	1	S	198.016	4.159.929	74.803	4.432.747	101.923	3.899.730	4.001.653	-	235.000	3.038	-	-	193.057	431.094	100,00%	431.094
		PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	1	S	2.706.329	686.714	50.059	3.443.103	148.371	1.724.439	1.872.811	-	400.000	-	-	-	1.170.292	1.570.292	100,00%	1.570.292
		PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	2	SS	854.466	48.789.037	125.211	49.768.714	480.017	46.428.410	46.908.427	-	125.000	-	-	2.735.287	-	2.860.287	100,00%	2.860.287
		PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	1	KS	233.623	356.123	2.019	591.765	86.501	565.443	651.944	2	40.000	-	-	16.696	(116.878)	(60.181)	100,00%	(60.181)
		PT Taspen	2	S	679.151	16.915.221	2.210.950	19.805.322	53.949	18.091.317	18.145.266	7.693	12.500	(3.188)	-	-	1.643.051	1.652.363	100,00%	1.652.363
4	BAJA & KONSTRUKSI BAJA	PT Barata Indonesia	1	KS	162.352	59.788	22.970	245.109	144.827	13.804	158.631	-	128.203	102.630	-	-	(144.356)	86.478	100,00%	86.478
		PT Boma Bisma Indra (BBI)	3	TS	69.755	29.869	35.541	135.165	127.602	91.181	218.783	-	4.800	224.876	-	-	(313.294)	(83.618)	100,00%	(83.618)
		PT Krakatau Steel (KS)	2	KS	6.615.758	3.194.659	308.192	10.118.609	3.767.348	1.341.943	5.109.291	-	2.000.000	1.303.465	-	381	1.705.472	5.009.318	100,00%	5.009.318
5	DOK DAN PERKAPALAN	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	2	KS	210.941	383.725	18.005	612.671	1.325.669	1.254.581	2.580.250	-	76.600	85	-	-	(2.044.264)	(1.967.579)	99,40%	(1.955.774)
		PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	2	S	88.955	58.226	13.103	160.285	100.923	5.247	106.169	-	40.535	402	-	-	13.179	54.115	100,00%	54.115
		PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	5	KS	50.445	109.065	35.679	245.189	31.602	208.952	240.564	-	3.521	-	-	53.173	(52.069)	4.625	100,00%	4.625
		PT PAL Indonesia	2	KS	2.227.376	857.955	49.226	3.134.557	1.469.986	353.152	1.823.139	-	1.137.331	-	-	181.034	(6.947)	1.311.418	100,00%	1.311.418
6	ENERGI	PT Konversi Energi Abadi (KONEBA)	1	S	13.915	7.978	691	22.585	7.175	443	7.618	-	9.100	6.455	-	-	(589)	14.967	100,00%	14.967
		PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	1	S	1.973.164	13.111.677	29.060	15.113.902	1.359.569	7.620.676	8.980.245	557.623	2.268.483	1.152.622	-	(599.437)	2.754.366	5.576.033	55,26%	3.081.093
		PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	2	KS	30.207.722	195.989.284	22.609.030	248.806.036	26.227.722	82.350.116	108.577.238	-	46.107.154	25.852.391	-	137.556.253	(69.287.000)	140.228.798	100,00%	140.228.798

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17	18	19=14 s/d 18	20	21=19*20
		PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	1	S	2.347.761	566.071	193.902	3.107.734	431.533	368.560	800.093	12.181	1.152.066	30.485	-	-	1.112.909	2.295.460	65,02%	1.492.448
7	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	PT Batan Teknologi	1	S	28.689	9.059	-	37.748	6.085	-	6.085	-	25.000	2.200	-	-	4.463	31.663	100,00%	31.663
		PT Industri Kereta Api (INKA)	1	KS	238.359	25.142	30.077	293.578	209.816	33.174	242.991	-	80.280	39.646	-	-	(69.339)	50.587	100,00%	50.587
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	1	S	784.050	82.133	13.052	879.234	331.466	56.065	387.532	2.795	350.000	2.847	-	-	136.061	488.908	100,00%	488.908
		PT LEN Industri	1	S	203.164	7.041	43.774	253.979	154.316	32.958	187.273	522	45.601	8.083	-	-	12.499	66.184	100,00%	66.184
8	INDUSTRI FARMASI	PT Biofarma	1	S	335.723	248.846	15.340	599.908	64.421	20.749	85.170	-	250.000	-	-	-	264.739	514.739	100,00%	514.739
		PT Indo Farma, Tbk	1	KS	563.170	118.787	4.980	686.937	379.342	27.110	406.451	1	309.927	75.100	-	-	(104.541)	280.486	80,66%	226.240
		PT Kimia Farma, Tbk	1	S	747.904	421.648	91.673	1.261.225	352.671	37.900	390.571	-	555.400	43.580	-	44.852	226.823	870.654	90,03%	783.850
9	INDUSTRI PERTAHANAN	PT Dahana	2	S	210.972	49.562	-	260.534	132.319	5.361	137.680	-	76.090	-	-	23.155	23.609	122.854	100,00%	122.854
		PT PINDAD	1	S	464.172	116.830	37.605	618.607	210.238	241.049	451.288	2	367.542	2.526	-	-	(202.751)	167.317	100,00%	167.317
10	INDUSTRI SANDANG	PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	2	KS	85.661	130.102	7.508	223.272	279.944	54.652	334.595	-	197.500	1.369	-	-	(310.193)	(111.324)	100,00%	(111.324)
		PT Primissima	5	KS	37.769	21.181	1.561	60.512	35.176	-	35.176	-	3.749	121	-	1.756	19.710	25.336	52,79%	13.375
11	JASA KONSTRUKSI	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	2	KS	987.914	212.073	7.550	1.207.537	370.551	304.397	674.948	-	1.000	430.673	2.594	55.036	43.286	532.589	100,00%	532.589
		PT Adhi Karya	1	S	2.571.437	203.952	94.559	2.869.948	2.152.017	273.532	2.425.550	3.737	180.132	19.144	-	904	240.481	440.661	51,00%	224.737
		PT Brantas Abipraya	2	KS	138.693	84.374	839	223.907	235.896	41.044	276.940	-	10.000	-	-	34.808	(97.841)	(53.033)	100,00%	(53.033)
		PT Hutama Karya (HK)	1	S	1.269.095	133.872	35.200	1.438.167	1.083.486	124.376	1.207.362	-	20.000	-	-	78.023	132.282	230.305	100,00%	230.305
		PT Istaka Karya	2	KS	219.119	95.923	39.934	354.976	403.858	52.442	456.300	-	50.000	-	-	8.440	(159.764)	(101.324)	100,00%	(101.324)
		PT Nindya Karya	2	S	677.057	86.264	23.559	786.880	614.659	97.055	711.714	-	17.000	7.010	-	45.857	5.300	75.167	100,00%	75.167
		PT Pembangunan Perumahan (PP)	1	S	1.832.912	119.782	19.028	1.971.721	1.497.079	192.678	1.689.757	-	110.000	-	-	-	171.964	281.964	51,00%	143.802
		PT Waskita Karya	1	S	1.728.736	203.794	8.224	1.940.753	1.479.859	135.359	1.615.217	-	180.000	-	-	-	145.536	325.536	100,00%	325.536
		PT Wijaya Karya (WIKA)	1	S	2.272.818	242.432	139.892	2.655.143	1.820.446	377.434	2.197.880	55.005	69.523	1	-	106.882	225.853	402.258	100,00%	402.258
12	JASA LAINNYA	Perum Jasa Tirta I	2	S	34.926	34.373	590	69.890	15.685	309	15.994	-	17.500	13.070	276	16.281	6.769	53.896	100,00%	53.896
		Perum Jasa Tirta II	1	S	110.953	180.691	19.298	310.942	33.636	14.962	48.599	-	124.727	-	44.802	-	92.814	262.343	100,00%	262.343
		PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	2	S	1.206.748	10.841	2.369	1.219.958	355.762	31.931	387.693	-	300.000	-	-	59.986	472.279	832.265	100,00%	832.265
		Perum Pegadaian	1	S	5.633.269	357.736	32.596	6.023.601	3.144.897	1.747.122	4.892.019	-	205.000	46.252	-	911	879.419	1.131.582	100,00%	1.131.582

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17	18	19=14 s/d 18	20	21=19*20
13	JASA PEMBIAYAAN	Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)	1	S	172.007	48.269	221.810	442.086	33.165	113.857	147.022	-	99.733	-	-	-	195.330	295.064	100,00%	295.064
		PT Danareksa	1	S	1.944.937	151.422	45.562	2.141.921	436.825	1.033.941	1.470.766	1	701.480	85.927	-	116.062	(232.316)	671.153	100,00%	671.153
		PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	1	TS	116.339	4.481	1.029	121.849	18.991	1.827	20.818	-	20.000	82.000	-	-	(969)	101.031	100,00%	101.031
		PT PANN Multi Finance	1	SS	594.498	10.824	1.133.049	1.738.370	1.524.110	1.727.184	3.251.294	-	45.997	192.066	-	-	(1.750.986)	(1.512.923)	93,04%	(1.407.624)
		PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	1	S	1.939.721	37.288	20.628	1.997.636	1.553.967	7.428	1.561.395	1	300.000	-	-	169	136.071	436.240	100,00%	436.240
14	JASA PENILAI	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	1	S	40.457	28.547	3.055	72.059	19.527	1.783	21.311	-	6.000	-	-	979	43.770	50.749	100,00%	50.749
		PT Sucofindo	2	S	402.942	259.214	16.513	678.668	281.157	31.194	312.352	-	75.000	-	-	273.852	17.464	366.316	95,00%	348.001
		PT Surveyor Indonesia (SI)	2	S	225.377	61.270	22.162	308.809	36.069	33.802	69.871	-	25.000	-	-	(2.857)	216.795	238.938	85,12%	203.384
15	KAWASAN INDUSTRI	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	1	S	135.268	267.091	18.833	421.193	40.920	32.228	73.148	-	200.000	-	-	452	147.593	348.045	88,74%	308.855
		PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	1	S	36.835	14.226	12.668	63.729	10.708	3.066	13.774	-	34.550	-	-	-	15.406	49.956	60,00%	29.973
		PT Kawasan Industri Medan (KIM)	1	S	73.175	10.108	0	83.283	35.003	2.543	37.546	-	18.268	-	-	-	27.469	45.737	60,00%	27.442
		PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	2	KS	18.864	12.590	368	31.822	5.346	1.246	6.592	-	14.000	-	-	-	11.230	25.230	60,00%	15.138
		PT Pengembangan Daerah Industri - Pulau Batam	1	KS	10.381	19.742	8.448	38.571	5.590	350	5.940	-	19.000	7.184	-	-	6.448	32.632	100,00%	32.632
16	KEBANDARUDARAAN	PT Angkasa Pura I (AP I)	1	S	1.524.163	3.144.172	255.866	4.924.201	290.598	97.739	388.338	-	925.000	266.906	1.998.366	2.360	1.343.232	4.535.864	100,00%	4.535.864
		PT Angkasa Pura II (AP II)	1	S	1.906.245	3.547.298	310.151	5.763.694	288.213	58.738	346.951	-	1.900.000	200.055	1.599.101	-	1.717.587	5.416.743	100,00%	5.416.743
17	KEHUTANAN	Perum Perhutani	2	S	1.174.638	249.371	56.646	1.480.655	208.443	64.116	272.559	-	700.000	-	-	83.830	424.266	1.208.096	100,00%	1.208.096
		PT Inhutani I	5	KS	39.725	-	415.563	455.288	51.545	82.961	134.506	-	-	-	-	320.782	-	320.782	100,00%	320.782
		PT Inhutani II	5	KS	76.191	69.252	98.788	244.231	36.336	24.564	60.900	-	183.083	-	-	7.852	(7.604)	183.331	100,00%	183.331
		PT Inhutani III	5	KS	57.019	70.830	223.050	350.899	3.147	7.034	10.181	-	324.120	-	-	15.409	1.189	340.718	100,00%	340.718
		PT Inhutani IV	5	KS	9.611	78.110	7.211	94.932	14.133	8.054	22.187	-	92.253	-	-	13.116	(32.624)	72.745	100,00%	72.745
		PT Inhutani V	5	TS	1.620	148.248	12	149.879	124.043	5.190	129.233	-	132.659	-	-	44.862	(156.874)	20.646	100,00%	20.646
18	KERTAS	PT Kertas Leces	2	TS	263.144	889.273	38.998	1.191.415	499.075	948.435	1.447.510	-	140.073	101.976	-	507.117	(1.005.261)	(256.095)	100,00%	(256.095)
19	KONSULTAN KONSTRUKSI	PT Bina Karya	5	S	21.389	25.998	2.757	50.144	44.579	937	45.516	-	2.728	-	-	1.058	842	4.628	100,00%	4.628
		PT Indah Karya	2	S	13.415	6.855	2.062	22.332	16.323	1.333	17.656	-	7.000	-	-	1.900	(4.225)	4.675	100,00%	4.675
		PT Indra Karya	5	KS	23.409	17.246	285	40.940	29.404	3.289	32.693	-	2.000	-	-	6.247	-	8.247	100,00%	8.247

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17	18	19=14 s/d 18	20	21=19*20
		PT Virama Karya	5	S	25.601	2.126	263	27.990	12.777	-	12.777	-	7.400	-	-	-	7.813	15.213	100,00%	15.213
		PT Yodya Karya	2	S	31.246	2.643	1.012	34.902	26.259	-	26.259	-	3.500	3.832	-	-	1.311	8.643	100,00%	8.643
20	LOGISTIK	Perum Bulog	5	(blank)	7.632.864	3.253.830	597.006	11.483.700	5.203.199	-	5.203.199	-	6.354.565	-	1.062.820	-	(1.136.884)	6.280.502	100,00%	6.280.502
		PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	1	S	75.294	28.620	3.017	106.930	33.423	9.270	42.692	-	40.000	-	-	-	24.238	64.238	100,00%	64.238
		PT Pos Indonesia (POSINDO)	1	KS	2.576.527	731.886	89.188	3.219.226	2.268.349	187.167	2.455.516	(31.833)	425.000	5.023	-	-	168.130	598.152	100,00%	598.152
		PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	2	KS	29.925	11.560	2.702	44.187	52.387	-	52.387	-	11.000	-	-	3.149	(22.349)	(8.200)	100,00%	(8.200)
21	PARIWISATA	PT Bali Tourism & Development Corporation	2	S	131.244	76.995	36.219	244.458	19.567	47.618	67.185	-	82.500	30.000	-	40.740	24.033	177.273	100,00%	177.273
		PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	2	KS	46.208	110.821	37.654	194.683	44.413	108.941	153.354	-	101.700	82	-	-	(60.453)	41.329	100,00%	41.329
		PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	1	S	14.266	73.311	2.414	89.990	1.086	435	1.521	0	79.502	106	-	(1.230)	10.092	88.469	100,00%	88.469
		PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	1	S	555.325	525.571	150.483	1.231.379	82.008	104.321	186.329	-	312.000	143.059	1.987	-	588.004	1.045.050	100,00%	1.045.050
22	PELABUHAN	PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	1	S	1.227.418	3.369.153	105.235	4.701.806	458.738	545.694	1.004.432	32.401	1.000.000	35.735	-	-	2.629.239	3.664.974	100,00%	3.664.974
		PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	2	S	1.160.794	2.136.935	2.822	3.300.550	364.682	827.190	1.191.871	-	525.000	284.329	179.614	-	1.119.737	2.108.679	100,00%	2.108.679
		PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	1	S	210.509	749.007	11.800	971.317	80.921	73.124	154.045	-	133.000	217.624	252.524	-	214.124	817.272	100,00%	817.272
		PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	5	S	177.052	686.305	54.089	917.447	44.169	6.056	50.225	-	266.362	147.133	412.540	-	41.187	867.222	100,00%	867.222
23	PELAYARAN	PT Djakarta Lloyd	5	S	93.272	917.140	221.296	1.231.708	253.455	438.067	691.522	-	180.640	-	-	1.030.702	(671.156)	540.186	100,00%	540.186
		PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	2	S	87.023	13.802	6.346	107.171	68.762	2.663	71.425	-	21.674	-	-	12.230	1.842	35.746	100,00%	35.746
		PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	5	KS	825.476	4.283.862	70.079	5.179.417	404.685	418.416	823.100	-	359.000	-	1.945.288	3.245.627	(1.193.599)	4.356.316	100,00%	4.356.316
24	PENGERUKAN	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	2	KS	71.394	301.038	36.357	408.789	218.327	25.625	243.952	-	482.923	-	-	-	(318.086)	164.837	100,00%	164.837
25	PENUNJANG	PT Amarta Karya	2	KS	47.923	17.303	9.969	75.196	42.540	24.137	66.676	-	11.250	-	-	5.363	(8.094)	8.519	100,00%	8.519
	KONSTRUKSI	PT Jasa Marga	1	S	824.001	7.089.902	2.341.794	10.255.697	1.353.599	6.516.434	7.870.033	117	1.000.000	695	-	(386)	1.385.237	2.385.547	100,00%	2.385.547
		PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	1	S	8.789.412	4.754	10.413	8.804.579	4.810.982	35	4.811.017	-	3.000.000	-	-	-	993.562	3.993.562	100,00%	3.993.562
		PT Bank Mandiri, Tbk	1	S	254.464.203	8.089.564	4.963.425	267.517.192	237.010.986	4.157.360	241.171.346	5.176	10.315.609	6.433.948	-	3.478.023	6.113.090	26.340.670	69,11%	18.204.037
26	PERBANKAN	PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	1	S	160.804.564	4.471.223	4.139.786	169.415.573	152.044.443	2.552.210	154.596.653	24.651	7.042.194	2.525.661	-	1.329.124	3.897.290	14.794.269	99,12%	14.664.079
		PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	1	S	150.920.875	2.755.688	1.048.923	154.725.486	135.615.247	2.231.431	137.846.678	-	6.143.211	2.582.707	-	713.710	7.439.180	16.878.808	56,97%	9.615.857
		PT Bank Tabungan Negara (BTN)	1	S	32.187.746	307.296	80.755	32.575.797	30.543.357	272.164	30.815.521	-	1.250.000	13.843.540	-	-	(13.333.264)	1.760.276	100,00%	1.760.276

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17	18	19=14+16+18	20	21=19*20
27	PERCETAKAN & PENERBITAN	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	5	S	118.923	27.583	15.814	162.320	11.419	65.741	77.160	-	38.317	-	1.003	18.849	26.991	85.160	100,00%	85.160
		Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	2	S	705.150	716.667	7.022	1.428.839	394.867	438.846	833.713	-	363.573	-	-	82.650	148.903	595.126	100,00%	595.126
		PT Balai Pustaka (BP)	2	TS	52.710	7.517	1.361	61.589	89.689	4.716	94.405	-	10.000	-	-	-	(42.816)	(32.816)	100,00%	(32.816)
		PT Pradnya Paramita	2	KS	3.443	1.857	-	5.300	709	-	709	-	500	1.371	-	3.488	(768)	4.591	100,00%	4.591
28	PERDAGANGAN	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	2	TS	418.348	330.479	62.558	811.385	710.721	584.078	1.294.800	-	156.200	86	-	220.508	(860.208)	(483.415)	100,00%	(483.415)
		PT PP Berdikari	2	KS	251.186	71.839	5.468	328.493	150.064	28.568	178.632	-	75.000	-	-	20	74.841	149.861	100,00%	149.861
		PT Sarinah	2	S	35.343	78.120	6.722	120.185	23.965	13.113	37.077	11	25.000	-	-	-	58.096	83.096	100,00%	83.096
29	PERIKANAN	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	2	S	22.255	71.082	5.538	98.875	7.746	8.912	16.657	-	75.935	-	-	-	6.283	82.218	100,00%	82.218
		PT Perikanan Nusantara	5	(blank)	121.371	20.005	8.896	150.272	98.427	58.046	156.473	-	145.041	-	-	-	(151.242)	(6.201)	100,00%	(6.201)
		PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	2	KS	47.553	415.361	20.214	483.128	174.864	298.831	473.695	-	120.000	-	-	-	(110.567)	9.433	100,00%	9.433
		PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	1	KS	405.045	1.158.555	145.661	1.709.261	1.130.042	519.453	1.649.495	-	446.591	-	-	-	(386.825)	59.766	100,00%	59.766
		PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	1	S	470.391	2.462.195	57.193	2.989.779	795.998	901.939	1.697.936	1	315.000	-	-	6.005	970.836	1.291.841	100,00%	1.291.841
		PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	1	S	693.503	2.191.821	200.026	3.085.351	944.607	770.382	1.714.989	8.646	975.000	-	-	322	386.393	1.361.715	100,00%	1.361.715
		PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	1	S	483.779	416.738	24.205	924.722	599.355	134.803	734.158	-	165000	-	-	-	25.565	190.565	100,00%	190.565
		PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	1	S	485.805	1.198.825	183.690	1.868.321	501.116	664.099	1.165.216	-	298.813	-	-	-	404.292	703.105	100,00%	703.105
		PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	2	S	113.509	819.540	17.841	950.890	291.667	339.883	631.550	-	200.000	-	-	107.234	12.107	319.340	100,00%	319.340
30	PERKEBUNAN	PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	1	S	743.176	1.202.723	76.848	2.022.747	575.527	658.094	1.233.621	-	365.000	-	-	19.092	405.035	789.126	100,00%	789.126
		PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	1	S	397.601	579.416	379.288	1.356.305	440.029	287.479	727.508	4.107	270.000	-	-	-	354.690	624.690	100,00%	624.690
		PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	2	S	863.481	327.175	24.064	1.214.720	331.729	120.844	452.573	-	250.000	-	-	1.380	510.767	762.147	100,00%	762.147
		PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	2	S	762.556	220.053	101.439	1.084.048	198.322	342.804	701.126	-	165.000	-	-	217.922	-	382.922	100,00%	382.922
		PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	2	S	216.590	579.638	41.738	837.966	197.473	243.632	441.105	-	200.000	-	-	-	196.861	396.861	100,00%	396.861
		PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	1	S	969.322	303.187	1.567.287	550.723	366.228	916.951	-	650.336	-	-	-	650.336	100,00%	650.336		
		PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	5	KS	109.535	212.310	253.392	575.246	402.454	191.211	593.665	-	-	-	-	-	(18.419)	(18.419)	100,00%	(18.419)
		PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	2	S	1.737.992	1.076.985	321.009	3.438.986	2.495.432	230.557	2.725.989	130.618	352.425	-	-	-	229.954	582.379	100,00%	582.379

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17	18	19=14 s/d 18	20	21=19*20
31	PERTAMBANGAN	PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	1	S	3.317.603	3.547.866	425.436	7.290.906	1.179.516	1.829.784	3.009.300	3	953.846	2.526	-	20.335	3.304.895	4.281.602	65,00%	2.783.042
		PT Pertamina	5	S	89.326.242	97.845.034	3.035.680	190.206.956	33.335.521	20.373.466	53.708.987	270.529	106.046.389	-	-	(7.140.860)	37.321.912	136.227.441	100,00%	136.227.441
		PT Sarana Karya	2	TS	14.442	1.079	799	16.320	16.819	1.202	18.022	-	5.000	7.432	-	-	(14.133)	(1.701)	100,00%	(1.701)
		PT Timah, Tbk	1	S	2.352.411	583.077	526.734	3.462.222	1.488.816	296.506	1.785.322	271	251.651	120.792	-	1.984	1.302.202	1.676.629	65,00%	1.089.809
32	PERTANIAN	PT Pertani	2	KS	221.657	26.054	9.464	257.175	146.702	62.325	209.027	-	25.000	46.989	-	-	(23.841)	48.149	100,00%	48.149
		PT Sang Hyang Seri (SHS)	2	S	236.525	66.599	88.363	391.487	165.189	76.517	241.706	-	134.000	-	-	9.146	6.635	149.781	100,00%	149.781
33	PUPUK	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	1	S	7.609.269	12.611.232	293.836	20.514.337	4.956.235	6.885.692	11.841.928	89.923	3.953.966	-	-	-	4.627.727	8.581.693	100,00%	8.581.693
34	SEMEN	PT Semen Baturaja	1	S	204.644	404.432	18.199	627.275	148.583	336.103	484.686	-	60.414	1	-	-	82.175	142.590	100,00%	142.590
		PT Semen Gresik, Tbk	1	S	4.153.263	3.224.597	118.559	7.496.419	1.460.083	455.160	1.915.243	81.562	593.152	1.247.355	-	-	3.659.107	5.499.614	51,01%	2.805.353
35	TELEKOMUNIKASI	Perum Produksi Film Negara (PFN)	5	KS	2.269	31.567	-	33.836	5.482	62	5.544	-	40.000	14.904	-	-	(26.612)	28.292	100,00%	28.292
		PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	4	S	14.247.285	49.121.578	4.983.097	68.351.960	16.993.169	16.654.321	33.647.490	7.195.424	5.040.000	462.147	-	713.550	21.293.349	27.509.046	51,19%	14.081.881
36	USAHA PENERBANGAN	PT Garuda Indonesia (GIA)	2	KS	4.187.985	3.407.817	511.343	8.107.145	5.312.191	2.037.266	7.349.457	368	6.826.564	508.402	-	8.033	(6.585.679)	757.320	100,00%	757.320
		PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	2	KS	256.262	265.822	155.853	677.937	1.841.675	263.333	2.105.008	-	878.556	75.000	-	82.743	(2.463.370)	(1.427.071)	93,20%	(1.330.030)
37		PT Dirgantara Indonesia*	2		1.880.346	354.823	188.119	2.423.288	1.002.923	1.526.185	2.529.108	-	1.910.417	1.824.611	-	(3.840.848)	-	(105.820)	92,90%	(98.307)
		PT Sarana Multigriya Finansial*	1		1.002.721	120.427	-	1.123.148	6.110	1.264	7.373	-	1.000.000	-	-	-	115.775	1.115.775	100,00%	1.115.775
38		PT Survey Udara Penas**																		
		PT Kertas Kraft Aceh**																		
Grand Total					846.615.866	534.105.989	56.750.816	1.437.294.295	710.560.499	252.825.789	963.386.289	8.511.580	239.542.398	61.130.637	8.207.369	142.513.825	13.688.240	465.198.244		427.734.043

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat;

c) BPYBDS = Bagian Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya

* Masih dibawah pembinaan Departemen Keuangan

** Tidak Mengirimkan Laporan Keuangan

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
1	ASURANSI												
1	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	2	SS	729.160	650.023	79.137	1.643	-	80.781	-	80.781	-	80.781
2	PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	2	KS	61.602	41.273	20.329	328	531	20.126	-	20.126	-	20.126
3	PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	5	S	2.744.611	2.656.139	88.472	-	2.094	86.378	-	86.378	21.594	64.783
4	PT Asuransi Jasa Raharja	2	S	1.221.245	983.978	237.267	272.063	-	509.330	-	509.330	117.327	392.003
5	PT Asuransi Jiwasraya	5	S	2.325.158	2.279.696	45.462	12.774	27.022	31.214	-	31.214	213	31.001
6	PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	2	KS	3.220.286	3.079.274	141.012	393.124	130.443	403.694	-	403.694	56.491	347.203
7	PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	2	SS	7.633.162	2.359.057	5.274.105	15.419	4.334.858	954.666	-	954.666	161.116	793.549
8	PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	2	KS	469.720	418.446	51.274	-	42.895	8.379	-	8.379	(3.730)	12.110
9	PT Taspen	2	S	4.138.014	3.687.123	450.890	206.565	20.881	636.575	-	636.575	158	635.848
	Total		-	**22.542.958**	**16.155.009**	**6.387.948**	**901.917**	**4.558.724**	**2.731.142**	-	**2.731.142**	**353.169**	**2.377.403**
2	JASA PEMBIAYAAN												
1	Perum Pegadaian	2	S	1.939.794	1.457.570	482.224	20.068	1.048	501.244	(429)	500.815	126.447	374.367
2	Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)	2	S	222.060	194.168	27.892	22.595	8.440	42.047	-	42.047	-	42.047
3	PT Danareksa	2	S	333.181	232.323	100.858	23.462	2.301	122.019	-	122.019	30.017	92.002
4	PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	2	S	24.076	15.061	9.015	5.950	286	14.679	-	14.679	1.312	13.367
5	PT PANN Multi Finance	2	S	54.575	34.035	20.541	34.824	21.921	33.444	-	33.444	(801)	34.245
6	PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	2	S	182.091	135.890	46.201	8.625	9.798	45.028	-	45.028	12.209	32.819
	Total		-	**2.755.777**	**2.069.047**	**686.730**	**115.523**	**43.793**	**758.461**	**(429)**	**758.032**	**169.184**	**588.847**
3	PERBANKAN												
1	PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	2	S	859.414	498.604	360.809	733	3	361.539	-	361.539	115.659	245.880
2	PT Bank Mandiri, Tbk	1	S	27.750.217	6.861.975	2.732.574	48.517	33.301	2.747.790	-	2.747.790	408.724	1.844.838
3	PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	4	S	13.201.756	11.139.640	2.062.116	-	40.427	2.021.689	-	2.021.689	615.000	1.404.841
4	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	2	S	22.572.036	16.621.817	5.950.219	162.547	10.481	6.102.285	-	6.102.285	1.936.981	4.165.304

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
	5 PT Bank Tabungan Negara (BTN)	1	S	4.163.319	2.539.074	1.624.245	164.982	1.246.008	543.219	-	543.219	178.545	364.674
	Total		-	68.546.742	37.661.110	12.729.963	376.779	1.330.220	11.776.522	-	11.776.522	3.254.909	8.025.537
4	ANEKA INDUSTRI												
	1 PT Garam	5	KS	132.326	117.613	14.713	970	14.077	1.606	-	1.606	411	1.195
	2 PT Industri Gelas (IGLAS)	2	TS	164.375	221.481	(57.106)	11.256	4.880	(50.730)	-	(50.730)	-	(50.730)
	3 PT Industri Soda Indonesian (ISI)	6	TS	79.871	85.694	(5.823)	-	14.852	(20.675)	-	(20.675)	-	(20.675)
	Total		-	376.572	424.788	(48.216)	12.226	33.809	(69.799)	-	(69.799)	411	(70.211)
5	INDUSTRI FARMASI												
	1 PT Biofarma	2	S	615.660	481.788	133.872	15.354	21.135	128.091	-	128.091	41.451	86.640
	2 PT Indo Farma, Tbk	5	KS	821.725	798.713	23.012	-	19.602	3.409	-	3.409	6.971	(3.562)
	3 PT Kimia Farma, Tbk	2	S	2.188.785	2.131.112	57.673	9.792	(10.691)	56.775	-	56.775	20.352	36.423
	Total		-	3.626.170	3.411.613	214.557	25.146	30.046	188.275	-	188.275	68.774	119.501
6	INDUSTRI SANDANG												
	1 PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	2	KS	168.270	197.269	(28.999)	14.007	24.813	(39.805)	-	(39.805)	(5.577)	(34.228)
	2 PT Primissima	5	KS	99.222	100.330	(1.109)	593	1.197	(1.713)	-	(1.713)	-	(1.713)
	Total		-	267.492	297.599	(30.107)	14.599	26.010	(41.518)	-	(41.518)	(5.577)	(35.941)
7	JASA KONSTRUKSI												
	1 Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM	2	KS	271.257	296.319	(25.062)	76.953	24.307	27.584	-	27.584	7.971	19.613
	2 PT Adhi Karya	2	S	4.363.058	4.106.697	256.361	35.571	161.315	130.617	-	130.617	38.909	91.708
	3 PT Brantas Abipraya	2	KS	307.723	305.738	1.984	2.521	1.832	2.674	-	2.674	-	2.674
	4 PT Hutama Karya (HK)	2	S	1.784.513	1.737.755	46.758	32.800	39.280	40.278	-	40.278	12.066	28.212
	5 PT Istaka Karya	2	KS	255.940	356.638	(100.698)	2.639	24.492	(122.551)	-	(122.551)	-	(122.551)
	6 PT Nindya Karya	2	S	861.280	808.759	52.521	2.910	47.885	7.546	-	7.546	2.246	5.300
	7 PT Pembangunan Perumahan (PP)	2	S	2.480.354	2.370.085	110.269	13.590	15.191	109.068	-	109.068	32.310	76.758

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
	8 PT Waskita Karya	2	S	2.776.431	2.637.957	138.474	4.638	62.554	80.559	-	80.559	26.506	54.053
	9 PT Wijaya Karya (WIKA)	2	S	3.065.388	2.902.628	162.760	107.938	98.124	172.574	-	172.574	21.133	151.441
	Total		-	**16.165.943**	**15.522.576**	**643.367**	**279.961**	**474.979**	**448.349**	**-**	**448.349**	**141.141**	**307.208**
8	**KAWASAN INDUSTRI**												
	1 PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	2	S	160.765	129.537	31.228	14.001	9.628	35.601	-	35.601	11.692	23.909
	2 PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	2	KS	28.581	10.107	18.474	586	8.736	10.324	-	10.324	3.062	7.262
	3 PT Kawasan Industri Medan (KIM)	2	S	52.604	46.744	5.860	926	229	6.557	-	6.557	1.950	4.608
	4 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	2	KS	4.703	4.272	431	559	35	954	-	954	-	954
	5 PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Bat	5	KS	28.834	28.394	440	2.002	-	2.442	-	2.442	715	1.727
	Total		-	**275.487**	**219.054**	**56.433**	**18.074**	**18.628**	**55.879**	**-**	**55.879**	**17.419**	**38.460**
9	**KONSULTAN KONSTRUKSI**												
	1 PT Bina Karya	5	S	36.752	33.755	2.997	55	1.967	1.086	-	1.086	519	566
	2 PT Indah Karya	2	S	4.329	5.456	(1.127)	327	324	(1.124)	(799)	(1.923)	-	(1.923)
	3 PT Indra Karya	5	KS	49.169	46.648	2.521	294	2.525	289	0	289	43	246
	4 PT Virama Karya	5	S	59.946	56.484	3.462	1.950	2.200	3.212	-	3.212	281	2.931
	5 PT Yodya Karya	2	S	52.831	48.218	4.613	64	2.302	2.376	-	2.376	1.065	1.311
	Total		-	**203.027**	**190.561**	**12.466**	**2.691**	**9.319**	**5.838**	**(799)**	**5.039**	**1.909**	**3.131**
10	**ANGKUTAN DARAT**												
	1 Perum DAMRI	2	S	380.581	394.413	(13.831)	6.562	1.029	(8.298)	-	(8.298)	-	(8.298)
	2 Perum PPD	2	TS	88.885	150.054	(61.169)	4.958	13.930	(70.141)	62.722	(7.419)	(4.758)	(12.177)
	3 PT Kereta Api Indonesia (KAI)	2	S	3.311.657	3.448.191	(136.534)	144.590	-	8.056	392	7.663	-	8.448
	Total			**3.781.123**	**3.992.657**	**(211.535)**	**156.110**	**14.959**	**(70.384)**	**63.114**	**(8.054)**	**(4.758)**	**(12.027)**
11	**JASA PENILAI**												
	1 PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	2	S	135.656	114.558	21.098	982	1.689	20.391	-	20.391	6.088	14.303
	2 PT Sucofindo	2	S	829.223	758.273	70.950	12.931	49.932	33.948	-	33.948	14.659	19.289
	3 PT Surveyor Indonesia (SI)	2	S	307.919	288.573	19.346	14.840	9.056	25.130	-	25.130	-	25.130
	Total		-	1.272.798	1.161.405	111.393	28.753	60.678	79.469	-	79.469	20.747	58.722

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
12	**KEBANDARUDARAAN**												
	1 PT Angkasa Pura I (AP I)	2	S	1.312.100	1.074.754	237.346	231.979	145.251	324.074	-	324.074	41.665	282.408
	2 PT Angkasa Pura II (AP II)	2	S	1.871.862	1.276.738	595.124	147.940	97.151	645.913	(161.454)	1.291.826	214.576	269.883
	Total		-	**3.183.962**	**2.351.492**	**832.470**	**379.919**	**242.402**	**969.987**	**(161.454)**	**1.615.900**	**256.241**	**552.291**
13	**PARIWISATA**												
	1 PT Bali Tourism & Development Corporation	2	S	47.591	33.628	13.963	12.355	3.018	23.300	733	22.567	-	24.033
	2 PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	2	KS	179.176	188.750	(9.574)	9.169	30.193	(30.598)	-	(30.598)	-	(30.598)
	3 PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	2	S	28.059	32.419	(4.360)	1.143	1.192	(4.409)	-	(4.409)	-	(4.409)
	Total		-	**254.826**	**254.797**	**29**	**22.667**	**34.403**	**(11.707)**	**733**	**(12.440)**	**-**	**(10.974)**
14	**PELABUHAN**												
	1 PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	2	S	590.228	433.323	156.905	38.356	10.650	184.611	-	184.611	-	184.611
	2 PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	2	S	1.752.174	1.182.971	569.203	393.181	221.075	741.309	-	741.309	153.033	580.742
	3 PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	2	S	1.776.845	1.126.161	650.684	47.767	244.966	453.485	(9.597)	443.888	192.372	251.516
	4 PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	2	S	421.465	285.883	135.582	11.305	23.663	123.224	-	123.224	37.991	85.233
	Total		-	**4.540.712**	**3.028.337**	**1.512.374**	**490.610**	**500.355**	**1.502.629**	**(9.597)**	**1.493.032**	**383.396**	**1.102.102**
15	**PELAYARAN**												
	1 PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (A	2	S	537.751	510.853	26.898	5.800	7.067	25.632	-	25.632	6.433	19.199
	2 PT Djakarta Lloyd	5	S	427.135	398.393	28.742	27.130	24.420	31.452	-	31.452	4.724	26.728
	3 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	2	S	87.590	89.031	(1.441)	5.430	2.536	1.453	-	1.453	1.313	141
	4 PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	5	KS	1.910.082	2.064.508	(154.426)	39.989	39.772	(154.210)	-	(154.210)	3.769	(157.979)
	Total		-	**2.962.558**	**3.062.785**	**(100.227)**	**78.349**	**73.795**	**(95.673)**	**-**	**(95.673)**	**16.239**	**(111.911)**
16	**PENGERUKAN**												
	1 PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	2	KS	96.674	126.641	(29.968)	10.379	29.152	(48.741)	-	(48.741)	5.049	(53.790)
	Total		-	**96.674**	**126.641**	**(29.968)**	**10.379**	**29.152**	**(48.741)**	**-**	**(48.741)**	**5.049**	**(53.790)**
17	**PENUNJANG KONSTRUKSI**												
	1 PT Amarta Karya	2	KS	65.645	74.468	(8.823)	455	2.967	(11.335)	-	(11.335)	(3.399)	(7.936)
	2 PT Jasa Marga	2	S	2.304.891	1.480.010	824.880	414.102	727.426	511.557	-	511.557	51.757	459.799

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
	Total		-	**2.370.536**	**1.554.478**	**816.057**	**414.558**	**730.393**	**500.222**	-	**500.222**	**48.358**	**451.864**
18	**PERDAGANGAN**												
	1 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	2	TS	782.401	775.080	7.321	22.780	27.589	2.511	-	2.511	-	2.511
	2 PT PP Berdikari	2	KS	359.288	360.497	(1.209)	22.057	25.078	(4.230)	-	(4.230)	1.983	(6.212)
	3 PT Sarinah	2	S	192.709	189.066	3.643	4.726	1.035	7.334	-	7.334	2.165	5.166
	Total		-	**1.334.397**	**1.324.643**	**9.754**	**49.563**	**53.702**	**5.616**	-	**5.616**	**4.148**	**1.465**
19	**USAHA PENERBANGAN**												
	1 PT Garuda Indonesia (GIA)	2	KS	12.292.741	12.654.847	(362.106)	424.215	174.597	(112.488)	-	(112.488)	78.049	(191.865)
	2 PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	2	KS	1.303.278	1.501.913	(198.635)	220.545	204.136	(182.226)	-	(182.226)	-	(182.226)
	Total		-	**13.596.019**	**14.156.760**	**(560.741)**	**644.760**	**378.733**	**(294.714)**	-	**(294.714)**	**78.049**	**(374.091)**
20	**JASA LAINNYA**												
	1 Perum Jasa Tirta I	2	S	90.226	81.566	8.660	7.564	6.691	9.533	-	9.533	2.765	6.769
	2 Perum Jasa Tirta II	2	S	196.975	142.838	54.137	22.423	35.797	40.763	-	40.763	14.828	25.934
	3 PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	2	S	346.877	155.062	191.815	66.375	408	257.782	-	257.782	57.735	200.047
	Total		-	**634.078**	**379.466**	**254.612**	**96.361**	**42.895**	**308.078**	-	**308.078**	**75.328**	**232.750**
21	**KEHUTANAN**												
	1 Perum Perhutani	2	S	751.505	683.884	67.621	82.986	37.945	112.662	-	112.662	31.903	80.759
	2 PT Inhutani I	5	KS	78.202	95.436	(17.234)	26.530	15.056	(5.761)	(3.930)	(9.691)	-	(9.690)
	3 PT Inhutani II	5	KS	62.362	65.113	(2.751)	4.904	2.587	(434)	-	(434)		(434)
	4 PT Inhutani III	5	KS	14.958	17.783	(2.825)	4.600	713	1.062	-	1.062	(126)	1.188
	5 PT Inhutani IV	5	KS	22.439	26.280	(3.841)	1.084	198	(2.955)	-	(2.955)	(205)	(2.750)
	6 PT Inhutani V	5	TS	-	6.909	(6.909)	3.605	-	(3.304)	-	(3.304)	8.129	(11.432)
	Total		-	**929.466**	**895.406**	**34.060**	**123.709**	**56.499**	**101.270**	**(3.930)**	**97.340**	**39.701**	**57.640**
22	**KERTAS**												
	1 PT Kertas Leces	2	TS	318.376	416.586	(98.210)	2.695	42.756	(138.271)	-	(138.271)	-	(138.271)
	Total		-	318.376	416.586	(98.210)	2.695	42.756	(138.271)	-	(138.271)	-	(138.271)

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7= 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
23	**LOGISTIK**												
	1 Perum Bulog	5	(blank)	1.849.774	2.625.437	(775.664)	443.909	217.476	(549.230)	-	(549.230)	-	(549.230)
	2 PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	2	S	212.757	198.478	14.279	2.503	4.298	12.484	-	12.484	5.132	7.352
	3 PT Pos Indonesia (POSINDO)	2	KS	1.524.246	1.496.486	27.760	143.473	169.000	2.233	-	2.233	-	2.233
	4 PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	2	KS	83.874	85.615	3.259	138	3.426	(29)	-	(29)	(306)	277
	Total		-	3.675.651	4.406.017	(730.366)	590.024	394.201	(534.542)	-	(534.542)	4.826	(539.369)
24	**PERCETAKAN & PENERBITAN**												
	1 Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	5	S	42.795	48.658	(5.863)	7.949	-	2.086	-	2.086	-	2.086
	2 Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	2	S	1.320.844	1.111.274	209.570	55.414	78.370	186.614	-	186.614	37.712	148.902
	3 PT Balai Pustaka (BP)	2	TS	19.264	35.297	(16.033)	1.155	20.183	(35.060)	-	(35.060)	360	(35.421)
	4 PT Pradnya Paramita	2	KS	1.156	1.453	(298)	322	-	24	-	24	-	24
	Total		-	1.384.059	1.196.683	187.376	64.841	98.553	153.664	-	153.664	38.072	115.592
25	**PERIKANAN**												
	1 Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	2	S	97.969	86.521	11.448	31	11.211	268	-	268	-	268
	2 PT Perikanan Nusantara	5		25085	41.032	-15947	1812	2.901	(17.036)	-	(17.036)	0	-17036
	Total		-	123.054	127.553	(4.499)	1.843	14.112	(16.768)	-	(16.768)	-	(16.768)
26	**PERKEBUNAN**												
	1 PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	2	KS	275.420	326.709	(51.289)	10.442	13.750	(54.597)	-	(54.597)	-	(54.597)
	2 PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	2	KS	969.673	927.420	42.253	14.623	83.093	(26.217)	-	(26.217)	21.431	(47.648)
	3 PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	1	S	2.656.668	2.195.357	461.311	76.008	113.401	423.918	-	423.918	130.065	293.853
	4 PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	2	S	657.363	433.524	223.839	67.684	77.866	213.657	-	213.657	68.370	145.287
	5 PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	5	S	1.109.865	887.046	222.819	-	105.430	117.389	-	117.388	16.005	101.383
	6 PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	2	S	411.086	272.710	138.376	26.313	28.056	136.633	-	136.633	45.011	91.622
	7 PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	2	S	846.041	793.011	53.030	7.609	41.907	18.732	-	18.732	6.626	12.107
	8 PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	2	S	2.349.707	1.999.434	350.273	26.515	126.128	250.660	-	250.660	75.418	175.242
	9 PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	2	S	1.157.082	936.186	220.896	22.135	138.372	104.659	-	104.659	31.124	73.535
	10 PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	2	S	1.433.230	1.182.241	250.989	71.190	65.782	256.397	-	256.397	-	256.397

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
11	PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	2	S	1.761.899	1.555.075	206.824	26.905	50.649	183.079	-	183.079	54.906	128.173
12	PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	2	S	514.397	418.404	95.993	75.564	97.239	74.318	-	74.318	22.553	51.765
13	PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	2	S	1.394.180	1.282.748	111.432	24.239	65.651	70.020	-	70.020	25.839	44.181
14	PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	5	KS	294.386	298.574	(4.188)	-	7.377	(11.565)	-	(11.565)	-	(11.565)
15	PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	2	S	2.756.107	2.550.741	205.366	44.223	152.012	97.577	-	97.577	9.410	78.140
	Total			**18.587.104**	**16.059.179**	**2.527.924**	**493.449**	**1.166.713**	**1.854.661**	**-**	**1.854.660**	**506.759**	**1.337.874**
27	PERTANIAN												
1	PT Pertani	2	KS	800.637	798.046	2.591	12.921	10.469	5.043	-	5.043	-	5.043
2	PT Sang Hyang Seri (SHS)	2	S	479.514	469.669	9.846	15.890	15.950	9.785	-	9.785	3.151	6.635
	Total			**1.280.152**	**1.267.715**	**12.437**	**28.810**	**26.419**	**14.828**	**-**	**14.828**	**3.151**	**11.678**
28	PUPUK												
1	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	2	S	16.270.104	15.363.473	906.631	1.373.634	883.029	1.397.236	(69.394)	1.327.842	404.045	923.797
	Total		-	**16.270.104**	**15.363.473**	**906.631**	**1.373.634**	**883.029**	**1.397.236**	**(69.394)**	**1.327.842**	**404.045**	**923.797**
29	BAJA & KONSTRUKSI BAJA												
1	PT Barata Indonesia	2	KS	186.257	179.972	6.285	4.225	14.422	(3.912)	-	(3.912)	83	(3.995)
2	PT Boma Bisma Indra (BBI)	3	TS	24.901	32.279	(7.378)	1.099	2.575	(8.854)	-	(8.854)	-	(8.854)
3	PT Krakatau Steel (KS)	2	KS	12.141.404	12.329.956	(188.552)	449.703	304.162	(43.011)	-	(43.011)	50.073	(93.084)
	Total		-	**12.352.562**	**12.542.207**	**(189.645)**	**455.027**	**321.159**	**(55.777)**	**-**	**(55.777)**	**50.156**	**(105.933)**
30	DOK DAN PERKAPALAN												
1	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	2	KS	263.364	273.639	(10.275)	33.309	62.379	(39.345)	-	(39.345)	-	(39.345)
2	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	2	KS	211.459	195.406	16.053	-	6.179	9.874	-	9.874	2.945	6.930
3	PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	5	KS	28.847	29.555	(708)	938	5.565	(5.335)	-	(5.335)	-	(5.335)
4	PT PAL Indonesia	2	KS	976.140	1.033.172	(57.032)	187.823	122.187	8.605	-	8.605	1.806	6.798
	Total		-	**1.479.810**	**1.531.772**	**(51.962)**	**222.070**	**196.310**	**(26.201)**	**-**	**(26.201)**	**4.751**	**(30.952)**
31	ENERGI												
1	PT Konversi Energi Abadi (KONEBA)	2	S	28.826	26.998	1.828	-	84	1.744	-	1.744	506	1.238
2	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	4	S	4.975.477	2.911.149	2.064.328	285.974	186.162	2.164.140	-	2.164.140	553.950	1.565.369

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
	3 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	2	KS	106.732.608	105.016.097	1.716.510	4.351.015	4.349.894	1.717.631		1.717.631	3.239.011	(1.521.379)
	4 PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	3	S	1.458.402	1.269.982	188.420	52.255	35.211	205.464		205.464	50.063	155.165
	Total		-	113.195.312	109.224.227	3.971.086	4.689.244	4.571.351	4.088.978	-	4.088.978	3.843.529	200.392
32	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI												
	1 PT Batan Teknologi	2	KS	23.550	22.776	774	448	363	859		859	240	619
	2 PT Industri Kereta Api (INKA)	2	KS	202.623	187.502	15.121	1.926	16.771	276		276	-	276
	3 PT Industri Telekmunikasi Indonesia (INTI)	2	S	629.548	620.622	8.926	23.575	14.812	17.689		17.689	5.115	12.525
	4 PT LEN Industri	2	S	294.217	275.075	19.141	1.005	9.949	10.197		10.197	3.970	5.935
	5 PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2	-	848.236	797.454	50.782	142.493	124.319	68.956		68.956	5.015	63.942
	Total		-	1.998.173	1.903.430	94.743	169.448	166.213	97.979	-	97.979	14.340	83.297
33	INDUSTRI PERTAHANAN												
	1 PT Dahana	2	S	325.929	308.214	17.715	5.310	4.580	18.445		18.445	7.214	11.231
	2 PT PINDAD	2	S	370.180	354.934	15.246	13.780	8.013	21.013		21.013	6.764	14.249
	Total		-	696.109	663.148	32.961	19.090	12.593	39.458	-	39.458	13.978	25.480
34	PERTAMBANGAN												
	1 PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	4	S	3.401.256	2.084.313	1.316.943	19.544	176.613	1.159.873		1.159.873	351.034	808.840
	2 PT Pertamina	5	S	354.243.400	326.273.361	27.970.039	12.386.796	7.217.258	33.139.577		33.139.577	11.852.877	21.286.700
	3 PT Sarana Karya	6	TS	32.350	25.437	6.913	1.555	818	7.651		7.651	2.308	5.343
	4 PT Timah, Tbk	2	S	4.363.359	3.996.166	367.193	31.034	55.725	342.502		342.502	145.344	197.130
	Total		-	362.040.365	332.379.276	29.661.088	12.438.929	7.450.414	34.649.603	-	34.649.603	12.351.563	22.298.013
35	SEMEN												
	1 PT Semen Baturaja	2	S	525.288	453.556	71.733	7.014	49.428	29.319		29.319	11.498	17.821
	2 PT Semen Gresik, Tbk	2	S	8.929.625	7.062.486	1.867.139	142.556	80.260	1.929.435		1.929.435	551.311	1.378.124
	Total		-	9.454.913	7.516.042	1.938.872	149.570	129.688	1.958.754	-	1.958.754	562.809	1.395.945
36	TELEKOMUNIKASI												
	1 Perum Produksi Film Negara (PFN)	5	KS	1.061	7.967	(6.906)	4.065	0	(2.840)		(2.840)	-	(2.840)
	2 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	4	S	37.199.944	20.017.060	17.182.884	1.244.014	862.222	17.564.676		17.564.676	5.387.012	9.222.471

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	BEBAN USAHA	PENDAPATAN KOTOR	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	LABA RUGI SEBELUM PKLB	PKLB c)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10=7+8-9	11	12=10 - 11	13	14=12-13
	3 PT Sarana Multigriya Financial	2	-	103.016	19.403	83.613	-	-	83.613		83.613	-	83.613
	Total			37.304.021	20.044.430	17.259.591	1.248.079	862.222	17.645.449	-	17.645.449	5.387.012	9.303.244
	Grand Total			729.877.080	632.881.961	78.839.451	26.189.410	25.079.226	79.928.252	(181.756)	80.551.612	28.108.826	48.111.997

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat

c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

BUMN yang laporannya tidak tersedia : 1). Survey Udara Penas ; 2). Kertas Kraft Aceh

160.747	1.176.085
4.235	56.711
164.982	13.212
	1.246.008

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (NON BUMN-MINORITAS)
A. AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Perusahaan	Sumber (a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya*	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS*	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Negara	Kepemilikan Negara
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11) =(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PT Atmindo	1	S	41.417	8.203	-	49.619	24.318	8.980	33.298	2.324	-	-	14.292	-	16.321	36,60%	5.974
2	PT Semen Kupang	7	-	29.568	9.171	614.249	652.988	110.198	484.727	594.925	125.000	-	-	35.982	(30.955)	58.064	38,50%	22.354
3	PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)	4	S	476.660.670	758.680.272	-	1.235.340.942	221.444.555	649.705.480	871.150.035	920.476.000	449.388.251	-	(1.005.673.344)	-	3.285.002	41,12%	1.350.793
4	PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)	1	S	595.272	249.928	62.025	907.225	34.080	21.129	55.209	400.000	-	-	354.153	97.863	852.016	45,00%	383.407
5	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2	-	121.383	39.977	6.035	167.394	30.328	11.191	41.519	30.000	438	-	95.990	-	126.417	50,00%	63.209
6	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	1	S	49.223	91.000	4.032	144.255	31.669	-	31.669	50.000	-	-	94.255	-	112.587	50,00%	56.293
7	PT Kertas Padalarang	1	KS	25.110	21.173	-	46.283	28.122	322	28.444	125.000	63.673	-	(43.489)	-	17.838	40,77%	7.273
8	PT Bank Bukopin	2	S	30.910.174	268.882	377.087	31.556.143	1.589.403	28.293.940	29.883.343	773.756	184.694	-	5.892	703.661	1.668.004	18,47%	150.786
9	PT Rekayasa Industri (REKIND)	1	S	679.090	174.983	57.431	911.505	444.213	19.876	464.089	50.300	-	-	-	390.667	440.967	4,97%	2.500
10	PT Freeport Indonesia	2	S	13.294.659	26.549.107	332.685	40.176.451	7.605.078	9.770.239	17.375.316	205.196	-	-	2.226.641	20.369.298	22.801.135	9,36%	19.213
11	PT Bahana PUI (BPUI)	1	S	1.422.942	320.138	67.530	1.810.610	2.109.735	564.561	2.674.296	22.500	-	-	5.215	(891.401)	(863.686)	17,78%	4.000
12	PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT Indosat, Tbk	7	-	7.526.992	25.260.141	-	32.787.133	5.431.380	12.864.736	18.296.116	535.617	-	-	13.779.711	-	14.315.328	14,50%	776.625
14	PT Kertas Basuki Rahmat	1	-	6.292	1.035.489	-	1.041.781	79.212	509.776	588.987	227.925	440.700	-	1.534.252	(1.747.083)	452.794	10,00%	25.000
15	PT Kertas Blabak	1	-	9.619	155.289	187	165.095	38.171	106.527	144.698	63.531	-	-	107.832	(137.726)	20.399	0,84%	531
16	PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT Asean Copper Product	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT JIHD	1	-	4.703.994	-	102.885	4.806.879	2.509.131	25.000	2.534.131	965.020	1.219.437		297.620		1.358.217	1,33%	12.835
19	PT Intirub	7	-	46.352	18.177	127	64.656	55.927	14.820	70.746	41.711	-	-	(47.801)	-	(6.090)	9,90%	4.129
20	PT Socfindo	1	S	301.392	718.370	-	1.019.762	240.703	200.069	440.771	42.250	3.671	-	38.979	494.090	578.990	10,00%	4.225
21	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)	7		108.982	168.526	1.676	279.184	36.670	18.904	55.573	49.578	-	(23.787)		15.655	41.446	5,00%	2.479
	TOTAL			**536.533.132**	**773.995.016**	**1.625.950**	**1.295.096.656**	**241.842.890**	**702.620.275**	**944.463.166**	**924.185.708**	**454.698.805**	**(23.787)**	**(987.173.819)**	**19.264.069**	**45.275.748**		**2.891.625**

Keterangan:
(a) 1) Telah diaudit (*audited*), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*) 3) Lap. Semester 4) Lap. Triwulan 5) Prognosa, 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2005
(b) SS = Sangat Sehat, S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat
(c) BPYBDS = Bagian Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya

*) Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Men

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (NON BUMN-MINORITAS)
B. PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Perusahaan	Sumber (a)	Status b)	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Pendapatan Kotor	Pendapatan Lain-lain	Beban Lain-lain	Laba Rugi Sebelum PKLB	PKLB c)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) bersih
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)-(9)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)=(12)-(13)
1	PT Atmindo	1	S	8.775	5.452	3.323	(2.574)	-	748	-	748	(1.043)	(295)
2	PT Semen Kupang	7	-	2.892	7.865	(4.973)	945	9	(4.037)	-	(4.037)		(4.037)
3	PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)	4	S	1.712.905	193.713	1.519.193	397.866	497.843	1.419.215	-	1.419.215	-	1.419.215
4	PT Bank Bukopin	2	S	3.284.721	2.847.656	437.065	755.088	730.069	462.084	-	462.084	138.608	323.476
5	PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)	1	S	171.868	76.887	94.981	2.630	10.082	87.529	-	87.529	219	87.310
6	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2	-	85.640	42.008	43.632	9.905	1.877	51.659	-	51.659	11.447	40.213
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	1	S	49.498	13.439	36.059	5.088	15.754	25.393	-	25.393	6.498	18.894
8	PT Kertas Padalarang	1	KS	66.643	71.815	(5.172)	2.222	2.302	(5.252)	-	(5.252)	863	(6.115)
9	PT Rekayasa Industri (REKIND)	1	S	1.026.039	1.014.699	11.340	52.259	29.646	33.952	-	33.952	3.313	30.640
10	PT Freeport Indonesia	2	S	39.640.952	14.958.804	24.682.148	154.873	121.454	24.715.567	-	24.715.567	8.595.239	16.120.328
11	PT Bahana PUI (BPUI)	1	S	436.153	423.866	12.287	69.032	9.161	72.158	-	72.158	26.695	45.463
12	PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT Indosat, Tbk	7	-	11.589.791	7.937.874	3.651.917	316.049	1.615.257	2.352.709	-	2.352.709	697.924	1.654.785
14	PT Kertas Basuki Rahmat	1	-	20.387	47.363	(26.976)	321	2.450	(29.105)	137.726	(166.831)	-	(166.831)
15	PT Kertas Blabak	7	-	(10.188)	5.954	(16.142)	382	107	(15.866)	-	(15.866)		(15.866)
16	PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT Asean Copper Product	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT JIHD	1	-	139.073	207.979	(68.906)	25.251	114.000	(157.655)		(157.655)	4.543	(162.197)
19	PT Intirub	7	-	6.266	14.055	(7.789)	600	(4.650)	(13.039)	-	(13.039)	(846)	(12.194)
20	PT Socfindo	1	S	1.257.675	595.311	662.364	29.105	159.708	531.761	-	531.761	160.051	371.711

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (NON BUMN-MINORITAS)
B. PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Perusahaan	Sumber (a)	Status b)	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Pendapatan Kotor	Pendapatan Lain-lain	Beban Lain-lain	Laba Rugi Sebelum PKLB	PKLB c)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) bersih
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)-(9)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)=(12)-(13)
21	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)	7	-	68.035	19.116	48.919	1.588	13.260	37.247	293	37.540	12.740	24.800
TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI				**59.557.126**	**28.483.856**	**31.073.269**	**1.820.629**	**3.318.329**	**29.565.069**	**138.019**	**29.427.636**	**9.656.250**	**19.769.299**

Keterangan:
(a) 1) Telah diaudit (*audited*) 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2005
(b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat
(c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

*). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN sebagai pemegang 92.9% Saham PT Dirgantara Indonesia (Persero)

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	BADAN HUKUM MILIK NEGARA	Sumber a)	Aktiva Lancar	Aktiva Lancar Lainnya	Aktiva Tetap	Aktiva Lain-lain	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas Dana Lancar Tidak Terikat	Ekuitas Dana Lancar Terikat Temporer	Ekuitas Dana Lancar Terikat Permanen			Total Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Tidak Lancar	Total Ekuitas
													PMP*	Lain-lain	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8 =4+5+6+7	9	10	11 =9+10	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Universitas Indonesia	2	427.317	16.647	281.987	27.910	753.861	27.241	3.392	30.633	-	-	-	-	-	-	-	723.228
2	Universitas Gadjah Mada	2	348.081	16.951	3.204.683	42.729	3.612.444	135.402	27.329	162.731	373.081	3.060.210	-	-	-	3.433.292	16.421	3.449.713
3	Institut Teknologi Bandung	1	263.438	10.229	3.353.895	1.788	3.629.349	125.894	756	126.650	111.618	29.964	3.361.118	-	3.361.118	3.502.700	-	3.502.700
4	Institut Pertanian Bogor	1	18.633	1.923	69.342	628.360	718.258	18.200	33.939	52.139	35.836	-	628.360	1.923	630.283	666.119	-	666.119
5	Universitas Sumatra Utara	2	64.135	-	1.731.086		1.795.221	-	-	-	-	-	-	-	-	10.584	1.784.636	1.795.221
6	Universitas Pendidikan Indonesia	2	44.160	15.491	261.117		320.768	599	137	736	218.811	1.004	-	-	100.218	320.033	-	320.033
7	Universitas Airlangga	2	50.501	-	435.365	-	485.866	-	-	-	-	-	-	-	-	485.866	-	485.866
8	Badan Pengelola Minyak dan Gas	2	110.203	-	24.277	-	134.480	-	-	-	-	-	-	-	-	134.480	-	134.480
TOTAL			**1.326.468**	**61.242**	**9.361.751**	**700.786**	**11.450.247**	**307.335**	**65.552**	**372.887**	**739.347**	**3.091.178**	**3.989.477**	**1.923**	**4.091.618**	**8.553.073**	**1.801.058**	**11.077.360**

Keterangan:
1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran BHMN ; 7). Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited)
* Penyertaan Modal Pemerintah

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	BADAN HUKUM MILIK NEGARA	Sumber a)	Pendapatan Operasional	Beban Operasional	Surplus(Defisit) dari Operasional	Pendapatan Non Operasional	Beban Non Operasional	Surplus(Defisit) Sebelum PKLB	Selisih Kurs	PKLB b)	Surplus(Defisit) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Surplus(Defisit) bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)-(8)	(10)	(11)	(12)=(9)-(10)-(11)	(12)	(13)=(11)-(12)
1	Universitas Indonesia	2	748.146	664.914	83.232	-	-	83.232	3.908	-	79.324	-	79.324
2	Universitas Gadjah Mada	2	856.373	741.487	114.886	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Institut Teknologi Bandung	2	58.759	6.233	52.526	-	-	52.526	-	-	52.526	-	52.526
4	Institut Pertanian Bogor	2	244.718	236.883	7.834	-	-	7.834	-	-	7.834	-	7.834
5	Universitas Sumatra Utara	2	288.461	224.556	63.905	-	-	63.905	-	-	63.905	-	63.905
6	Universitas Pendidikan Indonesia	2	300.146	125.130	175.016	-	-	175.016	-	-	175.016	-	175.016
7	Universitas Airlangga	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas	2	393.229	276.280	116.949	-	-	116.949	-	-	116.949	-	116.949
TOTAL			**2.889.831**	**2.275.483**	**614.348**	**-**	**-**	**499.462**		**-**	**495.554**	**-**	**495.554**

Keterangan:

1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa. 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggan BHMN ; 7). Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited)
PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Badan Lainnya	Sumber a)	Aktiva Lancar	Aktiva Tetap	Aktiva Lain-lain	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal	Surplus/ (Defisit) Tahun Lalu	Surplus/ (Defisit) Tahun Berjalan	Total Ekuitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10) =(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	1	7.182.769	5.196	9.213	7.197.178	1.623.333	-	1.623.333	5.573.845	-	-	5.573.845
2	Bapertarum	2	3.596.623	81.796	1.542	3.679.961	3.674.780	-	3.674.780	5.183	-	-	5.183
3	Badan Pengelola Gelora Bung Karno	2	70.222	13.782.012	479	13.852.713	3.761	-	3.761	13.678.220	(30.606)	13.667	13.661.281
4	Badan Pengelola Komplek Kemayoran	2	1.678.648	271.634	35.363	1.985.645	53.415	-	53.415	446.611	1.231.615	254.003	1.932.229
5	Badan Pengelola Otorita Batam	2	121.044	3.263.498	3.486	3.388.028	31.134	4.352	35.486	3.352.543	-	-	3.352.543
6	Badan Pengelola Otorita Asahan	2	-	449	-	449	-	-	-	-	-	-	449
7	Badan Pengelola Dana Abadi Umat*	2	1.343.133	-	-	1.343.133	27.403	-	27.403	1.315.728	-	-	1.315.728
8	Badan Amil Zakat Nasional	2	17.484	-	-	17.484	130	-	-	17.354	-	-	17.354
9	BP3 Taman Mini Indonesia	1	17.100	10.174	1.215	28.489		-	1.153	27.336	-	-	27.336
10	Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti	1	27.266	9.564	69	36.899	12.297	-	12.297	24.602	-	-	24.602
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	2	116	88.226	189.557	277.900	-	-	-	-	-	-	277.900
12	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	2	304	84.492	-	84.796	304	-	-	-	-	-	84.796
13	Lembaga Penyiaran Publik RRI	2	-	2.156.269	-	2.156.269	-	-	-	-	-	-	2.156.269
14	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	2	216.269	235.008	113	451.390	488.146	732	488.877	250.000	(231.475)	(56.012)	(37.487)
TOTAL			14.054.405	17.512.550	240.925	31.807.880	5.426.253	4.352	5.431.628	24.441.422	1.201.009	267.670	25.910.101

Keterangan:
a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa.
* Per 31 Maret 2006

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Badan Lainnya	Sumber a)	Pendapatan Aktivitas Operasional	Beban Aktivitas Operasional	Surplus (Defisit) Aktivitas Operasional	Pendapatan Aktivitas Non Operasional	Beban Aktivitas Non Operasional	Surplus (Defisit) Sebelum PKLB	PKLB b)	Surplus (Defisit) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Surplus (Defisit) Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)-(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	1	3.082.795	1.476.633	1.606.161	14.034	815	1.619.381		1.619.381	327.665	1.291.716
2	Bapertarum	2	361.678	8.986	352.692	1.063	1.358	352.397		352.397	-	352.397
3	Badan Pengelola Gelora Bung Karno	2	63.900	5.233	58.667			58.667		58.667	-	58.667
4	Badan Pengelola Komplek Kemayoran	2	283.276	71.463	211.813	42.189		254.002		254.002	-	254.002
5	Badan Pengelola Otorita Batam	2	422.009	329.006	93.003	7.185	4.130	96.058		96.058	-	96.058
6	Badan Pengelola Otorita Asahan	2	-	-	-	-	-	-		-	-	-
7	Badan Pengelola Dana Abadi Umat*	2			-	-	-	-		-	-	-
8	Badan Amil Zakat Nasional	2	20.067	20.119	(52)	-	-	(52)		(52)	-	(52)
9	BP3 Taman Mini Indonesia	1	38.800	37.964	836	-	-	836		836	-	836
10	Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti	1	42.325	37.921	4.404	2.976	1.101	6.279		6.279	3.379	2.900
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	2	-	-	-	-	-	-		-	-	-

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Badan Lainnya	Sumber a)	Pendapatan Aktivitas Operasional	Beban Aktivitas Operasional	Surplus (Defisit) Aktivitas Operasional	Pendapatan Aktivitas Non Operasional	Beban Aktivitas Non Operasional	Surplus (Defisit) Sebelum PKLB	PKLB b)	Surplus (Defisit) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Surplus (Defisit) Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)-(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)
12	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	2	-	-	-	-	-	-		-	-	-
13	Lembaga Penyiaran Publik RRI	2				-	-			-	-	
14	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			4.314.849	1.987.325	2.327.525	67.447	7.403	2.387.569	-	2.387.569	331.044	2.056.524

Keterangan:
a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa;
b) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa
* Per 31 Maret 2006

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
AKTIVA DAN KEWAJIBAN
UNAUDITED PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	BADAN LAYANAN UMUM	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tetap	Aktiva Tidak Berwujud	Aktiva Lain-lain	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Aktiva Bersih Tdk Terikat	Aktiva Bersih Terikat Temporer	Aktiva Bersih Terikat Permanen	Ekuitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) =(5)+(6)+(7)+(8)	(9)	(10)	(11) =(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)=(12)+(13)+(14)
1	**BIDANG RUMAH SAKIT**														
1	Rumah Sakit Persahabatan Jakarta	2		34.690	68.369	-	50	103.109	5.024	-	5.024	98.085	-	-	98.085
2	RSUP Fatmawati Jakarta	2		29.127	168.691	-	-	197.819	6.797	-	6.797	184.243	6.778	-	191.021
3	RS Dr. Cipto Mangunkusumo	2		146.871	157.872	-	98.184	402.927	13.844	1.241	15.086	387.841	-	-	387.841
4	RSUP Sanglah Denpasar	2		22.596	143.416	-	1.196	167.208	8.700	502	9.202	141.407	16.599	-	158.006
5	RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar	2		17.896	89.663	-	23.929	131.489	19.544	-	19.544	108.745	3.200	-	111.945
6	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	2		17.544	81.370	147	24.118	123.178	6.429	-	6.429	116.749	-	-	116.749
7	RS DR. M. Djamil Padang	2		32.926	102.203	-	1.794	136.923	3.244	-	3.244	114.237	-	19.442	133.679
8	RSU DR. sardjito Yogyakarta	2		59.985	298.662	134	77.692	436.473	16.495		16.495	419.968	-	-	419.968
9	RS Kanker Dharmais Jakarta	2		30.042	139.419	5.946	13.437	188.843	24.141	1.049	25.191	164.663	-	-	164.663
10	RS Dokter Kariadi Semarang	2		56.244	246.605	11.471	728	315.048	2.792	-	2.792	312.256	-	-	312.256
11	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	2		119.992	182.685	2.722	351	305.750	34.672	-	34.672	271.809	-	-	271.809
12	RS Anak dan Bunda Harapan Kita	2		31.888	123.861	-	-	155.750	10.310	-	10.310	145.440	-	-	145.440
13	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	2		58.133	328.143	1.612	-	387.888	5.798	-	5.798	382.090	-	-	382.090
	SUB TOTAL (1)			**657.934**	**2.130.961**	**22.032**	**241.477**	**3.052.404**	**157.793**	**2.793**	**160.586**	**2.847.531**	**26.577**	**19.442**	**2.893.551**

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
AKTIVA DAN KEWAJIBAN
UNAUDITED PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	BADAN LAYANAN UMUM	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tetap	Aktiva Tidak Berwujud	Aktiva Lain-lain	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Aktiva Bersih Tdk Terikat	Aktiva Bersih Terikat Temporer	Aktiva Bersih Terikat Permanen	Ekuitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) =(5)+(6)+(7)+(8)	(9)	(10)	(11) =(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)=(12)+(13)+(14)
2	**BIDANG PEMBIAYAAN**														
	1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Badan Investasi Pemerintah	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL (2)														
3	**BIDANG TELEKOMUNIKASI**														
	1 Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL (3)														
4	**BIDANG PENUNJANG KONSTRUKSI**														
	1 Badan Pengatur Jalan Tol	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL (4)														
	TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI			**657.934**	**2.130.961**	**22.032**	**241.477**	**3.052.404**	**157.793**	**2.793**	**160.586**	**2.847.531**	**26.577**	**19.442**	**2.893.551**

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggan BHMN ; 7). Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited);

b) S=Sehat; KS=Kurang Sehat; TS=Tidak Sehat

* Instansi yang telah berstatus PPK BLU tahun 2006 terdiri 13 Rumah Sakit berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2005. BLU selain Rumah Sakit belum menyampaikan laporan ke Departemen Keuangan karena baru ditetapkan akhir Desember 2006

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
UNAUDITED PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	BADAN LAYANAN UMUM	Sumber a)	Status b)	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat			Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit)	Pajak Penghasilan	Surplus (Defisit) Bersih
				Operasional	Non Operasional	APBN	Lainnya				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) =(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)
1	**BIDANG RUMAH SAKIT**											
1	Rumah Sakit Persahabatan Jakarta	2		83.596	926	54.821	-	139.343	121.978	17.365	-	17.365
2	RSUP Fatmawati Jakarta	2		104.248	1.986	47.783	131	154.148	147.370	6.778	-	6.778
3	RS Dr. Cipto Mangunkusumo	2		238.095	8.473	189.845	-	436.414	321.258	115.156	-	115.156
4	RSUP Sanglah Denpasar	2		119.514	1.729	59.172	15	180.429	163.830	16.599	-	16.599
5	RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar	2		96.517	350	62.480	-	159.347	125.975	33.372	-	33.372
6	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	2		84.653	960	57.054	10	142.677	126.825	15.852	-	15.852
7	RS DR. M. Djamil Padang	2		79.110	481	43.040	-	122.631	114.152	8.479	-	8.479
8	RSU DR. Sardjito Yogyakarta	2		129.632	953	77.799	-	208.384	193.736	14.648	-	14.648
9	RS Kanker Dharmais Jakarta	2		109.492	1.309	29.233	-	140.034	129.579	10.455	-	10.455
10	RS Dokter Kariadi Semarang	2		122.852	2.359	73.228	-	198.438	177.310	21.128	-	21.128
11	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	2		284.432	8.287	53.978	-	346.696	289.556	57.140	-	57.140
12	RS Anak dan Bunda Harapan Kita	2		112.890	2.549	49.147	-	164.587	145.940	18.647	-	18.647
13	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	2		148.761	2.129	76.504	-	227.395	215.364	12.030	-	12.030
	SUB TOTAL (1)			**1.713.793**	**32.490**	**459.983**	**155**	**2.620.523**	**2.272.873**	**347.650**	**-**	**347.650**

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
UNAUDITED PER 31 DESEMBER 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	BADAN LAYANAN UMUM	Sumber a)	Status b)	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit)	Pajak Penghasilan	Surplus (Defisit) Bersih
				Operasional	Non Operasional	APBN	Lainnya					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) =(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)
2	**BIDANG PEMBIAYAAN**											
	1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Badan Investasi Pemerintah	2		557.000	-	-	-	557.000	12.249	544.751	-	544.751
	SUB TOTAL (2)			557.000	-	-	-	557.000	12.249	544.751	-	544.751
3	**BIDANG TELEKOMUNIKASI**											
	1 Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL (3)											
4	**BIDANG PENUNJANG KONSTRUKSI**											
	1 Badan Pengatur Jalan Tol	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL (4)											
	TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI			**2.270.793**	**32.490**	**459.983**	**155**	**3.177.523**	**2.285.122**	**892.401**	**-**	**892.401**

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggan BHMN ; 7). LK tahun 2005 (Audited)

b) S=Sehat; KS=Kurang Sehat; TS=Tidak Sehat

* Instansi yang telah berstatus PPK BLU tahun 2006 terdiri 13 Rumah Sakit berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2005.
BLU selain Rumah Sakit belum menyampaikan laporan ke Departemen Keuangan karena baru ditetapkan akhir Desember 2006

www.peraturan.go.id

DATA ASET EKS ASING/CINA PER 31 DESEMBER 2006

No.	Provinsi	Jumlah	Jenis Penyelesaian					
			Sertifikat	Kompensasi	Ditukar	Hibah	Dikembalikan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = Jmlh 4 s.d 8*
1	Nangroe Aceh Darussalam	28	11	0	1	0	0	12
2	Sumatera Utara	184	5	33	3	0	4	45
3	Sumatera Barat	11	0	0	0	0	0	0
4	Riau	87	28	0	0	0	0	28
5	Jambi	23	17	2	0	0	1	20
6	Sumatera Selatan	47	2	4	0	0	0	6
7	Bandar Lampung	17	5	0	0	0	1	6
8	Bengkulu	5	5	0	0	0	0	5
9	Bangka Belitung	35	5	0	0	0	0	5
10	Banten	7	1	0	0	0	0	1
11	DKI Jakarta	75	21	15	4	1	2	43
12	Jawa Barat	148	17	27	3	0	5	52
13	Jawa Tengah	97	37	6	0	0	5	48
14	Yogyakarta	9	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	233	50	3	4	0	6	63
16	Kalimantan Barat	162	13	0	0	0	0	13
17	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Selatan	15	5	0	0	0	0	5
19	Kalimantan Timur	18	6	0	0	0	2	8
20	Bali	14	5	2	0	0	0	7

www.peraturan.go.id

DATA ASET EKS ASING/CINA PER 31 DESEMBER 2006

No.	Provinsi	Jumlah	Jenis Penyelesaian					
			Sertifikat	Kompensasi	Ditukar	Hibah	Dikembalikan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = Jmlh 4 s.d 8*
21	Nusa Tenggara Barat	16	11	0	0	0	0	11
22	Nusa Tenggara Timur	16	5	1	0	0	0	6
23	Sulawesi Selatan	53	0	6	5	0	1	12
24	Sulawesi Tengah	6	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tenggara	5	1	0	0	0	0	1
26	Sulawesi Utara	12	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	1	0	0	0	0	0	0
28	Maluku	15	1	0	0	0	0	1
29	Jayapura	6	4	0	1	0	0	5
	JUMLAH	1345	255	99	21	1	27	403

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.peraturan.go.id

DATA ASET EKS ASING/CINA PER 31 DESEMBER 2006

No.	Provinsi	Jumlah	Jenis Penyelesaian					
			Sertifikat	Kompensasi	Ditukar	Hibah	Dikembalikan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = Jmlh 4 s.d 8*
21	Nusa Tenggara Barat	16	11	0	0	0	0	11
22	Nusa Tenggara Timur	16	5	1	0	0	0	6
23	Sulawesi Selatan	53	0	6	5	0	1	12
24	Sulawesi Tengah	6	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Tenggara	5	1	0	0	0	0	1
26	Sulawesi Utara	12	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	1	0	0	0	0	0	0
28	Maluku	15	1	0	0	0	0	1
29	Jayapura	6	4	0	1	0	0	5
	JUMLAH	1345	255	99	21	1	27	403

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.peraturan.go.id